Kemenkes

PROFIL KESEHATAN INDONESIA

2023

PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2023

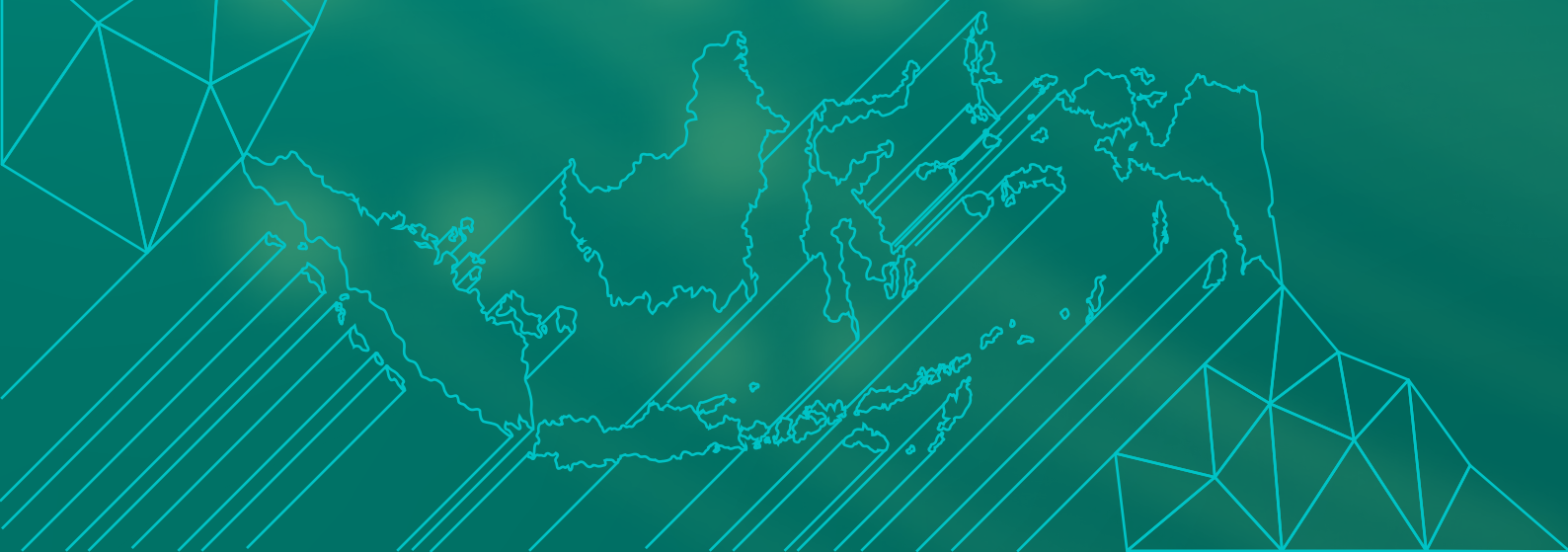

PROFIL KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2023

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

000.000
Ind
p

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Profil Kesehatan Indonesia 2023.
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2024

1. Judul I. HEALTH STATISTICS
II. HEALTH INFORMATION SYSTEMS

Buku ini diterbitkan oleh:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168
Fax no: 62-21-5277168
E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id
Website: http://www.kemkes/go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E, M.A, Ph.D
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua

Tiomaida Seviana H.H., S.H., M.A.P
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Editor

Farida Sibuea, SKM, MSc.PH; Boga Hardhana, S.Si, MM

Anggota

Evida Veronika Manullang, S.Si, MKM; Wardah, SKM, MKM; dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; dr. Ellysa, M.Epid; Dr. Zolaiha, SKM, MPHM; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Khairani SKM, MKM; Ratri Aprianda, SKM, MKM; Intan Suryantisa Indah, SKM, MKM; Sarinah Bintang, SKM, M.Epid; Eka Satriani Sakti, SKM, MKM; Annisa Harpini, SKM, MKM; Dewi Roro Kumbini, S.Pd, MKM; Athi Susilowati Rois, SKM, MKM; Titin Indriasari, S.Kom, MPH; Sri Hartatik, S.Si; Elsa Kathalea Putri, S.I.Kom; Anisah Mufidatush Shalihah, S.Stat; Ridwan Febryanto Syahputra, SKM.

Kontributor

Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Badan Pusat Statistik; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; Pusat Kesehatan Haji; Pusat Krisis Kesehatan; Setditjen. Kesehatan Masyarakat; Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia; Direktorat Kesehatan Jiwa; Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat; Setditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; Direktorat Pengelolaan Imunisasi; Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan; Direktorat Penyehatan Lingkungan; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan; Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; Setditjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Setditjen. Tenaga Kesehatan; Direktorat Perencanaan Kesehatan; Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan; Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; Set. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; Konsil Kedokteran Indonesia; Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KATA PENGANTAR

Profil Kesehatan Indonesia 2023 hadir sebagai gerbang untuk memahami lanskap kesehatan bangsa secara komprehensif. Di dalamnya, terukir jejak capaian program pembangunan kesehatan, menjadikannya sumber data resmi dan terpercaya Kementerian Kesehatan untuk mengukur kemajuan dan merumuskan arah kebijakan yang tepat. Profil ini juga menjadi rujukan data untuk berbagai kepentingan, seperti pencapaian indikator Rencana Strategis (Renstra), *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan program lainnya.

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023 disusun berdasarkan data rutin dari Kementerian Kesehatan dan institusi terkait lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data yang dikumpulkan mencakup data nasional, data provinsi, perbandingan data antar provinsi, serta analisis tren dari tahun ke tahun. Informasi yang disajikan mencakup data dan narasi tentang situasi Demografi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, serta Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

Terwujudnya Profil Kesehatan Indonesia 2023 ini merupakan buah kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunannya.

Kami menyadari bahwa Profil ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk memberikan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa depan.

Mari jadikan Profil Kesehatan Indonesia 2023 ini sebagai kompas untuk mengantarkan bangsa menuju masa depan yang lebih sehat. Unduh Profil ini di *website* Kementerian Kesehatan dan bagikan informasinya kepada khalayak yang lebih luas.

Bersama, kita wujudkan Indonesia yang Sehat!

Juni 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Dengan penuh rasa syukur dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita menerbitkan Buku Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Buku ini memuat data dan informasi yang telah melalui pengecekan kualitas secara ketat, sehingga dapat dijadikan referensi dalam proses manajemen pembangunan kesehatan.

Penerbitan Buku Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023 ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan. Di mana, Profil Kesehatan diwajibkan untuk diterbitkan secara berkala, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Puskesmas, minimal satu kali dalam setahun.

Kehadiran Buku Profil Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, terutama dalam:

- Menampilkan data dan informasi kesehatan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan.
- Mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat dan terukur dalam setiap proses manajemen kesehatan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar-stakeholder di bidang kesehatan.
- Mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kesehatan.

Penyusunan Buku Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023 ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi dari berbagai pihak. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kerja keras dan dedikasi kita bersama dapat bermanfaat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Juni 2024
Menteri Kesehatan

Budi G. Sadikin

PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2023

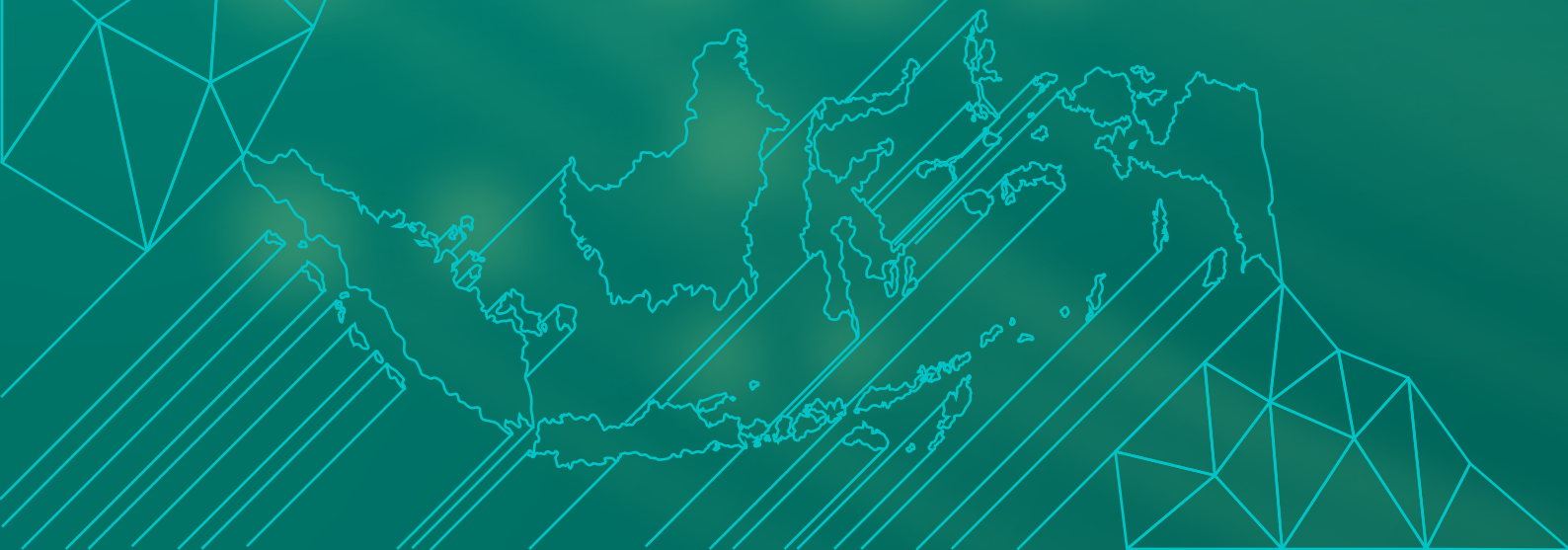

DAFTAR GAMBAR

BAB I. DEMOGRAFI

GAMBAR 1.1	JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN (DALAM JUTAAN) TAHUN 2023	1
GAMBAR 1.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI (DALAM RIBUAN) TAHUN 2023	2
GAMBAR 1.3	PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2023	3
GAMBAR 1.4	PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km^2) DI INDONESIA TAHUN 2023	4
GAMBAR 1.5	PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2023	5
GAMBAR 1.6	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2018 – 2023	7
GAMBAR 1.7	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	8
GAMBAR 1.8	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2023	10
GAMBAR 1.9	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI TAHUN 2023	12
GAMBAR 1.10	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS TAHUN 2021 – 2023	13
GAMBAR 1.11	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2018 – 2023	14
GAMBAR 1.12	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2018 – 2023	15
GAMBAR 1.13	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2019 – 2023	16
GAMBAR 1.14	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004 – 2023	17
GAMBAR 1.15	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	18

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

GAMBAR 2.1	JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019 - 2023	21
GAMBAR 2.2	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2023	22
GAMBAR 2.3	PERSENTASE TINGKAT KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023	24
GAMBAR 2.4	PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	26
GAMBAR 2.5	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA TAHUN 2019 – 2023	27
GAMBAR 2.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR JENIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	28
GAMBAR 2.7	PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	29
GAMBAR 2.8	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	31
GAMBAR 2.9	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	32
GAMBAR 2.10	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA TAHUN 2023	33
GAMBAR 2.11	KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	34
GAMBAR 2.12	PROPORSI KLINIK TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2023	35

GAMBAR 2.13 JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA 36
GAMBAR 2.14 JUMLAH KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 36
GAMBAR 2.15 JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 37
GAMBAR 2.16 JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 38
GAMBAR 2.17 JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 39
GAMBAR 2.18 LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2023 40
GAMBAR 2.19 JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN TERAKREDITASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 41
GAMBAR 2.20 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2018 – 2023 42
GAMBAR 2.21 JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2023 43
GAMBAR 2.22 RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2019 - 2023 44
GAMBAR 2.23 RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 45
GAMBAR 2.24 PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 46
GAMBAR 2.25 PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME DI ENAM LAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2023 48
GAMBAR 2.26 JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME SEPENUHNYA DI ENAM LAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2023 49
GAMBAR 2.27 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA TAHUN 2023 51
GAMBAR 2.28 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA TAHUN 2023 52
GAMBAR 2.29 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL DI INDONESIA TAHUN 2023 54
GAMBAR 2.30 JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023 55
GAMBAR 2.31 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023 56
GAMBAR 2.32 JUMLAH POSYANDU AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 57
GAMBAR 2.33 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 58

BAB III. SDM KESEHATAN

GAMBAR 3.1 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023 61
GAMBAR 3.2 PROPORSI TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2023 61
GAMBAR 3.3 JUMLAH 9 TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023 62
GAMBAR 3.4 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 63

GAMBAR 3.5 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2023 64
GAMBAR 3.6 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 65
GAMBAR 3.7 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2023 66
GAMBAR 3.8 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023 67
GAMBAR 3.9 PROPORSI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023 67
GAMBAR 3.10 DISTRIBUSI JUMLAH SDM KSEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2023 68
GAMBAR 3.11 SEBARAN JUMLAH SDMK DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2023 69
GAMBAR 3.12 JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR AKTIF PER 31 DESEMBER 2023 70
GAMBAR 3.13 JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 70
GAMBAR 3.14 JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 71
GAMBAR 3.15 JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 72
GAMBAR 3.16 JUMLAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2023 74
GAMBAR 3.17 PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2023 75
GAMBAR 3.18 PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENUGASAN KHUSUS TENAGA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023 76
GAMBAR 3.19 PENEMPATAN TENAGA MEDIS DAN TEENAGA KESEHATAN INDIVIDU TAHUN 2023 77
GAMBAR 3.20 PROPORSI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA INTERNSIP DI INDONESIA TAHUN 2023 78
GAMBAR 3.21 PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2023 80
GAMBAR 3.22 JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHARAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 82
GAMBAR 3.23 JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 82
GAMBAR 3.24 JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023 83
GAMBAR 3.25 JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 84
GAMBAR 3.26 JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2023 85

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2019-2023 87
GAMBAR 4.2 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2023 88
GAMBAR 4.3 PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2023 89

GAMBAR 4.4 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2023 89
GAMBAR 4.5 REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 90
GAMBAR 4.6 REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 91
GAMBAR 4.7 REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 92
GAMBAR 4.8 PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2022 94
GAMBAR 4.9 PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2016-2023 96
GAMBAR 4.10 CAKUPAN KEPERSERTAAN JAMINAN NASIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 97
GAMBAR 4.11 TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2017-2023 98
GAMBAR 4.12 ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2015-2023 98
GAMBAR 4.13 JUMLAH FKTP BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2015-2023 99
GAMBAR 4.14 PERSENTASE FKTP BEKERJA SAMA DENGAN BPJS TAHUN 2023 99
GAMBAR 4.15 JUMLAH FKRTL BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2023 100
GAMBAR 4.16 PERSENTASE FKRTL BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2023 100
GAMBAR 4.17 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2023 100
GAMBAR 4.18 PERSENTASE FASILTAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2023 100
GAMBAR 4.19 PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMEN KEPERSERTAAN TAHUN 2023 101
GAMBAR 4.20 PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN TAHUN 2023 102
GAMBAR 4.21 BEBAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023 102

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1 ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991 – 2020 106
GAMBAR 5.2 JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2018 - 2023 106
GAMBAR 5.3 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DI INDONESIA TAHUN 2023 107
GAMBAR 5.4 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2023 109
GAMBAR 5.5 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 110
GAMBAR 5.6 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6 MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 111
GAMBAR 5.7 CAKUPAN IMUNISASI TETANUS DIFTERI 2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2023 113
GAMBAR 5.8 CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 114

GAMBAR 5.9	CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	115
GAMBAR 5.10	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	117
GAMBAR 5.11	PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	118
GAMBAR 5.12	PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI DI INDONESIA TAHUN 2023	119
GAMBAR 5.13	JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2023	120
GAMBAR 5.14	PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI	121
GAMBAR 5.15	PRESENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	122
GAMBAR 5.16	PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	123
GAMBAR 5.17	PERSENTASE IBU HAMIL POSITIF SIFILIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	124
GAMBAR 5.18	JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2023	125
GAMBAR 5.19	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2023	126
GAMBAR 5.20	PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2023	127
GAMBAR 5.21	PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2023	128
GAMBAR 5.22	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI INDONESIA TAHUN 2018-2023	129
GAMBAR 5.23	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) DAN KN LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2018-2023	130
GAMBAR 5.24	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	131
GAMBAR 5.25	BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	133
GAMBAR 5.26	BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	135
GAMBAR 5.27	BALITA DILAYANI SDIDTK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	136
GAMBAR 5.28	BALITA DILAYANI MTBS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	137
GAMBAR 5.29	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013-2023	139
GAMBAR 5.30	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	140
GAMBAR 5.31	ANGKA DROP OUT (DO) IMUNISASI PADA BAYI TAHUN 2019-2023	141
GAMBAR 5.32	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2019-2023	142
GAMBAR 5.33	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	143
GAMBAR 5.34	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	145
GAMBAR 5.35	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2023	147
GAMBAR 5.36	CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	148
GAMBAR 5.37	CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	149

GAMBAR 5.38 CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 150
GAMBAR 5.39 PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 152
GAMBAR 5.40 PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 153
GAMBAR 5.41 PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 154
GAMBAR 5.42 PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 155
GAMBAR 5.43 PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 156
GAMBAR 5.44 PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 157
GAMBAR 5.45 PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2023 158
GAMBAR 5.46 PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI, SSGI 2023 159
GAMBAR 5.47 CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 161
GAMBAR 5.48 CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 162
GAMBAR 5.49 PERSENTASE RERATA BALITA DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 163
GAMBAR 5.50 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 165
GAMBAR 5.51 CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 167
GAMBAR 5.52 CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 169
GAMBAR 5.53 CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 170

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1 KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2023 173
GAMBAR 6.2 CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2013-2023 174
GAMBAR 6.3 CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 175
GAMBAR 6.4 ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2013-2023 176
GAMBAR 6.5 ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 176
GAMBAR 6.6 JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2023 178
GAMBAR 6.7 PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2023 178

GAMBAR 6.8	PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2023	179
GAMBAR 6.9	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2013-2023	180
GAMBAR 6.10	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	181
GAMBAR 6.11	PERSENTASE PENGOBATAN KASUS PNEUMONIA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	182
GAMBAR 6.12	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B DAN HEPATITIS C TAHUN 2015-2023	183
GAMBAR 6.13	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	184
GAMBAR 6.14	CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	185
GAMBAR 6.15	ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2013-2023	186
GAMBAR 6.16	PREVALENSI KUSTA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	187
GAMBAR 6.17	PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022 DAN 2023	188
GAMBAR 6.18	ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013-2023	188
GAMBAR 6.19	ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2022	189
GAMBAR 6.20	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2013-2023	190
GAMBAR 6.21	CAKUPAN RFT KUSTA PB MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	191
GAMBAR 6.22	CAKUPAN RFT KUSTA MB MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	192
GAMBAR 6.23	CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS LENGKAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	194
GAMBAR 6.24	CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 BOOSTER 1 DI INDONESIA TAHUN 2023	195
GAMBAR 6.25	SEBARAN KASUS TETANUS NEONATORUM PER PROVINSI TAHUN 2013 - 2023	198
GAMBAR 6.26	PROPORSI KASUS TETANUS NEONATORUM MENURUT FAKTOR RISIKO TAHUN 2023	199
GAMBAR 6.27	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2021 - 2023	200
GAMBAR 6.28	PETA SEBARAN KASUS CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2022 - 2023	201
GAMBAR 6.29	PROPORSI KASUS CAMPAK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2023	202
GAMBAR 6.30	PERSENTASE KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM YANG DIIMUNISASI DI INDONESIA TAHUN 2023	203
GAMBAR 6.31	FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021-2022	204
GAMBAR 6.32	DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUMDI INDONESIA TAHUN 2023	205
GAMBAR 6.33	SEBARAN KASUS DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2023	206
GAMBAR 6.34	KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2023	207
GAMBAR 6.35	PERFORMA SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2007-2023	219
GAMBAR 6.36	NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK< 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2023	210

GAMBAR 6.37	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	211
GAMBAR 6.38	INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA TAHUN 2013-2023	213
GAMBAR 6.39	ANGKA KESAKITAN (INCIDENCE RATE/IR) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	214
GAMBAR 6.40	CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA TAHUN 2013-2023	215
GAMBAR 6.41	CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	216
GAMBAR 6.42	JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2013-2023	217
GAMBAR 6.43	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD ≤ 10 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2023	218
GAMBAR 6.44	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2012-2023	219
GAMBAR 6.45	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	221
GAMBAR 6.46	PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2023	222
GAMBAR 6.47	ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API) PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2013-2023	223
GAMBAR 6.48	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	224
GAMBAR 6.49	PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	225
GAMBAR 6.50	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2014 – 2023	226
GAMBAR 6.51	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	227
GAMBAR 6.52	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1% MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	228
GAMBAR 6.53	CAKUPAN POPM FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2014-2023	229
GAMBAR 6.54	SITUASI RABIES DI INDONESIATAHUN 2013 – 2023	230
GAMBAR 6.55	PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR DI INDONESIA TAHUN 2023	231
GAMBAR 6.56	JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2023	232
GAMBAR 6.57	PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES TERHADAP KASUS GHPR (%) DI INDONESIA TAHUN 2023	232
GAMBAR 6.58	SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2013 – 2023	233
GAMBAR 6.59	JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2023	233
GAMBAR 6.60	PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA MEMILIKI 25% PUSKESMAS MELAKSANAKAN SURVEILANS VEKTOR DI INDONESIA TAHUN 2023	235
GAMBAR 6.61	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PANDU PTM DI ≥ 80% PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023	238
GAMBAR 6.62	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA) DI INDONESIA TAHUN 2021-2023	239
GAMBAR 6.63	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA (SADANIS) DI INDONESIA TAHUN 2021-2023	240
GAMBAR 6.64	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2023	241
GAMBAR 6.65	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2023	241

GAMBAR 6.66	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI INDONESIA TAHUN 2023	242
GAMBAR 6.67	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI ≥ 40% PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2023	243
GAMBAR 6.68	PERSENTASE USIA 7-15 DAN >15 TAHUN YANG MELAKSANAKAN SKRINING PTM PRIORITAS (DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA) TAHUN 2023	245
GAMBAR 6.69	PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 18 TAHUN YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI OBESITAS TAHUN 2023	247
GAMBAR 6.70	PROPORSI PENDUDUK USIA >18 TAHUN YANG OBESITAS BERDASARKAN HASIL DETEKSI DINI TAHUN 2023	248
GAMBAR 6.71	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA TAHUN 2023	250
GAMBAR 6.72	PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 15 TAHUN DENGAN RISIKO MASALAH JIWA YANG MENDAPATKAN SKRINING TAHUN 2023	252
GAMBAR 6.73	PERSENTASE PENYANDANG GANGGUAN JIWA YANG MEMPEROLEH LAYANAN DI FASYANKES MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	254
GAMBAR 6.74	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2023	257
GAMBAR 6.75	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2023	258
GAMBAR 6.76	JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2023	258
GAMBAR 6.77	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2023	259
GAMBAR 6.78	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	260
GAMBAR 6.79	JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	263
GAMBAR 6.80	PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2023	264
GAMBAR 6.81	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA YANG BERUMUR 50 -59 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	265
GAMBAR 6.82	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023	266
GAMBAR 6.83	PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2023	267
GAMBAR 6.84	PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2023	267
GAMBAR 6.85	CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2023	269
GAMBAR 6.86	HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER DI INDONESIA TAHUN 2022	270
GAMBAR 6.87	JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER DENGAN HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN KURANG SEKALI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023	271
GAMBAR 6.88	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI DI INDONESIA TAHUN 2023	272
GAMBAR 6.89	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI DAN PROVINSI TAHUN 2023	273
GAMBAR 6.90	JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER MENURUT EMBARKASI TAHUN 2023	275

GAMBAR 6.91 DISTRIBUSI JEMAAH HAJI INDONESIA YANG DIRAWAT INAP DI ARAB SAUDI MENURUT JENIS KASUS DAN TEMPAT RAWAT TAHUN 2023 276
GAMBAR 6.92 JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 277
GAMBAR 6.93 SEPULUH PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA TAHUN 2023 278

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1 PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 281
GAMBAR 7.2 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 283
GAMBAR 7.3 PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 284
GAMBAR 7.4 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2021-2023 285
GAMBAR 7.5 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE PROVINSI TAHUN 2023 286
GAMBAR 7.6 PERSENTASE DESA/KELURAHAN MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 288
GAMBAR 7.7 PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 289
GAMBAR 7.8 PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PTOVINSI TAHUN 2023 291
GAMBAR 7.9 PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAHAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 293
GAMBAR 7.10 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 295
GAMBAR 7.11 PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 297
GAMBAR 7.12 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 299
GAMBAR 7.13 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT TIPE DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2021-2023 300
GAMBAR 7.14 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023 301

DAFTAR TABEL

BAB I. DEMOGRAFI

TABEL 1.1	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023	6
TABEL 1.2	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA (JUTA ORANG) TAHUN 2020-2023	11

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

TABEL 2.1	PERSYARATAN PENETAPAN KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS	24
TABEL 2.2	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN DI INDONESIA TAHUN 2019 - 2023	43

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

TABEL 4.1	TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2013 - 2022	93
TABEL 4.2	JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROPIK DALAM PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2023	103

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

TABEL 6.1	JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2023	261
TABEL 6.2	SEPULUH PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER DI INDONESIA TAHUN 2023	274

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

TABEL 7.1	PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2023	282

DAFTAR ISI

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Kata Sambutan iii
Daftar Gambar vii
Daftar Tabel xvii
Daftar Isi xviii
Daftar Lampiran xxi
Ringkasan Profil xxxii

BAB I. DEMOGRAFI 1
A. **KEADAAN PENDUDUK** 1
B. **KEADAAN EKONOMI** 6
C. **KEADAAN PENDIDIKAN** 13
D. **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)** 16

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM 20
A. **PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT** 21
1. Akreditasi Puskesmas 23
2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap 27
3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan 27
4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja, Pengukuran dan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani 30
5. Pelayanan Kesehatan Tradisional 33
B. **KLINIK, PRAKTIK MANDIRI TENAGA MEDIS, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM** 35
1. Klinik 35
2. Praktik Mandiri Tenaga Medis 37
3. Unit Tranfusi Darah 38
C. **LABORATORIUM KESEHATAN** 40
D. **RUMAH SAKIT** 42
1. Jenis Rumah Sakit 42
2. Tipe Rumah Sakit 43
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 44
4. Akreditasi Rumah Sakit 45
5. Rekam Medis Elektronik (RME) Rumah Sakit 47
E. **KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN** 50
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial 50
2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial 50
3. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 53
F. **SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN** 55
1. Sarana dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 55
G. **UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)** 56
1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 56

BAB III. SDM KESEHATAN 60
A. **JUMLAH TENAGA KESEHATAN** 60

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas 62
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit 66
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal 68
B. **REGISTRASI TENAGA KESEHATAN** 69
C. **PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN** 73
1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap 73
2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus 74
3. Program Internsip Dokter 78
4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) 79
D. **INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN** 80
1. Jumlah Lulusan Poltekkes 81
2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi 83

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN **87**
A. **ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN** 87
B. **DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020** 89
C. **BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN** 92
1. Total Belanja Kesehatan/*Total Health Expenditure* (THE) 93
2. Jaminan Kesehatan 95

BAB V. KESEHATAN KELUARGA **105**
A. **KESEHATAN IBU** 105
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 108
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur 112
3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil 114
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 115
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 116
6. Pelayanan Kontrasepsi 117
8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil 120
B. **KESEHATAN ANAK** 125
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal (0-28 Hari) 128
2. Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah 132
3. Imunisasi 138
4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah 147
C. **GIZI** 151
1. Status Gizi Balita 151
2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi 159

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT **172**
A. **PENYAKIT MENULAR LANGSUNG** 172
1. Tuberkulosis 172
2. HIV dan AIDS 177
3. Pneumonia 179
4. Hepatitis 182
5. Diare 184
6. Kusta 186
7. Coronavirus Diseases (COVID-19) 193

B. **PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)** 196
1. Tetanus Neonatrum 197
2. Campak 199
3. Difteri 205
4. Polio dan *Acute Flaccid Paralysis (APF)*/Lumpuh Layu Akut 208
C. **PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS** 212
1. Demam Berdarah Dengue (DBD) 212
2. Chikungunya 219
3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya 220
4. Malaria 220
5. Filariasis 226
6. Rabies 230
7. Leptospirosis 232
8. Pengendalian Vektor Terpadu 234
D. **PENYAKIT TIDAK MENULAR** 236
1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di > 80% Puskesmas 237
2. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara 238
3. Pengendalian Konsumsi Tembakau 242
4. Deteksi Dini Gangguan Indera 244
5. Deteksi Dini Obesitas 246
E. **KESEHATAN JIWA & NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA & ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)** 248
1. Pelayanan Kesehatan Jiwa 249
2. Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis 255
F. **DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA** 257
G. **PELAYANAN KESEHATAN HAJI** 262
1. Profil Jemaah Haji Indonesia 263
2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 268
3. Kebugaran Jemaah Haji 270
4. Pola Morbiditas dan Mortalitas Jemaah Haji 274

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN **280**
A. **AIR MINUM** 280
B. **AKSES SANITASI LAYAK** 283
C. **SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)** 287
D. **TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR** 290
E. **TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)** 292
F. **KABUPATEN/KOTA SEHAT** 294
G. **PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS** 296
H. **GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)** 298
I. **PERUMAHAN** 300

Daftar Pustaka 303
Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. DEMOGRAFI

LAMPIRAN 1	LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023
LAMPIRAN 2.a	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
LAMPIRAN 2.b	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2023
LAMPIRAN 2.c	JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
LAMPIRAN 3.a	JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN TAHUN 2001-2023
LAMPIRAN 3.b	GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2023
LAMPIRAN 3.c	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023
LAMPIRAN 3.d	INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2023
LAMPIRAN 3.e	RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL, 2023
LAMPIRAN 3.f	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023
LAMPIRAN 3.g	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023
LAMPIRAN 3.h	ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019 - 2023
LAMPIRAN 3.i	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023
LAMPIRAN 3.j	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2023
LAMPIRAN 3.k	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
LAMPIRAN 3.l	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2023
LAMPIRAN 3.m	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2023
LAMPIRAN 3.n	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2023

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

LAMPIRAN 4.a JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2019 - 2023

LAMPIRAN 4.b JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI TAHUN 2019 - 2023

LAMPIRAN 4.c RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 4.d AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 4.e PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR (MINIMAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 4.f PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 4.g JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 4.h JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 4.i JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 4.j JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 4.k JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 8.a JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 8.b JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 8.c JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

LAMPIRAN 8.e AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 8.f PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 8.g JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 8.h JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 8.i JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN REKAM MEDIS ELEKTERONIK (RME) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 9.a PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 9.b PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 9.c PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 9.d JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 9.e JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 10 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF, KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF DAN JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

BAB III. SDM KESEHATAN

LAMPIRAN 11.a JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.b JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.c JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.d JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.e KECUKUPAN DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.f JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.g JUMLAH DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.h JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020- 2023

LAMPIRAN 11.i JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN BATCH XXIV-XXVI (PERIODE I-III TAHUN 2023)

LAMPIRAN 11.j JUMLAH PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.k JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN BERBASIS INDIVIDU PERIODE I-IV TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.l JUMLAH PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.m JUMLAH DOKTER INTERNSIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.n JUMLAH DOKTER GIGI INTERNSIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 11.o JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 12.a JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 12.b JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 12.c JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 12.d JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2023

LAMPIRAN 13.a JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 13.b JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 13.c JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 14.a JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 14.b JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 14.c JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 15.a JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 15.b JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 15.c JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.a JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.b JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.c JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.d JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.e JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.f JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.g JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.h JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.i JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.j JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 16.k JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

LAMPIRAN 19.a CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2023

LAMPIRAN 19.b FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 19.c FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 19.d FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN2023

LAMPIRAN 20.a ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 20.b ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2023

LAMPIRAN 20.c ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 20.d ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 20.e ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 20.f ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 20.g ANGGARAN KESEHATAN TAHUN 2023

BAB V KESEHATAN KELUARGA

LAMPIRAN 21 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 22 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

LAMPIRAN 23 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 24 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 25 CAKUPAN IMUNISASI T2+ PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 26 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI T2+ PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 27.a PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 27.b PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 27.c PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 27.d PEMERIKSAAN SIFILIS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 28.a PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 28.b PERSENTASE BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL RISIKO KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 29 JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 30 JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 31 CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 34 JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 35 JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 37 BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN2023

LAMPIRAN 38 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 39 PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 42 CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 43.a CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 43.b DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023

LAMPIRAN 43.c PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023

LAMPIRAN 44.a CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 44.b CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 45 CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 46 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 47 JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 48.a PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 48.b PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 48.c PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 48.d PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 48.e PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 48.f PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 49 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 53 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 54 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT PROVINSI TAHUN2023

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT

LAMPIRAN 56.a JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK DAN TREATMENT COVERAGE (TC) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 56.b JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 56.c JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 57 ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 58 PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 59.a JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 59.b JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

LAMPIRAN 60.a JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 60.b JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 60.c JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2023

LAMPIRAN 60.d JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 61 KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 62 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 64 KASUS BARU KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 65 KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 66 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 67 PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 68 KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 69.a JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 69.b JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 69.c JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 69.d JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIIMUNISASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 69.e JUMLAH KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM DAN KASUS CAMPAK YANG DIIMUNISASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 69.f FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 69.g DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 70 KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) SUSPEK CAMPAK DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 72.a KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 72.b JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

LAMPIRAN 73.a KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 73.b JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 73.c ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2023

LAMPIRAN 74.a PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 74.b JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 74.c SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019-2023

LAMPIRAN 74.d JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

LAMPIRAN 77.a REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023

LAMPIRAN 77.b KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 77.c KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI ≥40% PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 77.d JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM DI ≥80% PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 77.e DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA (SKRINING PTM PRIORITAS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 77.f PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK USIA ≥18 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 78.a JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 78.b JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN REHABILITASI MEDIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 84.a KASUS KUMULATIF KONFIRMASI, SEMBUH, DAN MENINGGAL COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 86 CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 MENURUT USIA BERDASARKAN DOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 88.a JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2023

LAMPIRAN 88.b JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2023

LAMPIRAN 88.c JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 88.d JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 89.a JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2022-2023

LAMPIRAN 89.b JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 89.c JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 89.d JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 89.e JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PEKERJAAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 89.f JUMLAH DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI REGULER MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2022-2023

LAMPIRAN 89.g HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 89.h JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI (RISTI) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 89.i JUMLAH RAWAT JALAN DAN RATIO JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER BERDASARKAN EMBARKASI TAHUN 2023

LAMPIRAN 89.j JUMLAH DAN PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

LAMPIRAN 79.a PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 79.b PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023

LAMPIRAN 80 JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 81.a PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023

LAMPIRAN 81.b PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 82 PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 83.a PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 83.b JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 83.c JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

LAMPIRAN 83.d PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) TAHUN 2023

LAMPIRAN 83.e PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023

PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2023

Ringkasan Profil

EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 280.725.428 jiwa yang terdiri dari 141.671.644 jiwa penduduk laki-laki dan 139.053.784 jiwa penduduk perempuan. Gambaran penduduk di Indonesia menunjukkan struktur penduduk muda yang artinya jumlah penduduk usia muda masih lebih banyak dibandingkan penduduk tua. Bersamaan dengan parameter ekonomi dan Pendidikan, kependudukan memegang peran penting terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,05%, lebih rendah daripada pertumbuhan tahun 2022 yaitu sebesar 5,31%. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2023 sebesar 9,13 tahun atau setara kelas 3 SMP/Sederajat. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 dibandingkan tahun sebelumnya.

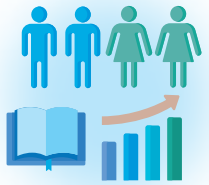

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan entitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Puskesmas dan rumah sakit masih menjadi jenis pelayanan kesehatan utama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Jumlah puskesmas di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 10.180 puskesmas, yang terdiri dari 4.210 puskesmas rawat inap dan 5.970 puskesmas non rawat inap. Rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2023 sebesar 1,4 yang menunjukkan sedikitnya terdapat 1 puskesmas di tiap kecamatan di Indonesia. Jumlah rumah sakit di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 3.155 yang terdiri dari 2.636 RSU dan 519 RSK. Rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia sebesar 1,38 per 1.000 penduduk yang telah memenuhi standar WHO sebesar 1 per 1.000 penduduk.

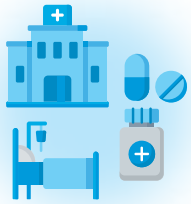

SDM kesehatan merupakan motor penggerak pembangunan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jumlah SDM kesehatan di fasyankes di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 2.077.473 orang yang terdiri dari 183.694 tenaga medis (8,8%), 1.317.589 tenaga kesehatan (63,4%), dan 576.190 tenaga penunjang kesehatan (27,7%). Pada tahun 2023 terdapat 11,5% puskesmas dengan status kekurangan dokter, 59,1% puskesmas kelebihan dokter, dan 29,4% puskesmas berstatus cukup memiliki dokter. Pada pelayanan kesehatan rujukan, terdapat sebanyak 51.201 orang dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2023. Sebagian besar merupakan dokter spesialis dasar sebanyak 17.424 orang atau 39% dari seluruh dokter spesialis di rumah sakit.

Selain SDM dan fasilitas, pembangunan kesehatan juga memerlukan sumber daya dalam bentuk anggaran dan jaminan kesehatan. Anggaran kesehatan yang dialokasikan pada tahun 2023 sebesar 97,4 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 94,6 triliun rupiah dan persentase realisasi 97,04%. Jumlah cakupan kepesertaan JKN/KIS pada tahun 2023 mencapai 267,3 juta jiwa atau 95,2% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, proprosi terbanyak adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 48%.

Anggaran, fasilitas Kesehatan, dan SDM berperan dalam menentukan derajat Kesehatan Masyarakat yang dapat diukur melalui indikator kematian ibu dan bayi, status gizi, dan angka morbiditas penyakit. Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup yang hampir mencapai target RPJMN 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya kesehatan untuk menurunkan AKI dilakukan pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Cakupan kunjungan ibu hamil K6, persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dan kunjungan nifas pada tahun 2023 masing-masing sebesar 74,4%, 87,2%, dan 85,7%.

Sama halnya dengan kematian ibu, berbagai upaya juga dilakukan untuk menekan angka kematian anak, seperti pelayanan neonatal dan imunisasi dasar lengkap. Cakupan kunjungan neonatal lengkap dan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2023 sebesar 90,8% dan 95,4%. Selain angka kematian, status gizi pada anak juga menjadi tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting) dan gizi buruk dan kurang (wasting) sebesar 21,5% dan 8,5%.

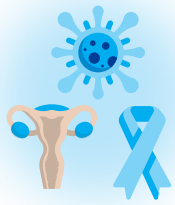

Derajat kesehatan masyarakat juga tercermin dari angka kesakitan, baik pada penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global pada SDGs, maupun penyakit yang berpotensi wabah. Pengendalian peyakit yang menjadi bagian dari tujuan SDGs seperti Tuberculosis, HIV, dan Malaria menunjukkan perbaikan dan sedikit penurunan. Angka kesakitan Malaria (API) pada tahun 2023 sebesar 1,5 per 1.000 penduduk. API mengalami peningkatan melebihi 1 per 1.000 penduduk sejak tahun 2021. Cakupan penemuan kasus Tuberculosis pada tahun 2023 sebesar 77,5%, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 74,7%. Jumlah kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan pada tahun 2023 masing-masing sebesar 57.299 dan 16.410.

Penyakit potensial wabah seperti Demam Berdarah Dengue memiliki incidence rate pada tahun 2023 sebesar 21,6 per 100.000 penduduk. Selain penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular juga menjadi salah satu prioritas program pembangunan kesehatan. Deteksi dini masih dianggap menjadi cara efektif dalam pengendalian penyakit tidak menular. Pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara (Sadanis) pada tahun 2023 sebesar 14,6% dan 13,7%.

Peningkatan derajat kesehatan juga dapat dicapai melalui upaya kesehatan lingkungan yang dapat mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, dan sosial. Indikator kunci pada kesehatan lingkungan antara lain akses air minum layak, akses sanitasi layak, dan kabupaten/kota sehat. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak, dan persentase kabupaten/kota sehat di Indonesia masing-masing sebesar 91,72%, 93,9%, dan 74,3%.

BAB I.
DEMOGRAFI

BAB I. DEMOGRAFI

Secara astronomis Indonesia yang berada di antara 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° sampai 141° Bujur Timur (BT), yang menunjukkan negara Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Benua Australia dan Benua Asia, serta berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.374 pulau, dengan luas wilayah sebesar 1.892.410,1 km^2. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa, menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pemerintah untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Secara administratif, Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Daerah provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota, dengan total 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia. Daerah kabupaten dan kota dibagi menjadi kecamatan, dengan total 7.145 kecamatan di seluruh Indonesia. Daerah kecamatan dibagi menjadi kelurahan dan desa, dengan total 8.433 kelurahan dan 74.326 desa di seluruh Indonesia (data selengkapnya di Lampiran 1).

A. KEADAAN PENDUDUK

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 280.725.428 jiwa yang terdiri dari 141.671.644 jiwa penduduk laki-laki dan 139.053.784 jiwa penduduk perempuan. Gambar 1.1 menunjukkan proporsi penduduk di Indonesia tahun 2023 menurut jenis kelamin. Proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama besar, hanya terpaut 0,94% lebih banyak laki-laki.

GAMBAR 1.1
PROPORSI PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2023

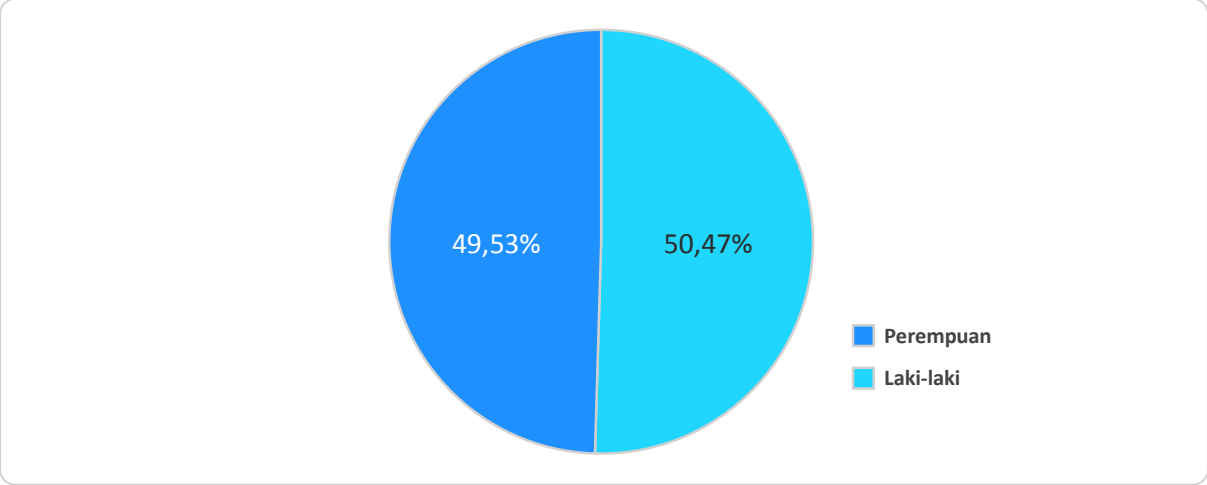

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Jika dilihat menurut provinsi, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Provinsi Papua Selatan. Secara rinci data estimasi jumlah penduduk per provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI (DALAM RIBUAN)
TAHUN 2023

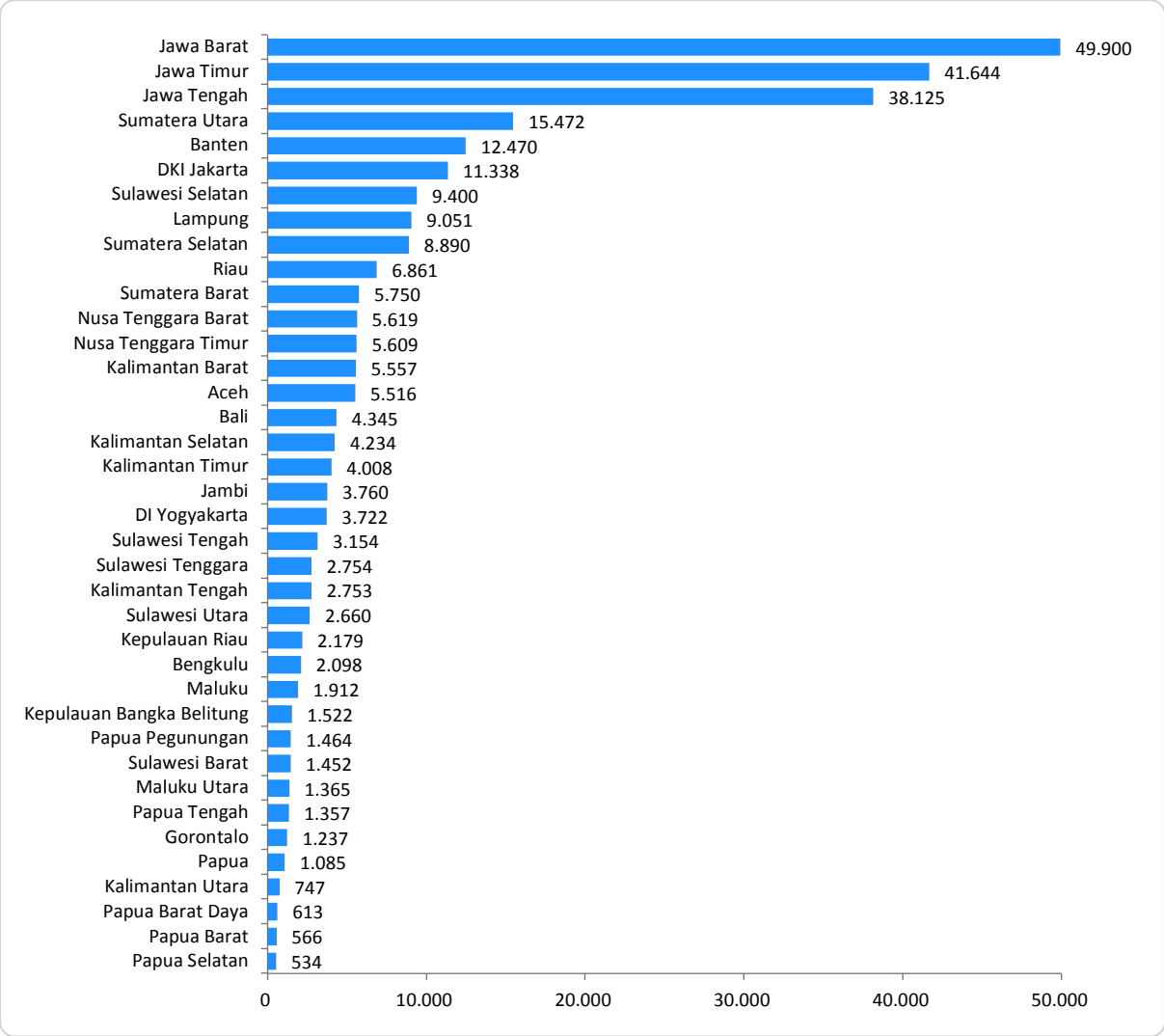

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Pulau berpenduduk adalah pulau dimana ada penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada wilayah administrasi dan berdomisili diantaranya melakukan aktivitas pelayanan publik dan keamanan seperti penjaga mercusuar dan satuan tugas pengamanan. Dari 17.374 pulau di Indonesia hanya 1.554 pulau yang berpenduduk. Pulau Jawa merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia (56%). Wilayah timur Indonesia yaitu Pulau Maluku (1,17%) dan Papua (2%) merupakan pulau dengan populasi penduduk paling sedikit. Data mengenai persebaran populasi penduduk per pulau-pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.3.

GAMBAR 1.3
PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA MENURUT PULAU
TAHUN 2023

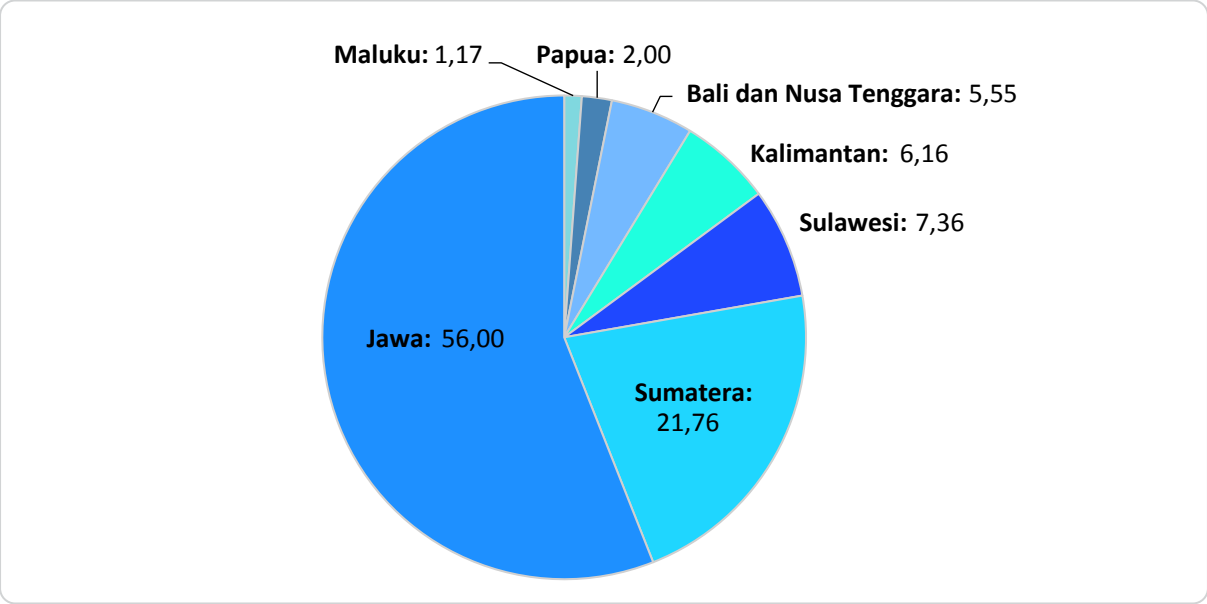

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat diketahui dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat persebaran penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, pusat pemerintahan, dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2023 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yaitu sebanyak 148 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Data kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

GAMBAR 1.4
PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM²) DI INDONESIA
TAHUN 2023

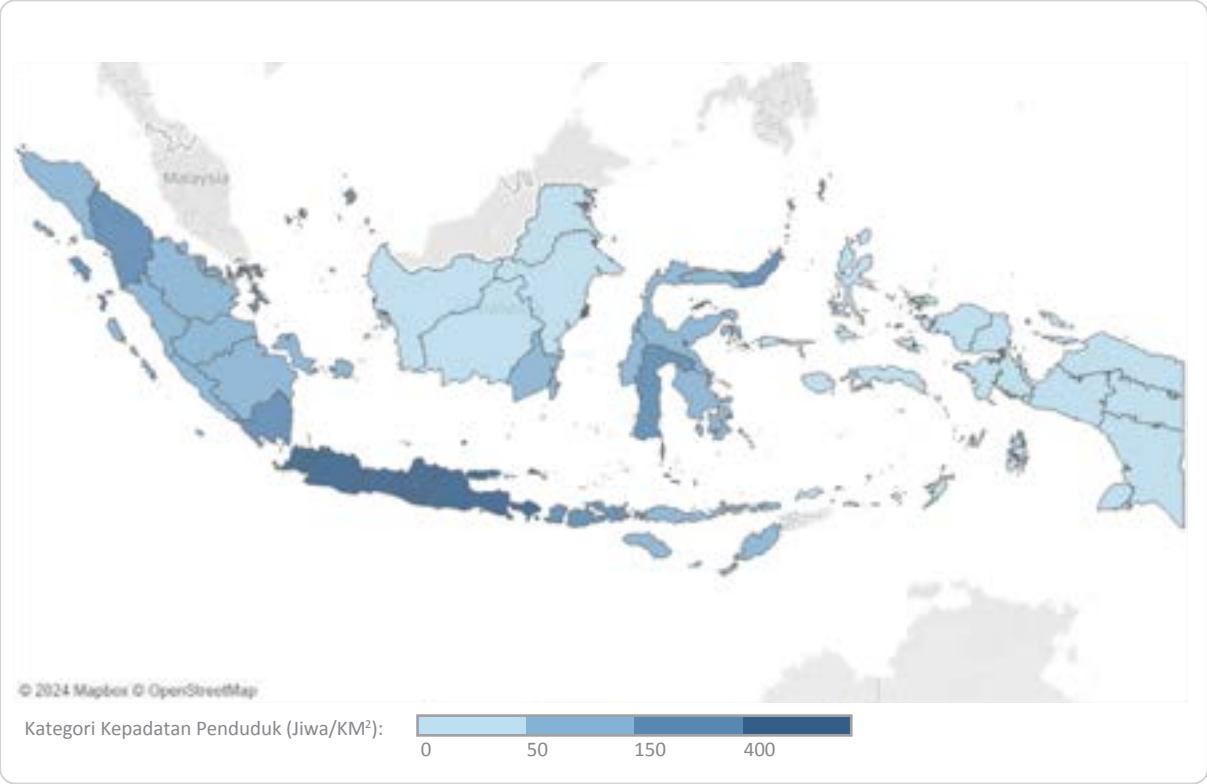

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi (17.153 jiwa/km^2). Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah yaitu di Provinsi Kalimantan Utara yaitu 11 jiwa/km^2.

Beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang masih jarang penduduknya; (2) pemerataan pembangunan terutama di wilayah timur Indonesia; (3) sosialisasi program keluarga berencana dan menunda usia pernikahan pertama.

Piramida penduduk adalah grafik demografi yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan komposisi umur-jenis kelamin suatu populasi. Piramida penduduk menyajikan jumlah atau persentase penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu penduduk menurut kelompok umur. Bentuk piramida pada titik waktu tertentu menunjukkan tahapan transisi demografi yang dialami suatu populasi.

Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Piramida penduduk Indonesia pada Gambar 1.5 berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelompok usia di atasnya. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek menunjukkan bahwa angka kematian yang masih tinggi pada penduduk lanjut usia.

GAMBAR 1.5
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2023

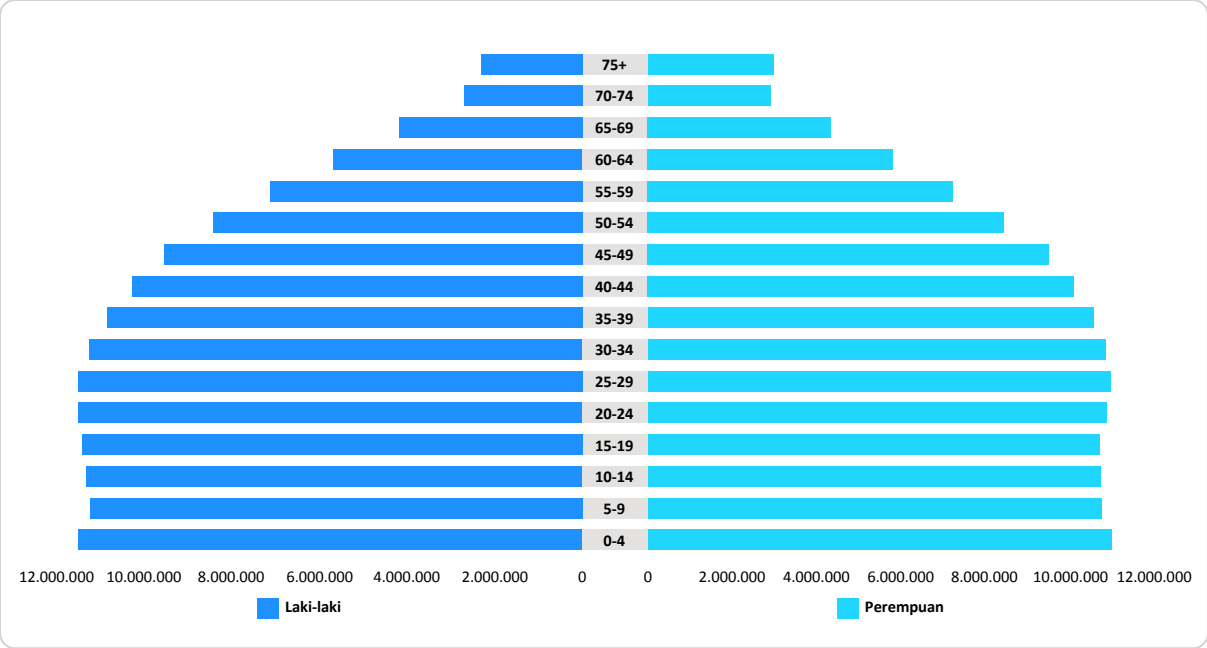

Sumber: Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2023

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebesar 44,65%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Indonesia yang berusia produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 45 orang yang tidak produktif. Angka ini masih sama dengan angka tahun sebelumnya. Dalam menanggapi kondisi ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya menekan jumlah kelahiran untuk mengurangi angka beban ketergantungan dan mengupayakan program kesehatan untuk usia pra lansia sehingga tidak menjadi beban saat mencapai usia lansia.

Tabel 1.1 menyajikan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan digunakan untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.a.

TABEL 1.1
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2023

No	Sasaran Program	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Bayi	0 tahun	4.659.154	4.447.534	9.106.688
2	Batita (Bawah Tiga Tahun)	0 – 2 tahun	6.955.521	6.649.484	13.605.005
3	Anak Balita	1 – 4 tahun	9.157.462	8.781.539	17.939.001
4	Balita (Bawah Lima Tahun)	0 – 4 tahun	11.499.263	11.012.575	22.511.838
5	Pra Sekolah	5 – 6 tahun	4.501.995	4.319.452	8.821.447
6	Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 tahun	2.244.209	2.149.510	4.393.719
7	Anak Usia SD/Setingkat	7 – 12 tahun	13.511.018	12.894.607	26.405.625
8	Penduduk Usia Muda	< 15 tahun	34.053.421	32.521.704	66.575.125
9	Penduduk Usia Produktif	15 – 64 tahun	97.540.111	95.129.067	192.669.178
10	Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 tahun	9.193.248	10.258.642	19.451.890
11	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 tahun	14.869.804	16.072.391	30.942.195
12	Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi	≥ 70 tahun	5.009.327	5.914.121	10.923.448
13	Wanita Usia Subur (WUS)	15 – 49 tahun	-	73.633.138	73.633.138
14	WUS Imunisasi	15 – 39 tahun	-	53.987.601	53.987.601

Sumber: Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2023

B. KEADAAN EKONOMI

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US$4.919,7.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,05%, lebih rendah daripada pertumbuhan tahun 2022 yaitu sebesar 5,31%. Sumber pertumbuhan ekonomi yang tertinggi menurut lapangan usaha adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan, sebesar 13,96%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 9,83%.

Selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi terus menguat di berbagai wilayah, khususnya kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua (6,94%), Sulawesi (6,37%), dan Kalimantan (5,43%). Namun, kelompok provinsi yang berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia berada di Pulau Jawa (57,05%) dan Sumatera (22,01%).

GAMBAR 1.6
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2018 – 2023

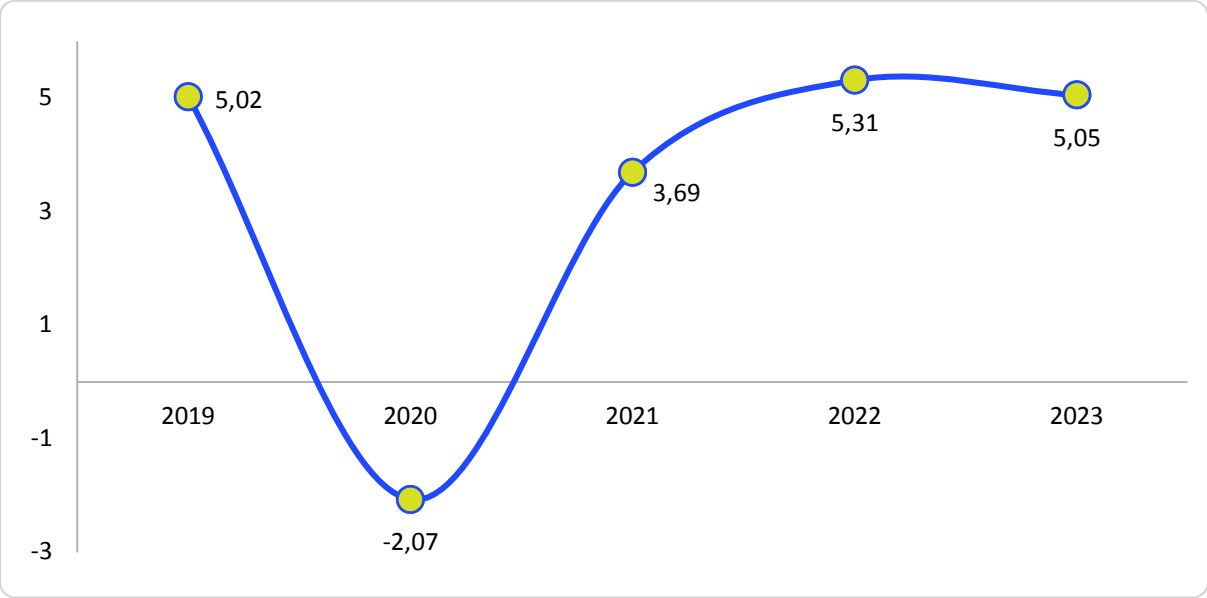

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran, baik garis kemiskinan bukan makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,89 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 300 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,4%, berkurang 0,1% poin terhadap Maret 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan masing-masing berkurang sebesar 100 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan berkurang dari 7,5% menjadi 7,3%. Persentase kemiskinan di perdesaan juga mengalami penurunan dari 12,3% menjadi 12,2%. Data mengenai jumlah penduduk miskin dan persentasenya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.a dan 3.b.

Dari Gambar 1.7, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023, persentase kemiskinan secara umum di Indonesia yaitu sebesar 9,4%. Persentase kemiskinan terendah yaitu di Provinsi Bali sebesar 4,3%, sementara tertinggi yaitu di Provinsi Papua yang pada 2023 mencapai angka sebesar 26%.

GAMBAR 1.7
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

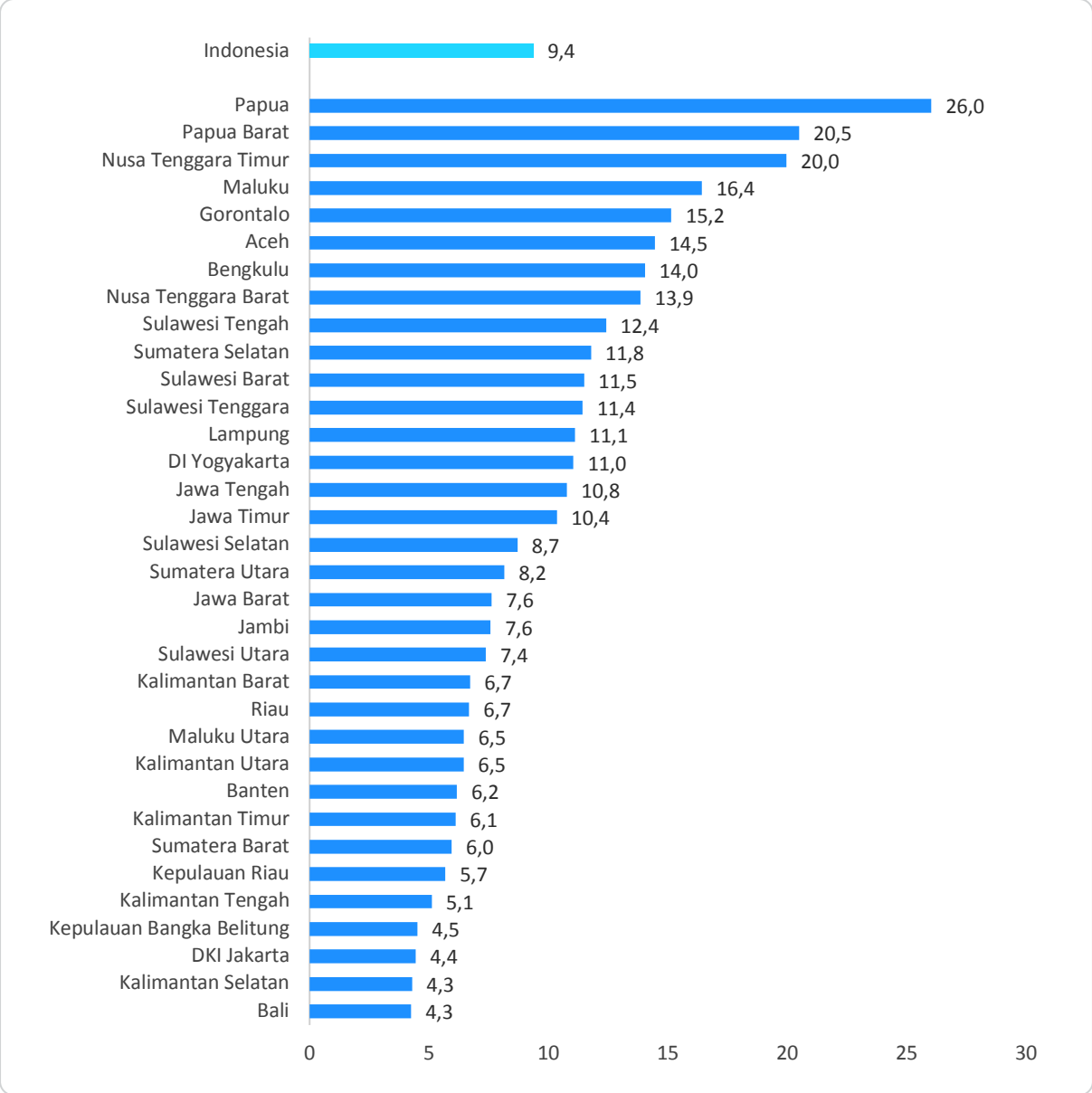

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode Maret 2022 – Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,5, turun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 1,6. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2023 sama dengan indeks pada Maret 2022 yaitu sebesar 0,38.

Salah satu alat ukur untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah Koefisien Gini/ Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan (pemerataan sempurna), sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna (ketimpangan sempurna). Pada Maret tahun 2023, nilai Indeks Gini Indonesia adalah 0,39. Bila dilihat lima tahun terakhir (2019-2023) Indeks Gini relatif sama yaitu sebesar 0,38, hanya tahun 2020 dan 2023 Indeks Gini sebesar 0,39. Rincian mengenai Indeks Gini selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.d.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

GAMBAR 1.8
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2023

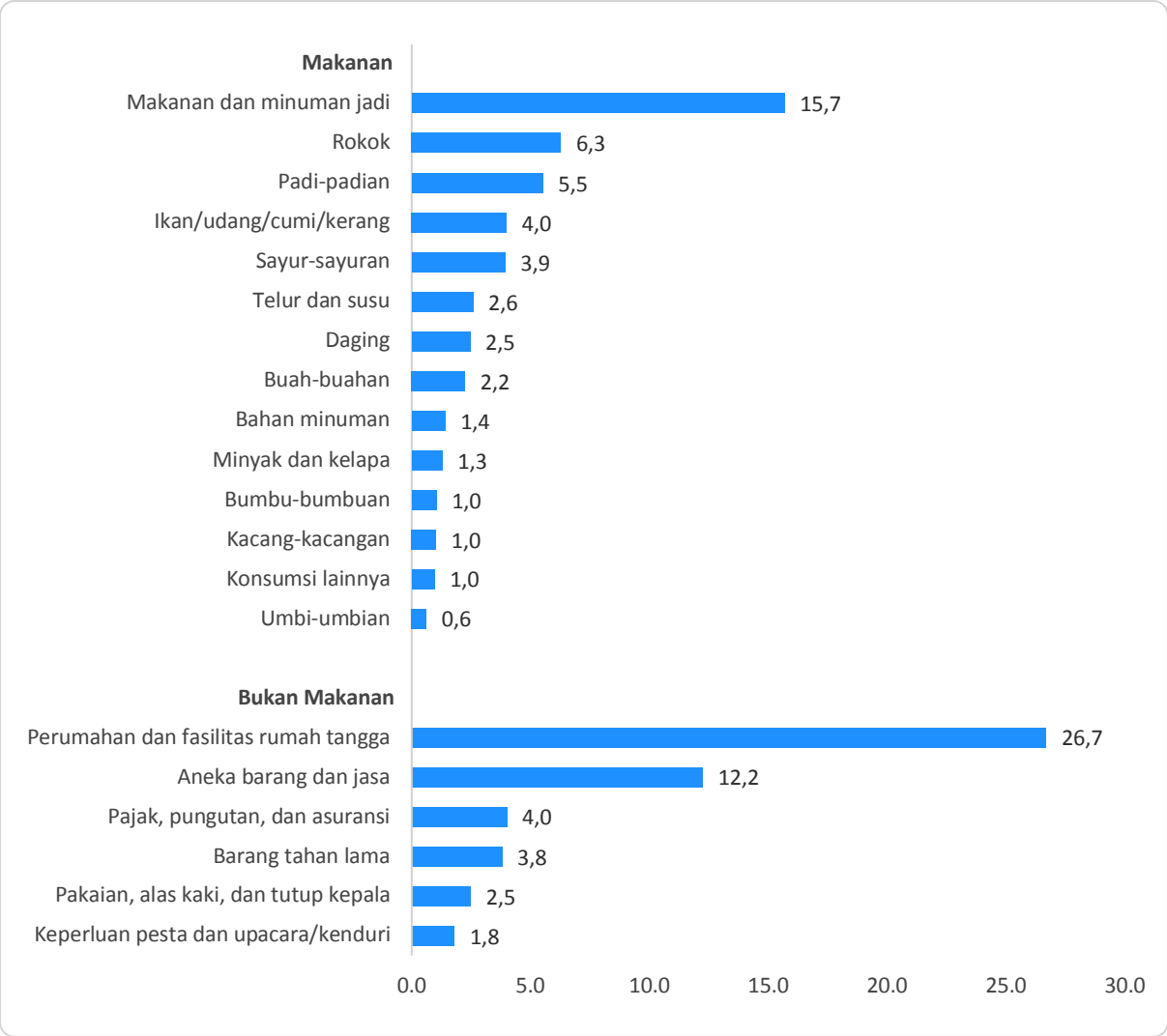

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2023, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan hampir sama besar, yaitu 48,99% untuk pengeluaran makanan dan 51,01% untuk pengeluaran bukan makanan. Dari Gambar 1.8 terlihat bahwa tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (26,7%), makanan dan minuman jadi (15,7%) dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (12,2%).

Ketenagakerjaan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, yang juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang

termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dapat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 147,71 juta orang, bertambah sekitar 3,99 juta orang (2,77%) dibanding Agustus 2022. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 sebanyak 139,85 juta orang, bertambah sebanyak 4,55 juta orang (3,37%) jika dibandingkan dengan Agustus 2022 (135,30 juta orang). TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2023 sebesar 69,48%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022 (68,63%).

Jumlah pengangguran pada Agustus 2023 mencapai 7,86 juta orang, berkurang sebanyak 0,56 juta orang (6,77%) jika dibandingkan dengan Agustus 2022 (8,42 juta orang). Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 5,32%, mengalami penurunan sebesar 0,54% poin dibanding Agustus 2022 (5,86%).

TABEL 1.2
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA (JUTA ORANG)
TAHUN 2020-2023

Angkatan Kerja	2020		2021		2022		2023	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	140,22	138,22	139,8	140,2	144,01	143,72	146,62	147,71
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,21	67,77	68,08	67,80	69,06	68,63	69,30	69,48
Jumlah Penduduk yang Bekerja	133,29	128,45	131,1	131,1	135,61	135,30	138,63	139,85
Jumlah Pengangguran Terbuka	6,92	9,76	8,75	9,10	8,40	8,42	7,99	7,85
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	7,07	6,26	6,49	5,83	5,86	5,45	5,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami penurunan pada periode tahun 2020-2023, dimana pada periode Agustus 2020 TPT tercatat sebesar 7,07% turun menjadi 5,32% pada Agustus 2023. TPT pada tahun 2022 sebesar 5,32% artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5-6 orang pengangguran. Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, adalah Banten (7,52%), Jawa Barat (7,44%), dan Kepulauan Riau (6,80%). Tingginya TPT biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

GAMBAR 1.9
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI (%)
TAHUN 2023

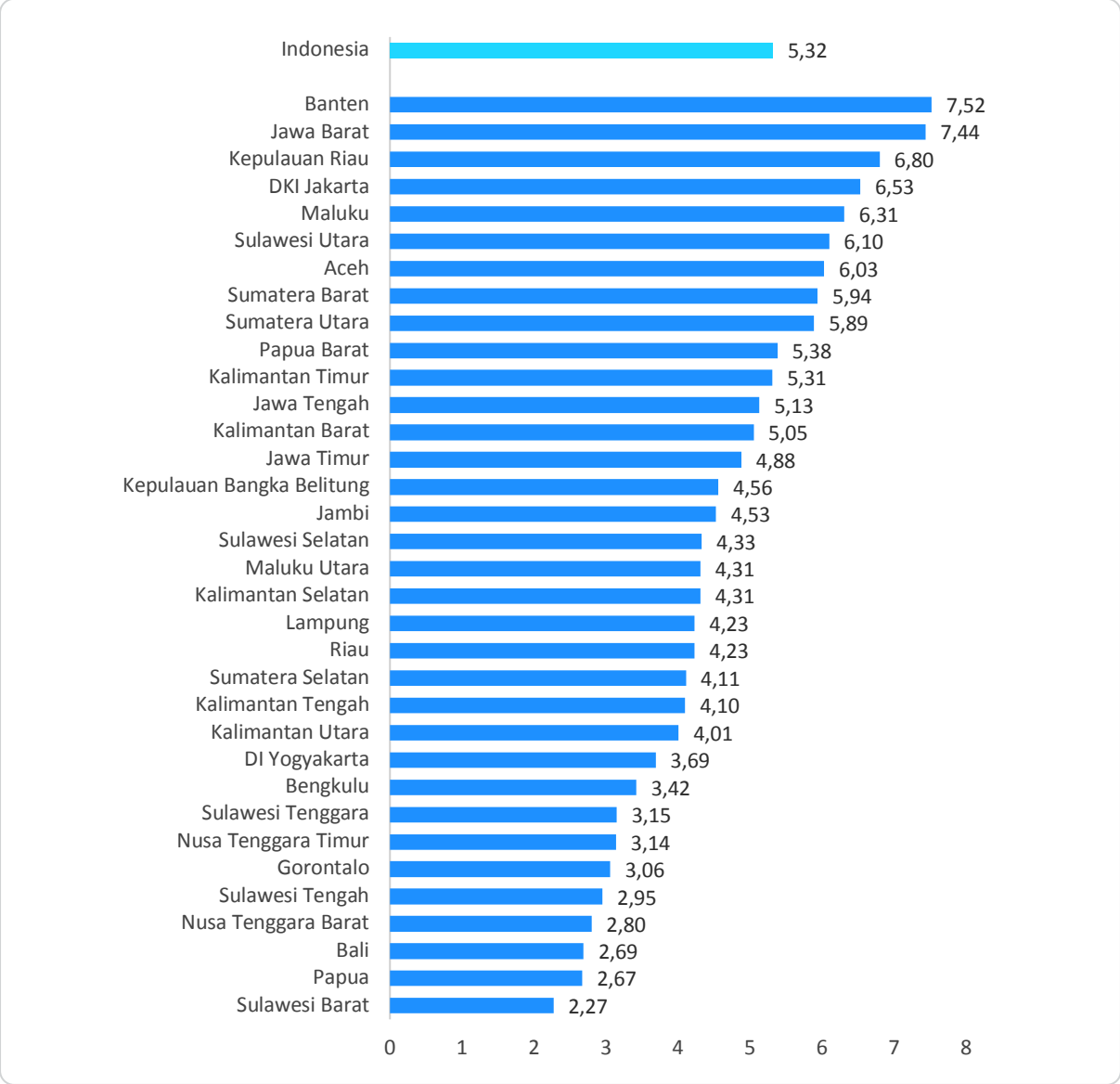

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM tangguh yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter.

Tingkat pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Pada tahun 2023, RLS penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 9,13 tahun atau setara kelas 3 SMP/Sederajat. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dibanding tahun sebelumnya.

GAMBAR 1.10
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
TAHUN 2019 – 2023

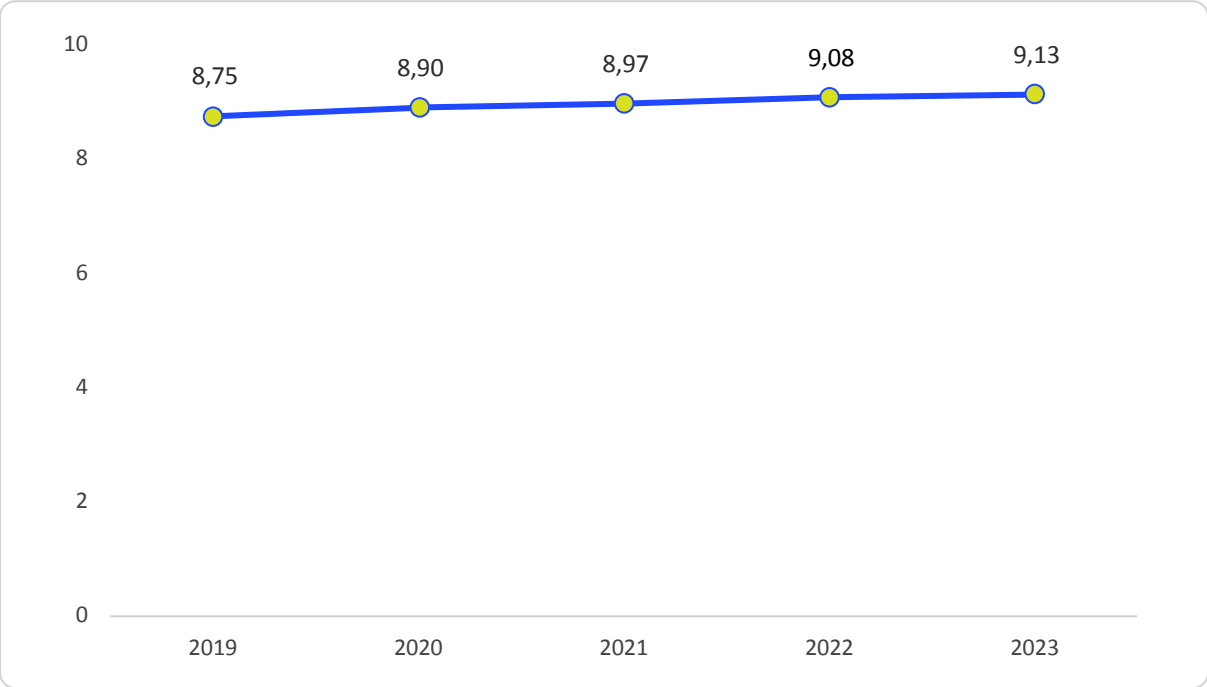

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat per provinsi, RLS yang paling rendah terdapat di Provinsi Papua (7,34 tahun) dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (11,42 tahun). Terdapat 22 provinsi (64,71%) yang sudah mencapai program wajib belajar 9 tahun. Rincian data mengenai RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.g.

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti

huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Capaian pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) terendah terjadi pada kelompok umur 15 tahun ke atas. Mayoritas penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia telah mencapai wajib belajar 9 tahun (63,11%). Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2023, AMH laki-laki (97,7%) lebih tinggi daripada AMH perempuan (95,29%). Secara rinci, AMH (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 3.h.

Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan di bidang pendidikan adalah partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Harapannya semakin tinggi tingkat partisipasi dari penduduk pada semua jenjang pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi.

GAMBAR 1.11
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
TAHUN 2021 – 2023

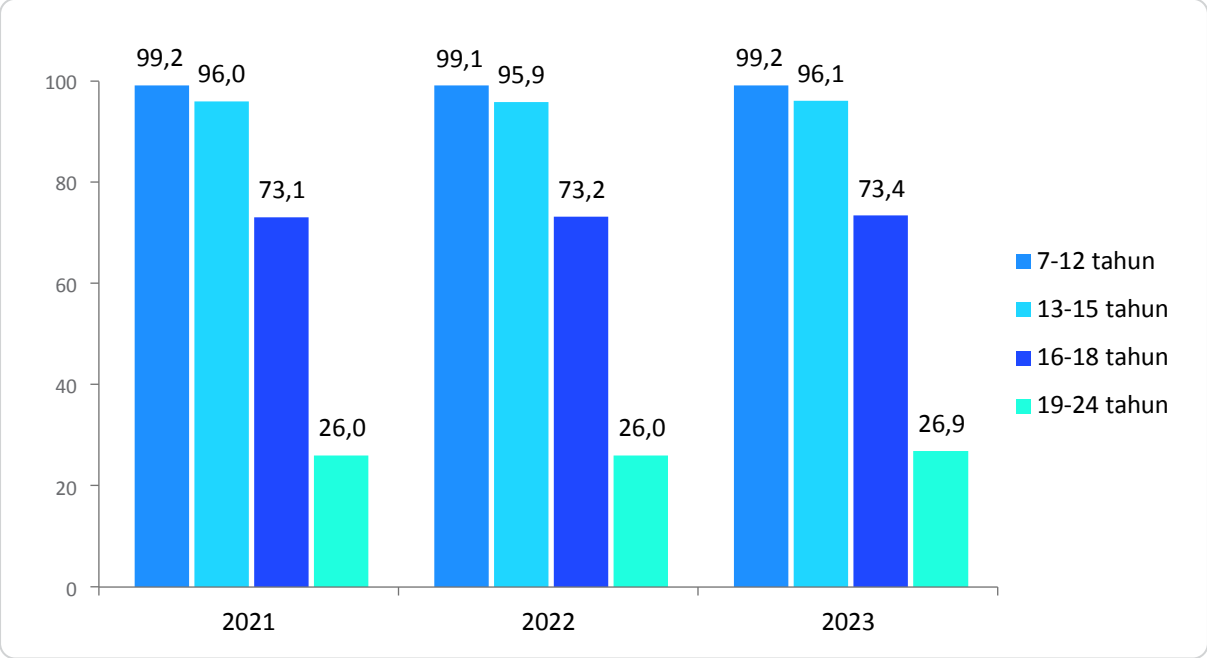

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK pada jenjang tersebut akan lebih dari 100. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya

pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Nilai APK (Gambar 1.12) untuk SD/MI tahun 2018-2021 melebihi 100% yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/sederajat). Meski demikian, dari tahun ke tahun nilainya semakin turun mendekati 100%, hal ini berarti penduduk yang bersekolah di SD/sederajat semakin banyak yang sesuai dengan peruntukan umurnya. Namun, untuk tahun 2023, angka APK untuk semua jenjang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara lengkap, nilai APK per jenjang Pendidikan per provinsi ini dapat dilihat pada lampiran 3.j.

Secara umum APK penduduk perempuan pada kelompok sekolah yang lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2023 terdapat pada Lampiran 3.k.

GAMBAR 1.12
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR
TAHUN 2019 – 2023

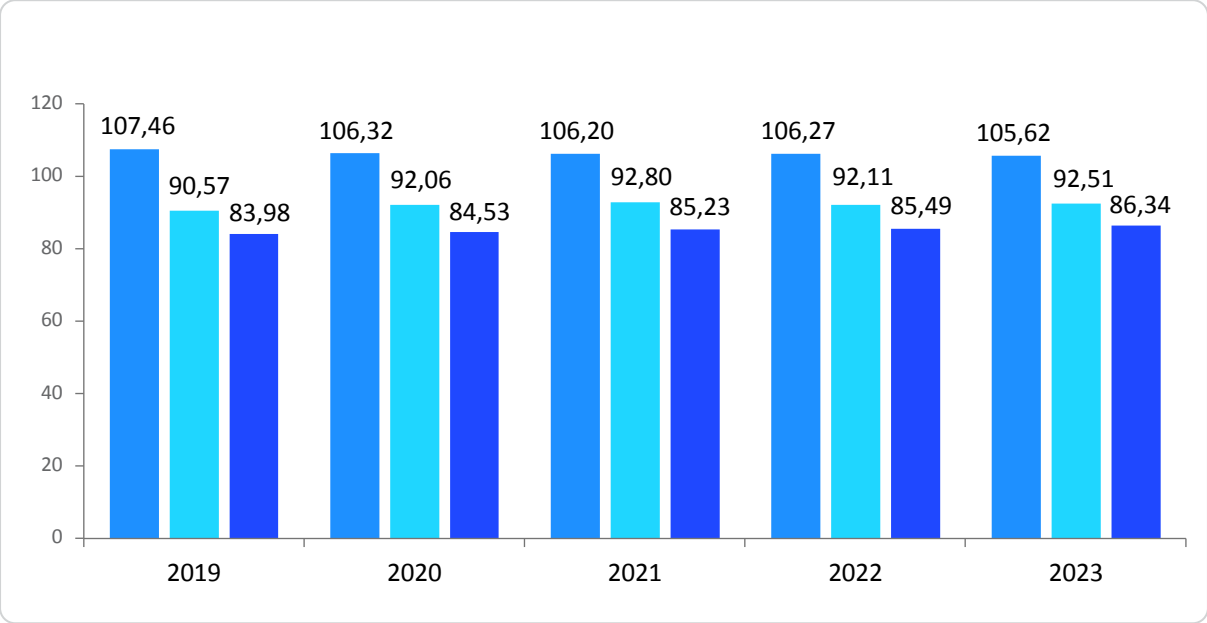

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. APM bertujuan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Secara umum, APM di setiap kelompok umur sekolah mengalami kenaikan sejak 2018 hingga 2023.

GAMBAR 1.13
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN
TAHUN 2019 – 2023

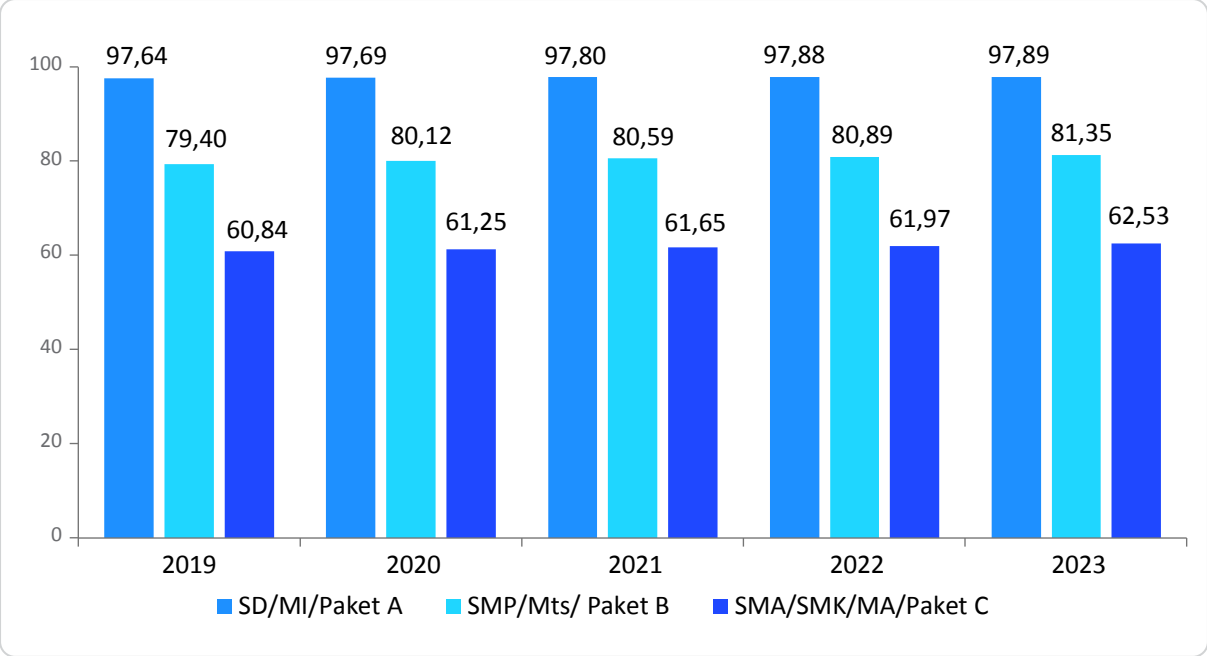

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah/negara. IPM dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat; (2) Pengetahuan; dan (3) Standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan di suatu wilayah dalam jangka panjang.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level "tinggi". Selama 2020–2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 74,39 pada 2023. Peningkatan IPM 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,38% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,15% dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,66% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,90%. Sementara itu, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat, dari 0,33% menjadi 0,31%. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,76 persen menjadi 0,92 persen.

GAMBAR 1.14
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2020 – 2023

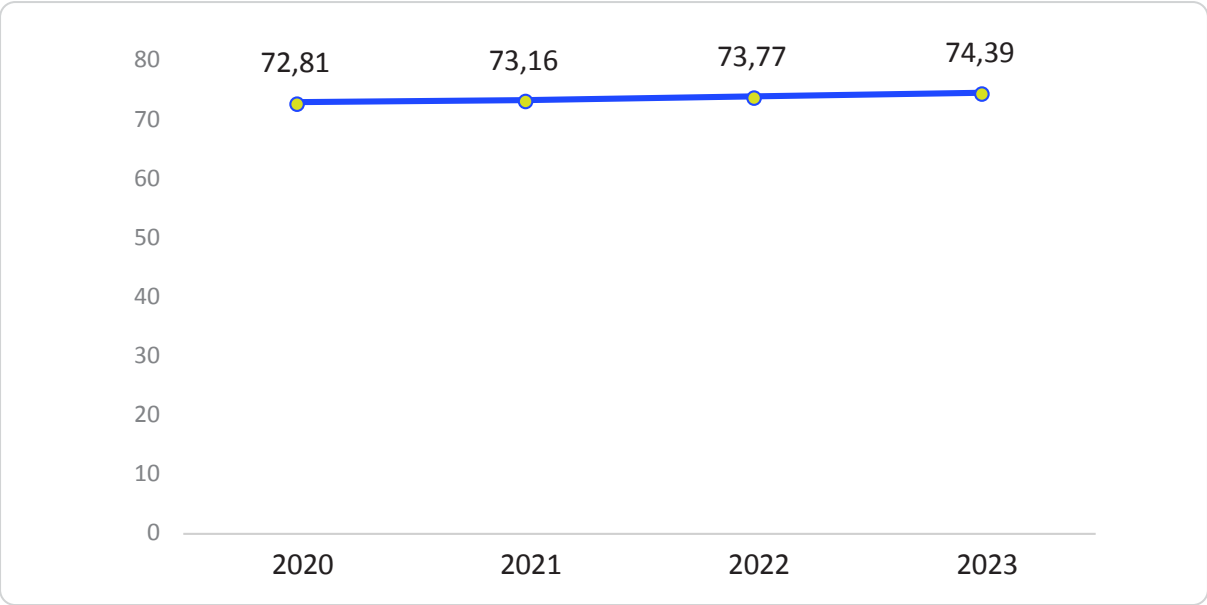

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta. Sejak pertama kali dihitung hingga tahun 2022, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta selalu paling tinggi diantara provinsi lainnya. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian, serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta setiap tahun. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 3.n.

GAMBAR 1.15
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

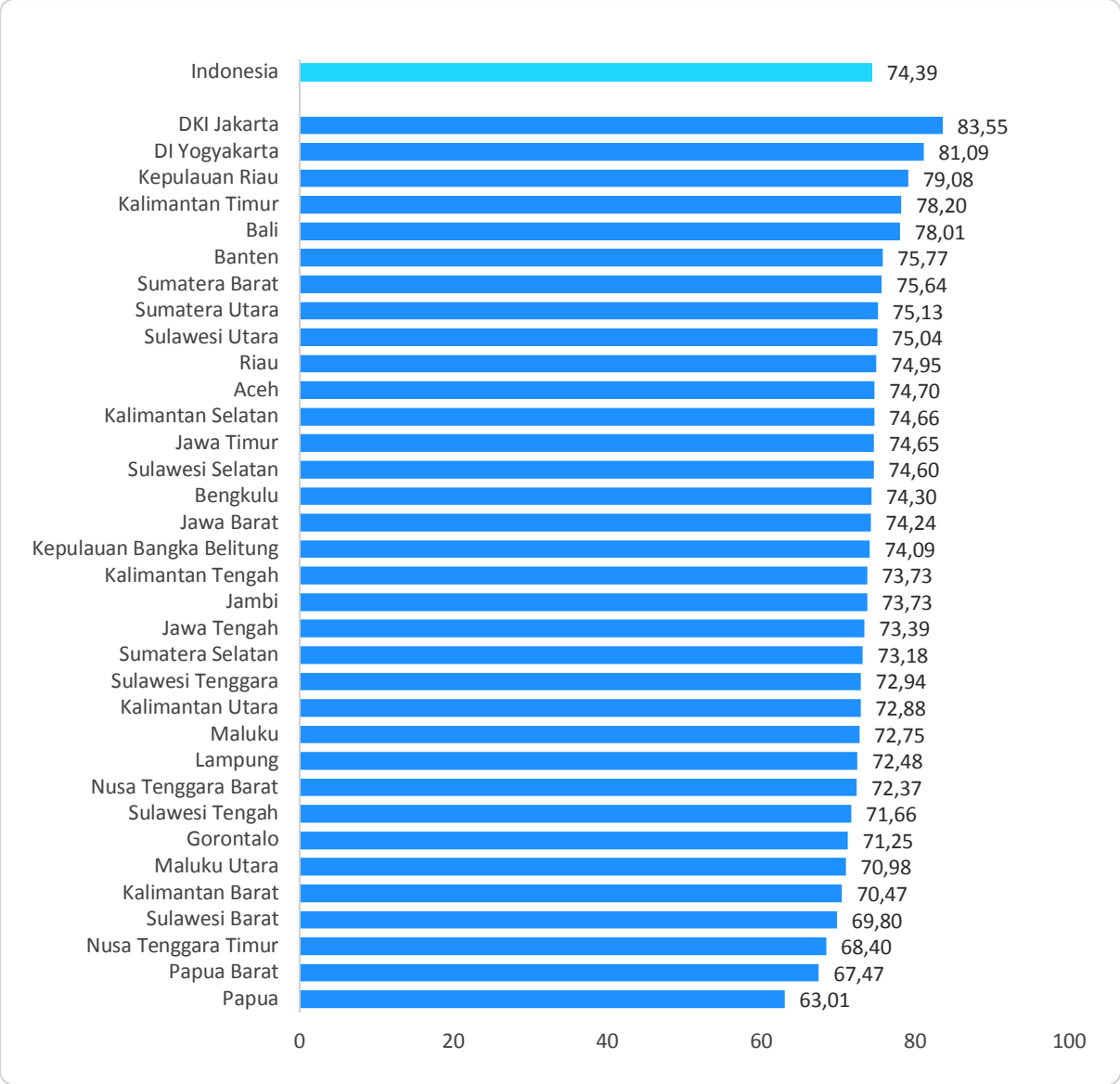

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

***

BAB II.
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

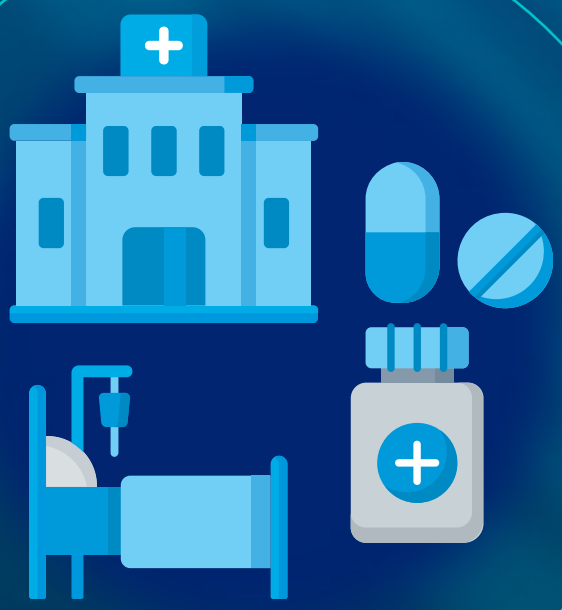

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

Tingkat kesehatan masyarakat suatu negara dapat dipengaruhi oleh adanya fasilitas layanan kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bab ini akan membahas tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari

A. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meliputi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
B. Laboratorium kesehatan;
C. Unit Transfusi Darah (UTD);
D. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang meliputi klinik utama, rumah sakit umum, rumah sakit khusus; dan
E. Fasilitas kefarmasian dan alat kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam upaya kesehatan. Proses ini dilakukan melalui fasilitasi pemecahan masalah dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, sambil memperhatikan kebutuhan, potensi, serta kondisi sosial budaya setempat.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa UKBM sebagai wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya untuk melaksanakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri dalam bidang kesehatan. Peraturan tersebut menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, melainkan yang lebih penting sebagai subjek pembangunan kesehatan yang dapat mengambil keputusan dalam mengadopsi inovasi di bidang kesehatan.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tahapan:

a. pengenalan kondisi desa/kelurahan;
b. survei mawas diri;
c. musyawarah di desa/kelurahan;
d. perencanaan partisipatif;
e. pelaksanaan kegiatan; dan
f. pembinaan kelestarian.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat didampingi oleh tenaga pendamping yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat. Tenaga pendamping dimaksud harus memiliki kemampuan sebagai tenaga pendamping yang didapat melalui pelatihan.

Pada bab II ini, UKBM yang akan diulas adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Jumlah puskesmas di Indonesia tahun 2023 adalah 10.180 puskesmas, yang terdiri dari 4.210 puskesmas rawat inap dan 5.970 puskesmas non rawat inap. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 10.374, dengan jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 4.302 dan puskesmas non rawat inap sebanyak 6.072. Penurunan jumlah puskesmas tersebut dikarenakan adanya penghapusan puskesmas. Beberapa sebab puskesmas dihapus antara lain meningkatnya status puskesmas menjadi RS pratama tipe D, restrukturisasi organisasi, dan penggabungan antara dua puskesmas. Data mengenai jumlah puskesmas ini dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 4.a dan 4.b.

GAMBAR 2.1
JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2019 – 2023

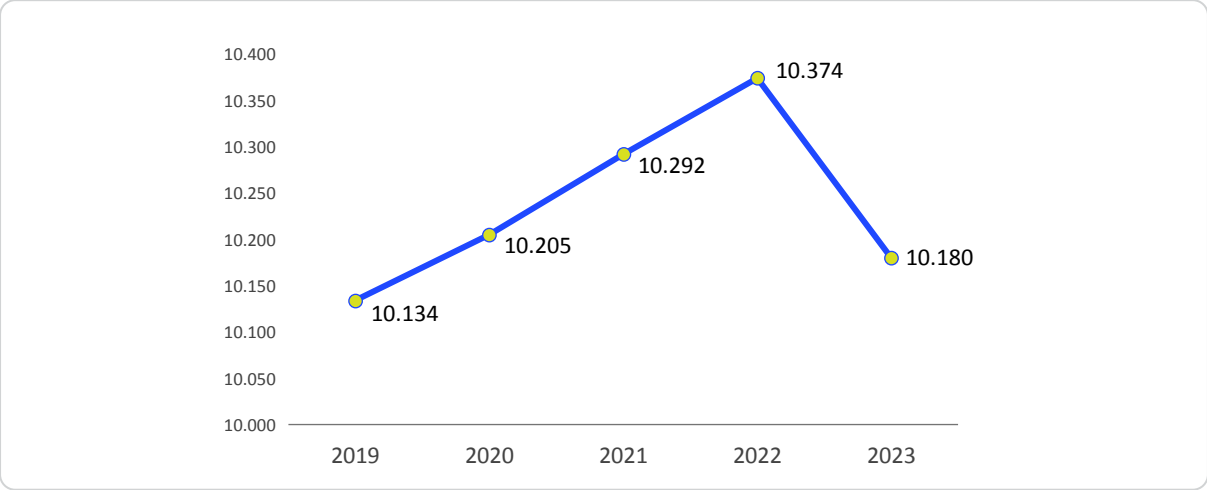

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2024

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio puskesmas terhadap kecamatan. Rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2023 sebesar 1,4. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1 puskesmas di tiap kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

GAMBAR 2.2
RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA
TAHUN 2023

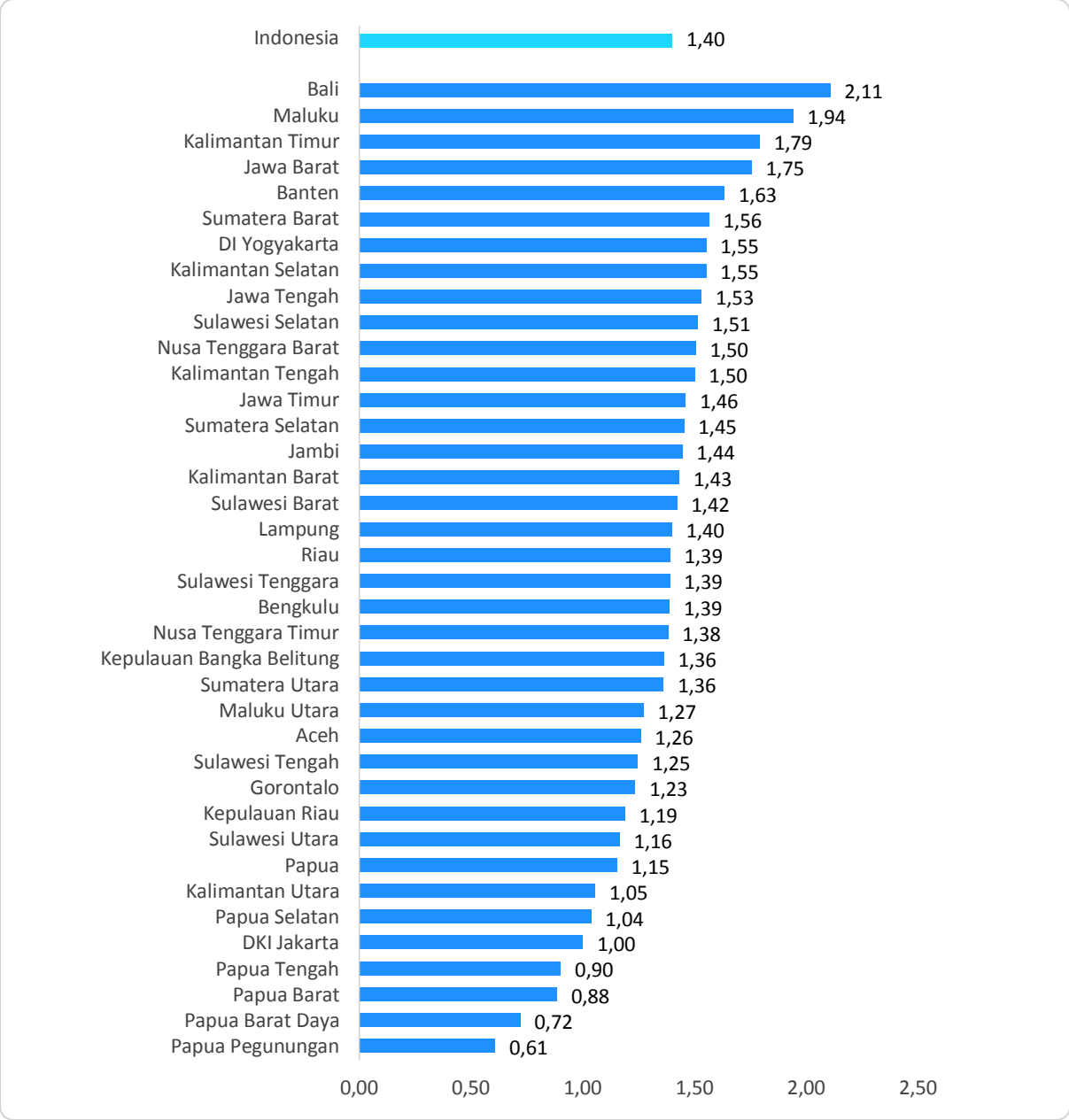

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2024; Kementerian Dalam Negeri, 2023

Rasio puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Dari gambar tersebut, provinsi dengan rasio terendah terdapat di Provinsi Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan. Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat di provinsi tersebut terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum ideal. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki puskesmas. Kemungkinan tidak adanya kecamatan yang memiliki paling sedikit 1 puskesmas karena adanya kondisi geografis yang sulit dan

rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi. Data mengenai rasio puskesmas per kecamatan setiap provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.c.

1. Akreditasi Puskemas

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagai pengganti Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 dimana akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas setelah dilakukan penilaian bahwa puskesmas telah memenuhi standar akreditasi. Pengaturan akreditasi ini bertujuan untuk:

1) meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat;
2) meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dan puskesmas sebagai institusi;
3) meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di puskesmas; dan
4) mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Setiap puskesmas wajib dilakukan akreditasi. Akreditasi dilakukan paling lambat setelah puskesmas beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Puskesmas yang telah terakreditasi wajib dilakukan akreditasi kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Dalam rangka menyelenggarakan akreditasi, menteri menetapkan lembaga penyelenggara akreditasi yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan survei akreditasi.

Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/menkes/1048/2023 tentang Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Kelas D Pratama, Puskesmas, Dan Klinik, Serta Pelaporan Indikator Nasional Mutu Bagi Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi menyatakan bahwa:

1. puskesmas yang telah melaksanakan survei akreditasi pada tahun 2023 dan memiliki sertifikat akreditasi harus melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menyusun dan melaksanakan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS).
2. puskesmas yang belum melakukan survei akreditasi pada tahun 2023 harus segera mendaftarkan survei akreditasi melalui aplikasi Lembaga Penyelenggara Akreditasi rumah sakit yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SINAR) untuk rumah sakit, dan melalui aplikasi Data Fasyankes *Online* (DFO) untuk puskesmas dan klinik, paling lambat tanggal 31 Januari 2024.
3. Waktu survei akreditasi puskesmas pada aplikasi Data Fasyankes *Online* (DFO) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan oleh puskesmas dan klinik paling lambat tanggal 31 Mei 2024.
4. Bukti pendaftaran survei akreditasi dari aplikasi Data Fasyankes *Online* (DFO) untuk puskesmas dan klinik (*screenshot* pengajuan survei di aplikasi DFO) sebagaimana dimaksud serta sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 8.250 puskesmas (81%) dari 10.180 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota Indonesia dengan kategori tingkat kelulusan sebagai berikut.

GAMBAR 2.3
PERSENTASE TINGKAT KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

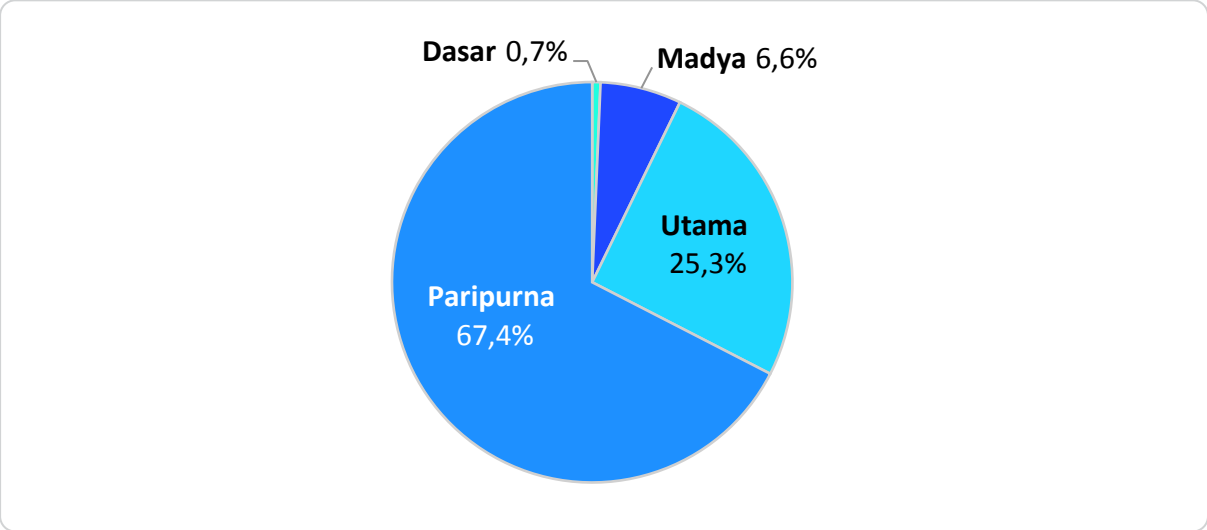

Sumber: Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Penetapan status akreditasi Puskesmas terdiri atas 5 (lima) tingkatan dengan pemenuhan masing-masing Bab pada tiap tingkatan kelulusan dengan persyaratan sebagai berikut.

TABEL 2.1
PERSYARATAN PENETAPAN KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS

Status Akreditasi	Bab Akreditasi Puskesmas				
	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
Terakreditasi Paripurna	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
Terakreditasi Utama	≥ 80%	≥ 80%	≥ 70%	≥ 80%	≥ 75%
Terakreditasi Madya	≥ 75%	≥ 75%	≥ 60%	≥ 75%	≥ 70%
Terakreditasi Dasar	≥ 75%	≥ 60%	≥ 50%	≥ 60%	≥ 60%
Tidak Terakreditasi	< 75%	< 60%	< 50%	< 60%	< 60%

Untuk kondisi per Desember 2023 didapatkan hasil akreditasi Puskesmas yang mencapai kelulusan status Paripurna sebesar 67,4%, status Utama sebanyak 25,3%, status Madya 6,6%, dan Dasar 0,7%. Setelah proses akreditasi Puskesmas wajib membuat dan menyampaikan Program Perbaikan Strategis (PPS) kepada Lembaga Penyelenggara Akreditasi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil survei dari Kementerian Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. PPS digunakan sebagai

bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi oleh lembaga penyelenggara akreditasi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi.

Puskesmas wajib mengisi formulir umpan balik pelaksanaan survei akreditasi melalui Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes (SINAF) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sertifikat akreditasi elektronik dan rekomendasi hasil survei diterima melalui Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes (SINAF). Sehingga diharapkan upaya perbaikan dilakukan memastikan tercapainya pelayanan Puskesmas yang berkualitas.

Berdasarkan Gambar 2.4, terdapat tiga provinsi yang berada jauh di bawah target Renstra Kementerian Kesehatan 2023 yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk Puskesmas pada wilayah tersebut akan didorong untuk melakukan persiapan akreditasi, dengan akan disokong dengan penganggaran melalui pembiayaan DAK Non Fisik. Dengan begitu pelaksanaan akreditasi tetap dapat dilakukan untuk menjamin bahwasannya pelayanan berkualitas adalah merata didapatkan baik di wilayah regional barat maupun regional Timur Indonesia.

GAMBAR 2.4
PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

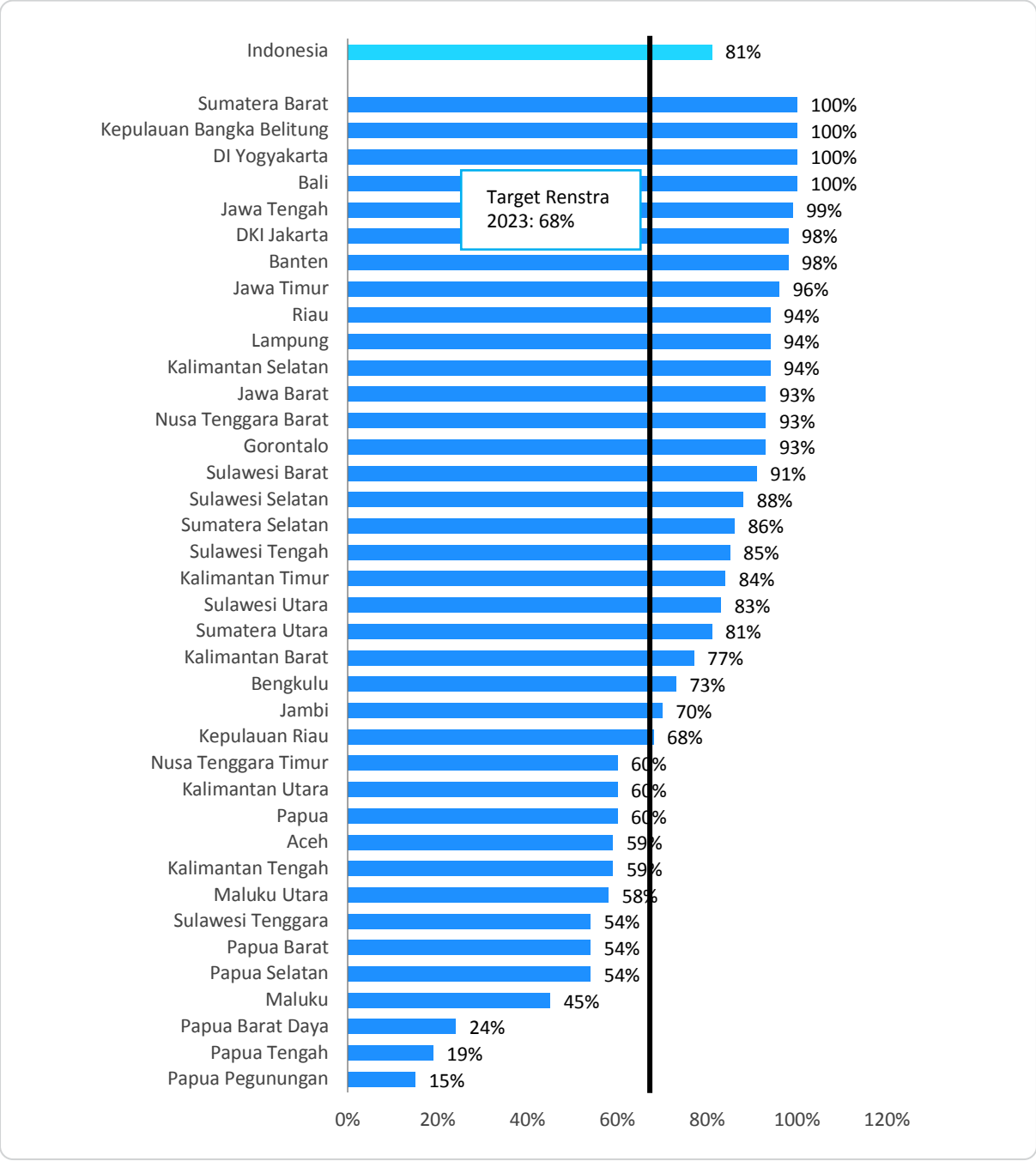

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2024

2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi atas dua kategori yaitu puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap. Berikut disajikan perkembangan jumlah puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

GAMBAR 2.5
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA
TAHUN 2019 – 2023

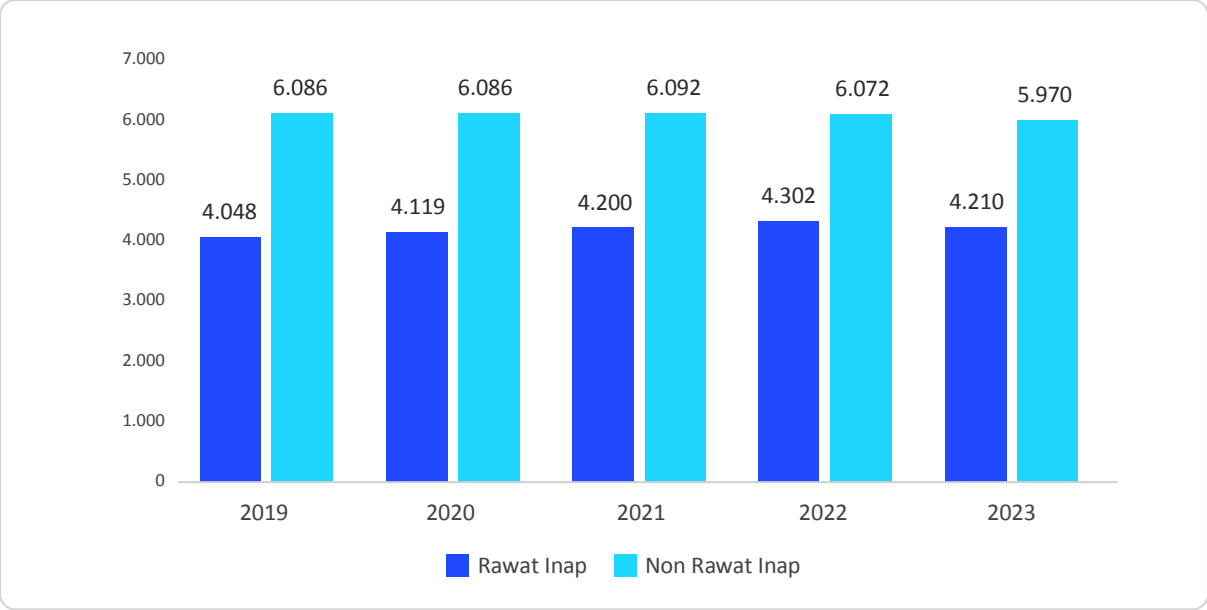

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2024

Jumlah puskesmas rawat inap selama tahun 2019-2022 jumlahnya terus meningkat, kemudian pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah puskesmas menjadi 4.210 unit (Gambar 2.5). Puskesmas non rawat inap cenderung mengalami penurunan jumlah puskesmasnya berdasarkan status pada tahun 2019, yaitu 6.086 dan pada tahun 2022 sebanyak 5.970. Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.b.

3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan

Sebuah Puskesmas dianggap memadai atau memenuhi syarat jika memiliki setidaknya satu orang dari masing-masing jenis tenaga kesehatan, meliputi: (1) dokter atau dokter layanan primer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Menurut data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), pada tahun 2023, sebanyak 56,2% Puskesmas telah memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

GAMBAR 2.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR JENIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

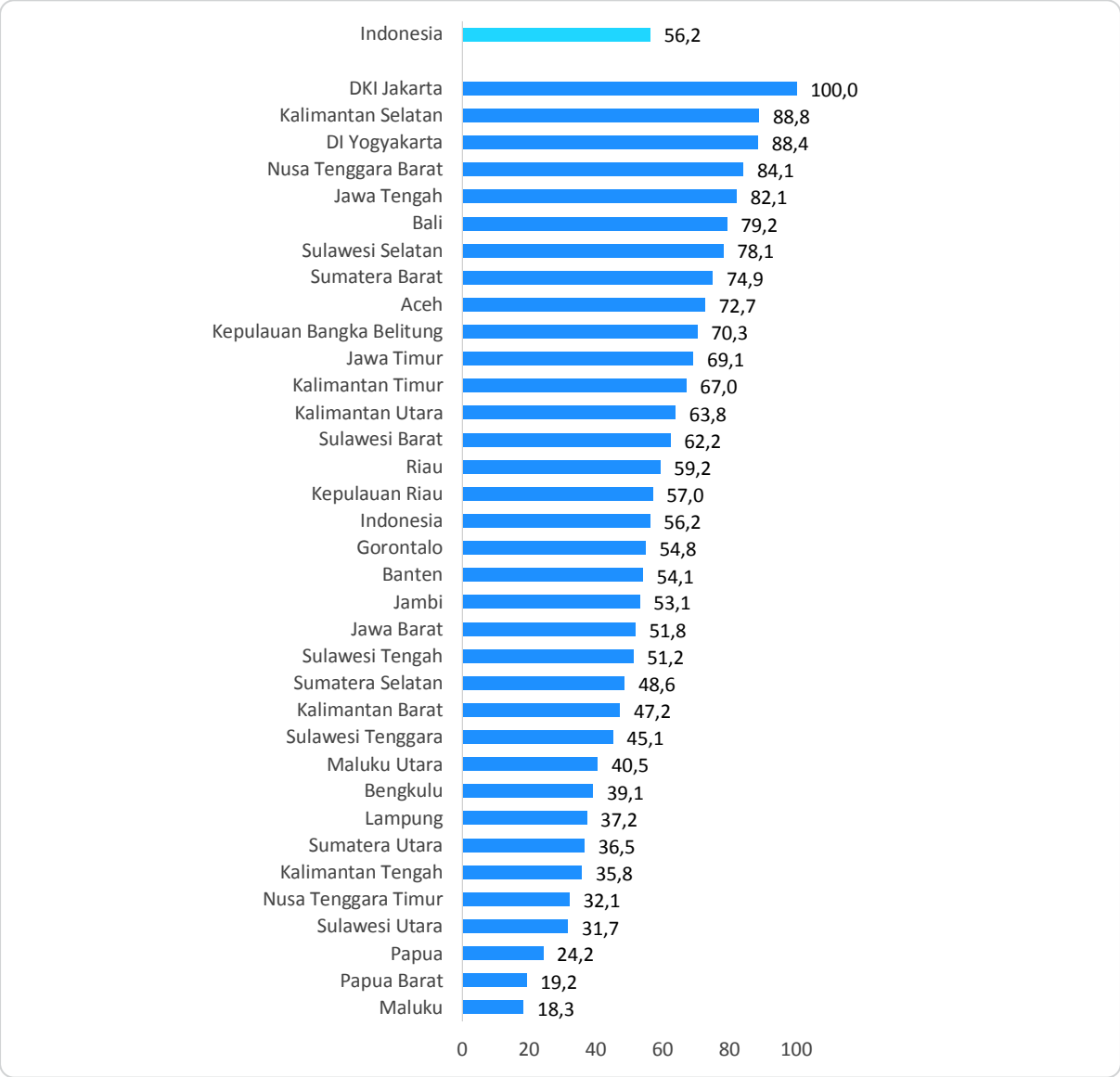

Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan Gambar 2.6, persentase provinsi dengan Puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (100%), Kalimantan Selatan (88,8%), dan DI Yogyakarta (88,4%). Sedangkan persentase provinsi dengan Puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan paling rendah adalah Provinsi Maluku (18,3%), Papua Barat (19,2%), dan Papua (24,2%). Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan dapat dilihat di Lampiran 4.e.

Derajat kesehatan masyarakat mulai membaik, meskipun jumlah tenaga kesehatan belum menjangkau seluruh penduduk. Berdasarkan data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), di tahun 2023 masih terdapat 3,2% Puskesmas tanpa dokter. Kementerian Kesehatan mengadakan program Nusantara Sehat (Penugasan Khusus Berbasis Tim dan Individu) sejak tahun 2015 dalam rangka pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas.

GAMBAR 2.7
PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

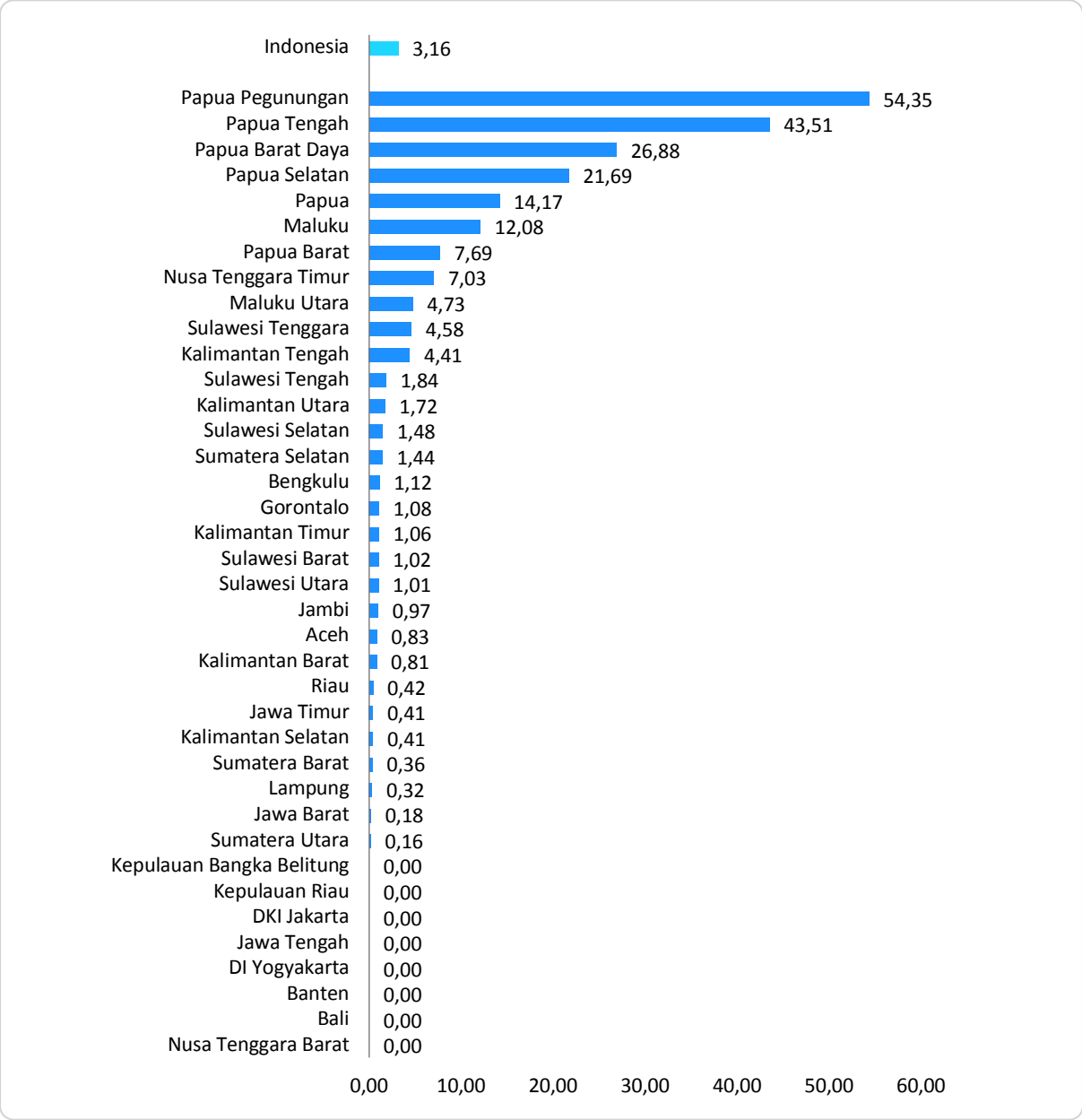

Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dengan persentase Puskesmas tanpa dokter tertinggi berdasarkan Gambar 2.7 adalah Provinsi Papua Pegunugan (54,3%), Papua Tengah (43,5%), dan Papua Barat Daya (26,9%). Sedangkan provinsi dimana seluruh puskesmas di wilayahnya memiliki dokter mencakup 8 provinsi diantaranya adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas tanpa dokter dapat dilihat di Lampiran 4.e.

4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

Upaya Kesehatan Kerja mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 98-101 yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja secara umum diatur sesuai dengan standar kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Selanjutnya, Penerapan standar kesehatan kerja dapat dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan bahaya, risiko, dan karakteristik masing-masing bidang.

Upaya Kesehatan Kerja yang dilakukan sesuai standar meliputi upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Pemberi kerja berkewajiban untuk menerapkan standar Kesehatan kerja dan memastikan seluruh pekerjanya mendapatkan hak sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerjanya. Dalam penerapannya, standar ini berkembang menjadi program Kesehatan kerja yang tidak dapat terpisahkan oleh program keselamatan kerja. Oleh karena itu, terdapat program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran, K3 Rumah Sakit, dan K3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat diterapkan oleh masing-masing instansi. Selain itu, terdapat program Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang ditujukan bagi pekerja sektor informal dan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif bagi Perusahaan dan organisasi perangkat daerah.

Agar tujuan Upaya Kesehatan kerja dapat tercapai, terukur, dan terlaksana dengan baik di setiap tempat kerja, di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan terdapat indikator terkait Kesehatan kerja. Indikator Kesehatan Kerja yang dimaksud adalah jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja. Setiap Kabupaten/kota dapat terhitung melaksanakan Kesehatan kerja, apabila:

1. Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja
2. Adanya SK/SE atau pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan program kesehatan di tempat kerja; dan
3. Melakukan Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal diantaranya Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), K3 Perkantoran, dan K3 Fasyankes.

GAMBAR 2.8
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

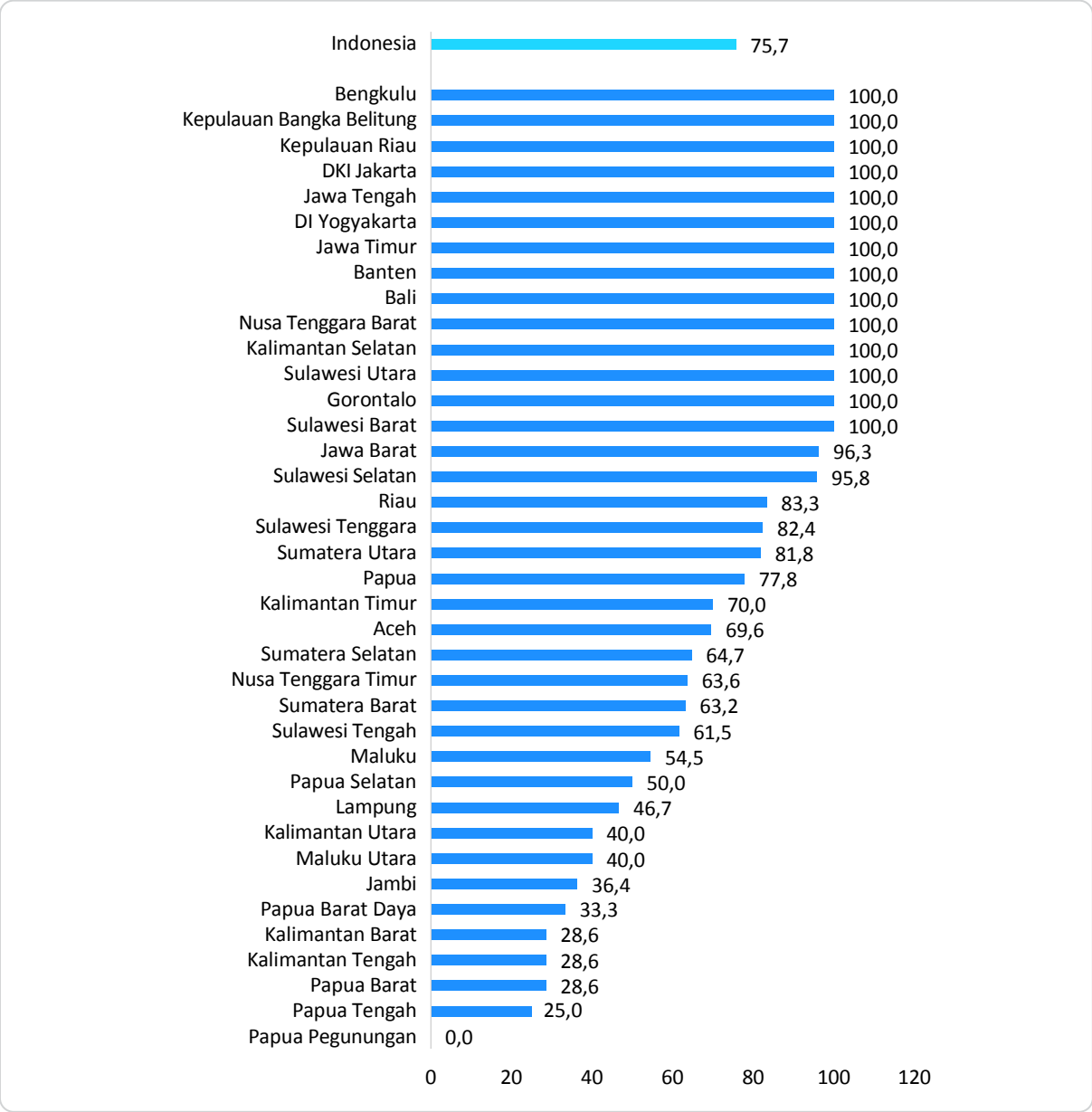

Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2024

Setiap tahunnya target RENSTRA terkait indikator kesehatan kerja berhasil tercapai, dengan capaian terakhir pada tahun 2023 sebanyak 389 kabupaten/kota sudah menerapkan kesehatan kerja. Capaian ini telah melewati target RENSTRA tahun 2023 yaitu 385 kabupaten/kota. Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 20 provinsi telah menerapkan sebesar 75% di di seluruh kabupaten/kota-nya. Oleh karena itu, pada tahun 2024, perlu adanya penguatan program Kesehatan kerja di 18 Provinsi yang capiannya masih kurang dari 75% diantaranya Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Selain Kesehatan Kerja, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 juga diatur tentang kesehatan olahraga. Pada pasal 102-103 dinyatakan bahwa Upaya Kesehatan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga.

GAMBAR 2.9
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

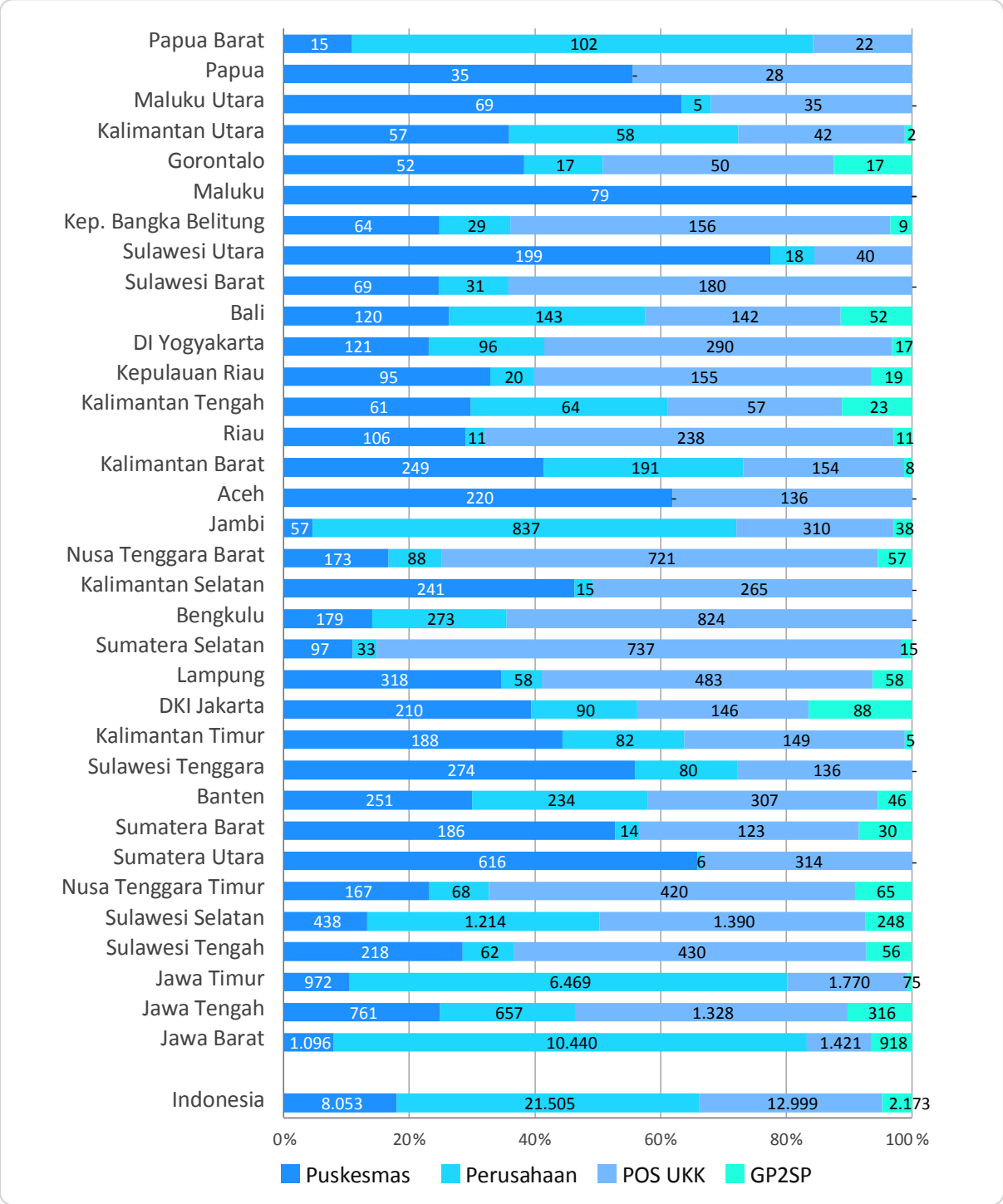

Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan RI, 2024

Pada tahun 2023, di Indonesia terdapat 8.053 Puskesmas, 21.505 perusahaan, 12.999 Pos UKK, dan 2.173 GP2SP yang menyelenggarakan kesehatan kerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja.

Dari gambar 2.10, pada tahun 2023 di Indonesia, jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani sebanyak 4.033 instansi, jumlah pembinaan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi jemaah haji sebanyak 44.418 jemaah, dan jumlah kelompok olahraga sebanyak 14.292 kelompok. Gambaran lebih rinci tentang pelaksanaan kesehatan kerja, pengukuran dan pemeriksaan kebugaran menurut provinsi terdapat pada Lampiran 8.h.

GAMBAR 2.10
JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA
TAHUN 2023

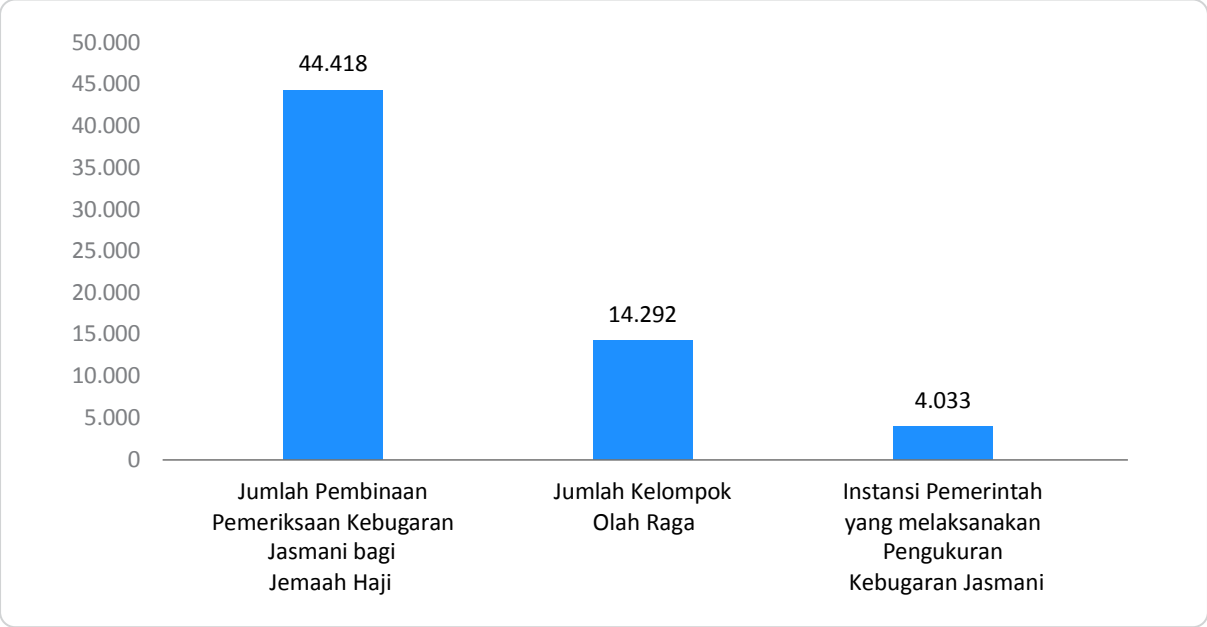

Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2024

Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan prestasi olahraga. Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

5. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bentuk pengobatan dan perawatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris. Metode ini dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi tiga jenis: empiris, komplementer, dan integrasi. Pelayanan kesehatan tradisional telah dilaksanakan di 350 puskesmas, 16 rumah sakit, dan 16 Griya Sehat.

Berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 13 Tahun 2022, indikator terkait kesehatan tradisional masuk sebagai salah satu komponen dalam indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yaitu memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional. Pada tahun 2023, sebanyak 379 kabupaten/kota di 38 provinsi terlibat dalam pembinaan kesehatan tradisional.

GAMBAR 2.11
KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

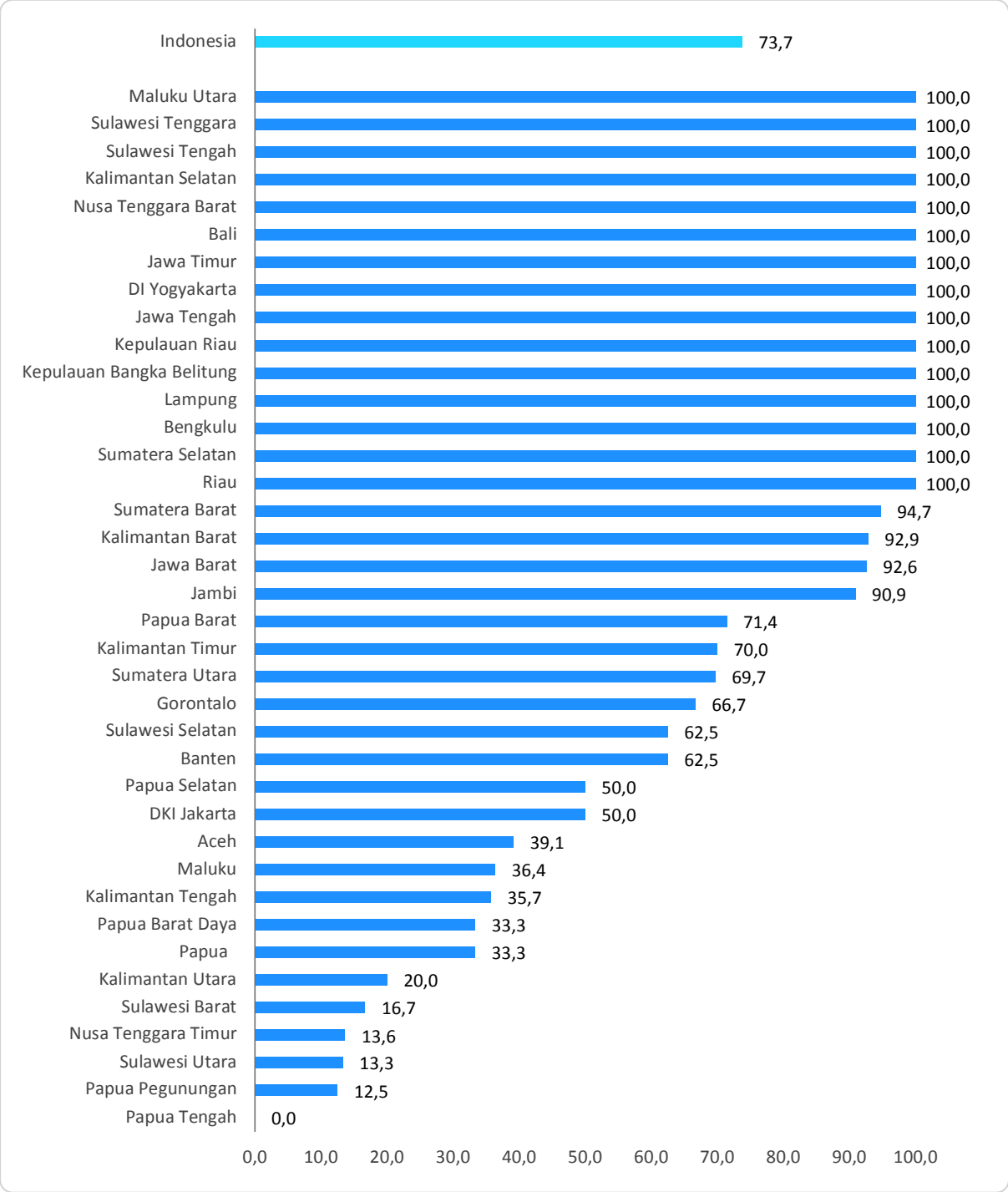

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

B. KLINIK, PRAKTIK MANDIRI TENAGA MEDIS, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM

1. Klinik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, klinik merupakan salah satu jenis fasilitas Pelayanan kesehatan (fasyankes). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik secara komprehensif. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/4392/2020 tentang Registrasi Klinik, Kementerian Kesehatan telah menghimbau seluruh klinik di Indonesia melakukan registrasi klinik secara daring melalui aplikasi berbasis *website* pada alamat registrasi fasyankes.kemkes.go.id. Berdasarkan data pada aplikasi tersebut per Desember 2023, terdapat 17.261 klinik teregistrasi di Indonesia yang dimiliki oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, dan Pemerintah Daerah), dan swasta (masyarakat).

Berdasarkan kemampuan pelayanan klinik, terdapat 14.564 klinik pratama dan 2.697 klinik utama, sedangkan berdasarkan kepemilikan klinik terdapat 1.950 klinik Pemerintah dan 15.311 klinik swasta. Data mengenai klinik teregistrasi secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.12 dan lampiran 4.h.

GAMBAR 2.12
PROPORSI KLINIK TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2023

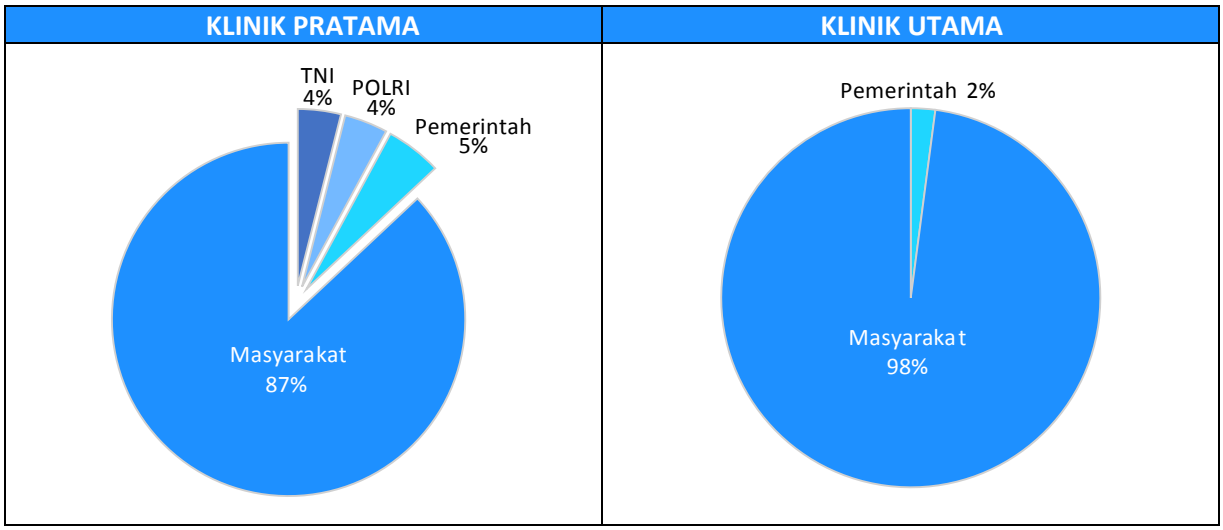

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

GAMBAR 2.13
JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023

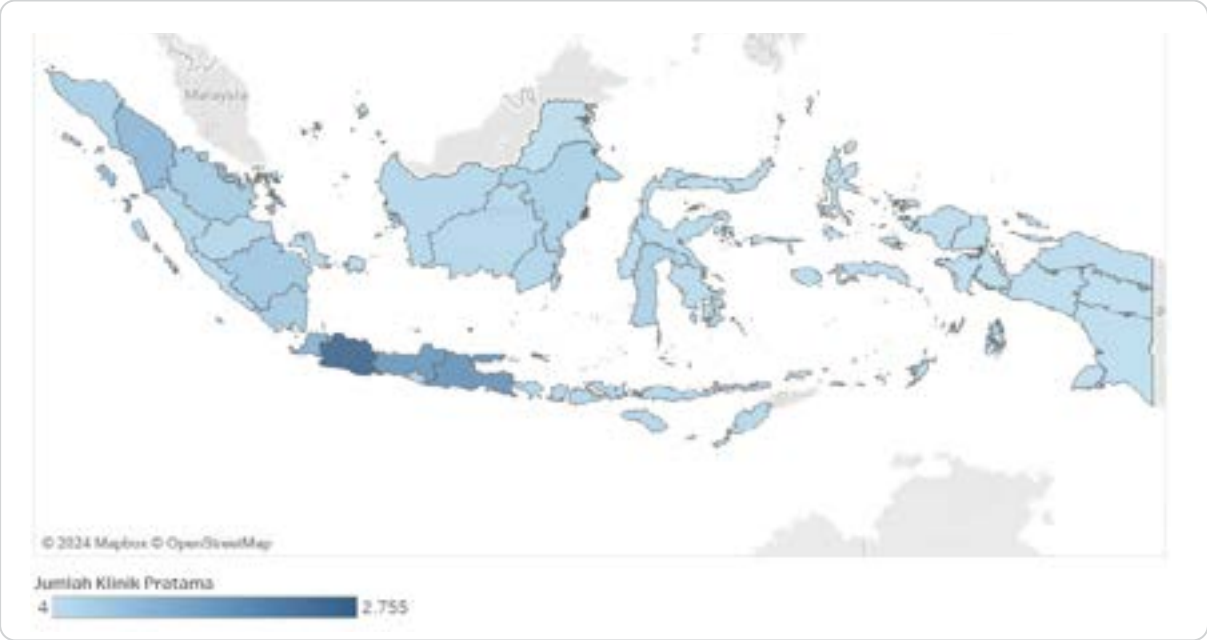

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dengan jumlah klinik pratama teregistrasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 2.755 klinik. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik pratama paling sedikit adalah Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 4 klinik.

GAMBAR 2.14
JUMLAH KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dengan jumlah klinik utama teregistrasi paling banyak adalah Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 628 klinik. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik utama paling sedikit adalah Provinsi Papua Selatan, sebanyak 0 klinik.

2. Praktik Mandiri Tenaga Medis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik mandiri tenaga medis merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Praktik mandiri tenaga medis meliputi Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG). Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/4406/2021 tentang Registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menghimbau kepada dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melakukan praktik mandiri agar dapat segera melakukan proses registrasi *online* melalui aplikasi berbasis *website* pada alamat registrasifasyankes.kemkes.go.id. Berdasarkan data pada aplikasi tersebut per Desember 2023, terdapat 12.411 praktik mandiri tenaga medis telah Teregistrasi meliputi sebanyak 8.465 TPMD dan 3.946 TPMDG.

Data mengenai praktik mandiri tenaga medis ini dapat dilihat pada lampiran 4.i.

GAMBAR 2.15
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER (TPMD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

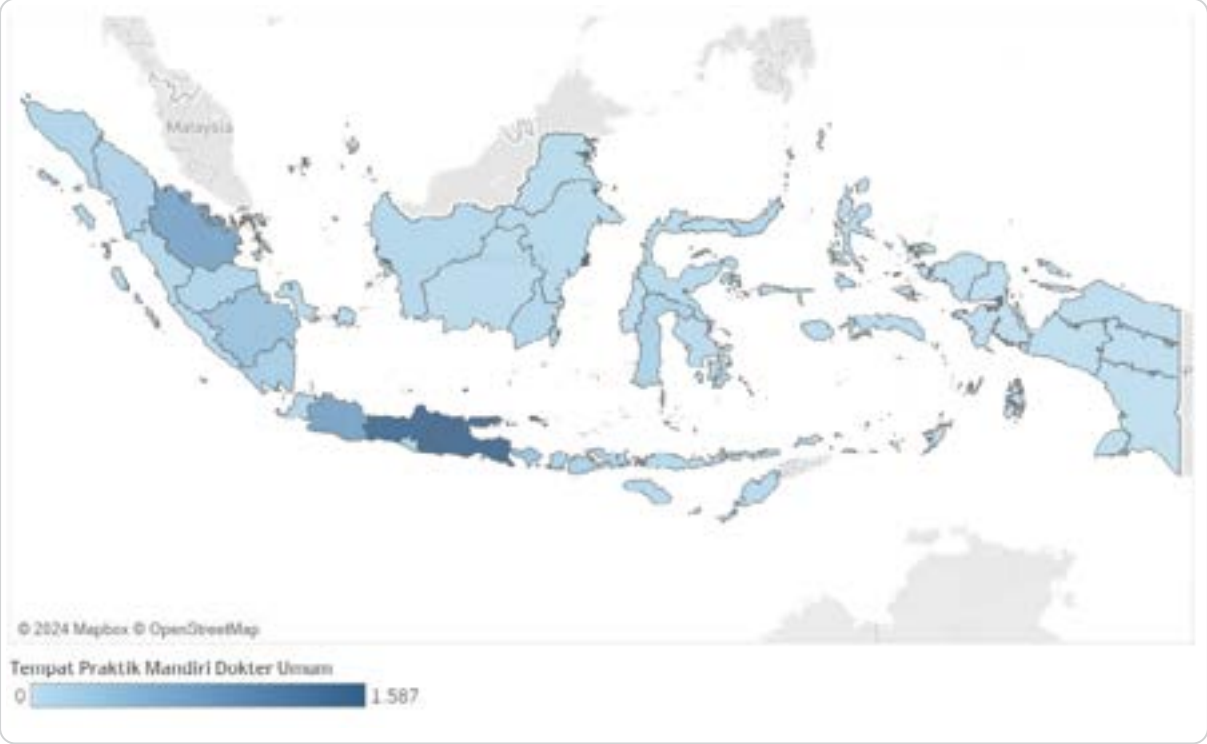

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dengan jumlah TPMD teregistrasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.587 TPMD. Sedangkan provinsi dengan jumlah TPMD paling sedikit adalah Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 0 TPMD.

GAMBAR 2.16
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI (TPMDG) KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

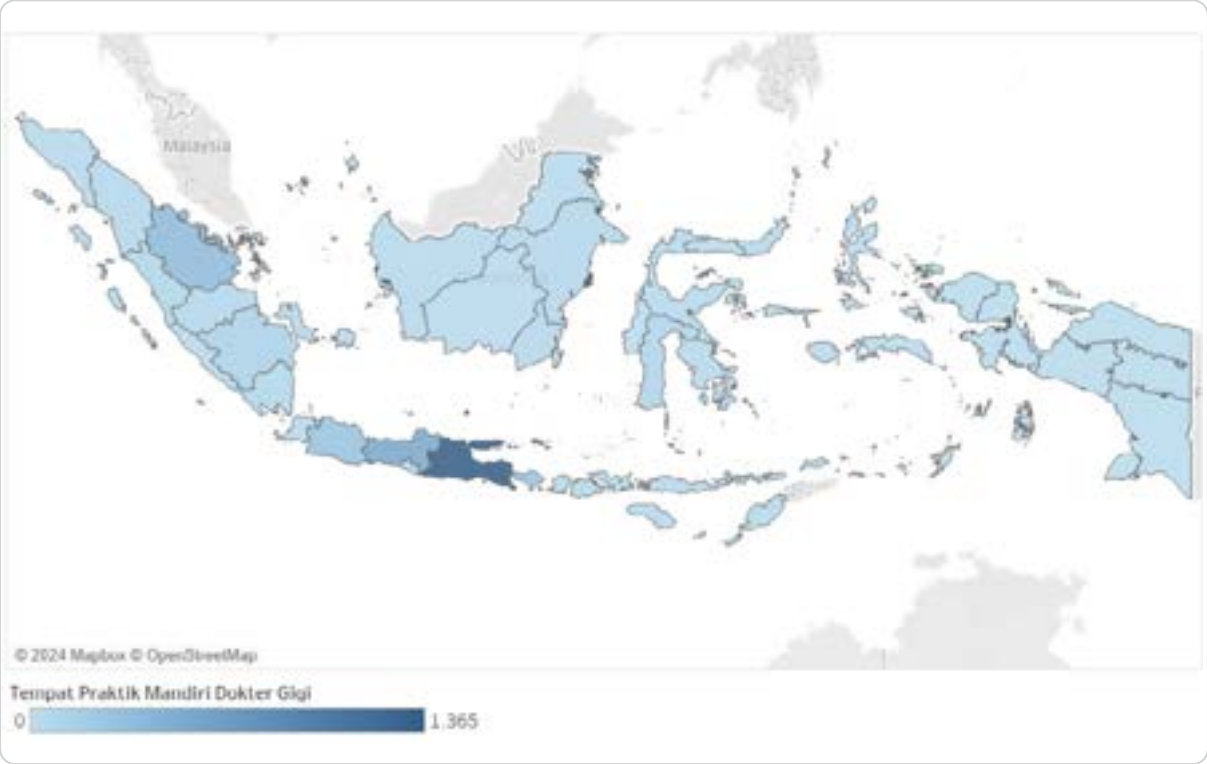

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dengan jumlah TPMDG teregistrasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 1.365 TPMD. Sedangkan provinsi dengan jumlah TPMDG paling sedikit adalah Provinsi Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, sebanyak 0 TPMDG.

3. Unit Transfusi Darah

Berdasarkan data dari aplikasi registrasi fasyankes, per Desember 2023 terdapat 408 UTD teregistrasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Pada tahun 2023, provinsi dengan total jumlah UTD teregistrasi paling banyak yaitu Provinsi Jawa Timur sebanyak 41 UTD, sementara itu provinsi yang memiliki UTD teregistrasi paling rendah adalah Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan (0 UTD). Data selengkapnya mengenai UTD teregistrasi dapat dilihat pada Gambar 2.17 dan lampiran 4.k.

GAMBAR 2.17
JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

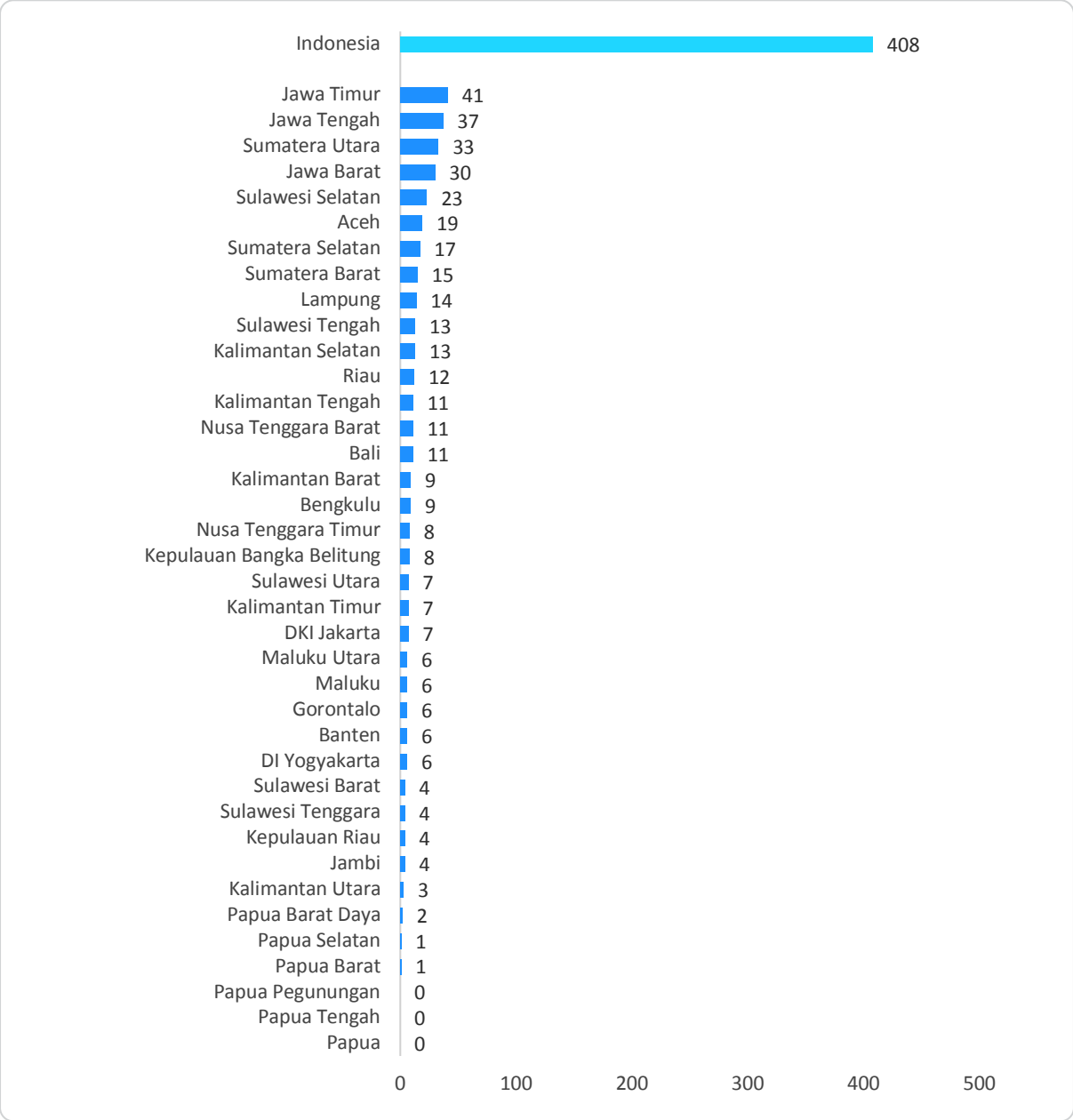

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

C. LABORATORIUM KESEHATAN

Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahkan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat. Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan. Laboratorium kesehatan diperlukan untuk memeriksa, menganalisis, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

Jumlah seluruh laboratorium kesehatan di Indonesia sebanyak 1.487, dan sebanyak 327 (22%) laboratorium sudah terakreditasi. Laboratorium terakreditasi terbanyak dimiliki oleh swasta yaitu sebanyak 1.218 (50,2%). Data mengenai laboratorium kesehatan dapat dilihat pada lampiran 4.j.

GAMBAR 2.18
LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
TAHUN 2023

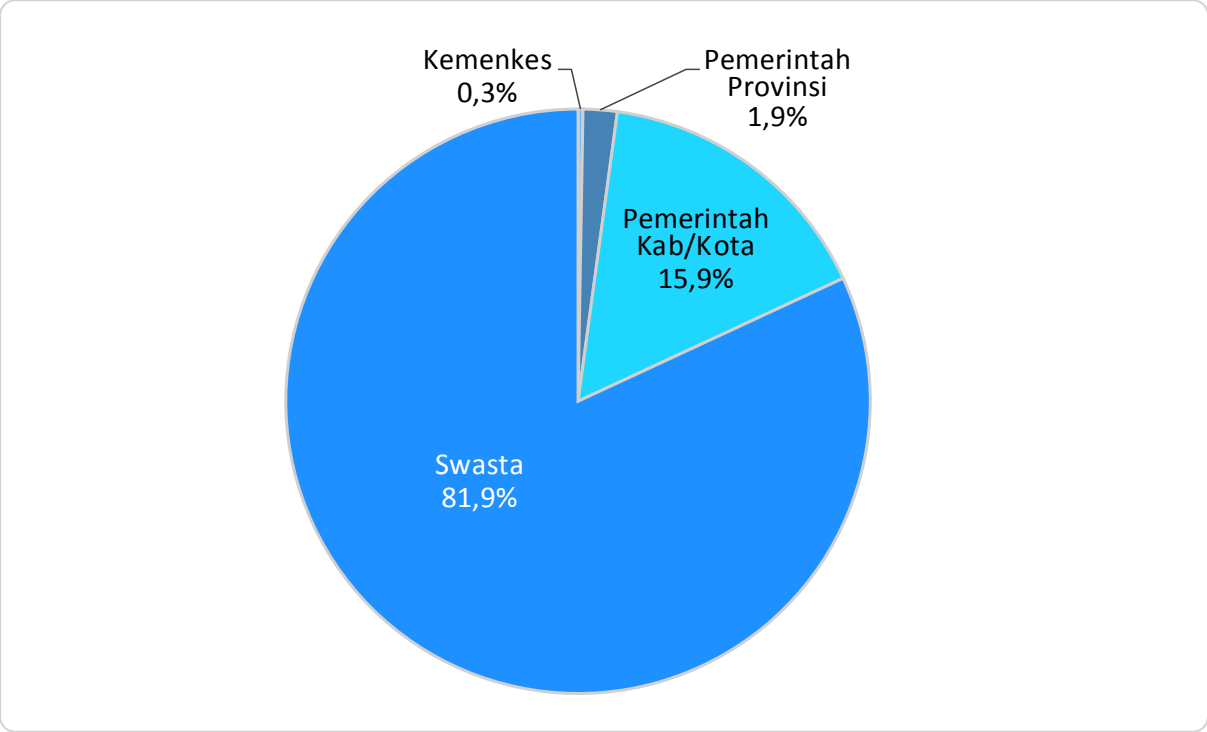

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah laboratorium kesehatan terbanyak, yaitu sebanyak 290 laboratorium. Provinsi terbanyak kedua yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 218, dan terbanyak ketiga yaitu Provinsi Jawa Tengah (180 laboratorium). Sebanyak 3 provinsi memiliki laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya (0 laboratorium).

GAMBAR 2.19
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN TERAKREDITASI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

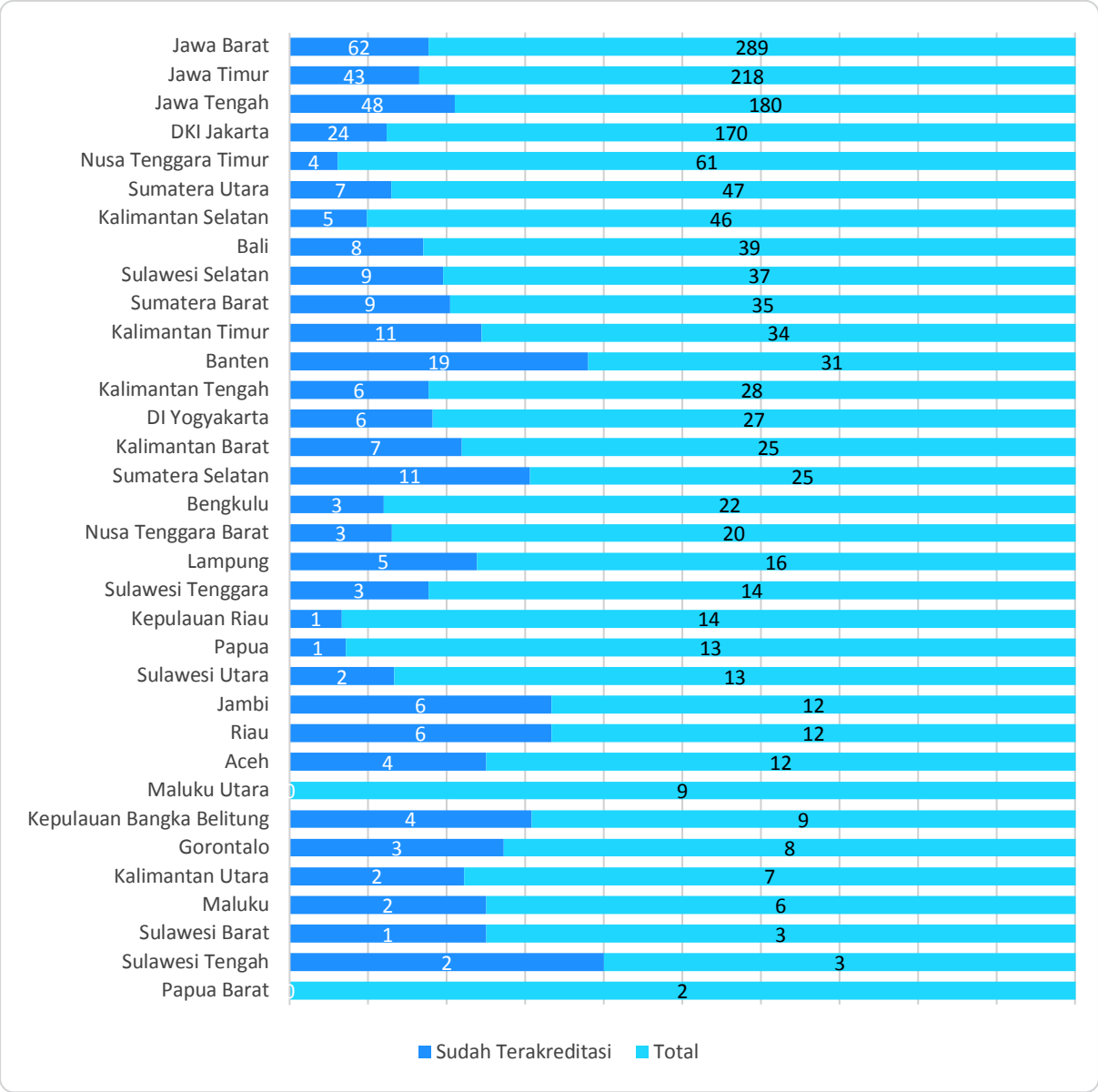

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2024

D. RUMAH SAKIT

Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain menyediakan upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, rumah sakit juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diklasifikasikan atau dikelompokkan kelasnya berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.

1. Jenis Rumah Sakit

Rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan diselenggarakan oleh berbagai instansi atau lembaga, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, BUMN, dan swasta. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK).

Selama tahun 2019-2023 jumlah rumah sakit di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 9,7%. Pada tahun 2019 jumlah rumah sakit sebanyak 2.877 meningkat menjadi 3.155 pada tahun 2023. Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2023 terdiri dari 2.636 RSU dan 519 RSK. Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.20.

GAMBAR 2.20
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2019 – 2023

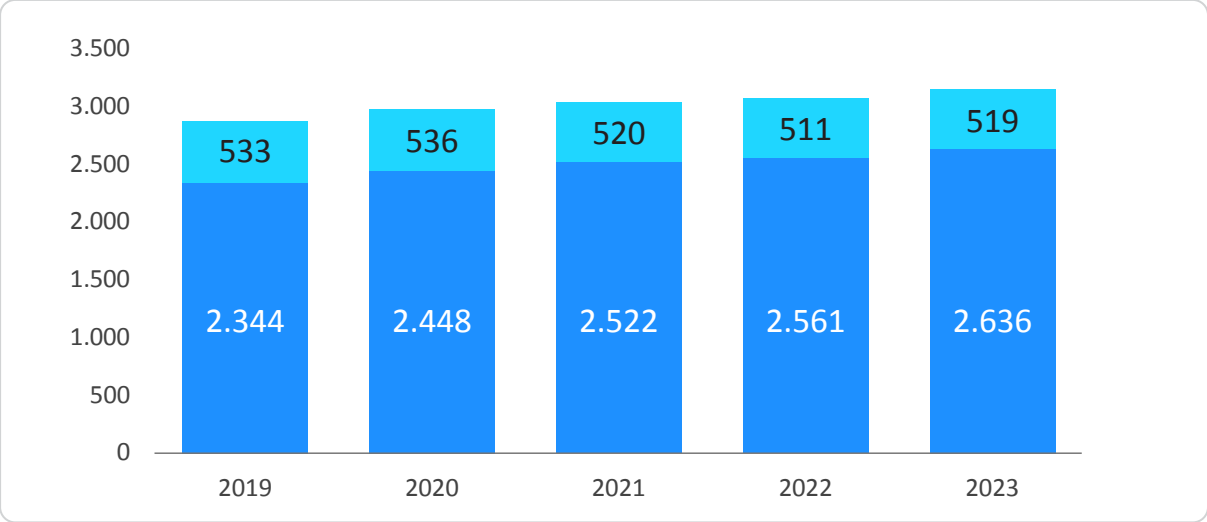

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023, Rumah Sakit Umum (RSU) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebanyak 242 (9,2%), pemerintah daerah sebanyak 849 (32,2%), dan swasta 1.545 (58,6%). Adapun rincian jumlah rumah sakit menurut jenis, kepemilikan, dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 8.a.

TABEL 2.2
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN DI INDONESIA TAHUN 2019 – 2023

No	Penyelenggara	2019	2020	2021	2022	2023
PEMERINTAH PUSAT		**228**	**230**	**236**	**241**	**242**
1	Kementerian Kesehatan	18	19	19	20	20
2	TNI/POLRI	159	160	164	165	163
3	Kementerian Lain dan BUMN	51	51	53	56	59
PEMERINTAH DAERAH		**732**	**773**	**790**	**817**	**849**
1	Pemerintah Provinsi	92	97	96	97	98
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	640	676	694	720	751
SWASTA		**1384**	**1445**	**1496**	**1503**	**1545**
Total Keseluruhan		**2344**	**2448**	**2522**	**2561**	**2636**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

2. Tipe Rumah Sakit

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Jumlah rumah sakit (RS) di Indonesia menurut kelas terbanyak yaitu tipe C sebesar 1.683 (53%) RS, kemudian kelas D dan D Pratama sebesar 946 (30%) RS , kelas B sebesar 437 (14%) RS, dan kelas A sebesar 70 (2,0%) RS, sedangkan selebihnya merupakan RS yang belum ditetapkan kelasnya sebesar 19 (1,0%) RS.

GAMBAR 2.21
JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2023

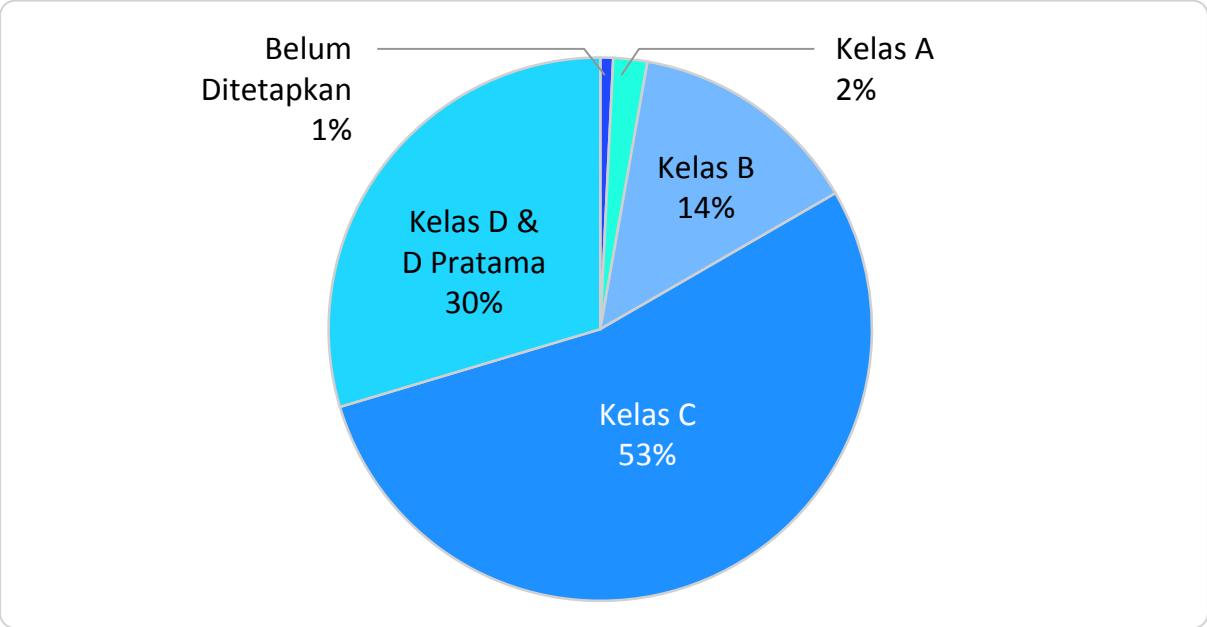

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2024

3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit

Dalam standar *World Health Organization* (WHO), standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2023 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk. Untuk tahun 2023, rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia adalah 1,38 per 1.000 penduduk (Gambar 2.22). Sehingga, jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia sudah tercukupi menurut standar WHO.

GAMBAR 2.22
RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2019 – 2023

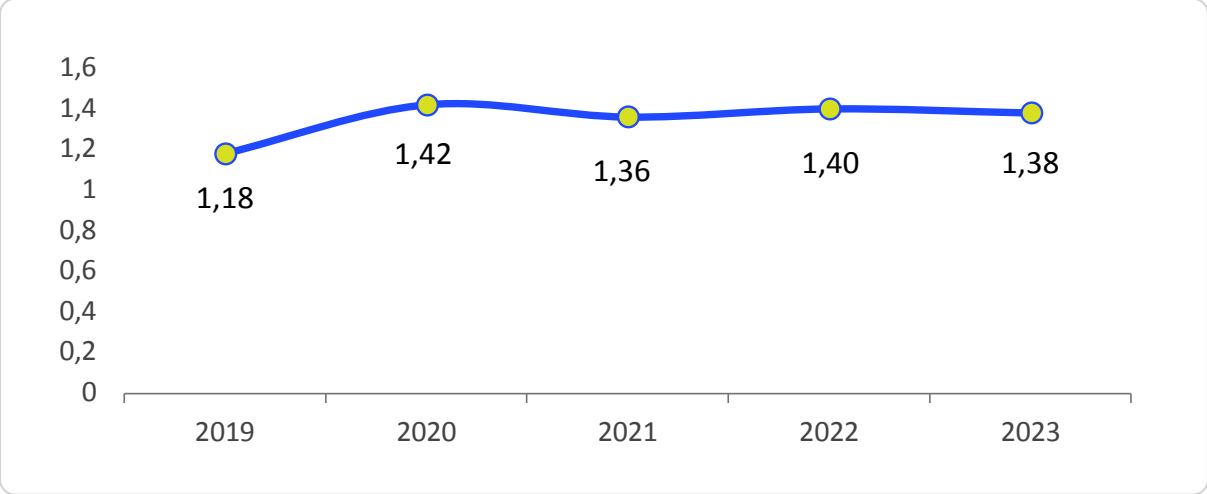

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2024

Rasio tempat tidur menurut provinsi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara (2,7 per 1.000 penduduk) dan terdapat dua provinsi yang masih berada dibawah standar WHO yaitu Provinsi Papua Tengah (0,7 per 1.000 penduduk) dan Papua Pegunungan (0,4 per 1.000 penduduk).

GAMBAR 2.23
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

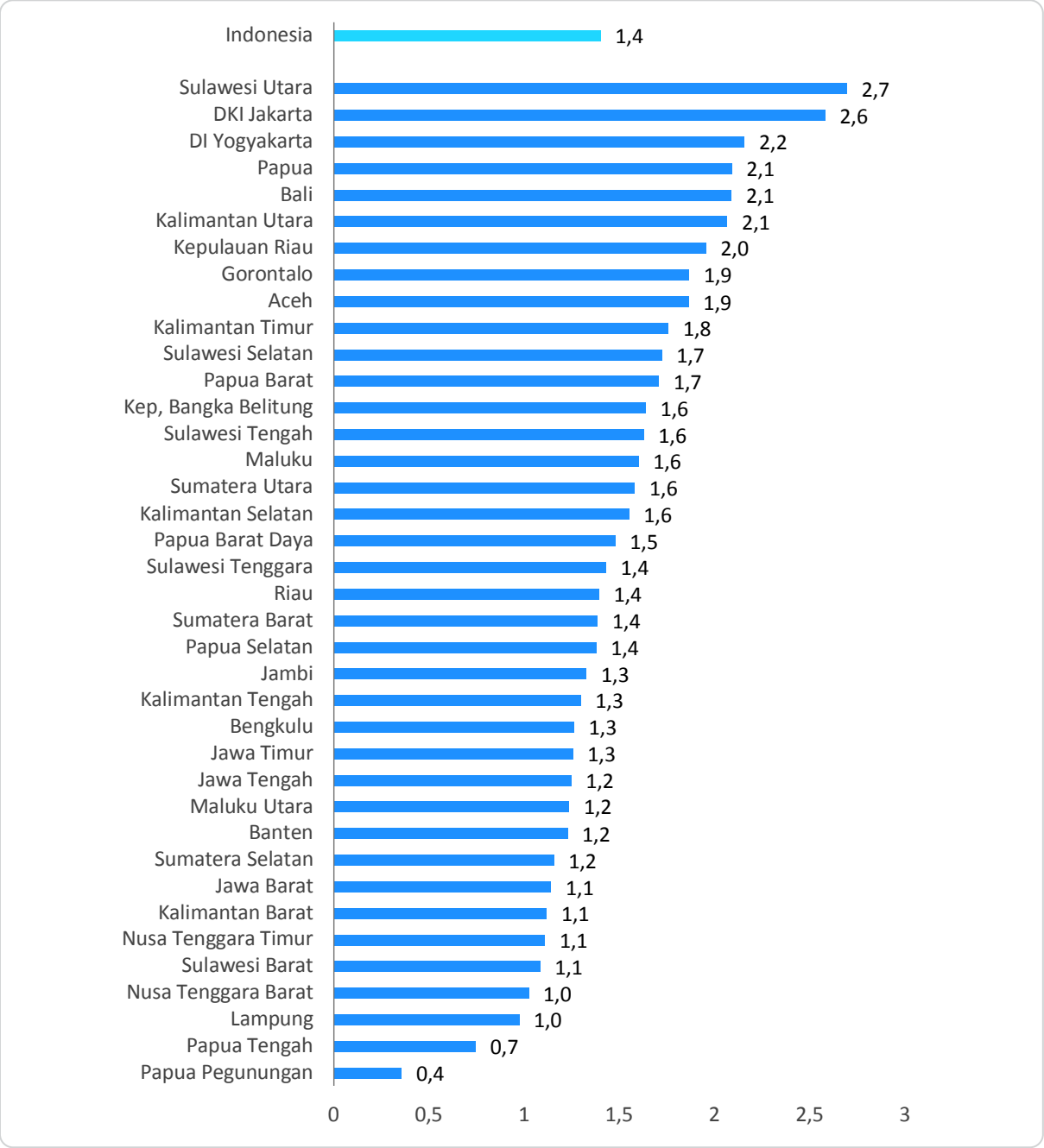

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2024

4. Akreditasi Rumah Sakit

Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah 100% RS terakreditasi pada tahun 2024.

Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan rujukan dilakukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan sistem jejaring rujukan serta kemitraan. Persentase RS terakreditasi tertinggi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 98,8% dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 68,8%. Capaian rumah sakit yang terakreditasi pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.24 dibawah untuk rincian data selengkapnya terdapat pada Lampiran 8.e.

GAMBAR 2.24
PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

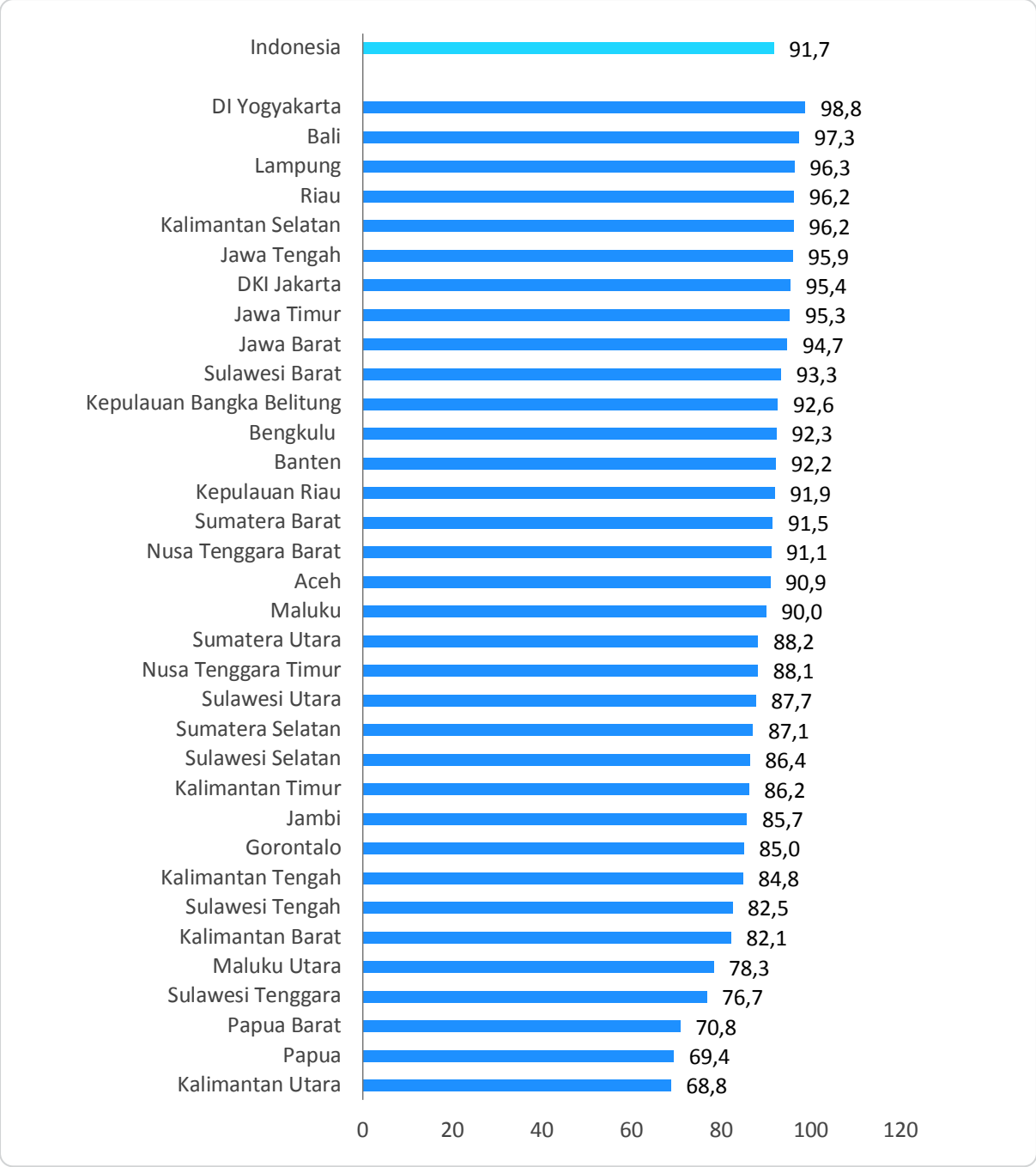

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2024

5. Rekam Medis Elektronik (RME) Rumah Sakit

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik dibutuhkan beberapa syarat. Salah satu syarat yang dimaksud adalah tersedianya data yang lengkap, tidak hanya tentang keadaan kesehatan pasien yang menjadi tanggung jawab dokter tetapi juga tentang keadaan lingkungan fisik serta lingkungan non fisik masing-masing. Semua data tersebut perlu dicatat serta disimpan sebaik-baiknya, sehingga apabila diperlukan ke depan dapat dengan mudah diambil kembali. Berkas atau catatan yang berisikan data yang dimaksud di atas dalam praktek kedokteran dikenal dengan nama Rekam Medis *(Medical Record)*. Peranan rekam medis dalam pelayanan kesehatan sangat penting karena macam dan jenis data pada pelayanan kesehatan relatif lebih banyak dan kompleks.

Di era digital ini, semua serba efisien dengan penggunaan teknologi informasi. Salah satu penggunaan teknologi informasi (TI) di bidang rekam medis adalah pemanfaatan RME. RME merupakan sistem informasi kesehatan terkomputerisasi yang berisi data sosial dan data medis pasien, serta dapat dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. RME dapat membantu manajemen pelayanan kesehatan pasien dengan lebih baik. Pengguna merupakan aspek penting untuk mewujudkan RME yang ideal. Dengan memahami persepsi pengguna mengenai RME dapat ditemukan rekomendasi yang tepat untuk memaksimalkan adopsi RME dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Penyelenggaraan rekam medis secara elektronik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan manajemen kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk mempermudah sistem pelaporan yang dilakukan oleh seluruh pemberi pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara administratif, RME bermanfaat sebagai gudang penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Selain itu, penggunaan RME memberikan manfaat kepada dokter dan petugas kesehatan dalam mengakses informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan klinis. Pencatatan rekam medis adalah wajib bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan tindakan medis kepada pasien, sesuai dengan aturan sehingga tidak ada alasan bagi dokter untuk tidak membuat rekam medis tersebut. RME merupakan solusi bagi rumah sakit untuk mengatasi berbagai masalah yang sering terjadi di rumah sakit seperti tempat penyimpanan yang besar, hilangnya rekam medis, pengeluaran data yang dibutuhkan, dan lain-lain.

Saat ini diperlukan pertukaran informasi yang sangat cepat dan akurat untuk mendukung pelayanan menjadi lebih efisien dan bermutu. RME di Rumah Sakit harus dilaksanakan dan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan. Keadaan geografis Indonesia, keterbatasan SDM tenaga kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana serta mobilitas penduduk membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan dimana saja dengan disertai pertukaran informasi kesehatan yang akurat.

Dengan memahami persepsi pengguna mengenai RME dapat ditemukan rekomendasi yang tepat untuk memaksimalkan adopsi RME dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Implementasi RME tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 pasal 45 yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan RME sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tahun 2023, terdapat 768 rumah sakit telah melaksanakan RME di enam pelayanan (Pendaftaran, Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Unit Penunjang, Farmasi). Terdapat delapan provinsi yang belum RME yaitu NTT, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.26.

Dari 3.138 rumah sakit yang dilakukan survey, terdapat 768 (24,5%) rumah sakit yang telah melaksanakan RME sepenuhnya, 1.225 (39%) rumah sakit melaksanakan sebagian RME yaitu RME digunakan minimal pada tiga pelayanan dari total enam pelayanan, dan 1.145 (36,5%) rumah sakit belum melaksanakan RME sebagaimana terlihat pada Gambar 2.25.

GAMBAR 2.25
PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME DI ENAM LAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2023

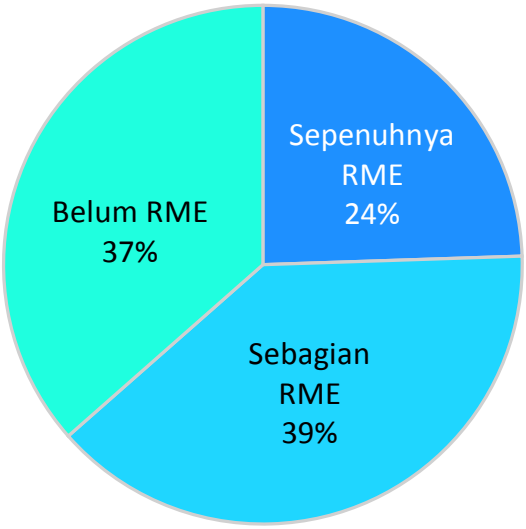

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

GAMBAR 2.26
JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME SEPENUHNYA DI ENAM LAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2023

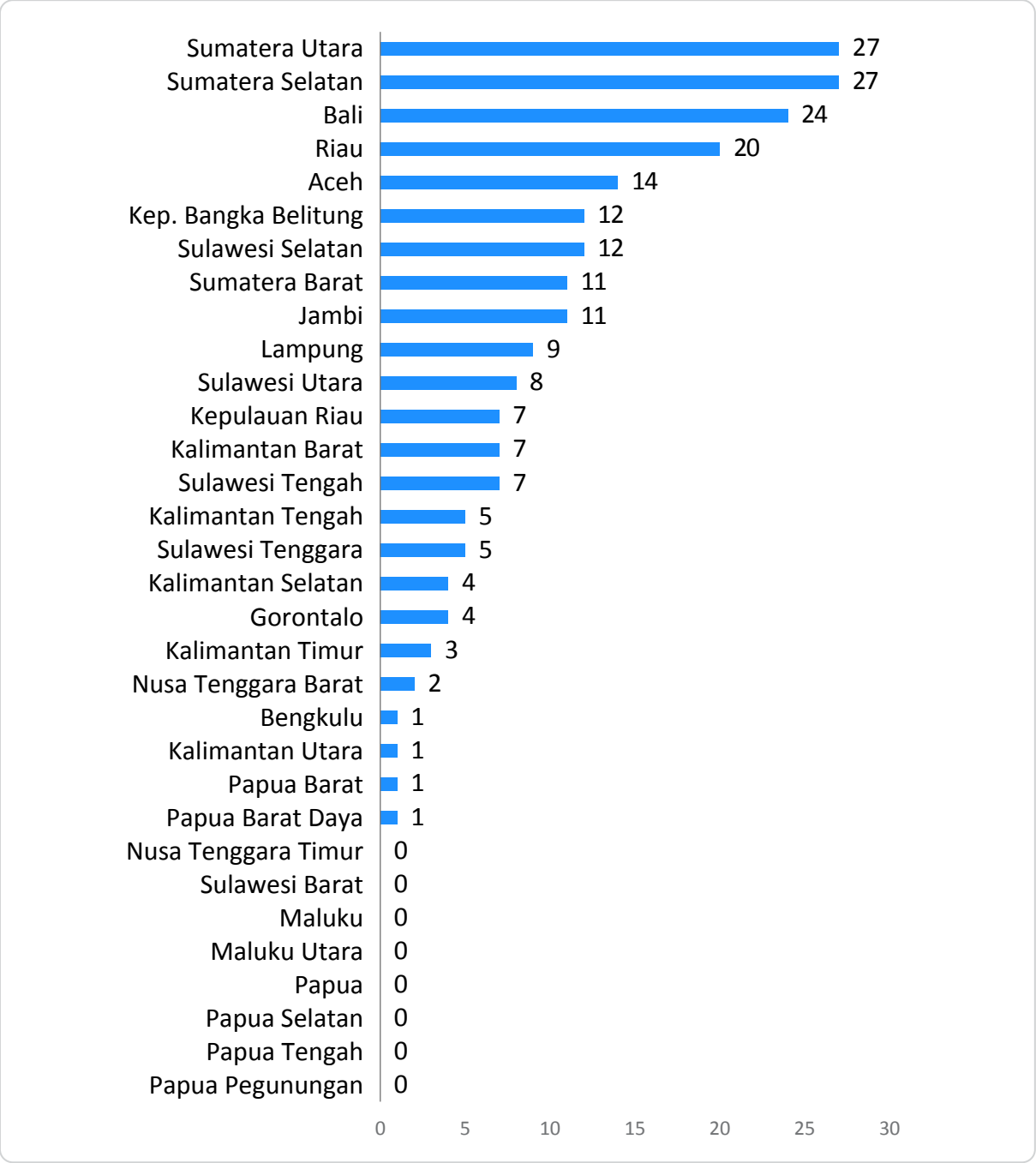

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial

Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator sasaran program pada Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian upaya tersebut. Adapun indikator sasaran program tersebut yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Definisi operasional dari indikator tersebut adalah persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pemantauan dilakukan terhadap 40 item obat yang dianggap esensial dan harus tersedia di pelayanan kesehatan dasar. Obat-obat yang dipilih sebagai obat indikator merupakan obat pendukung program tuberkulosis, malaria, kesehatan keluarga, gizi, dan imunisasi serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial yang terdapat di dalam Formularium Nasional. Pada tahun 2023, puskesmas yang melapor dengan ketersediaan obat esensial sebesar 93,1% dan persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 94,3%. Angka ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes di tahun 2023 yaitu sebesar 94%.

Capaian tertinggi persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2023 sebesar 100% dan dicapai oleh lima provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Hal tersebut berbeda pada tahun 2022 yaitu hanya terdapat satu provinsi dengan capaian 100%. Terdapat 15 provinsi yang belum mencapai target indikator tahun 2023. Rincian data persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi terdapat pada Lampiran 9.a.

2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan beberapa indikator yang berperan dalam mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan dalam hal menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang salah satunya diindikasikan oleh kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial. Indikator ini bertujuan untuk memantau ketersediaan obat esensial di tingkat kabupaten/kota. Adapun definisi operasional dari indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pada tahun 2023, realisasi indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 84,1%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMN Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 83%. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% obat esensial (40 item obat indikator) sebanyak 391 kabupaten/kota dari 465 kabupaten/kota yang melapor.

Capaian tertinggi kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2023 sebesar 100% yang dicapai oleh 12 provinsi. Namun, terdapat 20 provinsi yang belum mencapai target RPJMN di tahun 2023. Rincian data persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi tahun 2023 terdapat pada lampiran 9.b.

GAMBAR 2.27
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA TAHUN 2023

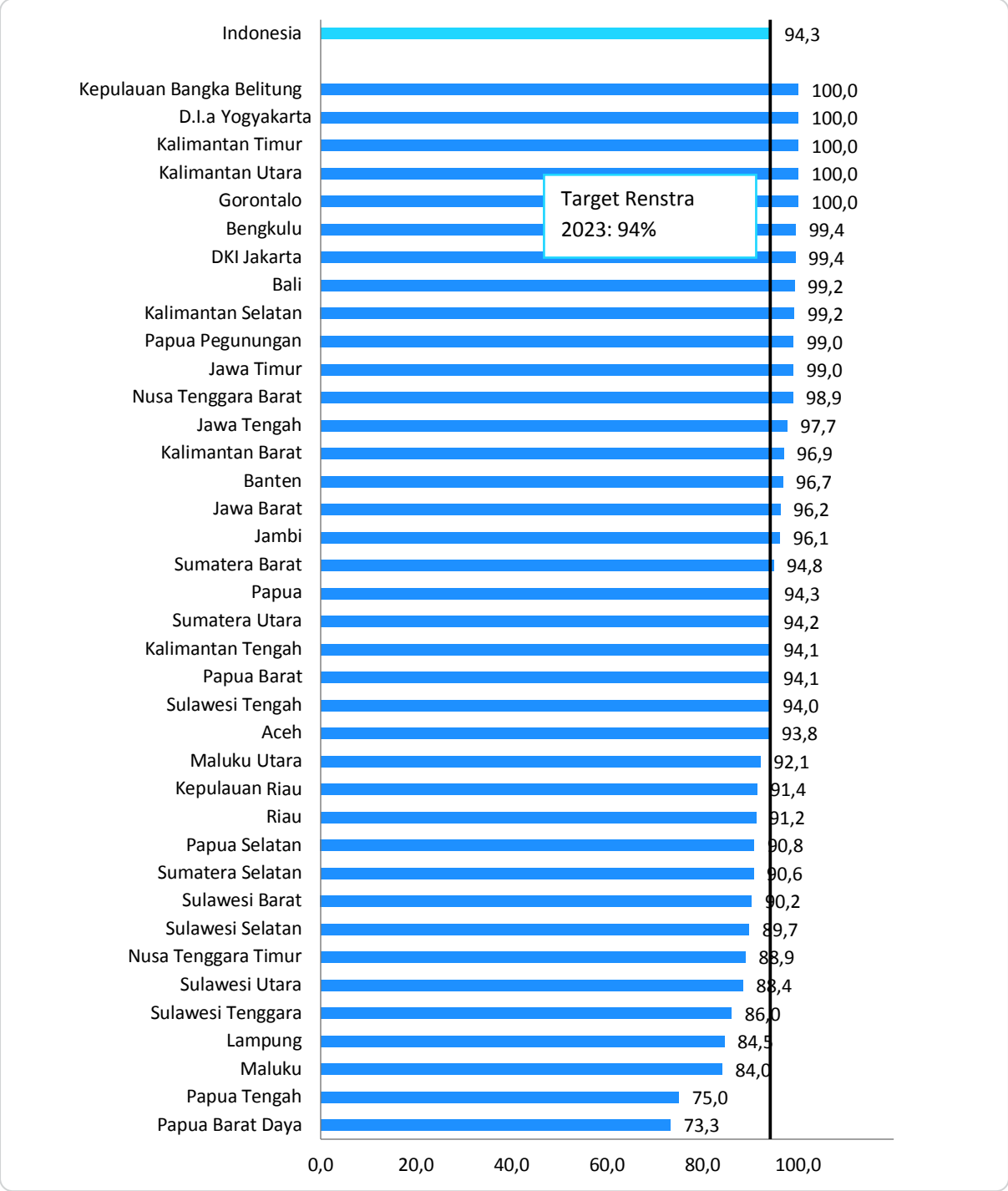

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

GAMBAR 2.28
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA TAHUN 2023

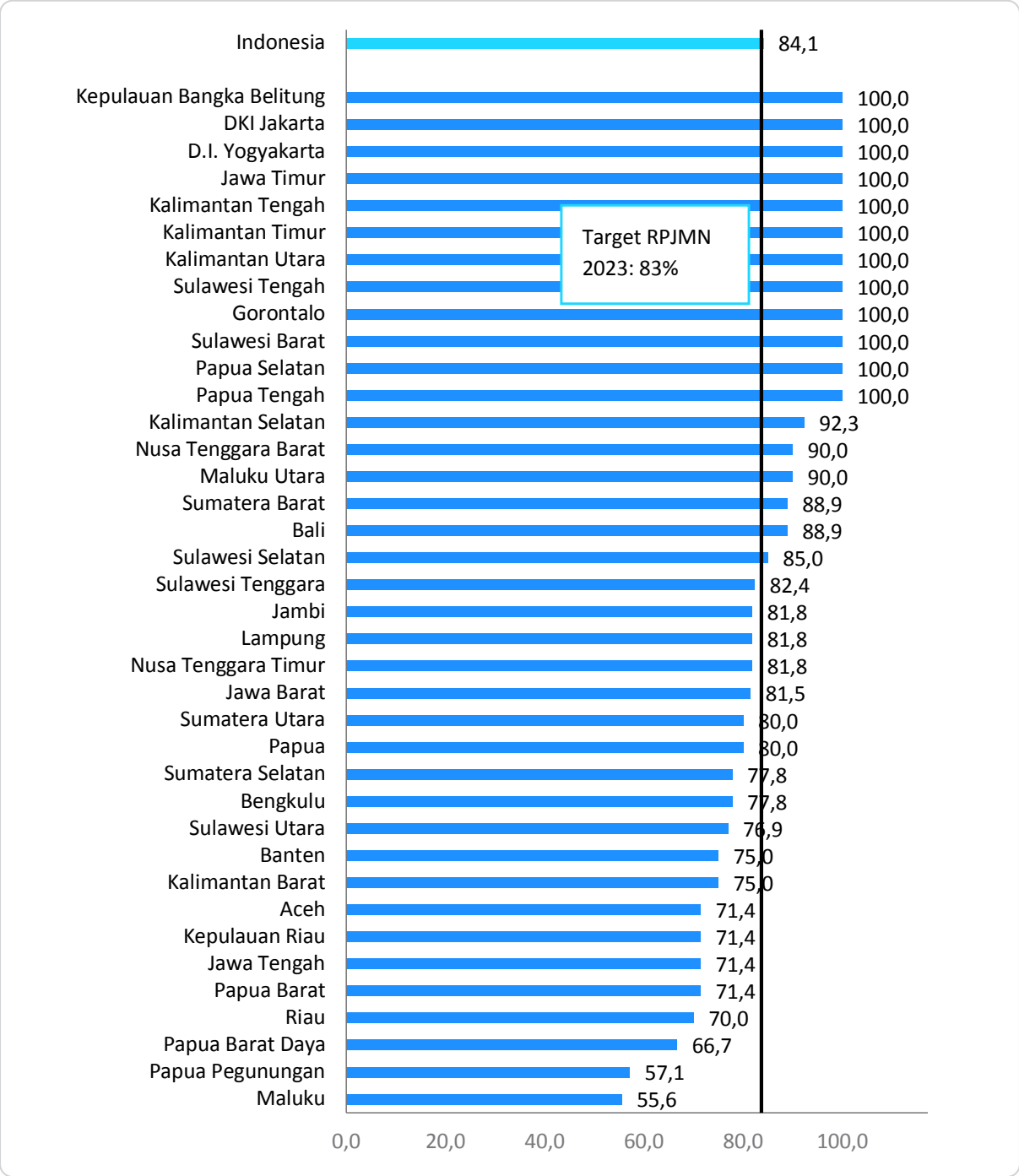

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2024

3. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Memastikan ketersediaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Upaya tersebut diindikasikan dengan indikator kinerja persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang bertujuan untuk memantau ketersediaan vaksin IDL di tingkat daerah. Definisi operasional dari indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella.

Pada tahun 2023, realisasi indikator kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 95,7%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 94%. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki vaksin IDL yang terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, dan Vaksin Campak/Campak Rubella sebanyak 492 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang melapor.

Provinsi yang sudah mencapai target capaian tertinggi kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin IDL pada tahun 2023 yakni sebanyak 28 provinsi. Namun, terdapat 10 provinsi dengan capaian kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin IDL dibawah target nasional. Rincian data persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin IDL menurut provinsi tahun 2023 terdapat pada lampiran 9.c.

GAMBAR 2.29
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL DI INDONESIA TAHUN 2023

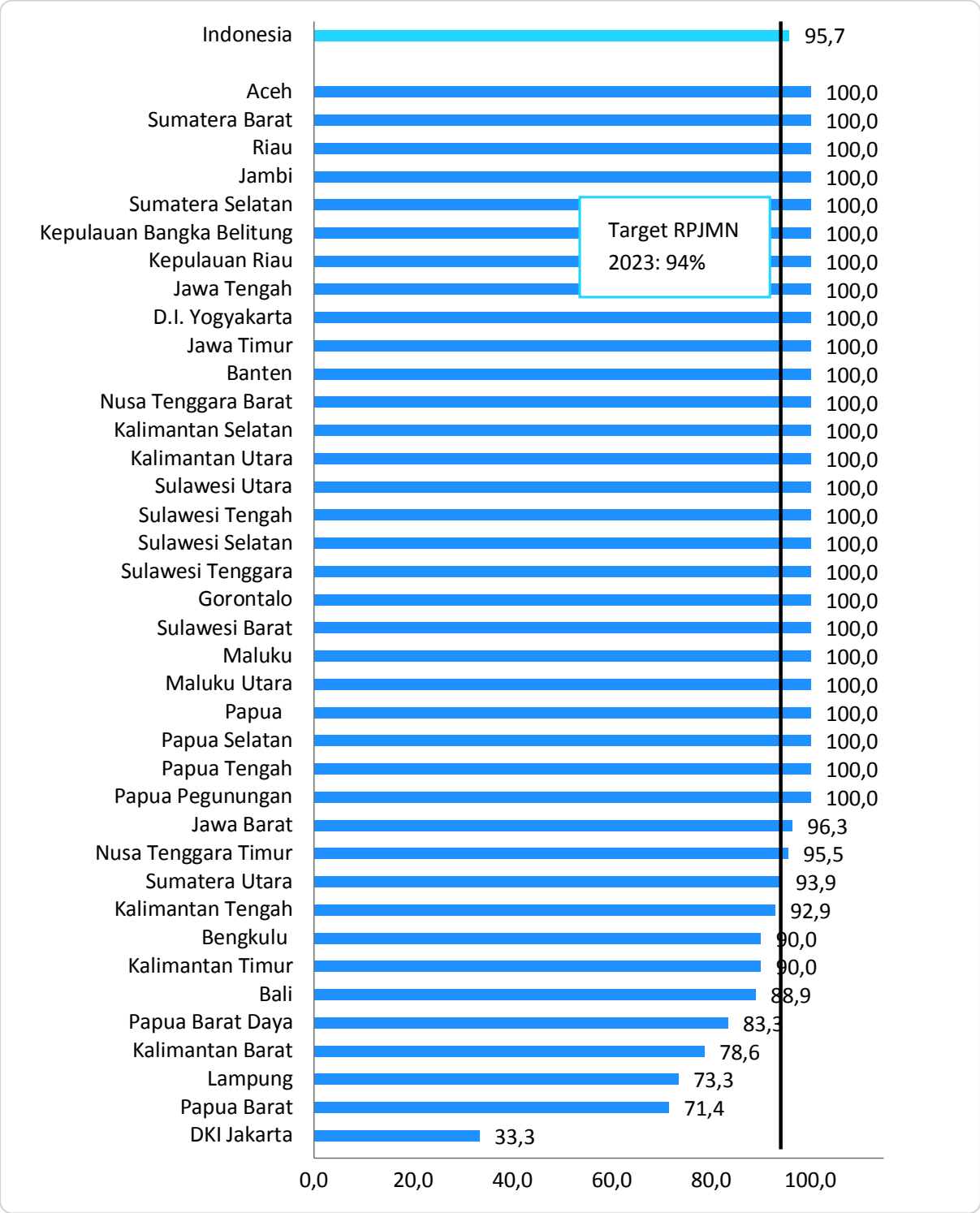

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

F. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Cakupan sarana produksi dan distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi dan distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi dan distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, dan Distributor Alat Kesehatan (DAK).

Jika ditelaah, sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Pulau Sumatera dan Jawa yakni sebesar 75,9%. Ketersediaan ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di wilayah Indonesia lainnya, sehingga terjadi pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Pada tahun 2023 terdapat 31.995 apotek, 8.559 toko obat, 3.594 Distributor Alat Kesehatan, 2.930 Pedagang Besar Farmasi, serta 2.343 sarana UKOT/UMOT. Secara keseluruhan, Provinsi dengan jumlah sarana produksi dan distribusi terbanyak adalah Jawa Barat. Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Gambar 2.30 berikut menyajikan jumlah sarana produksi dan Gambar 2.31 menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2023 serta rincian jumlah sarana produksi (Lampiran 9.d) dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan menurut provinsi tahun 2023 pada Lampiran 9.e.

GAMBAR 2.30
JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

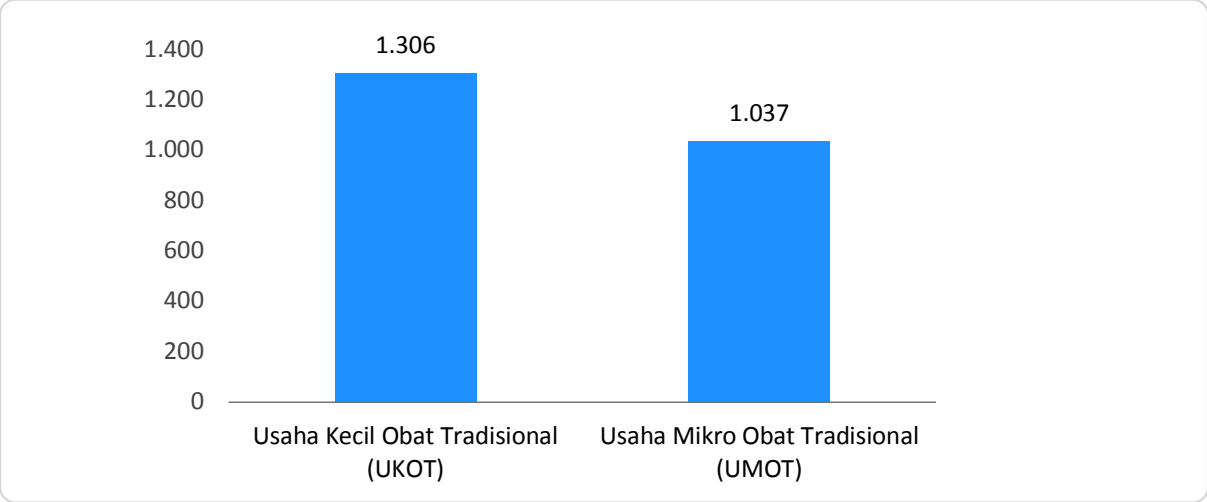

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

GAMBAR 2.31
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

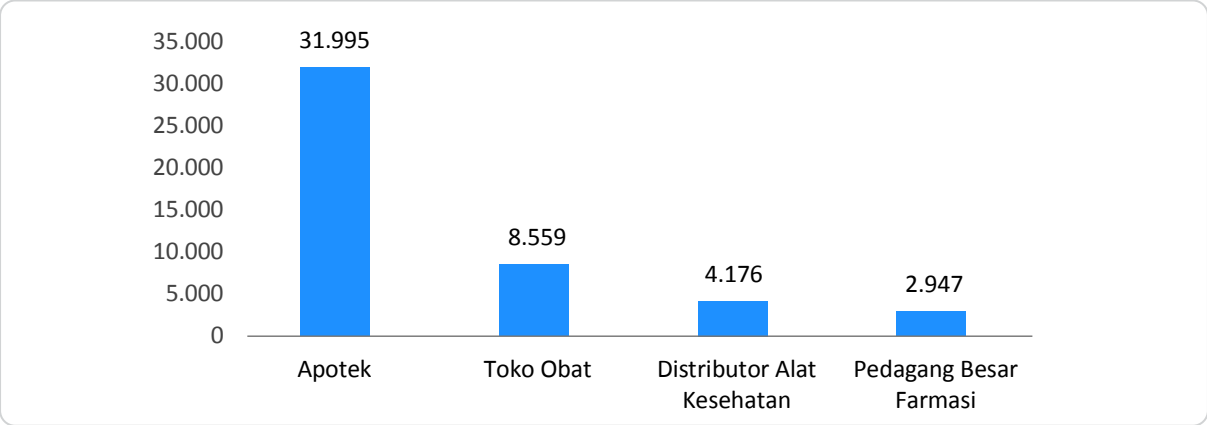

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2018, Posyandu termasuk dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) yang bertugas bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan dengan komitmen melaksanakan transformasi layanan primer, melaksanakan peningkatan kapasitas posyandu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap edukasi, skrining dan pelayanan promotif preventif bagi sasaran siklus hidup. Posyandu di garda depan, terdekat dengan masyarakat, sangat strategis mendukung Puskesmas untuk memperkuat upaya promosi kesehatan serta pencegahan penyakit bagi sasaran siklus kehidupan, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat. Sehubungan dengan hal itu Posyandu yang selama ini berjalan masih bersifat programatik seperti Posyandu KIA, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Posbindu PTM dengan adanya transformasi layanan kesehatan primer mengintegrasikan dalam satu Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan "Posyandu". Posyandu menyediakan layanan untuk seluruh sasaran siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bersalin dan nifas, bayi, balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia dewasa dan lansia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. Diharapakan Posyandu dalam kerangka LKD/K dilengkapi dengan tempat permanen, pengurus dan kader yang memadai, anggaran operasional memadai serta prasarana kesehatan yang memenuhi standar, peralatan kesehatan.

Jumlah posyandu di Indonesia pada Tahun 2023 sebanyak 304.263 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah (sumber: Pelaporan Program Prioritas *Microsite* Promkes Tahun 2023).

GAMBAR 2.32
JUMLAH POSYANDU AKTIF
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

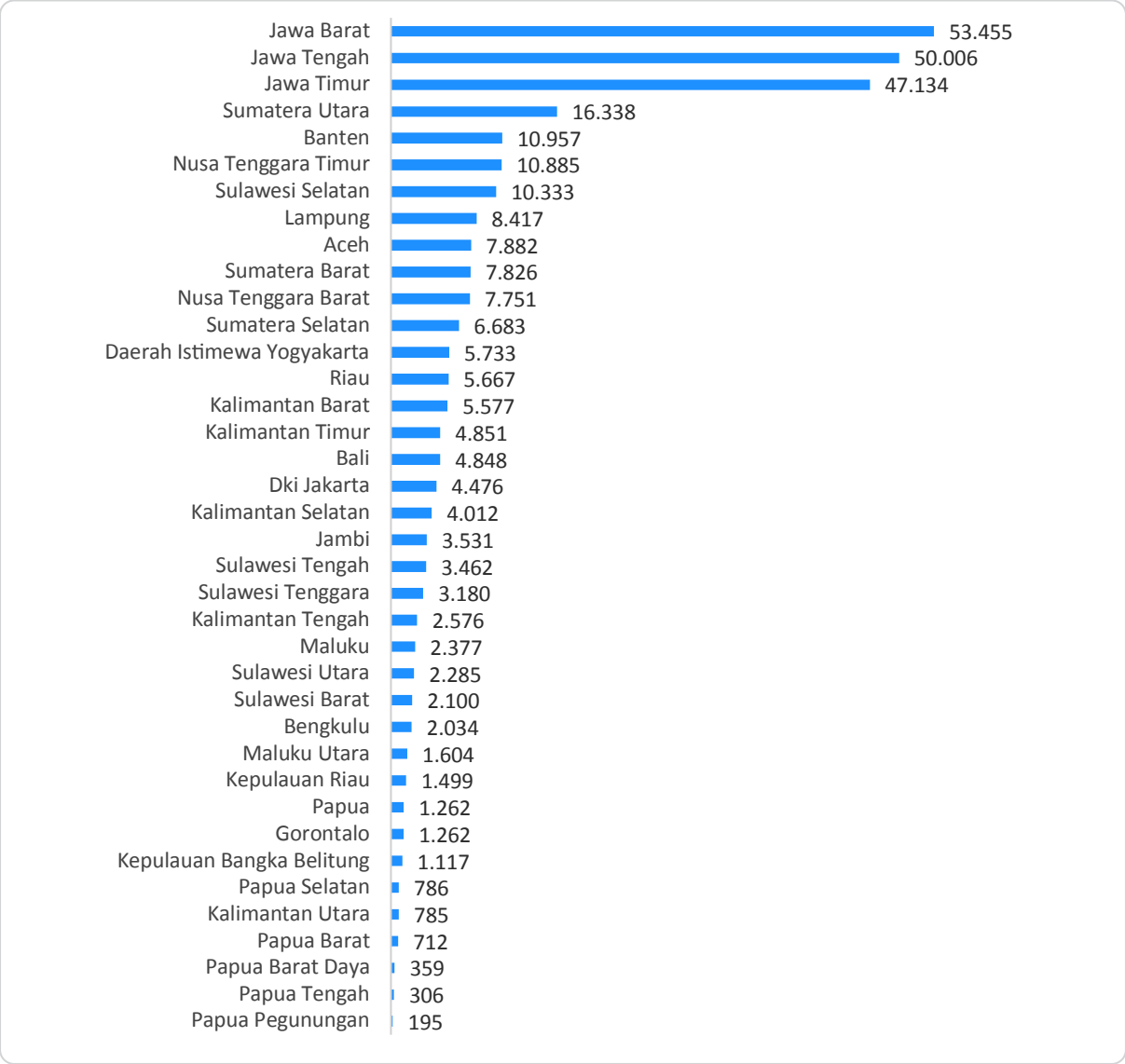

Sumber: Direktorat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Kementerian Kesehatan melaksanakan pembinaan teknis bagi posyandu dengan mengacu sasaran Permenkes 13 Tahun 2022 Renstra Kementerian Kesehatan yaitu indikator Tahun 2023 ditargetkan 80% persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Adapun definisi operasional Posyandu aktif adalah jika memenuhi kriteria:

1) Melakukan kegiatan rutin Posyandu (pelayanan kesehatan ibu hamil/balita/remaja/usia produktif/lansia) 1 kali dalam satu sebulan minimal 8 kali/tahun;
2) Memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil dan atau balita dan atau remaja;
3) Memiliki minimal 5 orang kader.

GAMBAR 2.33
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

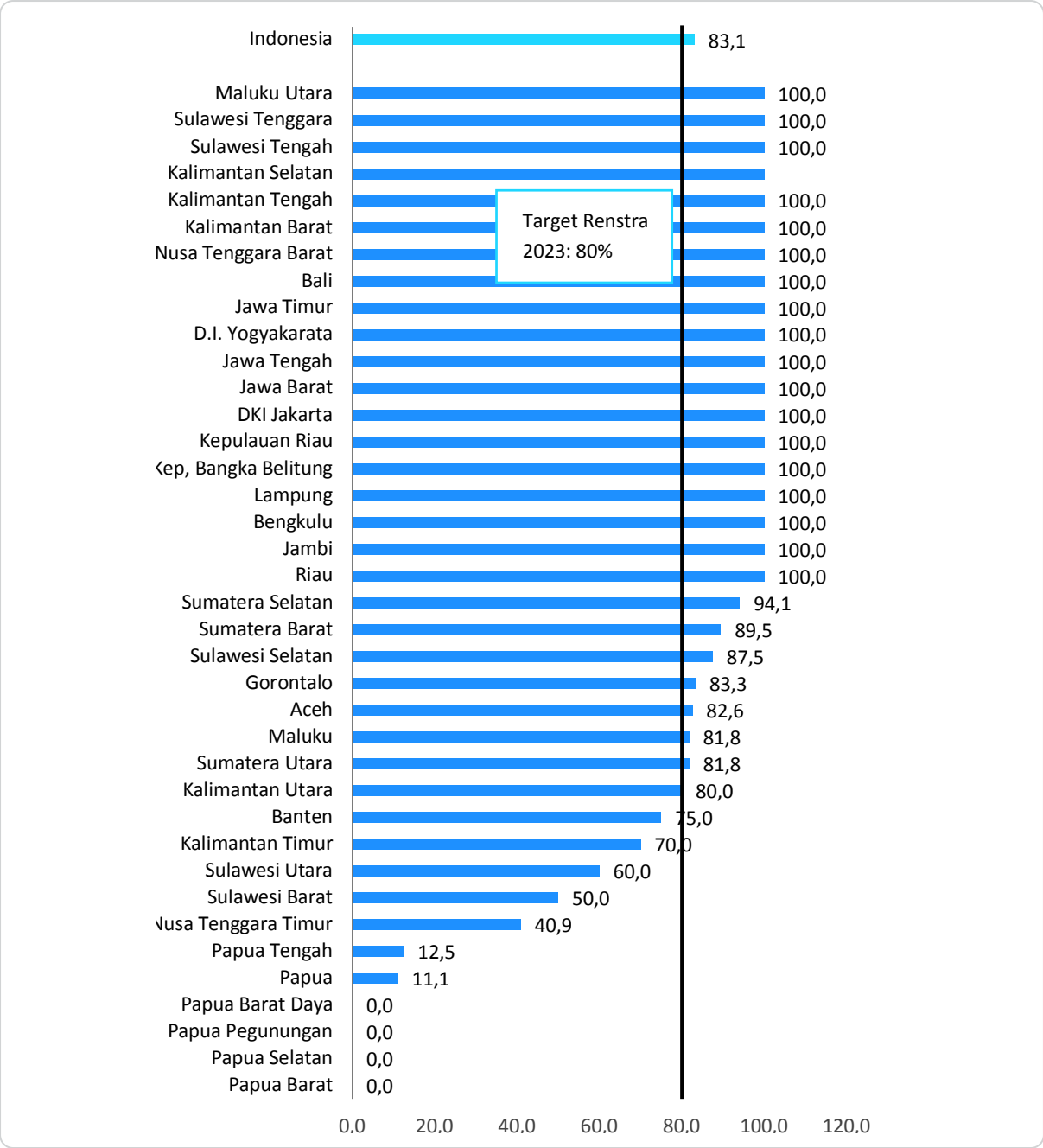

Sumber: Direktorat Promosi Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Hasil capaian indikator persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% Posyandu aktif pada tahun 2023 sebanyak 427 kabupaten/kota (83,1%) (Gambar 2.33). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2023 yaitu 75% kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Sebanyak 50% provinsi yang mencapai indikator kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Rincian lengkap data Posyandu dapat dilihat pada Lampiran 10.

***

BAB III.
SDM KESEHATAN

BAB III. SDM KESEHATAN

Kementerian Kesehatan telah merumuskan transformasi kesehatan terdiri dari enam pilar utama mencakup transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM Kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Di antara semua pilar tersebut, SDM Kesehatan memegang peran kunci dalam menggerakkan proses transformasi ini.

Sistem Kesehatan Nasional menggambarkan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai elemen vital yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterampilan hidup sehat bagi semua individu guna mencapai tingkat kesehatan yang optimal.

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan terdiri dari; (a) Tenaga Medis; (b) Tenaga Kesehatan; dan (3) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi (termasuk dokter/dokter gigi spesialis dan subspesialis). Sedangkan tenaga kesehatan terdiri dari: a. tenaga psikologi klinis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kebidanan; d. tenaga kefarmasian; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. tenaga gizi; h. tenaga keterapian fisik; i. tenaga keteknisian medis; j. tenaga teknik biomedika; k. tenaga kesehatan tradisional; dan l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pembahasan SDM kesehatan pada bab ini meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan baik di seluruh fasilitas kesehatan, maupun secara rinci di puskesmas dan rumah sakit, registrasi tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta lulusan tenaga kesehatan.

A. JUMLAH SDM KESEHATAN

Pengembangan dan pengelolaan SDM kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut mendefinisikan SDM kesehatan sebagai seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. SDM kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan

SDM kesehatan dapat dilihat berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi. Jika dilihat menggunakan kedua pendekatan tersebut, jumlah SDM kesehatan di fasyankes di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 2.077.473 orang yang terdiri dari 183.694 tenaga medis (8,8%), 1.317.589 tenaga kesehatan (63,4%), dan 576.190 tenaga penunjang kesehatan (27,7%).

Dalam ruang lingkup tenaga kesehatan, tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan menempati proporsi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 44,3% dan 26,2% dari seluruh tenaga kesehatan.

GAMBAR 3.1
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

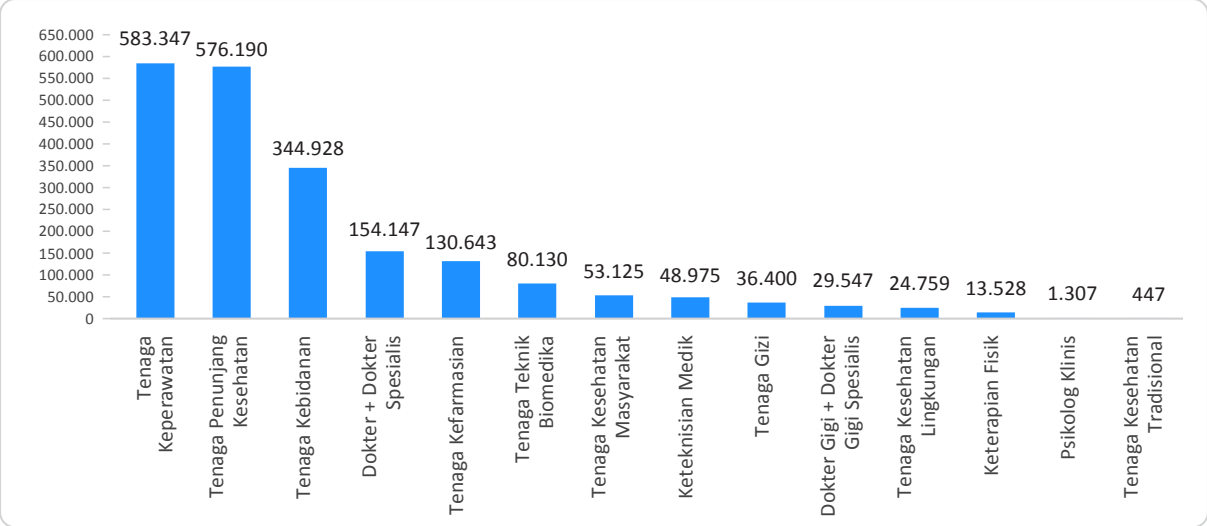

Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga medis di Indonesia sebanyak 183.694 orang atau 8,8% terhadap seluruh SDM kesehatan.

Dari seluruh tenaga medis, sebagian besar merupakan dokter yaitu sebesar 106.263 orang (57,8%). Proporsi tenaga medis dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

GAMBAR 3.2
PROPORSI TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2023

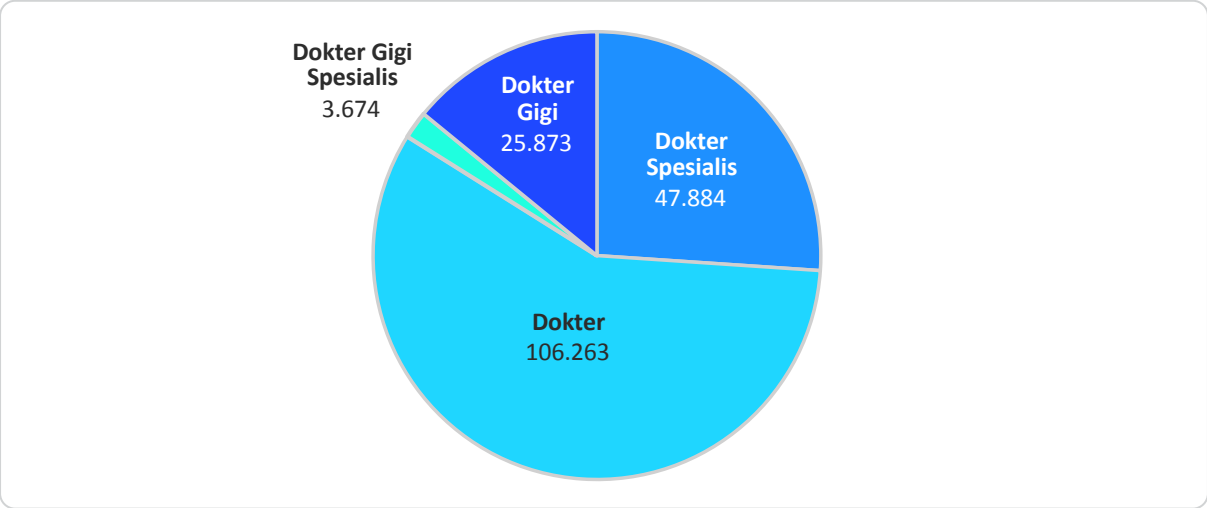

Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Sebaran tenaga medis masih menunjukkan ketimpangan antara wilayah Jawa-Bali dengan wilayah non Jawa-Bali. Sebanyak 60,8% dari total tenaga medis di Indonesia berada di wilayah Jawa-Bali. Sebagian besar dari tenaga medis tersebut berada di Provinsi Jawa Barat (27.091 orang), Jawa Timur (23.047 orang), dan DKI Jakarta (22.724 orang). Sedangkan provinsi dengan tenaga medis paling sedikit tersebar di Papua Pegunungan (235 orang), Papua Selatan (308 orang), dan Papua Barat Daya (385 orang).

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan penyelenggaraannya, puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik.

Puskesmas setidaknya harus memiliki tenaga yang meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga non kesehatan. Dalam kondisi tertentu, Puskesmas dapat menambah jenis tenaga kesehatan lainnya meliputi terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan.

GAMBAR 3.3
JUMLAH 9 TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

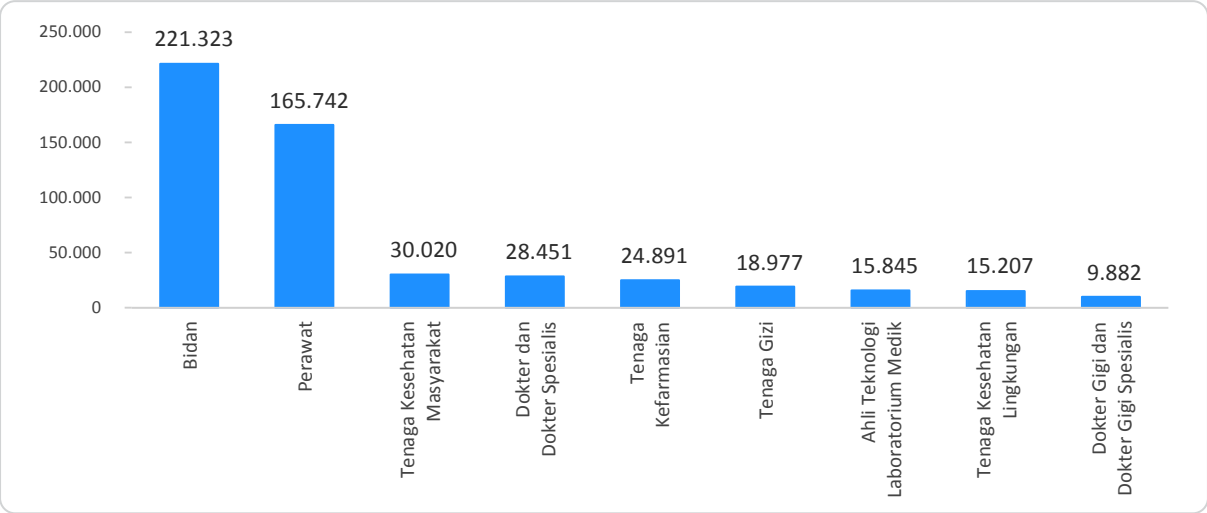

Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023 jumlah 9 tenaga kesehatan di Indonesia yang bertugas di puskesmas sebanyak 530.338, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 521.304 orang. Jumlah tenaga kesehatan tertinggi di puskesmas yaitu bidan sebesar 221.323 dan perawat sebesar 165.742.

Selain tenaga kesehatan, puskesmas juga memerlukan tenaga penunjang/pendukung kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerja. Jumlah tenaga penunjang/pendukung kesehatan di puskesmas di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 84.513 orang. Tenaga penunjang ini dapat merupakan tenaga kesehatan maupun non-kesehatan yang secara fungsi berperan sebagai pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen.

Terkait dengan tenaga non-kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas mengatur lebih jauh tentang hal ini. Regulasi ini mengatur bahwa penentuan jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan non-kesehatan di puskesmas dilakukan dengan mempertimbangkan analisis beban kerja, jumlah pelayanan yang diselenggarakan, rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya, luas dan karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

a. Kecukupan Dokter di Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas mengatur kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas dengan memberikan batasan minimal jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan agar puskesmas dapat menjalankan fungsinya. Kriteria kecukupan tenaga ini dibedakan untuk puskesmas rawat inap dan non-rawat inap. Pada Puskesmas non rawat inap, minimal satu orang dokter baik di kawasan perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Sedangkan pada puskesmas rawat inap minimal dua orang dokter baik pada kawasan perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pada tahun 2023 terdapat 11,5% puskesmas dengan status kekurangan dokter, di sisi lain terdapat sebanyak 59,1% puskesmas kelebihan dokter.

GAMBAR 3.4
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

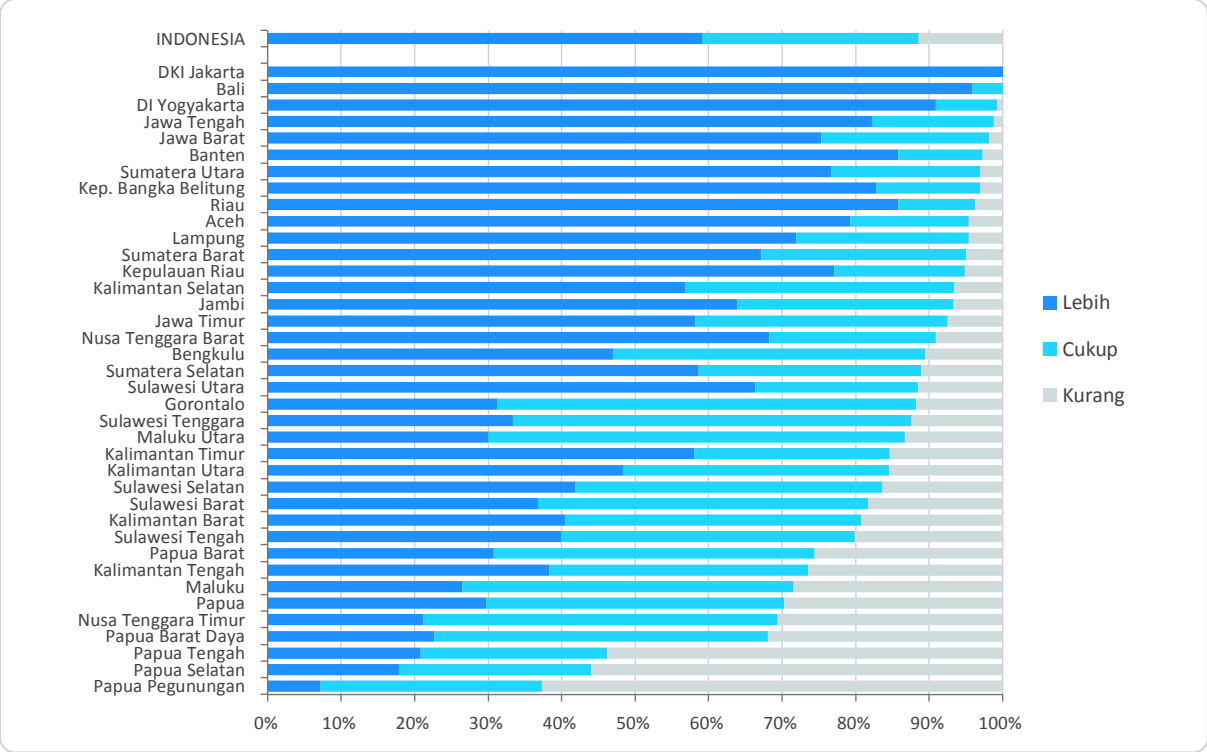

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Pada gambaran persebaran provinsi di atas dapat diketahui bahwa DKI Jakarta dan Bali merupakan provinsi dengan kecukupan dokter puskesmas 100%, bahkan seluruh puskesmas di DKI Jakarta memiliki kelebihan dokter. Sedangkan empat provinsi di Pulau Papua memiliki puskesmas dengan kecukupan dokter paling rendah yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

b. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Standar kecukupan dokter gigi di puskesmas rawat inap dan non-rawat inap baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil adalah minimal satu orang.

Pada tahun 2023, terdapat 28,9% puskesmas kekurangan dokter gigi, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 29,8%. Sebanyak 71,1% puskesmas lainnya memiliki dokter gigi sesuai standar (cukup dan lebih).

GAMBAR 3.5
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2023

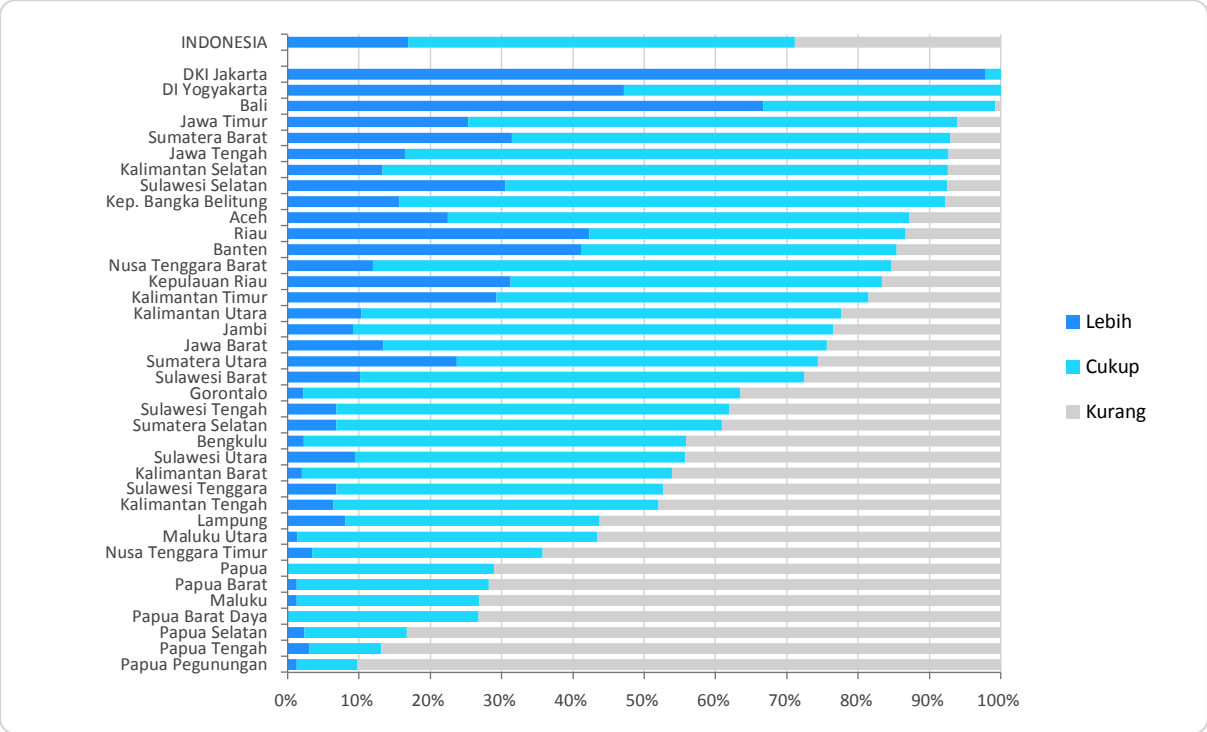

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Sejalan dengan kecukupan dokter, Puskesmas di wilayah timur Indonesia memiliki persentase puskesmas dengan status dokter gigi kurang tertinggi. Dari 38 provinsi, 10 diantaranya lebih dari setengah puskesmas di wilayahnya memiliki kekurangan dokter gigi, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Lampung.

Provinsi dengan kecukupan puskesmas dengan dokter gigi sesuai standar tertinggi terdapat di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang masing-masing sebesar 100%. Gambaran tersebut semakin mengkonfirmasi adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara di wilayah yang Jawa-Bali dengan wilayah timur Indonesia.

c. Kecukupan Perawat di Puskesmas

Standar kecukupan perawat di puskesmas mensyaratkan jumlah minimal yang lebih tinggi dibandingkan dokter dan dokter gigi, yaitu sebesar lima perawat pada puskesmas non rawat inap dan delapan perawat pada puskesmas rawat inap. Pada tahun 2023 terdapat 7,3% puskesmas dengan status kekurangan perawat di Indonesia, menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 9,7%.

GAMBAR 3.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA
TAHUN 2023

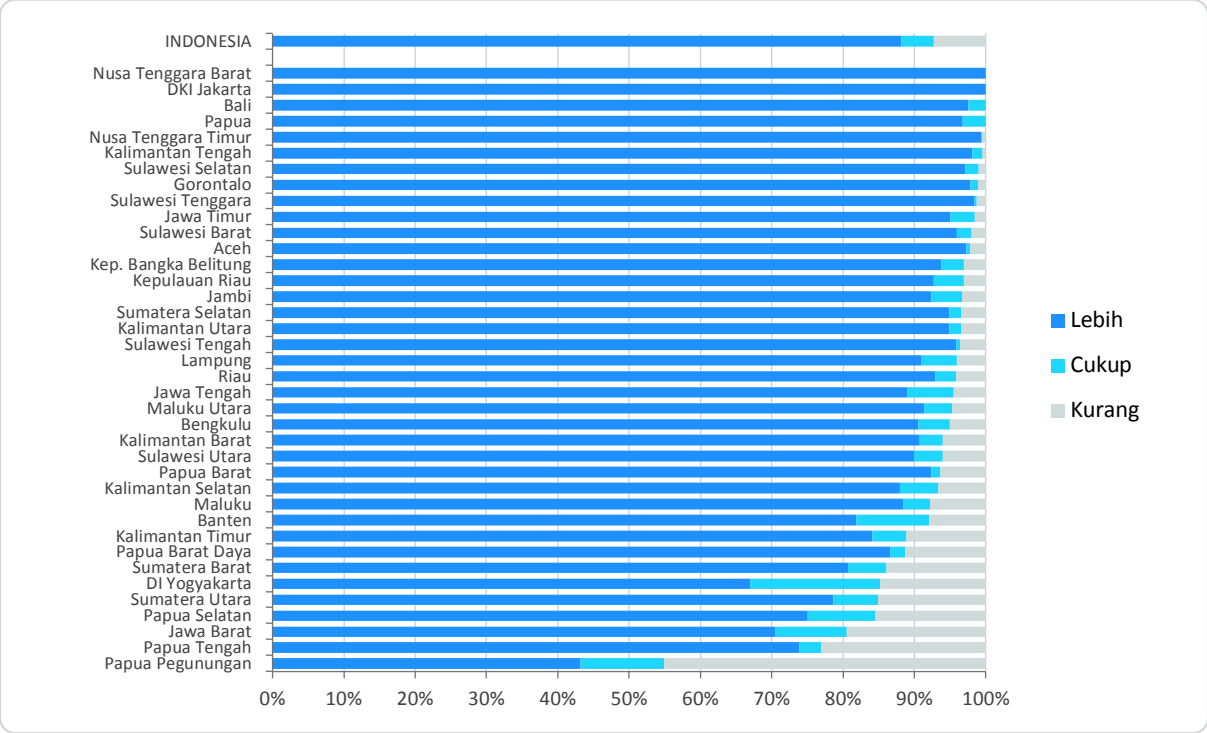

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Secara nasional, pada tahun 2023 sebagian besar puskesmas memiliki jumlah perawat sesuai standar (cukup dan lebih) yaitu sebesar 92,7%. Bahkan provinsi Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Bali, dan Papua tidak memiliki puskesmas dengan status kurang perawat.

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan persentase puskesmas dengan kekurangan perawat tertinggi.

d. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Bidan juga termasuk salah satu tenaga kesehatan yang disyaratkan kecukupannya di puskesmas. Puskesmas dinilai memiliki jumlah bidan cukup jika sedikitnya memiliki empat orang untuk puskesmas non rawat inap, dan tujuh orang untuk puskesmas rawat inap. Jumlah minimal ini diterapkan untuk puskesmas di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

GAMBAR 3.7
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA
TAHUN 2023

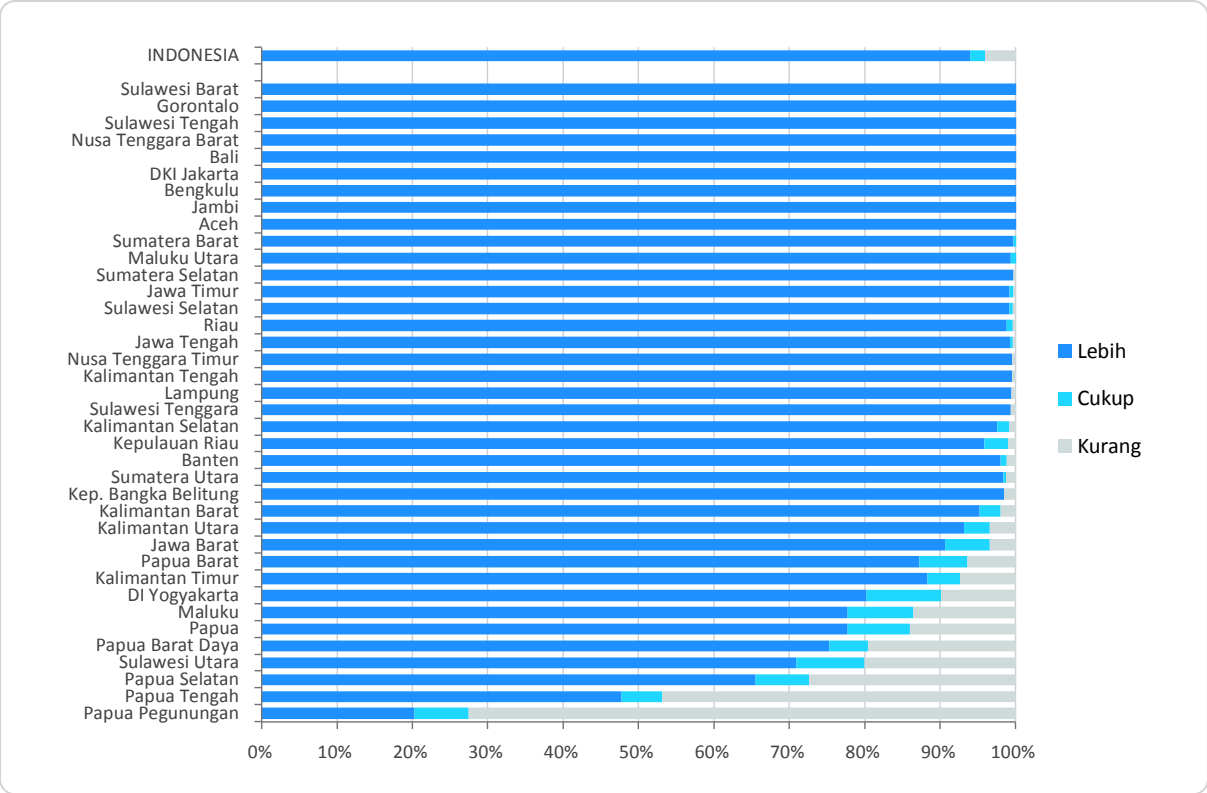

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Secara nasional, pada tahun 2023 terdapat 96% puskesmas dengan jumlah bidan cukup+lebih dan 4,1% kekurangan bidan. Bahkan 11 provinsi telah memiliki 100% puskesmas dengan jumlah perawat sesuai standar.

Meskipun secara nasional persentase puskesmas kekurangan bidan tergolong rendah, masih terdapat provinsi dengan kekurangan bidan lebih dari 25% puskesmas, yaitu Papua Pegunungan (72,6%), Papua Tengah (46,9%), dan Papua Selatan (27,4%).

Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan kecukupan dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan dapat dilihat di Lampiran 11.e.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Selain pelayanan kesehatan dasar yang utamanya diselenggarakan oleh puskesmas, di Indonesia juga terdapat pelayanan kesehatan rujukan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

GAMBAR 3.8
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

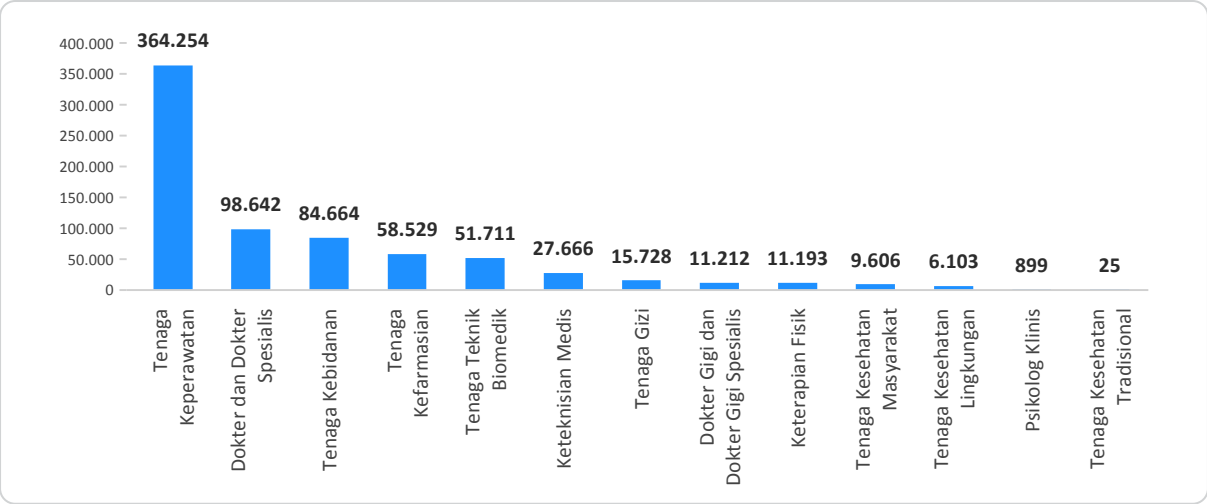

Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

SDM kesehatan dengan jumlah terbanyak di seluruh rumah sakit pada tahun 2023 adalah perawat sebanyak 364.254 orang. Sama halnya dengan pola distribusi yang ada di puskesmas, jumlah perawat memiliki porsi jauh lebih besar dibandingkan jenis SDM kesehatan lainnya. Secara umum, jumlah SDM Kesehatan tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, rumah sakit didukung dengan keberadaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dokter spesialis yang disajikan pada Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023 dikelompokkan menjadi dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dokter gigi spesialis, dan spesialis lain.

Dokter spesialis dasar terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah. Spesialis penunjang terdiri dari spesialis radiologi, spesialis anestesi, spesialis patologi klinik, spesialis patologi anatomi, dan spesialis rehabilitasi medik.

GAMBAR 3.9
PROPORSI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

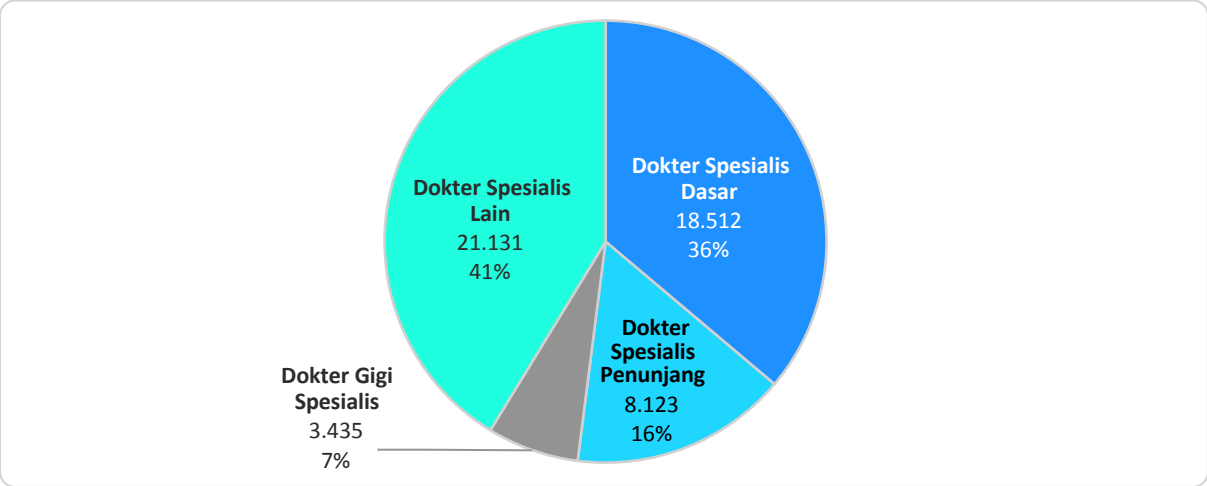

Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Terdapat sebanyak 51.201 orang dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 44.485 orang. Sebagian besar tenaga ini merupakan dokter spesialis dasar sebanyak 17.424 orang atau 39% dari total dokter spesialis di rumah sakit.

Sama seperti permasalahan distribusi tenaga kesehatan lainnya, jumlah dokter spesialis juga menunjukkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur. Sebagian besar dokter spesialis yang melakukan pelayanan di rumah sakit terkonsentrasi di Pulau Jawa Bali (66,2%) dan Sumatera (18%). Sedangkan 15,8% lainnya tersebar di pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal

Ketimpangan pembangunan masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia, termasuk pada sektor kesehatan. Permasalahan ini di antaranya dapat dilihat dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata antar wilayah di Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menetapkan 62 kabupaten tertinggal yang tersebar di 11 provinsi (karena pemekaran wilayah maka menjadi 15 provinsi pada tahun 2023). Dalam sektor kesehatan, pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

Jenis tenaga kesehatan terbanyak yang berada di daerah tertinggal adalah tenaga keperawatan sebanyak 24.242, tenaga kebidanan sebanyak 16.911, dan tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 4.271. Sebaliknya, jenis tenaga kesehatan dengan jumlah terendah yaitu tenaga psikologi klinis sebesar 17, tenaga kesehatan tradisional sebesar 63, dan tenaga keterapian fisik sebesar 140 orang.

GAMBAR 3.10
DISTRIBUSI JUMLAH SDM KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2023

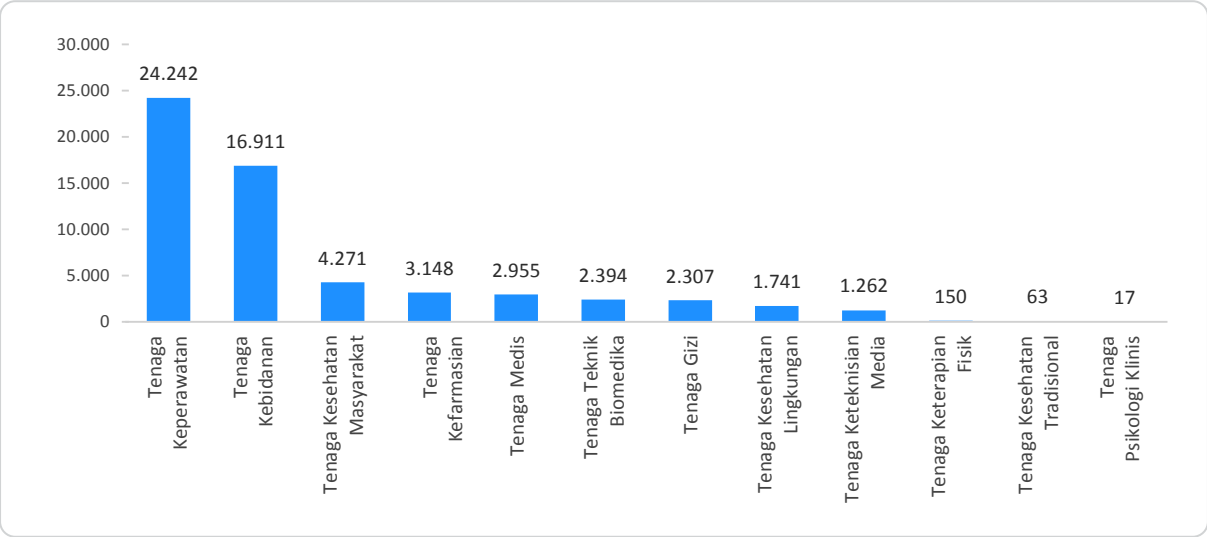

Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan wilayah, sebagian besar SDM kesehatan di di daerah tertinggal tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sumatera Utara.

GAMBAR 3.11
SEBARAN JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2023

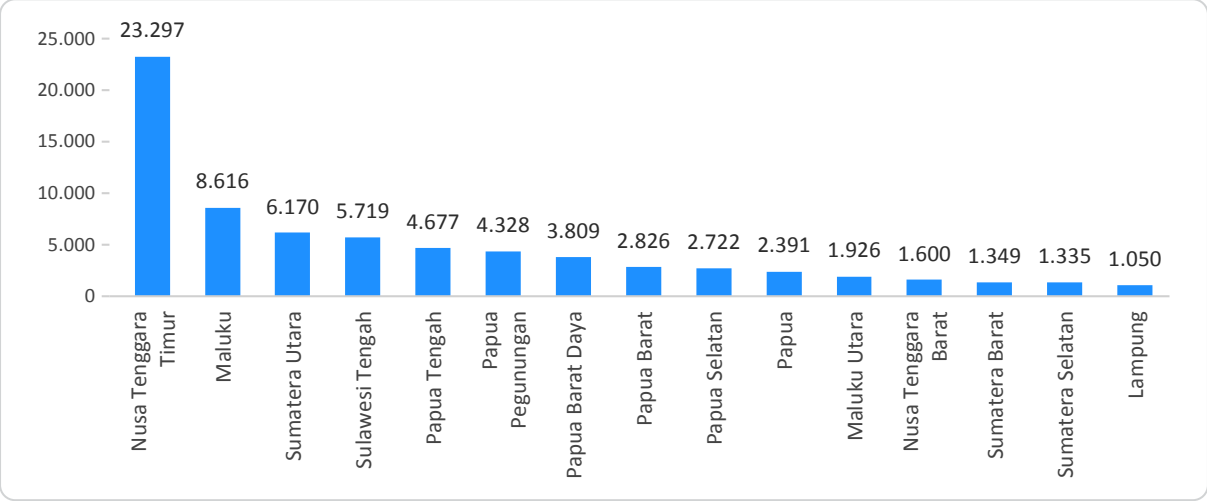

Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Sebaran SDM kesehatan di daerah tertinggal sejalan dengan banyaknya jumlah kabupaten tertinggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku memiliki jumlah kabupaten tertinggal terbanyak dibandingkan provinsi lainnya.

B. REGISTRASI SDM KESEHATAN

Selain metode pencatatan dan pelaporan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota, sistem pengelolaan data data SDM kesehatan juga bersumber dari proses registrasi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap SDM kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik. SDM kesehatan yang telah menyelesaikan proses registrasi akan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh konsil tenaga kesehatan.

Proses registrasi tidak hanya penting bagi pendataan SDM kesehatan, namun juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang memanfaatkan jasa tenaga medis dan tenaga kesehatan. Registrasi tenaga medis yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis dikelola oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

GAMBAR 3.12
JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR AKTIF PER 31 DESEMBER 2023

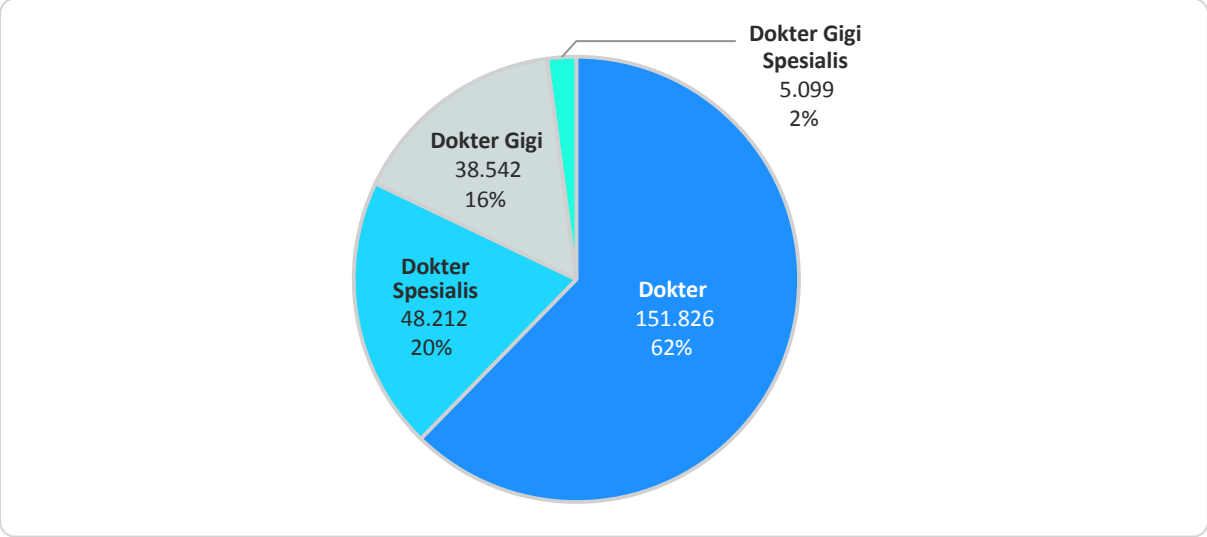

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2024

Jumlah tenaga medis yang memiliki STR sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 243.679 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 230.564 orang. Dokter merupakan tenaga medis dengan kepemilikan STR terbanyak yaitu sebesar 62%.

Registrasi tenaga kesehatan dikelola oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang melingkupi 30 jenis tenaga kesehatan. Sama halnya dengan tenaga medis, tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Izin tersebut diperoleh dengan adanya kepemilikan STR yang diterbitkan oleh KTKI. STR ini berlaku selama lima tahun, sehingga setiap tenaga kesehatan yang telah memenuhi syarat setelah lima tahun dari registrasi sebelumnya harus melakukan registrasi ulang (re-registrasi).

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 139.108 STR baru yang diterbitkan oleh KTKI. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 148.318 STR.

GAMBAR 3.13
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

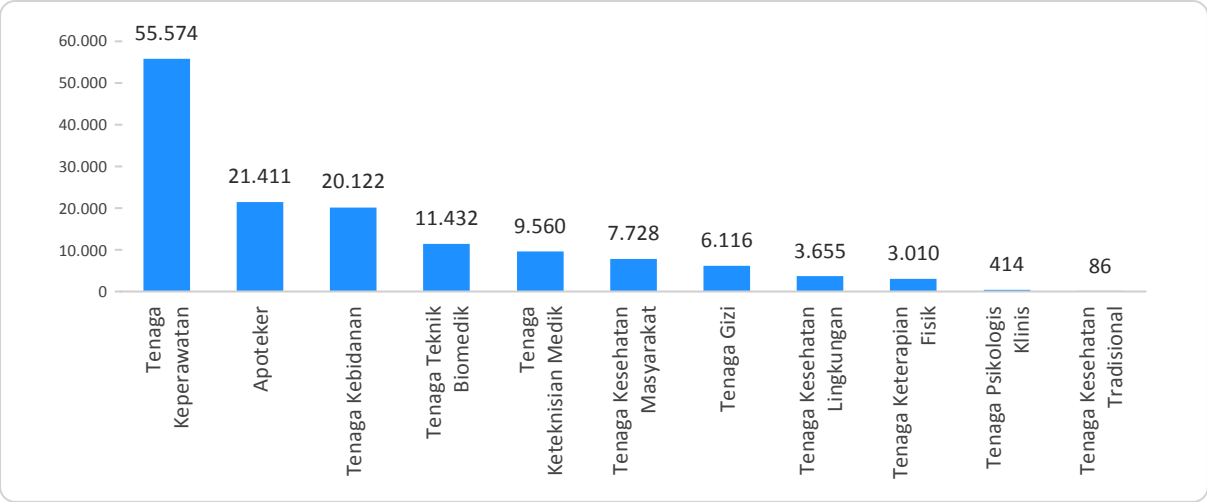

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2024

Tenaga Keperawatan dan apoteker menjadi tenaga dengan jumlah penerbitan STR baru terbanyak, yaitu masing-masing sebanyak 55.574 dan 21.411 orang.

Berdasarkan sebaran provinsi, penerbitan STR baru terbanyak dilaporkan di provinsi Jawa Timur sebesar 18.598, Jawa Barat sebesar 18.206, dan Jawa Tengah sebesar 14.815. Banyaknya registrasi di tiga provinsi tersebut sejalan dengan fakta bahwa jumlah sarana pendidikan ilmu kesehatan dan lulusannya banyak terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali.

GAMBAR 3.14
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

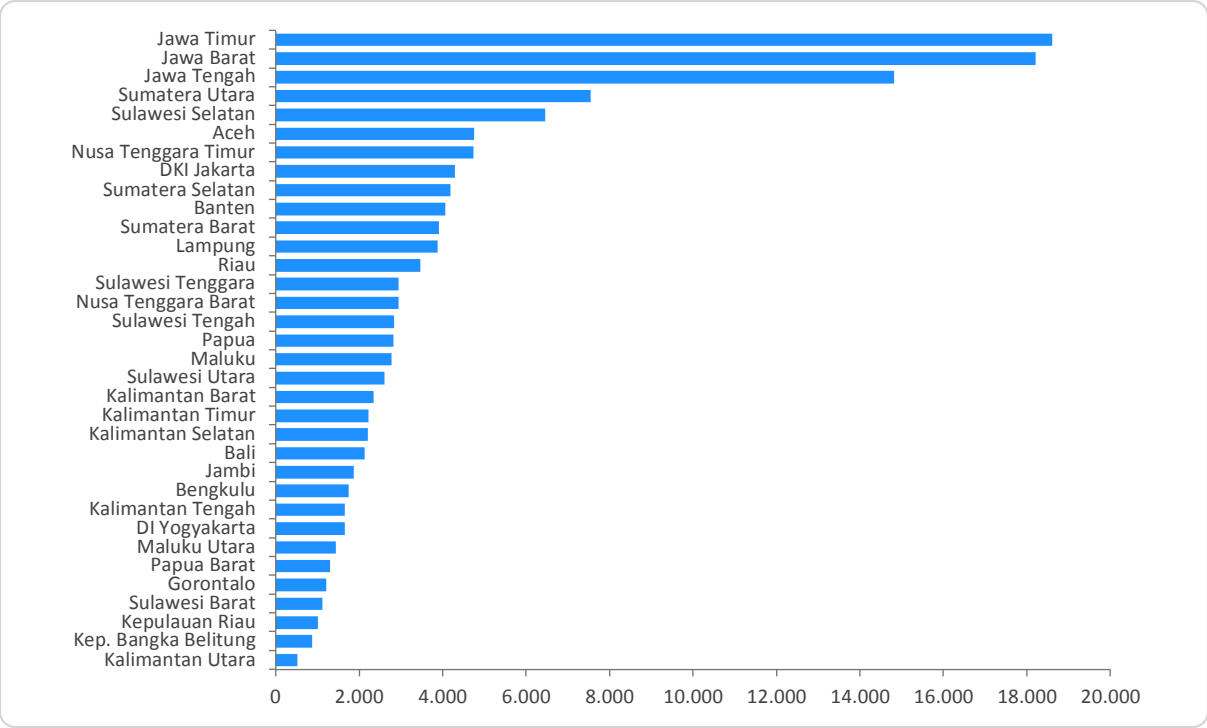

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2024

Sesuai dengan Permenkes Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, STR yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang profesinya, atau dapat juga melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Terdapat 387.324 tenaga kesehatan yang melakukan registrasi ulang pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 308.177 orang.

Dibandingkan tenaga kesehatan yang lain, jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan yang melakukan registrasi ulang merupakan yang tertinggi yaitu masing-masing sebanyak 155.579 orang dan 144.788 orang. Sedangkan tenaga kesehatan terendah yang melakukan registrasi ulang yaitu psikologi klinis sebanyak 130 orang.

GAMBAR 3.15
JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2023

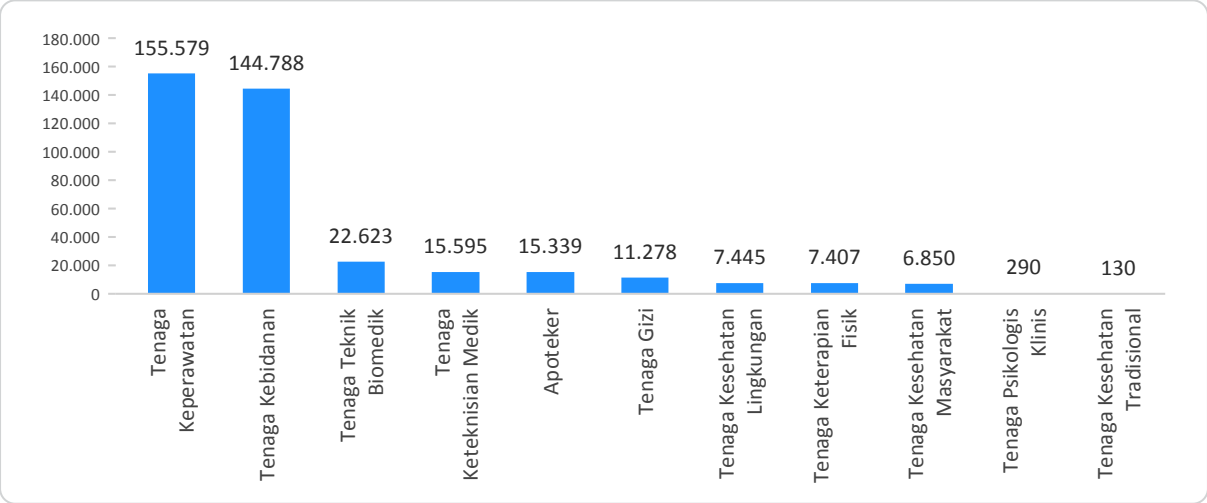

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2024

Tidak jauh berbeda dengan kondisi registrasi baru, registrasi ulang terbanyak dilaporkan di wilayah Jawa. Provinsi Jawa Timur melaporkan registrasi ulang sebanyak 43.831, Jawa Barat sebanyak 42.524, dan Jawa Tengah sebanyak 35.015. Peningkatan jumlah penerbitan STR tenaga kesehatan baik baru maupun ulang disebabkan karena adanya pemanfaatan sistem digital yaitu e-STR yang bisa langsung mencetak STR tenaga kesehatan.

Rincian lengkap mengenai jumlah penerbitan STR baru dan STR ulang tenaga kesehatan dapat dilihat di Lampiran 12.b dan 12.c.

C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013). Pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, dan dapat dilaksanakan pula oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota.

Pengangkatan dan penempatan PTT dilakukan untuk tenaga dokter dan bidan. Tenaga dokter yang dimaksud adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dokter PTT dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah bermasalah kesehatan, daerah rawan konflik; rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana; dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada wilayah terpencil dan sangat terpencil. Masa penugasan dokter PTT adalah satu tahun untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dua tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan tiga tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa. Dokter PTT dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak untuk satu kali masa penugasan.

Penempatan bidan PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil. Bidan PTT ditugaskan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak dua kali masa penugasan.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan dalam surat edaran nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT, tidak ada lagi pengangkatan baru tenaga kesehatan dengan status PTT Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016. Hal ini disebabkan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tidak hanya jenis tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, atau bidan, tetapi juga jenis tenaga kesehatan yang mendukung upaya promotif dan preventif. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan dengan program Nusantara Sehat berbasis tim dan individu yang diselenggarakan mulai tahun 2015.

Jumlah tenaga kesehatan yang masih bertugas dalam program PTT Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2023 berjumlah 39 orang dengan rincian 37 orang bidan, 1 orang dokter umum, dan 1 orang dokter gigi. Sementara itu, berdasarkan kriteria wilayah, terdapat 16 orang tenaga kesehatan di wilayah biasa, 12 orang di wilayah terpencil, dan 11 orang di wilayah sangat terpencil. Selain itu, pada tahun 2023, penugasan dokter dan dokter gigi hanya pada wilayah sangat terpencil dan juga program PTT berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023.

GAMBAR 3.16
JUMLAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2023

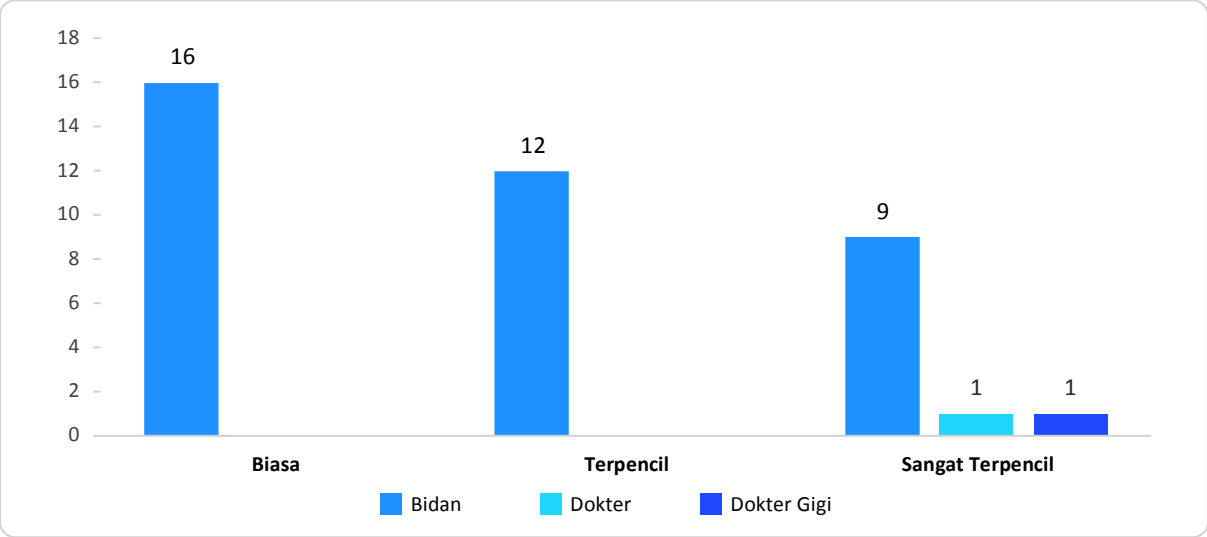

Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kemenkes RI, 2024

2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus

a. Penugasan Khusus Tenaga Residen

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Jenis tenaga kesehatan yang diangkat dalam penugasan khusus adalah residen.

Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Residen dalam penugasan khusus terdiri dari residen senior (pembiayaan pendidikan secara mandiri) dan residen pasca jenjang I (pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan). Residen senior ditugaskan antara tiga sampai dengan enam bulan, sedangkan residen pasca jenjang I ditugaskan selama enam bulan.

Pada tahun 2023, jumlah dokter spesialis dalam penugasan khusus sebagai residen di Indonesia adalah 23 orang. Tren jumlah penugasan khusus residen selama 3 tahun terakhir cenderung menurun yaitu 157 orang pada tahun 2021 turun menjadi 106 orang pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 23 orang. Hal ini disebabkan oleh sebagian lokus penugasan residen sudah terisi oleh tenaga dokter spesialis dari program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Program penugasan khusus residen masih berlanjut hingga tahun 2024.

Proporsi penugasan khusus residen dokter spesialis terbesar pada tahun 2023 adalah regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua sebesar 39,1%, diikuti oleh regional Sulawesi sebesar 34,8%, dan Sumatera sebesar 17,4%. Residen dokter spesialis terbanyak terdapat di Provinsi Maluku Utara (4 orang). Sebanyak

22 provinsi tidak terdapat residen dokter spesialis pada tahun 2023. Rincian lengkap mengenai jumlah peserta penugasan khusus residen dokter spesialis dapat dilihat di Lampiran 11.h.

GAMBAR 3.17
PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2023

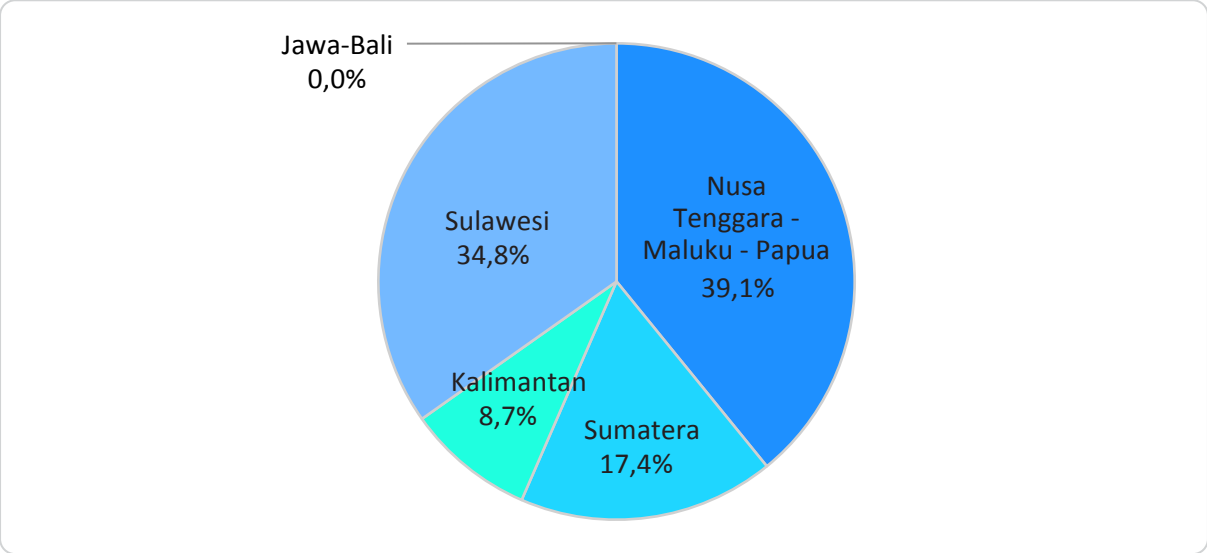

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

b. Penugasan Khusus Baru Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Penugasan khusus ini meliputi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, fungsi program Nusantara Sehat adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, program penugasan khusus ini dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah, meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2023, istilah Penugasan Khusus Nusantara Sehat berubah menjadi Penugasan Khusus Baru Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

1. Penugasan Khusus Baru Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim

Penugasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim akan ditempatkan di Puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masa tugas selama 2 tahun. Tim ini minimal terdiri dari lima jenis tenaga kesehatan dari sembilan jenis tenaga di Puskesmas, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Penempatan Penugasan Khusus Baru Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 26 *batch*. *Batch* I-II dilaksanakan pada tahun 2015, dengan penempatan di 120 Puskesmas. *Batch* III-V dilaksanakan pada tahun 2016, dengan penempatan di 131 Puskesmas. *Batch* VI-VIII dilaksanakan pada tahun 2017 dengan penempatan di 188 Puskesmas. *Batch* IX-XI dilaksanakan pada tahun 2018 dengan penempatan di 156 Puskesmas. *Batch* XII-XIV dilaksanakan pada tahun 2019 dengan penempatan di 173 Puskesmas. *Batch* XV-XVI dilaksanakan tahun 2020 dengan penempatan tim yang masih aktif pada 32 Puskesmas, 22 kabupaten/kota, dan 11 provinsi. *Batch* XVII-XIX dilaksanakan di tahun 2021 dengan penempatan di 104 Puskesmas, 52 kabupaten/kota, dan 17 provinsi. *Batch* XX-XXIII dilaksanakan di tahun 2022 dengan penempatan di 136 Puskesmas, 59 kabupaten/kota, dan 20 provinsi. *Batch* XXIV-XXIV di tahun 203 sejumlah 313 orang di 73 puskesmas, 50 kabupaten/kota, dan 20 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim dapat dilihat di Lampiran 11.i.

Jumlah tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan lingkungan yang ditempatkan di tahun 2023 hampir berbanding, yaitu ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 56 orang (18,2%), tenaga gizi sebanyak 41 orang (13,3%), tenaga farmasi sebanyak 44 orang (14,3%), dan tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 58 orang (18,8%). Jenis tenaga yang paling sedikit adalah dokter umum sebanyak 22 orang (7,1%). Provinsi dengan penempatan terbanyak adalah Sumatera Utara sebanyak 54 orang, sedangkan provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Sumatera Barat sebanyak 3 orang dan Riau sebanyak 4 orang. Sebanyak 18 provinsi tidak mendapatkan penempatan tim pada tahun 2023. Rincian lengkap mengenai jumlah Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim dapat dilihat di Lampiran 11.j.

GAMBAR 3.18
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

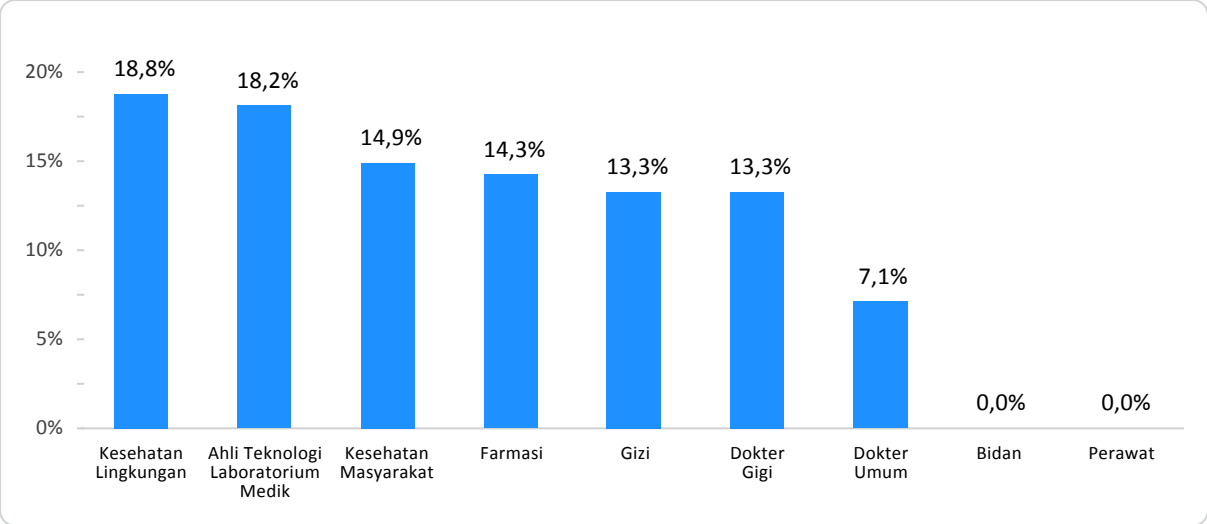

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

2. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual dilakukan secara perorangan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli

teknologi laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, dan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu akan ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 2 tahun dengan evaluasi pada 1 tahun pertama penugasan.

Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu sampai dengan tahun 2023 sudah dilakukan sebanyak 45 periode, dengan penempatan di 514 kabupaten/kota dan 30 provinsi. Pada tahun 2023 penempatannya tersebar pada 872 Puskesmas di 228 kabupaten/kota dan 30 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu dapat dilihat di Lampiran 11.k.

Jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan yang paling banyak ditempatkan pada tahun 2023 adalah dokter gigi yaitu sebanyak 283 orang (22,5%), diikuti oleh tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 271 orang (21,6%), sedangkan jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit adalah tenaga farmasi sebanyak 108 orang (8,6%). Pada tahun 2023 tidak ada penempatan tenaga perawat dan bidan.

Provinsi dengan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu terbanyak pada tahun 2023 yaitu di Nusa Tenggara Timur sebanyak 111 orang, sedangkan provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 2 orang. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, dan Papua Pegunungan tidak mendapatkan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu pada tahun 2023. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu dapat dilihat di Lampiran 11.l.

GAMBAR 3.19
PENEMPATAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN INDIVIDU
TAHUN 2023

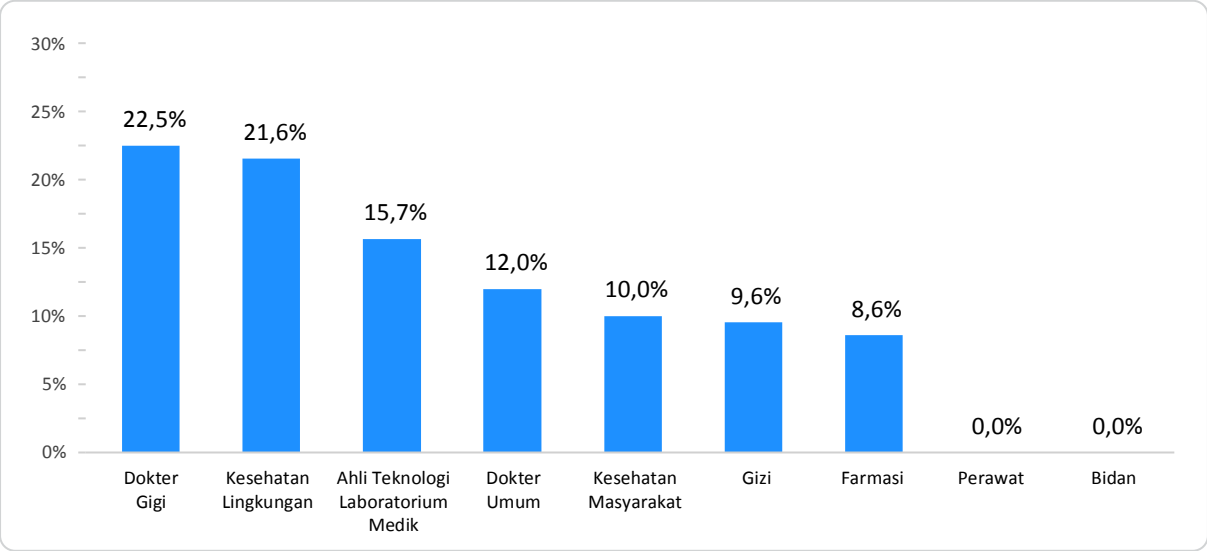

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Individu berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Program Internsip Dokter

Program internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022). Sejak tahun 2022, program internsip wajib diikuti oleh dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis. Dokter dan dokter gigi peserta program internsip harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Surat Izin Praktek (SIP) Internsip yang dikeluarkan oleh kepala dinas kabupaten/kota atau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di masing-masing kabupaten/kota. STR untuk kewenangan internsip dan SIP internsip hanya berlaku di wahana internsip selama menjalani internsip. Dokter peserta program internsip ditempatkan selama satu tahun di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

Pemberangkatan dokter peserta internsip sebanyak empat kali dalam satu tahun. Jika dibandingkan jumlah dokter peserta internsip tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2023 diberangkatkan empat angkatan berjumlah 10.901 orang. Jumlah dokter peserta internsip yang diberangkatkan pada bulan Februari sebanyak 2.411 orang, bulan Mei sebanyak 2.668 orang, bulan Agustus sebanyak 3.068 orang, dan bulan November sebanyak 2.754 orang. Secara regional, proporsi terbesar dokter peserta internsip yaitu regional Jawa-Bali (5.216 orang) dengan jumlah dokter peserta internsip terbanyak adalah Jawa Timur (1.459 orang). Provinsi dengan jumlah dokter peserta internsip paling sedikit adalah Papua Selatan (9 orang), Papua Tengah (0 orang), Papua Pegunungan (0 orang), dan Papua Barat Daya (0 orang), dikarenakan keempat provinsi tersebut merupakan provinsi baru hasil pemekaran berdasarkan SK Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022.

Internsip dokter gigi mulai dilaksanakan pada November tahun 2022, dan pertama kalinya ditempatkan sebanyak 392 orang Dokter Gigi. Pada tahun 2023 proporsi regional terbesar dokter gigi peserta internsip berada di regional Pulau Jawa sebanyak 1.615 orang dengan jumlah dokter gigi peserta internsip terbanyak di Provinsi Jawa Timur sebanyak 442 orang dan paling sedikit berada di Provinsi Sulawesi Barat, dimana ditempatkan 5 orang peserta. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter peserta internsip tahun 2023 dapat dilihat di Lampiran 11.m.

GAMBAR 3.20
PROPORSI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA INTERNSIP DI INDONESIA TAHUN 2023

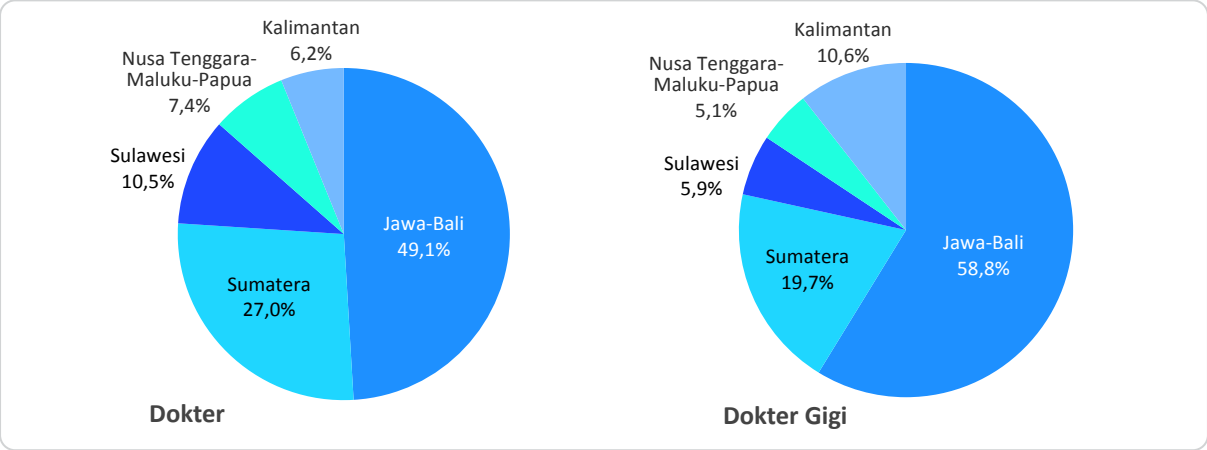

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

Pendayagunaan dokter spesialis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan spesialistik, pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah, dan mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Terdapat tujuh jenis spesialis yang termasuk kedalam PGDS, yaitu spesialis anak (Sp.A), spesialis obstetric dan ginekologi (Sp.OG), spesialis penyakit dalam (Sp.PD), spesialis bedah (Sp.B), spesialis anastesi dan terapi intensif (Sp.An), spesialis patologi klinik (Sp.PK), dan spesialis radiologi (Sp.Rad).

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62P/HUM/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Permohonan Uji Materiil atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), telah dilakukan pembaruan terhadap regulasi penempatan dokter spesialis yang semula WKDS menjadi Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

Pada tahun 2023 telah ditempatkan sejumlah 586 orang dokter spesialis yang ditempatkan di 38 provinsi, termasuk juga RS milik institusi TNI/POLRI dan K/L lainnya yang mengikuti program PGDS. Peserta PGDS terbagi menjadi Peserta Penerima Bantuan Langsung (PBL) ASN dan Peserta Penerima Bantuan Tidak Langsung (PBTL) non ASN. Peserta Penerima Bantuan Langsung adalah peserta yang menerima bantuan biaya pendidikan (tugas belajar) yang bersumber dari APBN/APBD. Peserta Penerima Bantuan Tidak Langsung adalah peserta yang menerima bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Pusat melalui fakultas kedokteran dan RS yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis.

Sebesar 46,8% dari peserta PGDS merupakan peserta PBL ASN yaitu sejumlah 274 orang, sedangkan peserta PBTL-non ASN sejumlah 312 orang. Provinsi dengan penempatan dokter spesialis pada PGDS terbanyak adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sejumlah 58 orang, kemudian untuk Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah memiliki jumlah penempatan PGDS masing-masing sejumlah 33 dan 30 orang. Provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Papua Barat dan Papua Barat Daya yaitu sejumlah 1 orang.

Jenis spesialisasi terbanyak pada penempatan PGDS tahun 2023 adalah dokter spesialis penyakit dalam (132 orang), sedangkan penempatan jenis spesialisasi yang paling sedikit adalah dokter spesialis patologi klinik (30 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada PGDS tahun 2023 dapat dilihat di Lampiran 11.o.

GAMBAR 3.21
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2023

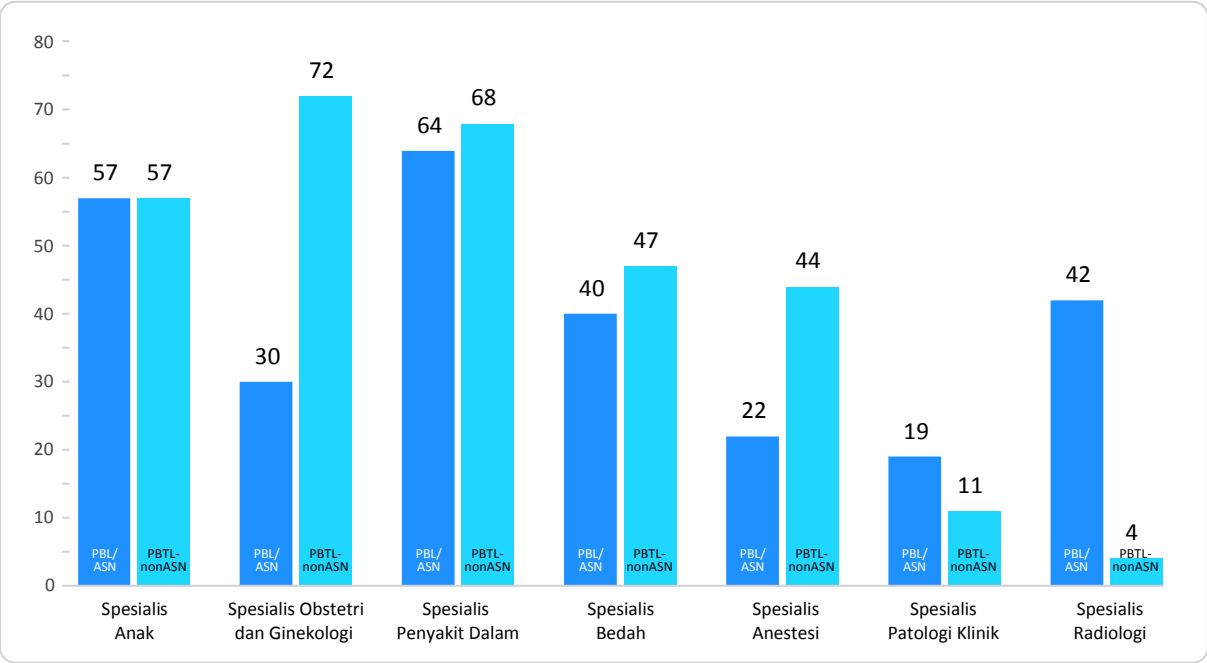

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal Diploma III kecuali tenaga medis. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi, dan standar pelayanan profesi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri, keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan bertanggungjawab terhadap pembinaan teknis institusi Poltekkes sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebanyak 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan tersebar di 33 provinsi. Poltekkes Kemenkes memiliki 507 program studi yang terdiri dari 300 program studi strata Diploma III (296 program studi reguler dan 4 program studi PJJ), 154 program studi strata Sarjana Terapan (Diploma IV), 49 program studi

pendidikan profesi, dan 4 program studi Magister Terapan. Kelompok jurusan di Poltekkes terdiri dari:

1. Keperawatan, yang terdiri dari Keperawatan dan Keperawatan Gigi;
2. Kebidanan;
3. Kefarmasian, yang terdiri dari Farmasi serta Analis Farmasi dan Makanan,
4. Kesehatan Tradisional;
5. Kesehatan Lingkungan;
6. Gizi;
7. Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari Promosi Kesehatan;
8. Keterapian Fisik, yang terdiri dari Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, dan Akupunktur dan Pengobatan Herbal;
9. Keteknisian Medis, yang terdiri dari Teknik Gigi, Kesehatan Gigi, Keperawatan Anestesiologi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Teknologi Bank Darah;
10. Teknik Biomedika, yang terdiri dari Teknologi Laboratorium Medis, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Teknik Elektromedik, dan Ortotik Prostetik.
11. Lainnya (Asuransi Kesehatan)

Dalam rangka memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Diploma III bagi tenaga kesehatan, sejak tahun 2016 Kementerian Kesehatan mengadakan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Program ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, dimana salah satunya berisi tentang pembiayaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau sumber lain yang tidak mengikat. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan berakhir pada tahun 2020. Selanjutnya, program RPL mengikuti ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan tidak lagi mendapat bantuan pendanaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan.

Selain jenjang Diploma, Poltekkes juga membuka program studi Magister Terapan dan Profesi. Program studi Magister Terapan dibuka di Poltekkes Semarang dengan program studi Magister Terapan Kebidanan, Keperawatan, Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan Magister Terapan Teknik Biomedika *(Imaging Diagnostic).* Sementara itu, untuk program studi profesi yang dibuka adalah Profesi Bidan, Ners, Dietisien, dan Fisioterapi.

1. Jumlah Lulusan Poltekkes

Jumlah lulusan Poltekkes pada tahun 2023 sebanyak 34.234 orang, atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 28.731 orang. Jumlah lulusan poltekkes tahun 2023 terdiri dari lulusan diploma III sebanyak 19.995 orang, diploma IV sebanyak 9.752 orang, program profesi sebanyak 4.336 orang, dan magister terapan sebanyak 151 orang. Program studi Keperawatan memiliki lulusan terbanyak, yaitu 6.171 orang lulusan Diploma III dan 1.849 orang lulusan Diploma IV. Program studi Akupunktur memiliki lulusan paling sedikit, yaitu sebanyak 66 orang lulusan Diploma III dan 76 orang lulusan Diploma IV. Secara umum, lulusan Diploma III lebih banyak dibandingkan dengan Diploma IV untuk hampir semua program studi. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.g dan Lampiran 16.h.

GAMBAR 3.22
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

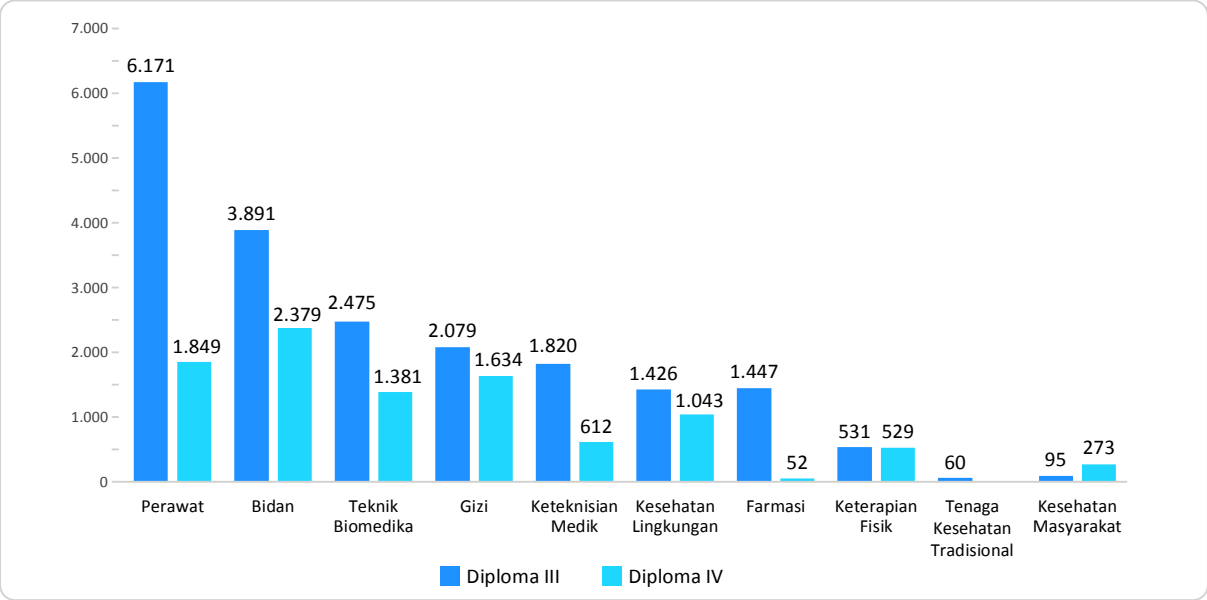

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Selain jenjang diploma, pada tahun 2023 Poltekkes juga menghasilkan lulusan program profesi sebanyak 4.336 orang dengan rincian 2.257 orang lulusan Profesi Bidan, 1.835 orang lulusan Profesi Ners, 101 orang Profesi Dietisien, dan 143 orang lulusan Profesi Fisioterapi. Jumlah lulusan profesi tahun 2023 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 3.939 orang.

Lulusan program studi Magister Terapan Poltekkes tahun 2023 berjumlah 151 orang, dengan rincian 60 orang lulusan Magister Terapan Kebidanan, 17 orang lulusan Magister Terapan Keperawatan, 33 orang lulusan Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan 41 orang Magister Terapan *Imaging* Diagnostik. Rincian mengenai jumlah lulusan program profesi di Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.i.

GAMBAR 3.23
JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

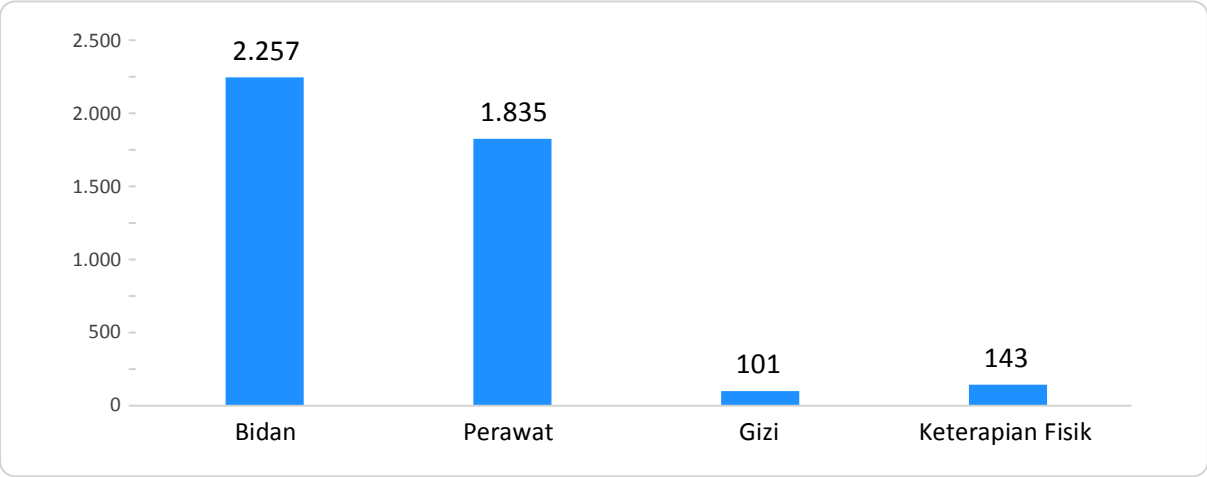

Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

Sebagai upaya mencapai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan membina dan mengembangkan perguruan tinggi di bawah kewenangannya. Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat sebanyak 334.194 lulusan bidang kesehatan serta matematika dan ilmu pengetahuan alam dari 5.155 program studi di 1.204 lembaga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTK/L). Jenjang pendidikan yang ada di perguruan tinggi terdiri dari D1, D2, D3, D4, S1, Profesi, Spesialis 1, Spesialis 2, S2, S2 Terapan, dan S3. Perguruan tinggi, khususnya di bidang kesehatan diharapkan dapat mencetak lulusan sumber daya manusia Kesehatan yang mampu dan siap bekerja sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten.

Berdasarkan perguruan tinggi pada kelompok bidang kesehatan dan bidang lain terkait kesehatan dengan jenjang D3, D4, S1, S2, S3, Spesialis, dan Profesi, jumlah lulusan tenaga kesehatan pada tahun 2023 sebesar 334.194 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan jumlah tahun lalu, yaitu 200.899 orang. Menurut rumpun tenaga kesehatan, jumlah lulusan perguruan tinggi terbanyak adalah perawat, yaitu sejumlah 113.045 orang, diikuti oleh bidan sebanyak 63.627 orang, dan tenaga kefarmasian 50.506 orang. Jumlah lulusan perguruan tinggi paling sedikit adalah tenaga teknik biomedik yaitu sejumlah 22 orang.

GAMBAR 3.24
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

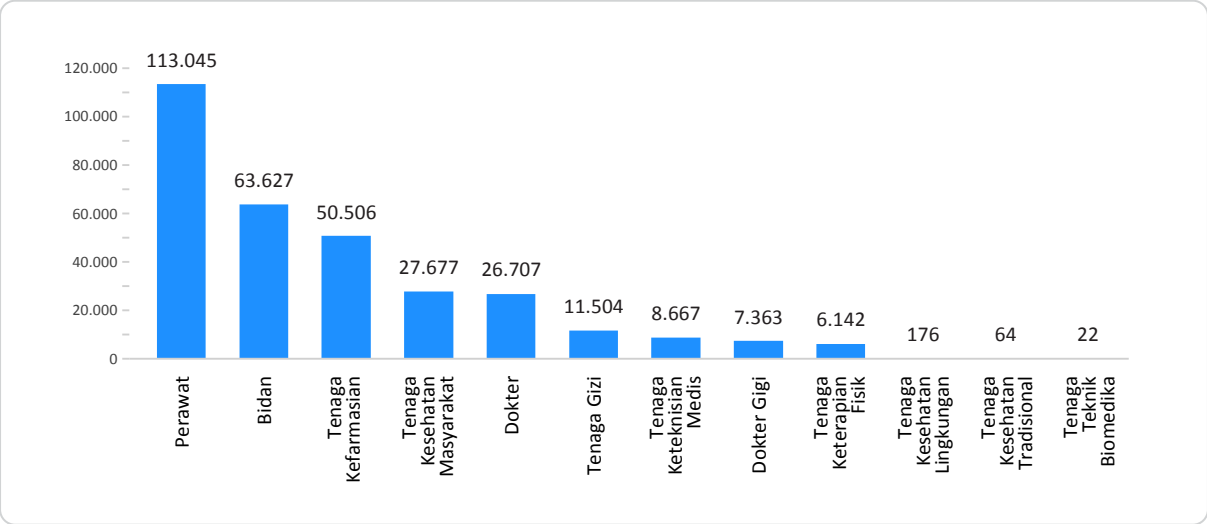

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sejumlah 44.749 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sejumlah 43.148 orang, dan Jawa Barat sejumlah 36.993 orang. Provinsi dengan jumlah lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu sebanyak 241 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi menurut jenis tenaga kesehatan dan provinsi tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 16.j.

GAMBAR 3.25
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

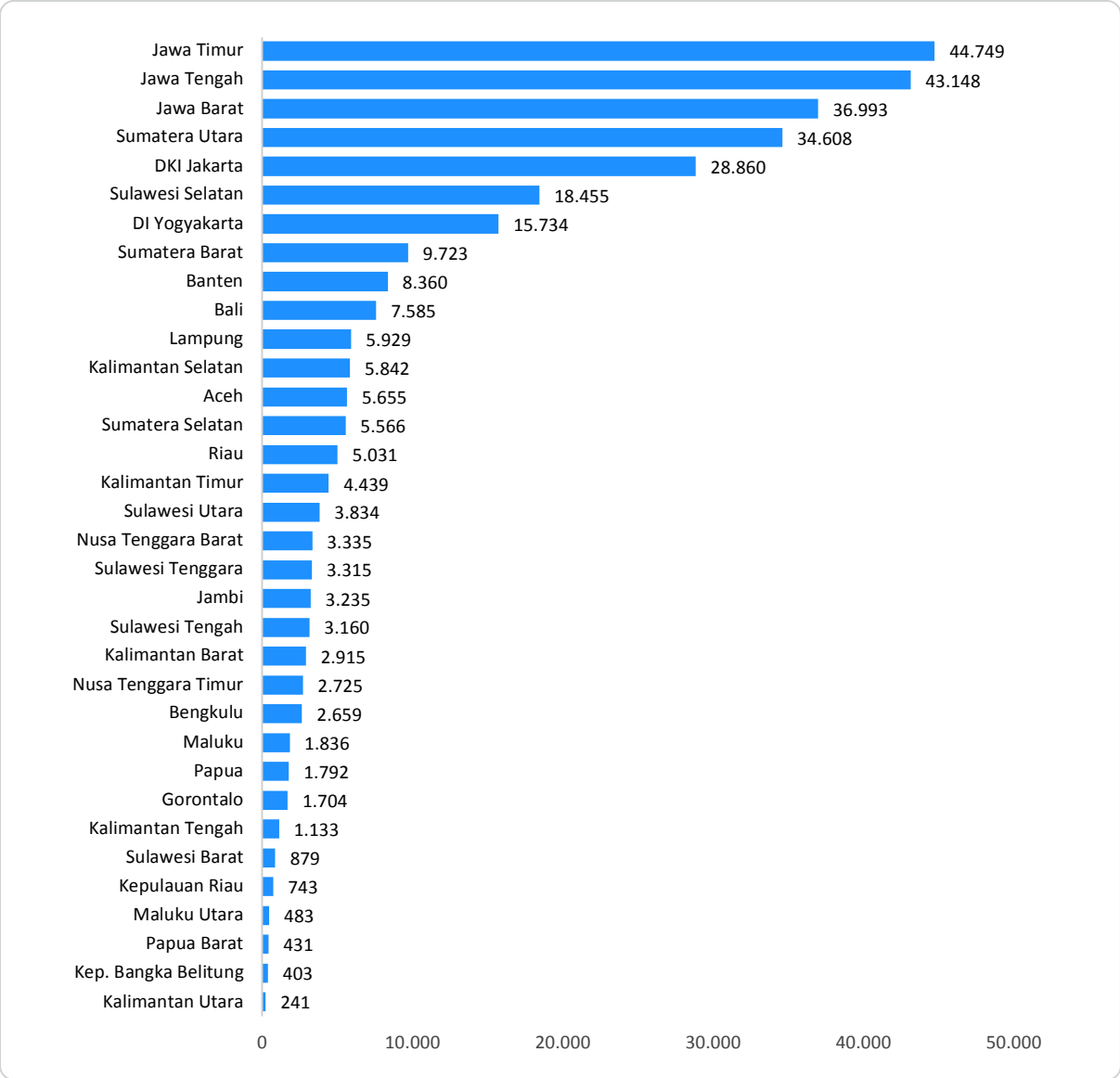

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Jumlah lulusan perguruan tinggi untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tahun 2023 sebanyak 4.912 orang yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Lulusan dokter spesialis terbanyak adalah dokter spesialis bedah sejumlah 510 orang, diikuti oleh dokter spesialis penyakit dalam sejumlah 473 orang. Sementara itu, dokter spesialis lain, di luar yang disebutkan bidang spesialisasi secara spesifik berjumlah 2328 orang dan dokter gigi spesialis berjumlah 377 orang. Dokter spesialis lulusan tahun 2023 yang paling sedikit adalah dokter spesialis patologi anatomi sejumlah 76 orang. Dokter Spesialis Radiologi pada tahun 2023 ini tergabung pencatatannya ke dalam Dokter Spesialis Lain.

GAMBAR 3.26
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2023

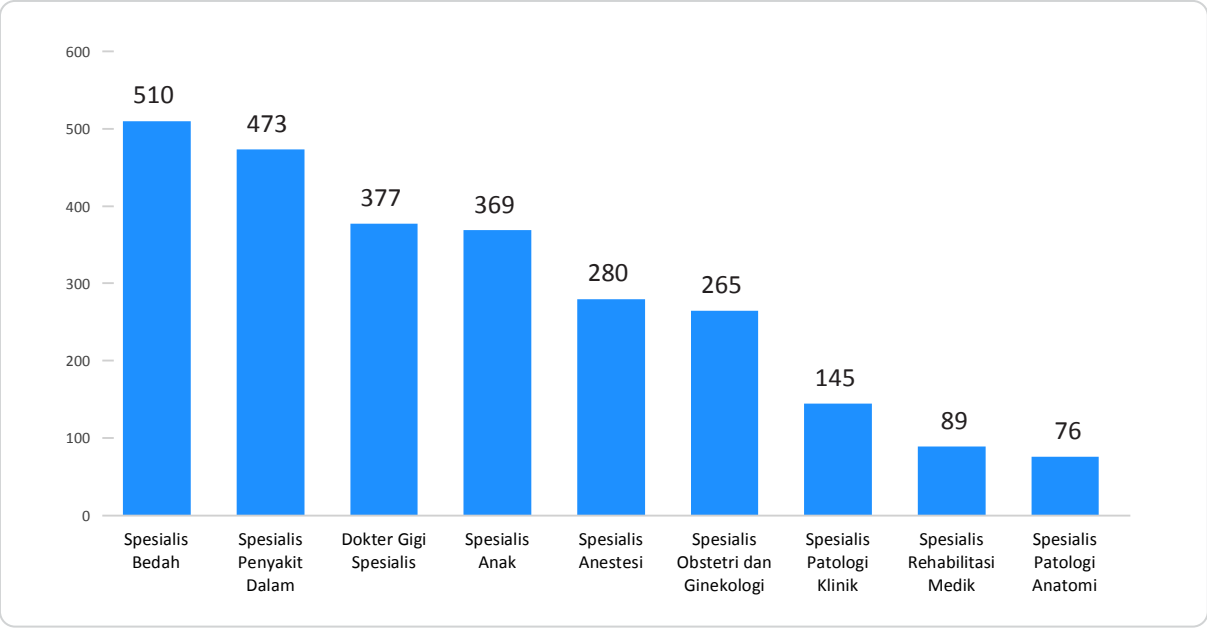

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi dokter spesialis dan dokter spesialis gigi menurut provinsi tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 16.k.

***

BAB IV.
PEMBIAYAAN KESEHATAN

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan Kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan anggaran berbasis kinerja *(money follow program)*, artinya Pemerintah harus mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan program prioritas.

Di dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan bersumber dari pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 ini memiliki alokasi anggaran sebesar 97,4 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 94,6 triliun rupiah. Alokasi anggaran tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 33,6 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dibandingkan dengan persentase realisasi tahun sebelumnya, tahun 2023 juga mengalami peningkatan, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 sebesar 97,0%, turun dari tahun 2022 sebesar 92,6%.

GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2019-2023

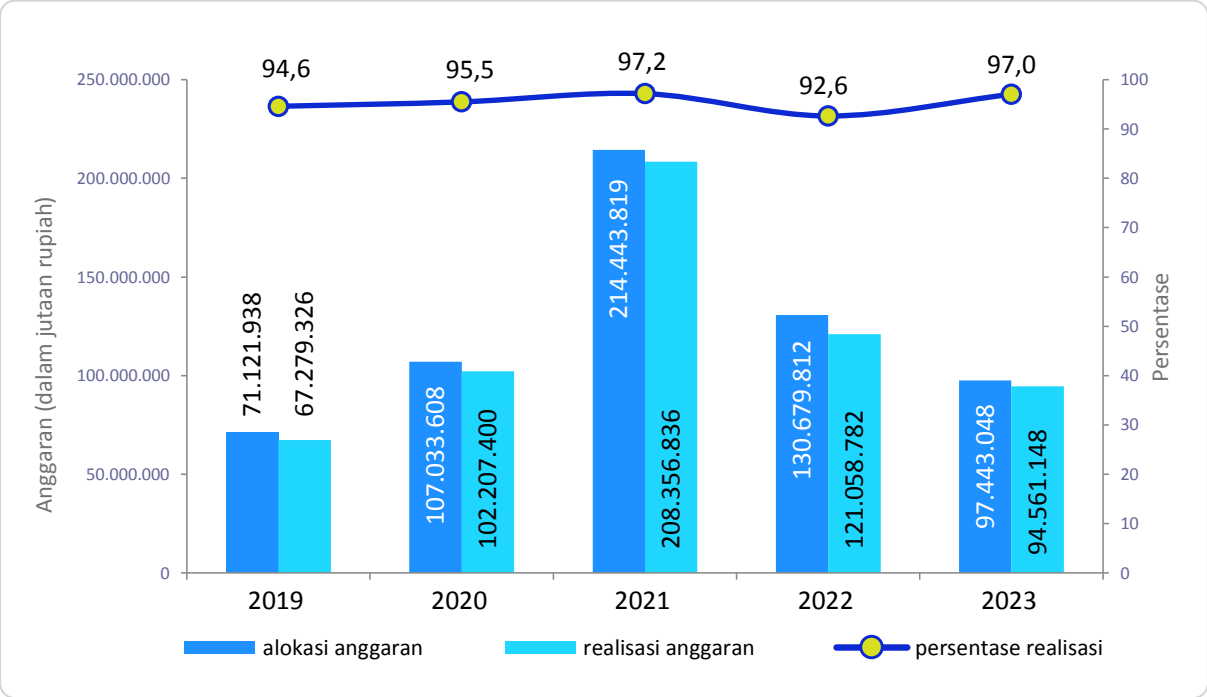

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2024

Gambar 4.1 menunjukkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun 2019-2023 berfluktuasi, dengan alokasi dan realisasi tertinggi pada tahun 2021.

Distribusi anggaran berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit Eselon I (Gambar 4.2) menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal sebesar 52,3 triliun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 36,6 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Inspektorat Jenderal sebesar 99,8%, sedangkan realisasi terendah adalah Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan persentase realisasi sebesar 92,7%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut eselon I pada tahun 2023 selengkapnya terdapat pada Lampiran 20.b.

GAMBAR 4.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2023

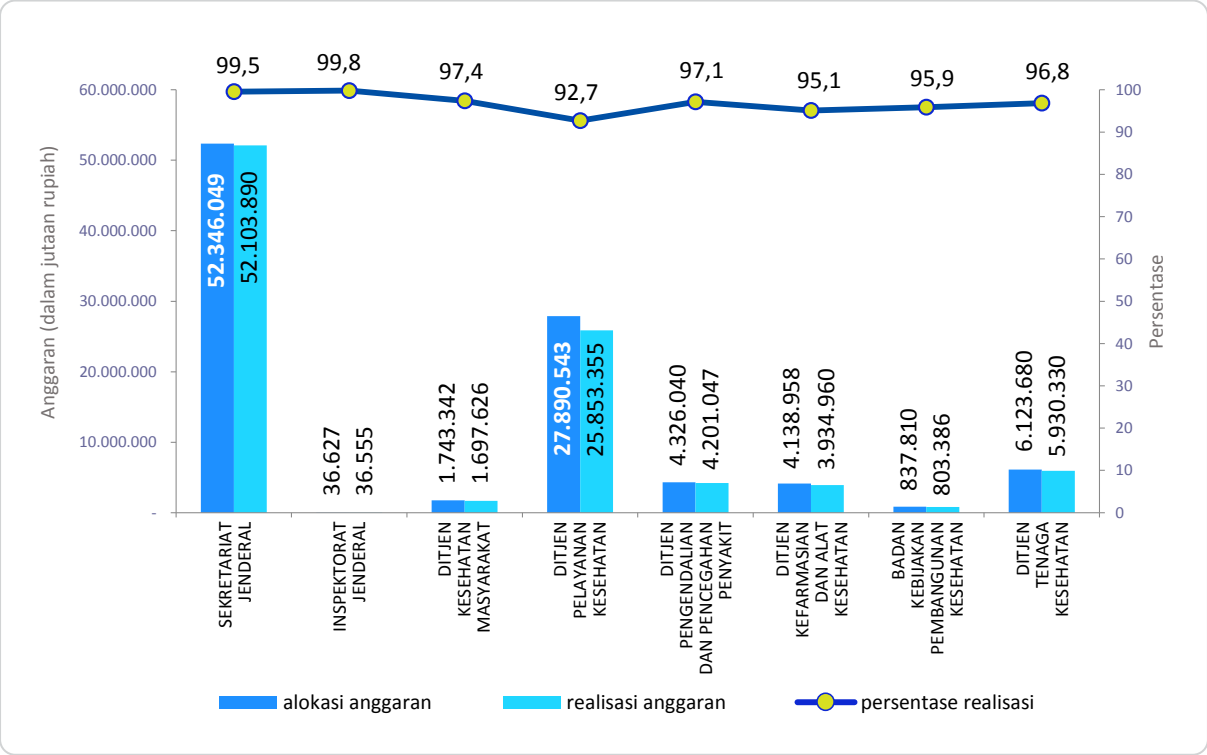

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2024

Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 97,4 triliun rupiah, sebanyak 46,4 triliun rupiah atau sebesar 47,6% merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Kesehatan. Anggaran terbesar berikutnya dialokasikan untuk belanja barang sebesar 38,0%, belanja modal sebesar 8,9% dan belanja pegawai 5,5%. Untuk persentase realisasi berdasarkan jenis belanja yang paling tinggi adalah belanja bansos sebesar 99,9% dan yang paling rendah adalah belanja modal sebesar 90,7% (Gambar 4.3 dan 4.4). Rincian alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut jenis belanja tahun anggaran 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20.c.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2023

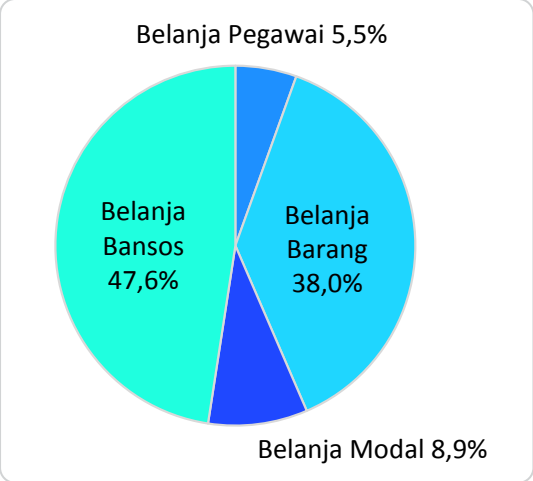

GAMBAR 4.4
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2023

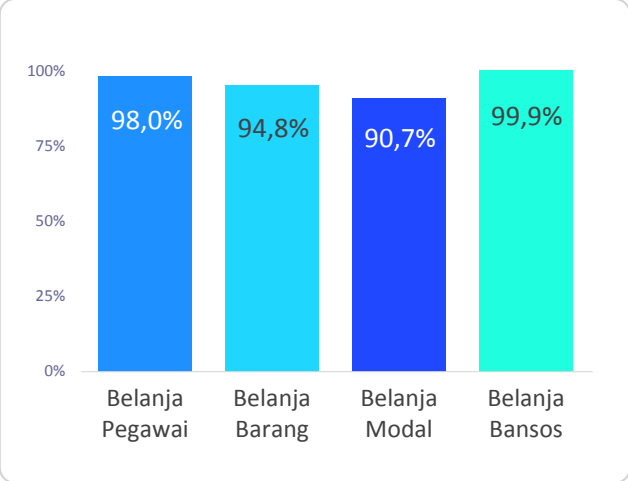

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2024

B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP. Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada GWPP. Dana dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN, yang digunakan untuk penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP yang meliputi pembinaan, pengawasan umum, dan teknis serta pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023, untuk pelaksanaan transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dengan dana dekonsentrasi dengan tujuan meningkatkan capaian program pembangunan kesehatan nasional. Anggaran dekonsentrasi pada Permenkes 16 tahun 2023 dengan anggaran Rp. 564.870.319.000,00.

Adapun pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada tahun berjalan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran prioritas, penting dan mendesak serta dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja telah dilakukan optimalisasi dan *refocusing* terhadap dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai pagu dan realisasi anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan menurut provinsi tahun anggaran 2023 disajikan pada Lampiran 20.e.

Realisasi dana dekonsentrasi paling tinggi di Provinsi Bengkulu sebesar 99,1%, sedangkan realisasi terendah adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 48,8%. Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5. Realisasi dana dekonsentrasi yang masih rendah, oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, termasuk analisis mengenai kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi pada setiap program di tiap provinsi.

GAMBAR 4.5
REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

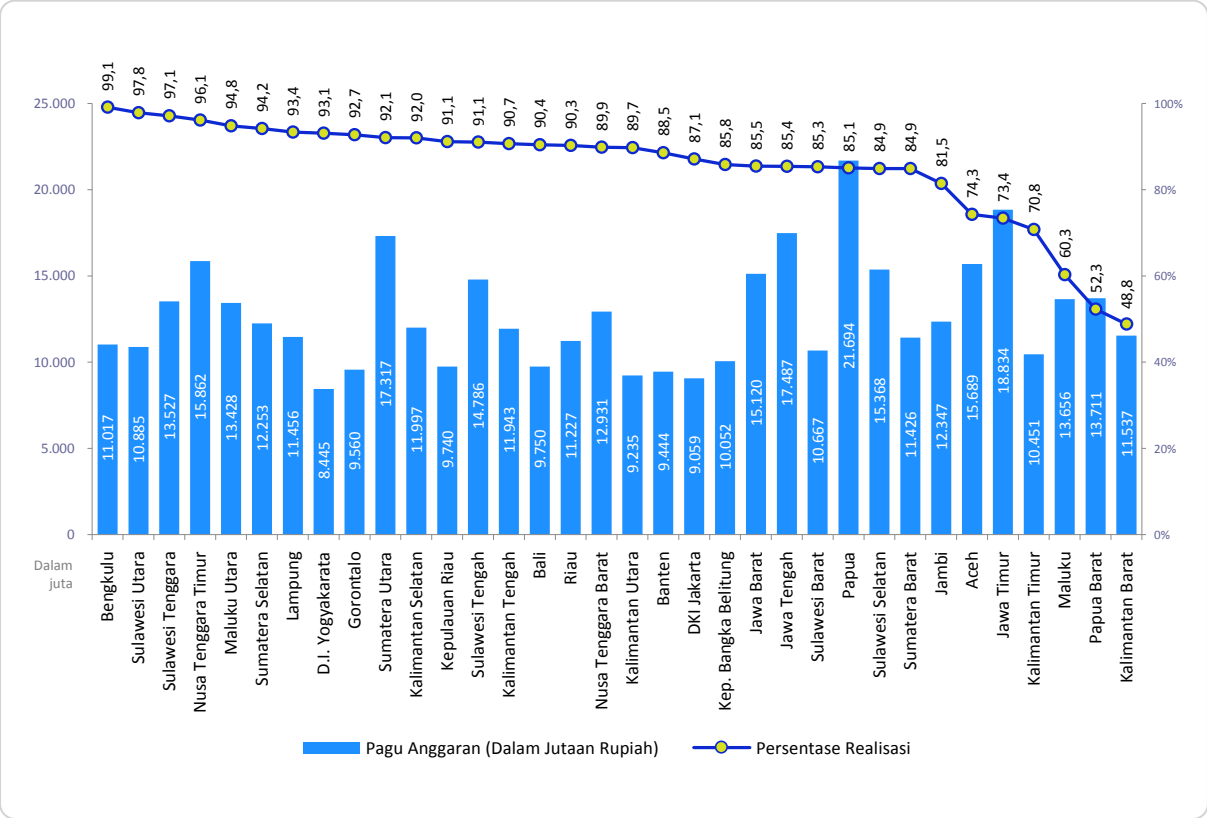

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2024 (OMSPAN, Kementerian Keuangan, 31 Desember 2023)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu. Tujuan pemberian DAK untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2023 tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

DAK fisik bidang kesehatan diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti penyediaan sarana prasarana, dan alat kesehatan puskesmas; pengadaan perangkat Sistem Informasi Kesehatan; penyediaan alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan; kelanjutan rumah sakit dan puskesmas yang belum operasional; penguatan laboratorium kesehatan daerah; pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau renovasi gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota; penyediaan alat Kesehatan dan prasarana di rumah sakit; dan peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota; penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat daerah kabupaten/kota; pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana prasarana instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan DAK non fisik bidang kesehatan terdiri atas: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan.

Pelaporan DAK bidang kesehatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri secara berkala (triwulan dan tahunan). Sedangkan untuk data realisasi dilaporkan melalui Sistem Informasi Keuangan daerah (IKD) Kemenkeu untuk DAK Fisik dan e-renggar Kemenkes untuk Dak Non Fisik. *Outcome* Jangka Pendek *(Immediate outcome)* dilaporkan melalui aplikasi KRISNA Bappenas.

Pada tahun 2023, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2023 secara nasional sebesar 69,9% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi Bangka Belitung (94,7%) dan terendah adalah Provinsi Papua (36,4%) serta DKI Jakarta (0%), sebagaimana terlihat pada Gambar 4.6 berikut.

GAMBAR 4.6
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

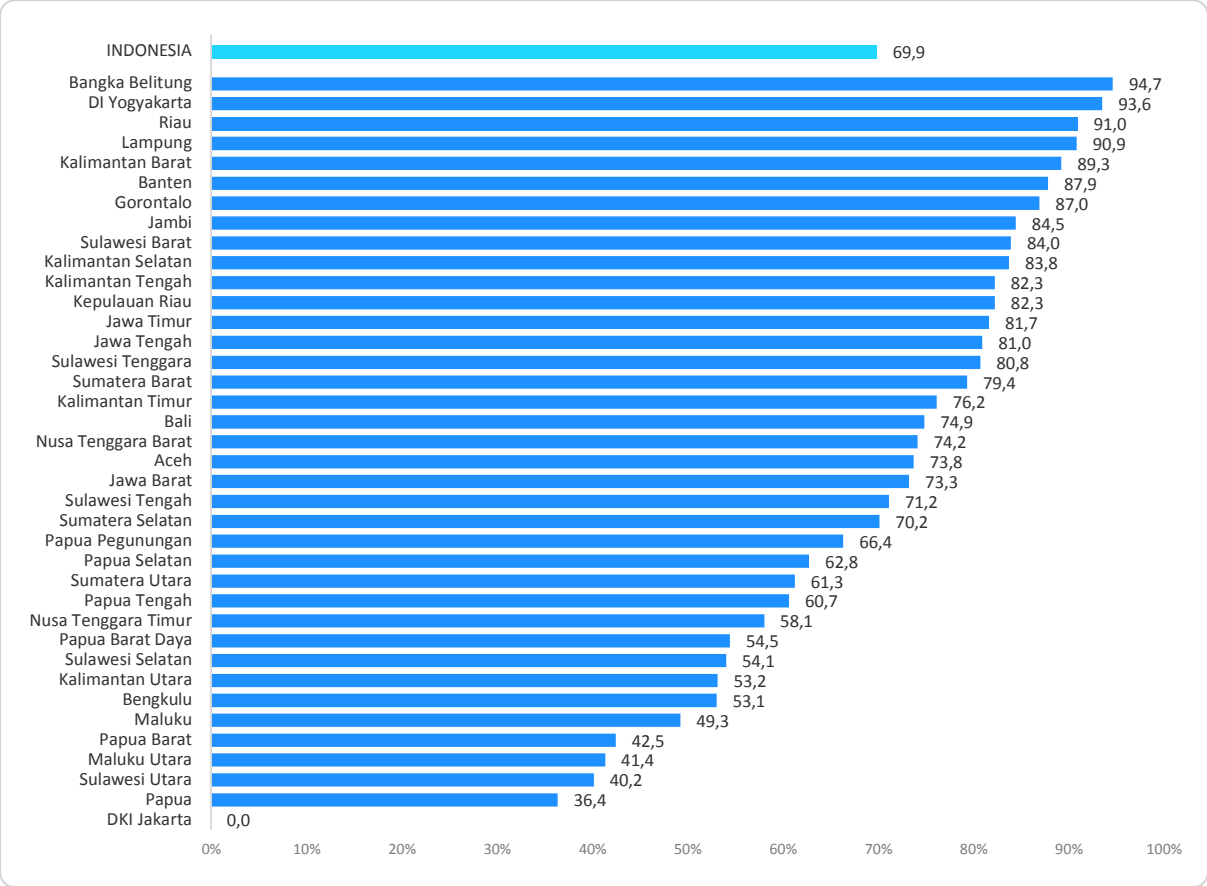

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2024

Untuk realisasi DAK non fisik Tahun 2023 secara nasional adalah 77,1% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (87,1%) dan terendah adalah Provinsi Kalimantan Timur (61,9%) dan 5 (lima) Provinsi dengan tidak ada data (0) yaitu DKI, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.7.

GAMBAR 4.7
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

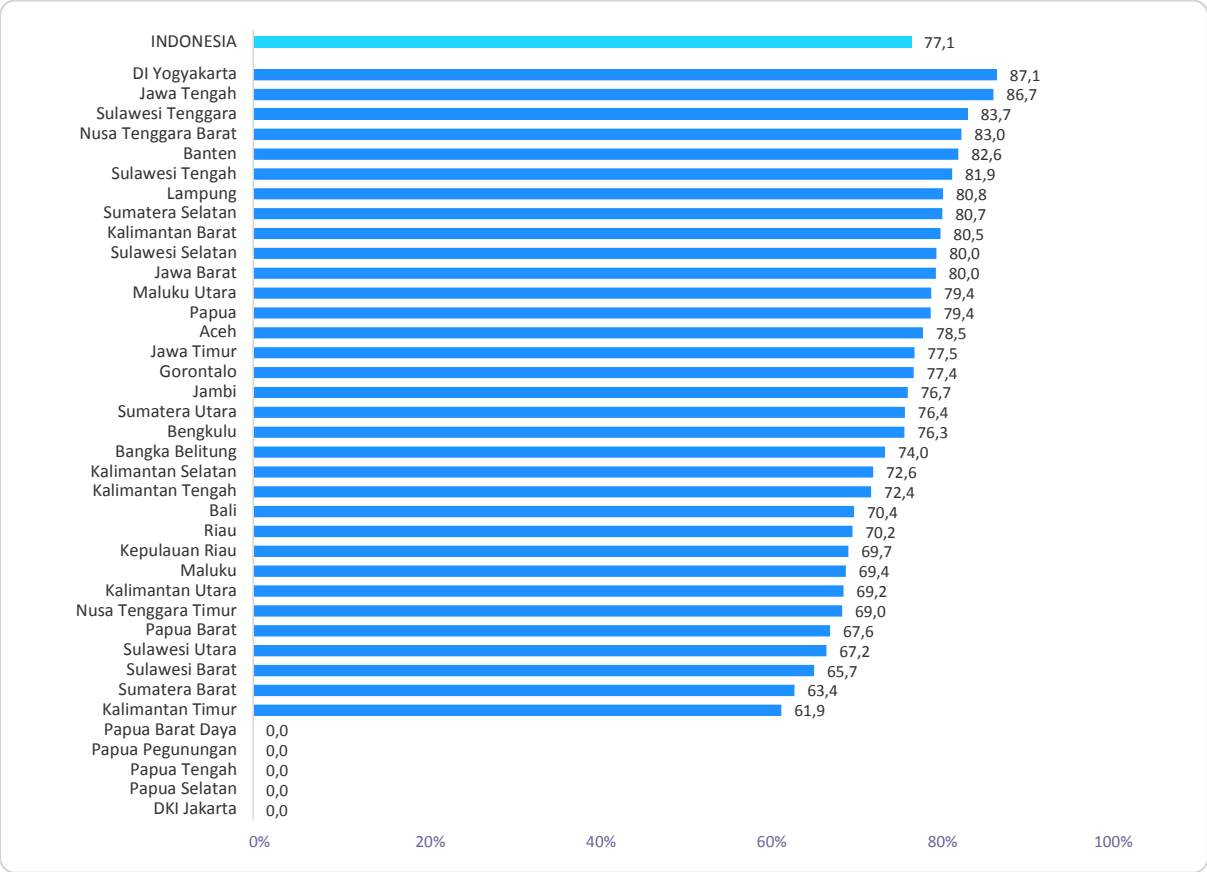

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2024

C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Pada tahun 2023, telah terbit Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan yang mengamanatkan anggaran berbasis kinerja *(money follow program)*, artinya Pemerintah harus mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan program prioritas. Undang-Undang Kesehatan ini juga mengganti prinsip anggaran dari mandatory spending menjadi *mandatory services*. Penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan dapat mendanai pembangunan kesehatan secara berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, efektif, efisien dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

National Health Accounts (NHA) atau Akun Kesehatan Nasional merupakan suatu instrumen strategis untuk memahami pola belanja kesehatan suatu negara. Akun kesehatan ini secara komprehensif dapat memotret aliran belanja kesehatan yang mencakup sumber dana, mekanisme pendanaan, institusi pengelola dana, penyedia layanan, serta penggunaan belanja tersebut. NHA dapat dimanfaatkan dalam pemberian input terkait efisiensi, efektivitas, serta keselarasan (sinergisme) baik dengan arahan program prioritas maupun regulasi yang ada.

Indonesia telah memproduksi NHA menggunakan metode *System of Health Accounts* (SHA) 2011 yang merupakan metode standar internasional sehingga dapat melihat posisi Indonesia

dibandingkan dengan berbagai negara. Data NHA juga telah didistribusikan secara global dalam *World Health Report* yang terpublikasi setiap tahunnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebagai negara dengan kebijakan single payer (hanya ada satu pengumpul premi dan sekaligus berfungsi sebagi badan penyelenggara) terbesar di dunia, banyak negara memberi perhatian pada pembiayaan kesehatan di Indonesia untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka menuju *Universal Health Coverage* (UHC). Dari data NHA tahun 2022, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, diantaranya penguatan pendanaan untuk menunjang upaya preventif dan promotif, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), edukasi kesehatan untuk pola hidup bersih sehat, imunisasi, *surveilance*, skrining, pengadaan pola makan tambahan, dan lain-lain. Penguatan pendanaan untuk layanan di FKTP serta pendanaan preventif-promotif akan membangun sistem layanan Kesehatan yang lebih kokoh terhadap berbagai kejadian tidak terduga termasuk adanya pandemik COVID-19.

1. Total Belanja Kesehatan Indonesia/Total Health Expenditure (THE)

Total Belanja Kesehatan (TBK) atau secara internasional dikenal dengan istilah *Total Health Expenditure* (THE), maupun dalam bentuk *Current Health Expenditure* (CHE). Dalam publikasi ini, indikator yang akan digunakan adalah THE. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi belanja kesehatan pemerintah yang juga dibelanjakan untuk investasi di bidang kesehatan.

Tabel 4.2 di bawah menunjukkan total belanja kesehatan Indonesia selama tahun 2013-2022 menunjukkan terdapat peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terjadi peningkatan belanja kesehatan hampir 2 (dua) kali lipat, dari Rp287,5 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp569,4 triliun pada tahun 2022. Proporsi belanja kesehatan terhadap PDB hanya mengalami fluktuasi kenaikan sebesar 0,6% yaitu dari 3,0% di tahun 2013 menjadi 2,9% di tahun 2022, namun meski demikian belanja kesehatan perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar Rp1.155.370 (US $94,7) menjadi Rp2,1jt (US $131) di tahun 2022.

TABEL 4.1
TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2013-2022

Tahun	Total Belanja Kesehatan (Triliun Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (US $)	% THE terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2013	287,5	1.155.370	94,7	3%
2014	324,6	1.287.311	103,5	3,1%
2015	358,3	1.402.743	101,7	3,1%
2016	399,3	1.553.258	115,6	3,2%
2017	421,7	1.610.217	118,9	3,1%
2018	447,9	1.690.385	116,7	3%
2019	488,3	1.821.579	131,0	3,1%
2020	563,0	2.076.987	147,3	3,6%
2021	677,9	2.474.591	173,4	4,00%
2022	569,4	2.056.770	130,8	2,90%

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Gambar 4.8 di bawah menunjukkan proporsi belanja kesehatan menurut skema pendanaan kesehatan yang meliputi sektor publik (skema Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), Asuransi Kesehatan Sosial (JKN) dan sektor non publik (skema Asuransi Kesehatan Swasta, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), Korporasi, dan Pembiayaan Rumah Tangga). Porsi belanja skema asuransi kesehatan sosial terhadap total belanja kesehatan menunjukkan peran dan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat di negara tersebut. Selain itu menunjukkan bahwa peningkatan porsi belanja pada skema asuransi kesehatan sosial seiring dengan penurunan pada porsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga. Tren belanja kesehatan pada skema pembiayaan dari kantong rumah tangga yang cenderung menurun secara proporsi sejak tahun 2013 hingga tahun 2022. Secara proporsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga menurun (dari 48,5% pada tahun 2013 menjadi 30,5 % pada tahun 2022), namun secara nominal mengalami kenaikan dari tahun 2013–2022 (dari Rp139,4 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp173,9 triliun pada tahun 2022). Hal ini merupakan dampak langsung dari pertumbuhan pasar di sektor kesehatan.

Pendanaan kesehatan sektor publik terdiri dari skema kementerian Kesehatan, Skema K/L lain, Skema Pemda dan Skema Askes Sosial. Sedangkan pendanaan kesehatan sektor non publik terdiri dari Skema askes swasta, skema Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), skema korporasi dan skema pembiayaan rumah tangga (*Out of Pocket* = OOP). Proporsi belanja kesehatan berdasarkan skema pendanaan tahun 2013-2022 dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut.

GAMBAR 4.8
PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2022

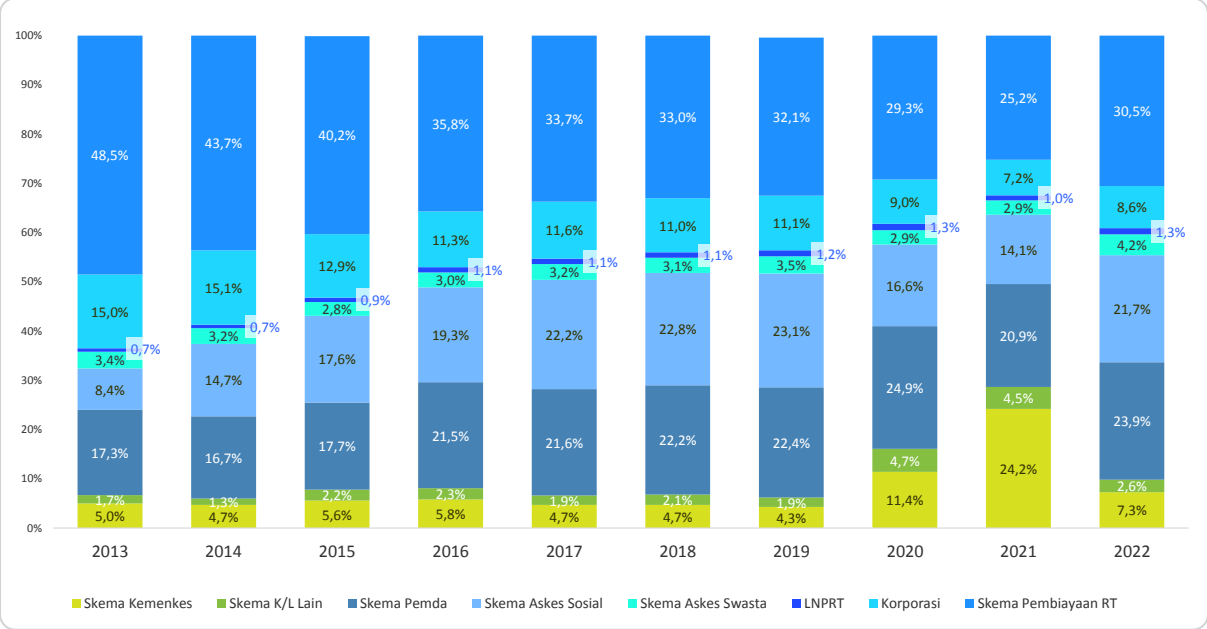

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Belanja kesehatan nasional pada awalnya didominasi pendanaan sektor non publik, terutama yang berasal dari kontribusi pembiayaan rumah tangga. Meskipun begitu, pendanaan dari sektor publik setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari proporsi maupun dari jumlahnya, dimana pada tahun 2013 sebesar 32,4% (Rp93,2 triliun) dari total belanja nasional dan tahun 2022 sebesar 55,4% (Rp315,4

triliun). Tren peningkatan ini terutama terjadi pada skema JKN dan skema pemerintah daerah (Pemda), sementara skema Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan skema K/L lainnya berfluktuasi pada tahun 2013-2019 dan meningkat pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 pola belanja kesehatan kembali ke pola sebelum terjadinya pandemi COVID1-19 walaupun ada peningkatan dari tahun 2013-2019.

Salah satu yang menunjukan tren kenaikan adalah belanja kesehatan pada skema Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota cenderung meningkat selama tahun 2013-2020 namun mengalami penurunan kembali setelah tahun 2021-2022. Peningkatan jumlah belanja kesehatan Pemda diharapkan memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan program-program vertikal yang menjadi indikator kinerja kesehatan nasional. Peran besar daerah dalam mengelola pembiayaan kesehatan tentu saja melahirkan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karenanya, pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program/kegiatan. Mengingat capaian indikator kesehatan menjadi ukuran penting kinerja Kemenkes, maka perlu dilaksanakan juga proses monitoring dan evaluasi terhadap dana transfer dari pusat ke daerah. Hal ini bertujuan agar pendanaan kesehatan yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta berdampak positif pada pembangunan kesehatan.

2. Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya *(managed care).*

Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu (fakir miskin).

Dasar hukum untuk jaminan kesehatan adalah Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Prinsip asuransi sosial yang dimaksud meliputi :

1. Kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah;
2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
3. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan;
4. Bersifat nirlaba.

Sedangkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Pelaksanaan JKN di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan terdiri dari 2 kelompok, yaitu:

1. PBI Jaminan Kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan dibiayai oleh pemerintah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

2. Bukan PBI jaminan kesehatan.

Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari:

- Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
- Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya
- Bukan pekerja dan anggota keluarganya

GAMBAR 4.9
PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2017-2023

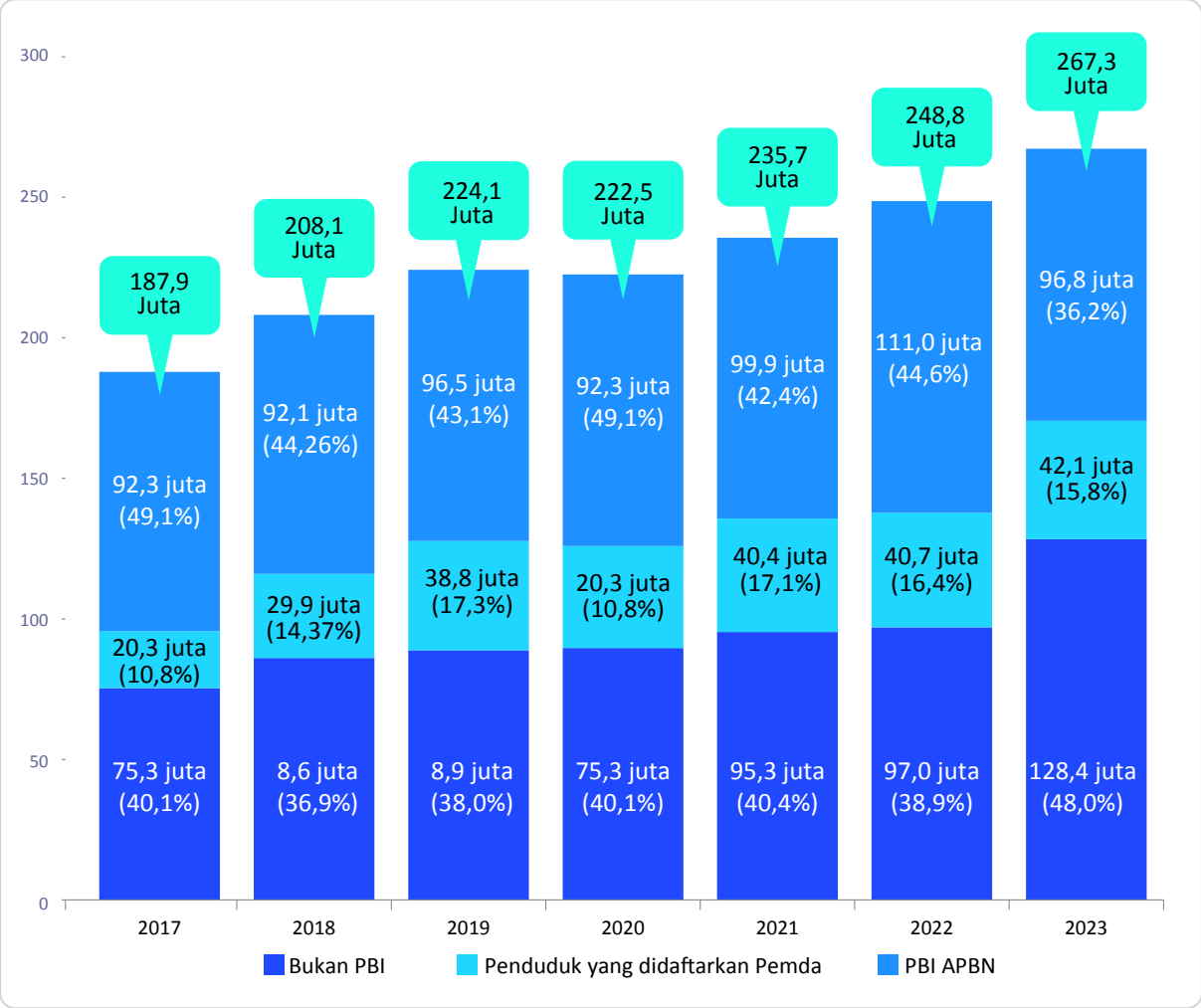

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2024 (Laporan BPJS Kesehatan Bulan Desember 2023)

Pada Tahun 2023, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI (APBN) sebesar 48,0%. Akan tetapi, pertumbuhan peserta pada segmen non PBI mengalami penurunan dari jumlah tahun 2022. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah cakupan kepesertaan JKN/KIS mencapai 267,3 juta jiwa, dimana terjadi peningkatan jumlah kepesertaan dibandingkan dengan jumlah kepesertaan tahun 2022.

GAMBAR 4.10
CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

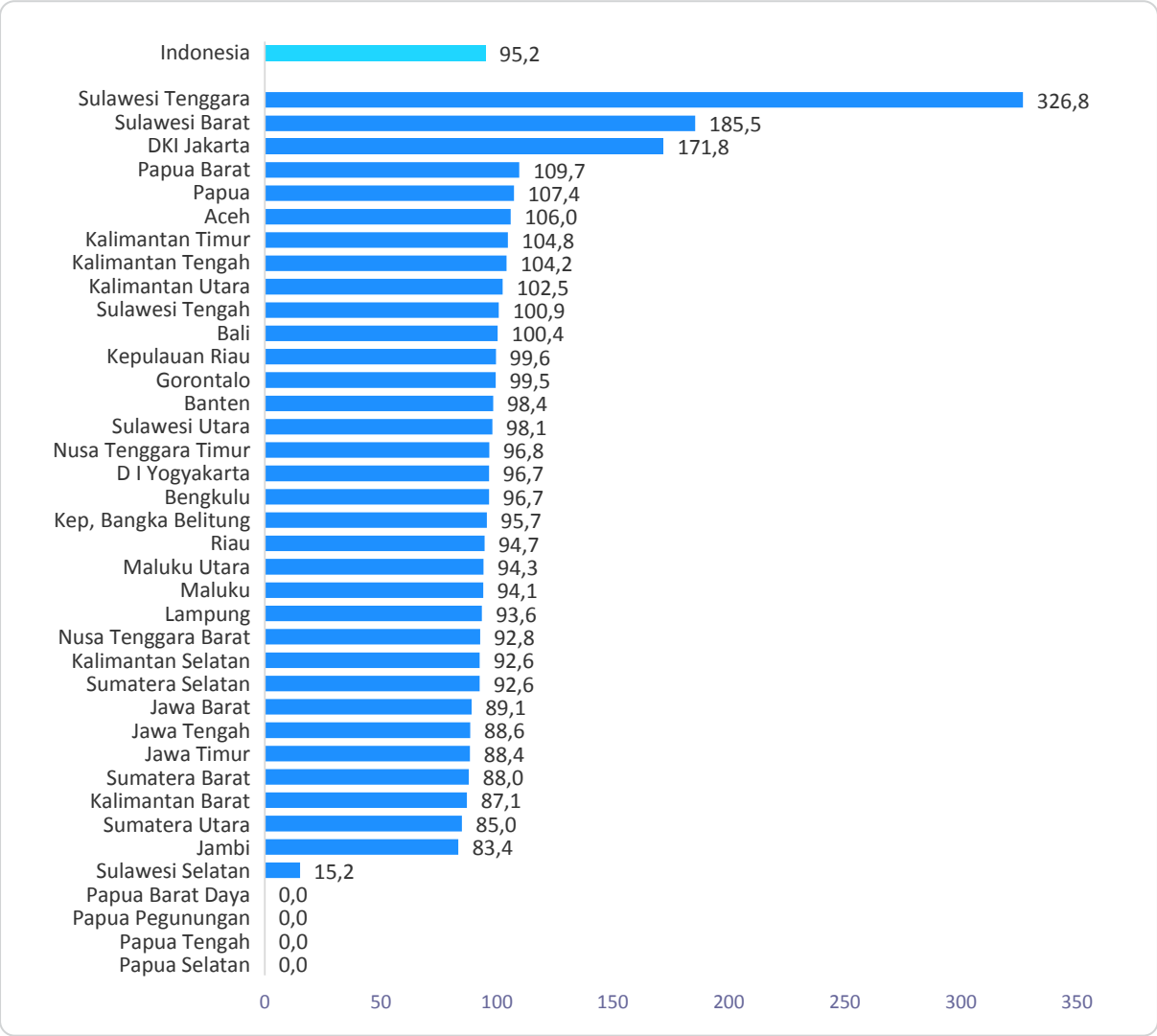

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Bulan Desember 2023

Pada tahun 2023 sebanyak 95,2% penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN). Sebagian besar Provinsi memiliki cakupan kepesertaan lebih dari 83,4%. Terdapat beberapa Provinsi yang memiliki cakupan kepesertaan lebih dari 100%. Hal ini diasumsikan karena adanya perbedaan antara domisili dengan tempat terdaftarnya peserta, sehingga mempengaruhi cakupan kepesertaan di satu provinsi. Provinsi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan sebagai provinsi baru belum ada datanya. Data cakupan kepesertaan JKN di Indonesia menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 19.a.

GAMBAR 4.11
TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2022

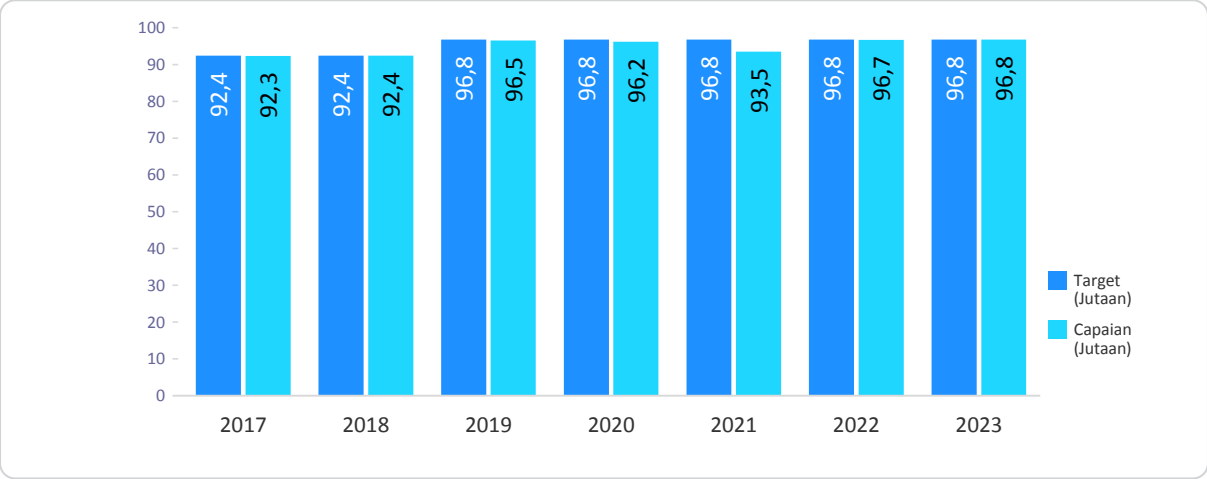

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Pada Tahun 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2023, Menteri Sosial menetapkan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 96,7 juta jiwa dan bayi baru lahir yang belum ada NIKnya sebanyak 98,527 jiwa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memperoleh data PBI Jaminan Kesehatan yang mutakhir, tepat sasaran, tepat waktu, dan valid.

GAMBAR 4.12
ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2023

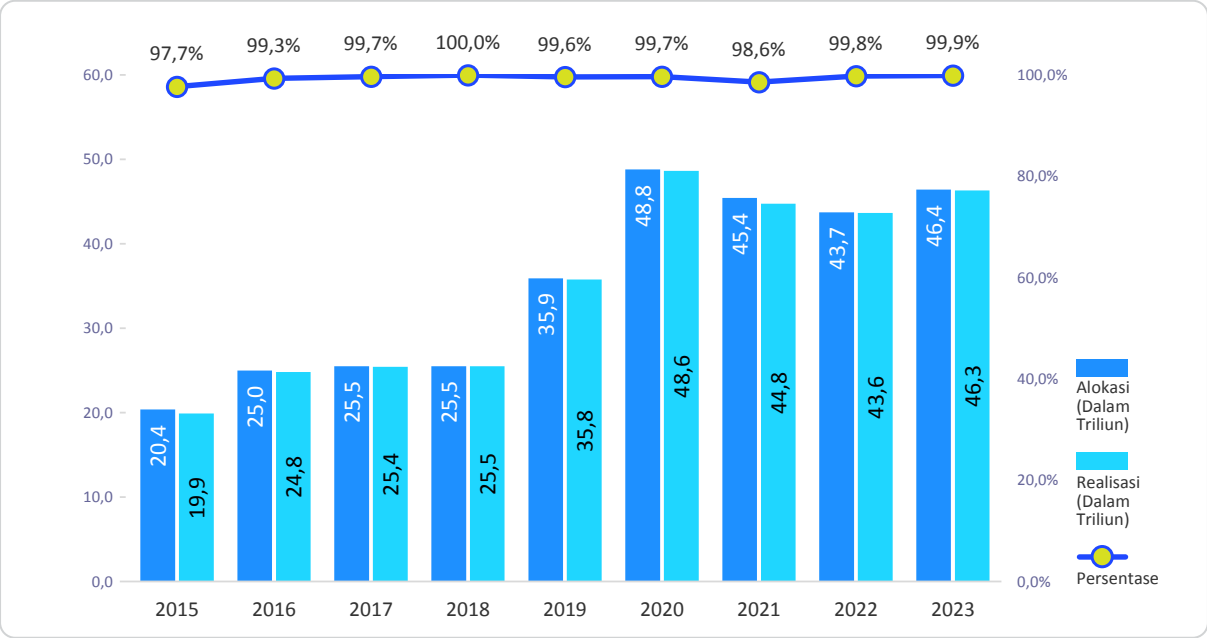

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2024

Alokasi anggaran untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) disesuaikan dengan regulasi yang ada. Telah terjadi perubahan besaran iuran peserta PBI dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, terjadi perubahan pada besaran iuran, diantaranya yaitu iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500 (Rp42.000 dikurangi subsidi Pemerintah Rp16.500), tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000, serta besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang sepenuhnya dibayar oleh Pemerintah. Adapun Perpres tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 34 dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020.

Realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2015 dan 2021 sebesar 97,7% dan 98,5% dari alokasi yang dianggarkan merupakan persentase terendah dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir.

GAMBAR 4.13
JUMLAH FKTP BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2023

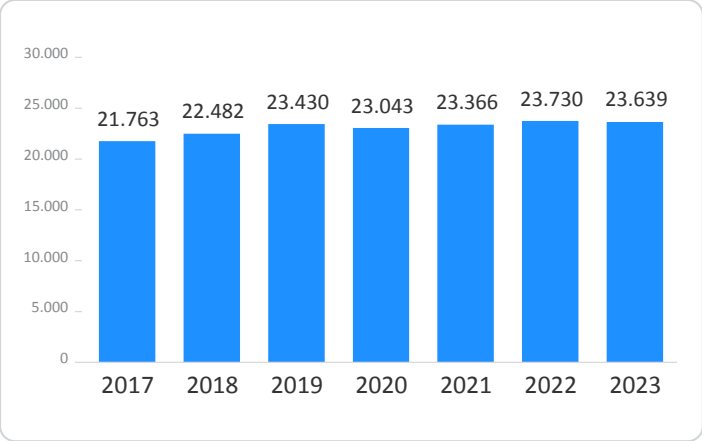

GAMBAR 4.14
PERSENTASE FKTP BEKERJA SAMA DENGAN BPJS DI INDONESIA TAHUN 2023

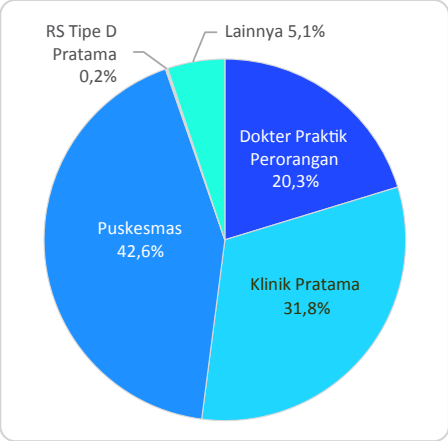

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2024[1]

Jumlah FKTP yang bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2023 mengalami penurunan, dari sebanyak 20.763 faskes pada tahun 2017 menjadi 23.639 faskes pada tahun 2023. Jenis FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terbanyak adalah Puskesmas yaitu sebesar 42,6%, kemudian Klinik Pratama sebesar 31,8%, lalu kemudian dokter praktik perorangan sebesar 20,3%. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19.b[2].

GAMBAR 4.15
JUMLAH FKRTL BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2023

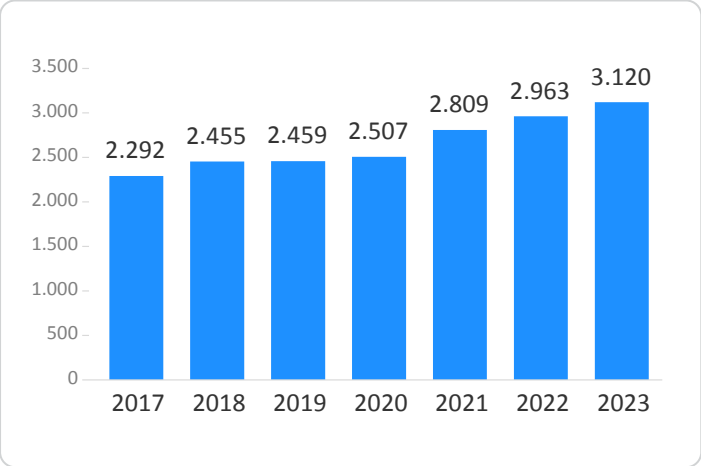

GAMBAR 4.16
PERSENTASE FKRTL BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

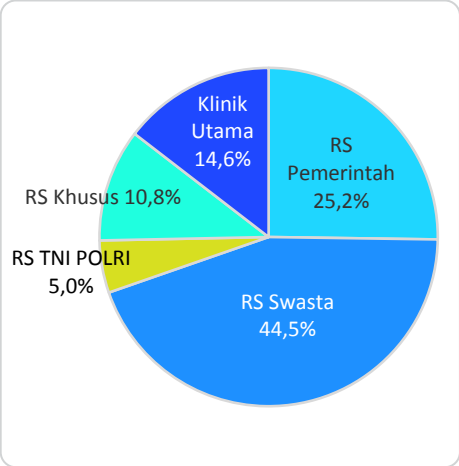

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Sama dengan halnya FKTP, perkembangan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terjadi peningkatan dari sebanyak 2.292 faskes pada tahun 2017 menjadi 3.120 faskes pada tahun 2023. Jenis FKRTL terbanyak adalah RS Swasta, yaitu sebesar 44,5%, RS Pemerintah (25,2%), Klinik Utama (14,6%) dan RS Khusus sebesar 10,8% dari seluruh FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.17
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

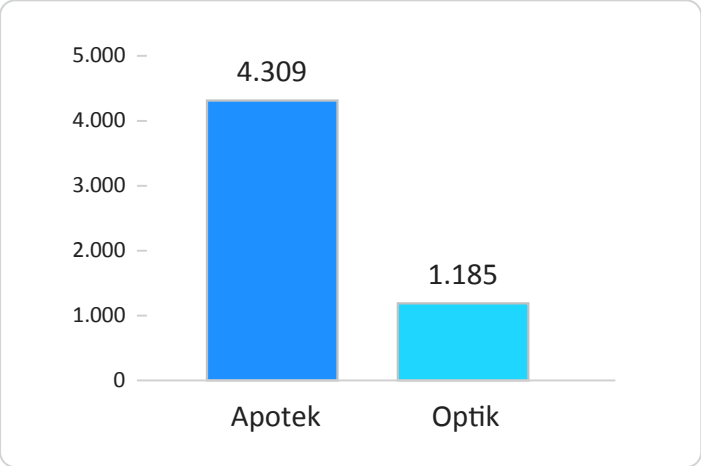

GAMBAR 4.18
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

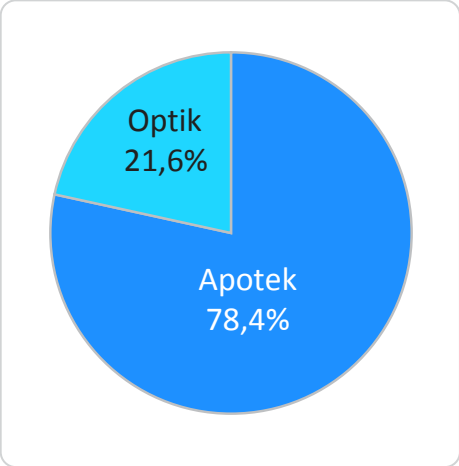

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Selain FKTP dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, pada tahun 2023 terdapat provider fasilitas kesehatan penunjang yaitu apotek dan optik. Terdapat 4.309 apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau sebesar 78,4% dan 1.185 optik atau sebesar 21,6% dari jumlah provider penunjang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.19
PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMEN KEPESERTAAN DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Jenis Iuran	Pendapatan Iuran
1	**PBI**	
	Penerima Bantuan Iuran	45.621.222
2	**Bukan PBI**	
	a. PPU Penyelenggara Negara	27.524.458
	b. PPU Badan Usaha	41.974.005
	c. PBPU dan BP	13.653.084
	d. BP Penyelenggara Negara	2.218.413
3	**PBPU Pemda**	16.128.062
4	**Bantuan Iuran**	
	a. Bantuan Iuran Pemerintah atas PBPU & BP	1.114.114
	b. Bantuan Iuran Pemerintah atas PBPU Pemda	3.191.835
Total		**151.425.193**

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan - Realisasi s.d 31 Desember 2023

Total pendapatan iuran sampai dengan bulan 31 Desember 2023 adalah Rp151,425 triliun, dimana pendapatan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan segmen kepesertaan terbesar yaitu pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 45,621 triliun (30,1%), terbanyak kedua dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan usaha sebesar Rp41,974 triliun (27,7%). Selanjutnya dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda sebesar Rp16,128 triliun (10,7%), segmen PBPU termasuk dengan bantuan iuran pemerintah atas PBPU Pemda sebesar Rp3,191 triliun (2,1%) dan pada segmen BP atau Bukan Pekerja sebesar Rp1,114 triliun (0,7%) dari total pendapatan iuran.

GAMBAR 4.20
PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2023

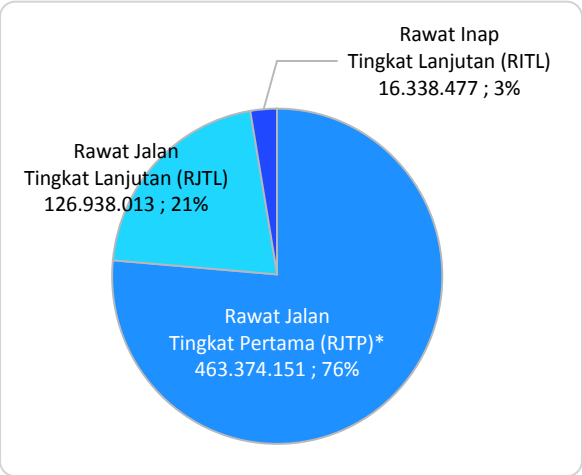

GAMBAR 4.21
BEBAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

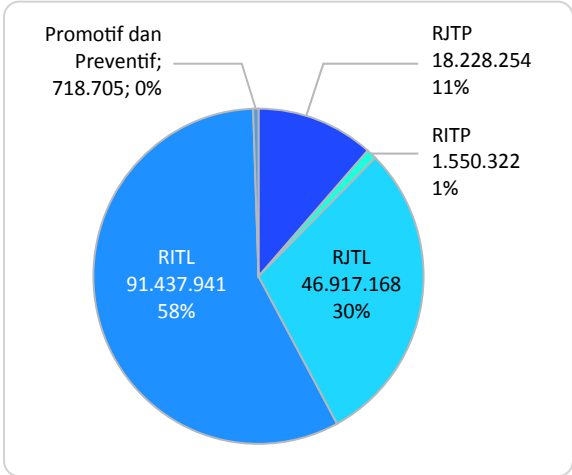

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan - Realisasi s.d 31 Desember 2023

Pada tahun 2023, jumlah pelayanan Kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah kunjungan di FKTP sebanyak 463.374.151 kunjungan sedangkan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebesar 2,7%. Meski RITL dari segi jumlah merupakan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan, tetapi bila dari segi pembiayaan merupakan yang terbesar pemanfaatannya, yaitu sebesar Rp 91,437 triliun atau 57,6% dari seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan.

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat delapan penyakit katastropik dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Penyakit katastropik merupakan penyakit yang membutuhkan biaya tertinggi dalam pelayanan Kesehatan JKN. Penyakit dengan biaya terbanyak yaitu penyakit jantung, yang membutuhkan Rp17,629 triliun untuk pembiayaan. Penyakit jantung juga merupakan jumlah kasus penyakit yang terbanyak dibiayai oleh BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 20.037.280 kasus. Sedangkan penyakit katastropik dengan biaya terendah yaitu Sirosis Hati, yang dibiayai BPJS Kesehatan sebesar Rp 446,434 miliar sebanyak 236.589 kasus. Meskipun demikian, jika dilihat dari rata-rata pembiayaan per kasus, tiga teratas penyakit dengan biaya terbesar per kasus merupakan penyakit kronis, yaitu Jantung, Kanker, dan Stroke.

TABEL 4.2
JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROPIK DALAM PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Katastropik	Kasus	Biaya
1	Jantung	20.037.280	17.629.046.950.030
2	Kanker	3.864.086	5.979.918.075.905
3	Stroke	3.461.563	5.209.327.023.563
4	Gagal Ginjal	1.501.016	2.919.190.263.610
5	Hemofilia	140.179	1.230.805.429.951
6	Talasemia	346.468	764.496.116.568
7	Leukimia	161.529	579.968.047.983
8	Sirosis Hati	236.589	446.434.569.697
Total		**29.748.710**	**34.759.186.477.307**

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan - Realisasi s.d 31 Desember 2023

***

BAB V.
KESEHATAN KELUARGA

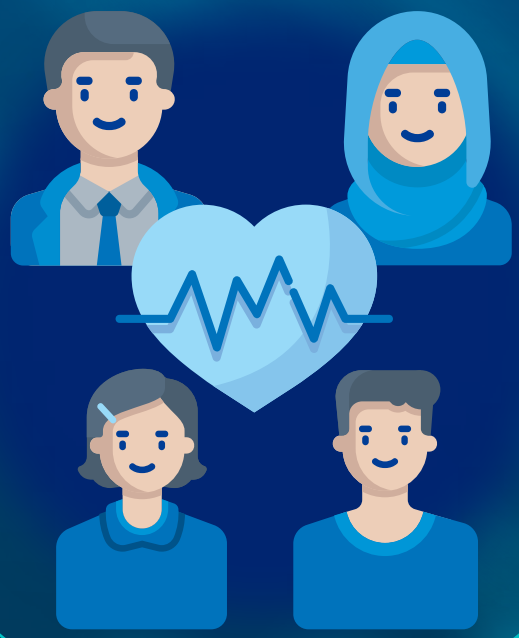

5. KESEHATAN KELUARGA

Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum, sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2020 dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini hampir mencapai target RPJMN 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, masih diperlukan upaya dalam percepatan penurunan AKI untuk mencapai target SGDs yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

GAMBAR 5. 1
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP
TAHUN 1991 – 2020

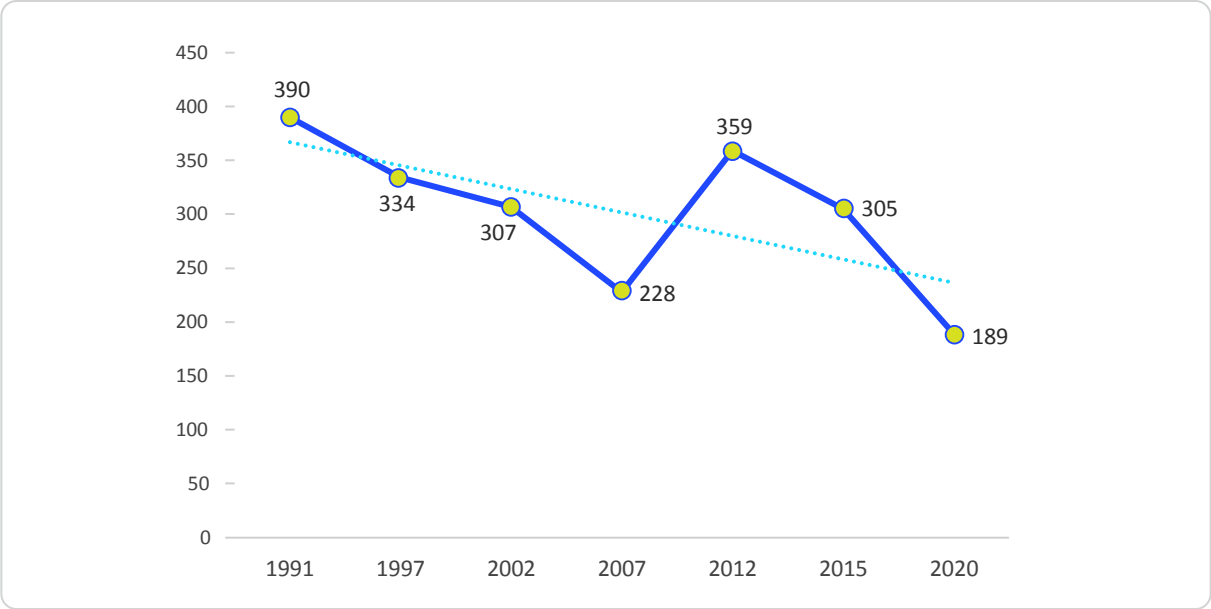

Sumber: BPS, SDKI 1991-2012
*AKI tahun 2020 merupakan hasil SP 2020

Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di Kementerian Kesehatan dari tahun 2019-2021 cenderung meningkat, sedangkan dari tahun 2021-2023 jumlah kematian ibu jumlahnya berfluktuasi. Jumlah Kematian Ibu tahun 2023 adalah 4.482 seperti tampak pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 5. 2
JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA
TAHUN 2018 – 2023

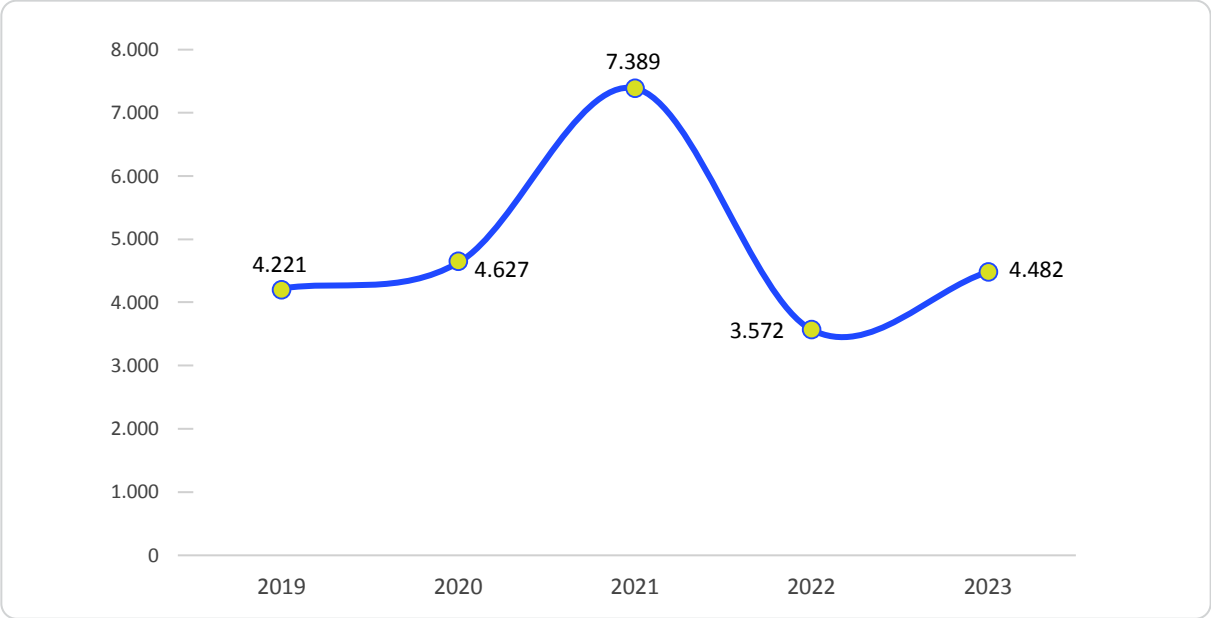

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 adalah hipertensi dalam kehamilan sebanyak 412 kasus, perdarahan obstettrik sebanyak 360 kasus dan komplikasi obstetrik lain sebanyak 204 kasus. Jumlah kematian ibu menurut provinsi disajikan pada Lampiran 22.

GAMBAR 5. 3
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DI INDONESIA
TAHUN 2023

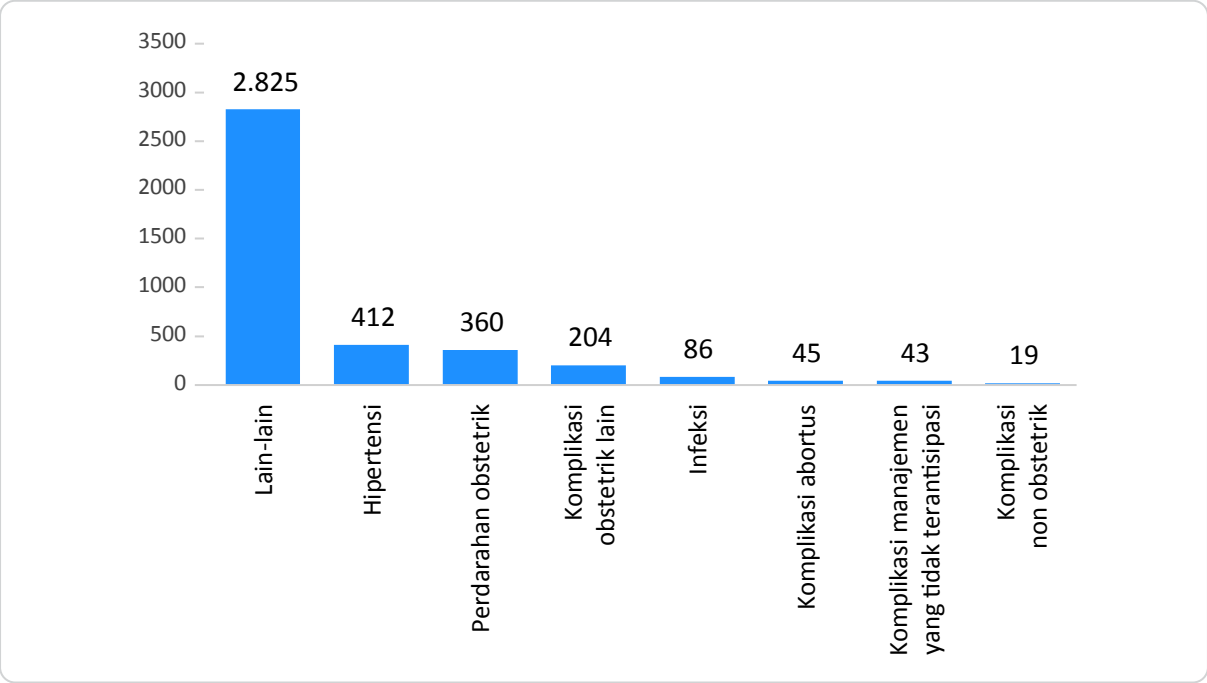

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB) termasuk KB pasca persalinan.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS), pemberian tablet tambah darah, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan ibu nifas, puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana (KB), dan pemeriksaan HIV, sifilis, serta Hepatitis B.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut.

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran lingkar lengan atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
6. Skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan.
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
8. Pelayanan tes laboratorium: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) dan malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti: gluko-protein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini thalasemia dan pemeriksaan lainnya.
9. Tata laksana/penanganan kasus sesuai kewenangan.
10. Pelaksanaan Temu wicara (konseling) untuk menyampaikan informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif.

Pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dengan dua kali pemeriksaan USG oleh dokter. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan minimal 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 2 kali pada trimester ke-2 (>12 minggu-24 minggu), dan 3 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai kelahirannya) serta minimal dua kali diperiksa oleh dokter saat kunjungan pertama di trimester satu dan saat kunjungan ke lima di trimester tiga. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K4 dan K6. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan, cakupan K6 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit enam kali pemeriksaan serta minimal dua kali pemeriksaan dokter sesuai jadwal yang dianjurkan pada tiap semester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar berikut ini menampilkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sepuluh tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.

GAMBAR 5. 4
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA
TAHUN 2014 – 2023

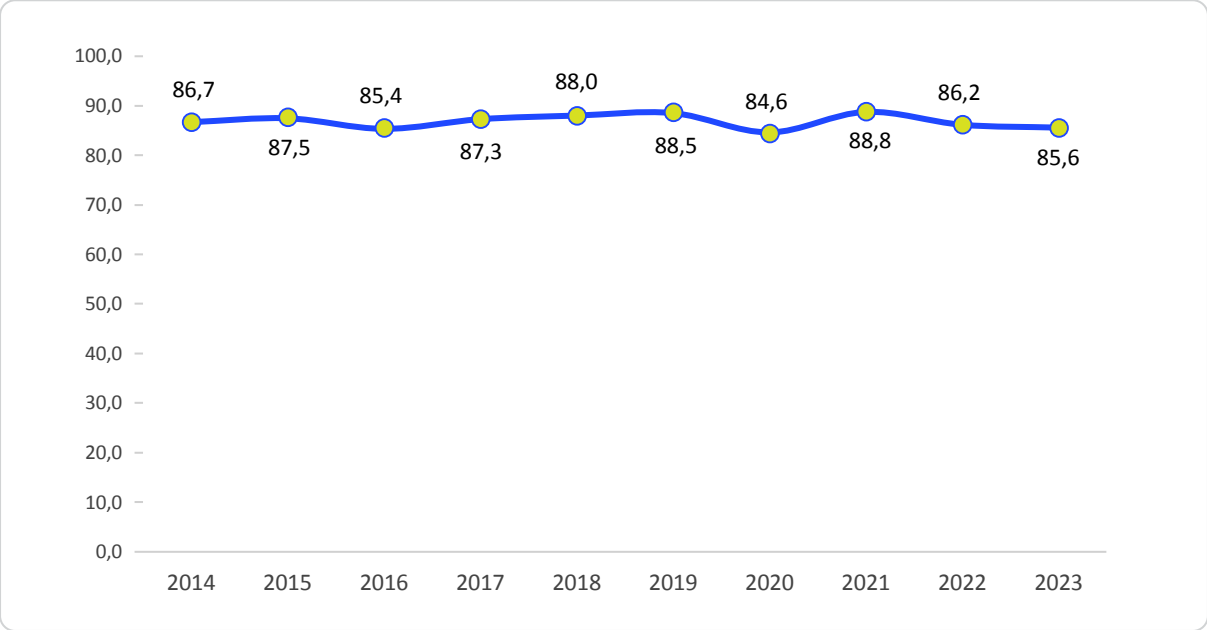

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Sejak tahun 2014 sampai dengan 2023, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 angka K4 sebesar 85,6%, dimana angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambaran cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2023 menurut provinsi disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5. 5
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

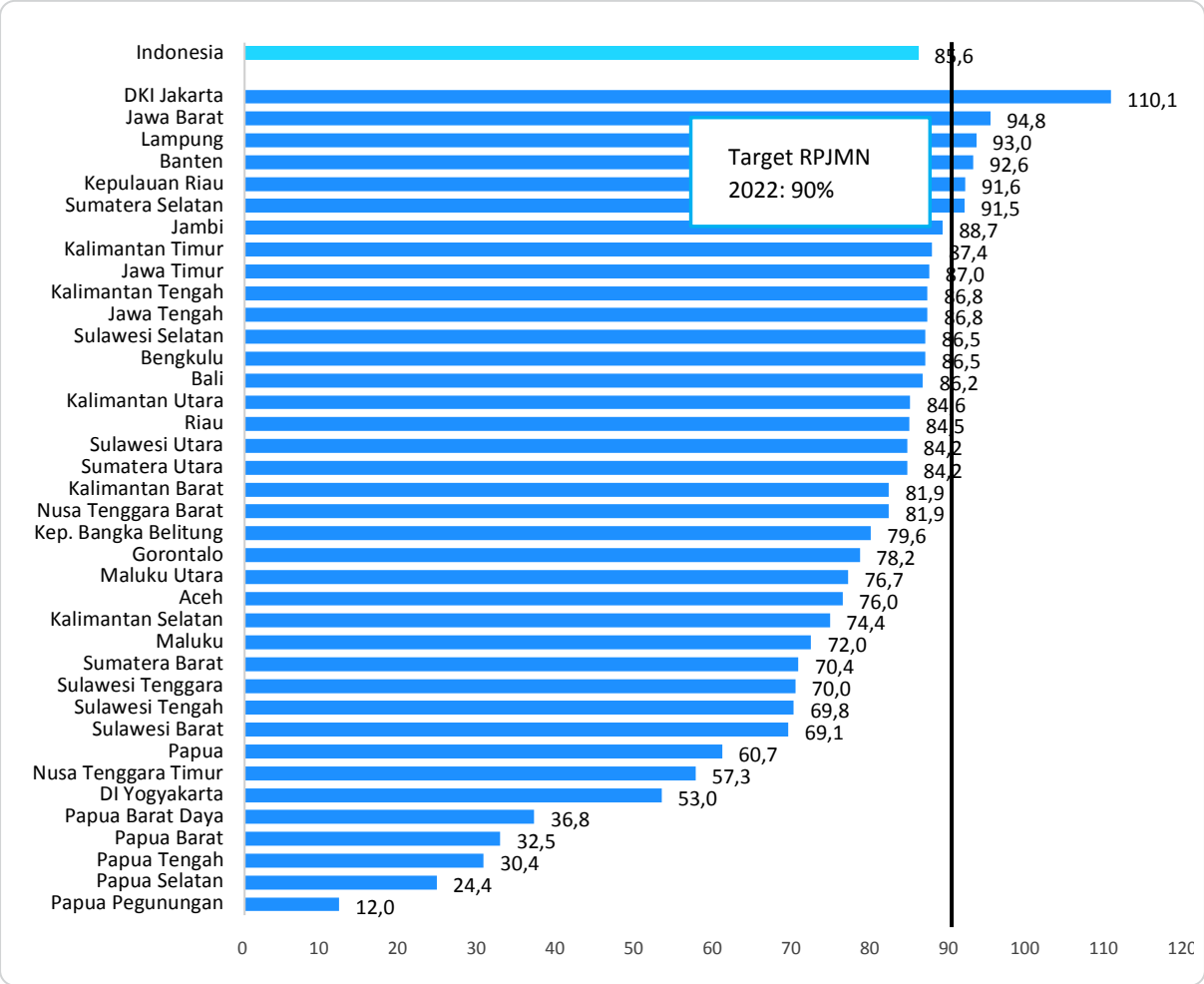

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) secara nasional pada tahun 2023 sebesar 85,6%, hampir mencapai target RPJMN sebesar 90%. Terdapat enam provinsi yang sudah mencapai target RPJMN 90%. Gambaran provinsi tertinggi terdapat di DKI Jakarta 110,1%, diikuti oleh Jawa Barat 94,8% dan Lampung sebesar 93,0%.

GAMBAR 5. 6
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

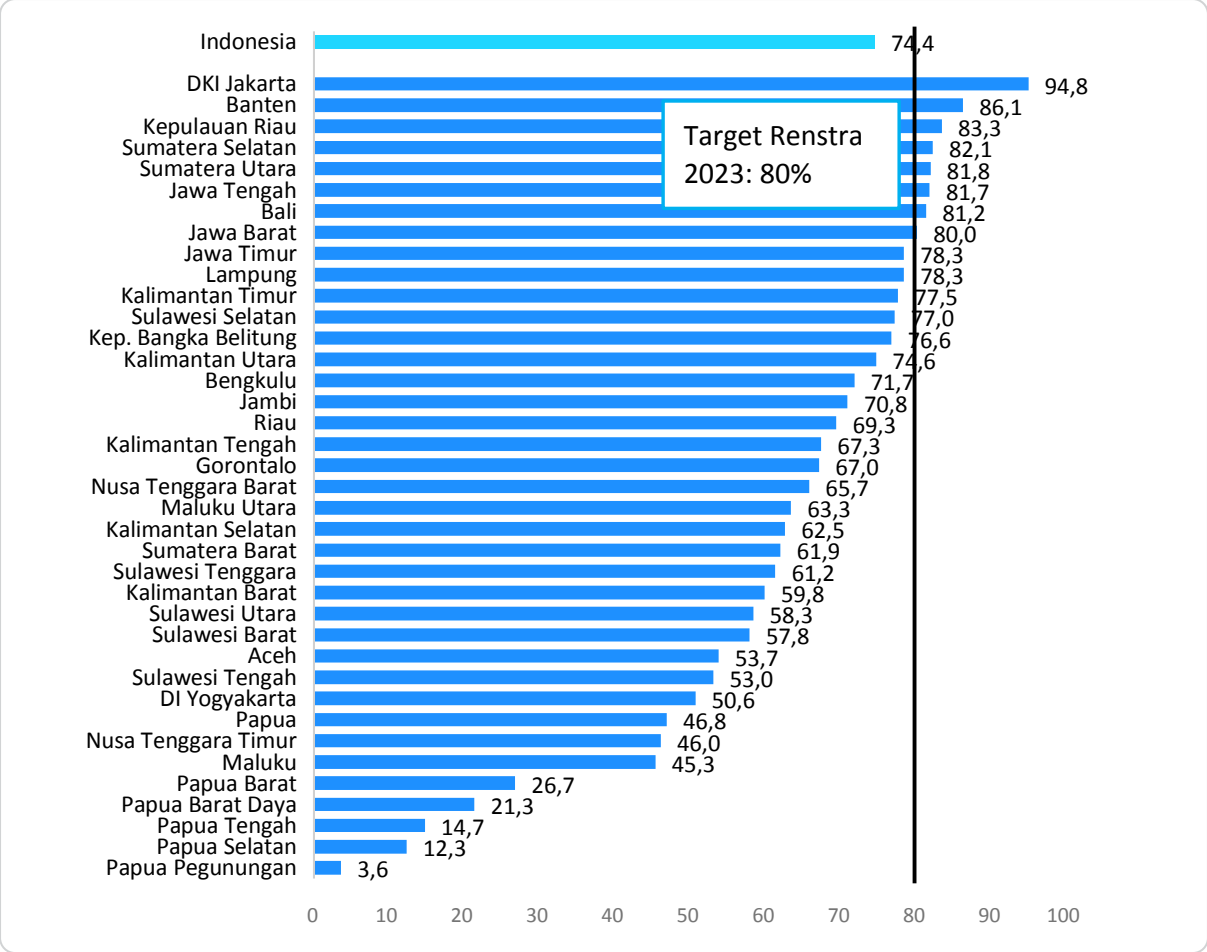

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K6) pada tahun 2023 di Indonesia sebesar 74,4% dengan provinsi tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 94,8%%, diikuti Banten sebesar 86,1%, dan Kepulauan Riau sebesar 83,3%. Ada 8 (21,1%) provinsi sudah mencapai target tahun 2023 sebesar 80% tahun 2023.

Selain akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil K4 dan K6 terdapat pada Lampiran 24.

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS)

Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan bayi serta memberikan perlindungan tambahan terhadap penyakit difteri, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur (khususnya ibu hamil) merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil skrining penilaian status T yang dimulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung "T" pada kegiatan imunisasi lainnya. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal, atau pelayanan kesehatan di posyandu.

Skrining status "T" pada WUS harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan status WUS telah mencapai T5, yang dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, kohort, atau buku register imunisasi lainnya. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan imunisasi Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi T2+.

Imunisasi T2+ merupakan prasyarat pelayanan kesehatan ibu hamil K4. Namun bila dilihat dari gambar 5.5 dan gambar 5.8 cakupan imunisasi T2+ pada ibu hamil tahun 2023 sebesar 75,6%, lebih rendah dibandingkan cakupan pelayanan ibu hamil K4 yang sebesar 85,6%. Hal ini disebabkan karena apabila hasil screening menunjukkan status WUS telah mencapai T5, yang dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, kohort, atau buku register imunisasi lainnya, kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan imunisasi Td2 sampai dengan Td5 dikatakan sudah mendapatkan imunisasi T2+.

GAMBAR 5. 7
CAKUPAN IMUNISASI TETANUS DIFTERI 2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2023

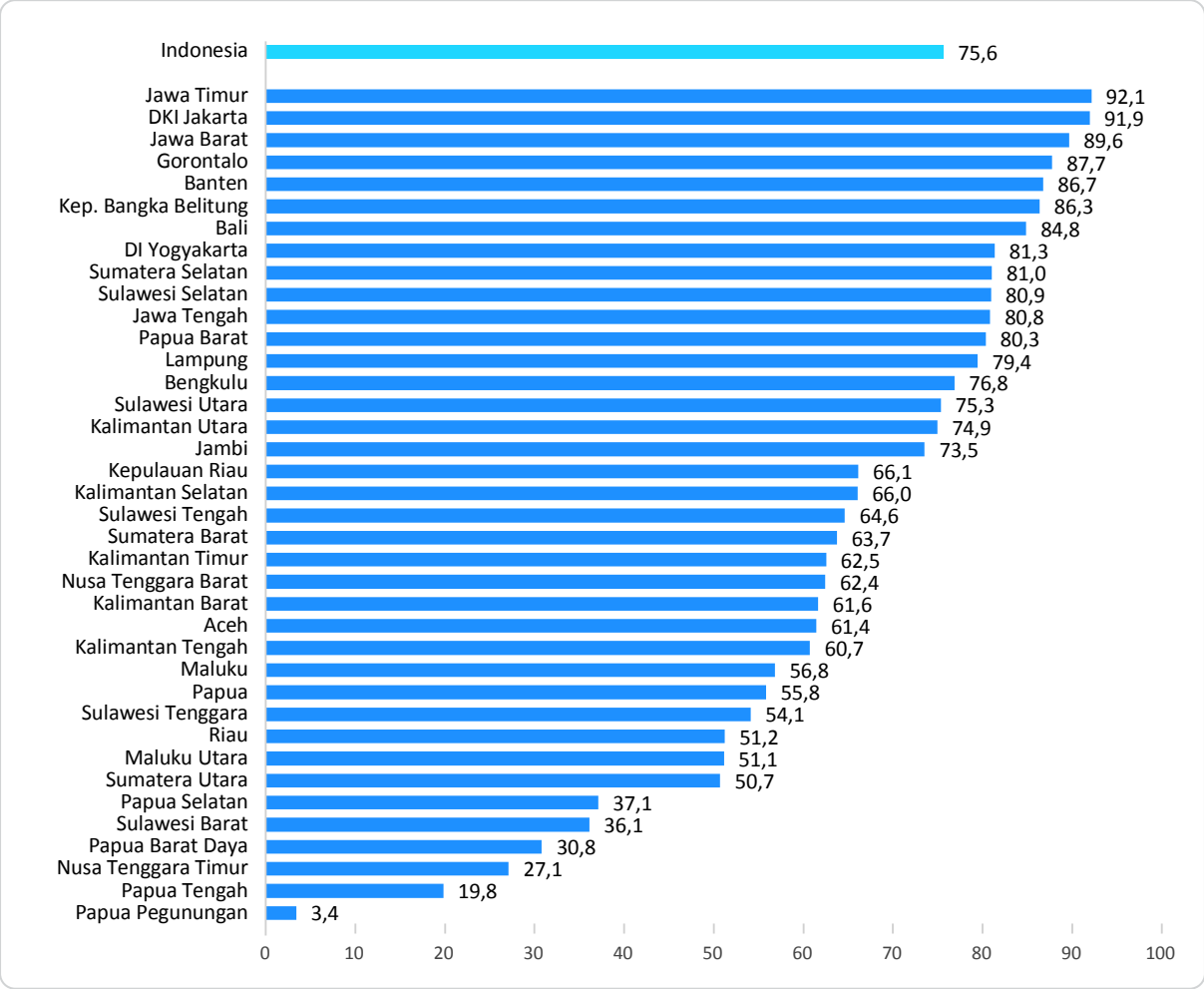

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan distribusi provinsi, Jawa Timur memiliki cakupan tertinggi sebesar 92,1% diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 91,9%, dan Jawa Barat sebesar 89,6%. Provinsi dengan cakupan rendah yaitu Nusa Tenggara Timur sebesar 27,1%, Papua Tengah sebesar 19,8%, dan Papua pegunungan sebesar 3,4%. Informasi lebih rinci mengenai imunisasi Td pada wanita usia subur terdapat pada Lampiran 25-27.

3. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi zat besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 27,7% ibu hamil mengalami anemia. Bila dilihat berdasarkan kelompok umur, ibu hamil mengalami anemia paling tinggi pada kelompok umur 35-44 sebesar 39,6%, diikuti kelompok umur 25-34 sebesar 31,4%. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan TTD minimal 90 Tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD minimal 90 Tablet pada ibu hamil di Indonesia tahun 2023 adalah 88,5%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 86,2%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah Kepulauan Riau sebesar 94,9%, Provinsi Jawa Barat sebesar 94,2%, dan Sumatera Selatan 94,1%. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Papua Barat sebesar 58,6%, Papua Pegunungan sebesar 55,3%, dan Papua Tengah 52,0%. Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28.

GAMBAR 5. 8
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

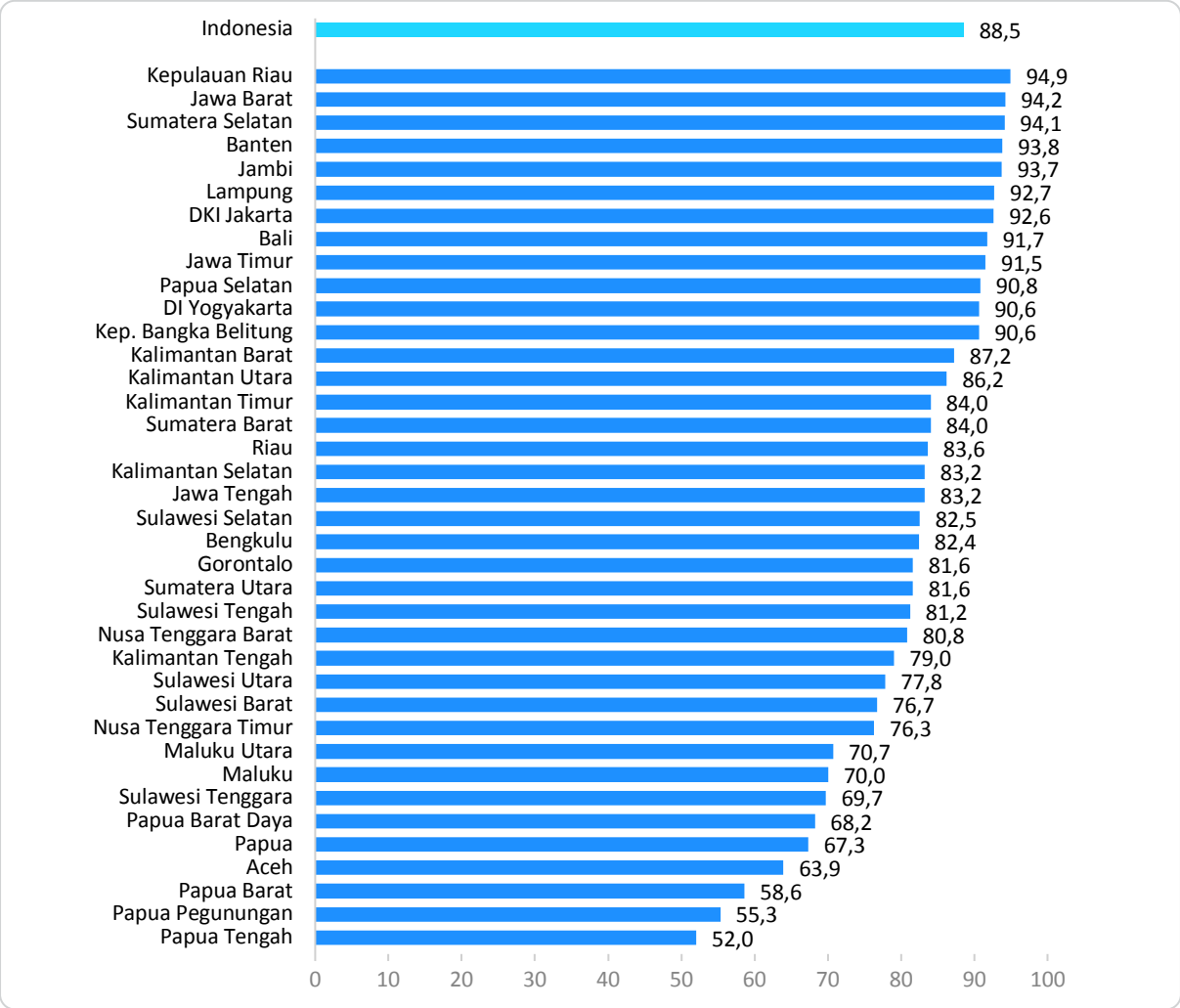

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, bidan, dan perawat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN).

Gambar 5.9 menyajikan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di 38 provinsi di Indonesia tahun 2023.

GAMBAR 5. 9
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

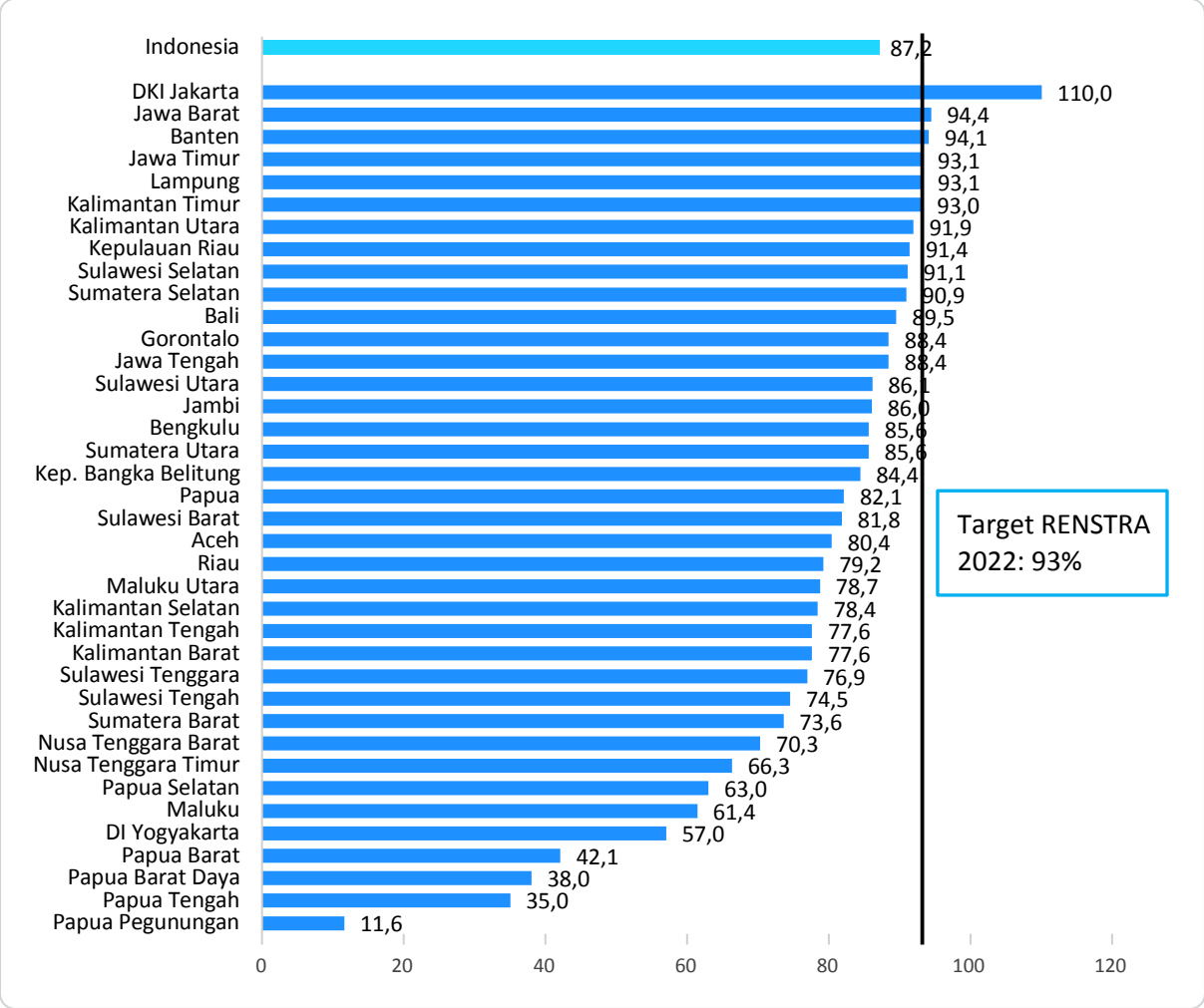

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2023 di Indonesia sebesar 87,2%. Bila dilihat berdasarkan target Renstra 2023 sebesar 93,0%, persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2023 belum tercapainya target Renstra 2023 disebabkan karena adanya perbedaan target sasaran ibu hamil di beberapa provinsi, misalnya di Provinsi DI Yogyakarta, dimana data proyeksi BPS jauh berbeda dengan data Dukcapil. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta sedang mengalami transisi proses pencatatan pelaporan dari manual ke digital, sehingga masih banyak data persalinan yang tidak tercatat atau terlaporkan ke fasilitas kesehatan, menyebabkan capaian menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Provinsi dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 110,0%, Jawa Barat sebesar 94,4%, dan Banten sebesar 94,1%. Sementara cakupan terendah di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 38,0% , Papua Barat Tengah sebesar 35,0% dan Papua Pegunungan sebesar 11,6%.

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal empat kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari setelah persalinan, pada hari ketiga sampai dengan hari ke tujuh setelah persalinan, pada hari ke delapan sampai dengan hari ke 28 setelah persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

1. Anamnesis;
2. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
3. Pemeriksaan tanda-tanda anemia;
4. Pemeriksaan tinggi *fundus uter*i;
5. Pemeriksaan kontraksi *uteri*;
6. Pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing;
7. Pemeriksaan *lokhia* dan perdarahan;
8. Pemeriksaan jalan lahir;
9. Pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI Ekslusif;
10. Identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas;
11. Pemeriksaan status mental ibu;
12. Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
13. Pemberian KIE dan konseling;
14. Pemberian kapsul vitamin A.

Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak empat kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap).

Cakupan kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 5.10 berikut ini.

GAMBAR 5. 10
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

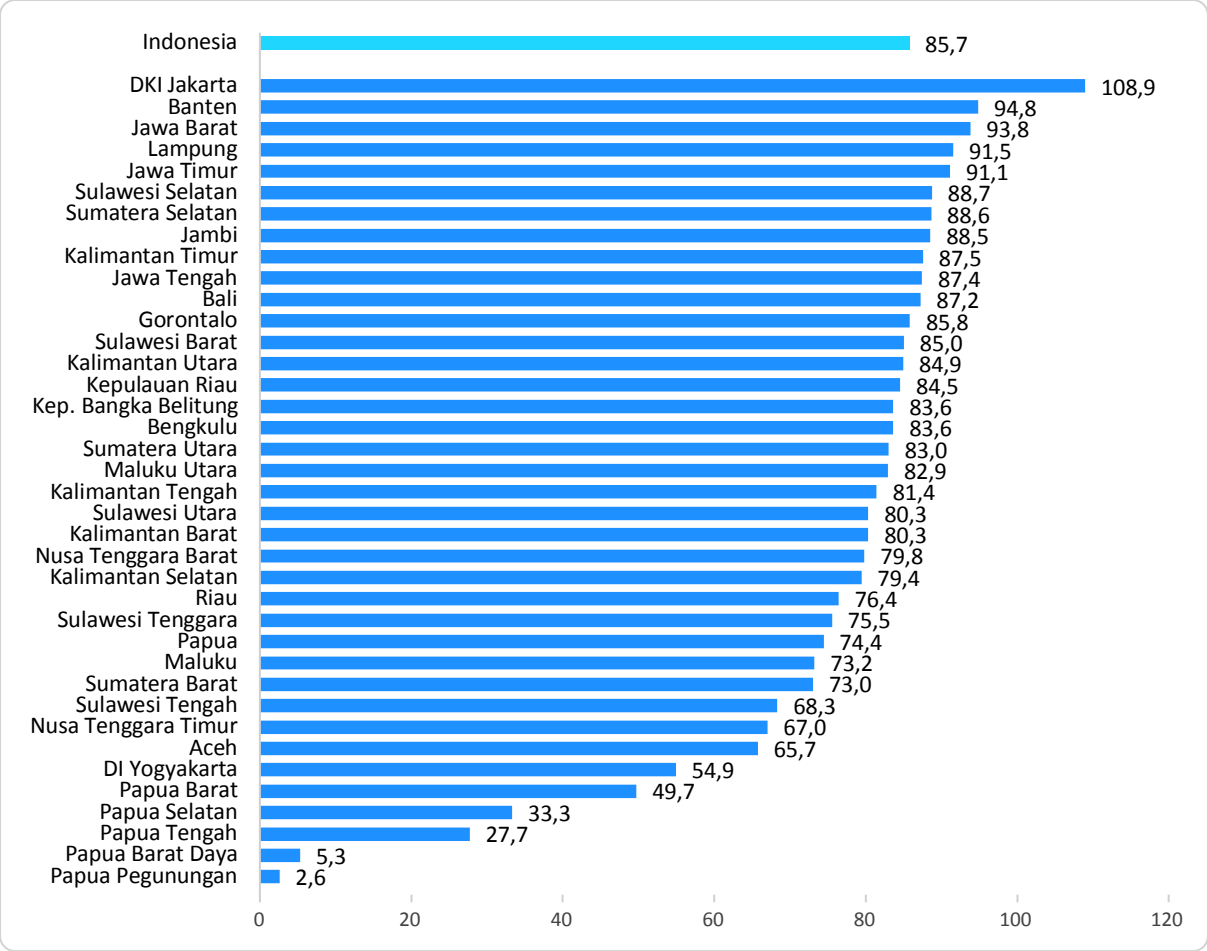

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Cakupan kunjungan KF lengkap di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 85,7%, dimana provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 108,9%, Banten sebesar 94,8%, dan Jawa Barat sebesar 93,8%. Provinsi yang memiliki cakupan terendah antara lain Papua Tengah (27,7%), Papua Barat Daya (5,3%) dan Papua Pegunungan (2,6%).

6. Pelayanan Kontrasepsi

Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui:

1. Mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan;
2. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas;
3. Mencegah terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS peserta KB terdiri dari peserta KB modern (mengunakan alat/obat/cara KB berupa steril wanita (MOW), steril pria (MOP), IUD/AKDR). Implan/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL) dan peserta KB tradisional (menggunakan alat/obat/cara KB berupa pantang berkala, senggama terputus, dan alat/obat/cara KB tradisional lainnya).

GAMBAR 5. 11
PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

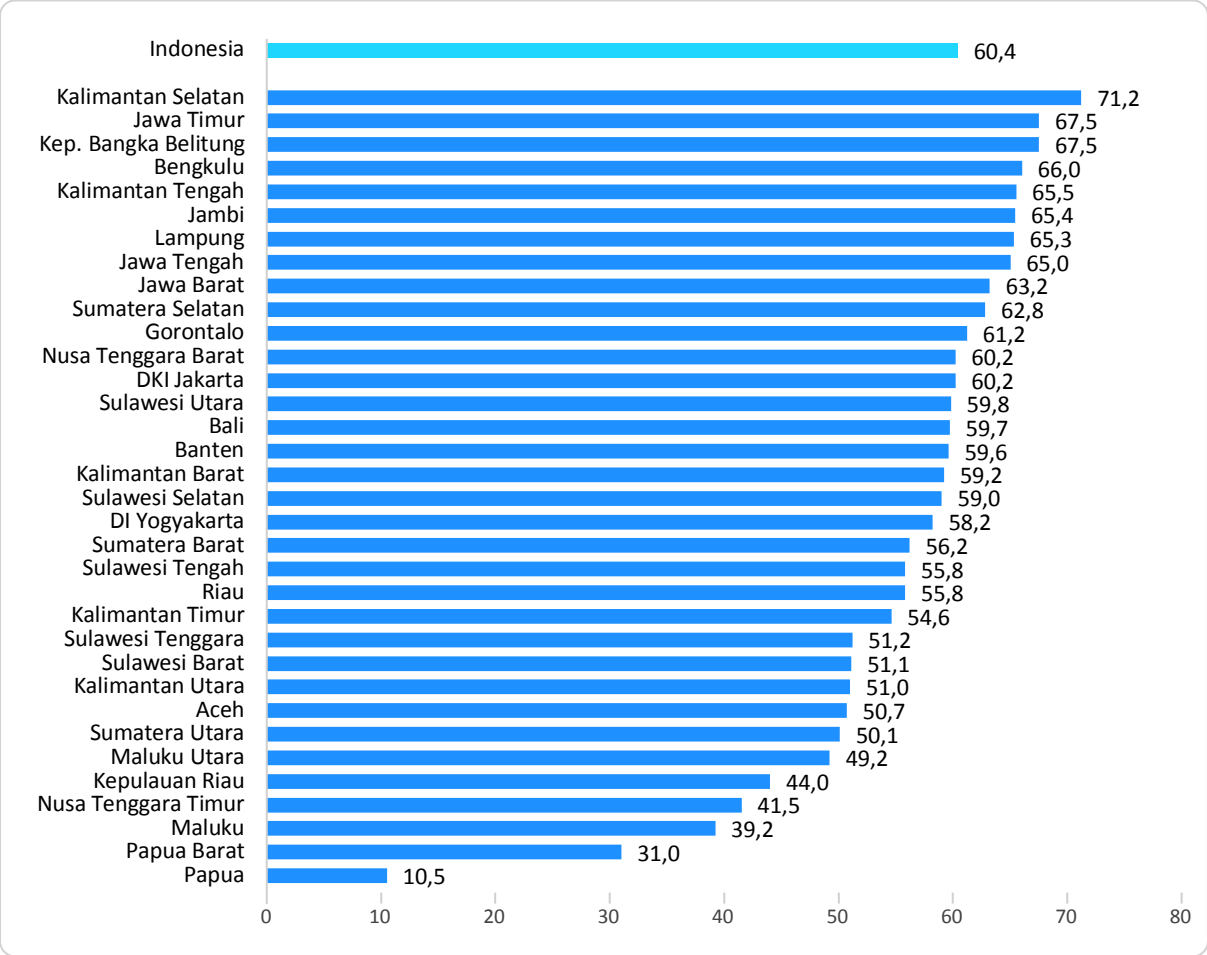

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (dengan *weighting*), BKKBN

Menurut hasil pemuktahiran pendataan keluarga tahun 2023 oleh BKKBN, menunjukkan bahwa angka prevalensi PUS peserta KB di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 60,4%. Berdasarkan distribusi provinsi, angka prevalensi pemakaian KB tertinggi adalah Kalimantan Selatan (71,2%), Jawa Timur (67,5%), dan Kep. Bangka Belitung (67,5%), sedangkan terendah adalah Papua (10,5%), Papua Barat (31,1%) dan Maluku (39,2%). Data angka prevalensi PUS peserta KB Provinsi Papua termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selain itu, Data angka prevalensi PUS peserta KB Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya.

GAMBAR 5. 12
PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI DI INDONESIA TAHUN 2023

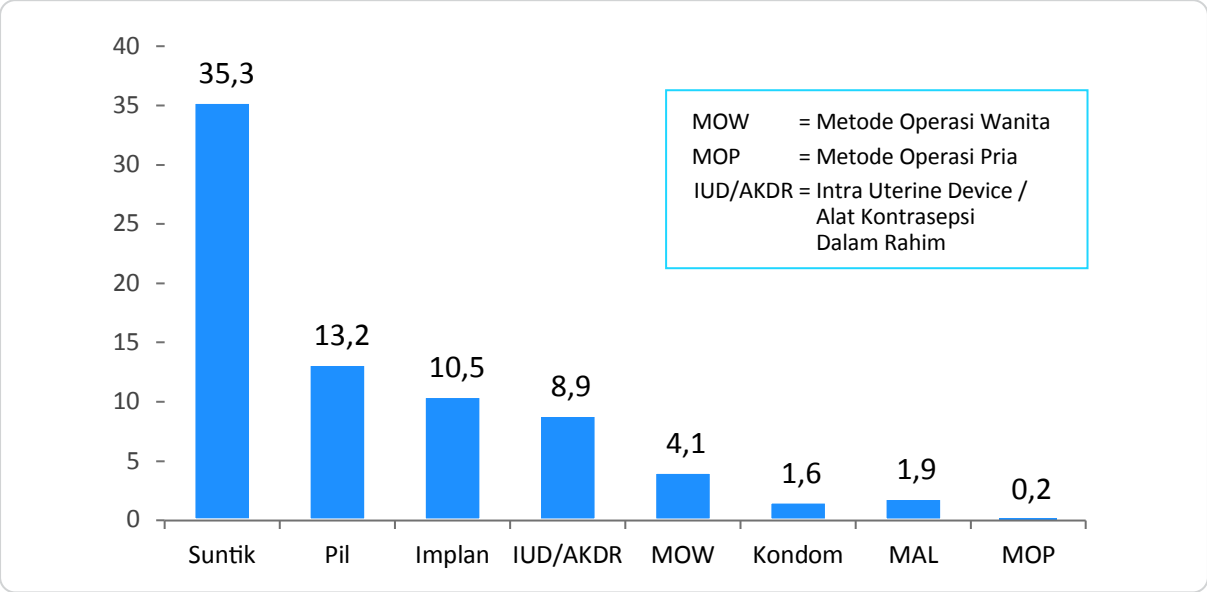

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (dengan *weighting*), BKKBN

Pola pemilihan jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor memilih menggunakan suntik sebesar 35,3%, diikuti pil sebesar 13,2%. Pola ini terjadi setiap tahun, dimana peserta KB lebih banyak memilih metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jika dilihat dari efektivitas, kedua jenis alat/obat/cara KB ini (suntik dan pil) termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Pendek sehingga tingkat efektivitas dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Alat/obat/cara KB yang termasuk MKJP yaitu IUD/AKDR, Implan, MOP dan MOW.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. PUS bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.13 berikut ini.

GAMBAR 5. 13
JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2023

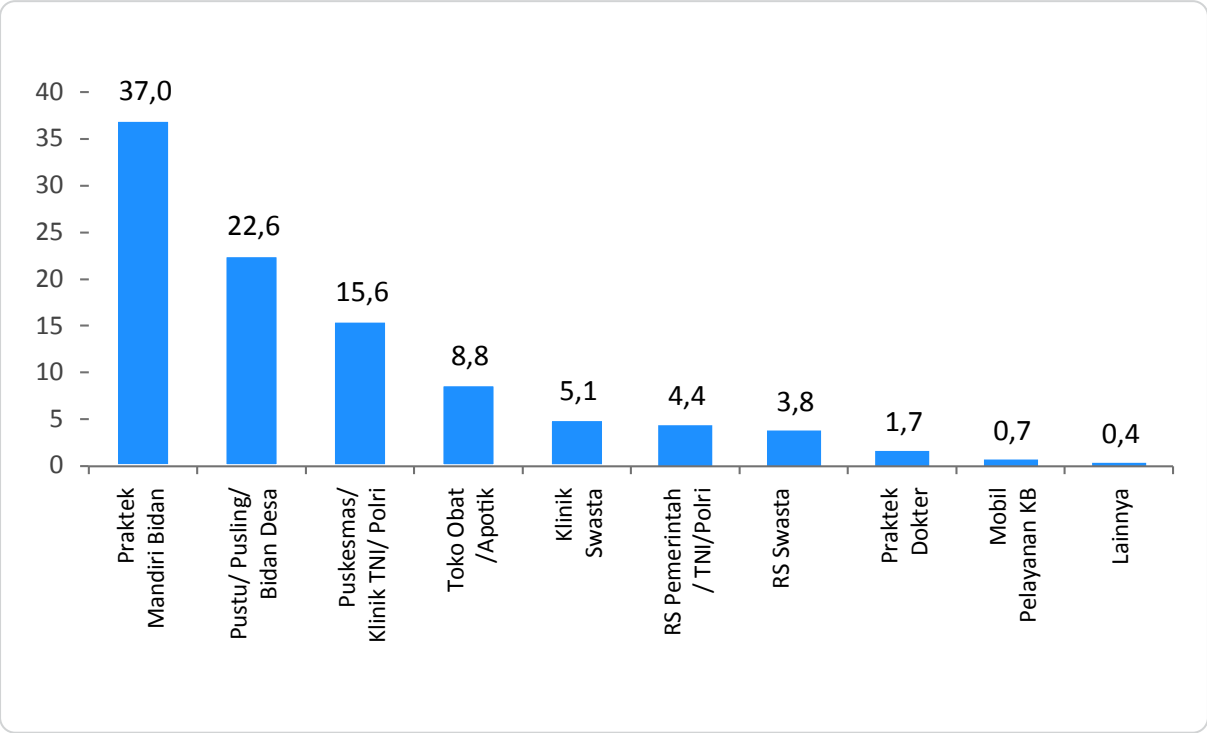

Sumber: Pendataan Keluarga Tahun 2023, BKKBN

Berdasarkan tempat pelayanan KB, PUS paling banyak dilayani oleh praktek mandiri bidan sebesar 37,0%, kemudian Pustu/Pusling/Bidan Desa (22,6%), dan Puskesmas/Klinik TNI/Polri (15,6%).

7. Pemeriksaan HIV, Hepatitis B, dan Sifilis pada Ibu Hamil

a. HIV

Tujuan pemeriksaan HIV pada ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya kasus HIV pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HIV. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan dan selama menyusui. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak.

Pada tahun 2023 terdapat 3.245.224 ibu hamil yang di periksa HIV di Indonesia. Dari pemeriksaan tersebut di dapatkan 2.490 (0,08%) ibu hamil yang positif HIV. Provinsi dengan persentase ibu hamil yang positif HIV tertinggi adalah Provinsi Papua sebesar 1,97%, Papua Pegunungan sebesar sebesar 1,85% dan Papua Barat sebesar 1,01%. Data selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 27.b

GAMBAR 5. 14
PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

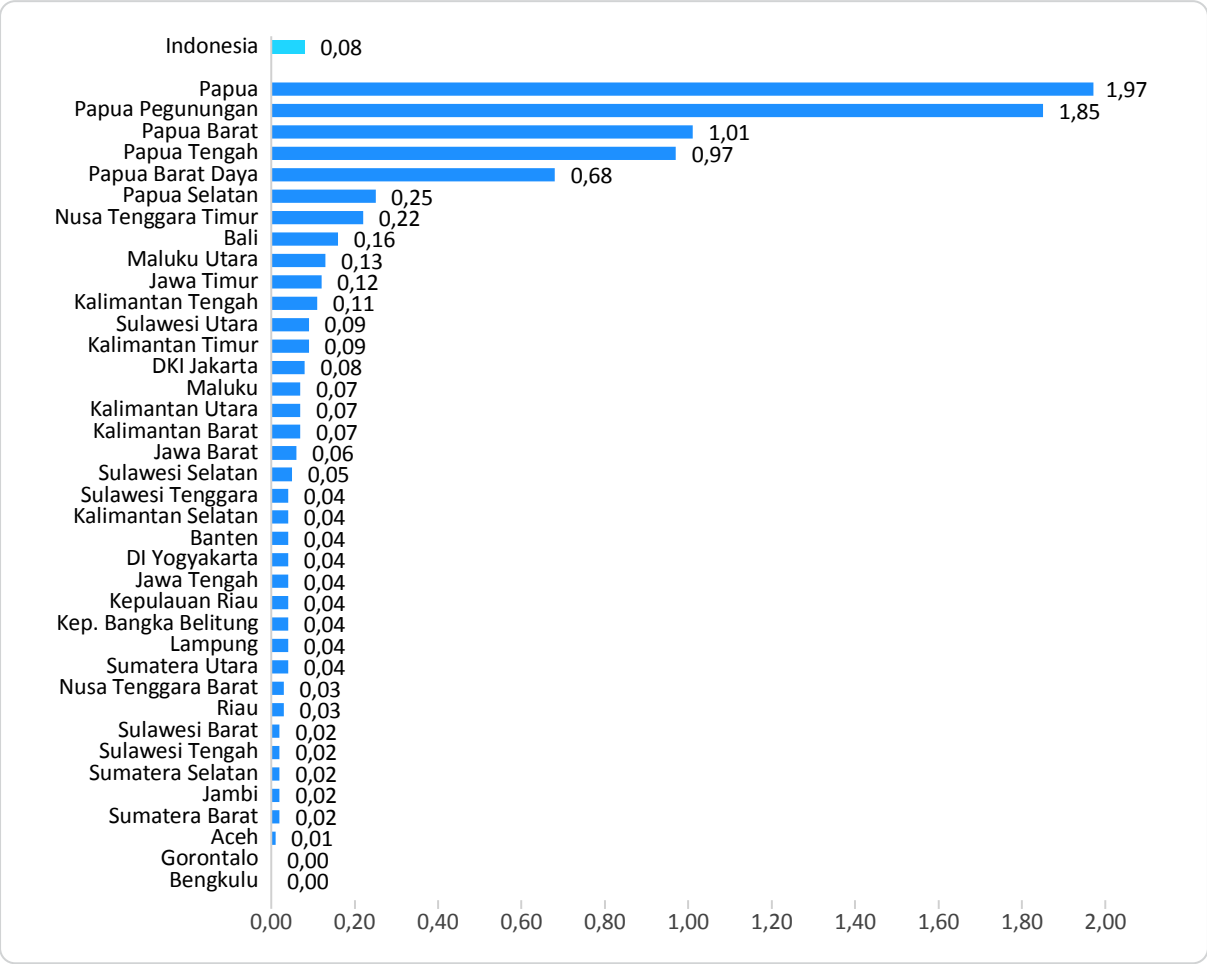

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

b. Hepatitis B

Penularan virus Hepatitis B secara umum terjadi secara vertikal (dari ibu yang positif menderita Hepatitis B kepada bayinya) dan horizontal (dari individu yang positif menderita Hepatitis B kepada individu lainnya). Pada daerah endemik seperti Indonesia penularan Hepatitis B umumnya terjadi secara vertikal terutama saat masa perinatal dan 95% bayi yang tertular saat masa perinatal akan menjadi Hepatitis B kronik.

Untuk mencegah penularan dari ibu ke anak tersebut telah dilakukan upaya-upaya pencegahan, diantaranya dengan melakukan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil menggunakan tes cepat/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) Hepatitis B *Surface* Antigen (HBsAg). HBsAg merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus Hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi Hepatitis B. DDHB bertujuan menemukan sedini mungkin ibu hamil terinfeksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif), kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian upaya terhadap bayi dari ibu terdeteksi HBsAg Reaktif tersebut yang didahului dengan pemberian vitamin K1 kemudian vaksin Hepatitis B (HB0) dan HBIg (Hepatitis B *Imunoglobulin*) sebelum 24 Jam kelahiran. HBIg merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi.

Persentase ibu hamil melaksanakan DDHB pada tahun 2023 menurut provinsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dimana sebesar 68,4% ibu hamil melaksanakan DDHB dari jumlah sasaran ibu hamil tahun 2023 sebanyak 4.907.227 ibu hamil. Provinsi dengan capaian tertinggi yaitu Sulawesi Barat sebesar 91,7%, Gorontalo sebesar 91,3%, dan Sulawesi Selatan sebesar 87,1%.

GAMBAR 5. 15
PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

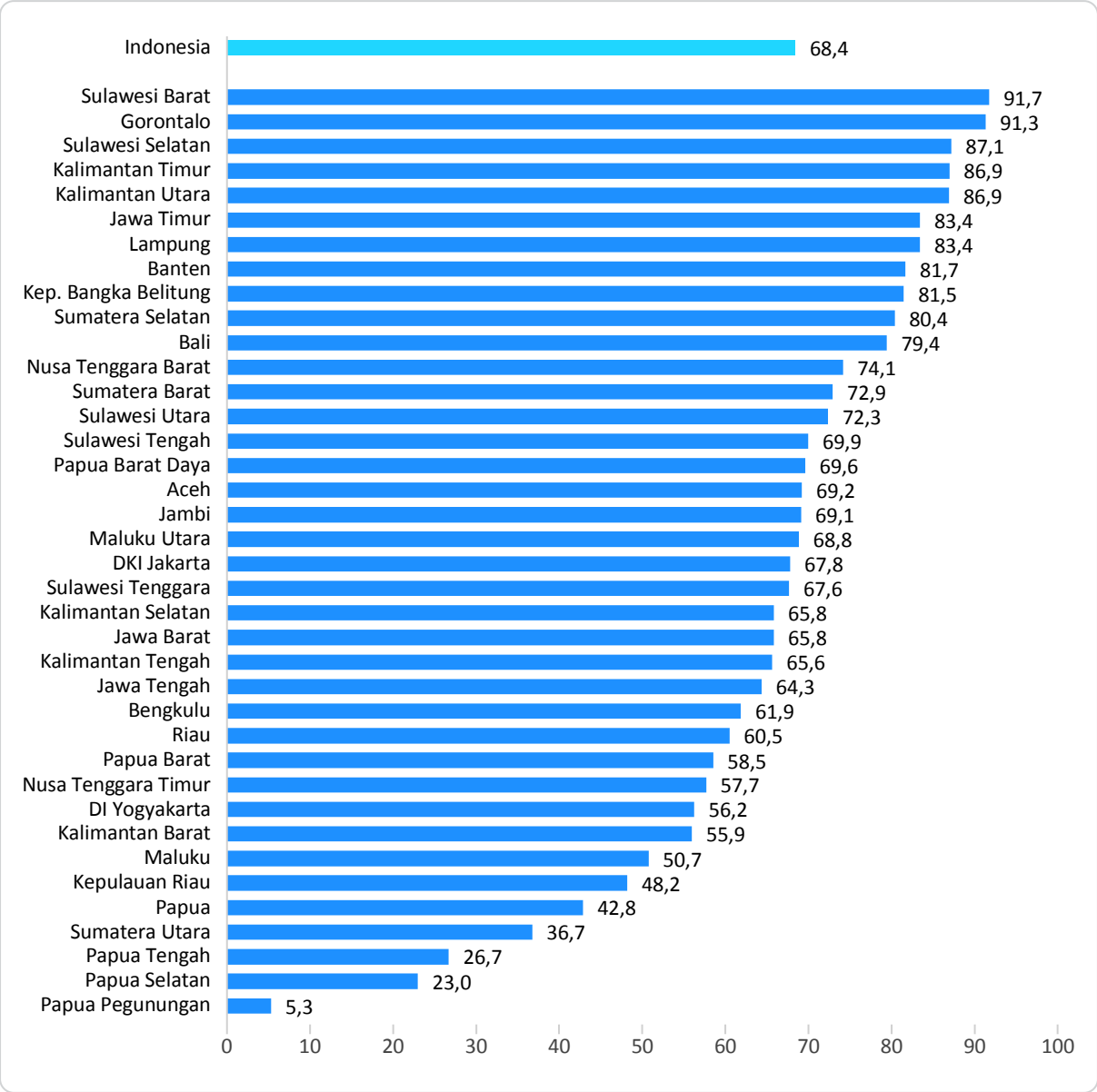

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Jumlah Ibu hamil yang diperiksa Hepatitis B dengan menggunakan RDT HBsAg tahun 2023 yaitu sebanyak 3.358.549 orang atau sebanyak 68,4% dari ibu hamil yang menjadi sasaran. Hasil pemeriksaan RDT HBsAg tahun 2023 menemukan sebanyak 50.789 atau 1,5% ibu hamil menunjukkan hasil reaktif.

GAMBAR 5. 16
R PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

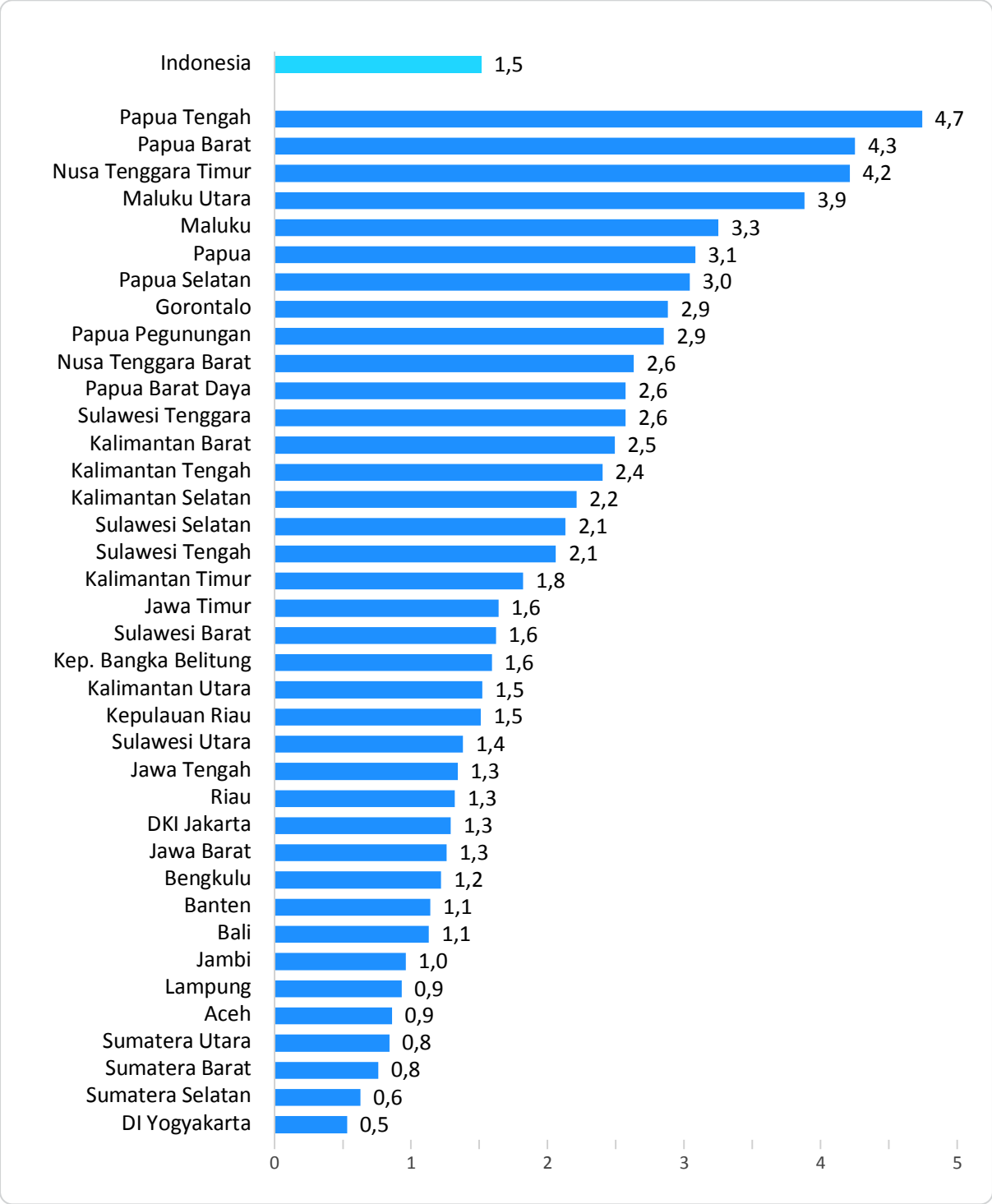

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Distribusi provinsi memperlihatkan Provinsi Papua Tengah dengan persentase tertinggi sebesar 4,7%, diikuti oleh provinsi Papua Barat (4,3%) dan Nusa Tenggara Timur (4,2%). Data/informasi terkait penyakit Hepatitis B menurut provinsi terdapat pada Lampiran 27.c.

c. Sifilis

GAMBAR 5. 17
PERSENTASE IBU HAMIL POSITIF SIFILIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

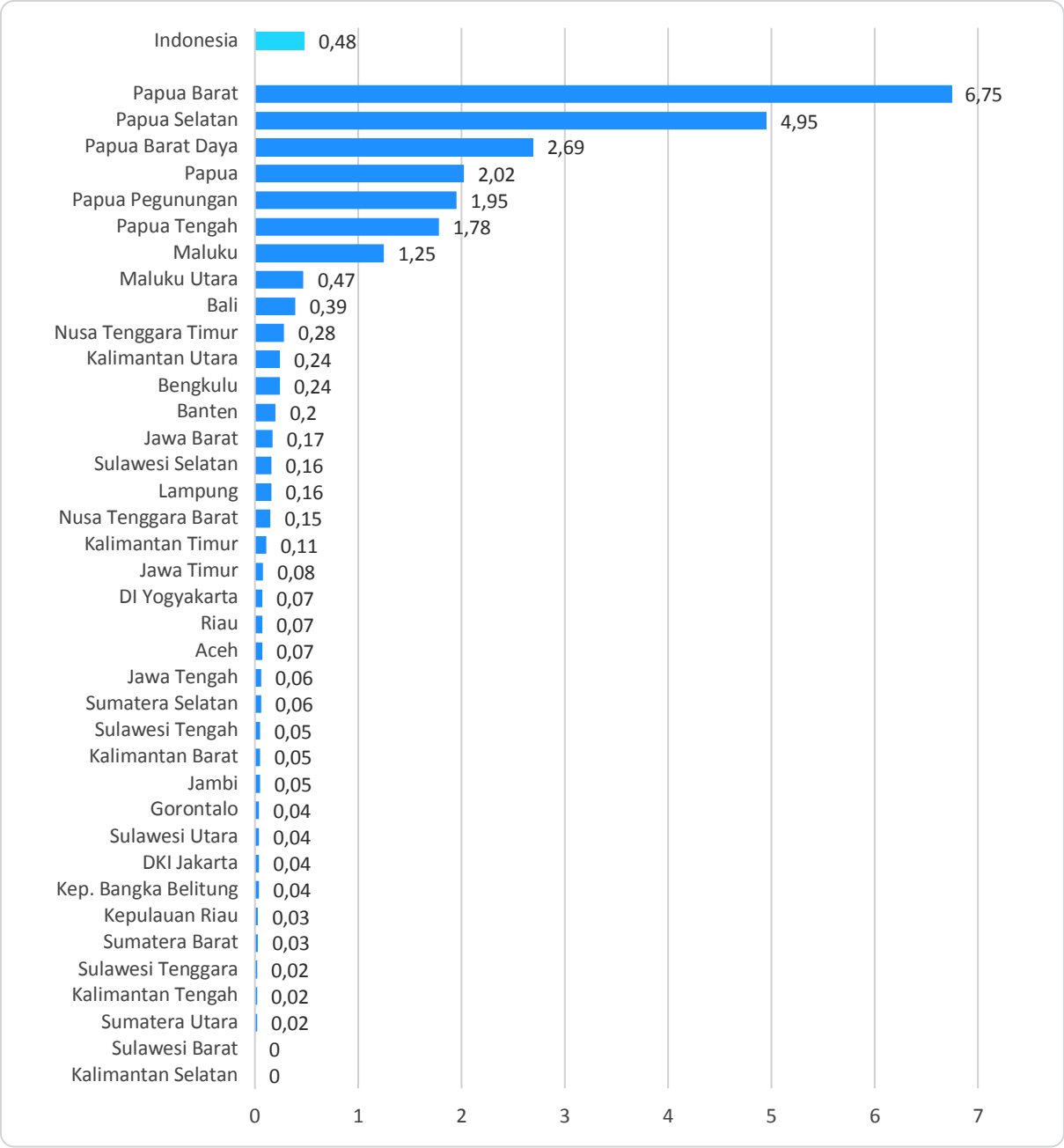

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 36,5% ibu hamil yang menjalani pemeriksaan Sifilis, dimana sebesar 0,48% ibu hamil dinyatakan positif.

Distribusi provinsi memperlihatkan Provinsi Papua Barat dengan persentase ibu hamil positif Sifilis tertinggi sebesar 6,75%, diikuti oleh provinsi Papua Selatan 4,95% dan papua Barat Daya 2,69%. Data dan informasi terkait pemeriksaan Sifilis pada ibu hamil menurut provinsi terdapat pada Lampiran 27.d.

B. KESEHATAN ANAK

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan hal tersebut, diperlukan upaya kesehatan anak dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya ini dimulai sejak janin berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Salah satu tujuan dari upaya kesehatan anak adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitasnya dengan mengurangi angka kematian, meningkatkan status gizi, serta memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal bagi bayi baru lahir, bayi, dan balita.

Tren Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia telah menunjukkan penurunan, namun masih memerlukan upaya percepatan dan langkah-langkah untuk mempertahankan momentum tersebut, sehingga target AKB 16/1000 kelahiran hidup dapat tercapai pada akhir tahun 2024

GAMBAR 5. 18
JUMLAH KEMATIAN BALITA (0-59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2023

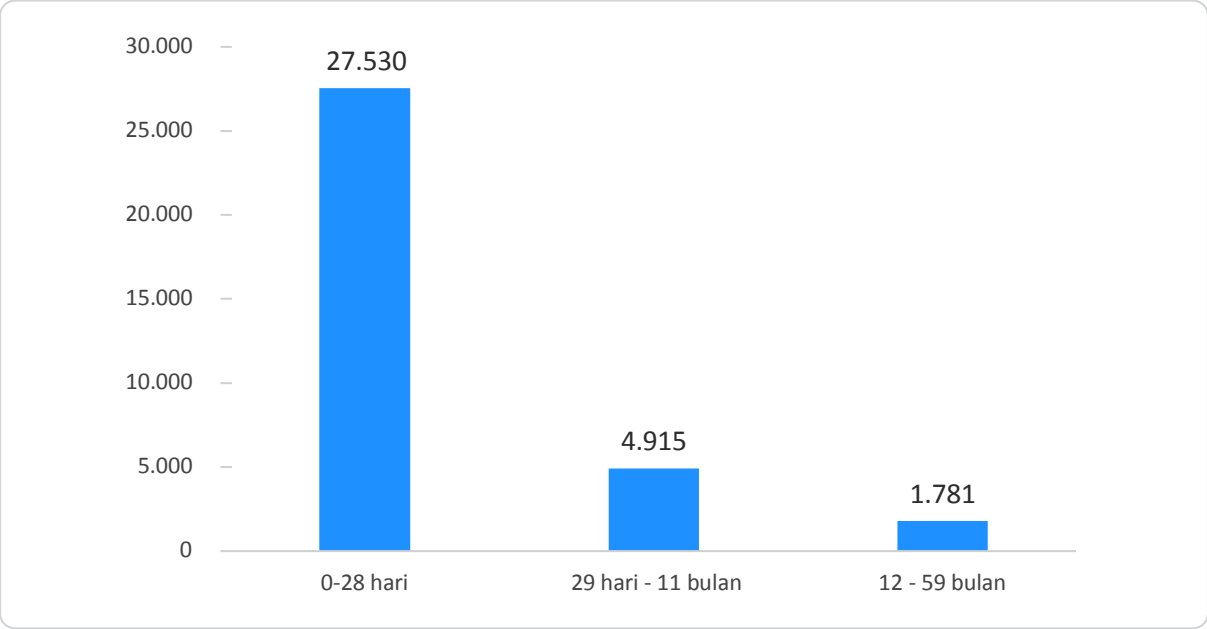

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Dari 5.18 di atas, terlihat bahwa total kematian balita dalam rentang usia 0-59 bulan pada tahun 2023 mencapai 34.226 kematian. Mayoritas kematian terjadi pada periode neonatal (0-28 hari) dengan jumlah 27.530 kematian (80,4% kematian terjadi pada bayi. Sementara itu, kematian pada periode post-neonatal (29 hari-11 bulan) mencapai 4.915 kematian (14,4%) dan kematian pada rentang usia 12-59 bulan mencapai 1.781 kematian (5,2%). Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah kematian balita pada tahun 2022, yang hanya mencapai 21.447 kasus.

GAMBAR 5. 19
PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA
TAHUN 2023

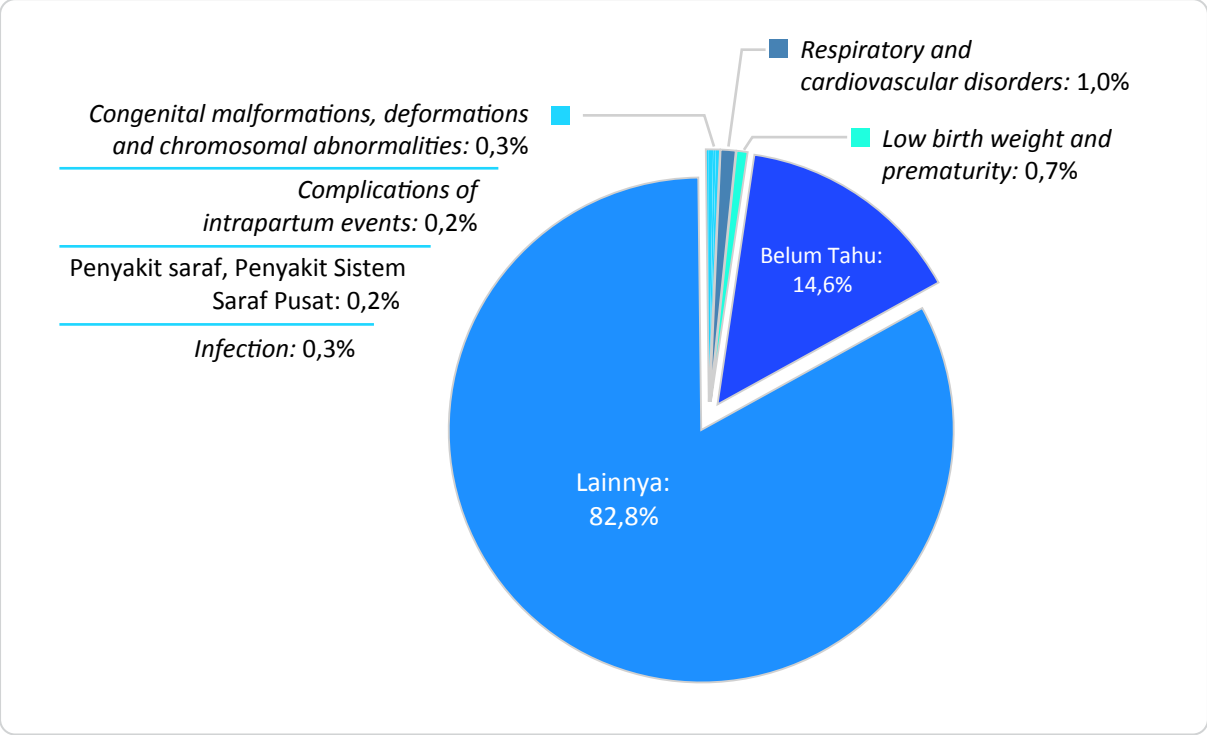

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Dengan jumlah kematian yang signifikan pada masa neonatal, penyebab utama kematian pada tahun 2023, diantaranya adalah *Respiratory* dan *Cardiovascular* (1%), Kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan persentase sebesar 0,7%. Kelainan Congenital (0,3%), Infeksi (0,3%), Penyakit saraf, penyakit sistem saraf pusat (0,2%), komplikasi intrapartum (0,2%). Belum diketahui penyebabnya (14,5%) dan lainnya (82,8%).

GAMBAR 5. 20
PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2023

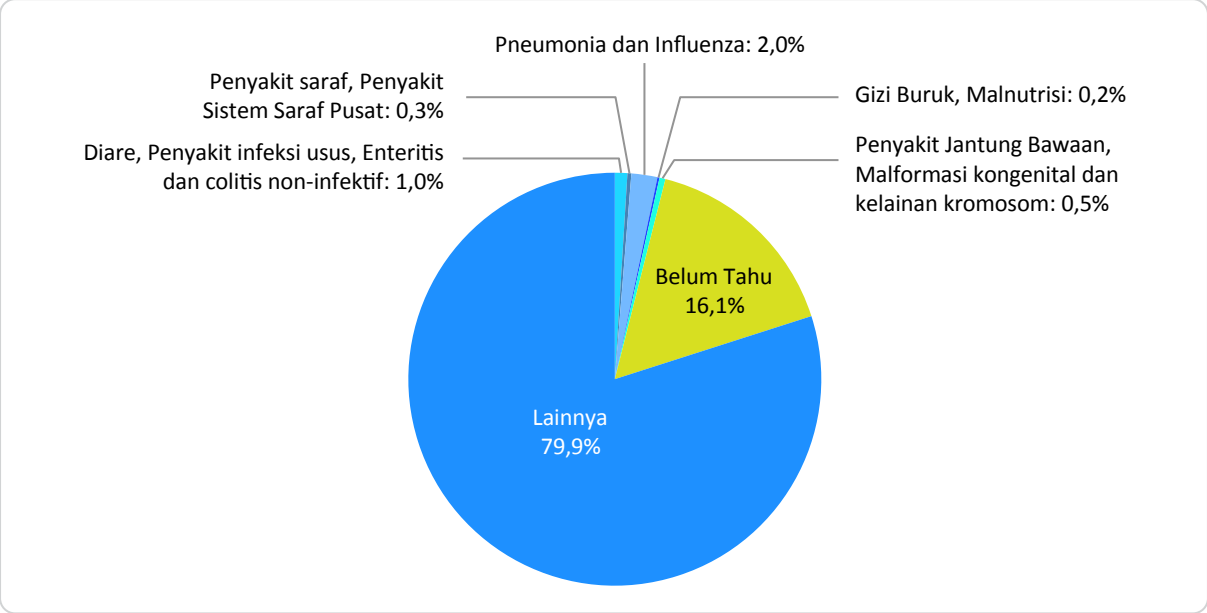

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Penyebab kematian pada post-neonatal di Indonesia, terdapat beberapa kesimpulan: Pneumonia menjadi penyebab kematian pada periode post-neonatal, menyumbang sekitar 2% dari kematian. Diare, penyakit infeksi usus, enteritis dan colitis non-infeksi sekitar 1%. Diare juga memiliki kontribusi sebesar 1% terhadap kematian pada post-neonatal. Penyakit jantung bawaan, kelainan kongenital juga merupakan penyebab yang signifikan, menyebabkan sekitar 0,5% dari kematian pada periode ini. Penyakit saraf dan penyakit sistem saraf pusat 0,3% tercatat sebagai penyebab kematian pada periode post-neonatal. Kematian yang disebabkan oleh gizi buruk atau malnutrisi 0,2%. Sekitar 16,1% dari kematian pada periode post-neonatal belum memiliki penjelasan yang belum diketahui penyebabnya. Meskipun penyakit seperti pneumonia, kelainan kongenital, dan diare menyumbang beberapa kasus kematian pada periode post-neonatal. Masih ada banyak kasus (79,9%) yang tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelidikan lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian pada periode ini.

GAMBAR 5. 21
PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2023

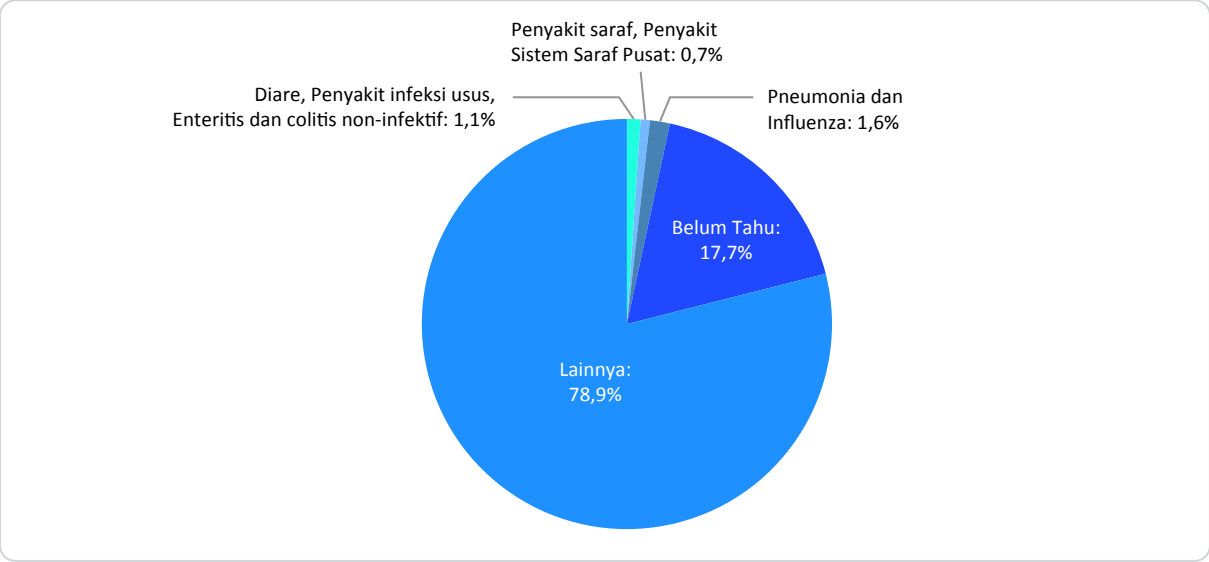

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Penyebab kematian pada balita kelompok usia 12-59 bulan adalah pneumonia (1,6%), diare (1,1%, Penyakit saraf, sistem saraf pusat (0,7%). Penyebab lainnya (78,9%). Dari penyebab lainnya, yang dapat diketahui secara spesifik beberapa diantaranya: Tbc, Kongenital dan kelainan, keganasan COO-D49 dan Keracunan, Tenggelam (1,2%). Selebihnya dari beberapa kasus kematian pada periode post-neonatal, masih ada banyak kasus yang tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelidikan lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian pada periode ini.

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal (0-28 Hari)

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia 28 hari memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Bila tidak dilakukan penanganan yang tepat, hal tersebut dapat berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir, meliputi:

- Pemeriksaan bayi segera setelah lahir untuk menilai keadaan bayi dan mengidentifikasi masalah kesehatan yang memerlukan penanganan segera.
- Pemberian perawatan dasar, termasuk pembersihan dan perawatan tali pusat, pemeriksaan suhu tubuh, serta pemberian imunisasi awal yang diperlukan.
- Penyediaan dukungan dan bantuan untuk ibu dalam memberikan ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif, karena ASI memberikan perlindungan terhadap penyakit dan mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi bayi.
- Penyediaan informasi dan dukungan kepada orang tua tentang perawatan bayi baru lahir, termasuk cara merawat bayi, tanda-tanda bahaya pada bayi, serta pentingnya perawatan yang tepat dan konsultasi medis jika diperlukan.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada bayi baru lahir, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya masalah kesehatan dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pada bayi baru lahir dan menjadi penyebab terbanyak kematian adalah BBLR, infeksi, dan kelainan kongenital. BBLR di Indonesia dapat terlihat dari Gambar 5.22 di bawah ini:

GAMBAR 5. 22
BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI INDONESIA TAHUN 2018-2023

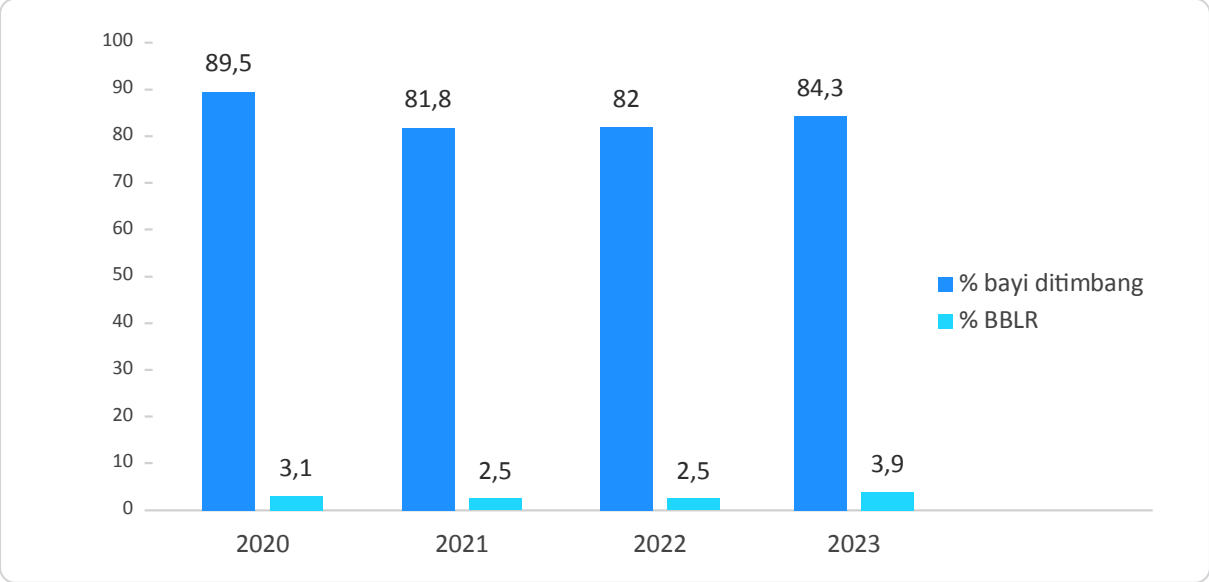

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan penimbangan yang dilakukan terhadap bayi baru lahir hidup pada tahun 2023 yang dilaporkan dari 38 provinsi, terdapat 84,3% bayi baru lahir yang ditimbang berat badannya, sebanyak 3,9% mengalami kondisi BBLR. Kondisi tersebut jauh meningkat dibandingkan dari tahun 2022, sekitar 2,5% bayi mengalami kondisi BBLR.

BBLR adalah kondisi bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram. Kondisi bayi BBLR disebabkan oleh kondisi Ibu saat hamil kurang energi kronik (KEK), dan lain-lain, kelahiran prematur dan gangguan plasenta yang mengakibatkan gangguan pada proses transportasi nutrisi pada plasenta. Untuk itu menjadi sangat penting dalam mempersiapkan sedini mungkin kondisi ibu yang sehat dan layak hamil sejak dari calon pengantin dan masa remaja. Selain sebagai salah satu penyebab tingginya kematian pada bayi baru lahir, BBLR juga meningkatkan risiko *Stunting* dan munculnya penyakit tidak menular dikemudian hari, seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung.

Data yang disajikan menunjukkan betapa pentingnya pemeriksaan bayi baru lahir dan penanganan kondisi BBLR untuk mencegah risiko kematian pada periode neonatal. Upaya pelayanan kesehatan esensial pada bayi baru lahir, seperti kunjungan neonatal, memiliki peran krusial dalam mendeteksi dini masalah kesehatan dan memastikan pelayanan yang tepat diberikan.

Kunjungan neonatal dilakukan secara berkala dan meliputi berbagai aspek perawatan bayi baru lahir, mulai dari perawatan tali pusat hingga pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak. Cakupan kunjungan neonatal menjadi indikator penting dalam pemantauan dan evaluasi program kesehatan, dengan fokus pada cakupan kunjungan neonatal pertama dan cakupan kunjungan neonatal lengkap.

Dengan melaksanakan kunjungan neonatal secara cepat dan tepat waktu, diharapkan dapat mengurangi risiko kematian pada periode neonatal serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir yang optimal. Selain itu, perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan ibu sejak awal kehamilan juga merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko kondisi BBLR dan masalah kesehatan pada bayi baru lahir.

GAMBAR 5. 23
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) DAN KN LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2018-2023

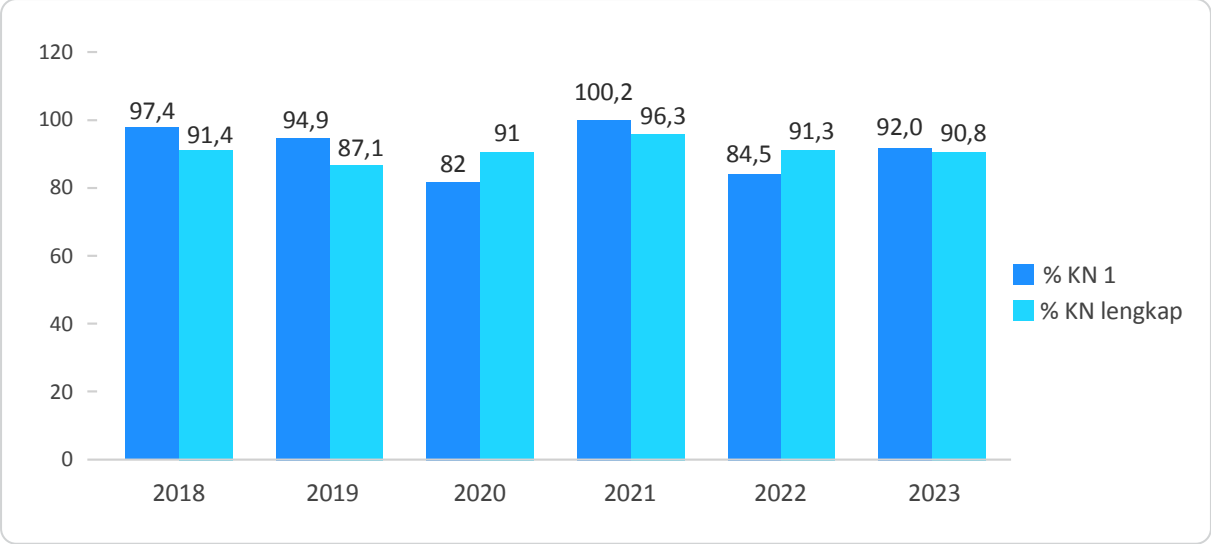

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Gambar 5.23 di atas menunjukkan bahwa cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) pada tahun 2023 (92,0%) mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Selain itu, terlihat bahwa cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) mengalami fluktuasi semenjak tahun 2018 – 2023. Pada tahun 2023 (90,8%) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 (91,3%). Cakupan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023, yaitu mencapai 93%.

GAMBAR 5. 24
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

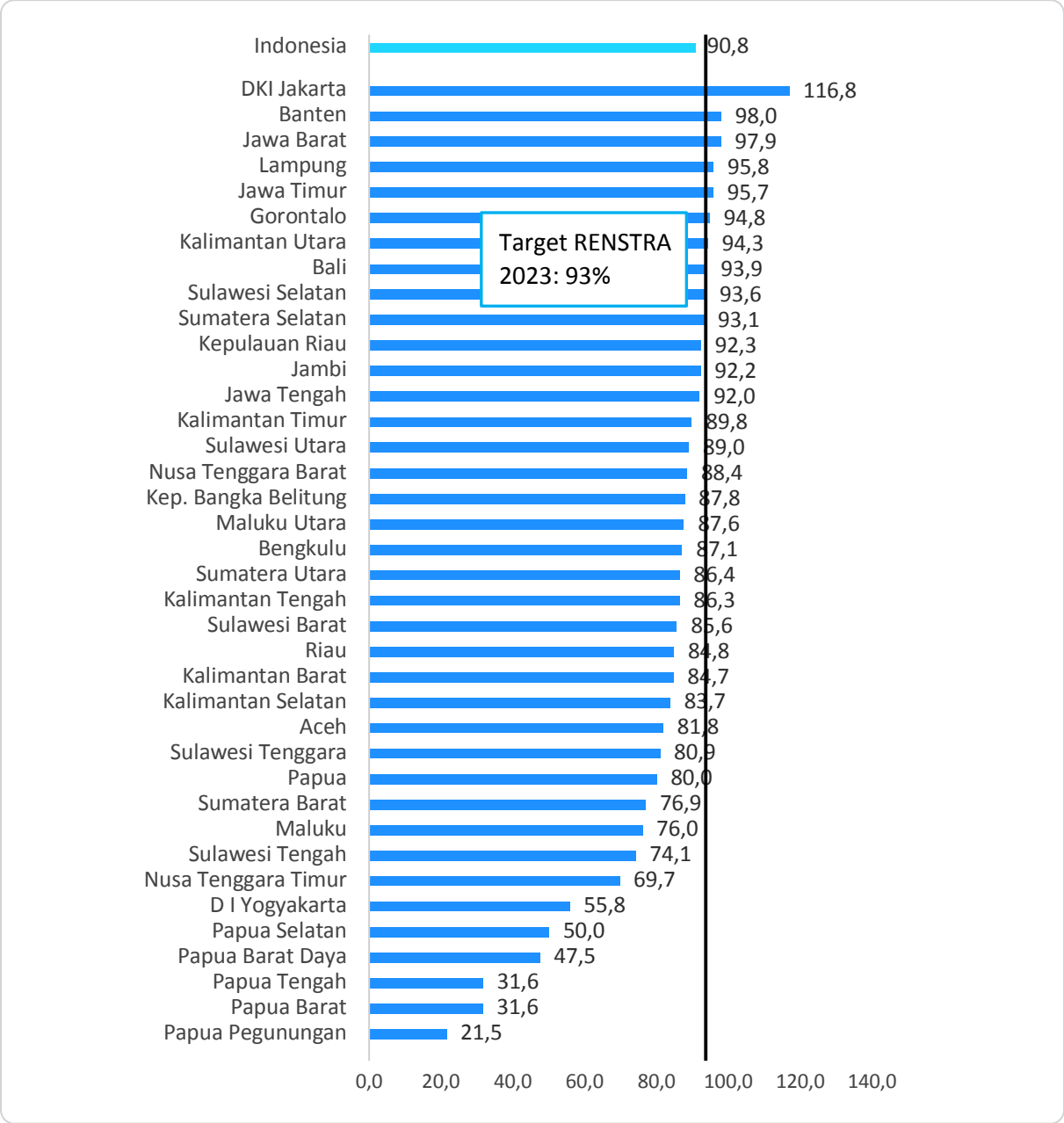

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Cakupan KN lengkap secara nasional per provinsi berkisar antara 21,5 % di Papua Pegunungan hingga 116,8% di DKI Jakarta. Terdapat provinsi yang sasarannya lebih tinggi dari target Renstra 2023, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara (lebih dari 93%).

2. Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah

Menurut Pasal 21 dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah, pelayanan kesehatan untuk bayi, anak balita, dan prasekolah dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain:

- Pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan.
- Pemberian ASI hingga usia 2 tahun.
- Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 bulan.
- Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi.
- Pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan.
- Pemberian vitamin A.
- Upaya pola mengasuh anak.
- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- Pemantauan gangguan tumbuh kembang.
- Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
- Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bayi, anak balita, dan prasekolah mendapatkan perawatan dan perlindungan kesehatan yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara menyeluruh.

Kegiatan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah dilakukan secara terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan bersama dengan kader posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dengan standar minimal pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat kabupaten/kota. Standar minimal pelayanan ini mencakup:

- Penimbangan berat badan setiap bulan minimal 8 kali.
- Pengukuran panjang badan/tinggi badan minimal 2 kali setahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun.
- Pemberian vitamin A (untuk usia 6-59 bulan).
- Imunisasi dasar lengkap dan lanjutan.
- Pelayanan balita sakit dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Pelayanan kesehatan ini dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif dengan tujuan utama menurunkan kematian bayi dan balita, menurunkan prevalensi stunting dan wasting, serta meningkatkan kualitas hidup balita.

Hasil dari pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas seperti posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan lainnya digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Untuk menurunkan kematian bayi dan balita serta memperkuat pelayanan kesehatan, penting untuk mengoptimalkan penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Buku KIA berperan sebagai *home-base record* untuk memastikan *Continuum of Care* (COC) ibu dan anak, serta sebagai panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan, serta sebagai media komunikasi informasi dan edukasi.

Data dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa persentase balita yang memiliki Buku KIA di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 69,6% menjadi 80% pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah Buku KIA yang disediakan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah belum mampu menyediakan Buku KIA untuk memenuhi kebutuhan. Provinsi Papua Pegunungan memiliki persentase terendah (9,2%), sementara Jawa Tengah memiliki persentase tertinggi (97,0%). Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengadaan dan distribusi Buku KIA untuk memastikan kontinuitas pelayanan kesehatan yang optimal bagi ibu dan anak.

GAMBAR 5. 25
BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

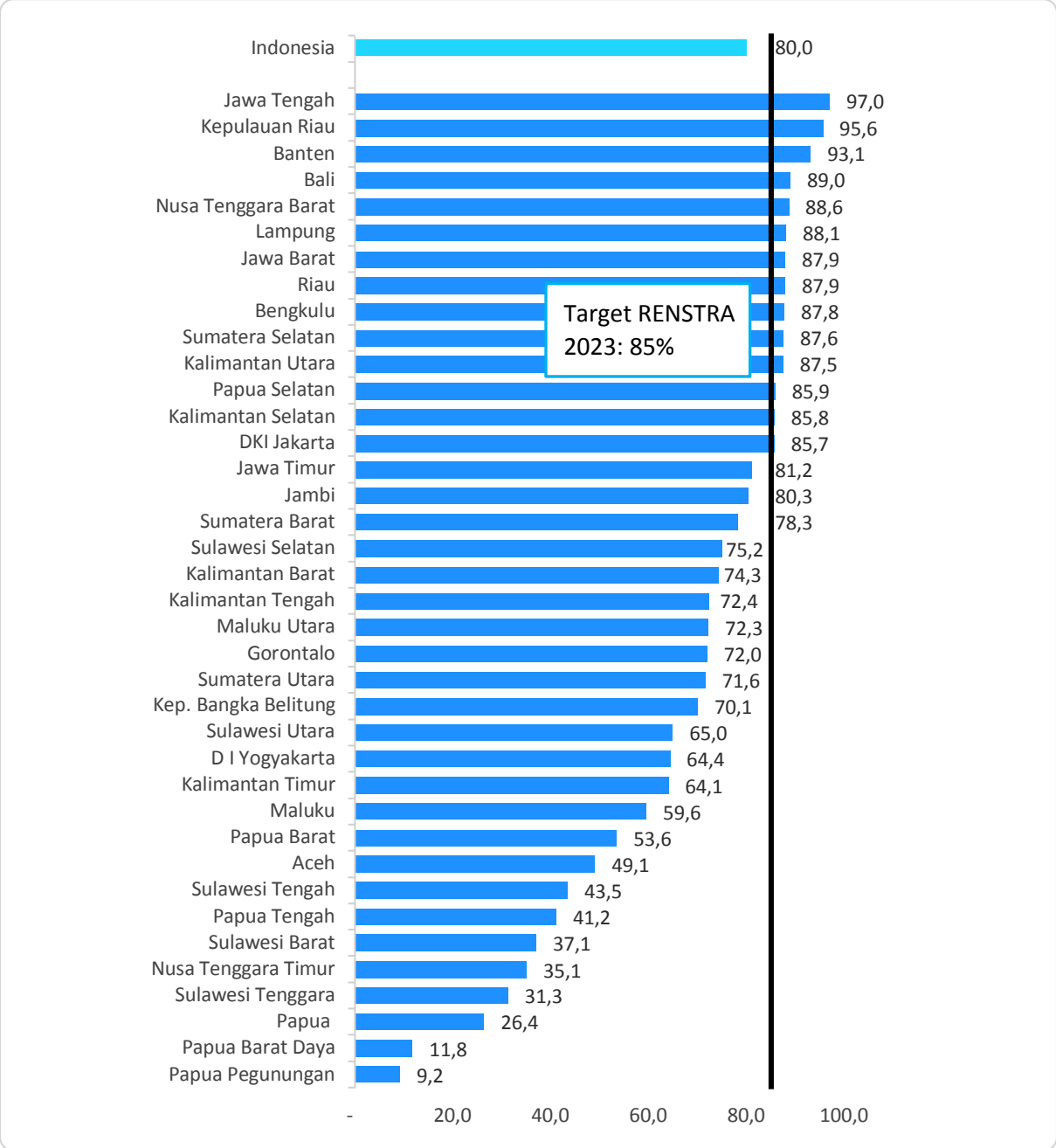

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Upaya pemenuhan layanan esensial utama untuk bayi dan balita meliputi pemberian ASI eksklusif dan vitamin A, serta upaya preventif melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti stunting, wasting, gizi buruk, dan obesitas pada balita, sehingga dapat dilakukan intervensi atau rujukan yang tepat ke fasilitas kesehatan.

Indikator keberhasilan dalam hal ini diukur dengan melihat persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan total sasaran balita. Secara nasional, indikator ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 yang mencapai 78,3% pada tahun 2023 mencapai 82,3%. Target Renstra sebesar 85%. Namun, dari segi provinsi, 7 dari 38 provinsi telah mencapai target Renstra tahun 2023.

Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memperkuat pelaksanaan Posyandu dan kunjungan rumah untuk mencari sasaran yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan dan untuk memastikan bahwa balita menerima pelayanan secara lengkap. Hal ini melibatkan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader masyarakat, serta memberdayakan ibu dan keluarga untuk melakukan pemantauan mandiri dengan menggunakan buku KIA.

GAMBAR 5. 26
BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

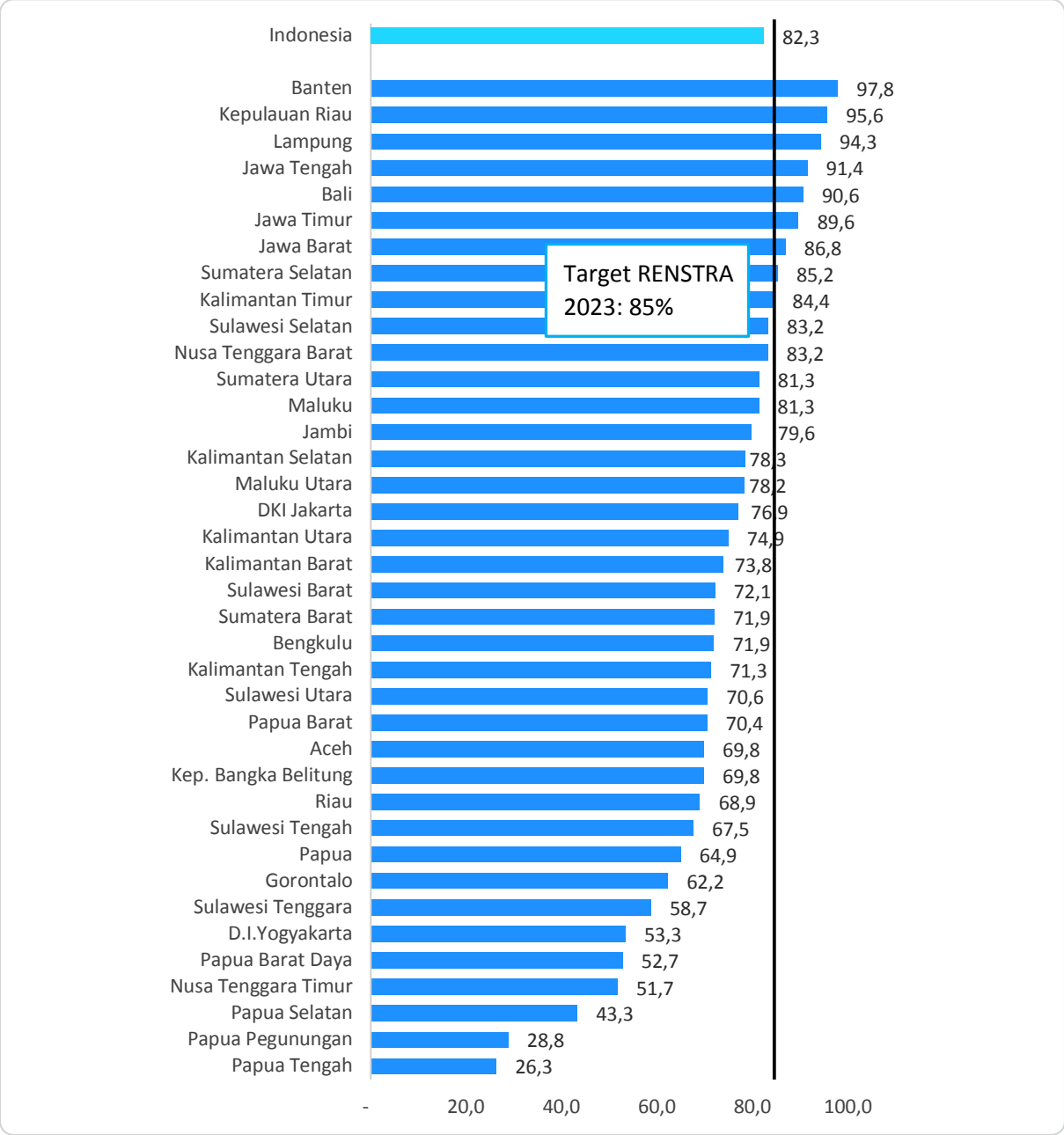

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan yang terdapat dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Apabila hasil pemeriksaan perkembangan melalui buku KIA menunjukkan interpretasi yang tidak lengkap, maka dilakukan tindak lanjut dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan oleh petugas kesehatan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di puskesmas.

Pada gambar 5.27 di bawah menunjukkan persentase balita yang dilayani oleh SDIDTK secara nasional pada tahun 2023, yakni sebesar 70,8%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Kepulauan Riau (93,8%), sementara Provinsi Papua Pegunungan memiliki persentase terendah yaitu 0,1%.

Ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan cakupan layanan SDIDTK di seluruh wilayah, terutama di provinsi-provinsi dengan persentase layanan yang masih rendah. Dengan meningkatkan cakupan layanan SDIDTK, diharapkan dapat lebih banyak balita yang mendapatkan deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan serta mendapatkan intervensi yang sesuai untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

GAMBAR 5. 27
BALITA DILAYANI STIMULASI, DETEKSI, DAN INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

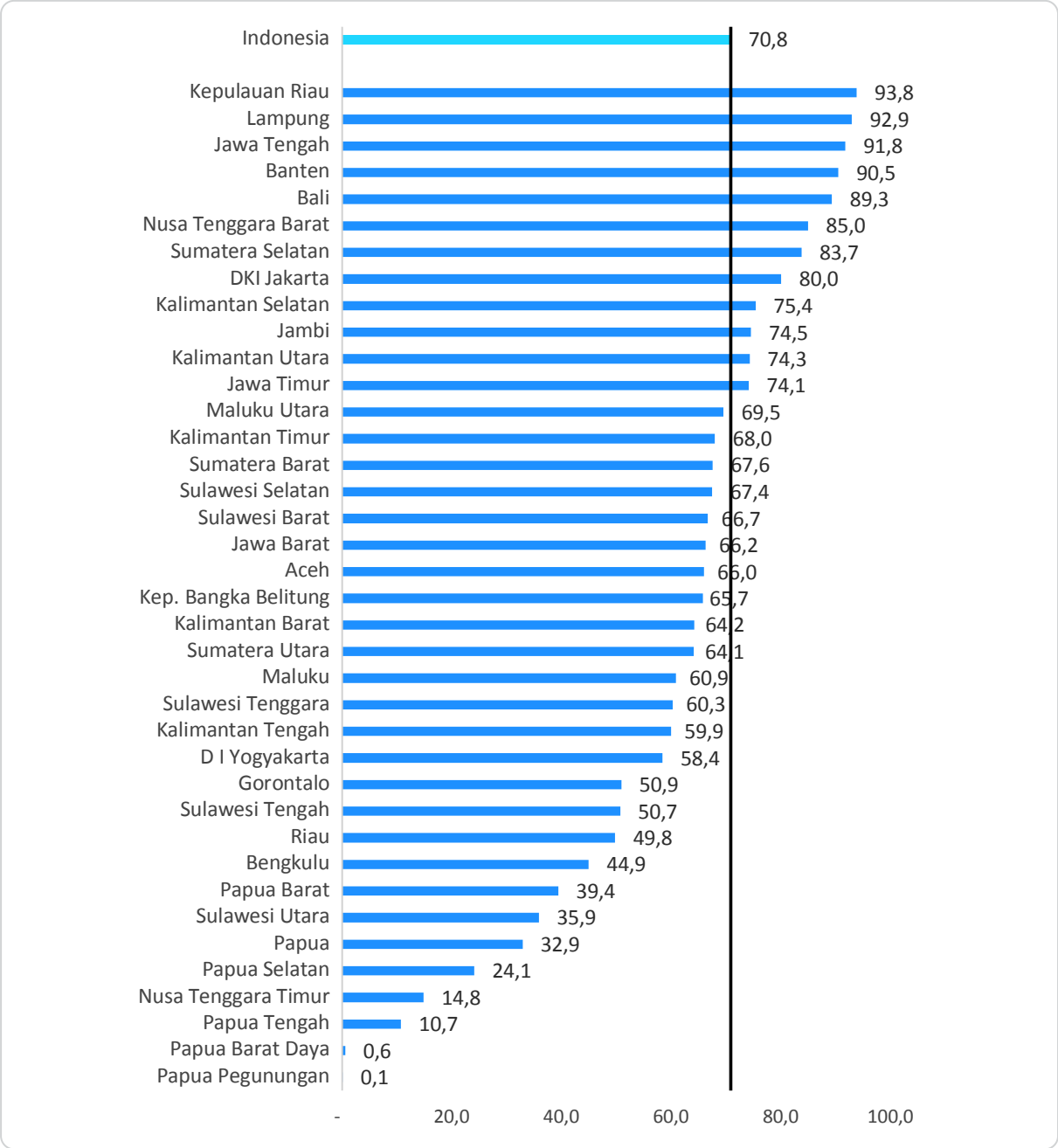

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) merupakan pendekatan pelayanan komprehensif dan terintegrasi terhadap penyebab utama kematian balita yang sering dijumpai, seperti pneumonia, diare, campak, malaria, atau kombinasi dari penyakit-penyakit tersebut. Selain itu, penyakit-penyakit tersebut sering kali dikaitkan dengan kondisi gizi kurang atau gizi buruk. Implementasi MTBS dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten/kota.

Gambar 5.28 di bawah menunjukkan persentase balita yang dilayani oleh MTBS secara nasional pada tahun 2023, mencapai 87,7%. Angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 juga mencapai 87,7%. Hal ini disebabkan penanganan Balita Sakit sudah menggunakan pendekatan MTBS sesuai dengan prosedur yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu, sehingga dapat menekan angka kesakitan pada balita.

GAMBAR 5. 28
BALITA DILAYANI MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

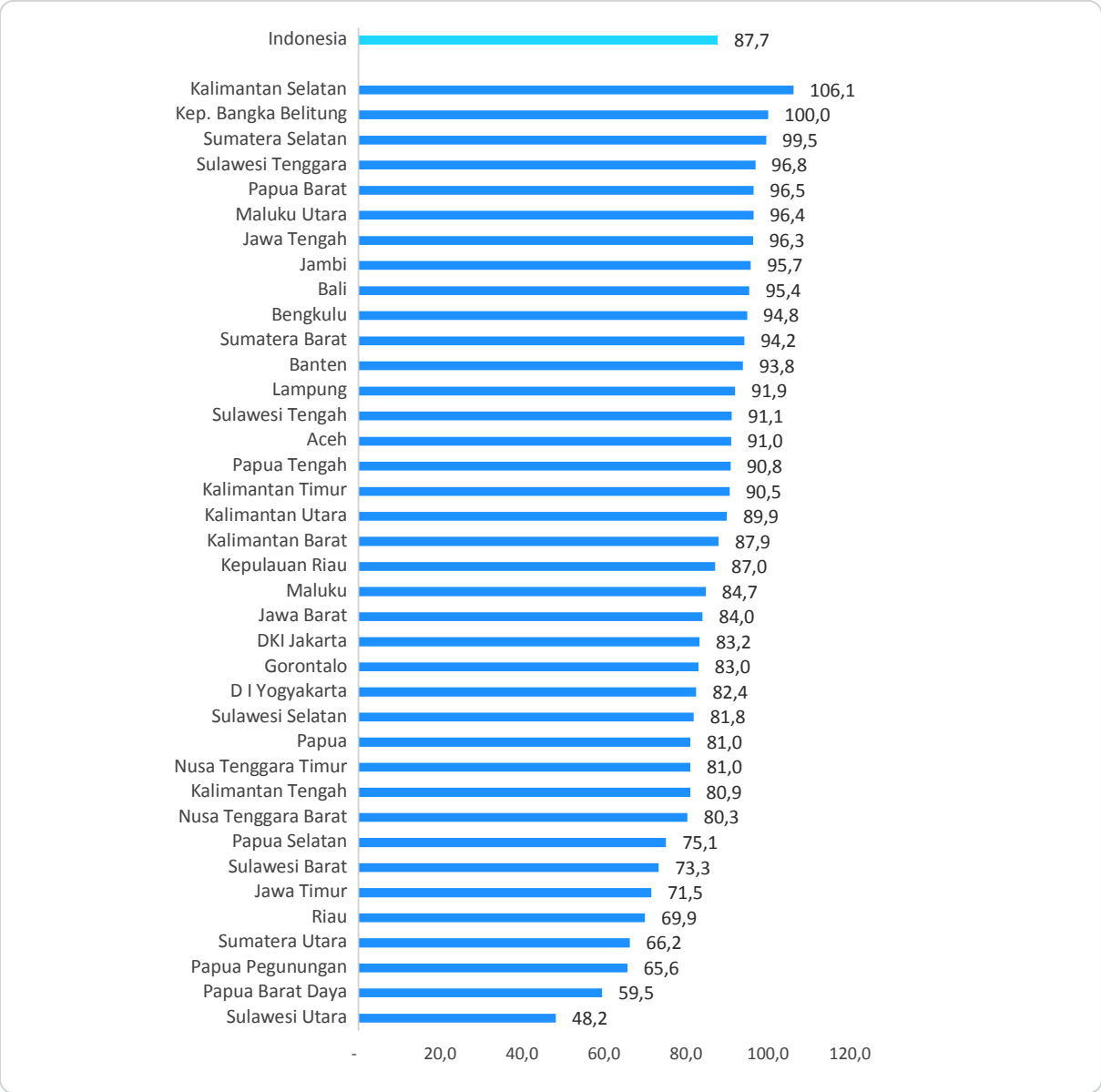

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

3. Imunisasi

Program imunisasi yang dilakukan pemerintah mencakup beberapa jenis vaksinasi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Beberapa program imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, antara lain:

1. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL): Program ini mencakup serangkaian vaksinasi dasar yang diberikan kepada bayi dan anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, seperti imunisasi Hepatitis B, BCG (Tuberkulosis), DPT-HB-Hib (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, *Haemophilus influenzae type b*), polio, campak, dan rubella.
2. Imunisasi Tambahan dan Lanjutan: Selain imunisasi dasar, terdapat juga program imunisasi tambahan dan lanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kekebalan individu terhadap penyakit tertentu, seperti vaksinasi influenza, HPV (*Human Papillomavirus*), meningokokus, dan lain sebagainya.
3. Imunisasi Rutin: Pemerintah juga menyelenggarakan program imunisasi rutin yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik di puskesmas, posyandu, sekolah, maupun tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Program imunisasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, sehingga dapat mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit tersebut. Selain itu, melalui program imunisasi, juga diharapkan dapat tercipta herd immunity di masyarakat, yang memberikan perlindungan tambahan bagi individu yang belum atau tidak dapat divaksinasi.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Di Indonesia, setiap bayi usia 0-11 bulan diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Ini meliputi:

1. 1 dosis Hepatitis B
2. 1 dosis BCG (Tuberkulosis)
3. 3 dosis DPT-HB-HiB (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, *Haemophilus influenzae type b*)
4. 4 dosis polio tetes atau *Oral Polio Vaccine* (OPV)
5. 1 dosis polio suntik atau *Inactivated Polio Vaccine* (IPV)
6. 1 dosis Campak Rubela

Penentuan jenis imunisasi dan jadwal pemberiannya didasarkan pada kajian ahli dan analisis epidemiologi terhadap penyakit-penyakit yang umum terjadi. Namun, untuk beberapa daerah tertentu yang dipilih berdasarkan kajian epidemiologi, analisis beban penyakit, dan rekomendasi ahli, ada tambahan imunisasi tertentu. Contohnya adalah *Pneumococcal Conjugate Vaccine* (PCV) dan *Japanese Encephalitis.*

Perlu dicatat bahwa implementasi pemberian imunisasi tambahan tersebut belum berlaku secara nasional, sehingga tidak dianggap sebagai bagian dari imunisasi dasar lengkap pada bayi. Namun, pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan imunisasi ini di masa mendatang berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi para ahli.

GAMBAR 5. 29
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI INDONESIA
TAHUN 2013-2023

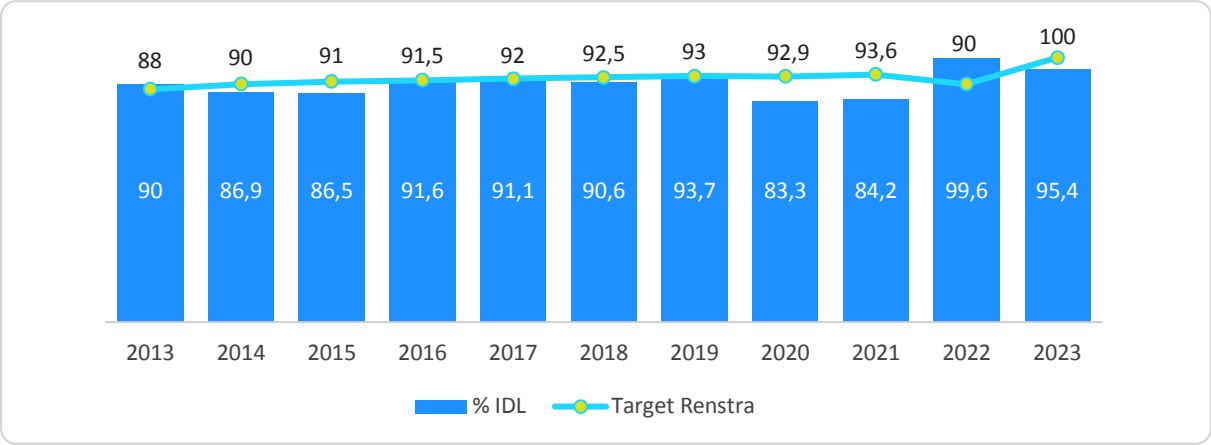

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Cakupan imunisasi dasar lengkap secara nasional tidak mengalami perubahan pada tahun 2023, yaitu 95,4%. Angka ini belum memenuhi target Renstra tahun 2023 sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan di mana jumlah provinsi yang mencapai target Renstra berkurang dari 9 provinsi menjadi 6 provinsi.

GAMBAR 5. 30
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

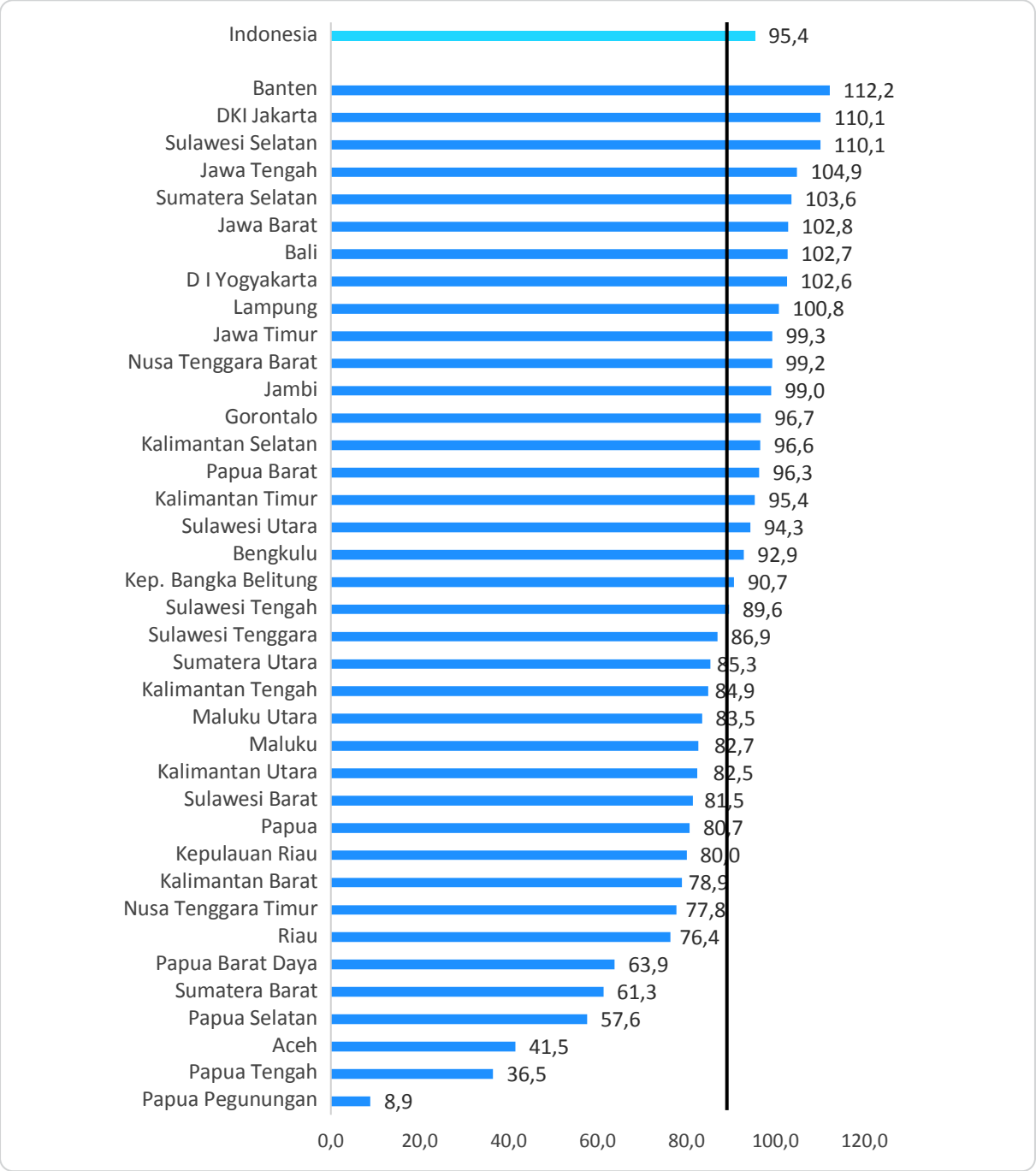

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada gambar 5.30 di atas, diketahui bahwa Provinsi dengan Imunisasi dasar lengkap tertinggi adalah Banten (112,2%). Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah yaitu Papua Pegunungan (8,9%). Rincian data mengenai Imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2023, terdapat pada lampiran 43.a.

b. Angka *Drop Out* Cakupan Imunisasi DPT/HB/HiB1-Campak Rubela

Pada Gambar 5.31 di bawah, diketahui Tren angka *Drop Out* (DO) imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 cenderung fluktuatif sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 15,4% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Angka DO imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 telah berada di bawah batas maksimal 5% dari tahun 2022 hingga 2023, tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2023, angka DO tersebut bahkan berada di ambang batas minimal (nilai minus: -15,4%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang mendapatkan imunisasi Campak Rubela 1 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib1. Faktor yang mungkin mempengaruhi hal ini adalah mudahnya orang tua mengingat jadwal imunisasi Campak Rubela 1 ketika anak memasuki usia 9 bulan, sementara efek samping dari imunisasi DPT-HB-Hib1 seringkali membuat orang tua melewatkan jadwal imunisasi tersebut.

Perlu dicatat bahwa pemanfaatan layanan imunisasi dianggap baik jika angka DO <5%, sehingga angka DO dari DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diharapkan tidak melebihi 5%. Evaluasi terus menerus terhadap tren DO ini penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan layanan imunisasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan mencegah DO yang tinggi.

GAMBAR 5. 31
ANGKA *DROP OUT* (DO) IMUNISASI PADA BAYI
TAHUN 2020-2023

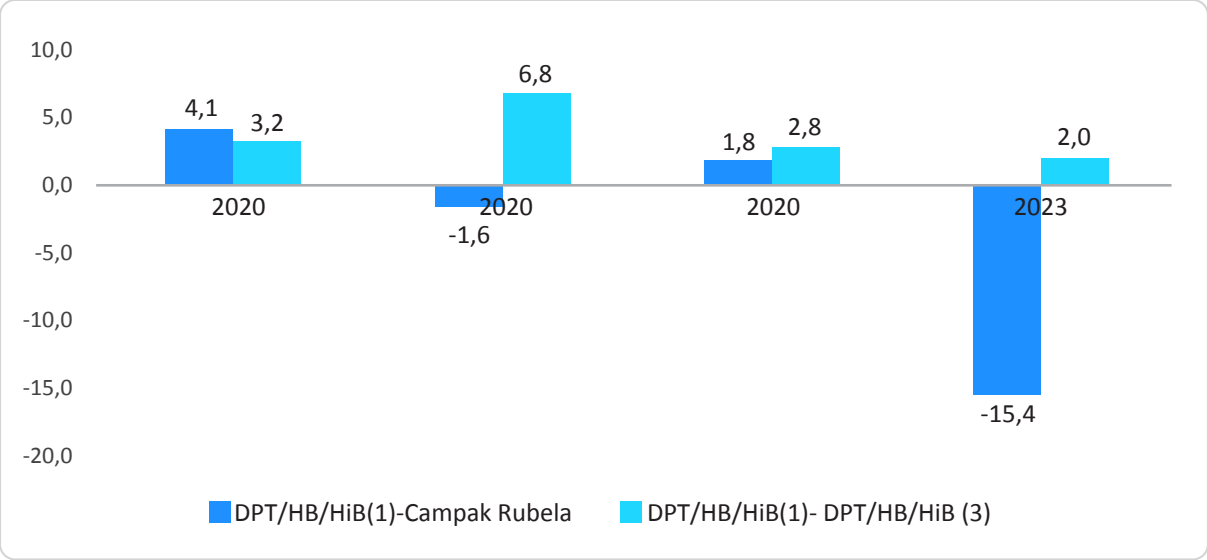

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

c. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi adalah salah satu indikator penting untuk mengukur pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Hal ini mengindikasikan sejauh mana pelayanan imunisasi dasar telah tersedia dan dapat diakses secara merata di berbagai daerah.

Ketika persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah berhasil memberikan pelayanan imunisasi dasar yang cukup baik kepada bayi-bayi di daerah tersebut. Ini bisa mengindikasikan adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan, kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, serta ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai di sektor kesehatan.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun persentase ini mencapai target, evaluasi terus menerus diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan imunisasi dasar tersebut tidak hanya merata secara geografis, tetapi juga mencakup semua kelompok masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau terpinggirkan. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memperbaiki pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan agar semua anak memiliki akses yang setara terhadap imunisasi dasar yang diperlukan.

GAMBAR 5. 32
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2020-2023

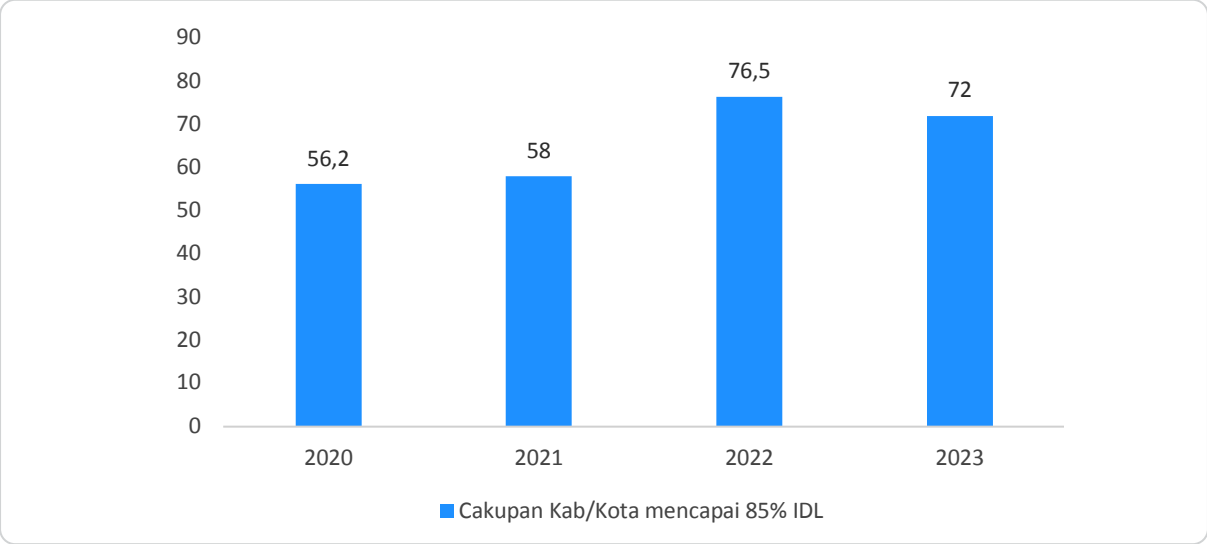

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Peningkatan jumlah provinsi dengan kabupaten/kotanya yang telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan penurunan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi di berbagai wilayah. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya imunisasi dalam melindungi mereka dari penyakit yang dapat dicegah.

Rincian lengkap mengenai persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap selama tiga tahun terakhir, seperti yang disebutkan, dapat dilihat pada Lampiran 43.c. Data ini memberikan penjelasan tentang progres imunisasi di setiap wilayah, serta memungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap upaya pemerataan dan peningkatan mutu layanan imunisasi di seluruh negeri. Dengan memahami tren ini, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk terus meningkatkan cakupan imunisasi dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan.

Pada Gambar 5.33 dapat diketahui, jumlah Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang telah mencapai 85% Imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami penurunan dari tahun 2022 sd 2023, berjumlah 15 Provinsi. Rincian lengkap mengenai persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasr Lengkap selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran 43.C

GAMBAR 5. 33
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

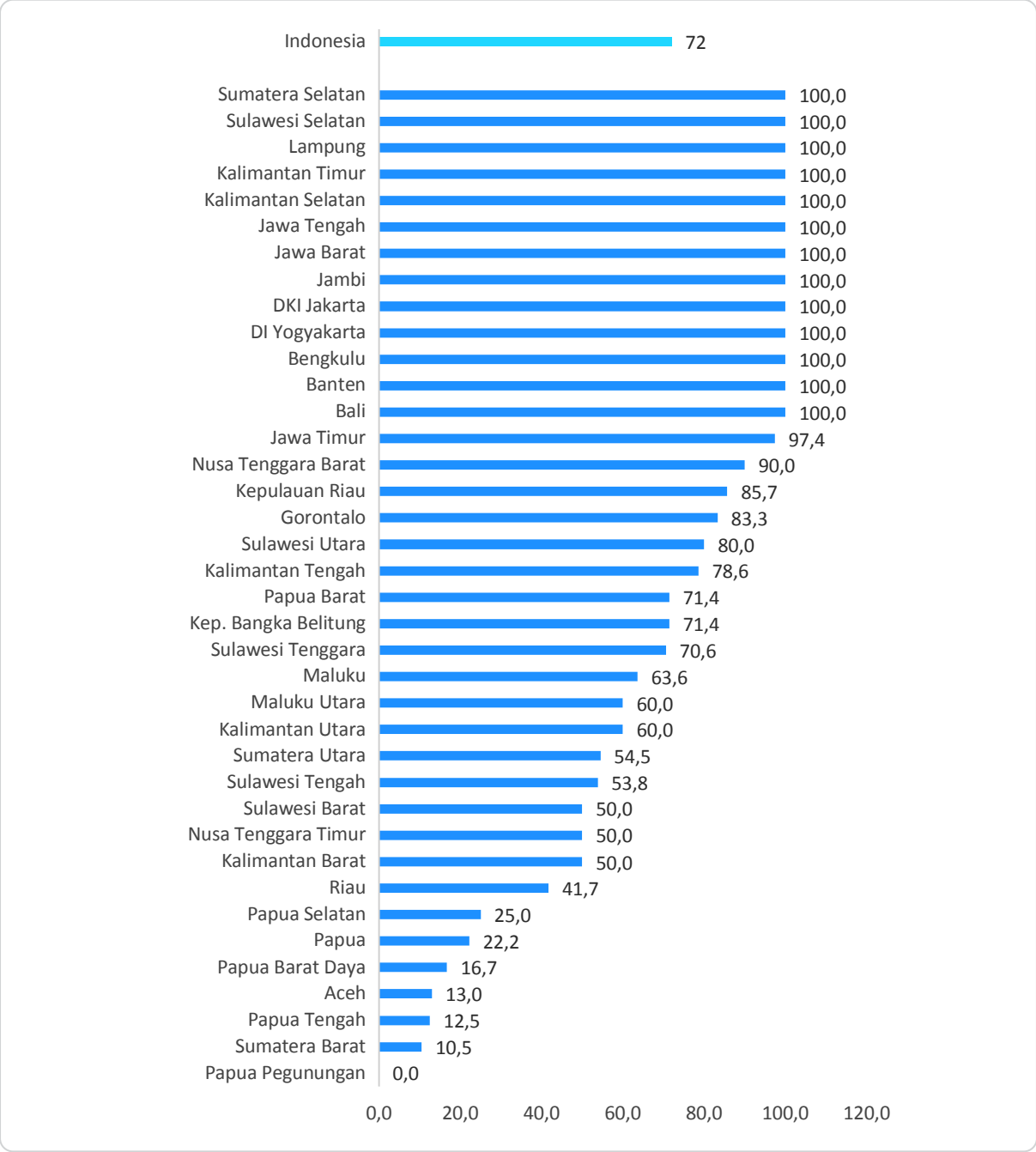

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

d. Imunisasi Lanjutan pada Anak Baduta

Imunisasi lanjutan pada anak baduta (di bawah dua tahun) memainkan peran penting dalam mempertahankan tingkat kekebalan tubuh mereka untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap penyakit yang dapat dicegah. Meskipun beberapa jenis imunisasi dasar yang diberikan pada saat bayi mungkin memerlukan dosis lanjutan (booster) untuk meningkatkan kekebalan, imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan tetap menjadi langkah penting dalam memastikan anak-anak tetap terlindungi.

Pemberian imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan ini mengintegrasikan pemberian dosis booster dari beberapa vaksin dasar yang penting, seperti DPT-HB-HiB dan Campak Rubela. Perlindungan optimal dari imunisasi lanjutan ini hanya dapat dicapai jika anak telah menerima imunisasi dasar secara lengkap. Oleh karena itu, program imunisasi rutin di Indonesia sejak tahun 2014 telah mencakup pemberian imunisasi lanjutan pada anak usia 18-24 bulan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak.

Peningkatan signifikan dalam cakupan imunisasi DPT-HB-HiB4 dan Campak Rubela 2 pada anak usia 18-24 bulan tahun 2023 adalah kabar yang sangat positif. Ini menunjukkan efektivitas dari upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan akses terhadap imunisasi di seluruh negeri. Dengan meningkatnya cakupan imunisasi, akan ada lebih banyak anak yang dilindungi dari penyakit yang dapat dicegah, dan ini merupakan langkah penting menuju tercapainya kesehatan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

Rincian lengkap mengenai cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-HiB4 dan Campak Rubela 2 pada anak baduta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren ini, serta memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas program-program imunisasi yang ada. Langkah-langkah yang lebih lanjut dapat diambil untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan imunisasi yang mereka butuhkan untuk melindungi kesehatan mereka secara optimal. Lihat 5.34.

GAMBAR 5. 34
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

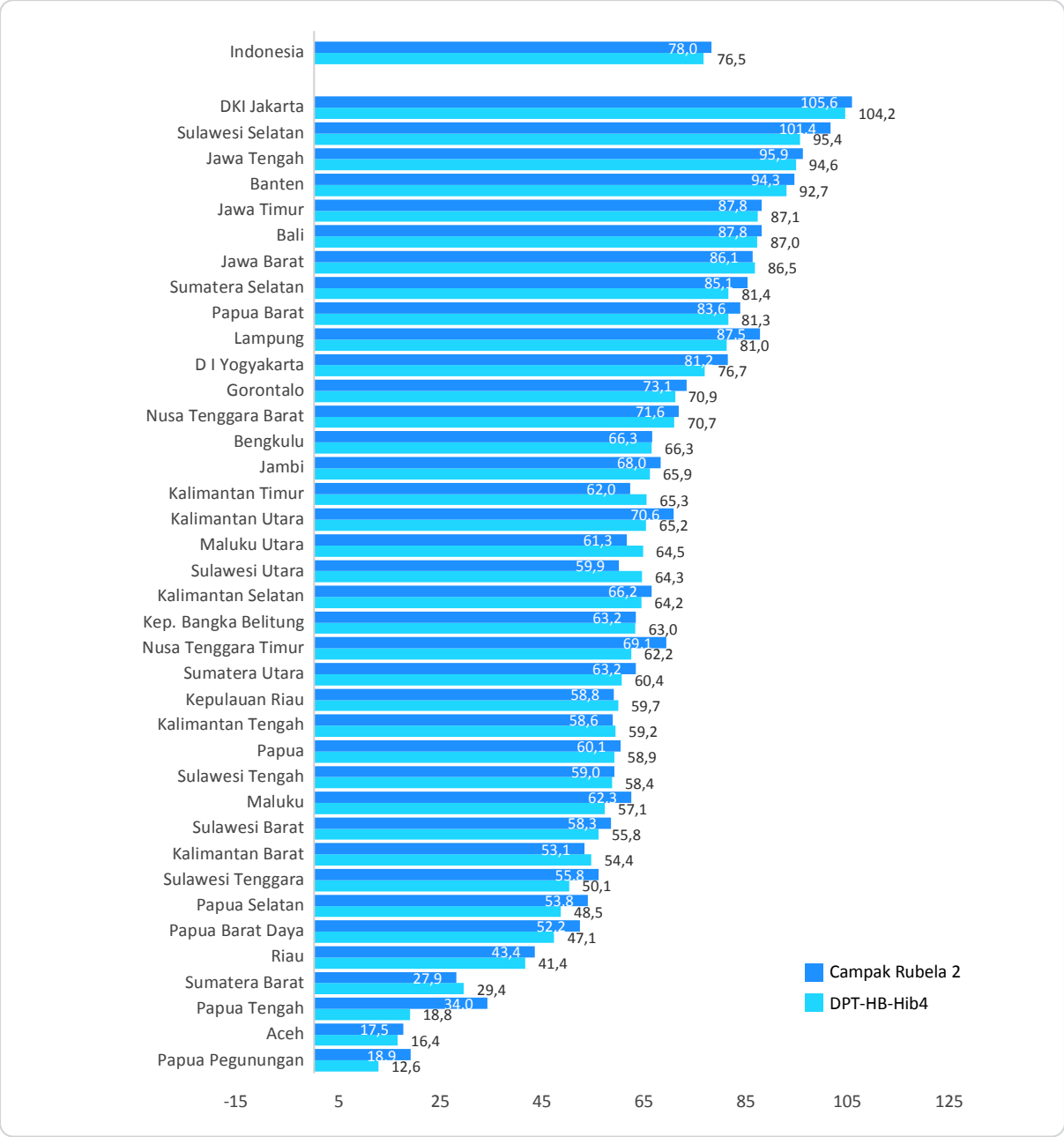

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib4 dan Campak Rubela 2 pada anak usia 18-24 bulan tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022. Imunisasi DPT-HB-Hib4 yang sebelumnya sebesar 98,4%, tahun 2023menjadi 76,5%. Cakupan Imunisasi Campak Rubela 2 Tahun 2023 juga menurun dibandingkan tahun 2022, dari 98,4% menjadi 76,8%. Rincian lengkap mengenai Imunisasi DPT-HB-Hib4 dan Campak Rubela 2 pada anak Balita, dapat dilihat pada lampiran 44-A.

e. Imunisasi Anak Sekolah

Pelaksanaan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) memiliki peran penting dalam mempertahankan tingkat kekebalan anak-anak sehingga mereka terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Pelaksanaan BIAS dapat terpengaruh selama masa pandemi Covid-19 karena pembatasan aktivitas tatap muka di sekolah. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari solusi alternatif agar program imunisasi pada anak sekolah tetap dapat dilaksanakan dengan efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Promosi Imunisasi Melalui Kampanye *Online*: Memanfaatkan media sosial dan *platform* digital lainnya untuk memberikan informasi dan mengedukasi orang tua serta anak-anak mengenai pentingnya imunisasi lanjutan dan jadwal yang harus diikuti.
2. Pelayanan Imunisasi di Fasilitas Kesehatan: Memastikan bahwa pelayanan imunisasi tetap tersedia di fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, untuk anak-anak yang tidak dapat mengikuti kegiatan BIAS di sekolah.
3. Imunisasi Berbasis Komunitas: Mengorganisir kegiatan imunisasi di tingkat komunitas, seperti di pusat-pusat kegiatan masyarakat, agar orang tua dan anak-anak dapat mengakses imunisasi dengan mudah.
4. Penjadwalan Ulang Kegiatan BIAS: Setelah situasi pandemi membaik dan pembatasan di sekolah diangkat, penting untuk segera menjadwalkan ulang kegiatan BIAS untuk mengejar kembali cakupan imunisasi yang mungkin terganggu selama pandemi.

Langkah-langkah ini, diharapkan program imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dapat tetap berjalan dengan baik, sehingga tingkat kekebalan anak-anak terjaga dan mereka terlindungi dari PD3I Selain imunisasi lanjutan pada baduta, untuk mempertahankan tingkat kekebalan pada anak sehingga dapat terlindungi dari PD3I.

Cakupan imunisasi Campak Rubela pada anak usia kelas 1 sebesar 93,8%, Cakupan Imunisasi DT sebesar 90,3%, Cakupan Imunisasi TD pada usia anak kelas 2, sebesar 91,2%. Cakupan imunisasi yang tinggi seperti itu menunjukkan upaya yang baik dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang optimal terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dengan cakupan imunisasi yang tinggi, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit menular di masyarakat dan meningkatkan kesehatan anak-anak secara keseluruhan. Cakupan Imunisasi anak sekolah menurut Provinsi dapat dilihat pada lampiran 44.b.

GAMBAR 5. 35
CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DI INDONESIA
TAHUN 2023

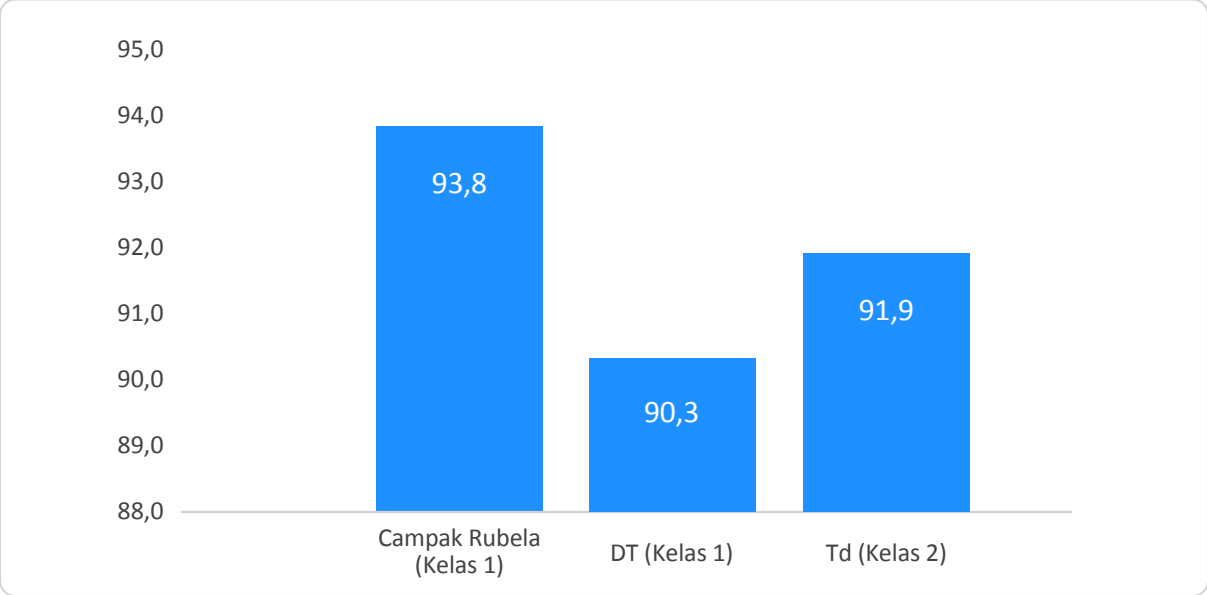

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Program kesehatan anak usia sekolah dan remaja, seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pelayanan kesehatan peduli remaja, memegang peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan generasi muda. Melalui kegiatan lintas sektor dan kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader kesehatan sekolah, serta berbagai pihak terkait lainnya, berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pemantauan kesehatan yang komprehensif bagi anak-anak dan remaja.

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah bertujuan untuk mendeteksi dini risiko penyakit pada anak sekolah agar dapat ditindaklanjuti secara dini, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan anak usia sekolah yang sehat dan berprestasi.

Cakupan pelayanan kesehatan di sekolah menengah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) sebesar 95,1% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia telah melaksanakan kegiatan kesehatan. Ini mencerminkan upaya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada anak-anak di lingkungan pendidikan.

Sebanyak 32 provinsi mencapai lebih dari 80% sekolah SD/MI yang mendapat pelayanan kesehatan, dengan 19 Provinsi diantaranya lebih dari 100%, dan terdapat 6 Provinsi diatas 80% yaitu: Papua Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat. ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari berbagai daerah untuk mendukung kesehatan anak-anak di lingkungan sekolah. Provinsi-provinsi yang mencapai lebih dari 100%, menunjukkan tingginya tingkat pelayanan kesehatan di sekolah-sekolah di wilayah tersebut.

GAMBAR 5. 36
CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

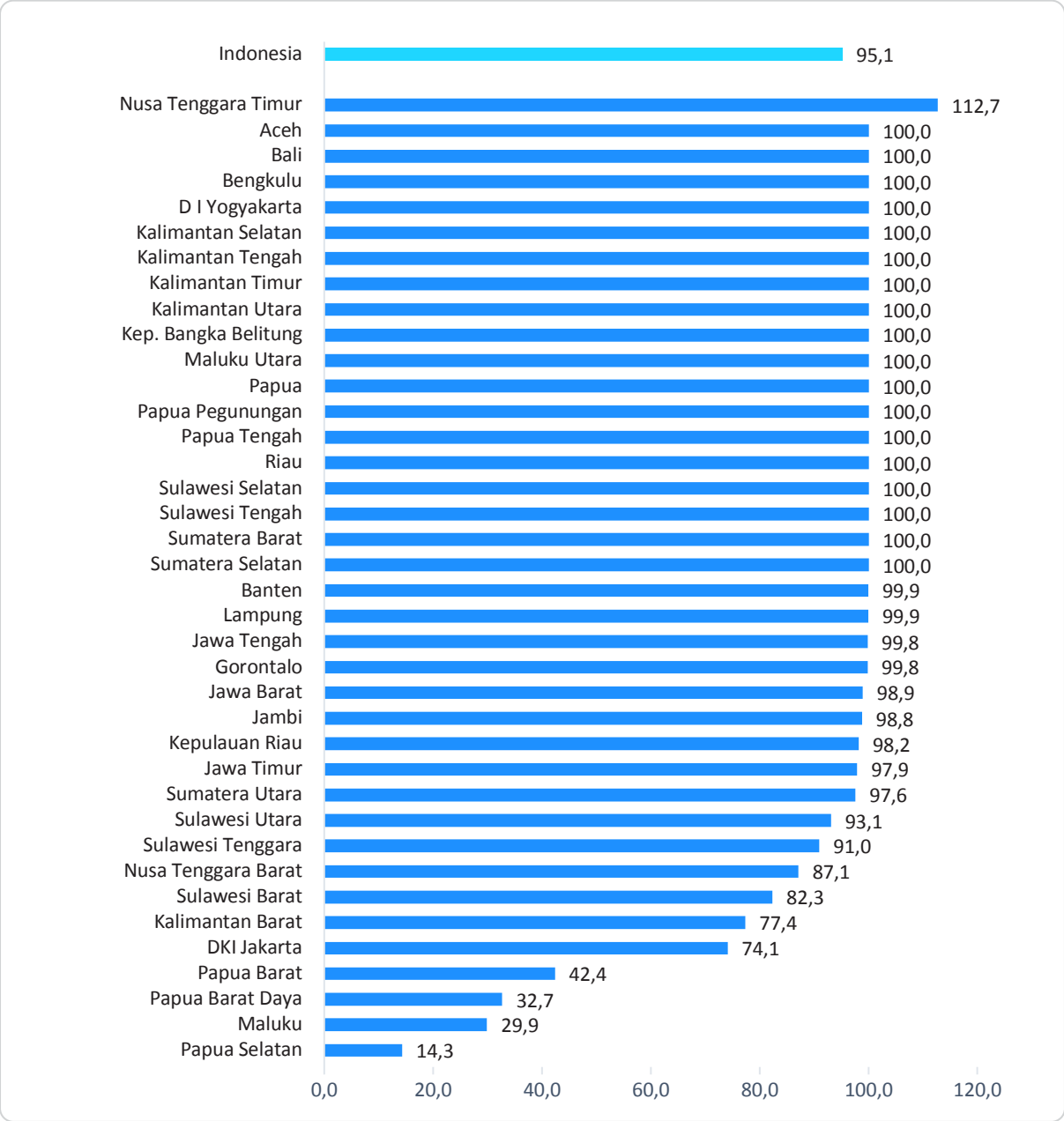

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, tetapi keberadaan pelayanan kesehatan di sekolah di provinsi-provinsi ini tetap memberikan akses yang penting bagi kesehatan anak-anak. Secara keseluruhan, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan di sekolah menengah dasar/madrasah ibtidaiyah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang penting untuk kesejahteraan dan perkembangan mereka

Cakupan pelayanan kesehatan di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) sebesar 93,9% pada tahun 2023. Adanya cakupan sebesar 100% menandakan bahwa sebagian besar sekolah SMP/MTs di Indonesia telah melaksanakan kegiatan kesehatan. Meskipun mungkin ada

ruang untuk peningkatan, keberadaan pelayanan kesehatan di sekolah-sekolah di tingkat SMP/MTs tetap memberikan akses yang penting bagi kesehatan remaja di masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Seperti gambar 5.37 di bawah ini.

GAMBAR 5. 37
CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

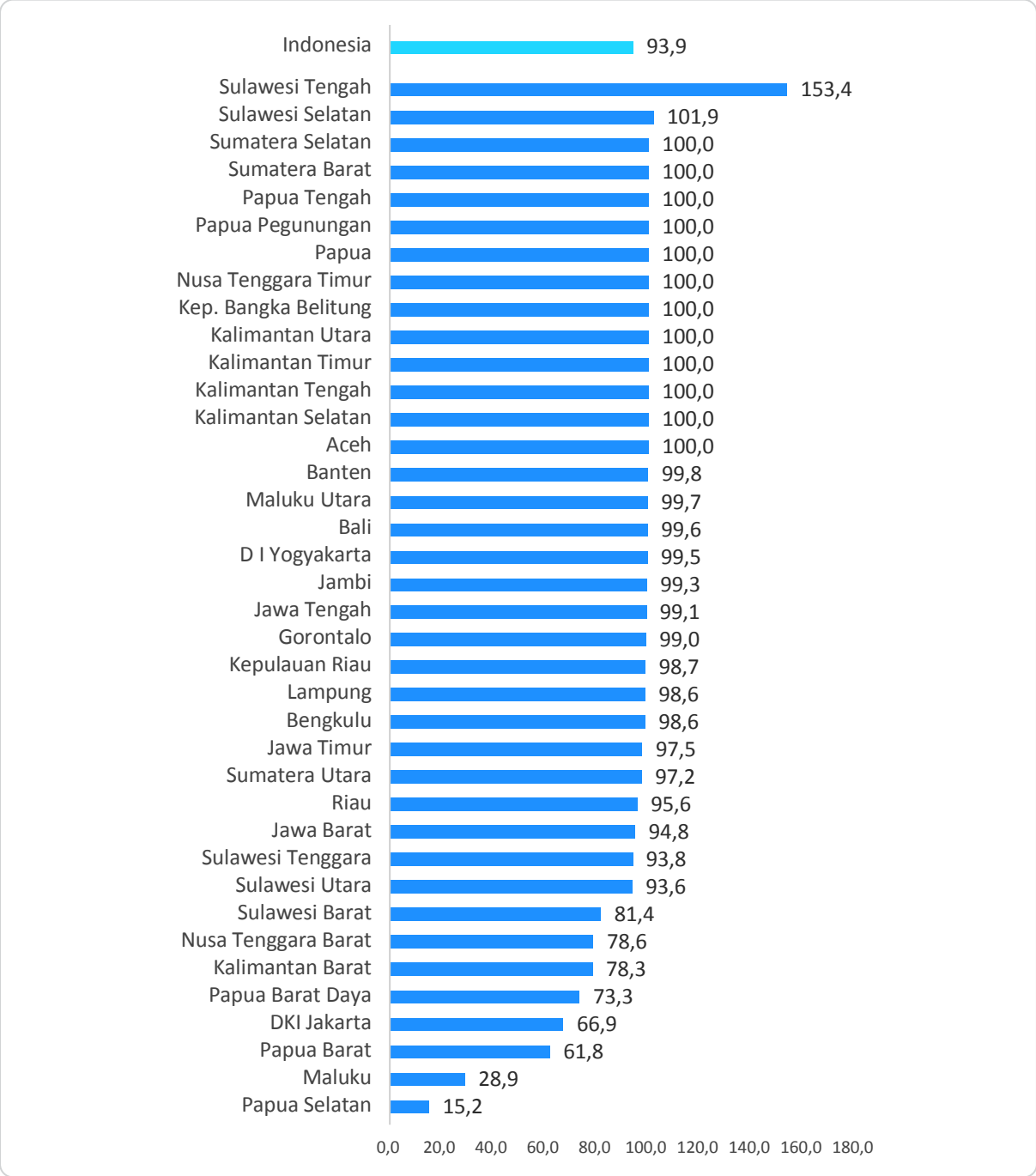

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

GAMBAR 5. 38
CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA
YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

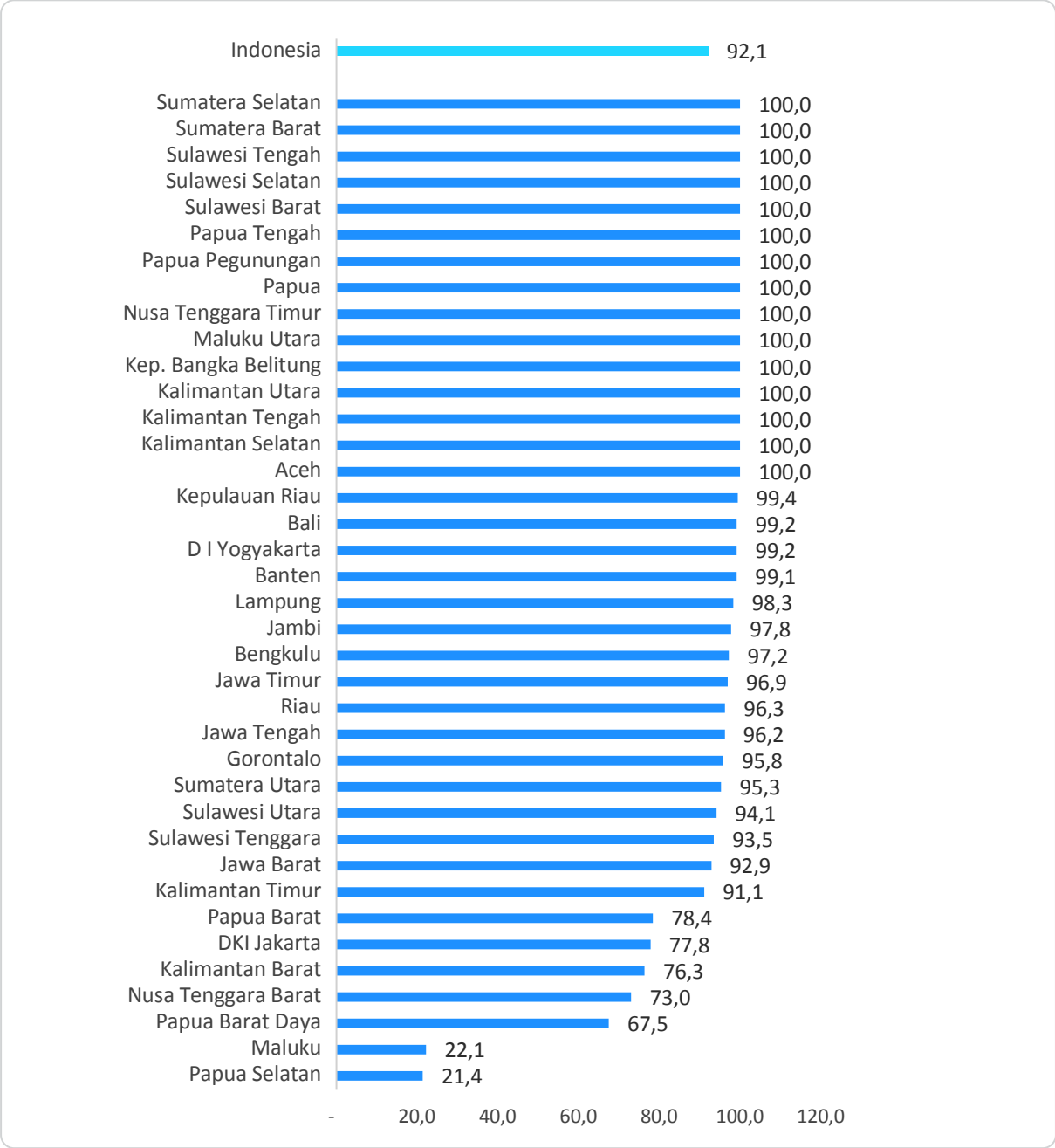

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Dengan cakupan sebesar 92,1% pada tahun 2023, pelayanan kesehatan di sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) menunjukkan bahwa upaya kesehatan di tingkat pendidikan menengah atas juga telah dilakukan secara luas. Lebih dari 80% sekolah SMA/MA di sebagian besar provinsi telah memberikan pelayanan kesehatan kepada siswa-siswinya, menunjukkan komitmen untuk mendukung kesehatan remaja di masa yang kritis ini.

Terdapat beberapa provinsi dimana cakupan pelayanan kesehatan di sekolah SMA/MA masih berada di kisaran 60-80%, yaitu: Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya. Sedangkan 2 Provinsi lainnya: Maluku dan Papua Selatan berada di kisaran 20%. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan akses dan ketersediaan layanan kesehatan di beberapa wilayah, sehingga lebih banyak siswa dapat memperoleh manfaat dari program-program kesehatan di sekolah. Melalui adanya pemantauan yang cermat terhadap cakupan pelayanan kesehatan di sekolah-sekolah, diharapkan dapat dilakukan upaya perbaikan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesehatan remaja dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan produktif secara keseluruhan. Rincian lengkap mengenai cakupan pelayanan kesehatan peserta didik SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA dapat dilihat pada Lampiran 49.

C. GIZI

Pembahasan ini berisi status gizi balita beserta pencegahan dan penanganan masalah gizi, di antaranya pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita gizi kurang.

1. Status Gizi Balita

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mengatur standar antropometri yang digunakan untuk mengukur atau menilai status gizi anak. Standar antropometri yang digunakan terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Klasifikasi penilaian status gizi menggunakan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO *Child Growth Standards* untuk anak usia 0-5 tahun dan WHO *Reference* 2007 untuk anak 5-18 tahun. Status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) pada balita (0-59 bulan) dinyatakan dengan kategori berat badan sangat kurang, kurang, normal, dan risiko berat badan berlebih. *Underweight* merupakan kategori status gizi berat badan sangat kurang dan kurang. Berdasarkan Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), status gizi dinyatakan dengan kategori tinggi badan sangat pendek, pendek, normal, dan tinggi. Tinggi badan sangat pendek dan pendek dikategorikan sebagai stunting. Selain itu, status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) dinyatakan dengan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, beresiko gizi lebih, gizi lebih, dan obesitas. Gizi buruk dan gizi kurang dikategorikan sebagai wasting.

Kegiatan pemantauan pertumbuhan merupakan penimbangan dan pengukuran yang dilakukan dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan setiap bulan pada seluruh sasaran balita di wilayah kerja puskesmas (posyandu maupun fasilitas pendidikan anak usia dini). Hasil penimbangan dan pengukuran dicatat atau dientri oleh petugas puskesmas ke dalam aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) untuk mengetahui kategori status gizinya. Pengukuran antropometri juga dilakukan pada kegiatan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran antropometri dilakukan dengan menggunakan timbangan berat badan digital (tingkat ketelitian 0,1 kg), alat ukur tinggi/panjang badan (tingkat ketelitian 1 mm), dan alat ukur LiLA (tingkat ketelitian 1 mm). Status gizi yang disajikan dalam SKI tahun 2023 meliputi prevalensi *stunting* dan *wasting*.

Perbedaan data status gizi pada SKI dengan data rutin pada e-PPBGM adalah metode dan sasarannya. Data SKI berasal dari survei dengan sasaran berdasarkan perhitungan sampel yang menyasar rumah tangga dengan anak balita. Sementara data rutin pada e-PPGBM berasal dari pelaksanaan pemantauan pertumbuhan setiap bulannya di posyandu yang mencakup seluruh sasaran di wilayah kerjanya. Data rutin status gizi pada e-PPGBM dapat dilihat secara kohort hingga ke tingkat individu berdasarkan nama dan alamatnya *(by name & by address).*

Berdasarkan kegiatan pemantauan pertumbuhan tahun 2023 yang dilaporkan melalui e-PPBGM, persentase bayi bawah dua tahun 0-23 bulan (baduta) dengan berat badan sangat kurang sebesar 1,4% dan baduta berat badan kurang sebesar 6,9% yang tergambar pada Gambar 5.39. Provinsi Nusa Tenggara Timur (18,8%) merupakan provinsi dengan persentase baduta *underweight* tertinggi di Indonesia, sedangkan provinsi dengan presentase terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan (2,1%).

GAMBAR 5. 39
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

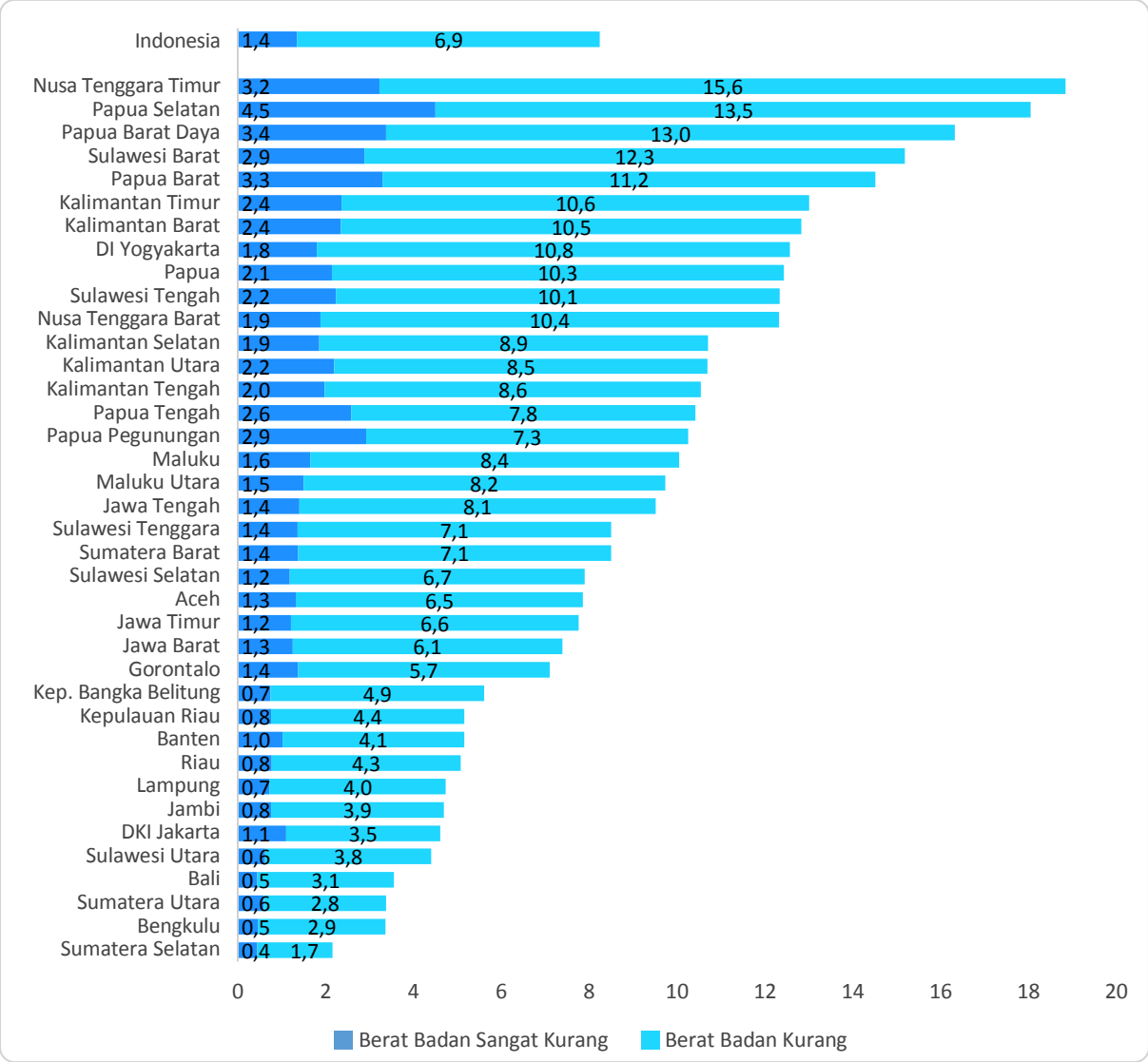

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

GAMBAR 5. 40
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

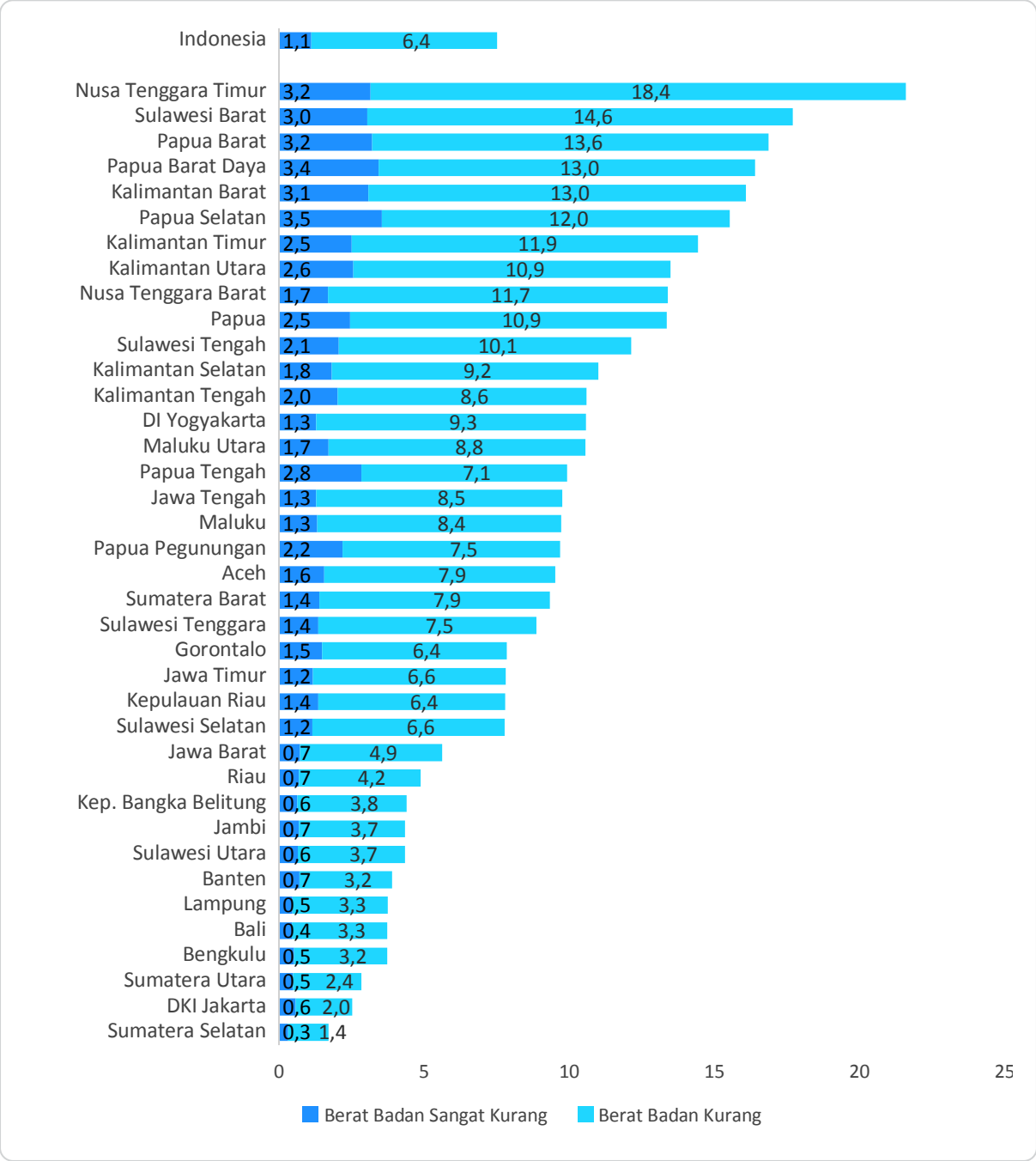

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Pada usia balita, berat badan sangat kurang mencapai 1,1% dan berat badan kurang sebesar 6,4% yang digambarkan pada Gambar 5.42. Provinsi dengan persentase balita *underweight* tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (21,6%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan (1,7%).

GAMBAR 5. 41
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

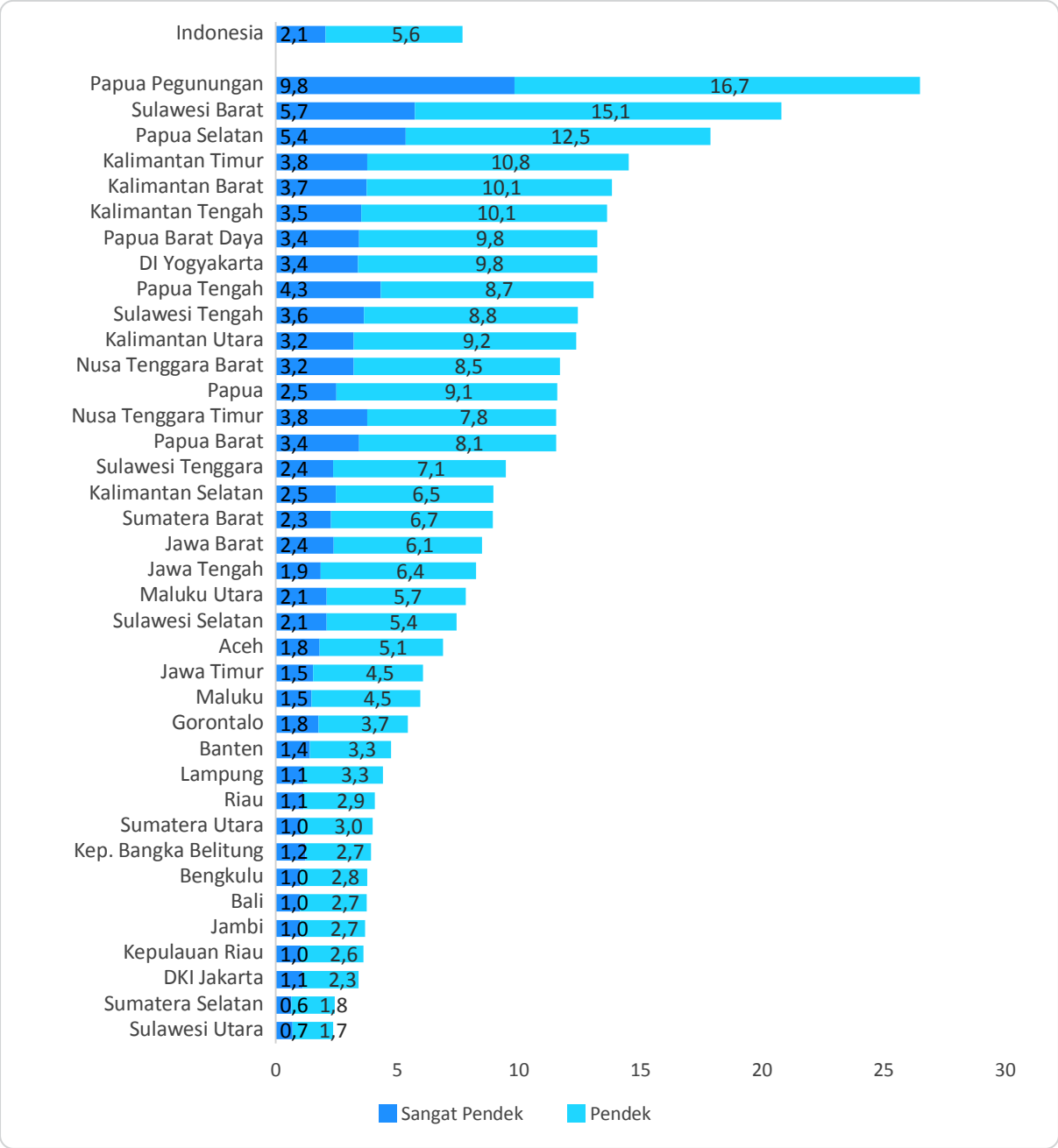

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Persentase baduta sangat pendek di Indonesia sebesar 2,1% sedangkan baduta dalam kategori pendek sebesar 5,6%. Provinsi dengan persentase baduta stunting tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat (26,5%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara (2,4%).

Persentase balita sangat pendek sebesar 1,7% dan balita pendek sebesar 5,7%. Provinsi dengan persentase balita stunting tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat (26,2%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan (1,5%). Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi balita *stunting* di Indonesia turun sebesar 0,1% dibanding perolehan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, menjadi 21,5%.

GAMBAR 5. 42
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

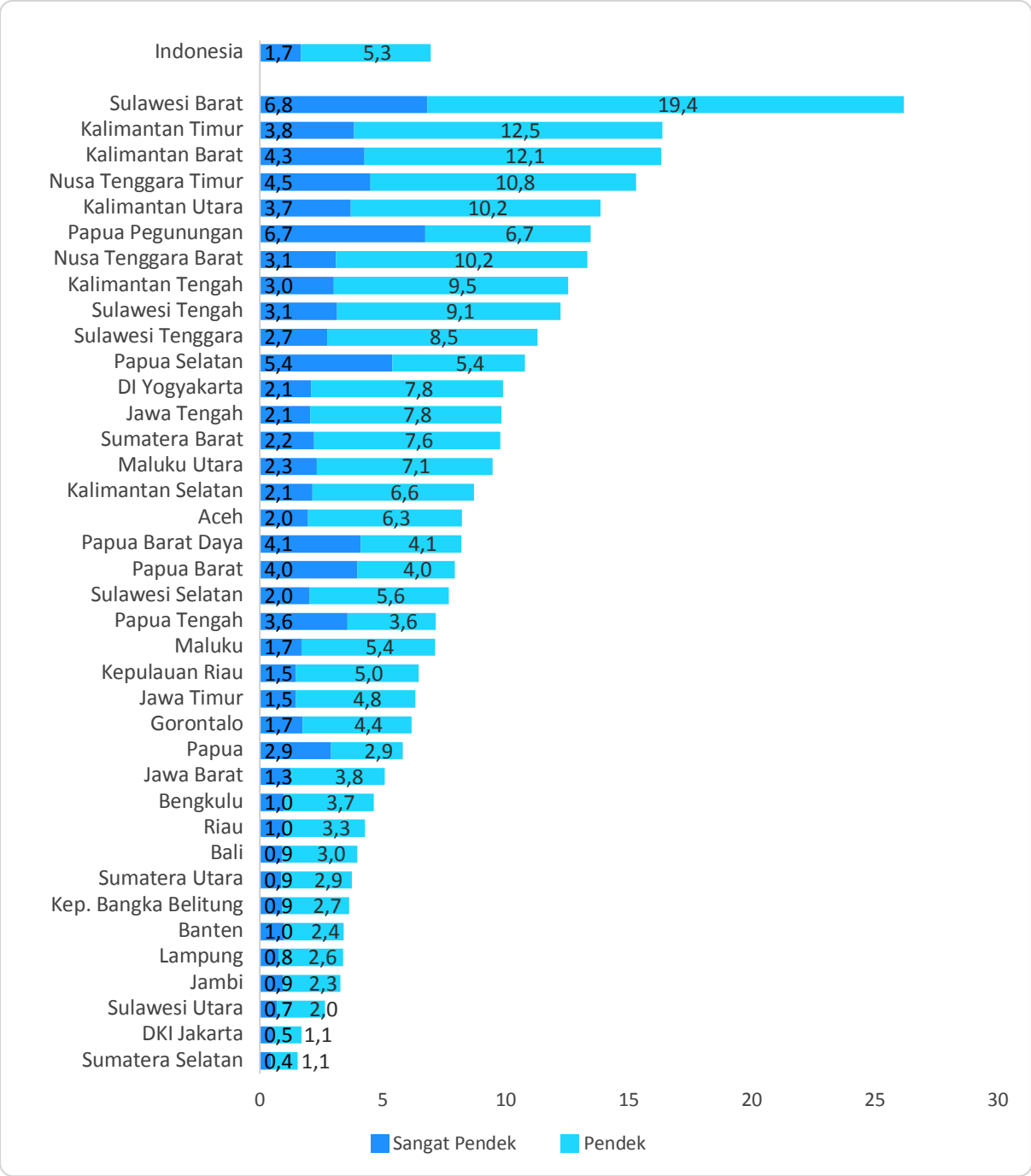

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

GAMBAR 5. 43
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

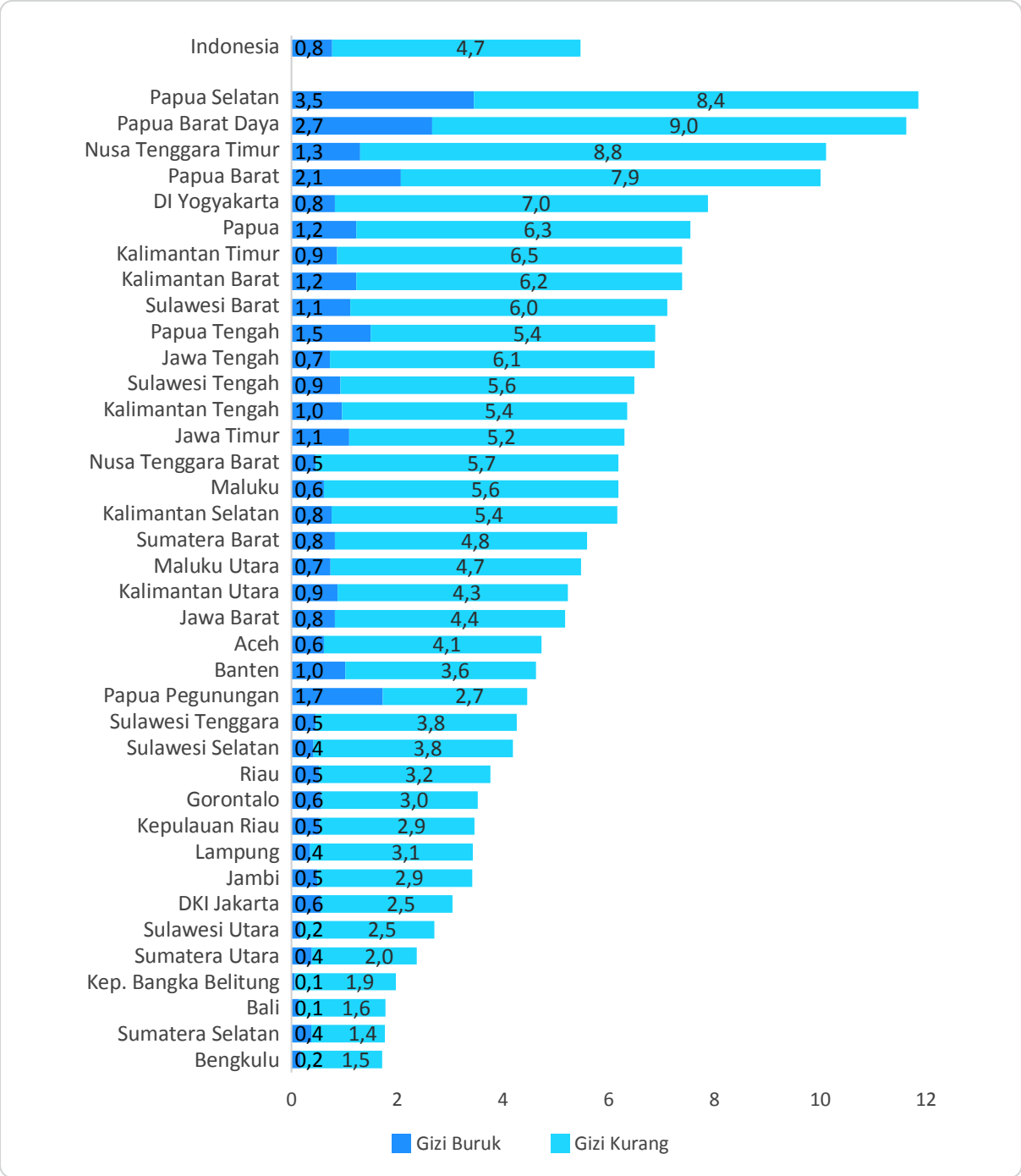

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Masalah gizi pada balita berdasarkan indeks Berat Badan menurut BB/PB atau BB/TB meliputi kategori gizi buruk dan gizi kurang. Menurut data rutin pada e-PPBGM didapatkan sebesar 0,8% baduta gizi buruk dan sebesar 4,7% baduta gizi kurang. Persentase baduta wasting tertinggi terjadi di Provinsi Papua Selatan (11,9%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bengkulu (1,7%).

GAMBAR 5. 44
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

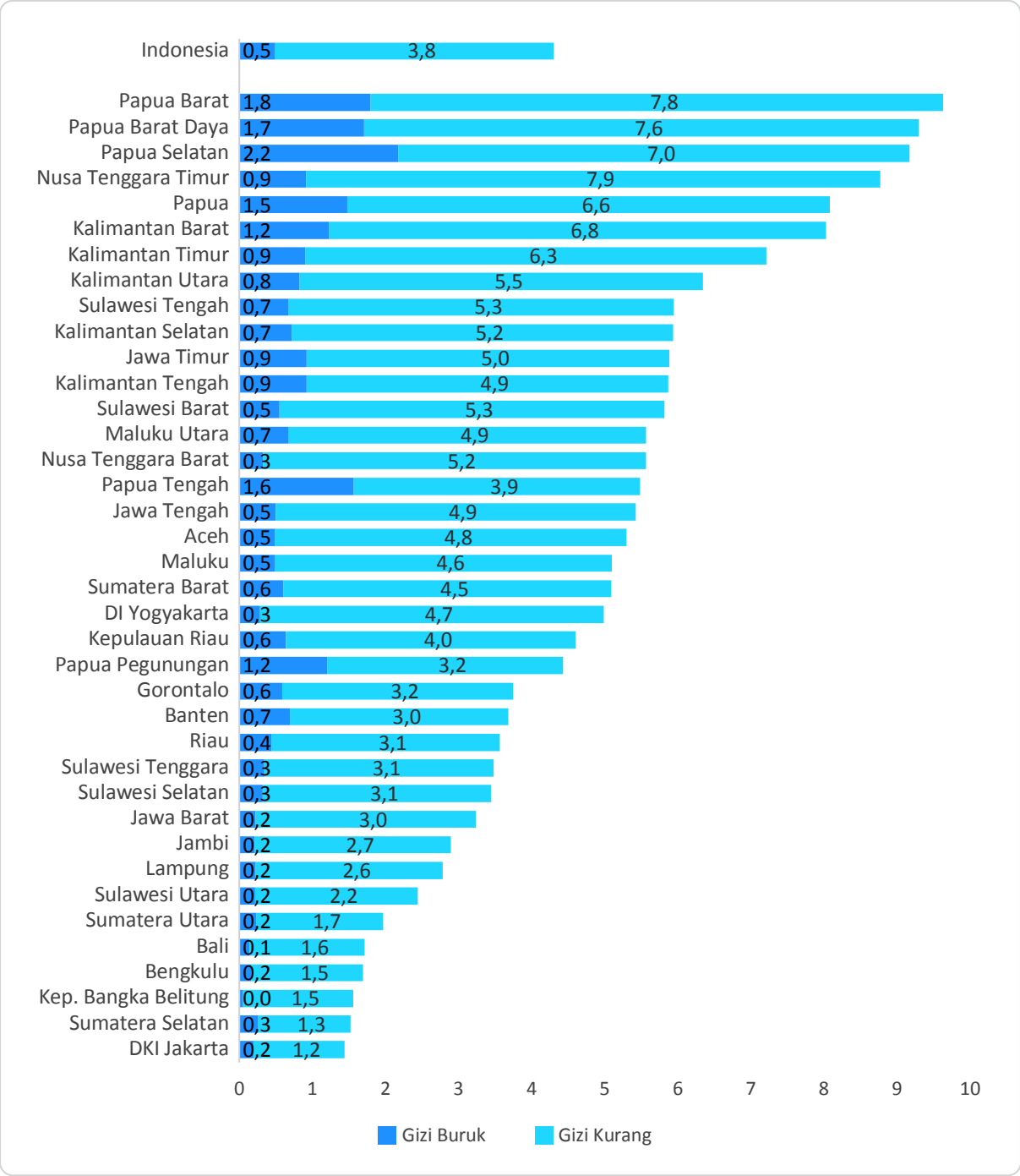

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Berdasarkan pengukuran indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) pada balita diperoleh persentase balita gizi buruk sebesar 0,6% dan persentase balita gizi kurang sebesar 4,0%. Provinsi dengan persentase balita *wasting* tertinggi adalah Provinsi Papua Barat (9,6%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi DKI Jakarta (1,4%). Prevalensi balita *wasting* juga diperoleh melalui SKI tahun 2023 sebesar 8,5%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,8% dibanding prevalensi balita *wasting* pada SSGI tahun 2022 (7,7%).

Pada Gambar 5.45 terlihat bahwa prevalensi *stunting* (sangat pendek dan pendek) dan *wasting* (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita usia 0-59 bulan sejak 2017-2022 cenderung mengalami penurunan, meskipun untuk *wasting* mengalami kenaikan pada tahun 2022. Hal ini tentu menjadi sebuah langkah yang baik dalam upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 untuk penurunan angka *stunting* dan *wasting*.

GAMBAR 5. 45
PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2023

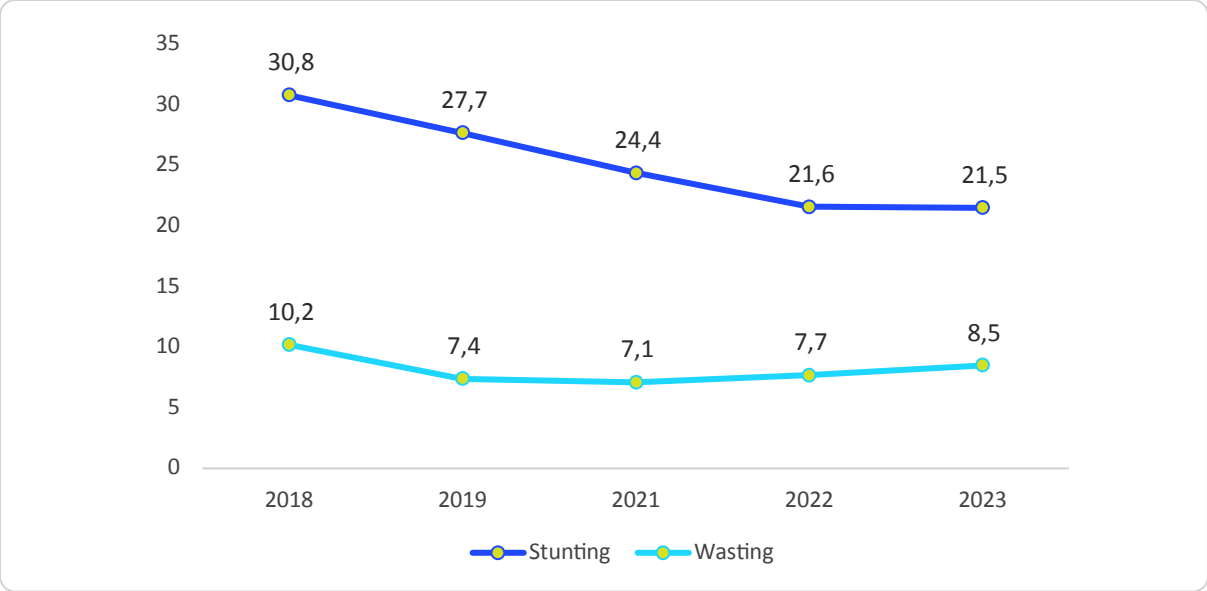

Sumber: Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021-2022, SKI 2023

GAMBAR 5. 46
PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

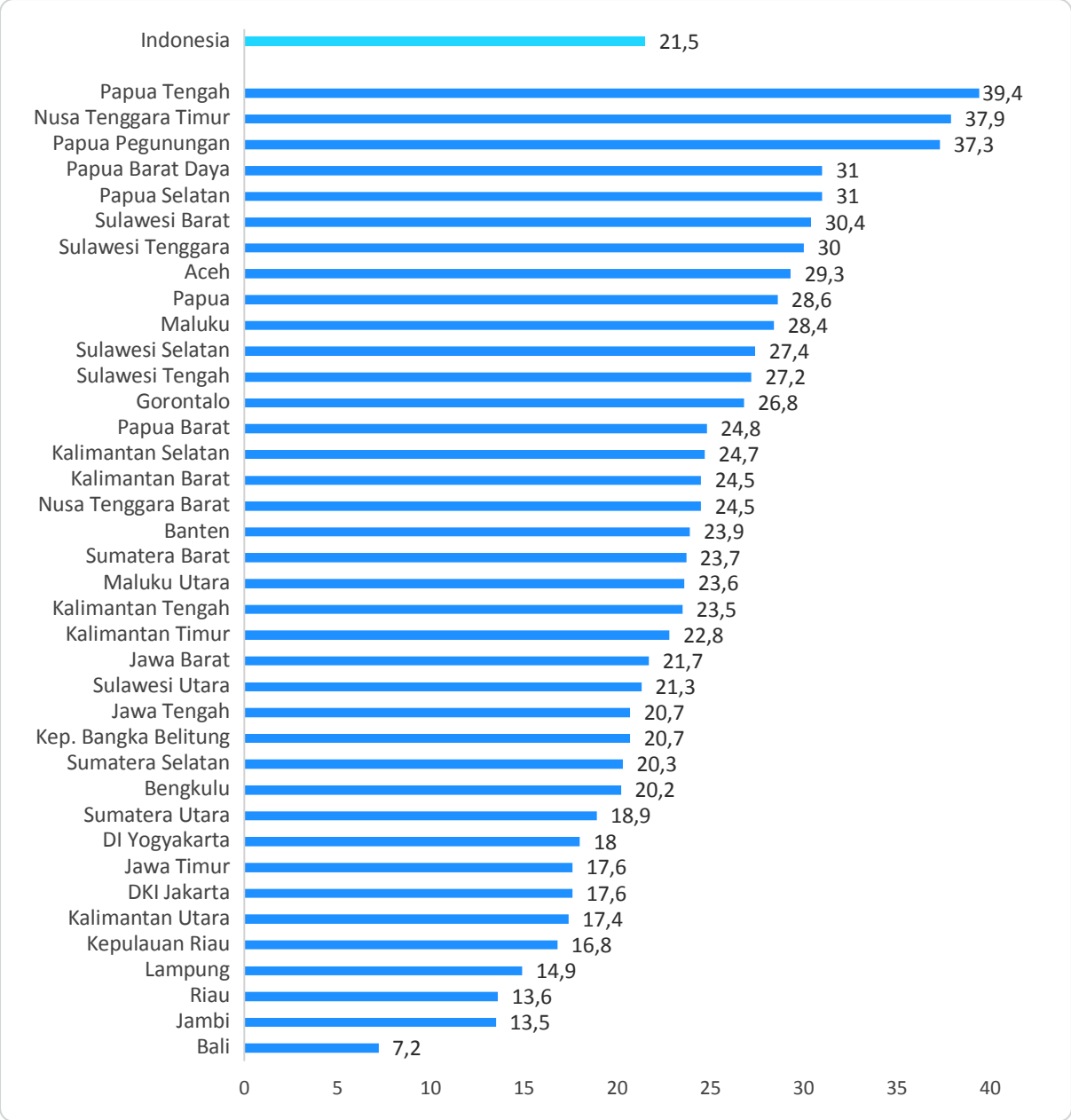

Sumber: SKI 2023, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan Gambar 5.46 hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, diketahui tiga provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi terdapat di Provinsi Papua Tengah (39,4%), Nusa Tenggara Timur (37,9%), dan Papua Pegunungan (37,3%).

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi menyatakan bahwa perlu dilakukan penerapan gizi seimbang sebagai upaya untuk perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat. Setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi

setiap anggota keluarganya. Mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi dapat dilakukan dengan menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI (Air Susu Ibu) saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI Eksklusif), mengonsumsi menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi menyatakan bahwa suplemen gizi yang diberikan meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan pendamping ASI, bubuk multi vitamin dan mineral, serta makanan tambahan dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada balita 6-59 bulan dengan kategori kurus, anak usia sekolah dasar dengan kategori kurus, dan ibu hamil kurang energi kronis.

a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menyatakan bahwa ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral). Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, namun ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, serta ibu terpisah dari bayinya. Pemberian ASI Eksklusif diatur dalam peraturan tersebut, salah satunya agar pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dapat terjamin.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan proses menyusu yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam. Beberapa manfaat IMD di antaranya, mengurangi angka kematian bayi, membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil, bayi mendapatkan zat kekebalan tubuh dan zat penting lainnya, dan merangsang pengaliran ASI dari payudara. Inisiasi Menyusu Dini juga akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui.

Pada tahun 2023, persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD secara nasional sebesar 86,6%. Provinsi dengan persentase bayi baru lahir mendapat IMD tertinggi adalah Provinsi Papua Pegunungan (100%) sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bali (66,5%). Target nasional IMD tahun 2023 sebesar 66%, sehingga seluruh provinsi telah mencapai target.

GAMBAR 5. 47
CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

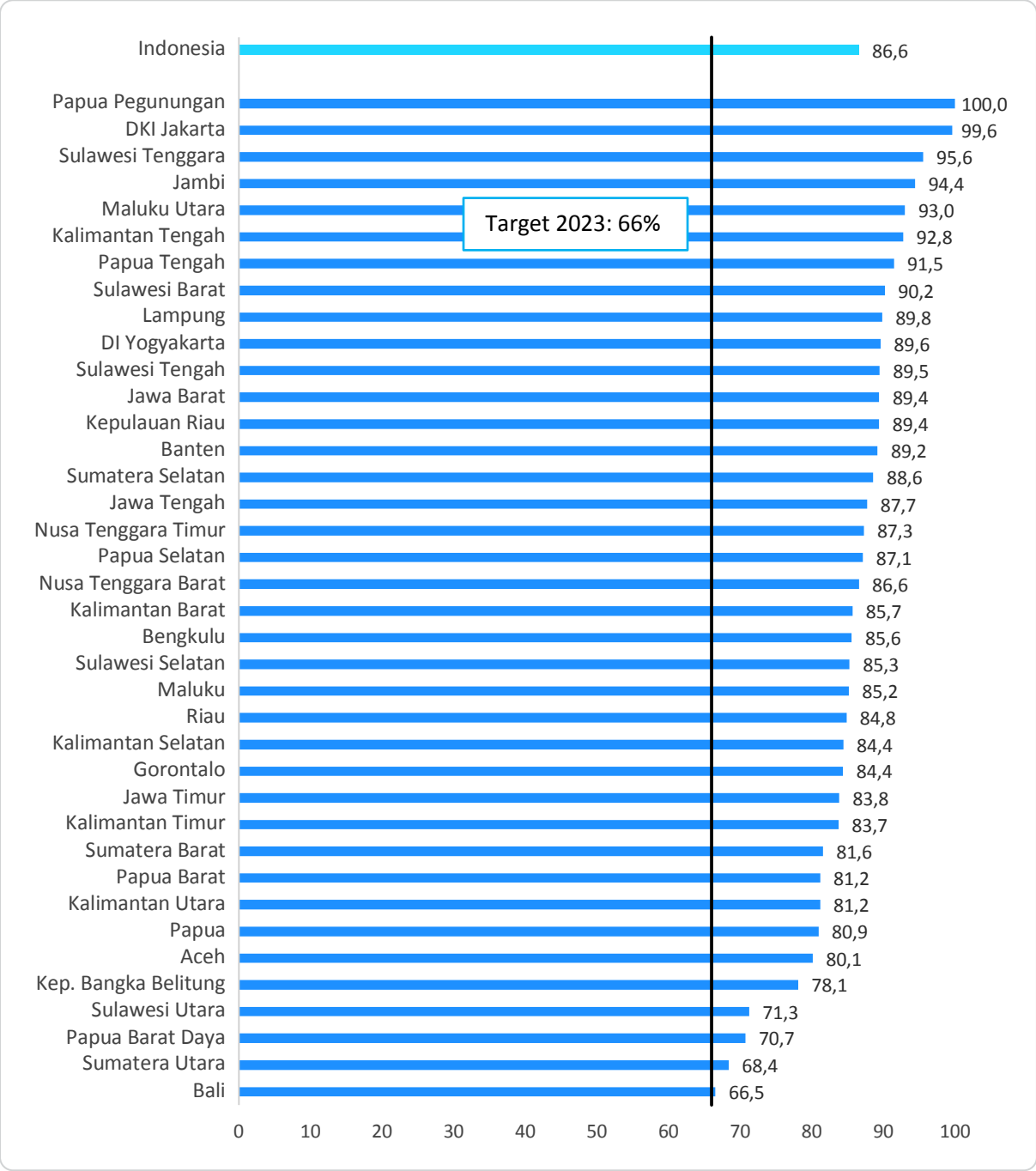

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Cakupan bayi berusia 6 bulan mendapat ASI eksklusif tahun 2023 yaitu sebesar 63,9%. Capaian tersebut telah mencapai target program tahun 2023 yaitu 50%. Persentase cakupan pemberian ASI eksklusif tertinggi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (81,1%), sedangkan persentase terendah di Provinsi Papua Barat (10,9%). Terdapat 14 (empat belas) provinsi yang belum mencapai target program tahun 2023, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Riau, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.48.

GAMBAR 5. 48
CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

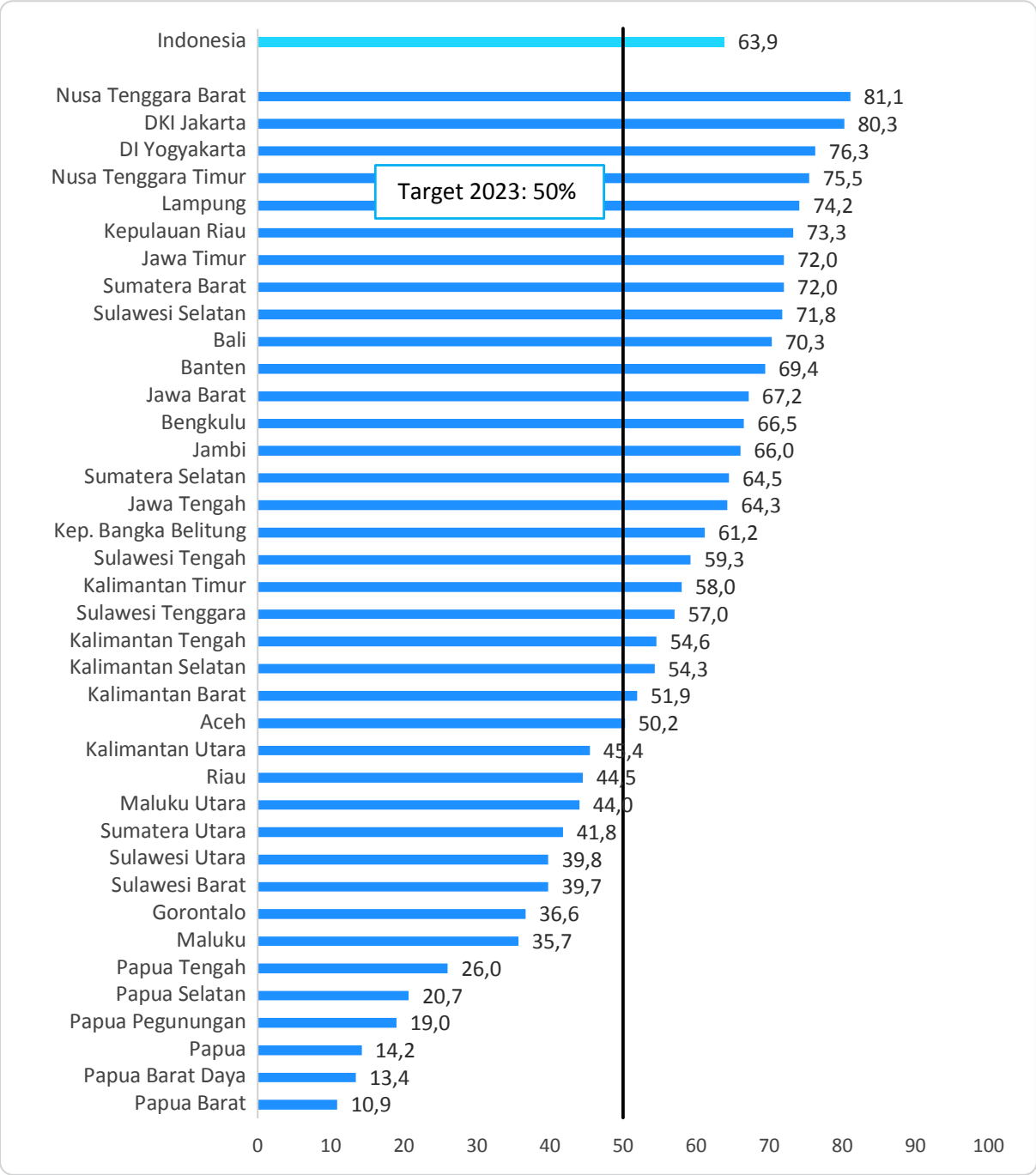

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

b. Penimbangan Balita

Pemantauan pertumbuhan merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari penimbangan, pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat), penilaian pertumbuhan, dan tindak lanjut setiap kasus gangguan pertumbuhan pemantauan status gizi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Pemantauan pertumbuhan balita adalah bagian

dari kegiatan rutin pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada pelayanan gizi dan kesehatan di Puskesmas. Pemantauan pertumbuhan balita juga berfungsi sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan pada balita. Status gizi balita yang bermasalah dapat diketahui melalui penimbangan balita tersebut sehingga dapat dilakukan intervensi sesuai dengan permasalahannya.

Persentase rata-rata balita yang ditimbang di Indonesia pada tahun 2023 adalah 78,9% anak per bulan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 74,1% anak per bulan. Persentase rata-rata balita ditimbang per bulan tertinggi dicapai oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 91,4%, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 21,8%. Data lebih lengkap mengenai rata-rata balita yang ditimbang per bulan dapat dilihat di Gambar 5.49.

GAMBAR 5. 49
PERSENTASE RERATA BALITA DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

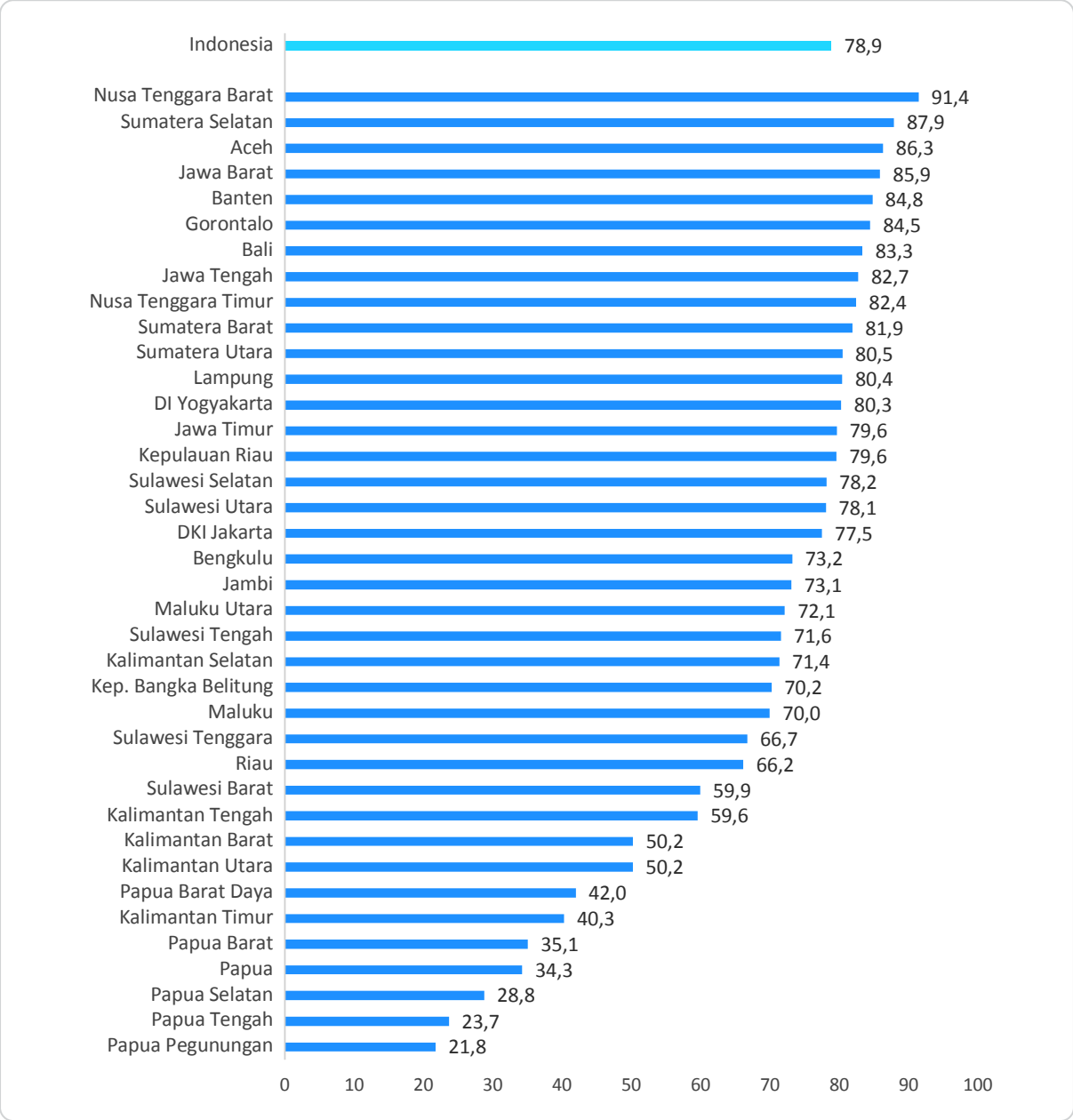

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6–59 Bulan

Vitamin A merupakan nutrisi penting yang terlibat dalam pembentukan, produksi, dan pertumbuhan sel darah merah, sel limfosit, antibodi juga integritas sel epitel pelapis tubuh. Vitamin A juga bisa mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan serta mencegah anemia pada ibu nifas. Anak yang kekurangan vitamin A berpotensi menjadi rentan terserang penyakit infeksi, seperti infeksi saluran pernafasan atas, campak, dan diare.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas menyebutkan bahwa kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (*nipple*) yang dapat digunting, tidak transparan (*opaque*), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk dapat masuk ke dalam mulut balita. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol *(palmitat/asetat)* 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan. Ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A berwarna merah dan mengandung retinol *(palmitat/asetat)* 200.000 IU.

Berdasarkan Panduan Manajemen Terintegrasi Suplementasi Vitamin A yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali.

Cakupan pemberian vitamin A pada balita di Indonesia tahun 2023 yaitu sebesar 92%. Persentase cakupan pemberian vitamin A tertinggi dicapai Provinsi Jawa Tengah (101,3%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Tengah (17%).

GAMBAR 5. 50
CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

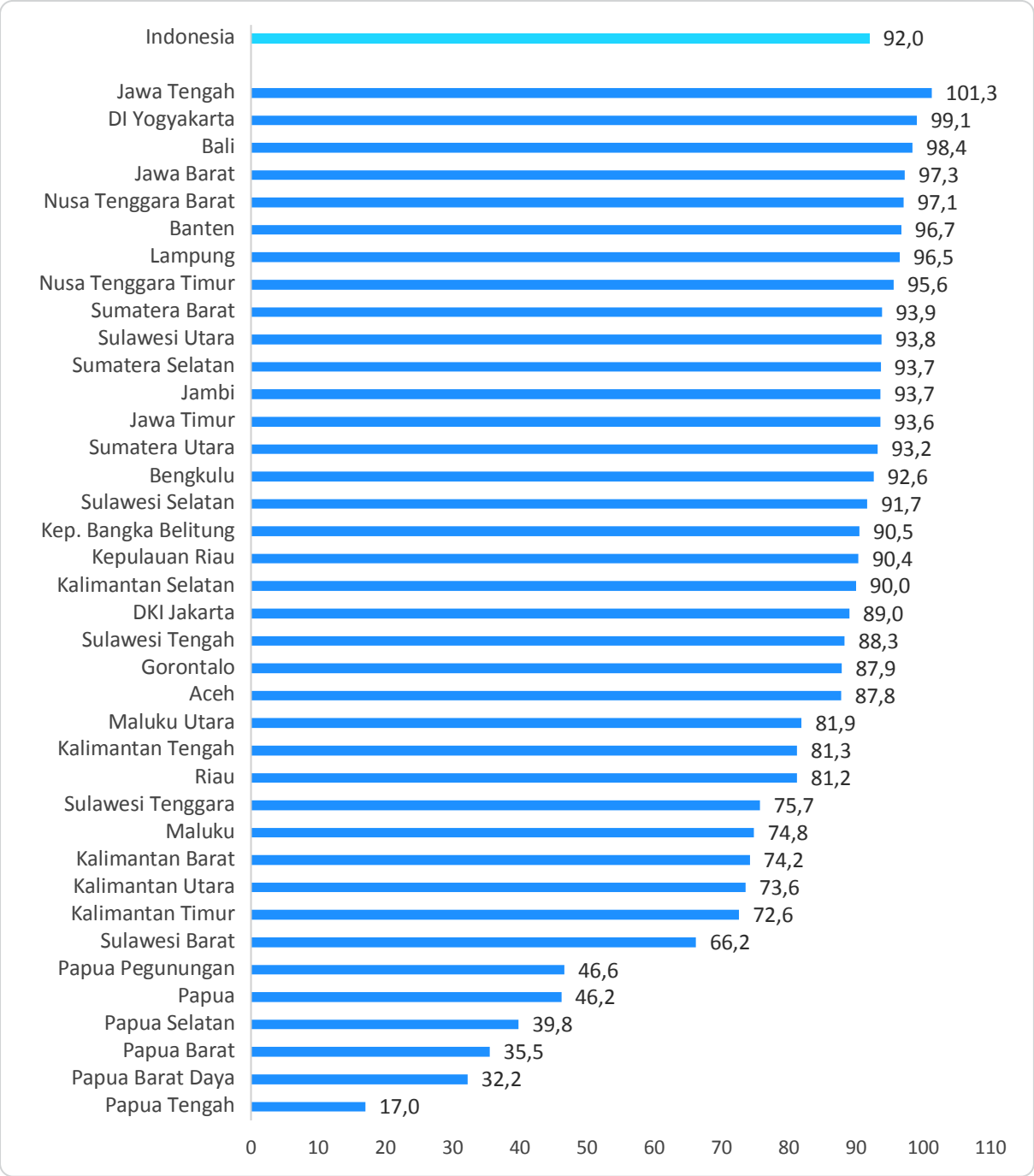

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

d. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri

Anemia adalah penyakit kekurangan kadar hemoglobin di dalam darah atau kekurangan butir darah merah (KBBI). Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi pada semua kelompok umur mulai dari balita sampai usia lanjut. Siklus menstruasi setiap bulan menyebabkan remaja putri (rematri) rentan menderita anemia. Anemia dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan produktivitas. Anemia yang terjadi pada rematri juga dapat berisiko pada saat hamil dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak.

Penanganan dan pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang menunjang pembentukan sel darah merah sebagai pencegahan, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan suplementasi zat besi. Konsumsi makanan beraneka ragam dan kaya akan zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin C seperti yang terdapat pada hati, daging, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau gelap, buah-buahan, dsb. Namun tidak semua masyarakat dapat mengonsumsi makanan tersebut, sehingga diperlukan asupan zat besi tambahan yang diperoleh dari tablet tambah darah (TTD).

Pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun.

Cakupan pemberian TTD pada remaja putri di Indonesia pada tahun 2023 adalah 78,9%. Cakupan pemberian TTD pada remaja putri tertinggi dicapai oleh Provinsi Bali (97,5%), sedangkan persentase terendah oleh Provinsi Papua Pegunungan (0,5%).

GAMBAR 5. 51
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

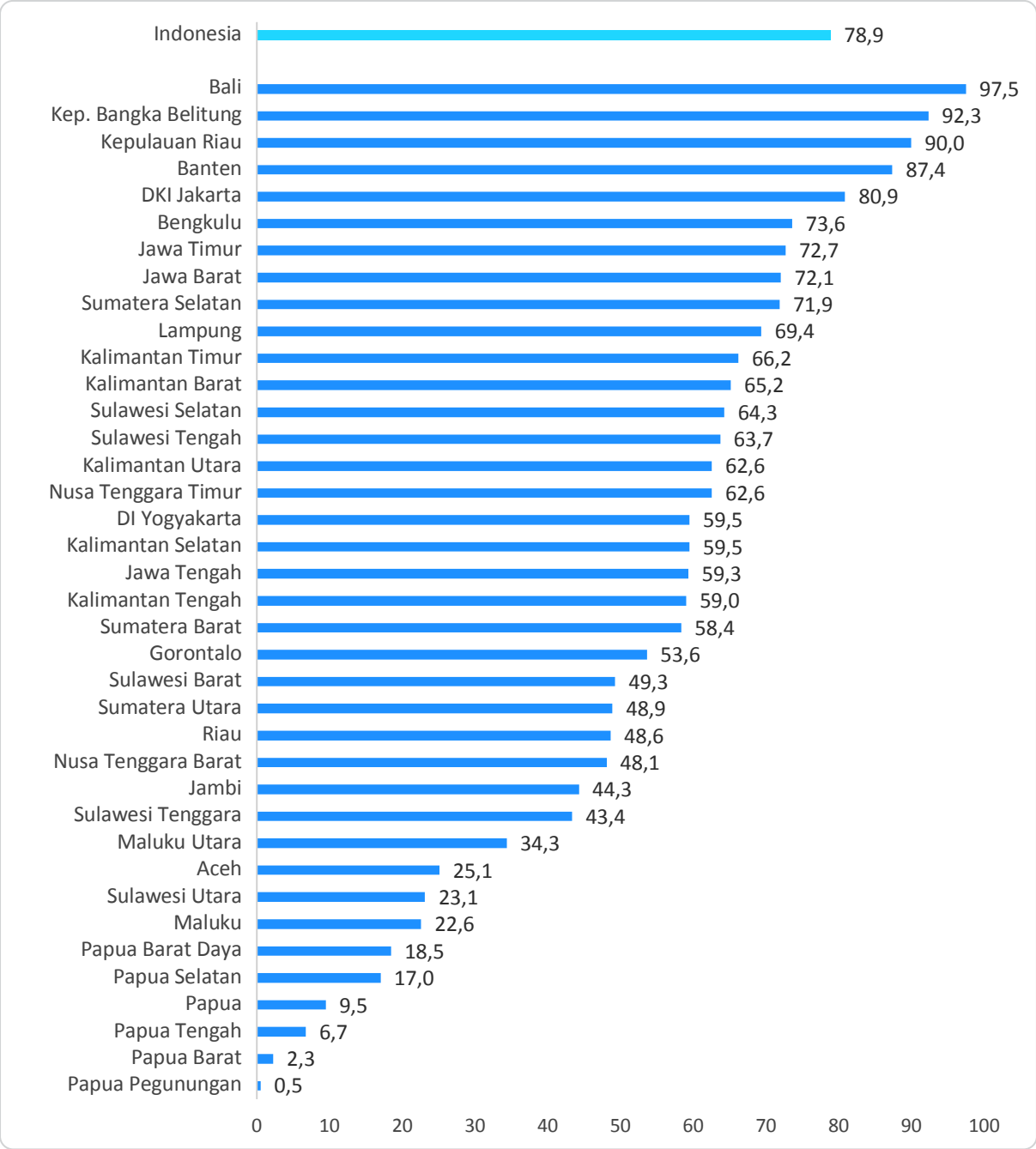

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

e. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang

Ibu hamil yang mengalami masalah gizi dapat berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi yang dilahirkan. Kurang Energi Kronik (KEK) dapat terjadi akibat ketidakseimbangan gizi (energi dan protein) yang berlangsung lama. Ibu hamil KEK berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persalinan yang berlangsung lama, perdarahan pasca salin, bahkan kematian ibu. Gangguan akibat ibu hamil KEK

juga dapat terjadi pada bayi yang dikandung, seperti kematian janin (keguguran), bayi lahir prematur, lahir cacat, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) bahkan kematian bayi.

Pedoman Proses Asuhan Gizi Puskesmas menyatakan bahwa kejadian risiko KEK ditandai oleh rendahnya cadangan energi dalam jangka waktu cukup lama yang diukur dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) pada masa kehamilan. Ibu hamil dikatakan berisiko KEK bila Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm. Indikator pengukuran tersebut digunakan pada SKI 2023 untuk mengukur prevalensi KEK pada ibu hamil. Prevalensi KEK pada ibu hamil berdasarkan SKI 2023 sebesar 16,9%.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ibu hamil KEK di antaranya, pengukuran status gizi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). PMT bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan. PMT bukan berarti mengganti asupan dari makanan utama, tetapi menambah asupan kebutuhan gizi.

Cakupan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK di Indonesia tahun 2023 adalah 76,3%. Provinsi dengan cakupan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK tertinggi adalah Provinsi Papua Barat Daya sebesar 139,2%, sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 66,9%.

GAMBAR 5. 52
CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

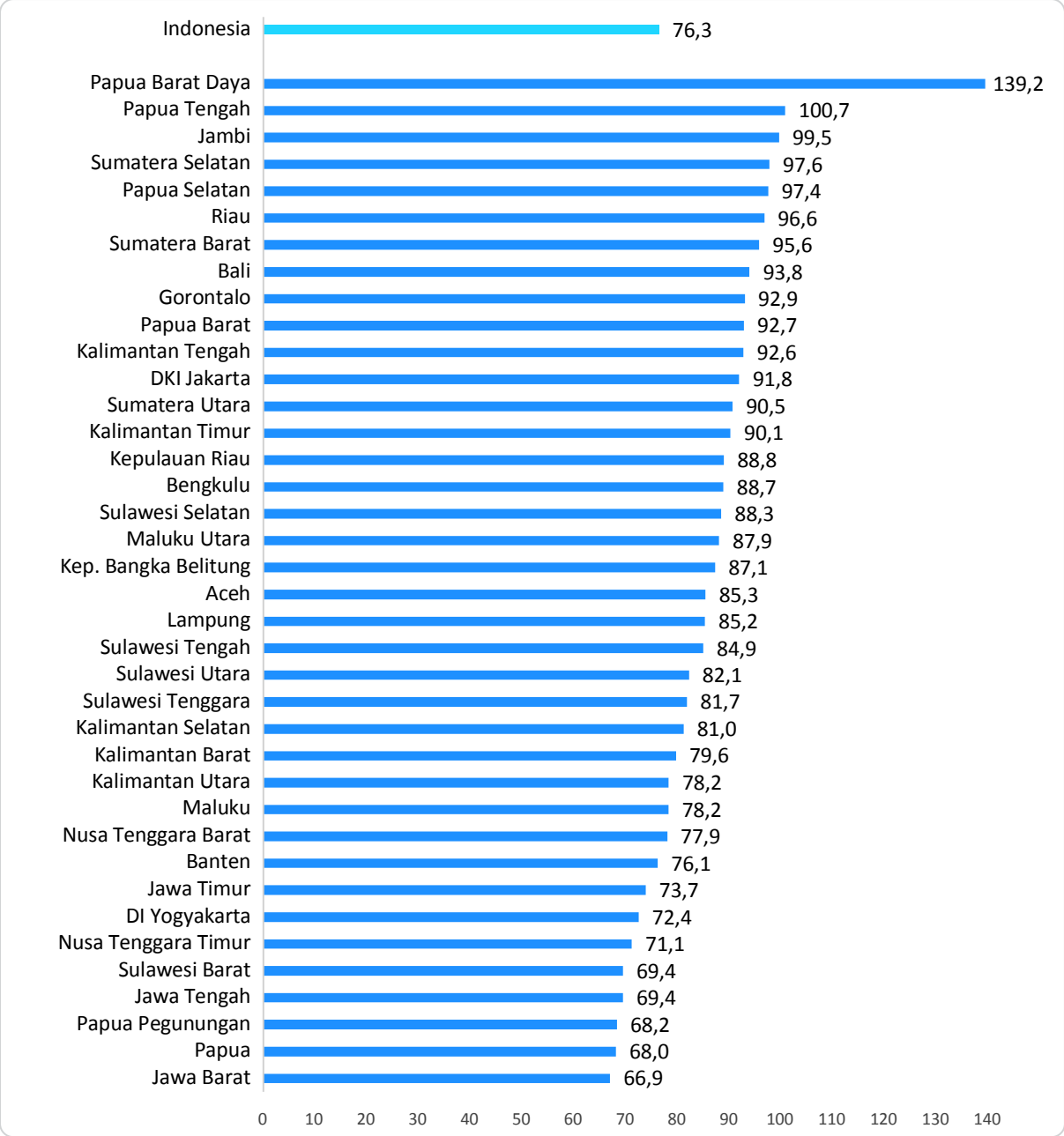

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Selain pada Ibu Hamil KEK, PMT juga dilakukan pada balita gizi kurang yang termasuk dalam kelompok rawan gizi yang membutuhkan suplementasi gizi. Pemberian makanan tambahan diberikan pada balita usia 6 bulan ke atas selama 90 hari berturut-turut dengan status gizi kurang. PMT dapat diberikan berupa makanan tambahan lokal maupun pabrikan seperti biskuit. Bila status gizi anak membaik (dinilai dari kenaikan berat badan dan nilai z-score berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) telah mencapai minus 2 standar deviasi (-2 SD) atau lebih atau sesuai dengan perhitungan, maka makanan tambahan balita gizi kurang dihentikan. Selanjutnya balita tersebut dapat mengonsumsi makanan keluarga yang memenuhi gizi seimbang serta dilakukan pemantauan berat badan secara rutin agar status gizi balita tidak kembali menjadi gizi kurang.

Persentase balita gizi kurang mendapat makanan tambahan di Indonesia tahun 2023 adalah 83,8%. Persentase balita gizi kurang mendapat makanan tambahan tertinggi dicapai Provinsi Papua Selatan dengan capaian 123,1% sedangkan persentase terendah adalah Provinsi Papua Tengah dengan capaian 47,4%.

GAMBAR 5. 53
CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

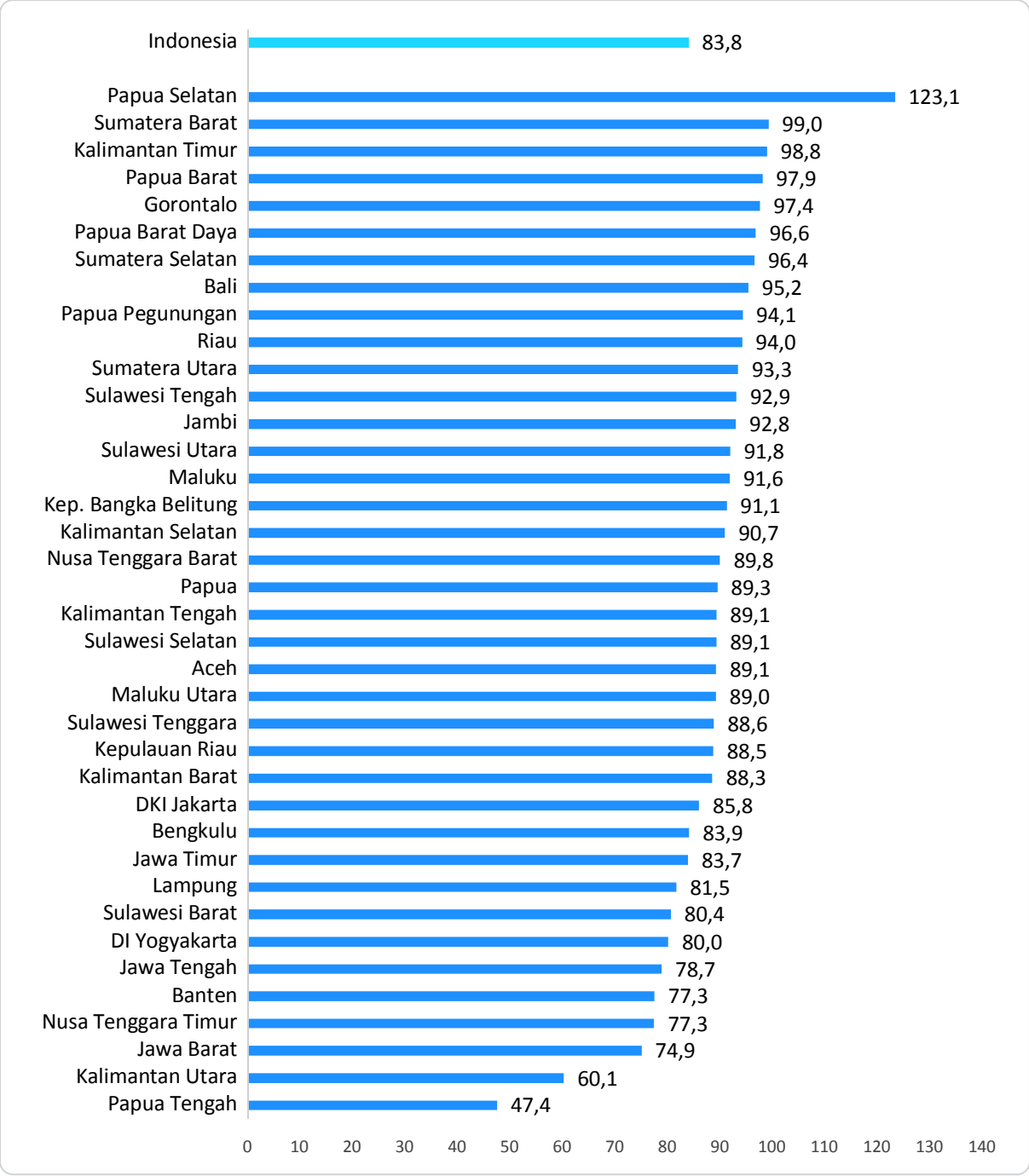

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

***

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

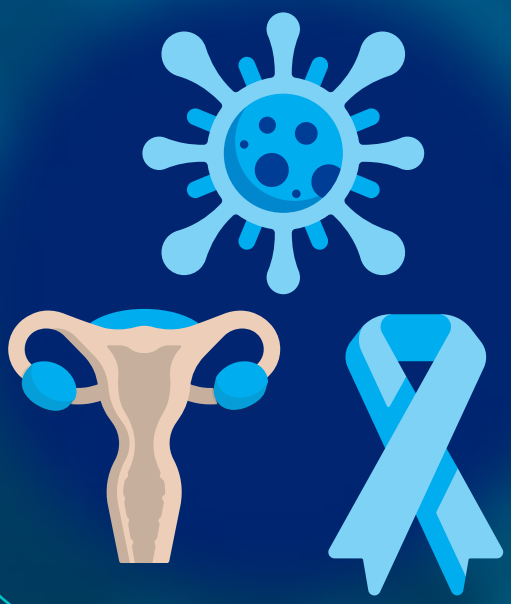

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi, dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tersebut menyebar dari penderita TBC melalui udara. Kuman TBC ini biasanya menyerang organ paru, namun dapat juga menyerang selain paru (ekstra paru). Hampir seperempat penduduk dunia terinfeksi dengan kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Sekitar 89% TBC diderita oleh orang dewasa (56,5% laki-laki dan 32,5% perempuan) dan 11% diderita oleh anak-anak. Sampai saat ini, TBC masih merupakan penyebab kematian tertinggi setelah HIV/AIDS, dan merupakan salah satu dari 20 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Sebagian besar estimasi kematian yang disebabkan TBC tercatat di empat negara, yaitu India, Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Jumlah kematian akibat TBC (di antara pasien HIV negatif) secara global pada tahun 2022 sebesar 1,1 juta, hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 1,2 juta.

Indonesia juga merupakan negara peringkat ke-2 penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dengan proporsi kasus baru sebesar 10% dibandingkan seluruh kasus di dunia. Secara global, diperkirakan 10,6 juta orang menderita TBC pada tahun 2022. (WHO, *Global Tuberculosis Report,* 2023).

Beban penyakit yang disebabkan oleh Tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan insiden kasus dan mortalitas/kematian, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Insiden Tuberkulosis

Menurut *Global Tuberculosis Report* tahun 2023, pada tahun 2022 estimasi angka insiden TBC di Indonesia sebesar 385 per 100.000 penduduk, meningkat jika dibandingkan dengan angka insiden TBC tahun 2021 yaitu sebesar 354 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian TBC tahun 2022 sebesar 49 per 100.000 penduduk.

b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Pada tahun 2023 jumlah semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 821.200 kasus, meningkat cukup tinggi bila dibandingkan semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2022 yaitu sebesar 677.464 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dari jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan baik secara nasional maupun provinsi. Secara nasional jumlah kasus pada laki-laki sebesar 57,9% dan 42,1% pada perempuan. Gambar 6.1 menunjukan bahwa pada tahun 2023 kasus TBC terbanyak ditemukan pada kelompok umur anak 0-14 tahun yaitu sebesar 16,7%, diikuti kelompok umur 45-54 tahun (15,9%) dan 55-64 tahun (14,8%).

GAMBAR 6.1
KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA
TAHUN 2023

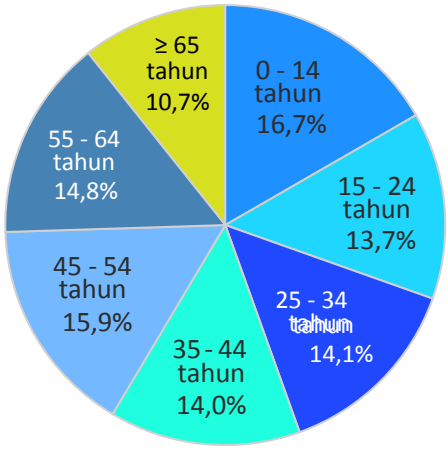

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

c. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

Gambar 6.2. menunjukkan bahwa cakupan penemuan kasus Tuberkulosis pada tahun 2023 adalah 77,5%, meningkat dari tahun 2022 yaitu 74,7%. Namun angka cakupan ini masih belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2023 yaitu 90%.

GAMBAR 6.2
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS DI INDONESIA
TAHUN 2013-2023

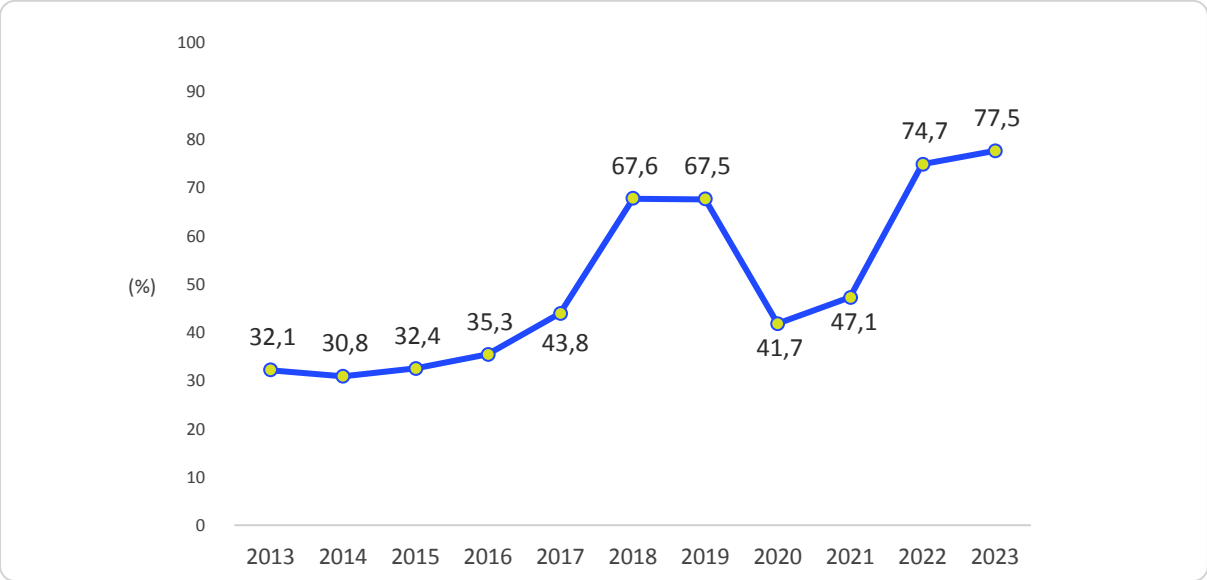

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Gambar 6.3 menunjukan bahwa pada tahun 2023 terdapat sembilan provinsi yang telah mencapai target cakupan penemuan kasus tuberkulosis ≥ 90% yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Tengah, Banten, DKI Jakarta, Papua Selatan, Papua Barat, Papua, dan Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022, hanya empat provinsi yang mencapai target ≥ 85%.

GAMBAR 6.3
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

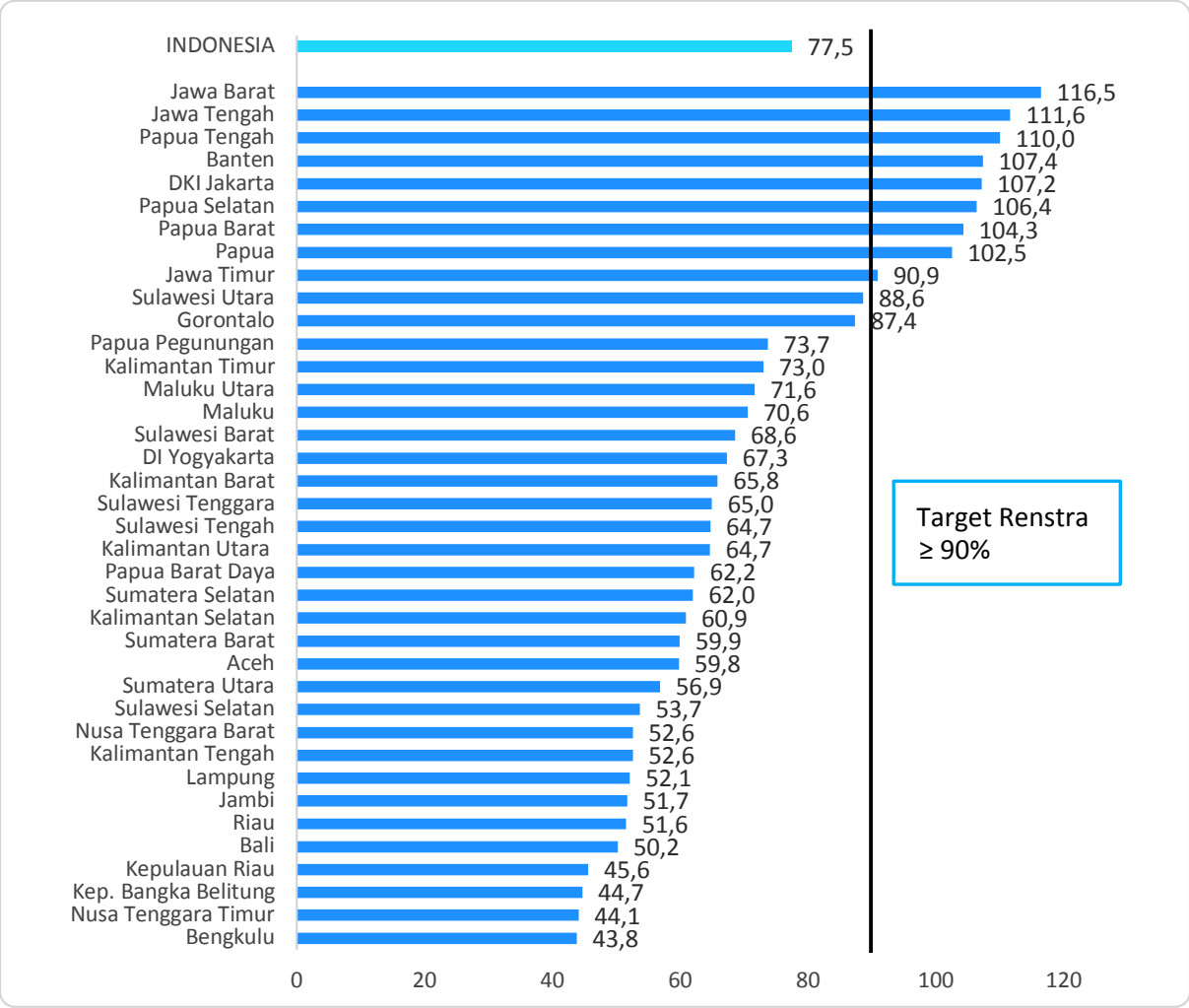

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

d. Angka Keberhasilan Pengobatan (*Treatment Success Rate*/TSR)

Angka keberhasilan pengobatan *(Treatment Success Rate)* merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan Tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus Tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2023 adalah 86,5%. Angka ini masih belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2023 yaitu 90%.

GAMBAR 6.4
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2013-2023

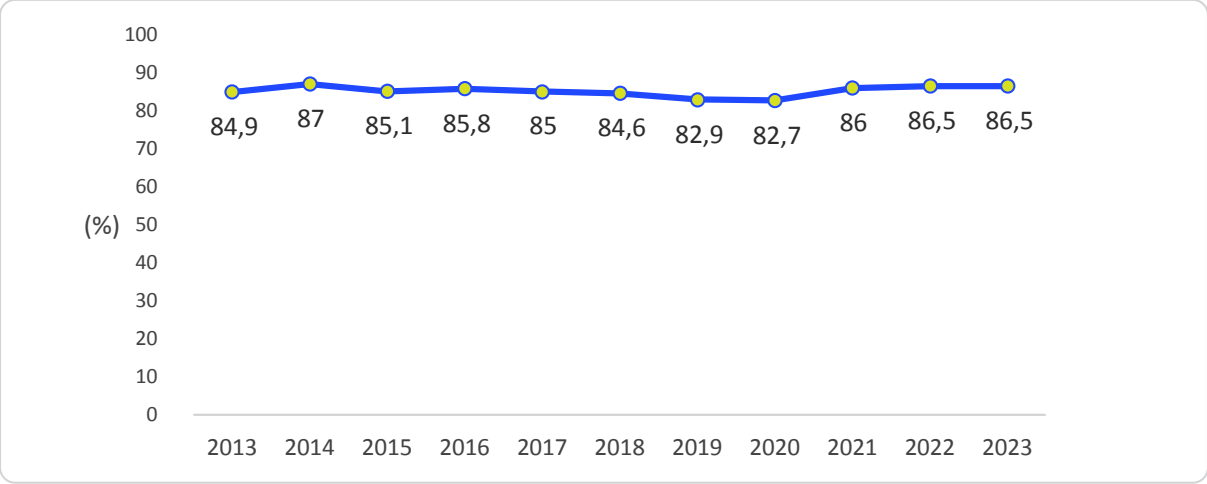

Sumber: Ditjen P2PL, Kemenkes RI, 2023

GAMBAR 6.5
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

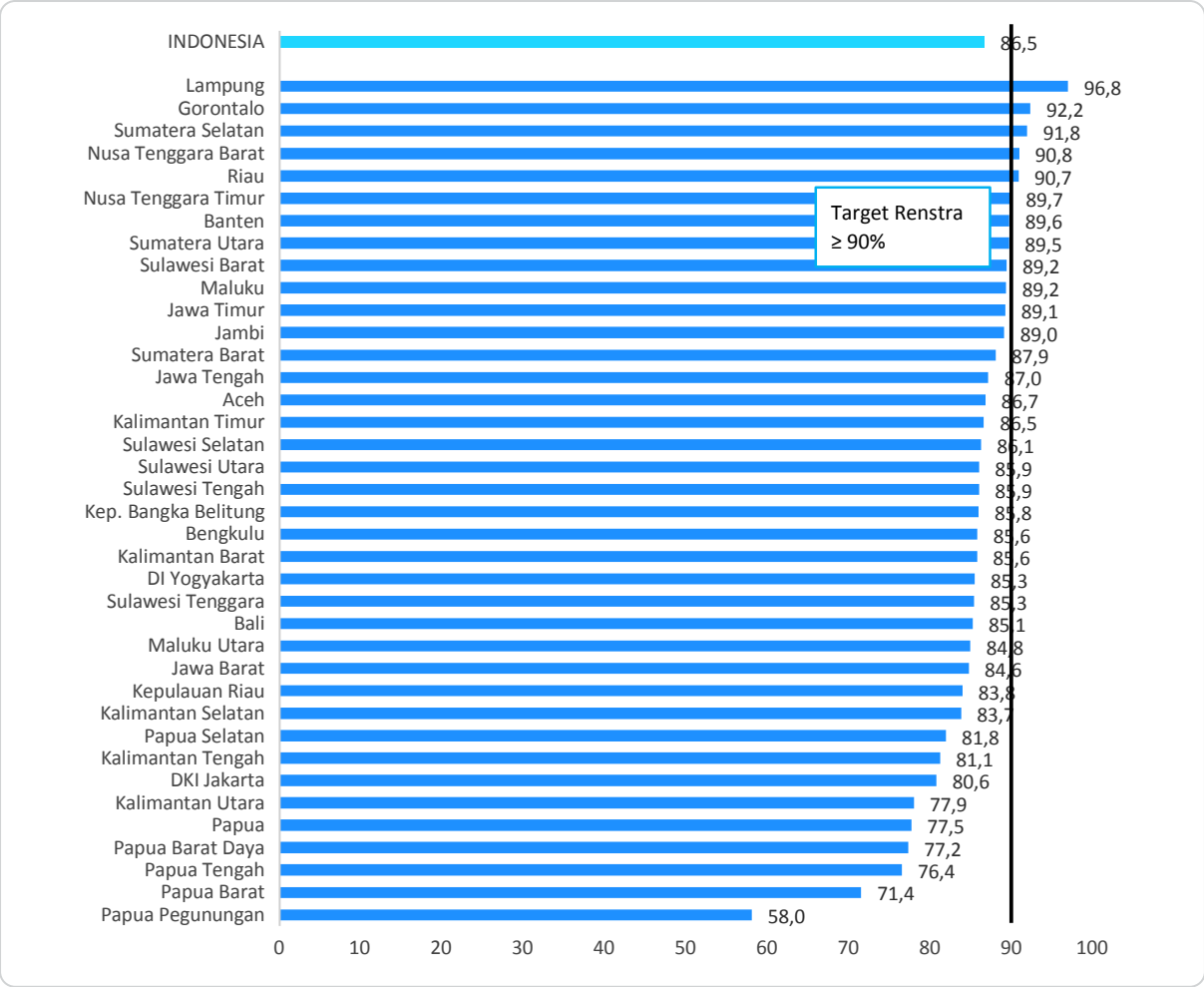

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Provinsi yang mencapai angka keberhasilan pengobatan semua kasus Tuberkulosis minimal 90% pada tahun 2023 sebanyak lima provinsi, yaitu Lampung (96,8%), Gorontalo (92,2%), Sumatera Selatan (91,8%), Nusa Tenggara Barat (90,8%), dan Riau (90,7%).

2. HIV dan AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV.

Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Virus yang tertekan (tersupresi) tidak berpotensi menular kepada orang lain, dan orang dengan HIV akan memiliki kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada stadium awal dan segera mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang tidak jatuh pada HIV stadium lanjut (AIDS). Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi potensi masuknya infeksi-infeksi lainnya yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: (1) menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; (2) menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; (3) menurunkan stigma dan diskriminasi.

Dari Gambar 6.6 terlihat jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan selama sebelas tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2023 dilaporkan sebanyak 57.299 kasus HIV dan 16.410 kasus AIDS. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tren tiga tahun terakhir. Penurunan kasus yang terjadi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi sehingga terbatasnya akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Dari segi penyedia pelayanan, peningkatan kasus COVID-19 yang cukup siginfikan menyebabkan beberapa tenaga kesehatan di layanan diperbantukan untuk membantu penanganan COVID-19, sehingga kegiatan operasional penemuan dan penjangkauan kasus menjadi terhambat. Selain itu pada tahun 2021 tenaga kesehatan di layanan membantu pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

GAMBAR 6.6
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2023

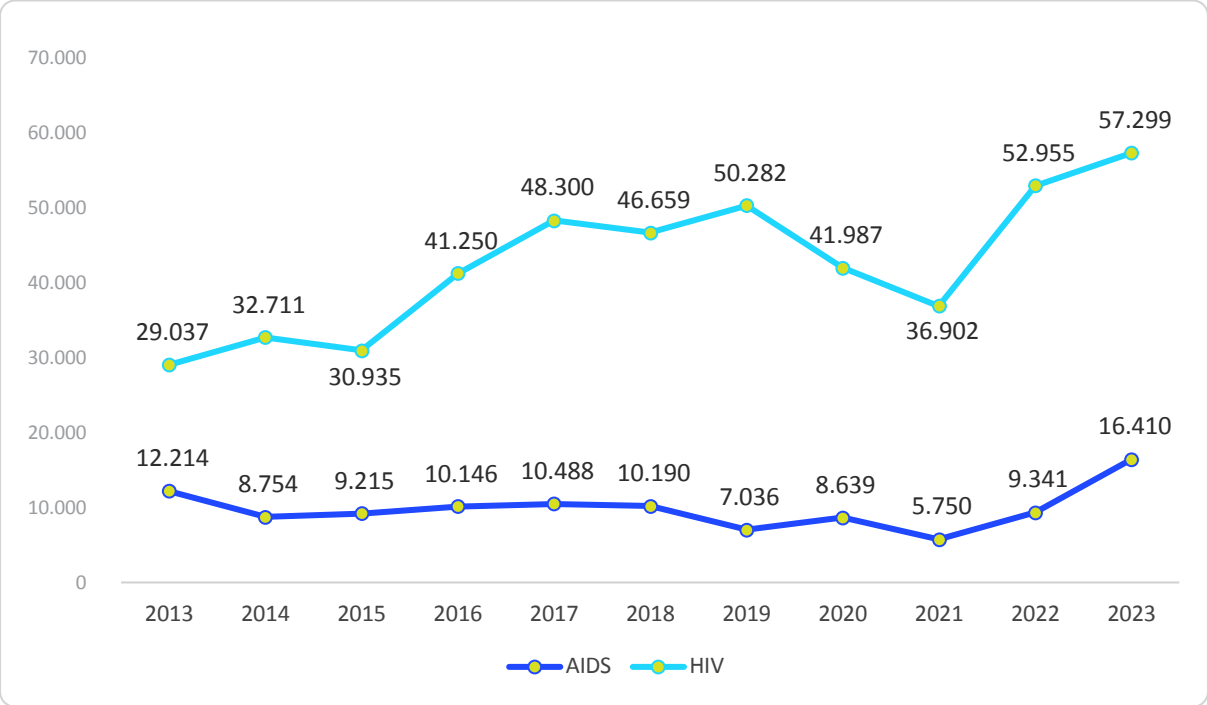

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus HIV dan AIDS pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Kesenjangan proporsi kasus kelompok laki-laki yang hampir tiga kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan pada Gambar 6.7 berikut ini.

GAMBAR 6.7
PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2023

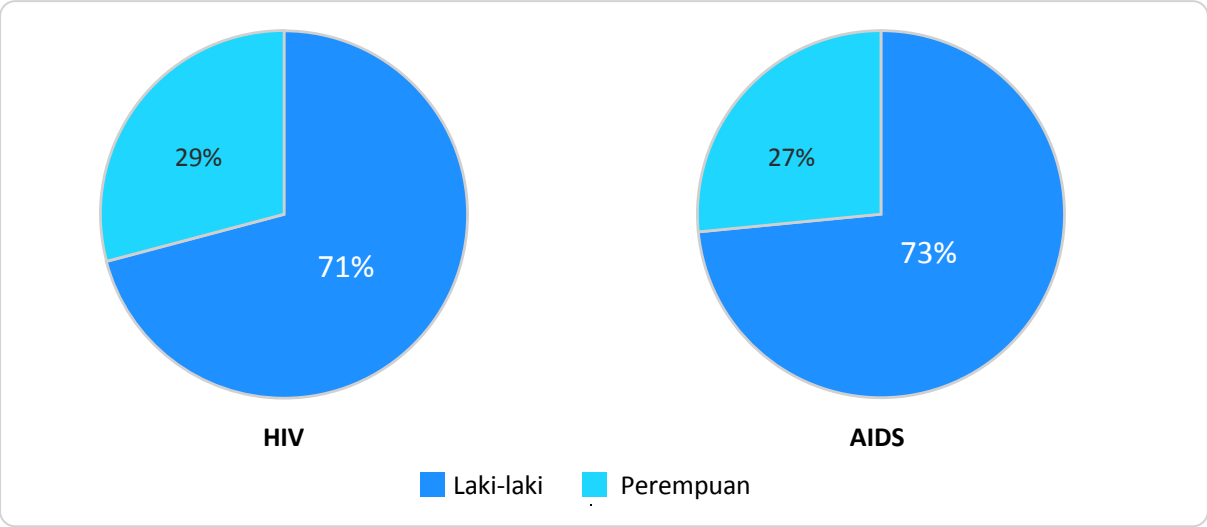

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2023 menurut kelompok umur seperti digambarkan pada Gambar 6.8 berikut ini.

GAMBAR 6.8
PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2023

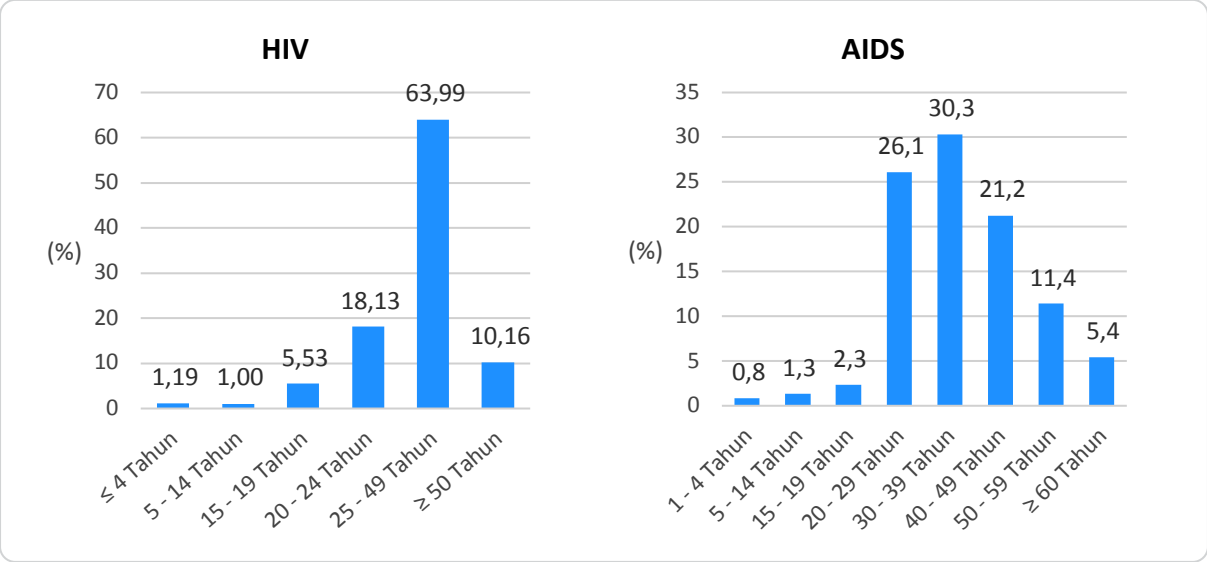

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Sebagian besar sebaran kasus HIV dan AIDS terdapat pada kelompok umur produktif 20-49 tahun. Hal ini disebabkan oleh rentang usia produktif lebih rentan terhadap perilaku beresiko seperti perilaku seks yang tidak aman dan penggunaan NAPZA suntik. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia 1-4 tahun yang menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak.

Penanggulangan HIV dan AIDS pada anak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual. Namun, masih adanya tantangan pengobatan seperti pengobatan pertama bagi anak dengan HIV yang saat ini hanya tersedia di unit pediatrik di Rumah Sakit dan regimen ART yang tidak ramah anak menyebabkan kurang optimalnya pengobatan HIV sehingga terjadi perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan global *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya.

3. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan parasit. Sampai saat ini program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita karena penyakit pneumonia memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan dan kematian balita. Diharapkan dengan penemuan kasus dan pengobatan pneumonia yang sudah sesuai standar dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian balita akibat pneumonia.

Pneumonia masih menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas utama karena infeksi pada bayi dan anak di dunia. Pada tahun 2019, kasus pneumonia menyumbang 740.180 (14%) kasus kematian anak usia di bawah 5 tahun (Balita) (WHO 2021). Sekitar 2.200 anak meninggal setiap hari akibat pneumonia (IVAC 2020; UNICEF 2019a). Pneumonia juga menjadi penyebab kematian Balita terbesar di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI 2020; UNICEF 2019b). Pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 19.000 anak meninggal dunia akibat pneumonia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2013-2023 dapat dilihat pada Gambar 6.9.

GAMBAR 6.9
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2013-2023

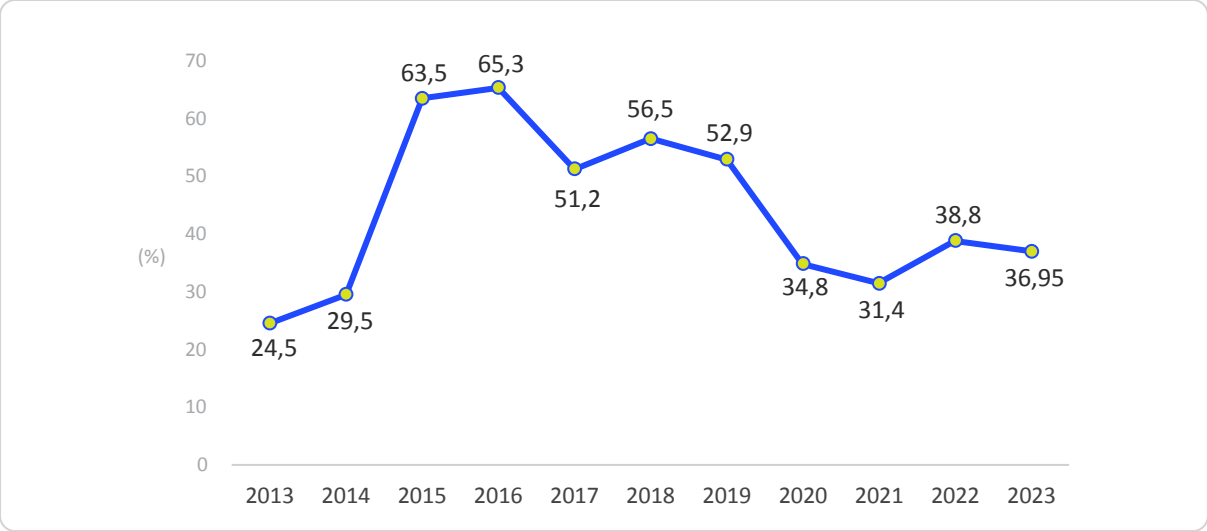

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Tren cakupan penemuan pneumonia pada balita selama sebelas tahun terakhir cukup fluktuatif. Cakupan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,3%. Sejak tahun 2015 terdapat perubahan angka perkiraan kasus dari 10% menjadi 3,55%, hal tersebut yang menyebabkan pada tahun 2015 cakupannya tinggi. Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2020-2022 jika dibandingkan dengan cakupan 5 tahun terakhir, penurunan ini disebabkan dampak dari pandemi COVID-19, dimana adanya stigma pada penderita COVID-19 yang berpengaruh pada penurunan jumlah kunjungan balita batuk atau kesulitan bernapas di Puskesmas.

Pada tahun 2023, cakupan penemuan pneumonia pada balita kembali menurun yaitu sebesar 36,95%. Provinsi dengan cakupan penemuan pneumonia pada balita tertinggi adalah Papua Barat (75%), DKI Jakarta (72,4%), dan Bali (71,6%).

GAMBAR 6.10
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

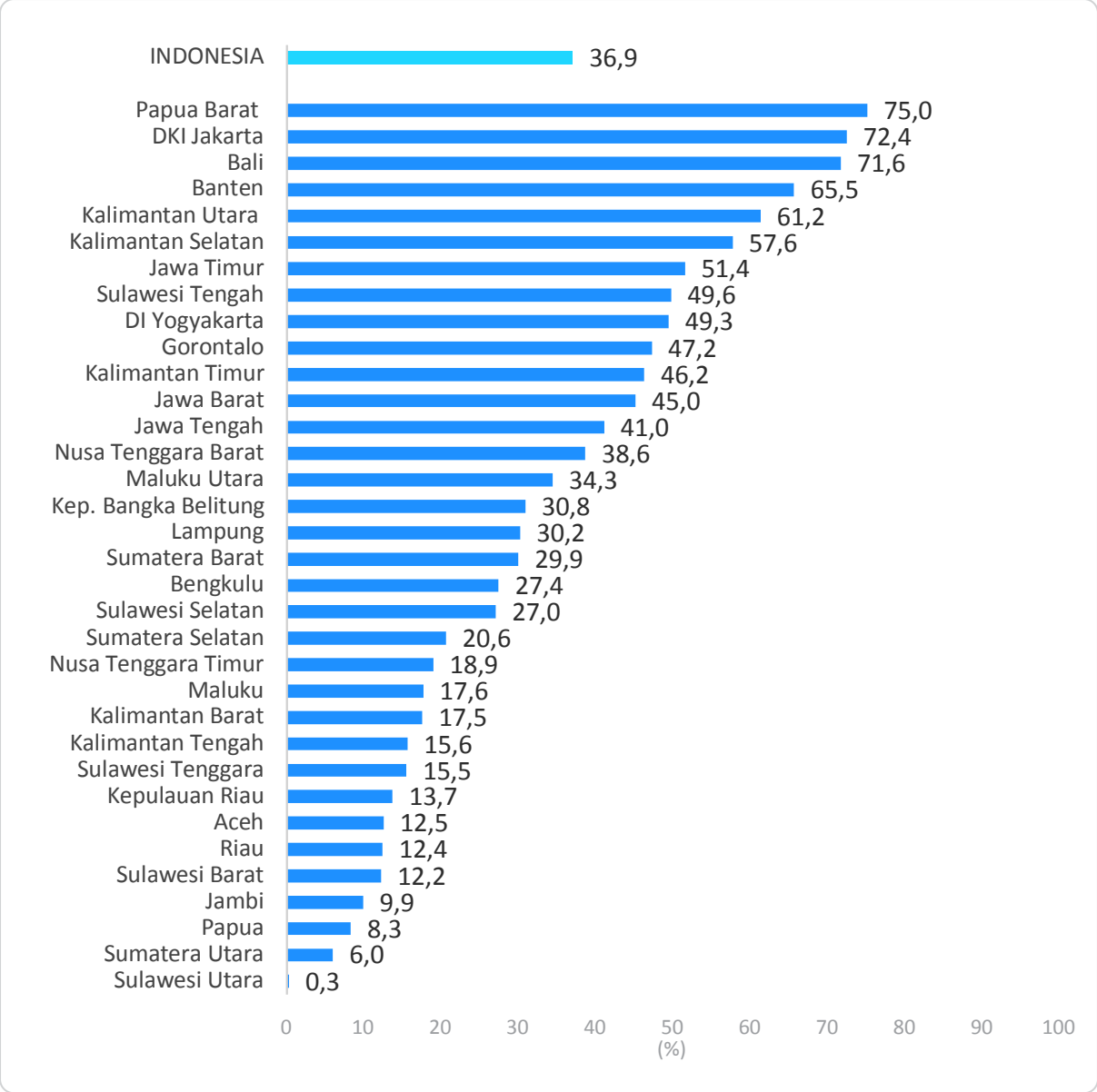

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Tata laksana pneumonia standar mengalami perluasan definisi menjadi penemuan kasus dan pengobatan standar menggunakan antibiotik. Pada tahun 2023, target persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2023 adalah 70%. Secara nasional, persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar tahun 2023 sebesar 94,8%, artinya sudah memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan. Jika dilihat berdasarkan provinsi, semua provinsi sudah mencapai target yaitu memiliki persentase lebih dari 70%.

GAMBAR 6.11
PERSENTASE PENGOBATAN KASUS PNEUMONIA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

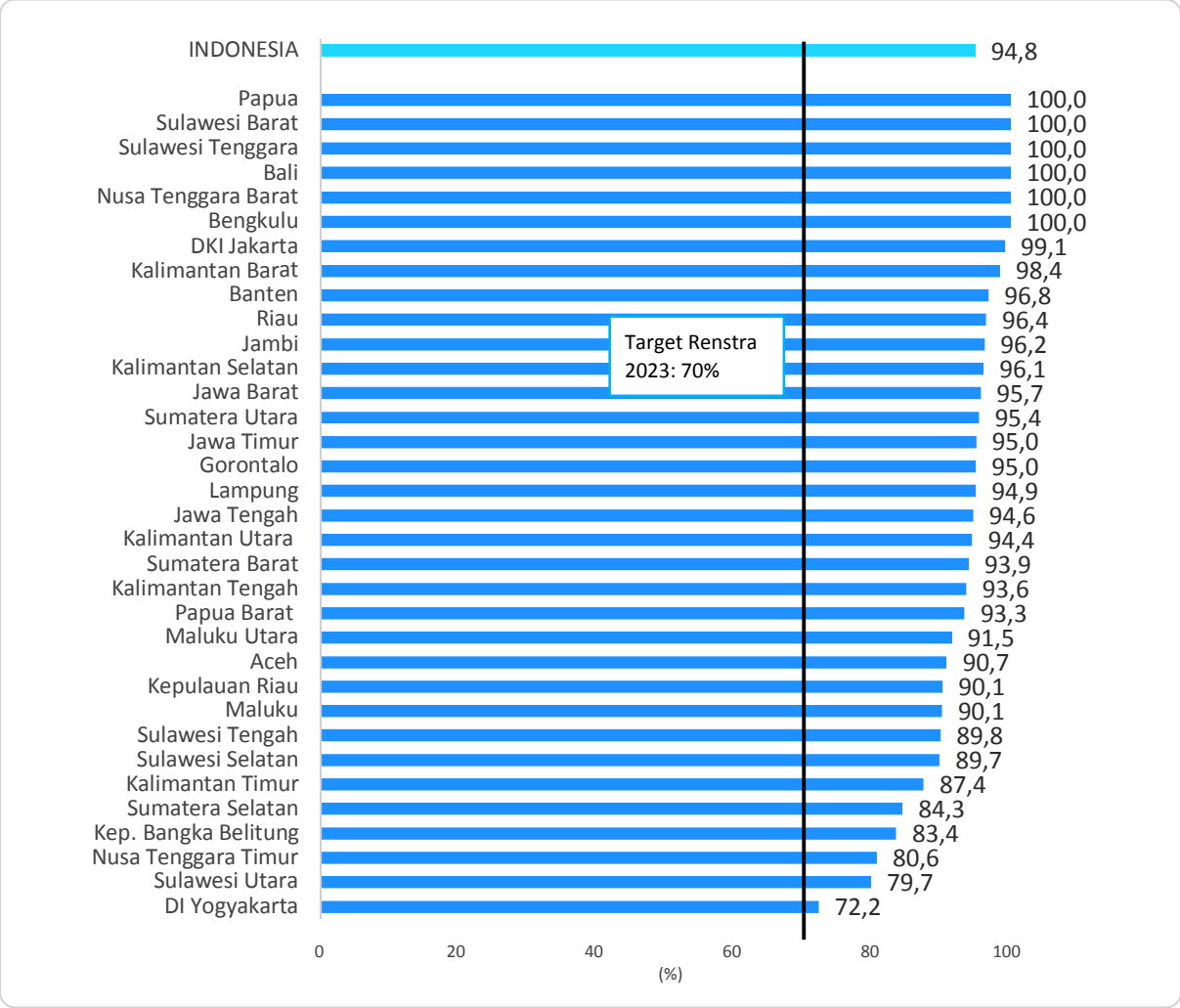

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023 angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,13%. Angka kematian akibat pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi hampir tiga kali lipat dibandingkan pada kelompok anak umur 1 – 4 tahun. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 58.

4. Hepatitis

Hepatitis merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis atau kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah infeksi Virus Hepatitis A (VHA), virus hepatiits b (VHB), Virus Hepatitis C (VHC), Virus Hepatitis D (VHD) dan Virus hepatitis E (VHE).

Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi hepatitis A, B, C, D dan E pada semua kelompok umur di Indonesia adalah 0,12%. Jika dilihat berdasarkan provinsi, provinsi dengan prevalensi hepatitis tertinggi adalah Papua Tengah (0,88%) dan provinsi dengan prevalensi hepatitis terendah adalah Riau (0,06%).

Meskipun ke lima jenis virus tersebut menyebabkan penyakit hati, tapi virus tersebut berbeda dalam hal penularan, tingkat keparahan penyakit dan pencegahan. Untuk Hepatitis A dan Hepatitis E, besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat Indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular Hepatitis A dan Hepatitis E. Sementara hepatitis B dan C merupakan jenis virus hepatitis yang menyebabkan penyakit kronis dan penyebab paling umum terjadinya sirosis hati, kanker hati dan kematian.

Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, Proporsi HBsAg reaktif (Hepatitis B) , pada semua umur sebesar 2,4% dan bila dilihat berdasarkan usia, proporsi tertinggi ada pada kategori usia 35-44, 45-54 dan 55- 64 tahun masing-masing 3,6% dan proporsi terendah ada pada usia 0-4 tahun sebesar 0.1%

Indikator kegiatan hepatitis saat ini merupakan indikator lanjutan dari tahun 2015-2019, Tahun 2015 – 2019 indikator kinerja hepatitis adalah Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B saja, tahun 2020 -2024 ditambah dengan Deteksi Dini Hepatitis C sehingga indikator di tahun 2020 – 2024 adalah persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko. Gambar 6.12 menunjukkan kenaikan target per tahun yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator. Pada tahun 2023 capaian indikator belum mencapai target Renstra tahun 2023 (100%), yaitu 97,28%.

GAMBAR 6.12
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B DAN HEPATITIS C DI INDONESIA TAHUN 2015-2023

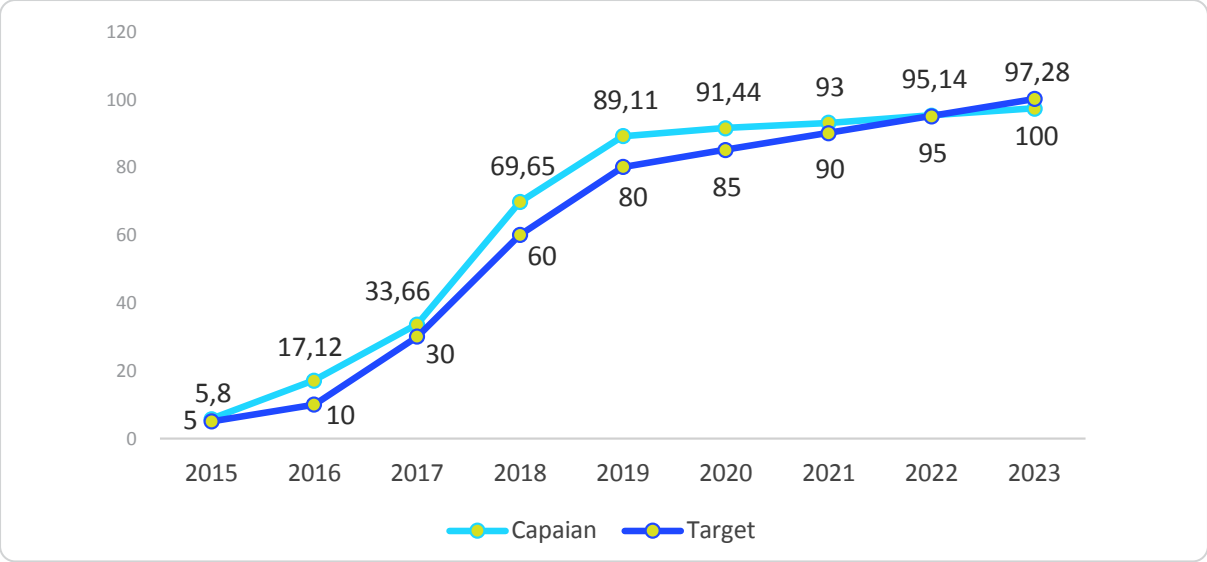

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Dari 38 provinsi sebanyak 34 provinsi sudah mencapai 100% kabupaten/kota yang telah melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C, sedangkan sebanyak 4 provinsi yaitu Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah belum mencapai 100%.

GAMBAR 6.13
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

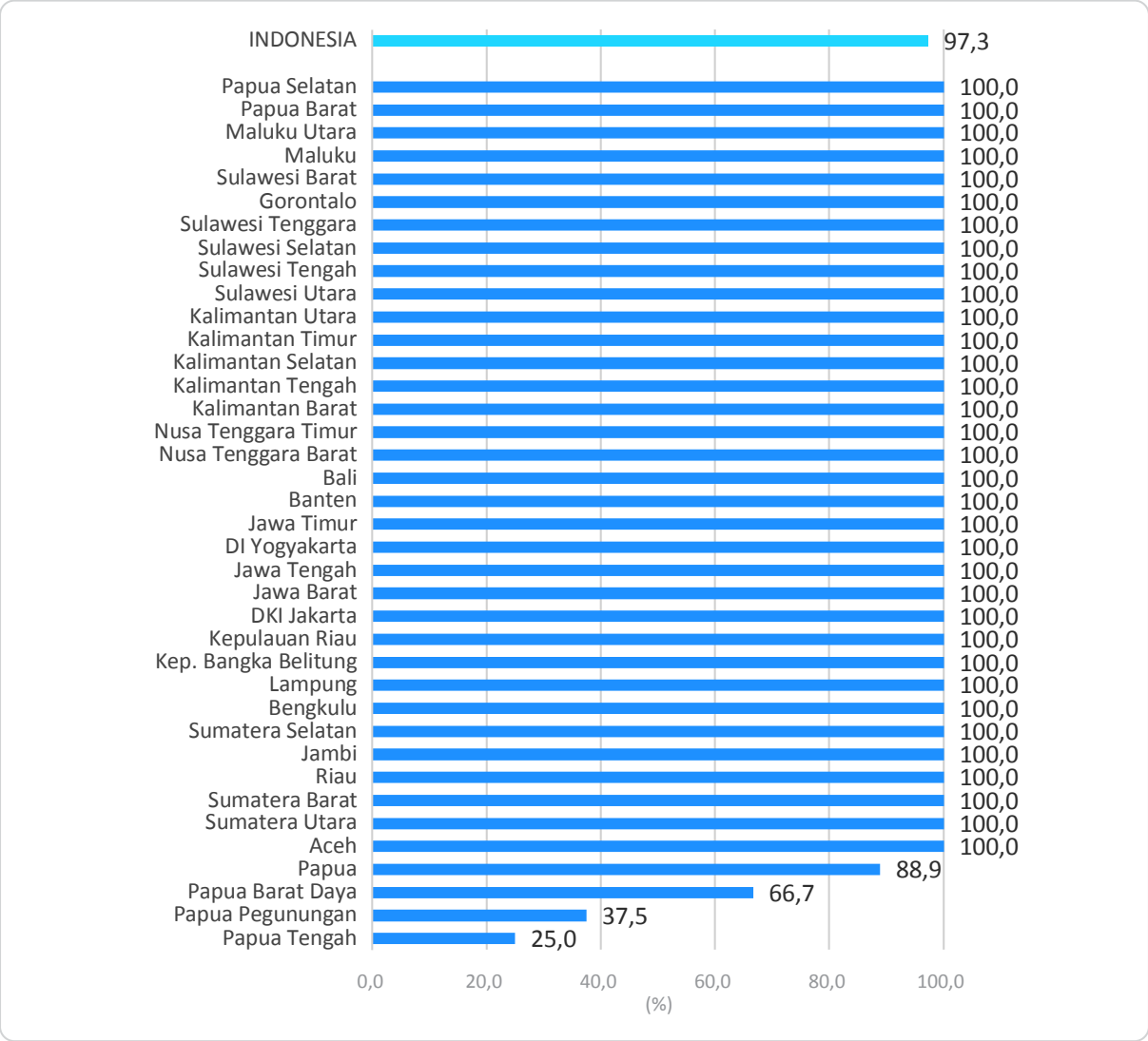

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

5. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi diare pada semua kelompok umur sebesar 2%, pada balita sebesar 4,9%, dan pada bayi sebesar 3,9%. Sementara pada *Sample Registration System* tahun 2018, diare tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian pada neonatus sebesar 7% dan pada bayi usia 28 hari sebesar 6%.

a. Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Sedangkan sasaran

pelayanan penderita diare pada semua umur ditargetkan sebesar 10% dari perkiraan jumlah penderita diare semua umur.

Pada tahun 2023 cakupan pelayanan penderita diare pada semua umur sebesar 41,5% dan pada balita sebesar 31,7% dari sasaran yang ditetapkan. Provinsi dengan cakupan tertinggi pelayanan diare pada balita adalah Jawa Timur (62,2%), sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Kepulauan Riau (5,3%).

GAMBAR 6.14
CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA (%)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

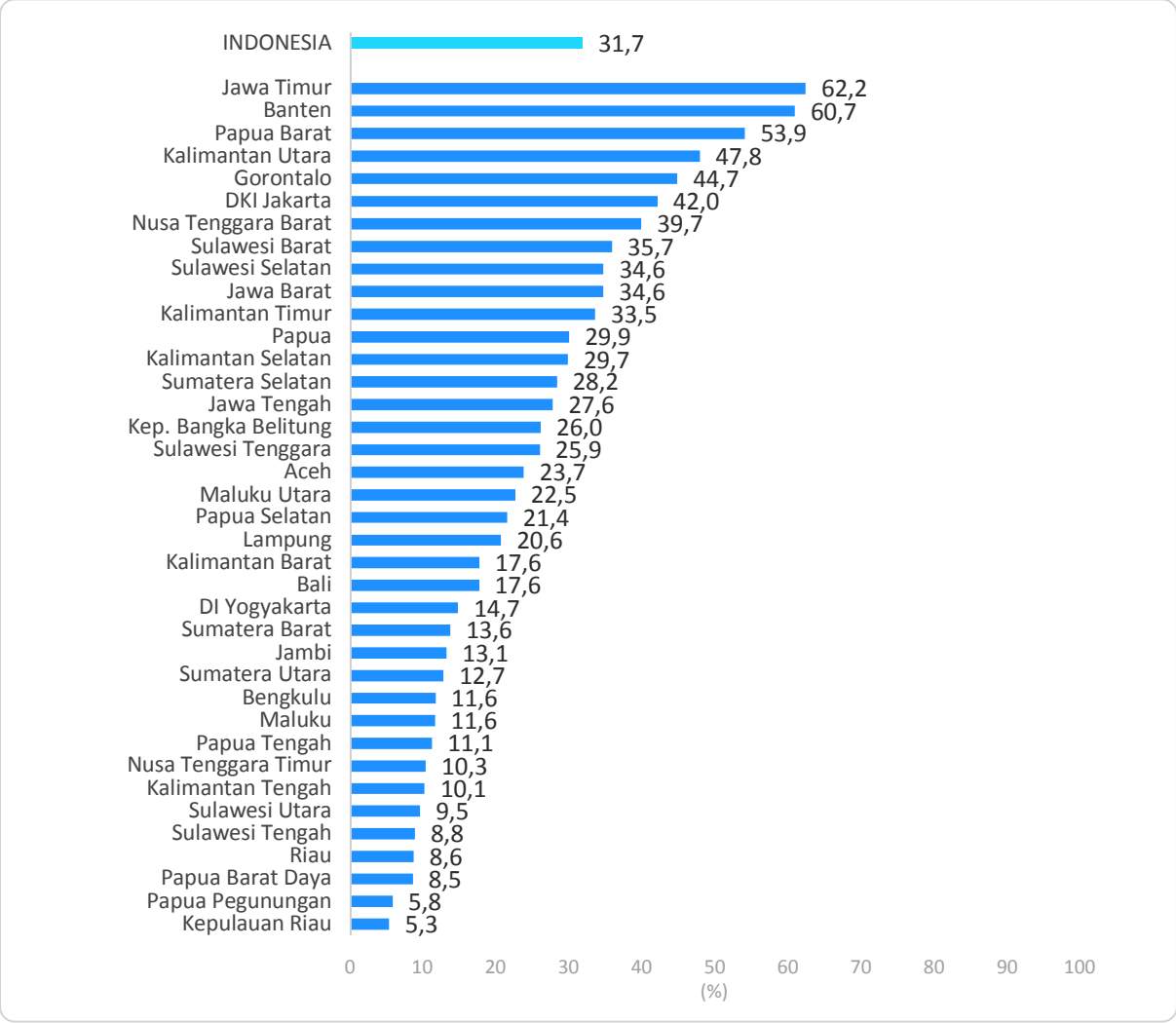

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

b. Penggunaan Oralit dan Zink

LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntaskan Diare) menganjurkan bahwa semua penderita diare harus mendapatkan oralit untuk penderita semua umur, maka target penggunaan oralit sebesar 100% dari semua kasus diare yang mendapatkan pelayanan di puskesmas. Tahun 2023 secara nasional penggunaan oralit pada penderita diare semua umur sebesar 92,1%.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pemberi layanan di puskesmas belum memberikan oralit/zink sesuai standar tata laksana pada penderita diare. Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang manfaat oralit/zink sebagai cairan yang harus diberikan pada setiap penderita diare untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

Selain oralit, balita juga diberikan zink yang merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja serta mencegah terjadinya diare berulang diare pada tiga bulan berikutnya. Penggunaan zink selama 10 hari berturut-turut pada saat balita diare merupakan terapi diare balita. Pada tahun 2023 cakupan rata-rata pemberian oralit dan zink pada balita diare sebesar 91,97%.

6. Kusta

Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri, *Mycobacterium leprae*. Penyakit kusta bersifat kronis, menyerang kulit, saraf tepi, dan organ tubuh lain kecuali saraf pusat. Terlambatnya dalam deteksi dini dan tatalaksana kasus kusta dapat mengakibatkan kecacatan, pada mata, tangan, dan kaki.

a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 0,63 kasus per 10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 5,2 kasus per 100.000 penduduk. Tren angka kejadian kusta dapat dilihat pada Gambar 6.15. Selama sebelas tahun terakhir terlihat rasio prevalensi angka penemuan kasus kusta baru tren relatif menurun, tetapi kembali menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022. Pada tahun 2023 dilaporkan terdapat 14.376 kasus baru kusta yang hampir 90% di antaranya merupakan kusta tipe *Multi Basiler* (MB).

GAMBAR 6.15
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR)
TAHUN 2013-2023

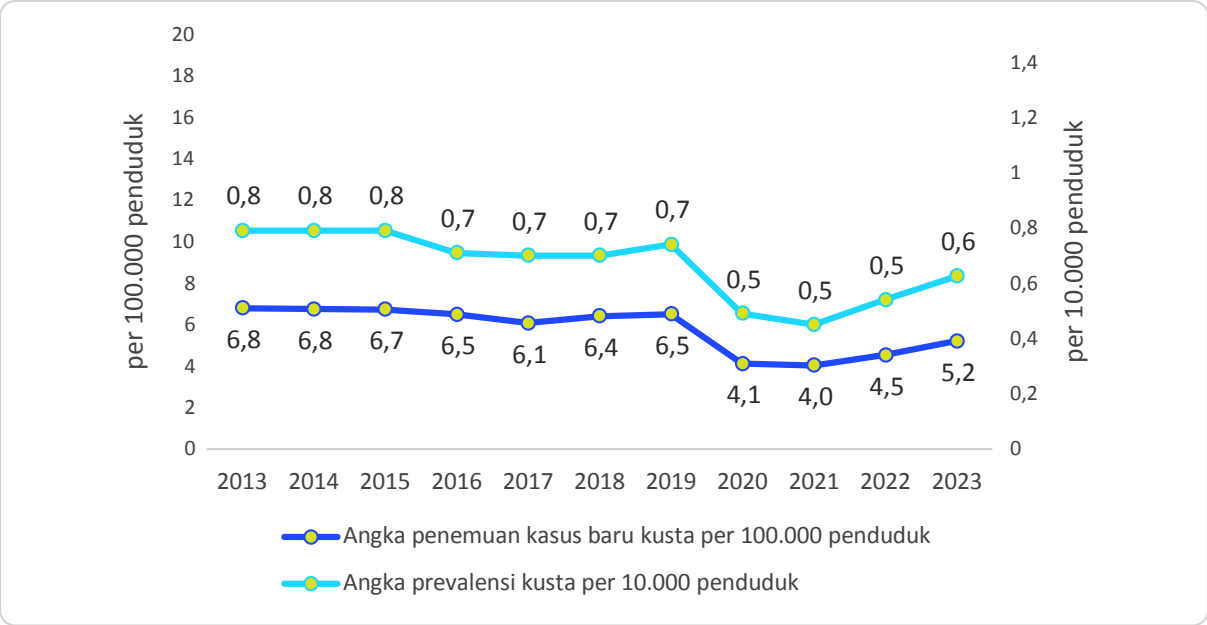

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dinyatakan telah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2023 sebanyak 27 provinsi dari 38 provinsi telah mencapai eliminasi kusta. Terdapat 12 rovinsi yang belum mencapai eliminasi pada tahun 2023 yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Maluku, Papua Tengah, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua dan Papua Barat.

GAMBAR 6.16
PREVALENSI KUSTA PER 10.0000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

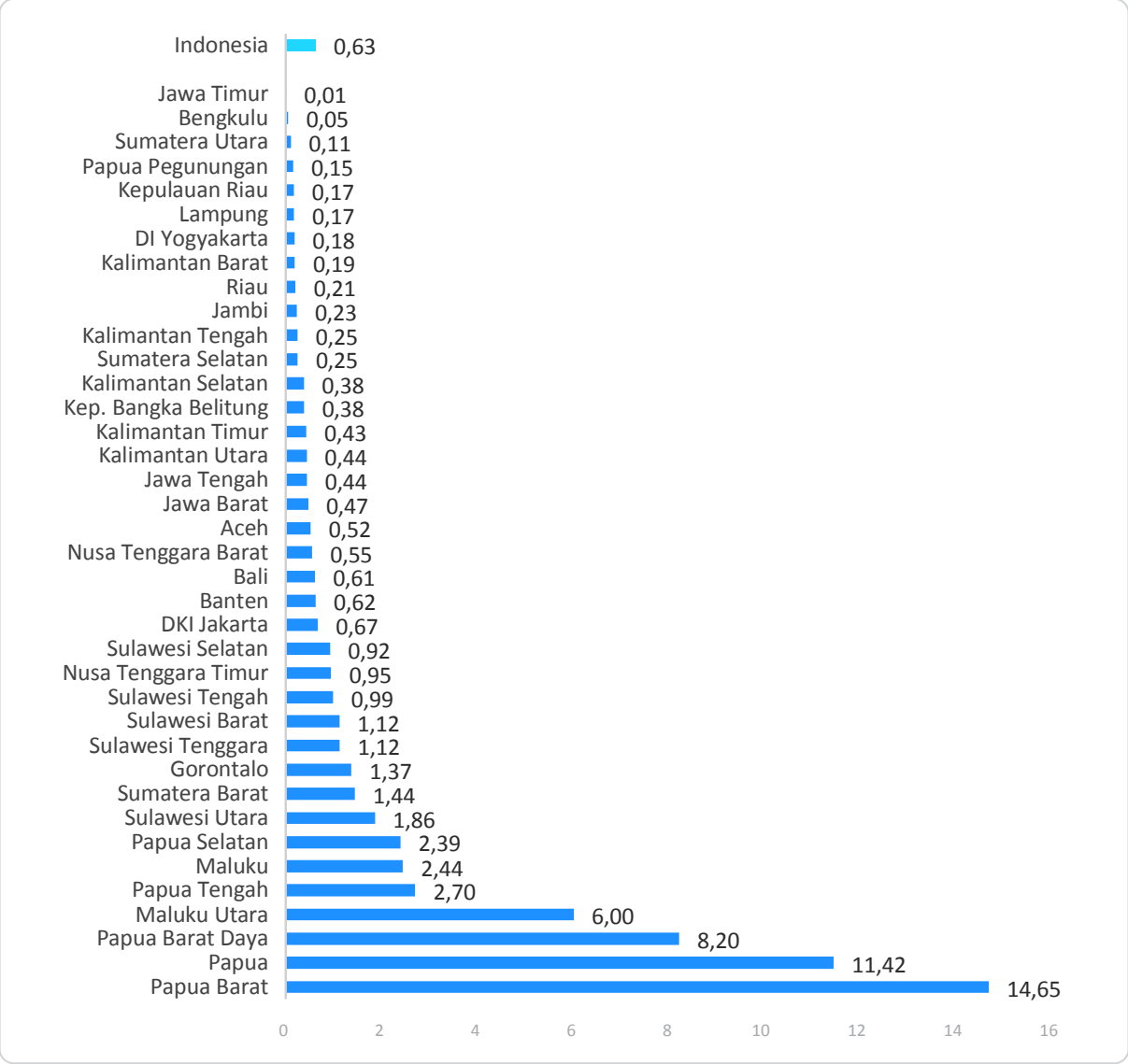

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Jika disajikan secara spasial, daerah yang berwarna kuning menandai provinsi yang sudah berstatus eliminasi kusta, sedangkan daerah yang berwarna merah menandai provinsi yang berstatus belum eliminasi kusta. Seluruh provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta berada di sebagian Indonesia Bagian Tengah dan sebagian besar Indonesia Bagian Timur, kecuali Papua Pegunungan. Provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara yang pada tahun sebelumnya sudah mencapai eliminasi, kembali berwarna merah karena angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk meningkat menjadi di atas 1 per 10.000 penduduk.

Jumlah kabupaten/kota yang sudah mencapai eliminasi adalah 390 kabupaten/kota. Jumlah ini belum mencapai target eliminasi kusta tahun 2023 yaitu 482 kabupaten/kota dikarenakan berbagai kendala baik dari sumber daya manusia dan logistik *multi drug therapy* (MDT).

GAMBAR 6.17
PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022 DAN 2023

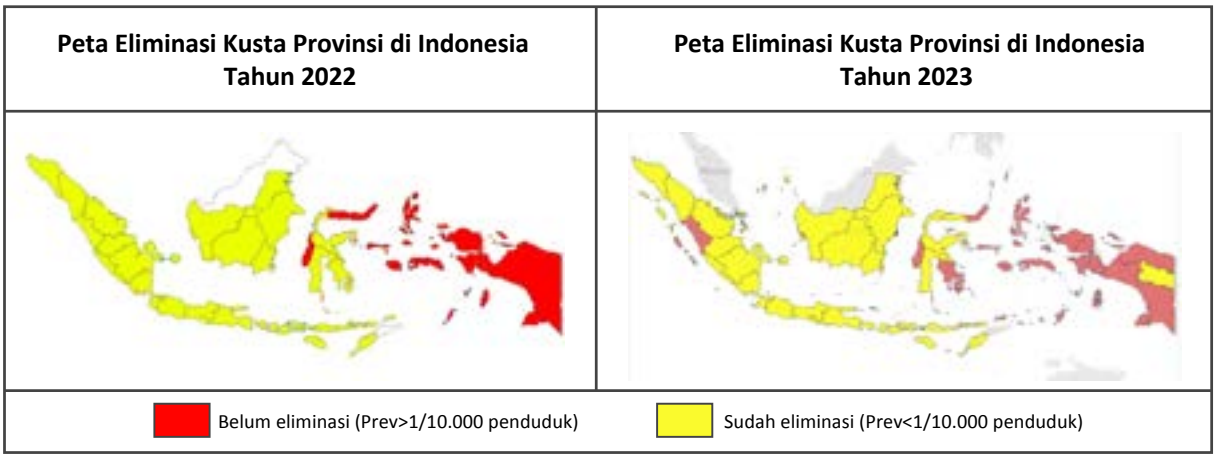

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

b. Angka Disabilitas Tingkat 2

Peningkatan deteksi kasus sejak dini diperlukan dalam pengendalian kasus kusta. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini yaitu angka disabilitas tingkat 2. Pada tahun 2023 angka disabilitas tingkat 2 sebesar 3 per 1.000.000 penduduk. Jika dilihat tren dalam sebelas tahun terakhir, angka disabilitas tingkat 2 cenderung menurun.

GAMBAR 6.18
ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK
DI INDONESIA TAHUN 2013-2023

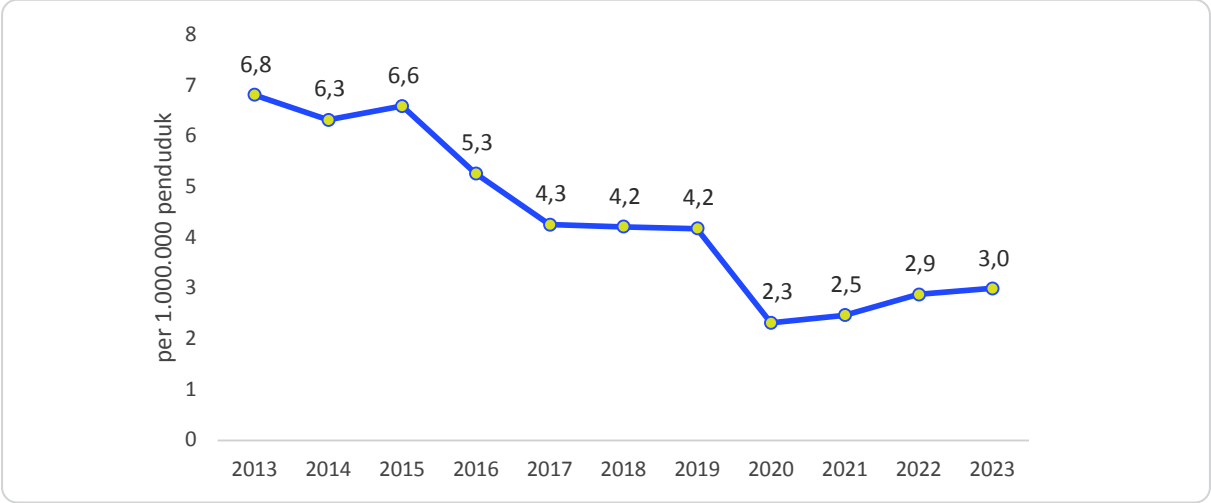

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan provinsi, tidak ditemukan kasus kusta baru dengan disabilitas tingkat 2 di Provinsi Papua Selatan. Angka disabilitas 2 tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat Daya yaitu 14,5 per 1.000.000 penduduk. Target program di tahun 2023 angka disabilitas tingkat 2 adalah <1 per 1.000.000 penduduk. Pada tahun 2023, hanya tujuh provinsi yang dapat mencapai target tersebut yaitu Papua Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

GAMBAR 6.19
ANGKA DISABILITAS TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2023

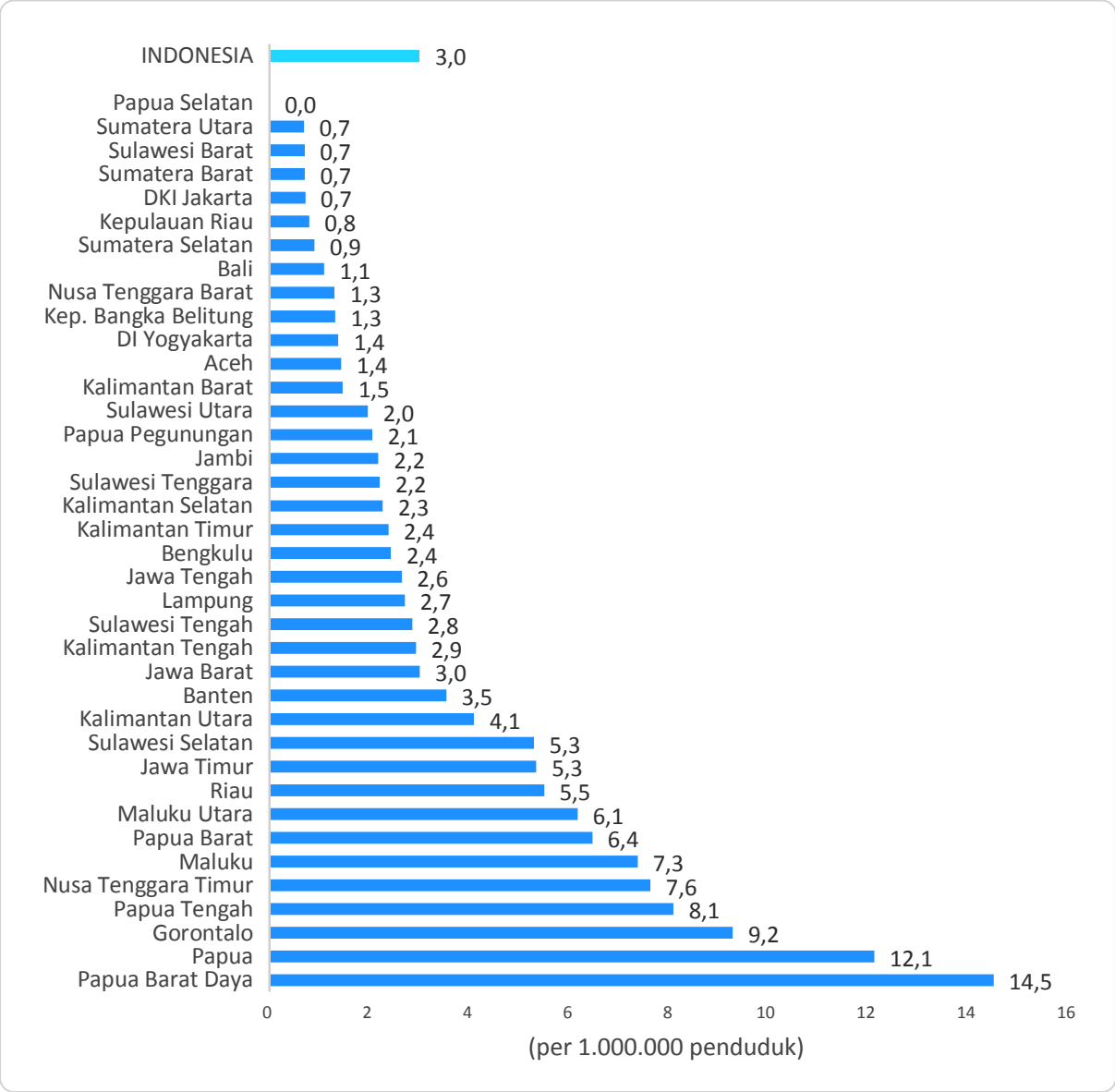

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

c. Proporsi Kusta Multibasiler (MB) dan Proporsi Kusta Baru pada Anak

Proporsi kusta MB dan proporsi kusta pada anak (0-14 tahun) di antara kasus baru memperlihatkan adanya sumber penularan tersembunyi serta tingginya tingkat penularan di masyarakat.

GAMBAR 6.20
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
DI INDONESIA TAHUN 2013 - 2023

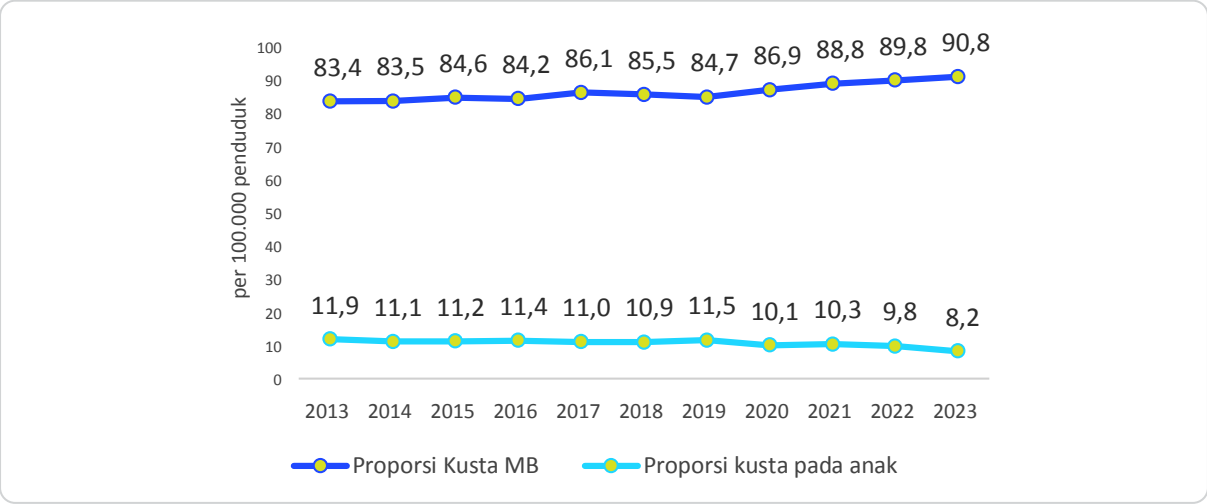

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Tidak banyak terjadi perubahan proporsi kusta MB selama periode 2013 - 2023. Kasus kusta tipe MB masih mendominasi di Indonesia menunjukkan banyaknya sumber penularan di masyarakat. Provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2023 yaitu Sumatera Utara (98%) dan Gorontalo (97,6%).

Proporsi kusta pada anak mulai mengalami penurunan sejak tahun 2021. Pada tahun 2023, proporsi kusta pada anak adalah 8,2%. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua (21,9%) dan Papua Barat (21,4%). Data terkait penyakit kusta selengkapnya terdapat pada Lampiran 64 - 67.

d. Penderita Kusta Selesai Berobat (*Release From Treatment*/RFT)

Indikator persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (RFT *rate*) sangat penting digunakan dalam menilai kualitas tatalaksana penderita dan kepatuhan penderita dalam minum obat. Indikator tersebut merupakan indikator tahunan dan perhitungannya dilakukan berdasarkan penderita yang memulai pengobatan MDT pada periode kohort yang sama.

Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu merupakan jumlah penderita baru kusta (PB/MB) dari periode kohort 1 (satu) tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu (PB menyelesaikan 6 dosis dalam waktu 6-9 bulan/MB menyelesaikan 12 dosis dalam waktu 12-18 bulan) dinyatakan dalam persentase.

Pada tahun 2023, cakupan RFT di Indonesia sudah cukup tinggi, yaitu untuk kusta PB sebesar 85,5% dan kusta MB sebesar 84,9%. Penderita kusta PB yang telah selesai berobat di tahun 2023 adalah penderita kusta yang tercatat pada kohort sejak tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Sebelas provinsi telah mencapai 100% persentase penderita kusta PB yang selesai berobat. Pada Provinsi Kalimantan Utara tidak ada penderita kusta yang selesai berobat di tahun 2023 karena memang tidak ada kasus kusta PB di provinsi tersebut.

GAMBAR 6.21
CAKUPAN RFT KUSTA PB MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

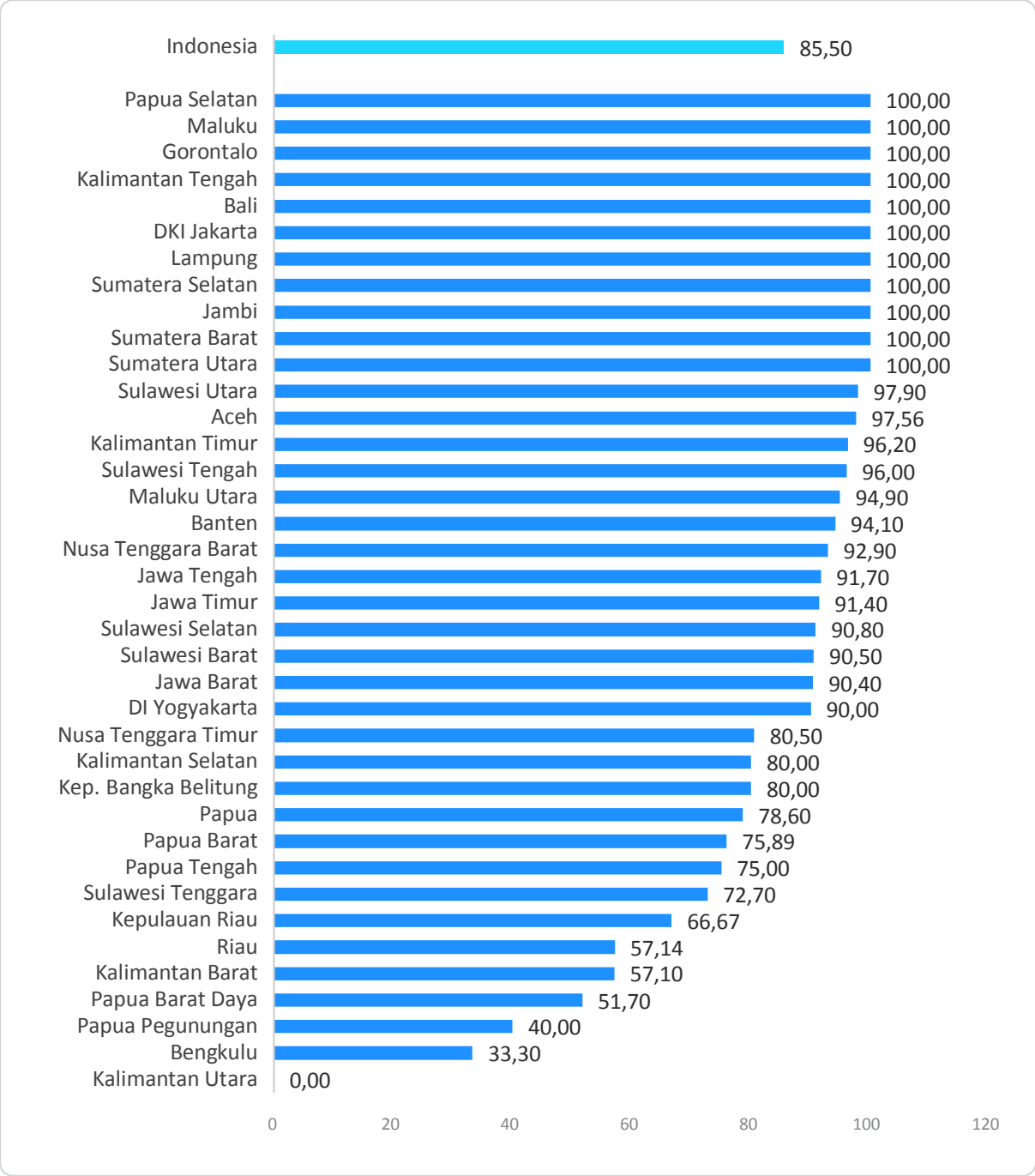

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Penderita kusta MB yang tercatat selesai berobat di tahun 2023 adalah penderita kusta MB yang tercatat pada kohort sejak 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Provinsi dengan cakupan tertinggi kusta MB selesai berobat adalah Papua Pegunungan dengan jumlah penderita kusta MB selesai berobat sebanyak 5 orang. Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua Selatan dengan persentase sebesar 43,3%.

GAMBAR 6.22
CAKUPAN RFT KUSTA MB MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

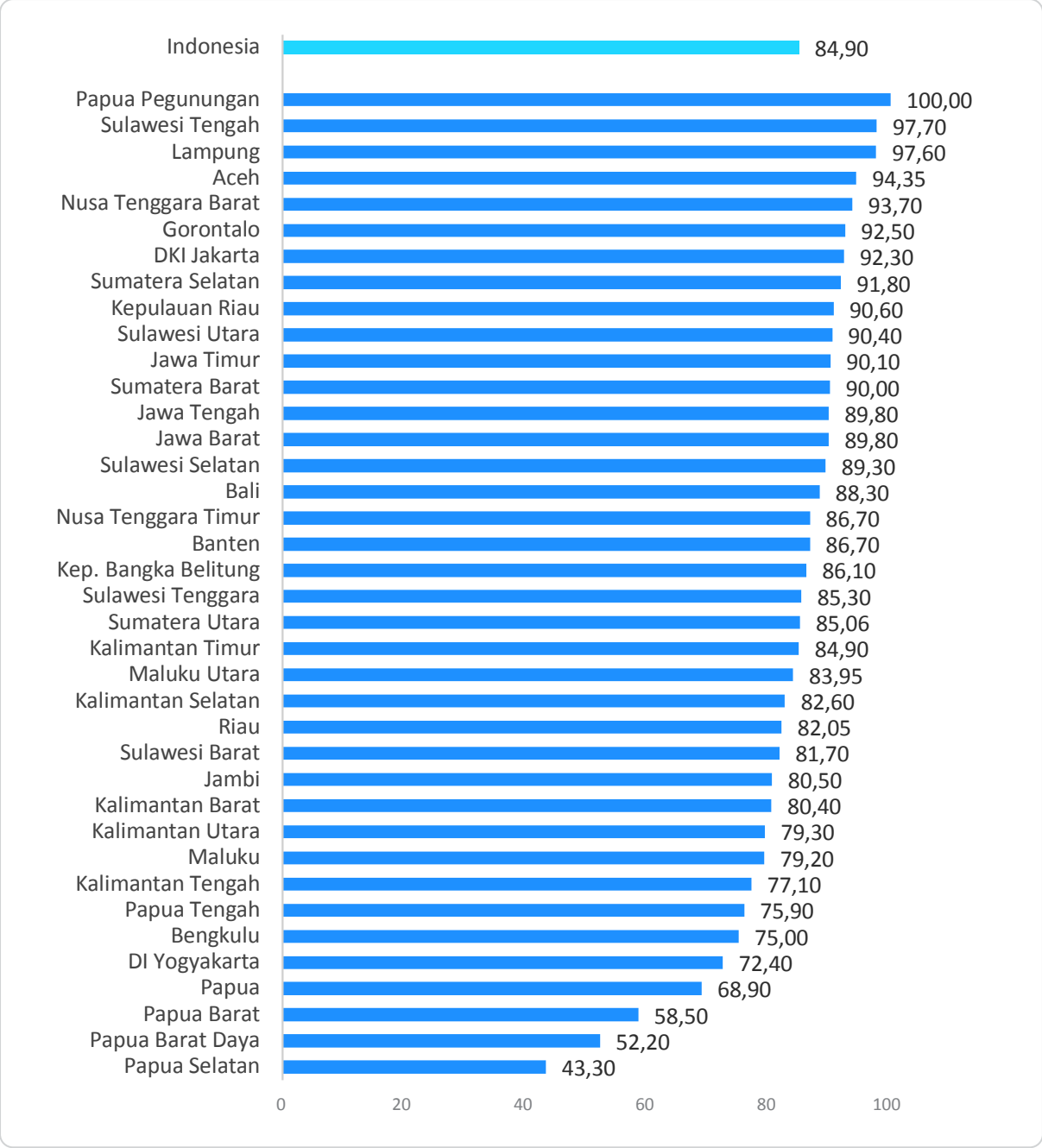

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

7. *Coronavirus Disease* (COVID-19)

Sejak dilaporkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, penyakit COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. *Coronavirus disease* (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).

Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Orang lanjut usia dan dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, paru, diabetes dan kanker berisiko mengalami tingkat keparahan lebih tinggi.

COVID-19 ditularkan melalui droplet, penularan terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan (misalnya: batuk atau bersin) sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi.

Dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor K.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa infeksi Novel Coronavirus (infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Setelah tiga tahun berjalan pandemi COVID-19, melalui Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19, pada tanggal 4 Agustus 2023 pemerintah menyatakan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sejak pertama kali diumukan adanya kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sampai 30 Desember 2023, tercatat kasus konfirmasi di Indonesia sebesar 6.821.940 kasus. Jumlah kasus konfirmasi yang dilaporkan sepanjang tahun 2023 adalah 101.978 kasus. Jumlah kasus konfirmasi tertinggi pada tahun 2023 dilaporkan dari Provinsi DKI Jakarta (35.608), Jawa Barat (21.483), dan Jawa Timur (12.715).

Secara kumulatif, hampir seluruh kasus COVID -19 sembuh. *Recovery rate* di Indonesia dan level provinsi rata-rata sudah lebih dari 90%. *Case fatality rate* (CFR) COVID-19 pada tahun 2023 di Indonesia sebesar 1,32%. Provinsi dengan CFR tertinggi yaitu Maluku (9,09%), Sumatera Barat (6,67%), dan Aceh (6,22%).

Untuk memutus rantai penularan COVID-19, selain melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, diperlukan upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan kekebalan kelompok (*herd immunity*). Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan total sasaran 234.660.020 penduduk usia ≥6 tahun.

Hingga tahun 2023, pemerintah telah mencanangkan program vaksinasi covid-19 dari vaksinasi pertama, vaksinasi primer lengkap (sesuai jenis vaksin yang digunakan), dan booster 1 dan 2. Capaian vaksinasi primer lengkap di Indonesia tahun 2023 sebesar 74,7%. Berdasarkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/762/2022 tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19, vaksinasi dikategorikan memadai jika mencapai lebih dari 70% target. Dengan demikian capaian vaksinasi COVID-19 dosis lengkap tahun 2023 secara nasional telah memadai. Terdapat 47% provinsi yang telah mencapai vaksinasi primer lengkap memadai, dengan capaian tertinggi yaitu DKI Jakarta (116,9%), Bali (98%), dan D.I. Yogyakarta (95,9%).

GAMBAR 6.23
CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS LENGKAP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

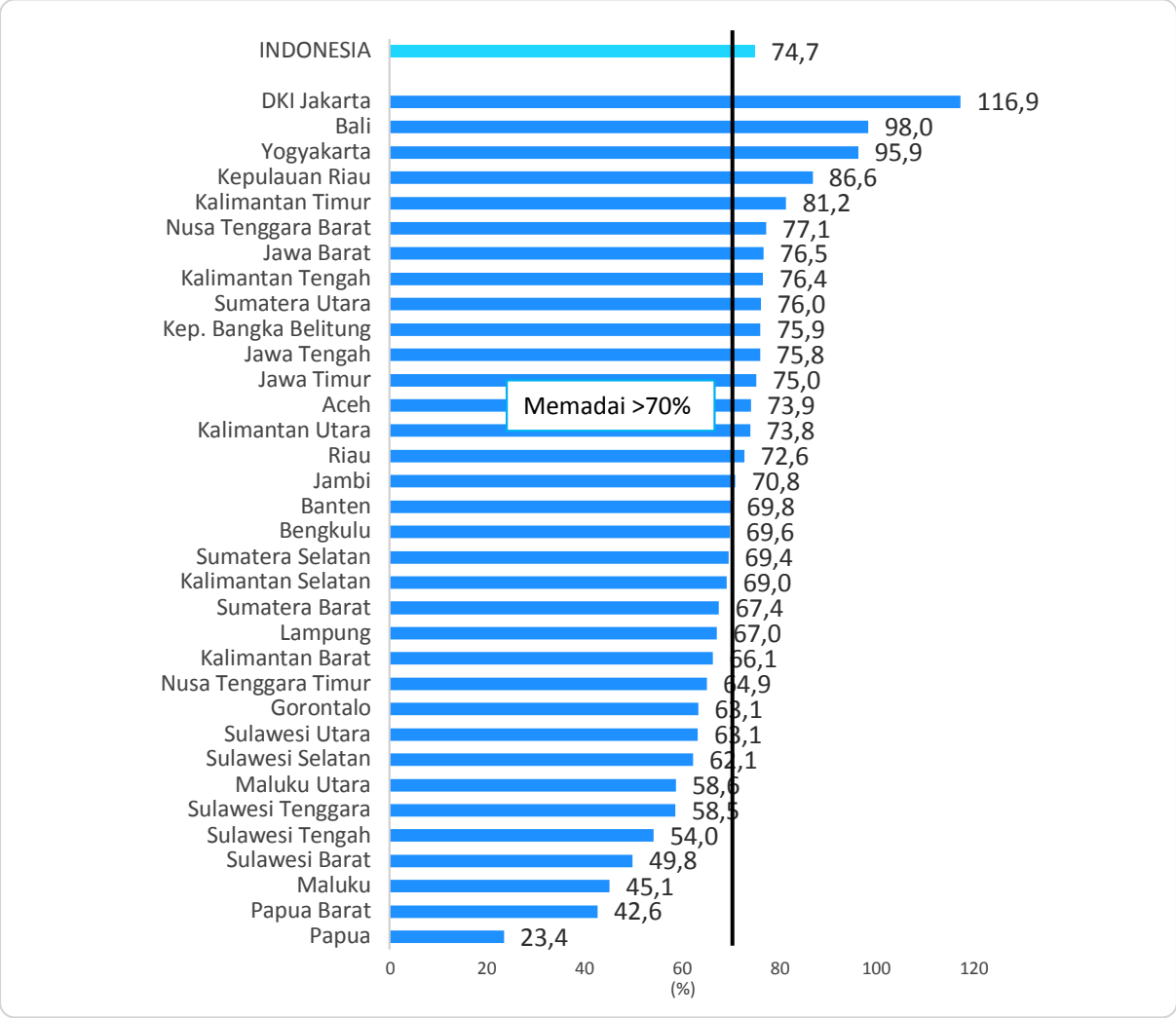

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2024, Data filter per 31 Desember 2023

Sejak Januari 2022 Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran nomor HK.02.02/ II/252/2022 mengenai pemberian vaksin COVID-19 dosis lanjutan *(booster)*. Hasil studi menunjukan telah terjadi penurunan antibodi pada enam bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap, sehingga dibutuhkan pemberian dosis *booster* untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan. Vaksinasi *booster* diselenggarakan untuk sasaran penduduk usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok lansia dan penurunan sistem imunitas (imunokompromi). Selama tahun 2023 sebanyak 30,2% target penduduk telah mendapatkan vaksinasi *booster* dengan provinsi tertinggi DKI Jakarta (59,1%) dan Bali (57,8%). Dibandingkan dengan target WHO *booster* 1 sebesar 50% maka secara nasional Indonesia belum mencapai target capaian vaksinasi *booster* 1.

GAMBAR 6.24
CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 *BOOSTER* 1
DI INDONESIA TAHUN 2023

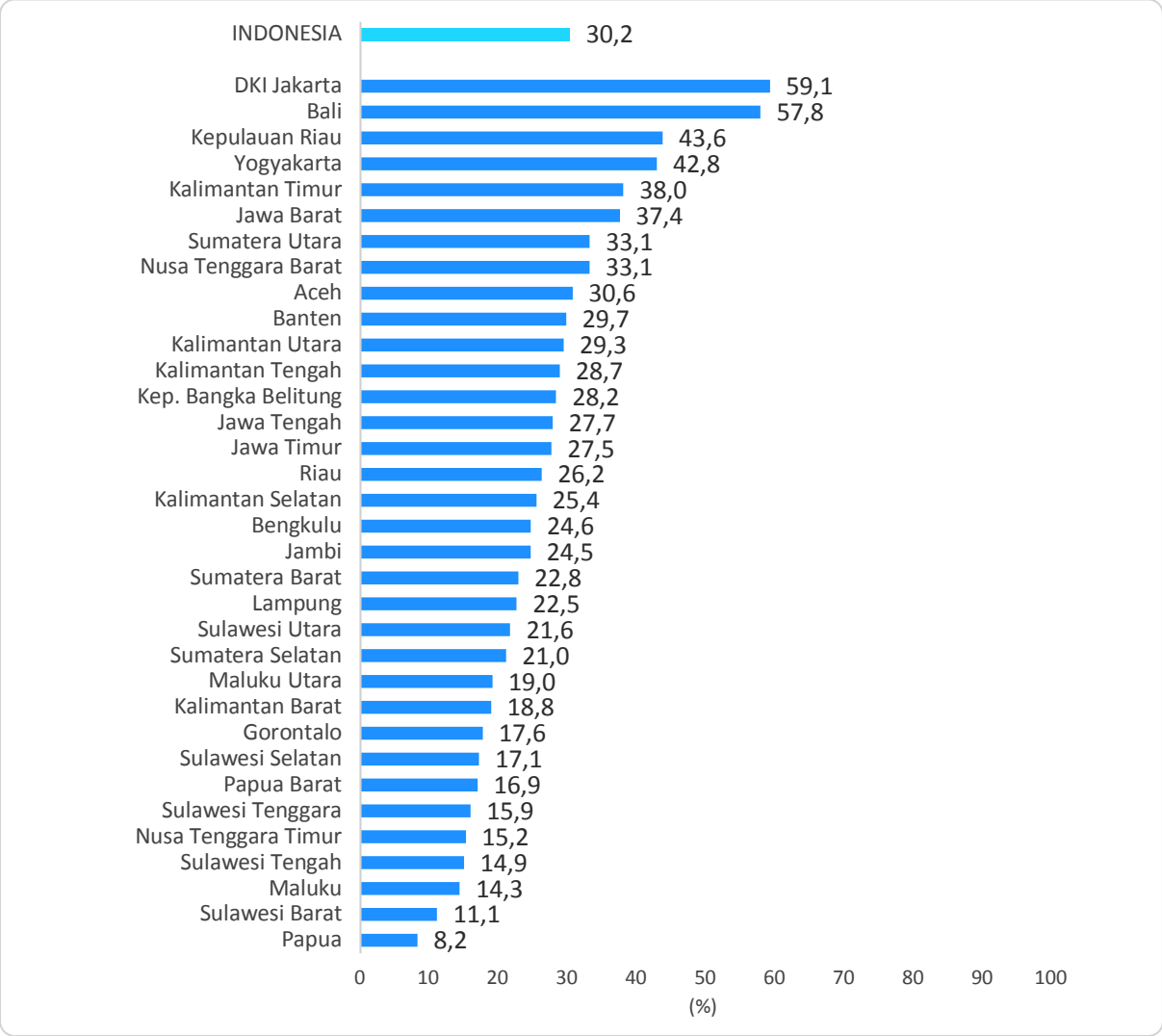

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2024, Data filter per 31 Desember 2023

Dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Kementerian Kesehatan menetapkan pemberian imunisasi rutin COVID-19 untuk kelompok tertentu. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 tentang Pemberian Imunisasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Program.

Kelompok sasaran imunisasi COVID-19 program adalah kelompok sasaran yang belum pernah menerima vaksin COVID-19 dan yang sudah menerima minimal 1 dosis vaksin COVID-19 yang terdiri dari kelompok lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, remaja usia dua belas tahun ke atas, dan kelompok usia lainnya dengan kondisi gangguan sistem imun *(immunocompromized)* sedang sampai berat. Pemberian imunisasi COVID-19 program akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia.

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi saat ini masih mengancam dunia karena dapat mengakibatkan kematian dan kecacatan. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan menjadi sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, 2017). Dengan memberikan imunisasi secara tepat waktu, maka masyarakat dapat tetap terlindung dan terjadinya wabah PD3I dapat dicegah. Untuk mendapatkan perlindungan seumur hidup, seseorang perlu mendapatkan imunisasi sesuai dosis dan jadwal secara terus menerus dan berkesinambungan. Selain **imunisasi rutin**, yaitu imunisasi bayi, imunisasi anak bawah dua tahun (baduta), imunisasi anak usia sekolah dan imunisasi dewasa, juga dikenal **imunisasi kejar, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.** Imunisasi kejar diberikan pada bayi, baduta dan anak usia sekolah yang belum mendapatkan dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi rutin. Imunisasi tambahan merupakan jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu, sementara itu imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan PD3I. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap, karena imunisasi merupakan pencegahan spesifik dari PD3I;
b. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan imunisasi;
c. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas surveilans PD3I dalam rangka meningkatkan kinerja surveilans AFP dan campak-rubela serta pengendalian difteri;
d. Menyusun, menyediakan, dan mendistribusikan petunjuk teknis surveilans PD3I
e. Menyediakan dan mendistribusikan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) surveilans PD3I;
f. Melakukan sosialisasi tentang PD3I kepada lintas program dan lintas sektor terkait serta organisasi profesi (IDI, IDAI, IBI, PPNI, PAEI, dll)
g. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Komite Ahli Nasional PD3I, untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka mencapai target eradikasi polio, eliminasi campak-rubela/CRS serta pengendalian difteri dan strategi penanggulangan KLB.
h. Melaksanakan pertemuan jejaring laboratorium difteri, campak-rubela/CRS, dan polio;
i. Melakukan pendampingan penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB termasuk PD3I ke daerah-daerah.

Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah sebagai berikut:

1. Tetanus Neonatorum

Tetanus Neonatorum (TN) merupakan penyakit tetanus yang menyerang neonatus (bayi usia <28 hari). Walaupun disebut sebagai *silent killer*, penyakit ini bisa dicegah melalui pemberian vaksin Tetanus Toxoid (TT) secara tepat waktu, selain menjaga kebersihan tempat praktik bersalin, serta proses persalinan, dan perawatan tali pusat yang bersih dan aman. Penyebab utama dari penyakit ini adalah infeksi bakteri *Clostridium tetani*, yaitu bakteri yang menghasilkan racun yang dapat menyerang otak dan sistem saraf pusat. Bakteri ini biasa ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan. Bakteri *Clostridium tetani* bisa menginfeksi seseorang, melalui luka goresan, sobekan, atau luka tusukan yang disebabkan oleh benda-benda yang terkontaminasi. Tetanus tidak dapat ditularkan dari orang ke orang, tetapi pada bayi yang baru lahir tetanus neonatorum terjadi oleh karena bakteri ini masuk ke dalam tubuh bayi melalui praktik persalinan yang tidak *higienis*, seperti memotong dan merawat tali pusat yang tidak bersih atau steril. Persalinan yang dilakukan oleh penolong persalinan dengan tangan yang tidak steril dan terkontaminasi juga merupakan faktor risiko terjadinya kasus tetanus neonatorum. Masa inkubasi dari penyakit ini adalah 3-10 hari. Tanda dan gejala biasanya muncul pada hari ke-3 sampai 28 setelah kelahiran (rata-rata 7 hari setelah kelahiran). Apabila masa inkubasi kurang dari 7 hari, biasanya memiliki prognosis penyakit lebih buruk dan mempunyai angka kematian yang tinggi.

Indonesia pada tahun 2016 berhasil mencapai status eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (TMN) dan menjadi negara terakhir di Wilayah Regional Asia Tenggara WHO yang divalidasi untuk eliminasi TMN. Eliminasi tetanus maternal dan neonatal atau *Maternal and Neonatal Tetanus Elimination* (MNTE) didefinisikan sebagai situasi dimana kejadian kasus TN < per 1000 kelahiran hidup di setiap kabupaten/kota. Saat ini Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan status eliminasi TMN. Ada 4 strategi yang direkomendasikan oleh WHO untuk dapat mempertahankan status eliminasi TMN, yaitu penguatan imunisasi rutin, pemberian imunisasi tetanus tambahan (*Supplementary Immunization Activities/SIA*) di wilayah-wilayah risiko tinggi dengan menargetkan wanita usia subur, mempromosikan persalinan dan perawatan tali pusat yang bersih, dan penguatan surveilans TN.

Pada penyakit tetanus, kekebalan tidak bisa didapat setelah terjadi infeksi. Kekebalan terhadap penyakit tetanus hanya dapat diperoleh melalui kekebalan buatan secara pasif dengan suntikan anti tetanus serum dan/atau secara aktif dengan pemberian imunisasi yang mengandung tetanus (jenis vaksin yang diberikan sesuai usia). Jadwal imunisasi tetanus dengan vaksin yang mengandung tetanus toxoid saat ini di Indonesia adalah DPT-HB-Hib (umur 2, 3, 4, dan 18 bulan), DT (SD/sederajat Kelas 1), Td 2 dosis (SD/sederajat kelas 2 dan 5), dan Td WUS (15-39 tahun).

Selama tahun 2021-2023, jumlah kasus TN secara terus menerus mengalami peningkatan. Jumlah kasus TN pada tahun 2023 sebanyak 27 kasus, sedikit meningkat dari jumlah kasus TN pada tahun 2022, yaitu sebanyak 21 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 11 kasus. Walaupun jumlah kasus meningkat, tapi angka *Case Fatality Rate (CFR)* pada tahun 2023 menurun, yaitu sebesar 48,1%. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 57%. Kasus TN tersebar pada 12 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara. Dari 12 provinsi tersebut, terdapat 8 provinsi dengan kasus kematian TN, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara. Dari 8 provinsi tersebut, terdapat 3 provinsi dengan CFR sebesar 100% yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Maluku Utara. Sebaran kasus *TN* dapat dilihat pada Gambar 6.25 di bawah ini.

GAMBAR 6.25
SEBARAN KASUS *TETANUS NEONATORUM* PER PROVINSI
TAHUN 2022 - 2023

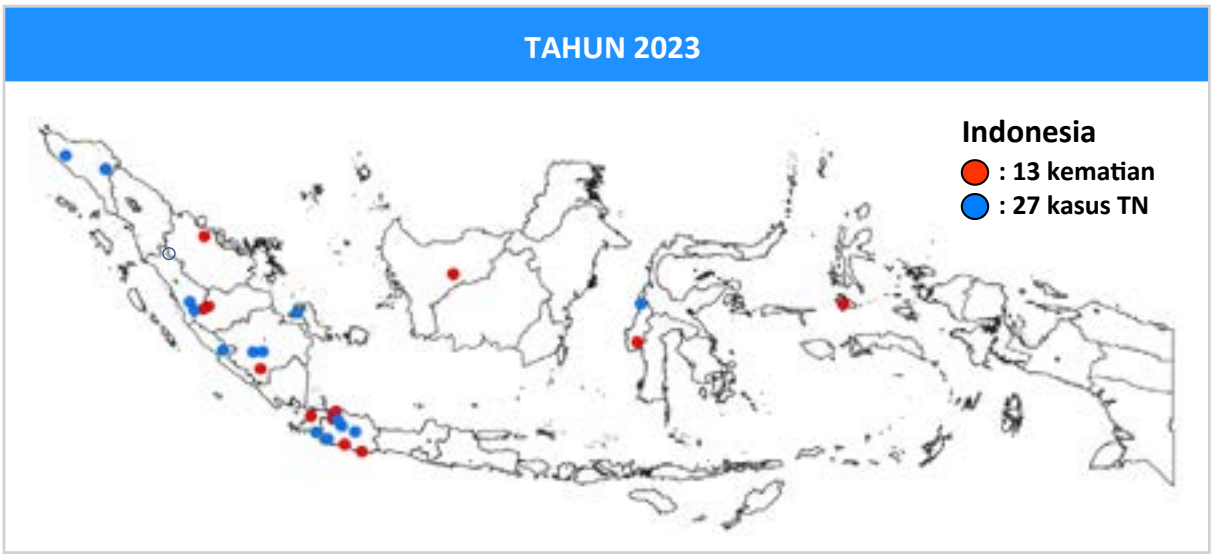

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan faktor risiko terjadinya kasus TN, dari 27 kasus yang terjadi pada tahun 2023, proporsi kasus dominan terjadi pada penderita yang tidak diimunisasi sebanyak 17 kasus (63%), penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga tradisional sebanyak 12 kasus (50%), perawatan tali pusat yang dilakukan secara lain-lain sebanyak 8 kasus (42,1%), alat pemotong tali pusat yang menggunakan bambu sebanyak 16 kasus (47,1%). Dari keseluruhan kasus TN, mayoritas penderita tidak dirawat di rumah sakit, yaitu sebanyak 25 penderita (83,3%). Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana lebih banyak penderita yang dirawat di rumah sakit dibandingkan dengan yang tidak dirawat. Jika mengacu pada proporsi kasus TN berdasarkan faktor risiko maka kita dapat melihat bahwa tingginya kenaikan kasus TN pada tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya cakupan imunisasi, praktik persalinan yang tidak higienis, dan perawatan tali pusat yang tidak bersih.

GAMBAR 6.26
PROPORSI KASUS *TETANUS NEONATORUM* MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA TAHUN 2023

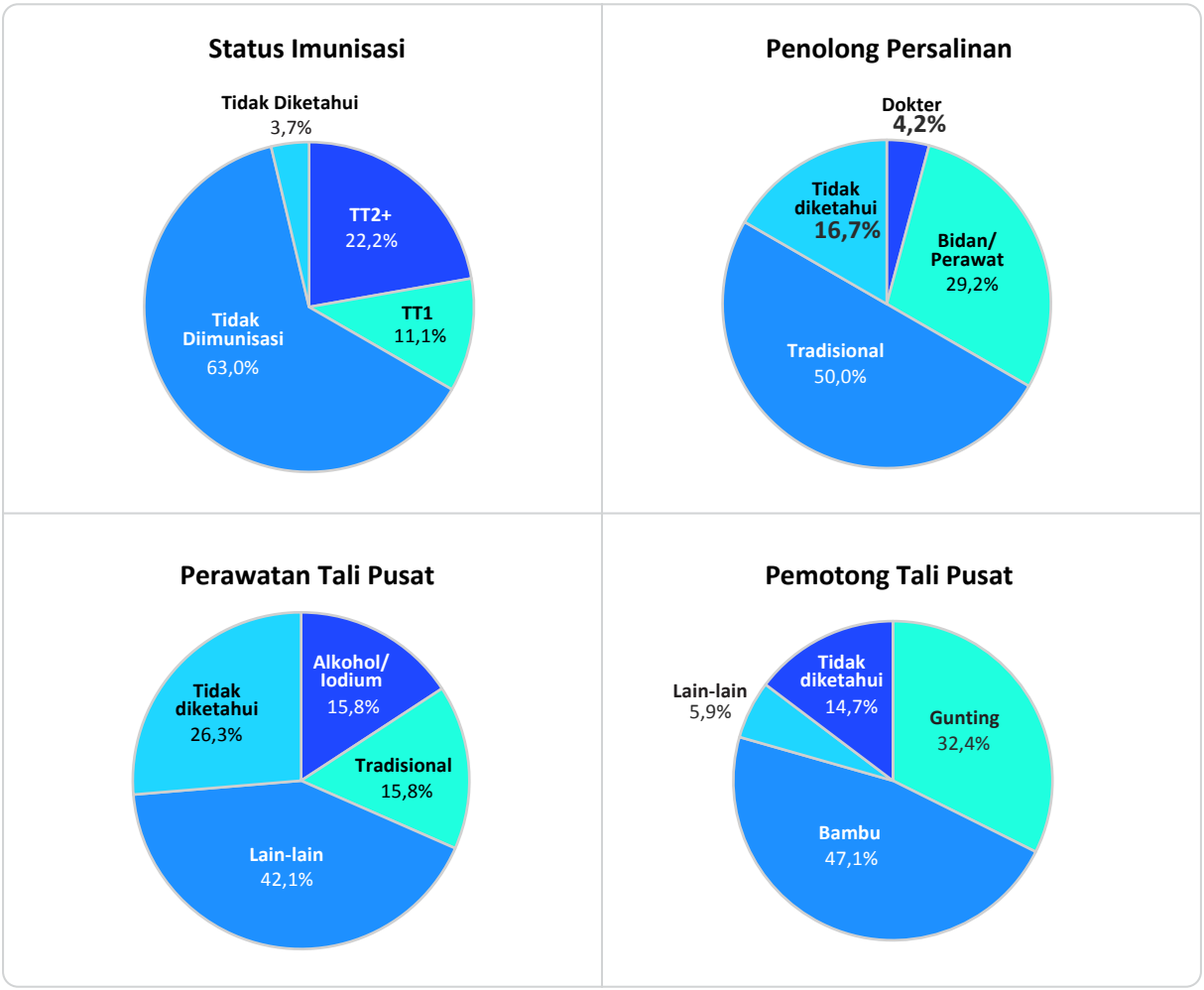

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

2. Campak

Penyakit campak yang biasanya juga dikenal sebagai morbili atau *measles* merupakan penyakit yang sangat menular disebabkan oleh virus dari *genus Morbillivirus* dan termasuk golongan *Paramyxovirus*. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Campak akan menyerang hampir 100% anak yang tidak kebal terhadap virus tersebut. Manusia diperkirakan satu-satunya reservoir, walaupun monyet dapat terinfeksi tetapi tidak berperan dalam penyebaran. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Masa inkubasi penyakit campak adalah 7-18 hari, rata-rata 10 hari. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, akan muncul ruam maculopapular, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, *ensefalitis* (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat

dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti *pneumonia*. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Suspek campak adalah setiap kasus dengan gejala minimal demam dan ruam *maculopapular*, kecuali sudah terbukti secara laboratorium disebabkan oleh penyakit lain. Penemuan kasus suspek campak merupakan salah satu strategi surveilans yang dilakukan untuk menemukan kasus campak lebih dini sehingga bisa terhindar dari komplikasi dan kematian. Pada tahun 2023 terdapat kasus suspek campak sebanyak 39.360 kasus dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah kasus suspek campak pada tahun 2022 sebanyak 21.175 kasus. Peningkatan kasus suspek campak dapat disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan cakupan imunisasi rutin anak selama pandemi COVID-19, sistem pencatatan/pelaporan, serta upaya surveilans yang lebih baik seiring dengan pelonggaran aktivitas setelah terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data, secara global sekitar 1 dari 5 orang anak tidak memiliki perlindungan terhadap campak (UNICEF, 2023). Pada tahun 2021, Indonesia masuk diantara 20 negara dengan angka tertinggi berdasarkan kategori anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali *(zero-dose)* (UNICEF, 2023). COVID-19 menyebabkan penurunan yang signifikan dalam imunisasi rutin anak, terutama karena gangguan terhadap layanan perawatan kesehatan esensial. Laporan terbaru UNICEF dalam *State of the World Children* mengungkapkan bahwa secara global, ada 67 juta anak yang tidak diimunisasi selama tiga tahun terakhir. Hal ini merupakan kemunduran terbesar dalam imunisasi rutin anak dalam 30 tahun terakhir. (UNICEF, 2023)

GAMBAR 6.27
JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2021-2023

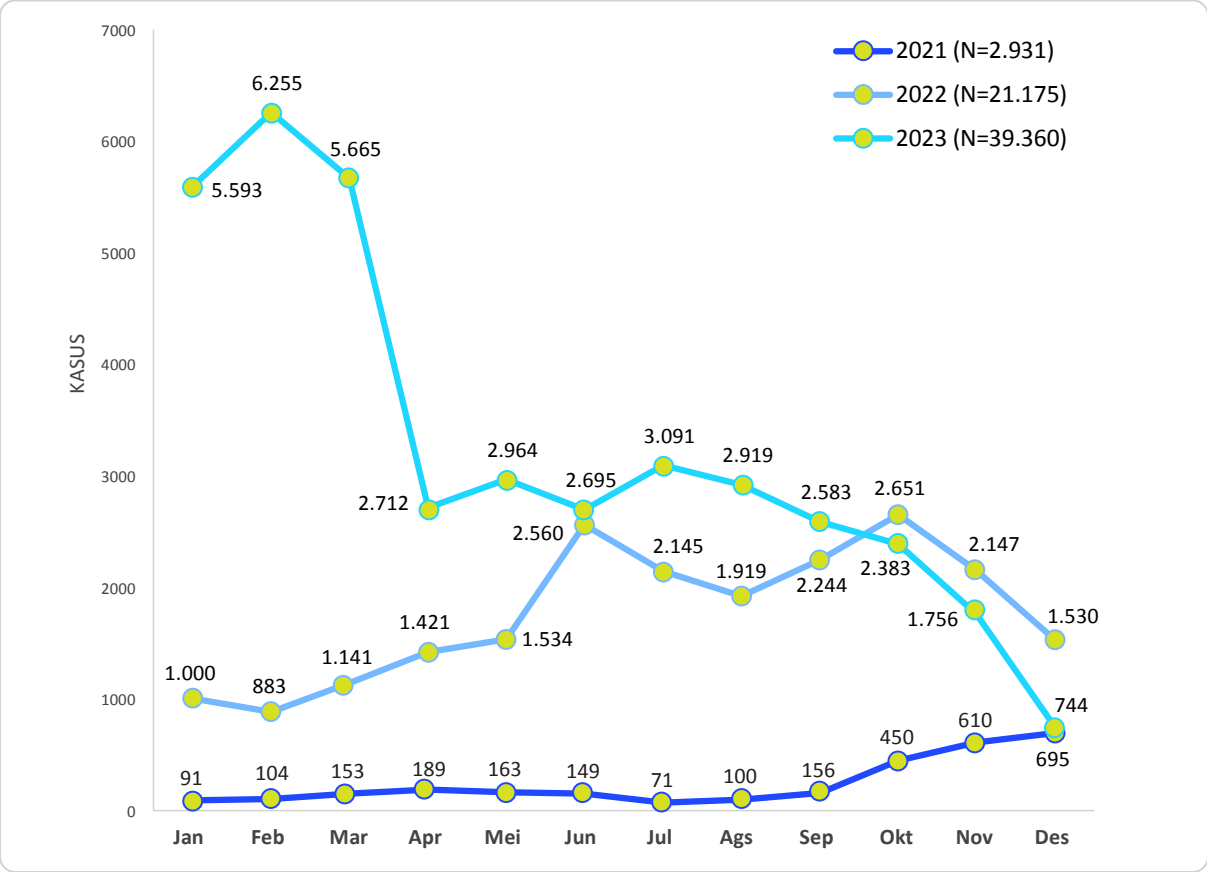

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Gambar 6.27 memperlihatkan kasus suspek campak per bulan yang terjadi di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Kasus suspek campak meningkat drastis pada awal tahun 2023. Kondisi ini mulai menurun pada bulan April, dan cenderung menurun sampai dengan Desember 2023. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kondisi ini cukup berbeda, dimana pada tahun 2021 dan 2022 jumlah kasus suspek campak di akhir tahun cenderung meningkat. Penurunan pada akhir tahun 2023 ini disebabkan oleh penemuan kasus dan pelaporan yang kurang optimal.

Upaya surveilans untuk menemukan kasus suspek campak, ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosa kasus campak. Pada tahun 2023, dari seluruh kasus suspek campak yang dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh data kasus campak konfirmasi laboratorium sebanyak 10.308 kasus (26,2% dari kasus suspek campak), dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kasus campak tahun 2023 mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan kasus campak tahun 2022 sebanyak 4.844 kasus. Hal ini disebabkan oleh cakupan imunisasi Campak Rubela *(MR)* yang belum tinggi dan merata.

Gambar 6.28, memperlihatkan perbandingan sebaran kasus campak konfirmasi laboratorium pada tahun 2022 dan 2023.

GAMBAR 6.28
PETA SEBARAN KASUS CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2022 - 2023

TAHUN 2022

4.844 Kasus **campak konfirmasi laboratorium** terdapat di **250 Kab/Kota di 32 Provinsi**

TAHUN 2023

10.308 Kasus **campak konfirmasi laboratorium** terdapat di **354 Kab/Kota di 38 Provinsi**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Gambar 6.29 memperlihatkan proporsi kasus campak berdasarkan kelompok umur pada tahun 2023. Proporsi kasus campak terbesar pada kelompok umur 1-4 tahun sebanyak 4.481 kasus (43,5%), diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 3.352 (32,5%), kelompok umur <1 tahun sebesar 10,7%. Proporsi kasus paling rendah ditemukan pada kelompok umur >14 tahun sebesar 7,4%, diikuti 10-14 tahun sebesar 5,9%. Kecenderungan ini sama dengan tahun sebelumnya.

GAMBAR 6.29
PROPORSI KASUS CAMPAK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2023

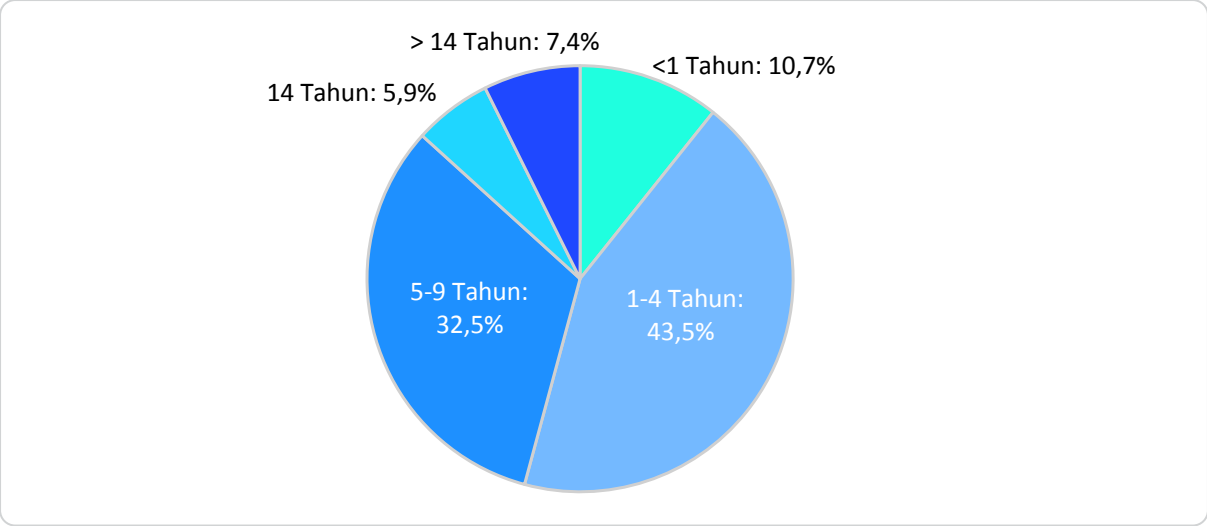

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Gambar 6.30 memperlihatkan proporsi kasus campak konfirmasi laboratorium yang sudah mendapatkan vaksinasi. Di Indonesia, proporsi kasus campak yang sudah mendapatkan imunisasi sebesar 17,2%. Proporsi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 6,7%. Mengacu pada data tersebut, maka dapat diartikan bahwa dari seluruh kasus campak konfirmasi laboratorium, ada sebanyak 82,8% kasus yang belum mendapatkan vaksin campak. Cakupan imunisasi campak pada kasus campak, masih jauh dari target cakupan imunisasi campak dosis pertama dan kedua minimal 95%. Dari 38 provinsi dengan kasus campak konfirmasi laboratorium, urutan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (100%), diikuti oleh Sulawesi Utara (60%), dan Bengkulu (47,1%). Proporsi Provinsi Nusa Tenggara Timur 100% karena kasus campak konfirmasi berjumlah 1 orang dan sudah mendapatkan vaksinasi. Ada 4 provinsi dengan proporsi kasus campak yang diimunisasi 0%, yaitu Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Maluku, dan Kalimantan Tengah.

GAMBAR 6.30
PERSENTASE KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM YANG DIIMUNISASI DI INDONESIA TAHUN 2023

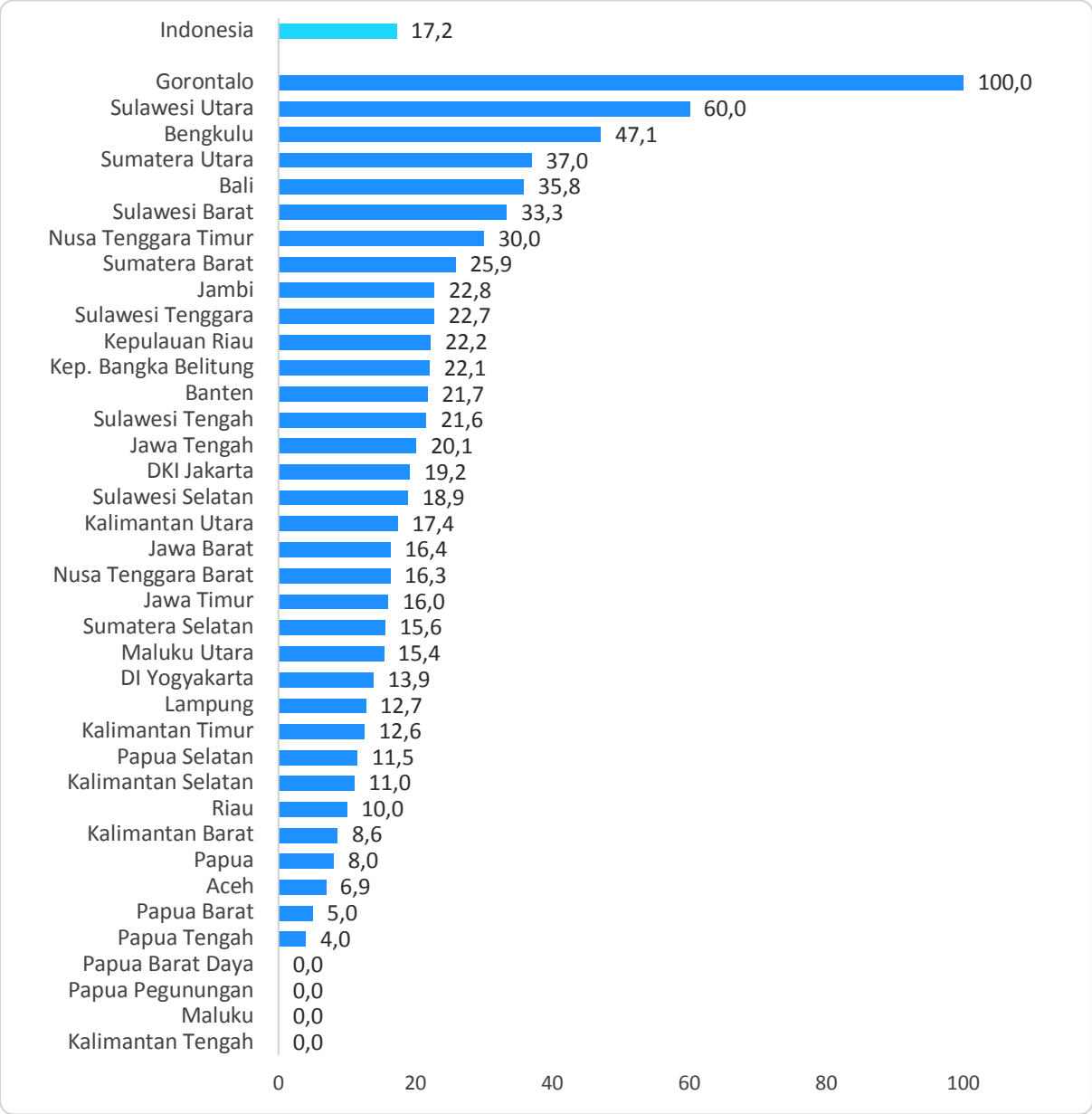

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Apabila terjadi 5 atau lebih kasus suspek campak dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok, dan telah dibuktikan adanya hubungan epidemiologis di suatu daerah, maka daerah tersebut dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) suspek campak. Setiap kasus suspek campak dilakukan penyelidikan epidemiologi menyeluruh (*fully investigated)* dalam waktu 2x24 jam.

Pada tahun 2023, dari 39.360 kasus suspek campak yang terjadi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, terjadi kejadian KLB suspek campak yang terbagi dalam 137 kali di 24 provinsi dengan jumlah kasus sebanyak 2.268. Kejadian KLB suspek campak pada tahun 2023 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kejadian KLB suspek campak pada tahun 2022 sebanyak 79 kali di 18 provinsi dengan jumlah kasus sebanyak 1.101. Dari 38 provinsi, terdapat 11 provinsi yang

mengalami kejadian KLB suspek campak pada tahun 2022 dan 2023 yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. (Gambar 6.31).

GAMBAR 6.31
FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022 - 2023

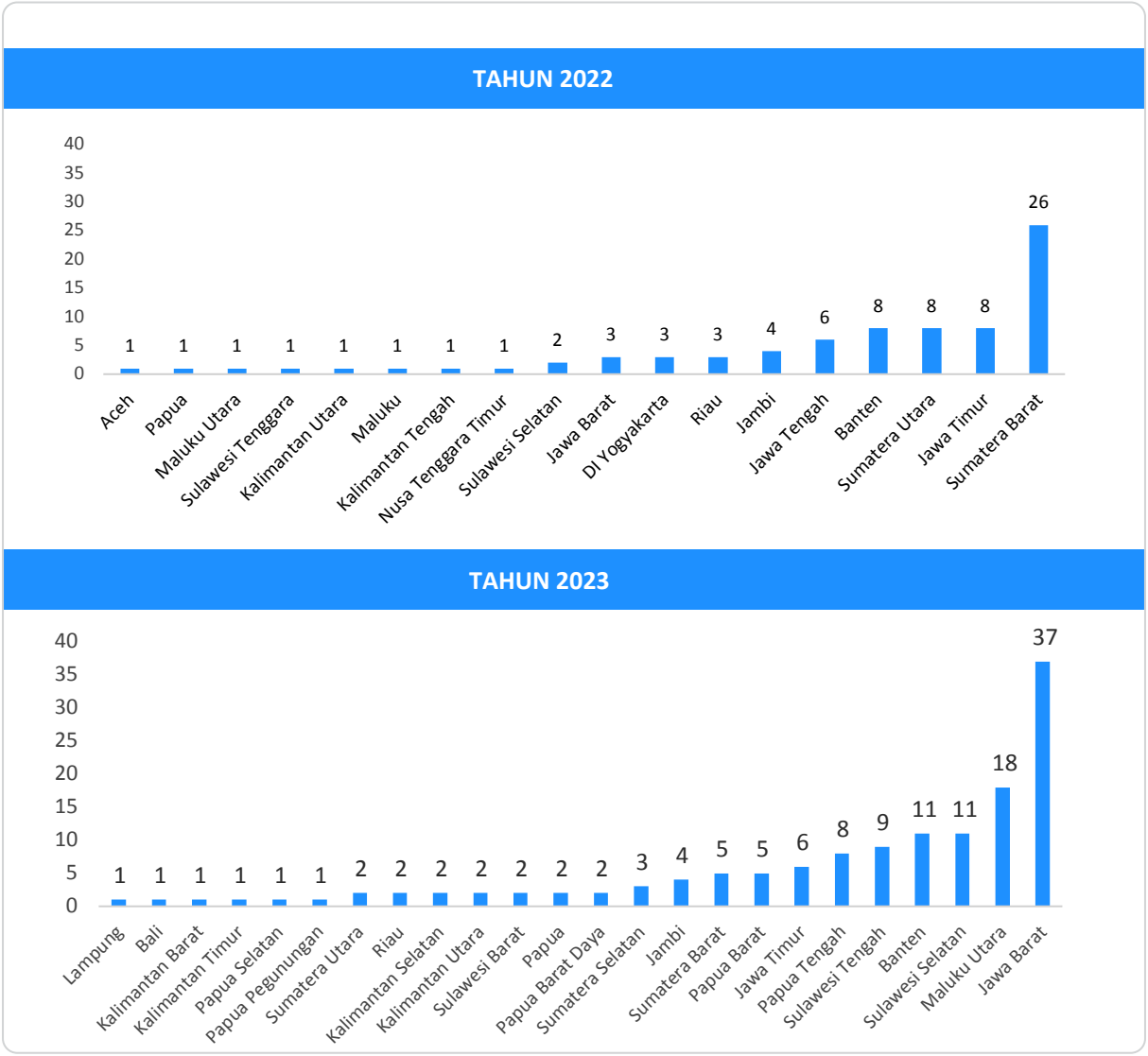

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

KLB suspek campak paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 37 kali. Dari keseluruhan KLB suspek campak, kasus kematian terbanyak ditemukan di Provinsi Papua Tengah sebanyak 4 kasus, diikuti oleh Papua Barat (2 kasus), serta Jambi dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 1 kasus. Walaupun kasus kematian hanya terjadi di Provinsi Banten, namun angka kematian di provinsi-provinsi tersebut berkisar antara 1-2% dari total kasus di wilayah masing-masing. Pelaporan penanganan kasus KLB yang ditangani <24 jam sudah 100%, sehingga kasus KLB suspek campak dapat ditangani lebih cepat dan tanggap.

Pada Gambar 6.32, dari seluruh KLB suspek campak yang dilakukan pemeriksaan laboratorium maka dapat dilihat distribusi KLB yang terjadi. Kejadian KLB campak konfirmasi laboratorium terjadi sebanyak 94 kali dengan kasus sebanyak 1.907 (84,5%), kejadian KLB rubela sebanyak 3 kali dengan kasus sebanyak 13 (0,6%), KLB gabungan rubela dan campak sebanyak 1 kali dengan kasus sebanyak 4 (0,2%), dan yang bukan merupakan KLB kasus campak/rubella/gabungan sebanyak 2 kali dengan kasus sebanyak 16 (0,7%). Hingga data disajikan, dari keseluruhan kasus KLB suspek campak masih ada kasus yang statusnya masih pending laboratorium (tidak dilakukan uji laboratorium) sebesar 12,1% dan kasus yang tanpa spesimen sebesar 2%. Hal ini disebabkan oleh orang tua kasus tidak mau anaknya diambil spesimen dan petugas yang belum menjelaskan secara maksimal.

GAMBAR 6.32
DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM DI INDONESIA TAHUN 2023

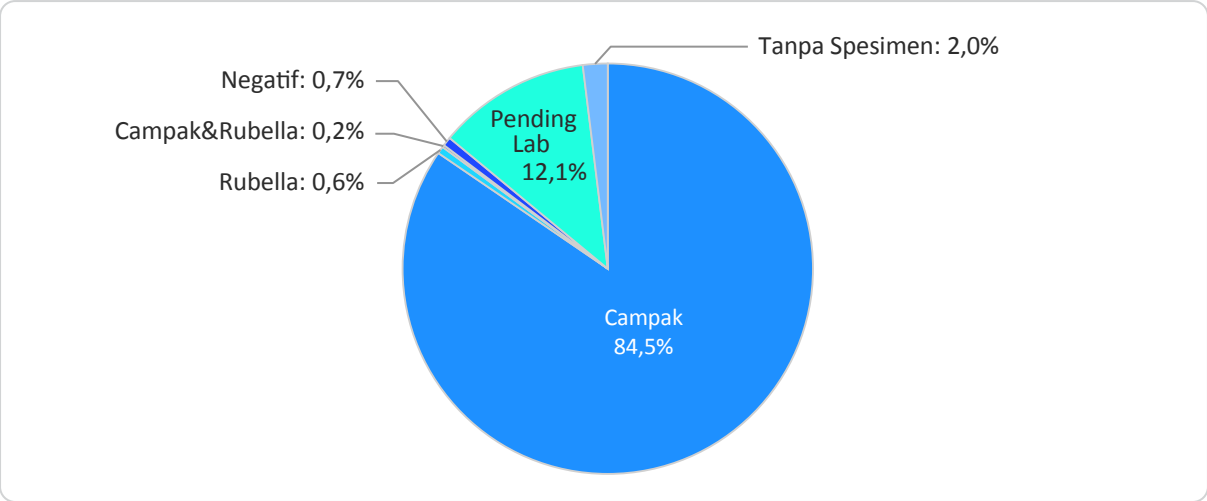

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

3. Difteri

Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diptheriae strain toksigenik*. Penularan terjadi secara droplet (percikan ludah) dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak erat langsung dari lesi di kulit. Apabila tidak diobati dan kasus tidak mempunyai kekebalan, angka kematian sekitar 50%, sedangkan dengan terapi angka kematiannya sekitar 10% (*CDC Manual for the Surveilance of Vaccine Preventable Diseases*, 2017). Angka kematian difteri rata rata 5 – 10% pada anak usia kurang 5 tahun dan 20% pada dewasa diatas 40 tahun (CDC Atlanta, 2016).

Difteri merupakan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/Wabah seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 tahun 2010. Setiap satu kasus suspek difteri dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai demam atau tanpa demam dan adanya *pseudomembran* putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi harus dilaporkan dalam 24 jam dan dilakukan segera penanggulangan untuk memutuskan rantai penularan. Kegiatan penanggulangan KLB difteri dilakukan dengan melibatkan program-program terkait yaitu surveilans epidemiologi, program imunisasi, klinisi, laboratorium dan program kesehatan lainnya serta lintas sektor terkait. (Pedoman Surveilans Difteri, 2019)

Pada tahun 2022, kasus difteri menyebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali 6 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Jumlah kasus difteri pada tahun 2023 sebanyak 949 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dari kasus difteri yang terjadi pada tahun 2022, yaitu sebanyak 541 kasus.

GAMBAR 6.33
SEBARAN KASUS DIFTERI DI INDONESIA

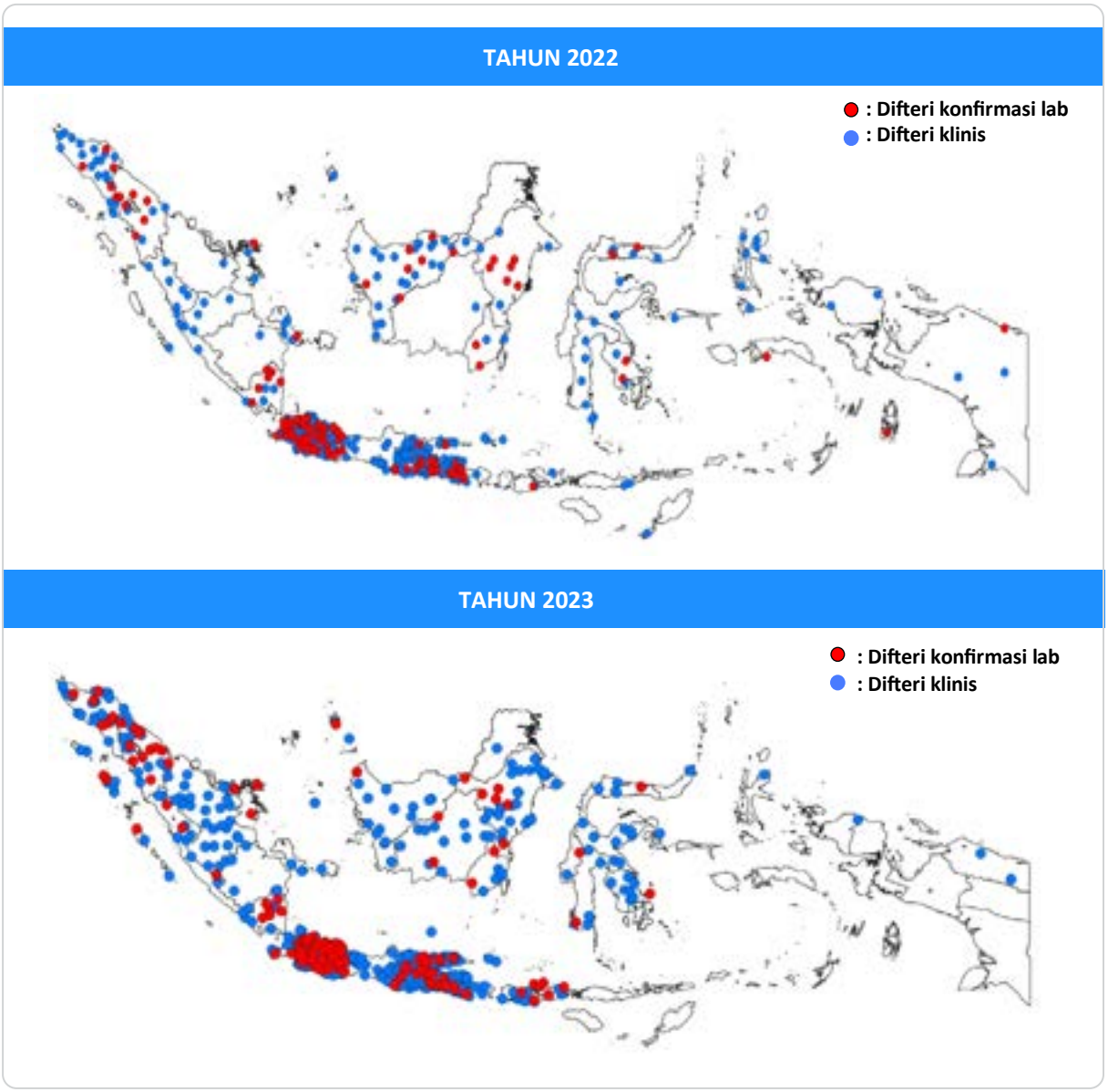

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Selama 2 tahun terakhir, jumlah kematian akibat difteri mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2022 jumlah kematian sebanyak 46 kasus, menjadi 68 kasus pada tahun 2023. Dari 38 provinsi dengan kasus difteri, terdapat 16 provinsi diantaranya ditemukan kasus kematian akibat difteri. Kasus kematian paling tinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 21 kasus, diikuti Sumatera Utara sebanyak 10 kasus dan Jawa Timur sebanyak 9 kasus. Pada tahun 2023, angka *CFR*

pada kasus difteri di Indonesia sebesar 7,2%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 9%. Dari 16 provinsi dengan kasus meninggal difteri, angka *CFR* paling tinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 37,5%, diikuti Sulawesi Tengah sebesar 33,3% dan Sumatera Utara sebesar 30,3%.

GAMBAR 6.34
KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA
TAHUN 2023

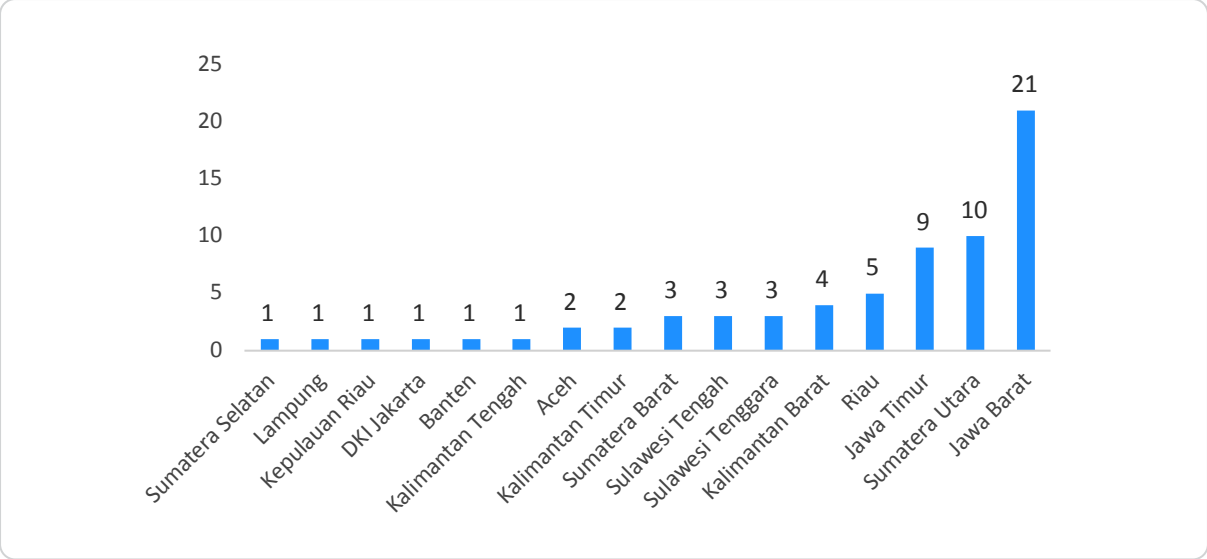

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

KLB difteri terjadi jika suatu wilayah kab/kota dinyatakan KLB difteri jika ditemukan satu suspek difteri dengan konfirmasi laboratorium kultur positif atau jika ditemukan suspek difteri yang mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus kultur positif.

Kebijakan dalam penanggulangan difteri antara lain:

1. Setiap KLB harus dilakukan penyelidikan dan penanggulangan sesegera mungkin untuk menghentikan penularan dan mencegah komplikasi dan kematian
2. Dilakukan tatalaksana kasus di rumah sakit dengan menerapkan prinsip kewaspadaan seperti menjaga kebersihan tangan, penempatan kasus di ruang tersendiri/isolasi, dan mengurangi kontak erat kasus dengan orang lain
3. Setiap suspek difteri dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kultur
4. Setiap kontak erat diberi kemoprofilaksis, dan imunisasi pada saat penyelidikan epidemiologi
5. Pengambilan spesimen pada kontak erat dapat dilakukan jika diperlukan sesuai dengan kajian epidemiologi
6. Setiap suspek difteri dilakukan *Outbreak Response Immunization* (*ORI*) atau respon pemberian imunisasi pada KLB sesegera mungkin. Sebaiknya luas wilayah *ORI* dilakukan untuk satu (1) kabupaten/kota tetapi jika tidak memungkinkan karena sesuatu hal maka *ORI* minimal dilakukan satu (1) kecamatan dengan sasaran sesuai kajian epidemiologi dan interval *ORI* 0-1-6 bulan
7. *ORI* dilanjutkan sampai selesai walaupun status KLB difteri di suatu wilayah kabupaten/kota dinyatakan telah berakhir.

4. Polio dan *Acute Flaccid Paralysis (AFP)*/Lumpuh Layu Akut

Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus poliomyelitis. Penyakit ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. Satu dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai). Diantara yang lumpuh, 5-10% akan berakhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan.

Pada bulan Mei 2012, sidang World Health Assembly (WHA) mendeklarasikan bahwa pencapaian eradikasi polio merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat global dan menetapkan agar Direktur Jenderal WHO menyusun strategi eradikasi polio yang komprehensif. Dokumen Rencana Strategis 2013-2018 dan Inisiatif Pencapaian Eradikasi Polio Global, telah disetujui oleh Badan Eksekutif WHO pada Januari 2013. Dalam rencana strategis tersebut dibutuhkan komitmen global bahwa setiap negara perlu melaksanakan strategis yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian dari *trivalent Oral Polio Vaccine* (*tOPV*) menjadi *bivalent Oral Polio Vaccine* (*bOPV*), introduksi *Inactivated Polio Vaccine* (*IPV*) dan penarikan seluruh vaksin polio oral (*OPV*), surveilans *AFP* (*Acute Flaccid Paralysis*), dan pengamanan virus polio di laboratorium (*Laboratory Containment*). Sebagai kelanjutannya, WHO juga telah menyusun Rencana Strategis 2019 – 2023 yang berisi 3 tujuan utama yaitu eradikasi, integrasi serta sertifikasi dan pengamanan virus polio.

Pada bulan November 2018, dilaporkan satu kasus polio akibat *vaccine derived polio virus* (*VDPV*) tipe 1 di Yahukimo, Papua. Penyelidikan yang dilakukan selanjutnya menemukan bahwa dua spesimen tinja dari anak sehat di sekitar kasus juga positif untuk jenis virus yang sama, yang membuktikan bahwa virus tersebut bersirkulasi. Sebagai respon, dilakukan sub PIN di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan *bOPV*. KLB polio akibat VDPV bisa terjadi di mana saja bila cakupan imunisasi polio rendah selama bertahun-tahun. Untuk menghindari kasus serupa, imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layu mendadak (*acute flaccid paralysis*/*AFP*) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan.

Penemuan adanya transmisi virus polio dapat dilakukan melalui surveilans AFP, dimana semua kasus lumpuh layu akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati. Surveilans AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio. Surveilans *AFP* juga penting untuk dokumentasi mengenai tidak adanya virus polio sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

Indikator surveilans AFP adalah *non-polio AFP rate,* yaitu kasus lumpuh layu akut yang terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh ruda paksa yang diduga disebabkan oleh virus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Kementerian Kesehatan menetapkan target *non-polio AFP rate* sebesar minimal 2/100.000 populasi penduduk usia kurang dari 15 tahun. Namun, dikarenakan adanya KLB pada tahun 2022 sehingga target *non-polio AFP rate* tahun 2023 dinaikkan menjadi minimal 3/100.000 populasi penduduk usia <15 tahun. Pada tahun 2023, secara nasional *non-polio AFP rate* sebesar 6,18/100.000 populasi penduduk kurang dari 15 tahun. Dapat diartikan bahwa secara nasional, Indonesia telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan kinerja surveilans AFP untuk menemukan kasus AFP sudah sangat baik sehingga diharapkan tidak ada kasus AFP yang belum terjaring. Angka capaian tahun 2023 ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3,05/100.000 populasi penduduk kurang dari 15 tahun.

Sejak tahun 2007 hingga 2023, secara umum target *non-polio AFP rate* sebesar 2 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun telah tercapai, kecuali pada tahun 2016, 2020, dan 2021. Sejak tahun 2021 capaian *non-polio AFP rate* terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi tahun 2023, yaitu 6,18 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun. Persentase spesimen adekuat sejak tahun 2007-2016 telah mencapai target sebesar 80%. Namun tahun-tahun berikutnya cenderung berada di bawah target kecuali pada tahun 2020. Performa surveilans *AFP* di Indonesia pada tahun 2007-2023 dapat dilihat pada Gambar 6.35.

GAMBAR 6.35
PERFORMA SURVEILANS AFP DI INDONESIA
TAHUN 2007 – 2023

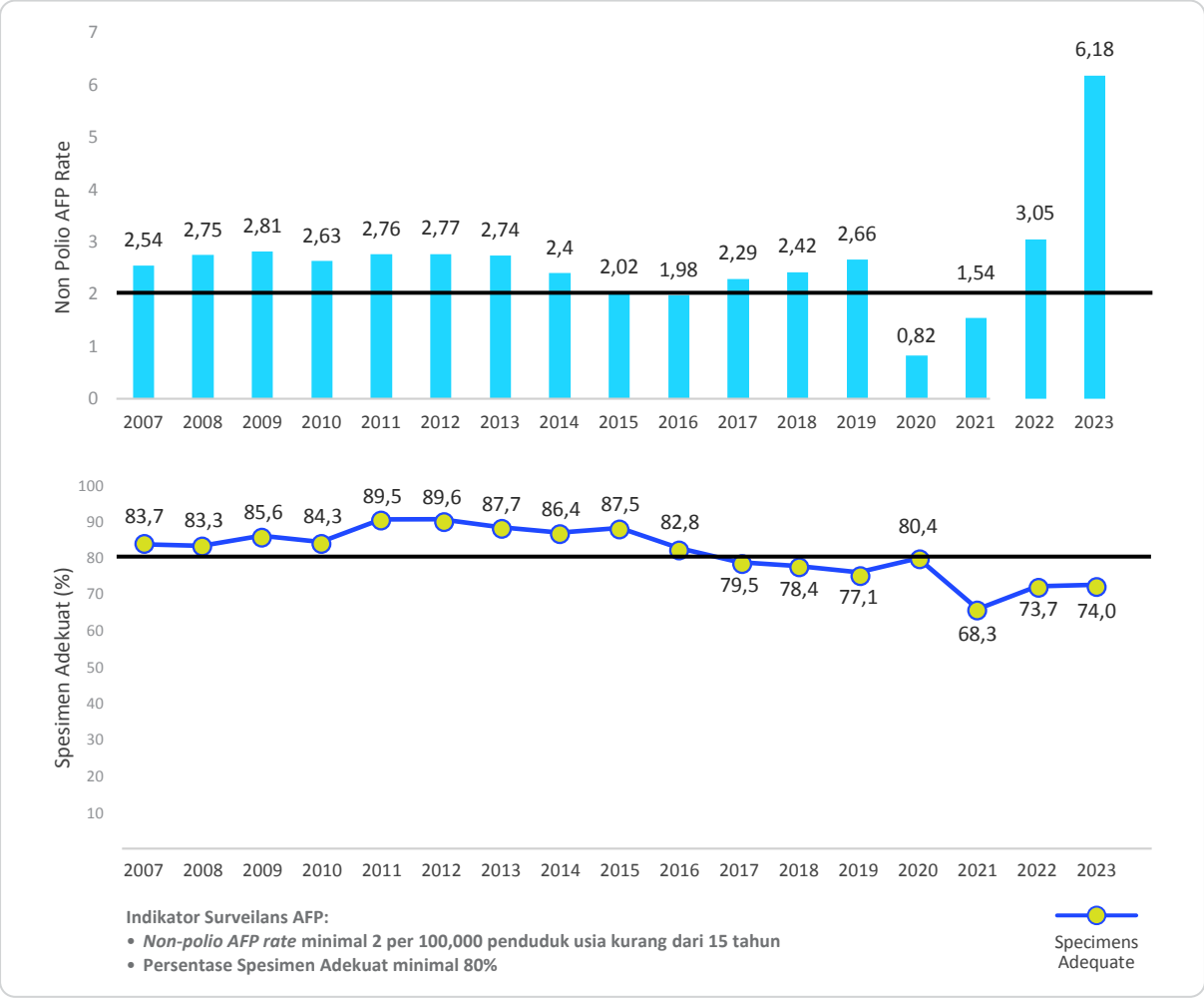

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023 seluruh provinsi telah melaporkan kasus *AFP,* kecuali Papua Pegunungan. Dari 38 provinsi di Indonesia, hampir semua provinsi sudah mencapai standar minimal penemuan *non-polio AFP rate* sebesar ≥3 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun, kecuali 7 provinsi. Angka capaian tertinggi ada di Provinsi Maluku Utara, diikuti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Tujuh provinsi yang belum berhasil mencapai standar minimal yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Capaian *non-polio AFP rate* yang paling rendah adalah Papua Selatan sebesar 0,6 per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun.

GAMBAR 6.36
NON POLIO *AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK <15 TAHUN
DI INDONESIA TAHUN 2023

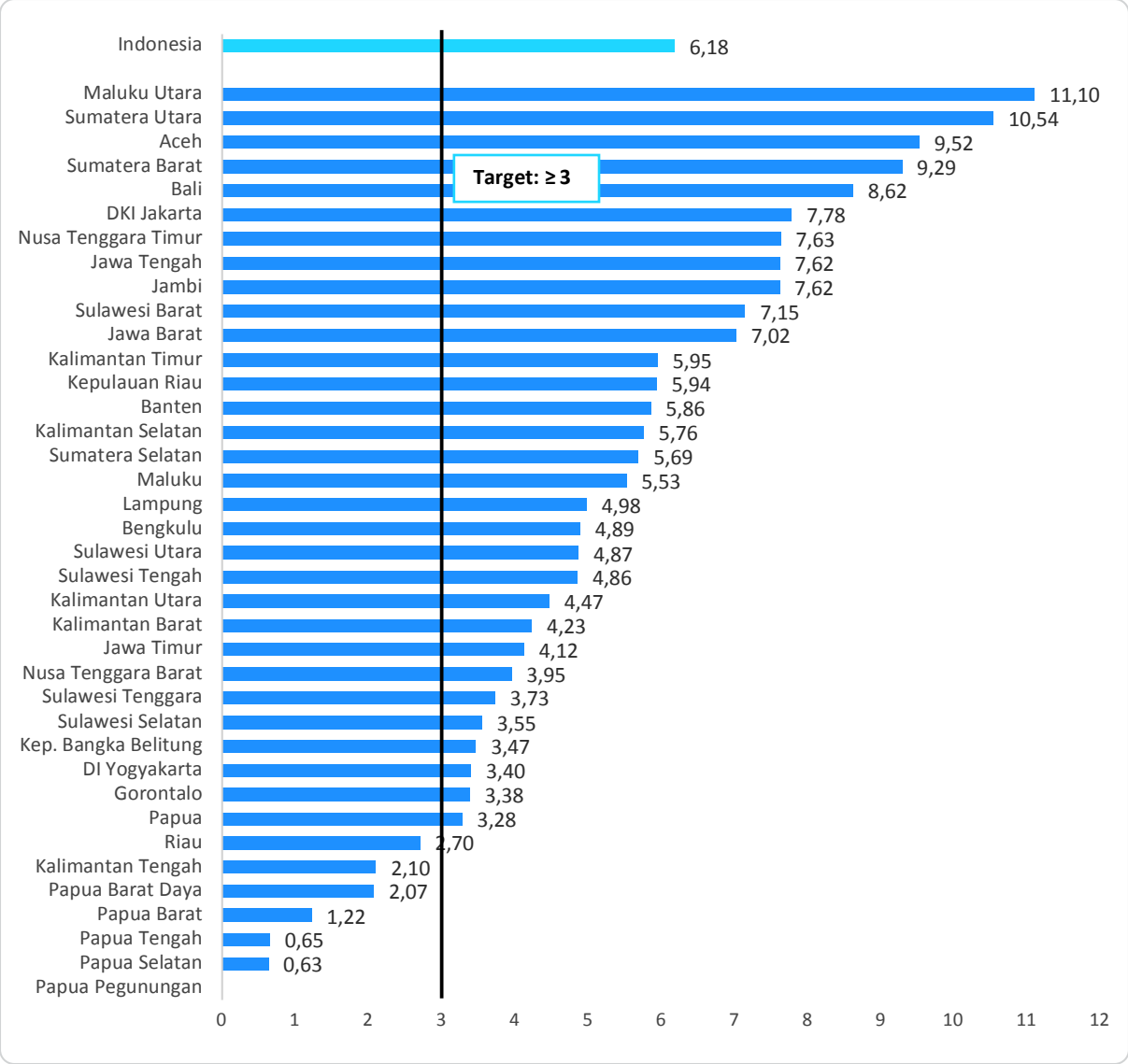

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024

Pemeriksaan spesimen tinja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya virus polio pada kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan surveilans AFP. Semua kasus AFP seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis dan investigasi virologi, dan setidaknya 80% kasus AFP harus memenuhi standar spesimen adekuat dengan persyaratan yaitu volume cukup 8-10 gr, spesimen kondisi baik (tidak bocor, suhu dingin 4-8˚C), dua spesimen didapatkan ≤14 hari setelah munculnya kelumpuhan dengan waktu pengambilan spesimen pertama dan kedua jeda waktu minimal 24 jam.

Persentase spesimen adekuat di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 74% dari target sebesar 80%, walaupun sudah sedikit meningkat dibandingkan dengan persentase spesimen adekuat pada tahun 2022 sebesar 73,7%. Selama 6 tahun terakhir pemeriksaan spesimen tinja dengan spesimen adekuat cenderung tidak mencapai target. Pada tahun 2023, dari 38 provinsi hanya terdapat 6 provinsi (15,8%) yang telah mencapai standar spesimen adekuat. Provinsi dengan persentase spesimen adekuat *AFP* yang tertinggi adalah Jawa Tengah sebesar 89,4%. Provinsi dengan persentase spesimen adekuat yang paling rendah adalah Papua Selatan sebesar 0%. Persentase spesimen adekuat AFP menurut provinsi tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 6.37.

GAMBAR 6.37
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

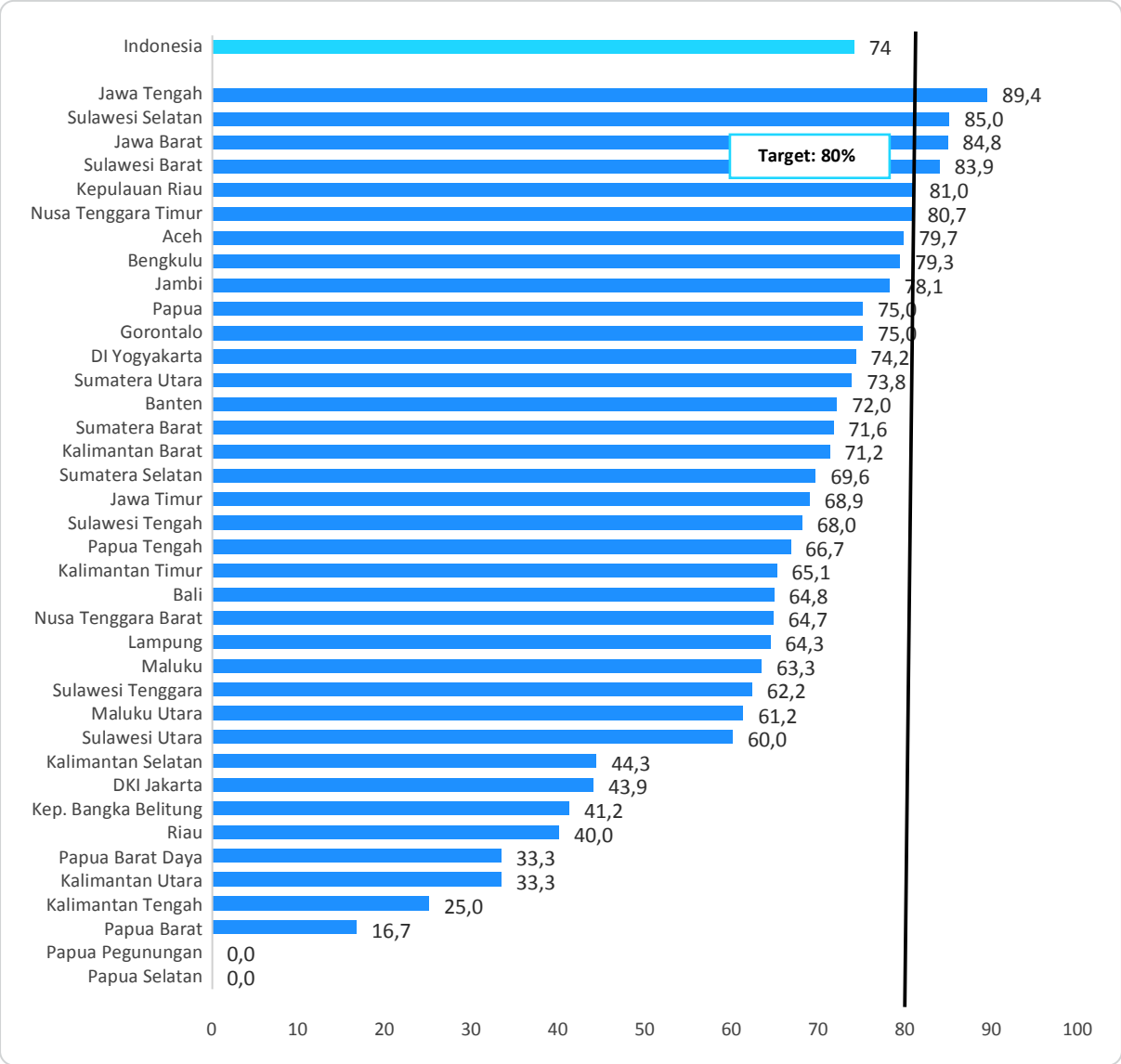

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 68-70.

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh vektor. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah Dengue. Kasus DBD pertama di Indonesia dilaporkan di Surabaya pada tahun 1968. Sejak pertama kali ditemukan kasus ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Vektor penular penyakit ini berasal dari jenis nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Nyamuk *Aedes* menyukai genangan atau tempat penampungan air seperti selokan, vas atau pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam renang, atau tempat sampah sebagai tempat perindukan. Karakteristik vektor penular menentukan persebaran dan waktu kejadian infeksi. Habitat nyamuk *Aedes* pada umumnya berada di wilayah dengan iklim tropis, curah hujan tinggi, serta suhu panas dan lembab. Karakteristik dan perilaku vektor tersebut dapat menjelaskan adanya kecenderungan peningkatan kasus DBD pada musim penghujan seiring dengan bermunculannya tempat perindukan. Selain mempengaruhi banyaknya kasus, karakteristik dan perilaku nyamuk *Aedes* juga menjadi landasan upaya pengendalian penyakit DBD melalui intervensi lingkungan dan perilaku individu dan masyarakat. Upaya pengendalian tersebut di antaranya melalui kampanye 3M (Menguras, Menutup, dan Memanfaatkan) dan 3M plus (memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, tidak menggantung pakaian di dalam kamar, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air).

a. Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Diagnosa kasus DBD ditegakkan dengan anamnesis perjalanan penyakit, gejala klinis, pemeriksaan fisik termasuk tanda vital dan tanda perdarahan, serta pemeriksaan penunjang konfirmasi diagnosis. Pasien terduga DBD akan menjalani pemeriksaan laboratorium yang megindikasikan penurunan trombosit < 100.000/mm3 dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit > 20%.

Pada tahun 2023 terdapat 114.720 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 894 kasus. Kasus maupun kematian akibat DBD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 143.266 kasus dan 1.237 kematian.

Dalam pengendalian penyakit DBD, digunakan beberapa indikator untuk kegiatan pemantauan. Dua indikator utama yang digunakan adalah *Incidence Rate* per 100.000 penduduk dan *Case Fatality Rate*.

GAMBAR 6.38
***INCIDENCE RATE* PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA TAHUN 2013-2023**

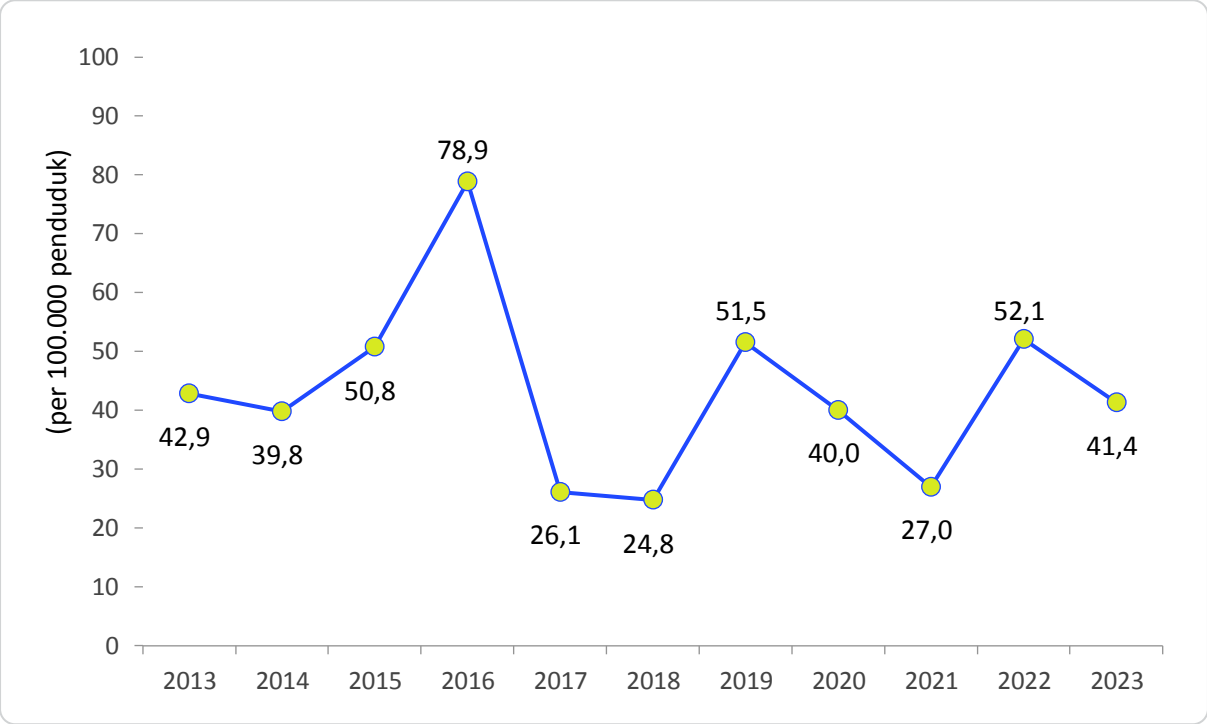

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk menunjukkan kecenderungan penurunan dari 52,1 pada tahun 2022 menjadi 41,4 pada tahun 2023.

GAMBAR 6.39
ANGKA KESAKITAN (*INCIDENCE RATE*/IR) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

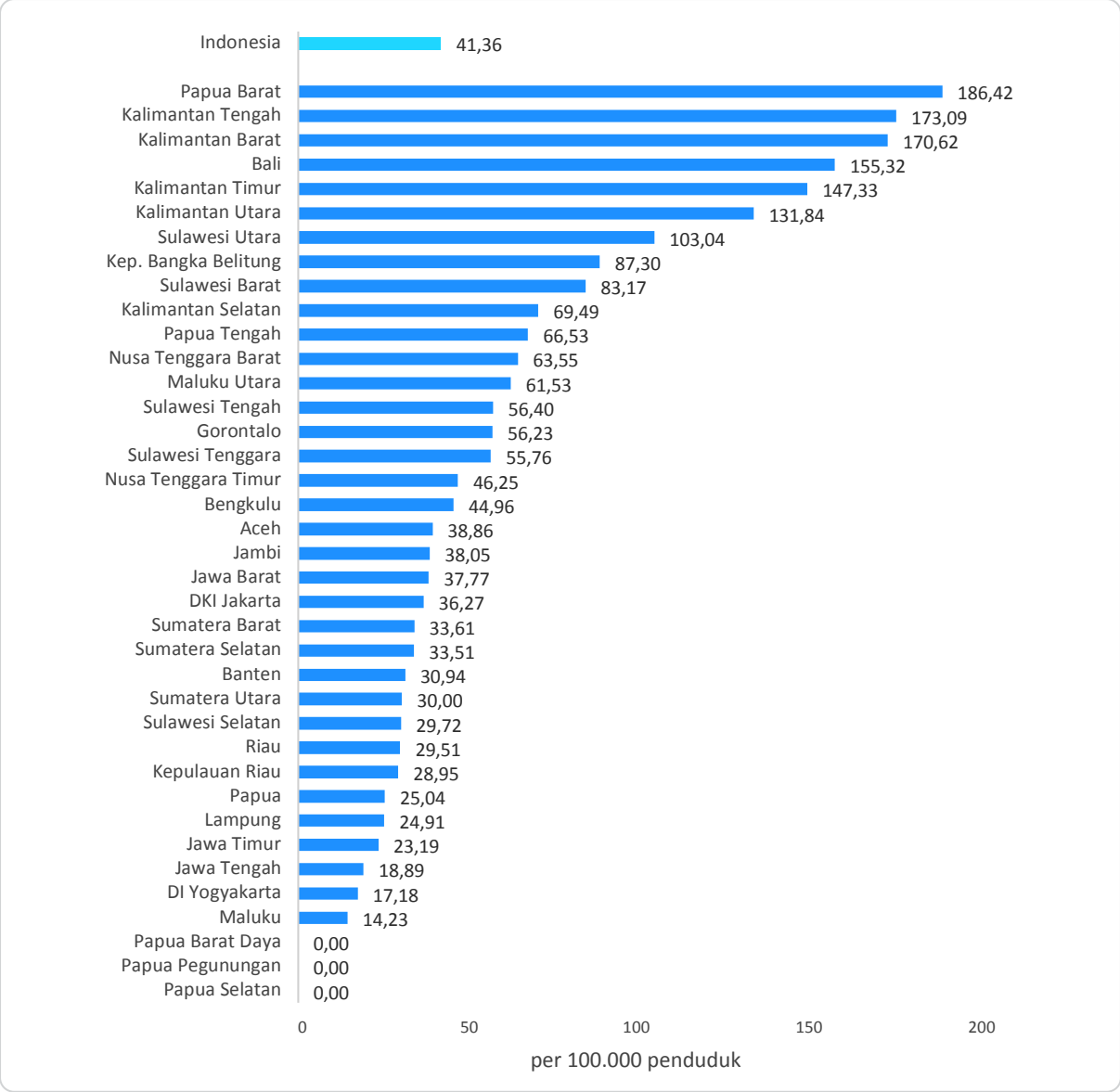

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023, sebanyak 35 provinsi atau 92% memiliki IR DBD >10 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan IR DBD tertinggi yaitu Provinsi Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Secara Nasional IR DBD Tahun 2023 sebesar 41,4 per 100.000 penduduk, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional sebesar ≤ 10 per 100.000 penduduk.

Kasus DBD yang terlambat mendapatkan perawatan dapat menyebabkan fatalitas seperti kematian. Proporsi kematian terhadap seluruh kasus DBD atau yang dikenal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pengendalian DBD.

GAMBAR 6.40
***CASE FATALITY RATE* DEMAM BERDARAH DENGUE**
DI INDONESIA TAHUN 2013-2023

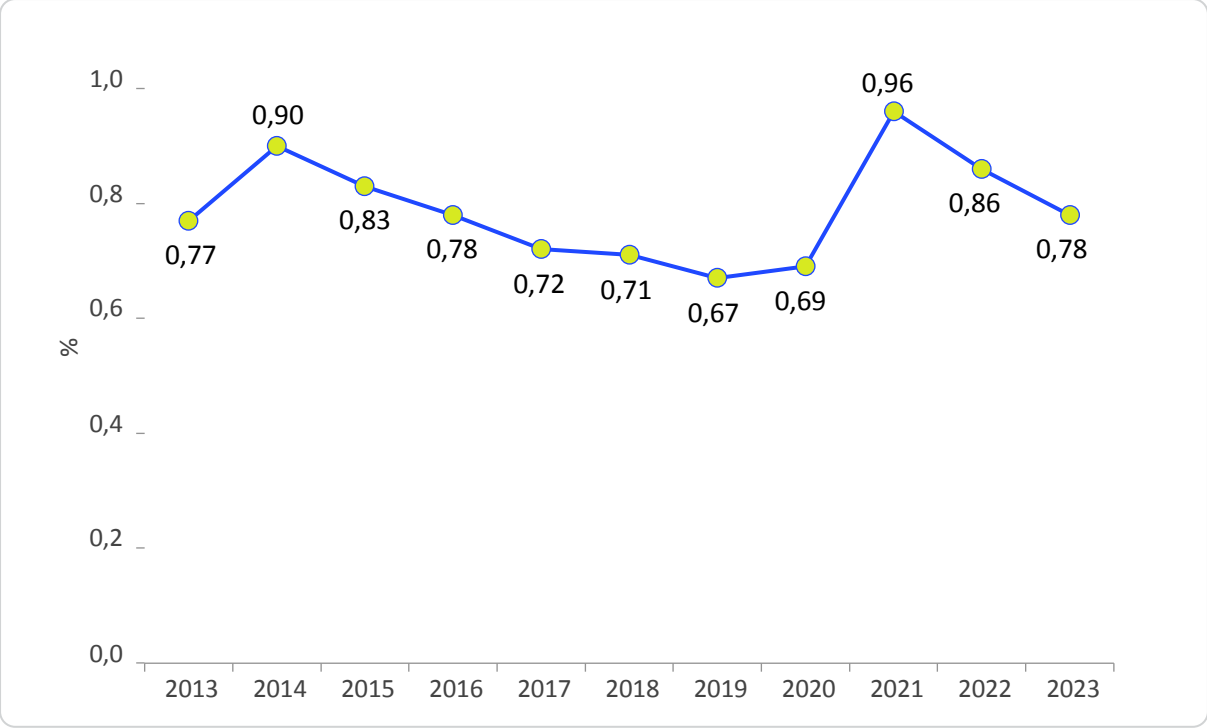

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2013-2020 CFR DBD di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan. Peningkatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,96% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,78%. Peningkatan ini dapat menjadi evaluasi bagi perawatan pasien DBD baik dari sisi ketepatan waktu penanganan maupun kualitas pelayanan kesehatan.

GAMBAR 6.41
***CASE FATALITY RATE* DEMAM BERDARAH DENGUE**
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

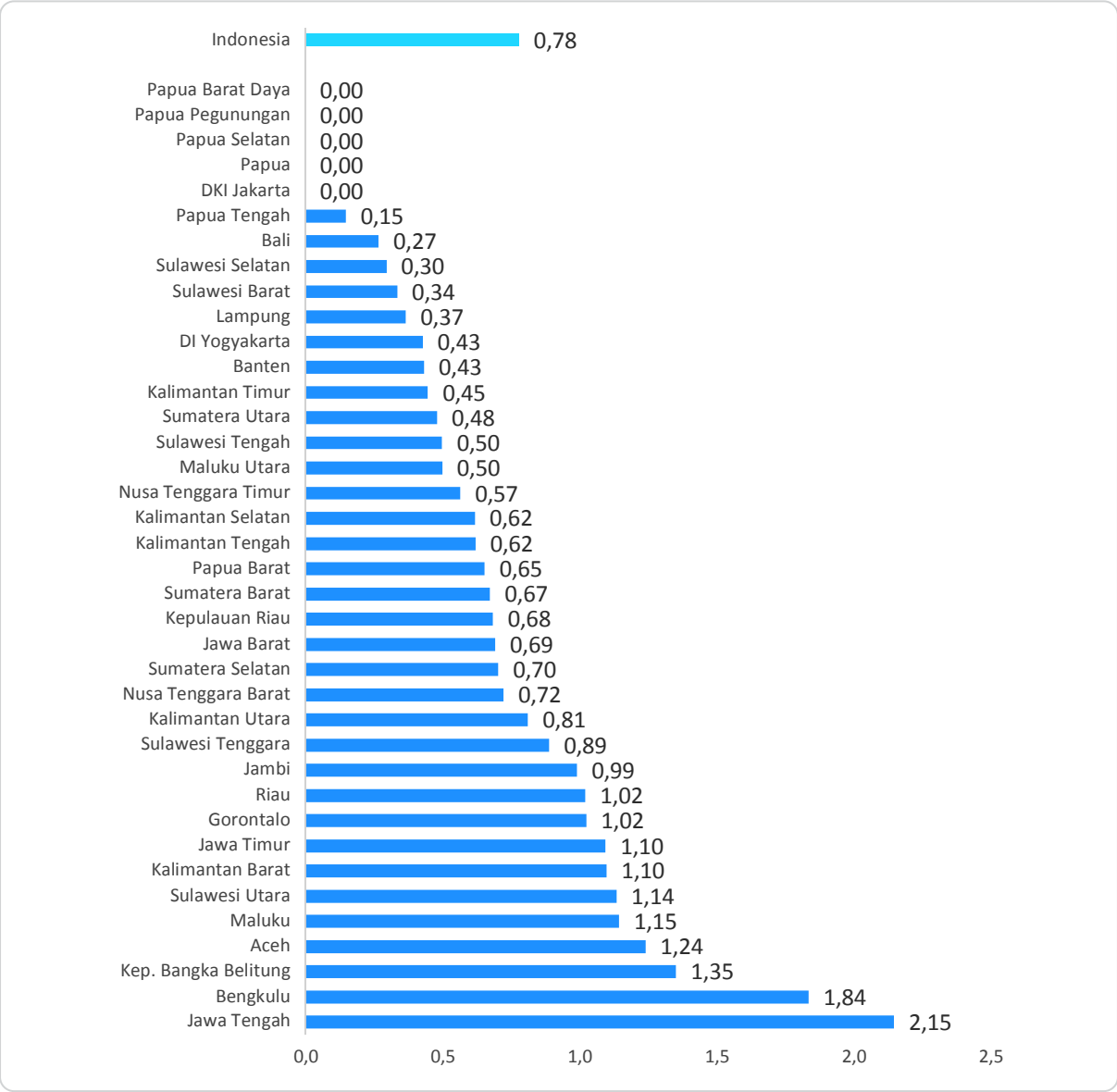

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional CFR DBD tahun 2023 mencapai 0,78%. CFR ini melebihi batas 0,7% yang telah ditetapkan pada target Strategi Nasional Penanggulangan Dengue. CFR pada tahun 2023 menurun dibandingkan periode sebelumya. CFR tinggi jika melampaui angka 1%.

Terdapat 10 provinsi atau 26,3% provinsi memiliki CFR di atas 1%. Pertolongan segera untuk mencegah dan mengurangi keparahan dan komplikasi yang menyebabkan kematian diperlukan untuk menurunkan CFR. Diperlukan upaya tindak lanjut tatalaksana kasus yg adequat, edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya Dengue untuk mencegah keterlambatan penanganan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat secara dini mengenali gejala dan tanda bahaya Dengue. Provinsi DKI Jakarta, Papua, Papua Selatan, Papua Pengunungan dan Papua Barat Daya tidak terdapat kasus kematian DBD (CFR=0).

b. Kabupaten/Kota Terjangkit DBD

Penyebaran kasus DBD di Indonesia dapat dipantau melalui banyaknya kabupaten/kota dengan status terjangkit DBD. Pada tahun 2023 terdapat 478 (92,99%) kabupaten/kota yang terjangkit DBD di Indonesia.

GAMBAR 6.42
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2013-2023

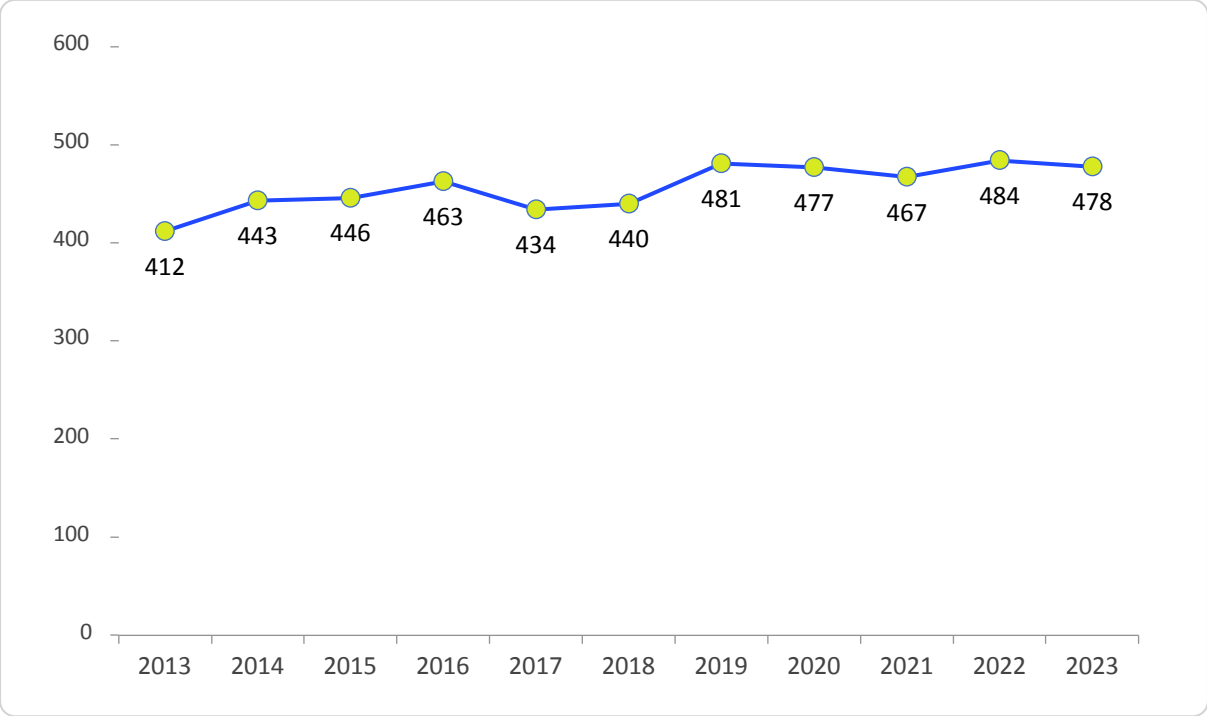

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024

Sejak tahun 2013 sampai dengan 2023 jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD cenderung mengalami fluktuasi, walaupun sedikit penurunan terjadi pada tahun 2017 (434) dan 2018 (440).

Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022, salah satu indikator Rencana Strategis tahun 2020-2024, yaitu persentase kabupaten/kota yang memiliki IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 111 kabupaten/kota (21,59%) yang mencapai IR DBD ≤ 10 /100.000 penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa target program tahun 2023 sebesar 85% kabupaten/kota dengan IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk belum tercapai.

GAMBAR 6.43
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD ≤ 10 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2023

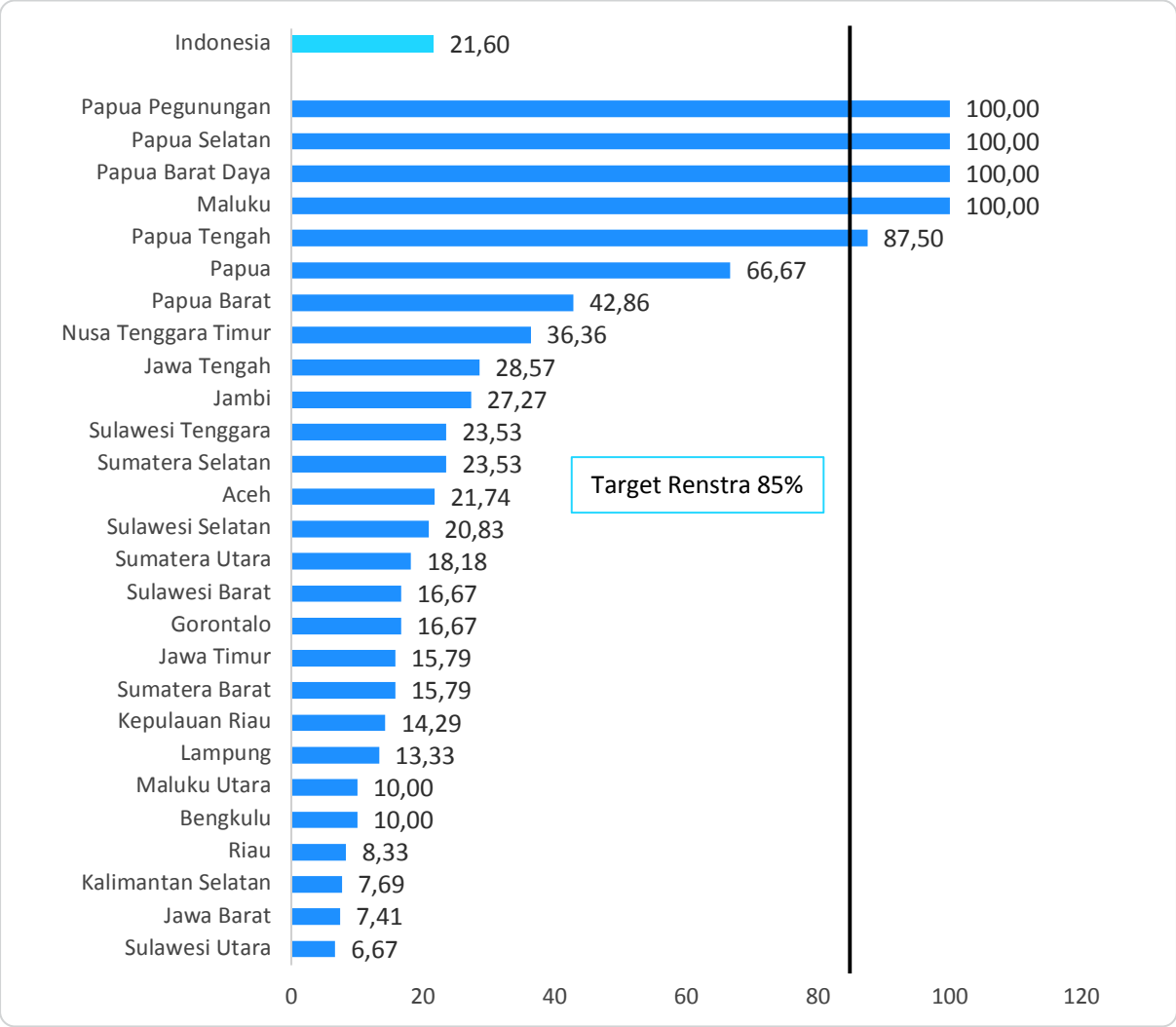

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023 terdapat 5 provinsi yang memenuhi target nasional persentase kabupaten/kota yang memiliki IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku dan Papua Tengah.

c. Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue

Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue adalah upaya penyelidikan penularan penyakit Dengue yang meliputi kegiatan pencarian atau identifikasi kasus Dengue dan/atau kasus suspek infeksi Dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular Dengue di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum yang berada dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. PE bertujuan untuk mengetahui potensi penularan dan penyebaran Dengue lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita atau fokus penularan. PE harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam setelah adanya laporan kasus atau terduga Dengue.

2. Chikungunya

Demam Chikungunya (demam chik) ini terutama dijumpai di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Gejala utama demam chik adalah demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki, tangan, tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ini ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypti* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD.

a. Kesakitan dan Kematian Akibat Chikungunya

Pada tahun 2023 ditemukan kasus demam Chikungunya sebanyak 6.049 kasus, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebanyak 2.974 kasus. Tidak ada kematian akibat Chikungunya di tahun 2023 maupun tahun 2022. Terdapat 29 provinsi yang melaporkan data Chikungunya pada tahun 2023. Hal ini berbeda dengan tahun 2022 hanya lima provinsi yang melaporkan Chikungunya. Tiga provinsi dengan yang melaporkan kasus tertinggi yaitu Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.552 kasus, Jawa Timur sebanyak 1.254 kasus, Jawa Barat sebanyak 519 kasus. Pada tahun tersebut juga dilaporkan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Chikungunya di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau sebanyak 96 kasus, Kabupaten Jember 48 kasus, Kabupaten Cirebon 14 kasus, Kabupaten Lampung Selatan 25 kasus, Kabupaten Magetan 54 kasus, dan Bojonegoro 30 kasus. Jumlah kasus Chikungunya pada tahun 2012-2023 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.44
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA
TAHUN 2012-2023

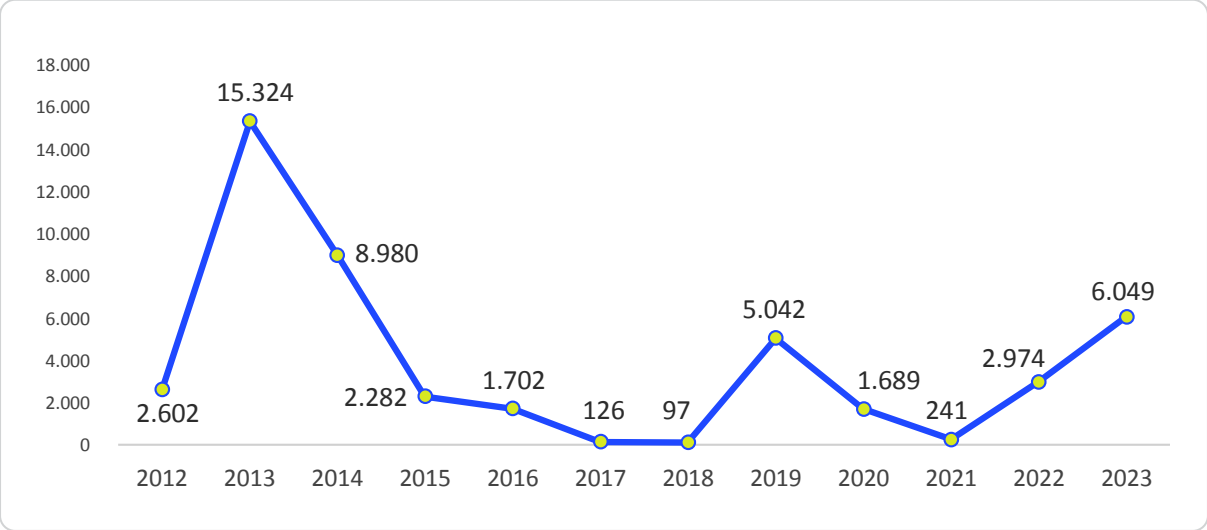

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024

Faktor penyebab meningkatnya kasus chikungunya antara lain kondisi cuaca yang relatif lembab dengan curah hujan yang tinggi dan periode waktu hujan yang panjang, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit. Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya.

b. Penyelidikan Epidemiologi Pada Chikungunya

Penyelidikan epidemiologi (PE) bertujuan untuk mengetaui potensi dan penyebaran Chikungunya lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita. PE pada Chikungunya adalah kegiatan pencarian penderita atau terduga demam chikungunya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular di tempat tinggal penderita dan rumah/ bangunan sekitar, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter.

3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya

Pengendalian faktor risiko yang paling efektif adalah pengendalian vektor terpadu baik secara fisik, kimiawi dan biologi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan Pengendalian Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus. PSN 3M Plus merupakan upaya pemberantasan sarang nyamuk secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

Kegiatan PSN 3M meliputi menguras bak mandi atau bak penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air dan memanfaatkan Kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk.

Kegiatan Plus meliputi: mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat-tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancer atau rusak, menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon, dan lainnya, menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampungan air, memasang kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi ruang yang memadai, menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, dan cara spesifik lainnya di masing-masing daerah.

Keberhasilan kegiatan PSN 3M Plus antara lain dapat diukur dengan angka bebas jentik (ABJ). Jika ABJ ≥ 95% diharapkan penularan DBD dan Chikungunya dapat dicegah atau dikurangi. Upaya pemberantasan vektor penyakit DBD dan Chikungunya hanya dapat berhasil apabila seluruh masyarakat berperan secara aktif dalam melakukan kegiatan PSN 3M Plus melalui gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

4. Malaria

Terkait dengan pengendalian Malaria di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menetapkan target program eliminasi malaria agar seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030. Target ini sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/ SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang “Eliminasi Malaria di Indonesia”.

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut *Plasmodium*. *Plasmodium* menginfeksi manusia melalui vektor penular nyamuk *Anopheles*. Bersama dengan HIV AIDS dan Tuberkolusis, pengendalian malaria menjadi bagian dari tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai tujuan global yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030.

Pada tahun 2023, terdapat delapan provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya ditetapkan sebagai wilayah bebas malaria, yaitu Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Selain itu, terdapat satu provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum berstatus eliminasi malaria, yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Papua tersebut yang memiliki status

endemis rendah. Dengan adanya intervensi yang efektif status tersebut bisa ditingkatkan menjadi bebas malaria.

GAMBAR 6.45
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

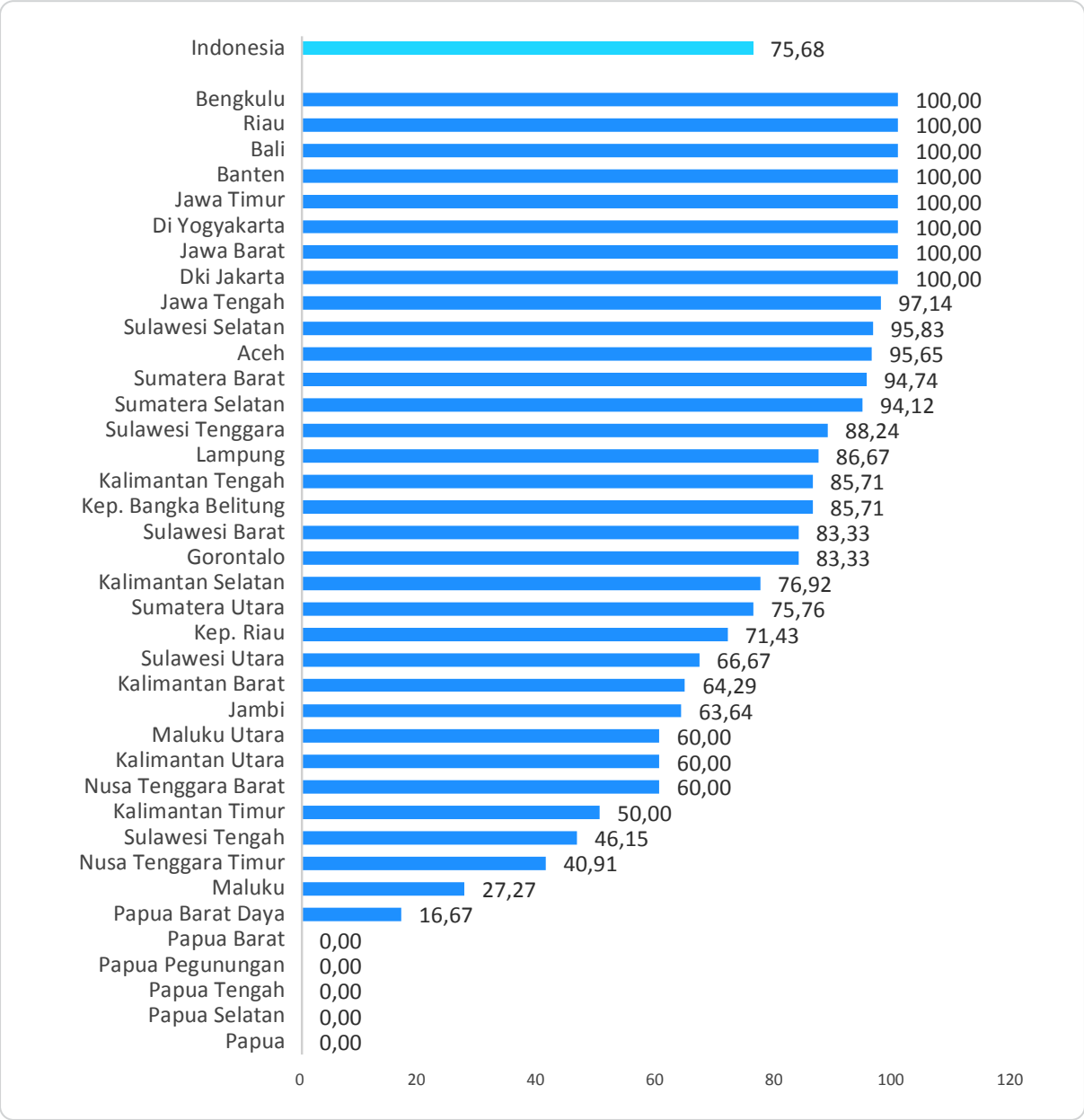

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Eliminasi malaria dapat diupayakan melalui peningkatan persentase konfirmasi sediaan darah dan persentase pengobatan standar. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 sebanyak 75,68% kabupaten/kota di Indonesa atau sebanyak 389 kabupaten/kota telah berstatus bebas malaria.

GAMBAR 6.46
PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2023

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berstatus eliminasi malaria tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Sebagian besar kabupaten/kota dengan status endemis tinggi terdapat Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memiliki 2 kabupaten endemis tinggi (Sumba Timur dan Sumba Barat Daya) serta 1 kabupaten endemis tinggi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penentuan stratifikasi endemisitas di antaranya ditentukan berdasarkan nilai *Annual Parasite Incidence* (API) per 1000 penduduk (‰). Wilayah endemis rendah jika API <1 ‰, endemis sedang jika API sebesar 1-5 ‰, dan endemis tinggi jika API >5‰. Pada tahun 2023 terdapat 389 kabupaten/kota (76%) bebas malaria, 72 kabupaten/kota (14%) berstatus endemis rendah, 26 kabupaten/kota (5%) berstatus endemis sedang, dan 27 kabupaten/kota (5%) berstatus endemis tinggi.

a. Angka Kesakitan Malaria

Morbiditas malaria dapat diketahui dengan menilai indik*ator Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk. Indikator ini diperoleh dengan menghitung proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tertentu. Indonesia berhasil menekan API menjadi kurang dari 1 sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Namun demikian, pada tahun 2023 API meningkat hingga 1,5 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan peningkatan pemeriksaan kasus malaria yang cukup signifikan mencapai 3.464.738 (meningkat dibandingkan tahun sebelumnya) dengan kasus positif sebesar 418.546. Jumlah kasus positif mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan kelengkapan laporan mencapai 95%.

GAMBAR 6.47
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API*)
PER 1.000 PENDUDUK Di INDONESIA TAHUN 2013-2023

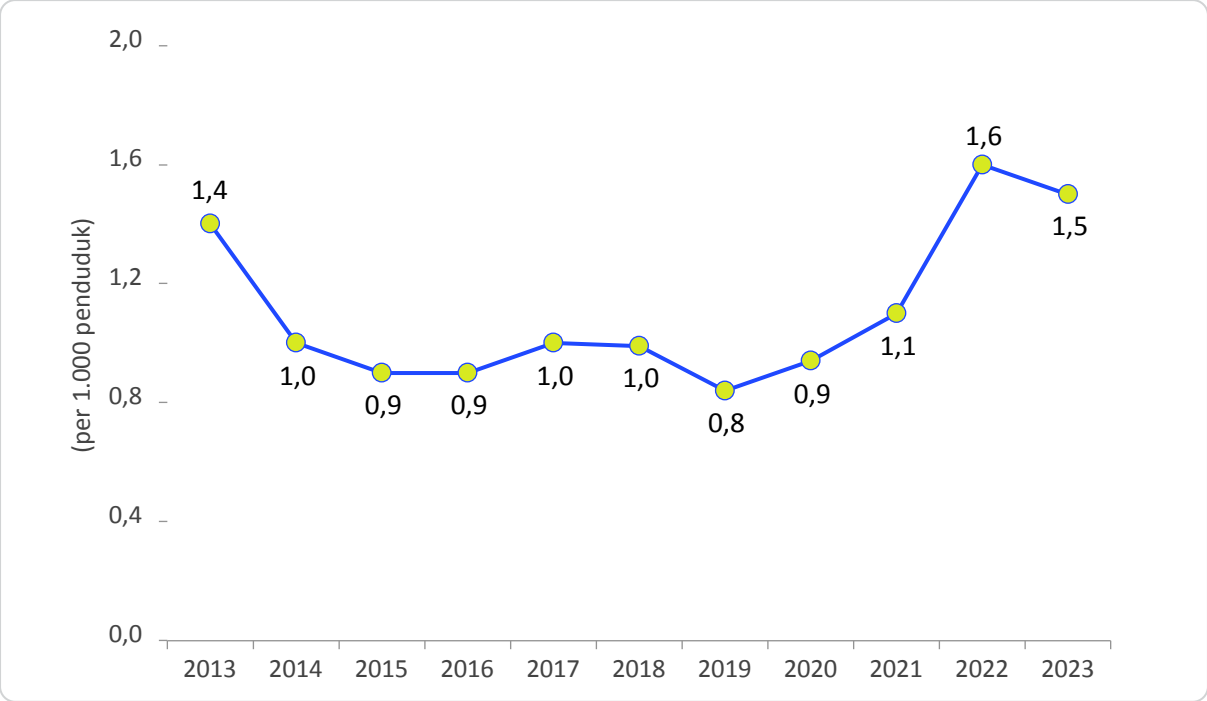

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Dari 3.468.250 suspek malaria tahun 2023 yang dilaporkan, sebanyak 99,80% di antaranya telah terkonfirmasi laboratorium, 59,1% diperiksa secara mikroskopis dan 40,9% menggunakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT), dengan capaian *Positivity Rate* (PR) sebesar 12,1% dari angka PR yang ditargetkan <5%.

API pada tingkat nasional dan provinsi di tahun 2023 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.48
ANGKA KESAKITAN MALARIA (API)
PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

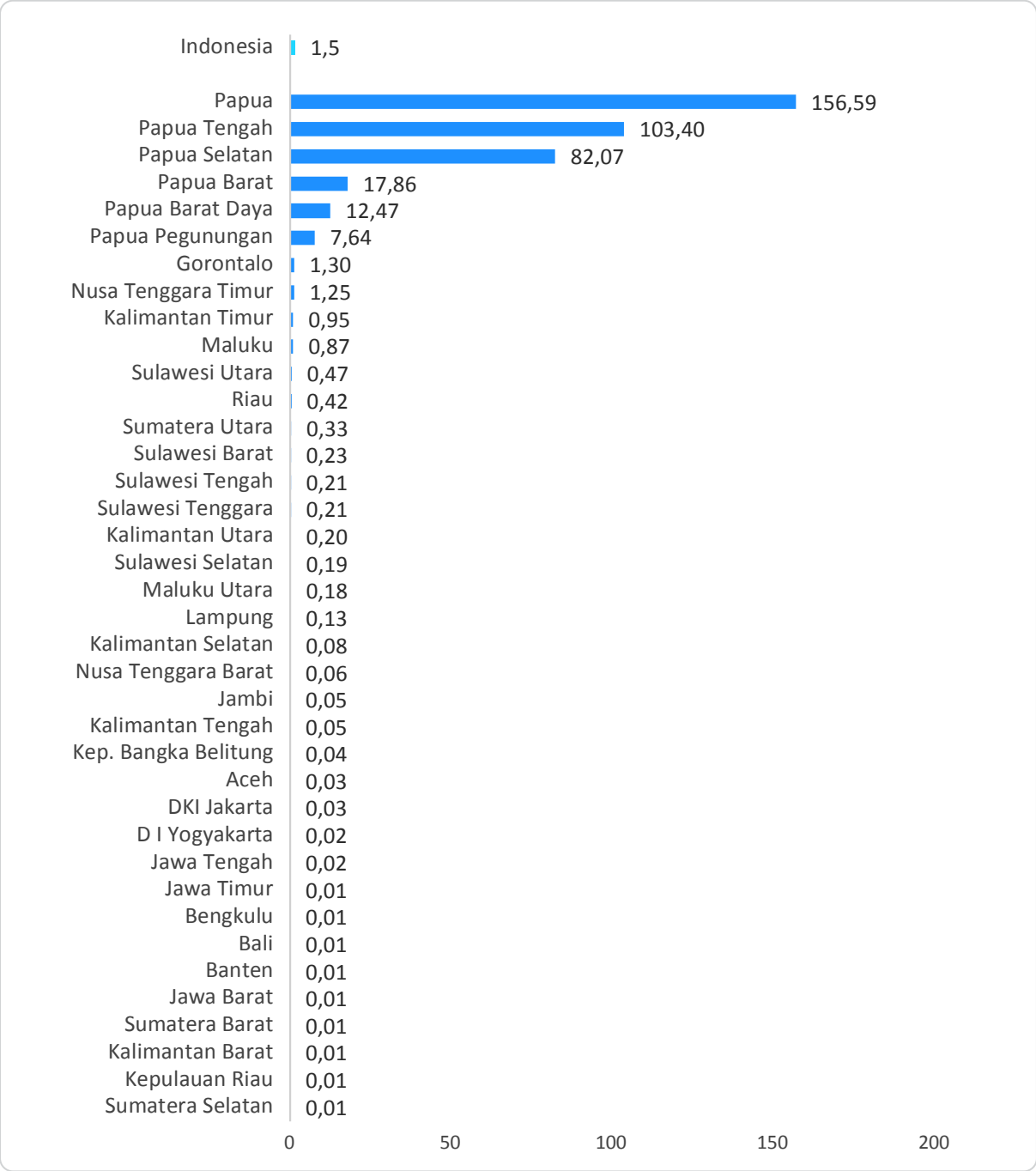

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Sebanyak 78% provinsi di Indonesia telah mampu menekan API malaria hingga kurang dari 1 per 1.000 penduduk. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan API malaria tertinggi. Hal ini sejalan dengan banyaknya kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan status endemis tinggi. Tingginya API di Provinsi Papua sebesar 156,59 per 1.000 penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan seluruh provinsi, hal ini dapat menggambarkan kontribusi yang signifikan terhadap API di tingkat nasional.

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria yang standar dan efektif sampai saat ini masih menggunakan *Artemicinin-based Combination Therapy* (ACT) ditambah primakuin. Pengobatan dilakukan pada 24 jam pertama pasien demam dan obat harus diminum habis. Pemerintah menetapkan target persentase pengobatan ACT sebesar ≥95%.

GAMBAR 6.49
PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

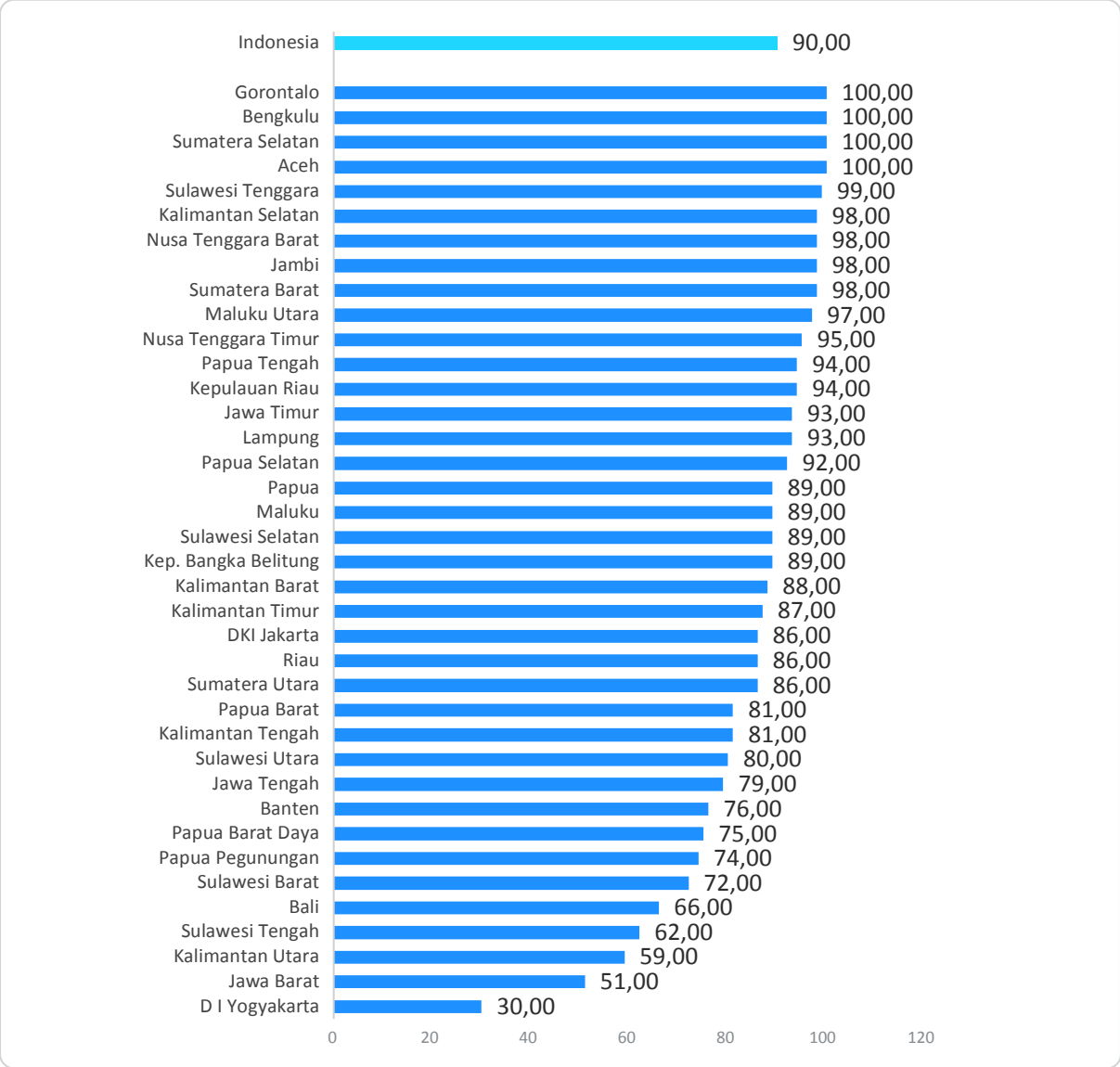

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada gambar di atas dapat diketahui hanya sebagian provinsi di Indonesia yang memenuhi target pengobatan standar ≥95%, yaitu sebanyak 11 provinsi (28%). Selain itu masih terdapat 27 provinsi dengan persentase pengobatan standar kurang dari 95%, dengan 10 Provinsi terendah yaitu DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Banten, dan Jawa Tengah.

Data dan informasi lebih rinci tentang penyakit Malaria terdapat pada Lampiran 73.a, 73.b, dan 73.c.

5. Filariasis

Filariasis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh cacing Filaria dan ditularkan dengan perantara nyamuk. Cacing Filaria yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk akan merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae dan scrotum, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Secara tidak langsung, penyakit yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas kerja penderita dan beban keluarga. Cacing penyebab Filaria yang tersebar di Indonesia terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan Brugia timori.*

Diperkirakan saat ini terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit Filariasis di dunia. Jumlah tersebut tersebar di lebih dari 83 negara dan 60% kasus tersebut terdapat di Asia Tenggara. Dalam Pertemuan ke 73 *World Health Assembly* (WHA) secara Virtual tanggal 12 November 2020, WHO telah meluncurkan Roadmap untuk penyakit tropis terabaikan (*Neglected Tropical Diseases /NTDs*) tahun 2021–2030. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah mentargetkan eliminasi filariasis pada tahun 2030.

Di Indonesia, pada tahun 2023 terdapat 7.955 kasus kronis Filariasis yang tersebar di 38 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis setelah dilakukan validasi data dan konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan kondisi kasus Filariasis di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

GAMBAR 6.50
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2014 – 2023

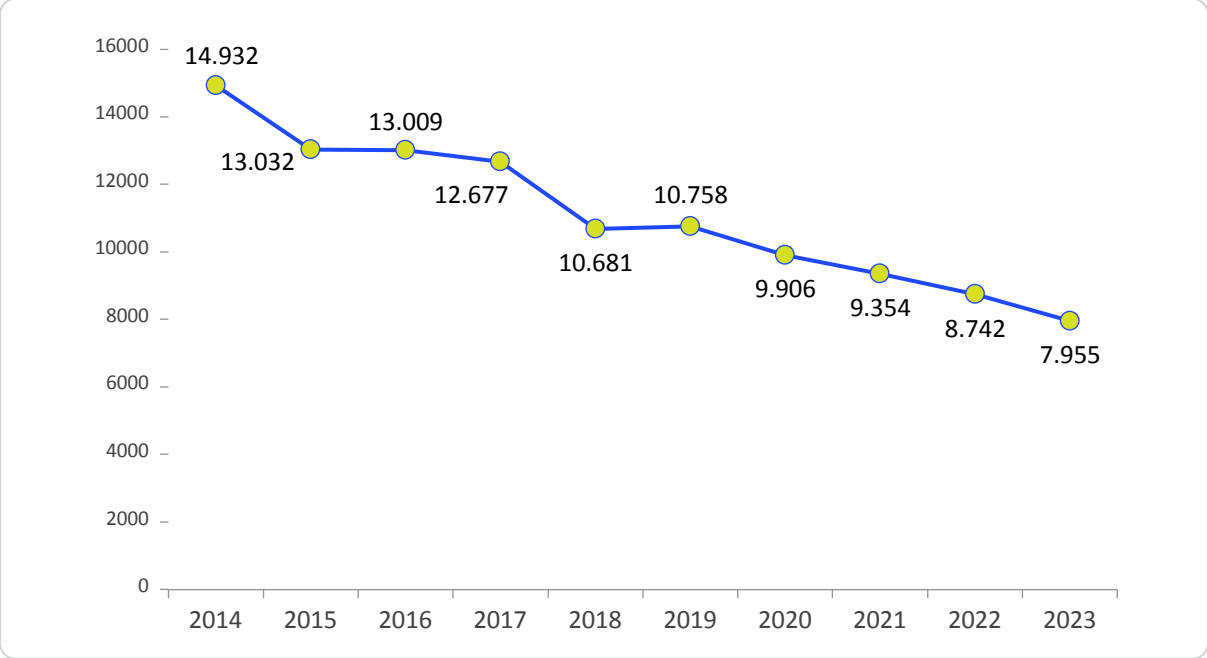

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Provinsi dengan kasus kronis Filariasis tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua Selatan sebanyak 1.996 kasus, Nusa Tenggara Timur 1.200 kasus, dan Papua sebanyak 1.023 kasus. Provinsi dengan kasus Filariasis < 5 kasus yaitu Bali, DI Yogyakarta, Gorontalo dan Kalimantan Utara.

GAMBAR 6.51
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

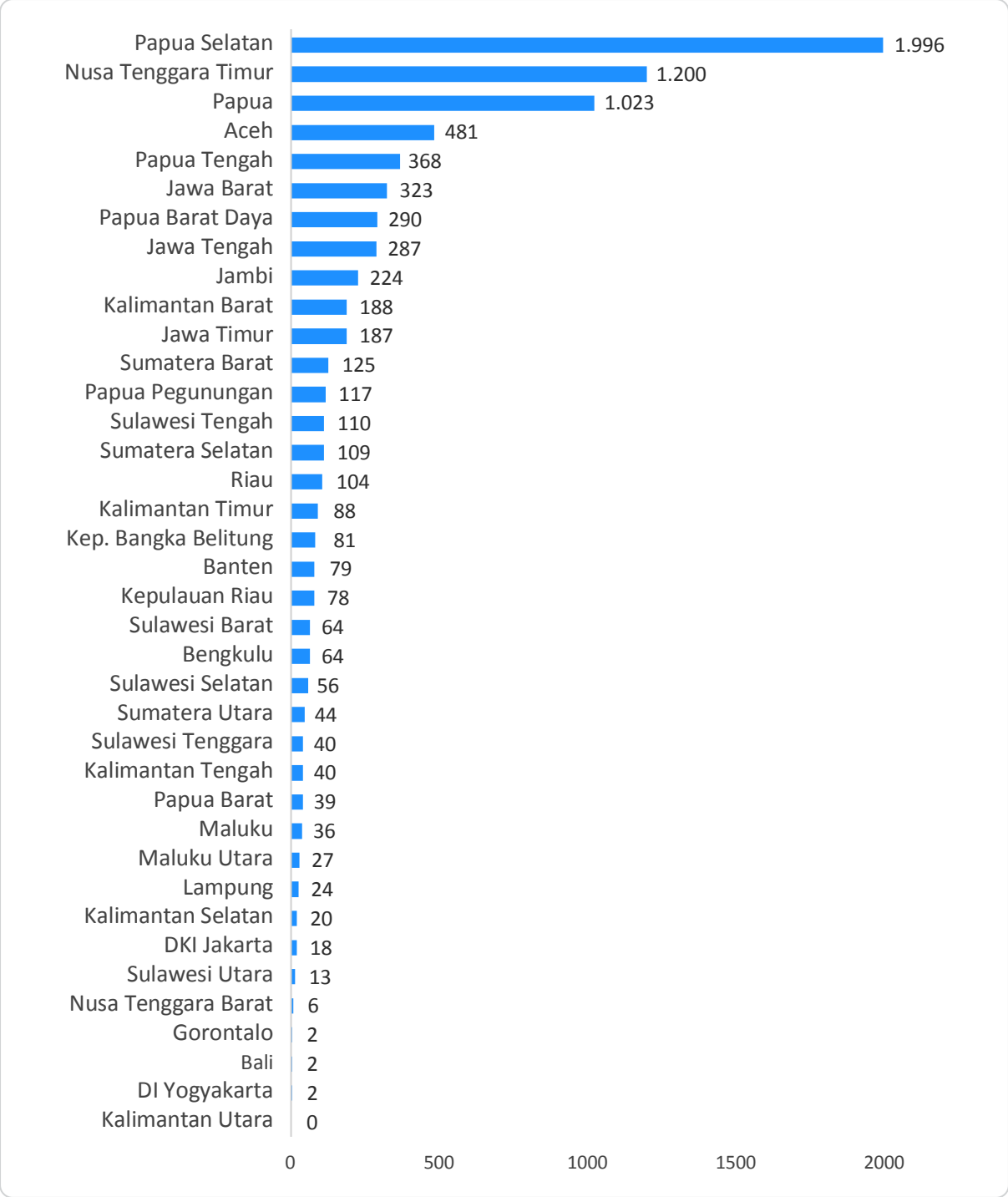

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Keberhasilan program pengendalian Filariasis dapat diketahui di antaranya dengan melihat jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%. Indonesia telah menetapkan 236 kabupaten/kota di 32 provinsi sebagai daerah endemis filariasis. Dengan demikian, terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota endemis sehingga provinsi tersebut ditetapkan sebagai provinsi non-endemis Filariasis. Keenam provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa

Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Dalam menuju eliminasi filariasis, pemerintah menetapkan dua program utama yaitu melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Filariasis untuk memutus rantai penularan Filariasis pada penduduk di semua Kabupaten/Kota Endemis Filariasis serta yang kedua adalah tatalaksana kasus kronis filariasis di fasyankes.

GAMBAR 6.52
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1% MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

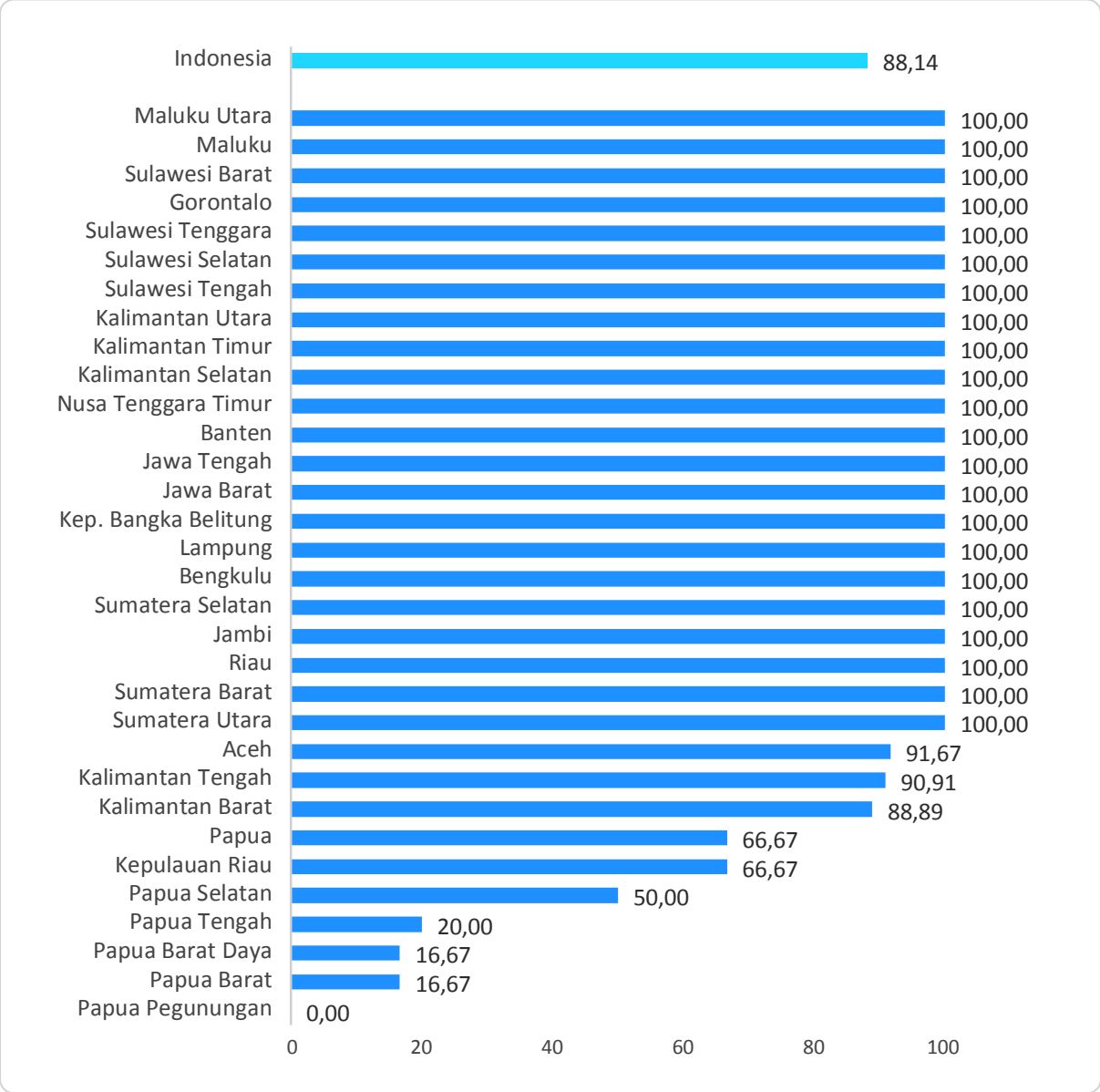

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Indikator keberhasilan pengendalian Filariasis yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1%. Pada tahun 2023 jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% sebanyak 208 kabupaten/kota dan belum memenuhi target indikator yaitu 220 kabupaten/kota endemis.

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase kabupaten/kota endemis filaria yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1% sebesar 88,14%. Terdapat 22 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya mencapai 100%.

Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dilaksanakan setahun sekali selama lima tahun berturut-turut dengan cakupan minimal 65%. Seluruh kabupaten/kota endemis Filariasis telah memulai tahapan POPM filariasis dengan waktu yang berbeda-beda. Pada tahun 2023 sebanyak 26 (11,02%) kabupaten/kota endemis Filariasis masih melaksanakan POPM Filariasis. Sedangkan sisanya yaitu 210 kabupaten/kota endemis filariasis telah menyelesaikan putaran POPM filariasis selama 5 tahun dan memasuki masa surveilans eliminasi dan pasca eliminasi.

GAMBAR 6.53
CAKUPAN POPM FILARIASIS DI INDONESIA
TAHUN 2014-2023

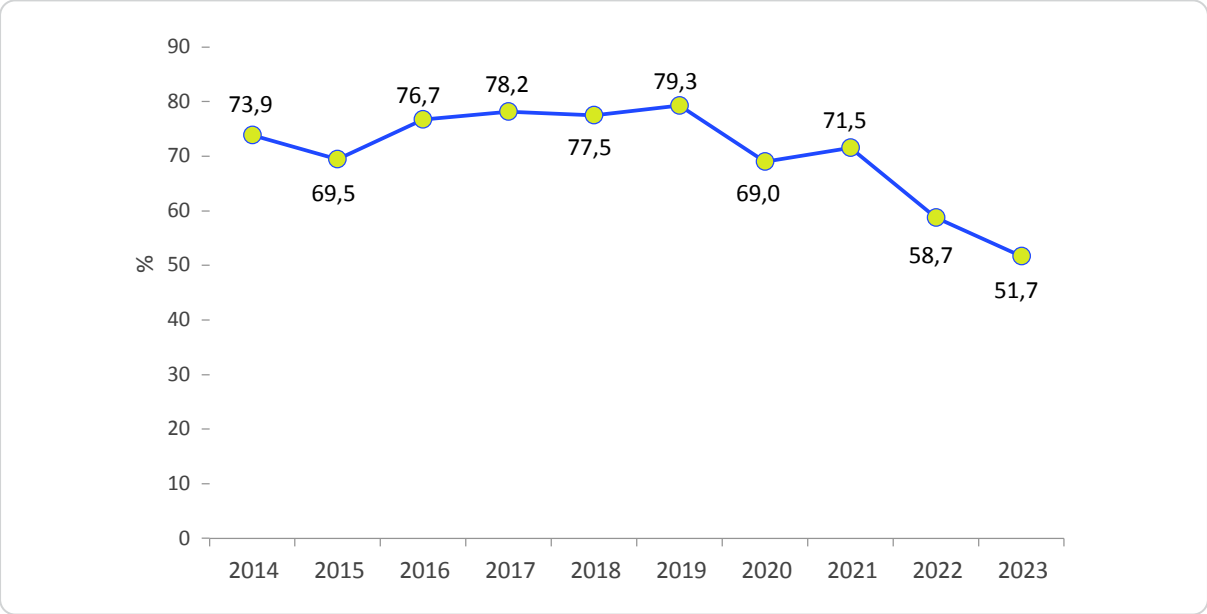

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Cakupan POPM Filariasis mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memutus rantai penularan Filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal. Selama periode tahun 2014 sampai 2019 tren cakupan penduduk minum obat Filariasis di kabupaten/kota endemis yang masih melaksanakan POPM Filariasis cenderung meningkat. Namun tahun 2019-2023 cenderung menurun menjadi 51,7% pada tahun 2023. Dari 26 kabupaten/kota endemis filariasis yang belum menyelesaikan 5 tahun putaran POPM >65%, sebanyak 20 kabupaten/kota diantaranya berada di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kondisi geografis serta faktor keamanan menjadi penyebab menurunnya cakupan POPM filariasis pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 sebanyak 13 kabupaten/kota melaksanakan POPM Filariasis menggunakan obat Diethylcarbamazine (DEC) dan Albendazole (DA) dan sebanyak 13 kabupaten/kota menggunakan tiga macam kombinasi obat yaitu kombinasi DEC, Albendazole dan Ivermectine (IDA). Terdapat 3 kabupaten di provinsi Papua Pegunungan dan 1 di Provinsi Papua Tengah yang pelaksanaan POPM dengan kombinasi obat DA tidak melaporkan data cakupan POPM filariasis.

6. Rabies

Rabies merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus dari golongan *Rhabdovirus.* Penyakit ini ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala. Selain bagi manusia, rabies dapat menyebabkan kesakitan dan kematian bagi hewan penular tersebut.

Permasalahan Rabies dapat diketahui melalui kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR), dan kasus kematian (LYSSA). Kasus GHPR yang dilaporkan diarahkan untuk mendapatkan VAR. Kasus GHPR yang mengalami kematian dan ditemukan adanya sero positif pada hewan penularnya menjadi landasan penentuan daerah rabies.

Sampai dengan tahun 2023 terdapat 12 provinsi yang telah dinyatakan sebagai wilayah bebas Rabies, yaitu yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

GAMBAR 6.54
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2013 – 2023

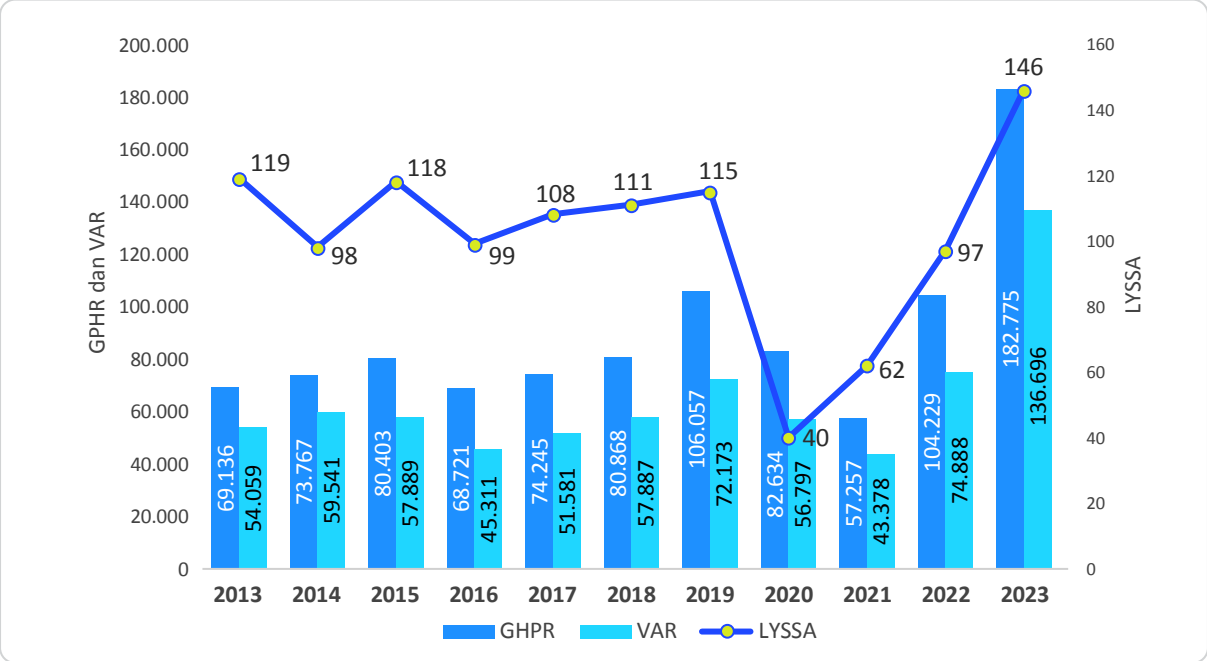

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan grafik kecenderungan GHPR, VAR dan LYSSA yang disajikan di atas, kasus GHPR tertinggi dilaporkan pada tahun 2023 sebesar 182.775 kasus. Kasus GHPR pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus VAR yang dilaporkan pada tahun 2023 juga menunjukan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 74.888 menjadi 136.696 kasus. Demikian juga untuk kasus kematian (LYSSA) meningkat dari 96 menjadi 146 kasus.

Pada tahun 2023 Kasus GHPR paling banyak dilaporkan oleh Provinsi Bali sebesar 72.522 kasus, Nusa Tenggara Timur sebesar 18.924 kasus, dan Sumatera Utara sebesar 10.360 kasus. Kasus GHPR harus segara mendapatkan tatalaksana, di antaranya dengan pemberian VAR. Berikut ini disajikan persentase pemberian VAR terhadap kasus GHPR.

GAMBAR 6.55
PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR
DI INDONESIA TAHUN 2023

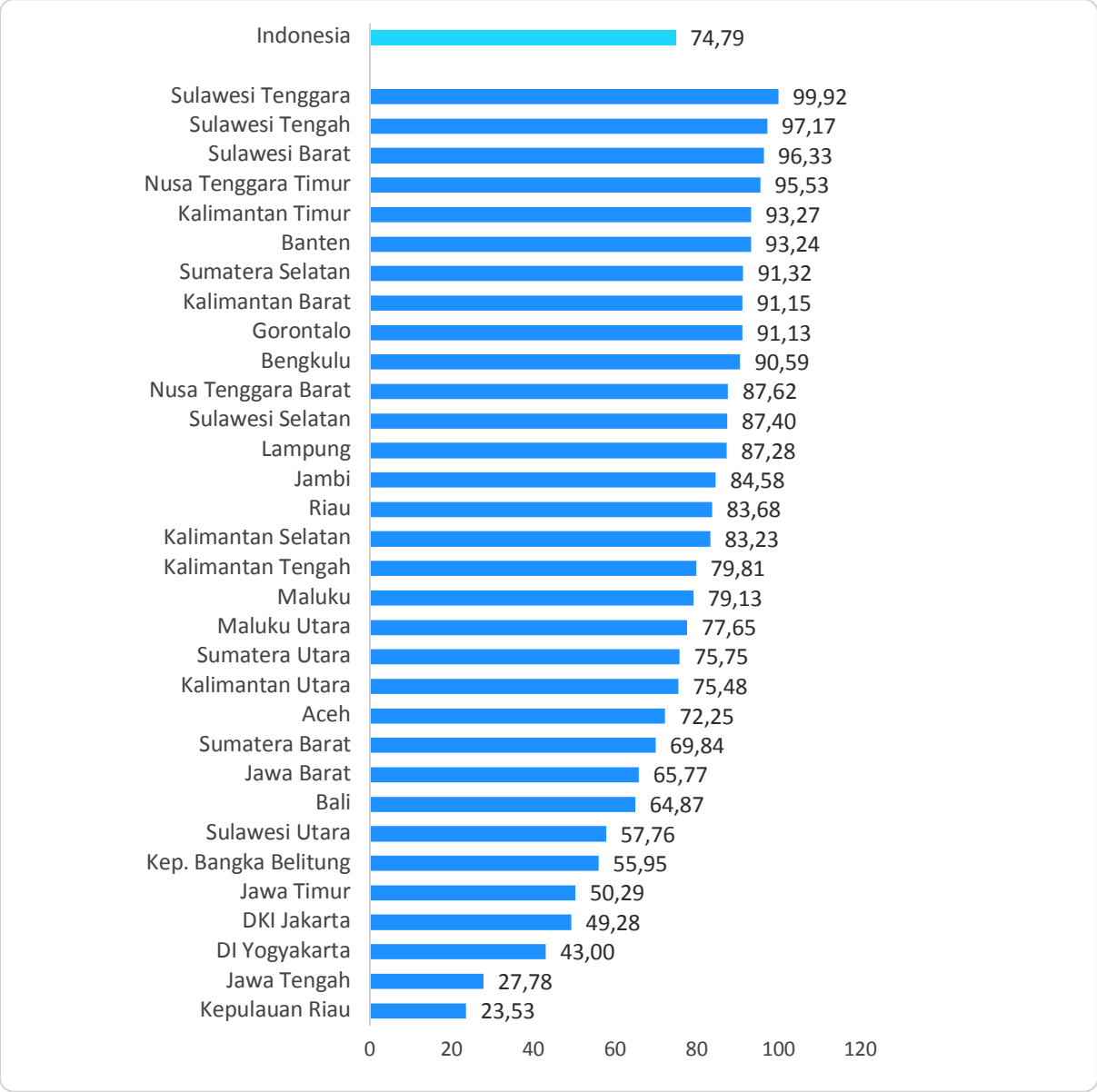

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Capaian pemberian VAR tertinggi yaitu Kalimantan Timur sebesar 99,92%, Sedangkan Kepulauan Riau memiliki capaian pemberian VAR terendah sebesar 23,53%. Provinsi Bali, NTT dan Sumatera Utara yang melaporkan kasus GHPR tertinggi masing-masing memiliki persentase 64,87%, 95,53% dan 75,75%. Dengan tingginya kasus GHPR, seharusnya diperlukan capaian pemberian VAR yang tinggi. Penatalaksanaan kasus yang efektif dan pemberian VAR dapat mencegah kematian karena Rabies.

GAMBAR 6.56
JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2023

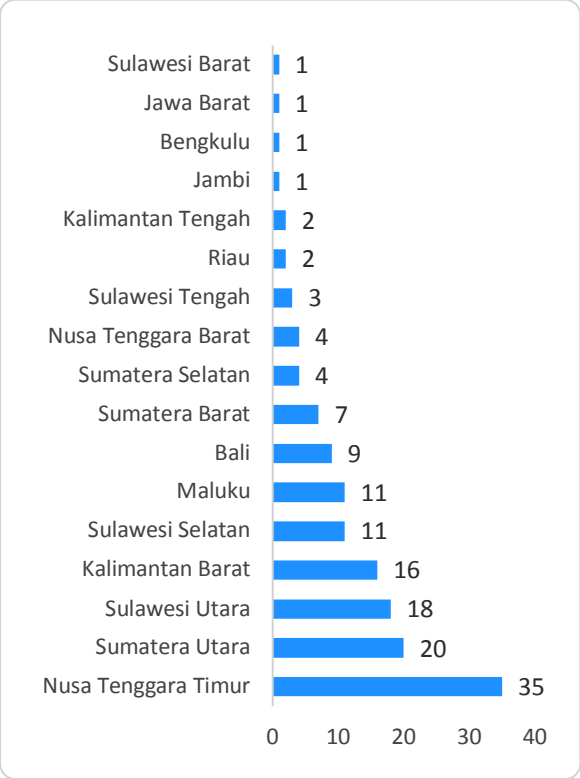

GAMBAR 6.57
PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES TERHADAP KASUS GHPR (%) DI INDONESIA TAHUN 2023

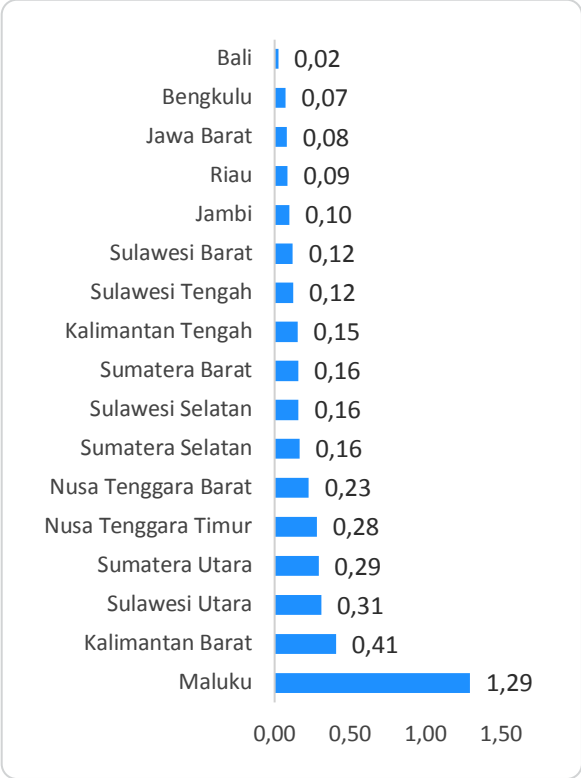

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara melaporkan kasus kematian akibat Rabies lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Jika dilihat berdasarkan proporsi kematian akibat rabies terhadap kasus GHPR, tertinggi yaitu Provinsi Maluku, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara dengan masing-masing persentase sebesar 1,29%, 0,41% dan 0,31%. Apabila dibandingkan dengan persentase VAR terhadap kasus GHPR, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki persentase di atas 95%. Kematian akibat rabies diakibatkan keterlambatan penatalaksanaan kasus dan pemberian VAR.

7. Leptospirosis

Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan bakteri *Leptospira sp*. Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung antara manusia dengan urine hewan yang telah terinfeksi bakteri Leptospira. Tingginya biaya pemeriksaan laboratorium dan metode diagnosis menyebabkan tidak semua kasus dapat terlaporkan.

Pada tahun 2023 ditemukan adanya 2554 kasus Leptospirosis di Indonesia yang dilaporkan oleh dua belas provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali dan Maluku. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan tersebut, terdapat 205 kasus meninggal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 8%.

GAMBAR 6.58
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2013 – 2023

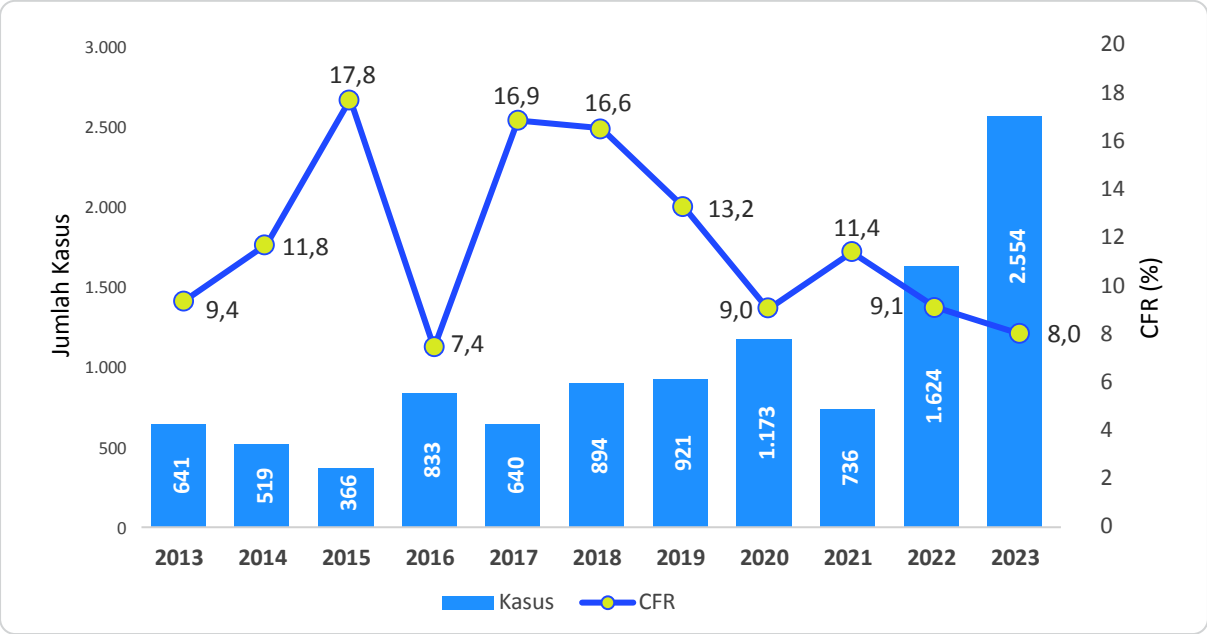

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Kasus Leptospirosis tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 1.624 kasus menjadi 2.554 kasus. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kasus di Pulau Jawa dan Kalimantan khususnya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Sedangkan CFR menurun dari 9,1 % menjadi 8%. Hal ini dapat disebabkan karena kecepatan dalam mendeteksi dini dan merespon kasus yang ditemukan.

GAMBAR 6.59
JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2021 – 2023

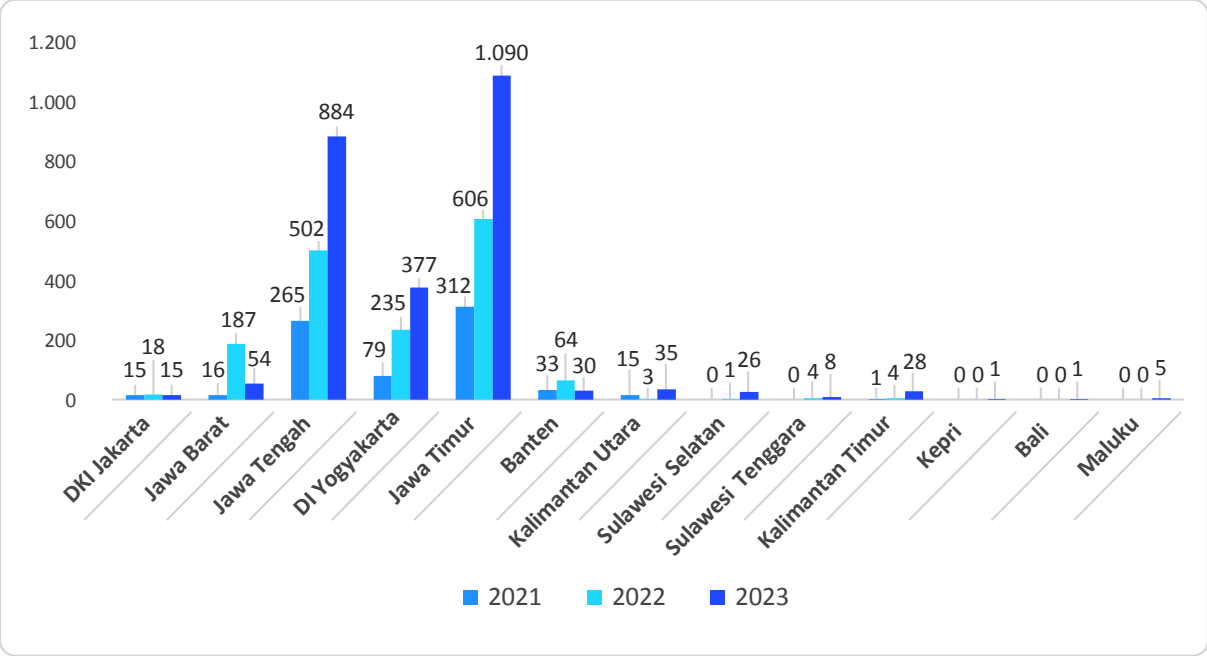

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara melaporkan peningkatan kasus. Sedangkan penurunan kasus terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kepulauan Riau, Bali dan Maluku pada tahun 2022 tidak ditemukan kasus Leptospirosis dan pada tahun 2023 melaporkan adanya kasus leptospirosis.

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar terhadap seluruh kasus di Indonesia yaitu masing-masing sebesar 36,6% dan 42,7%.

Kasus dan kematian akibat Leptospirosis memerlukan upaya pengendalian yang selama ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan NSPK Pengendalian Leptospirosis,
2. Penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi,
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik melalui pelatihan, sosialisasi, orientasi dan *workshop*,
4. Penguatan surveilans zoonosis berbasis laboratorium seperti Surveilans Sentinel Leptospirosis di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
5. Penguatan surveilans leptospirosis terpadu lintas sektor Kabupten Demak Provinsi Jawa Tengah
6. Penguatan tata laksana sesuai standar dan prosedur,
7. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB,
8. Pengendalian faktor risiko secara terpadu yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor meliputi sektor kesehatan hewan dan kesehatan satwa liar,
9. Penyediaan logistik (*Rapid Diagnostik Test*).

8. Pengendalian Vektor Terpadu

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan vektor dapat dicegah. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan upaya preventif yang paling efektif dalam rangka pencegahan penyakit tular vektor dan zoonotik, karena penularan penyakit ini tidak akan terjadi apabila tidak ada vektor dan binatang pembawa penyakit.

Kementerian Kesehatan menetapkan persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas melaksanakan surveilans vektor sebagai indikator pengendalian vektor. Puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor yang dimaksud pada indikator tersebut adalah Puskesmas yang melaksanakan surveilans nyamuk Aedes dan/atau nyamuk Anopheles secara rutin setiap bulan yang dilaporkan melalui SILANTOR (Sistem Surveilans Vektor) berupa angka bebas jentik dan index habitat nasional.

GAMBAR 6.60
PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA MEMILIKI 25% PUSKESMAS MELAKSANAKAN SURVEILANS VEKTOR DI INDONESIA TAHUN 2023

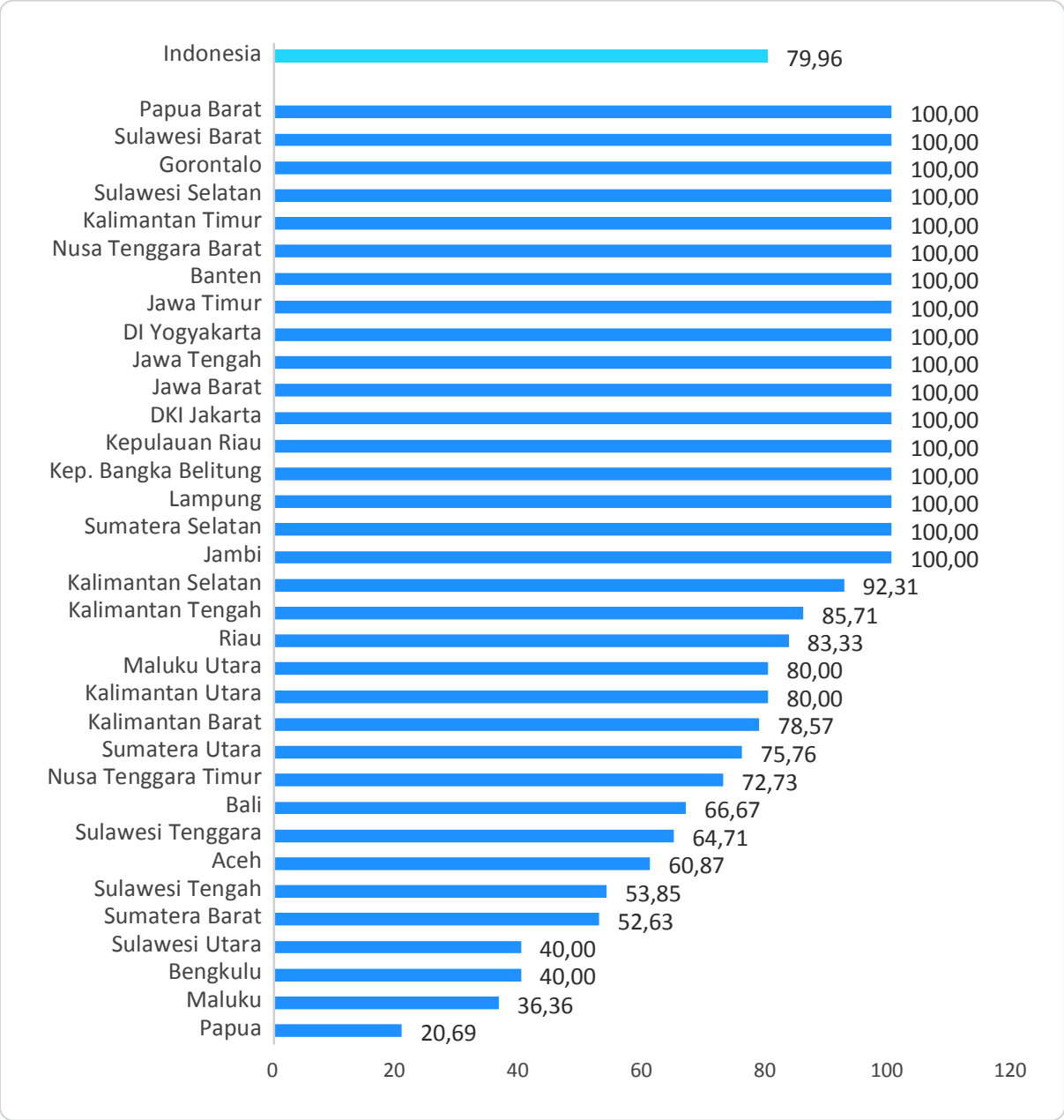

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase kabupaten/kota memiliki 25% puskesmas melaksanakan surveilans vektor sebesar 79,96%. Terdapat 17 provinsi dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya surveilans dan pengendalian vektor telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 70% dengan realisasi 79,96%.

D. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Penyakit tidak menular atau penyakit non-infeksi telah menjadi bagian dari beban ganda epidemiologi di dunia sejak beberapa dekade terakhir. Berbeda dengan penyakit menular, penyakit ini tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Badan kesehatan dunia (WHO) mengestimasikan bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya terhadap 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang mengacu pada klasifikasi internasional penyakit *(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) mengelompokkan penyakit ini berdasarkan sistem dan organ tubuh menjadi 12 jenis penyakit yaitu:

1. Penyakit keganasan;
2. Penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
3. Penyakit sistem saraf;
4. Penyakit sistem pernapasan;
5. Penyakit sistem sirkulasi;
6. Penyakit mata dan adnexa;
7. Penyakit telinga dan mastoid;
8. Penyakit kulit dan jaringan subkutanius;
9. Penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung;
10. Penyakit sistem genitourinaria;
11. Penyakit gangguan mental dan perilaku;
12. Penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.

Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat. Kemunculan COVID-19 sebagai *new-emerging disease* telah menyadarkan banyak pihak terhadap pentingnya pengendalian penyakit tidak menular, karena penyakit ini merupakan salah satu komorbid yang berperan dalam meningkatkan keparahan COVID-19.

Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan beberapa kriteria, yaitu tingginya angka kematian atau kecacatan, tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan, dan memiliki faktor risiko yang dapat diubah.

Penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat terdiri dari upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus yang menitikberatkan pada faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Upaya pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di ≥ 80% Puskesmas

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian PTM di tingkat nasional, sejalan dengan pendekatan global dan regional. Salah satu program yang telah dan masih terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini sebagai upaya dalam mendukung pencapaian target SPM dan pencapaian target indikator Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, yaitu meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM.

PANDU PTM di FKTP merupakan upaya pencegahan, pengendalian dan tatalaksana hipertensi dan diabetes melitus serta PTM lainnya yang dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan dengan pendekatan faktor risiko, menggunakan algoritma PANDU PTM dan tabel prediksi risiko PTM. Algoritma PANDU PTM merupakan alur pikir dalam melakukan pelayanan terpadu PTM di FKTP. Dalam algoritma dijelaskan tentang tahapan pelayanan bagi pengunjung Puskesmas yang berusia 15 tahun keatas. Tahapan diawali dari identifikasi faktor risiko hingga diagnosis dan tata laksana yang dalam salah satu prosesnya menggunakan tabel prediksi risiko PTM. Sedangkan dalam kaitan dengan tatalaksana penyakit yang bersifat spesifik, PANDU PTM tetap mengacu pada pedoman tata laksana penyakit yang berlaku.

Untuk memperkuat pelaksanaan PANDU PTM di daerah, Kementerian Kesehatan menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang melakukan PANDU PTM di ≥80% Puskesmas. Puskesmas PANDU PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Kabupaten/Kota dinilai telah menyelenggarakan PANDU PTM bila 80% atau lebih Puskesmas telah melakukan PANDU PTM.

Pada tahun 2023, sebanyak 388 kabupaten/kota atau 94,4% dari 411 total kabupaten/ kota yang menjadi target indikator melakukan pelayanan terpadu PTM di ≥80% Puskesmas. Terdapat 25 provinsi dari 38 provinsi atau 65,8% memiliki kabupaten/kota dengan jumlah Puskesmas menerapkan PANDU PTM ≥80%, dan sebanyak 18 provinsi memiliki capaian melebihi 100% dari target kabupaten/ kota yang telah ditetapkan. Tiga belas provinsi lainnya (34,2%) dengan capaian <80% dan Provinsi Papua Pegunungan tidak memiliki kabupaten/kota dengan jumlah Puskesmas menerapkan PANDU PTM ≥80% dikarenakan belum ada laporan yang dikirimkan melalui Direktorat P2PTM.

GAMBAR 6.61
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PANDU PTM DI ≥80% PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

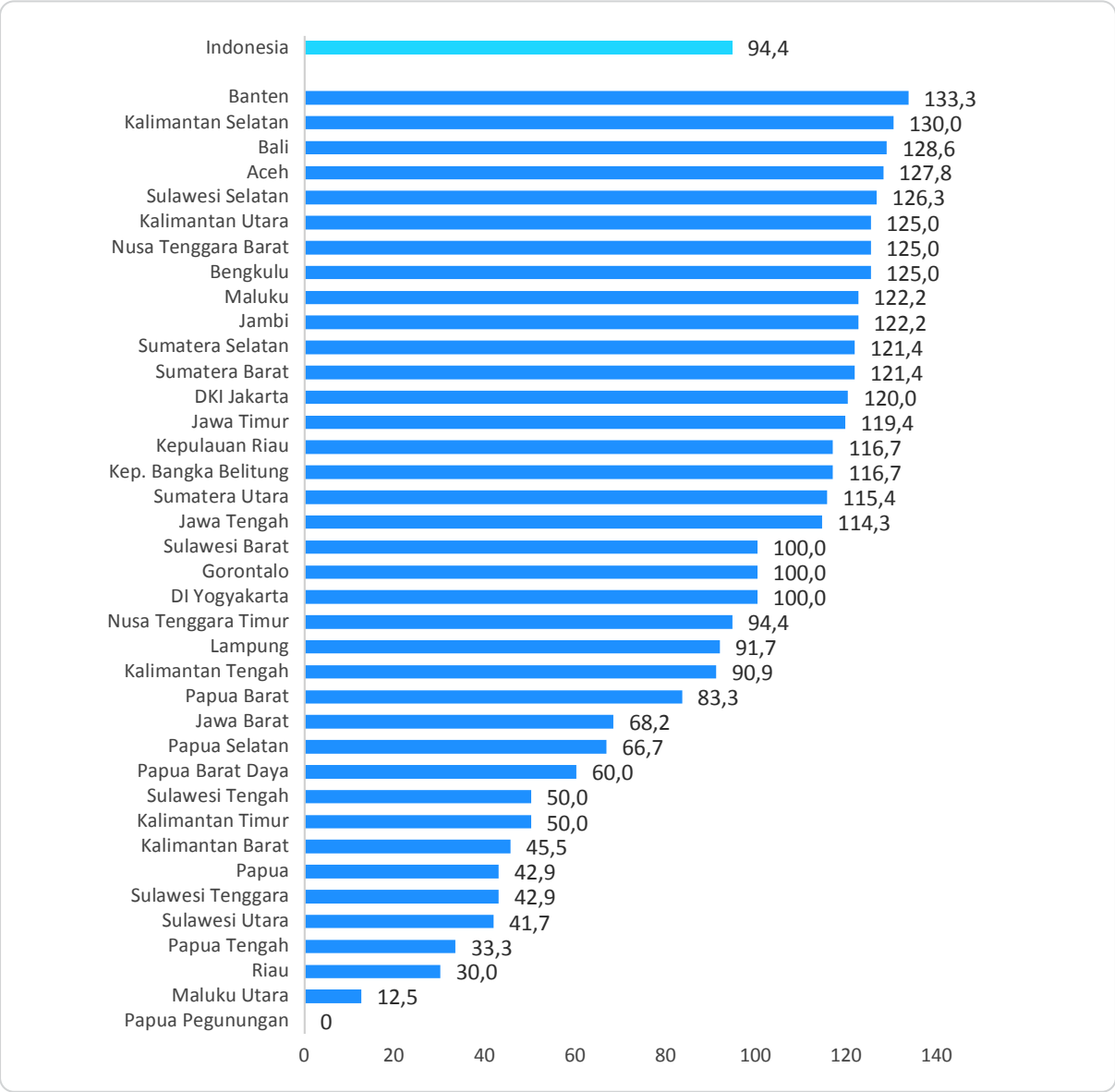

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

2. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker terbanyak di Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan oleh terlambatnya diagnosis dan tatalaksana. Hampir 70% pasien kanker dideteksi pada stadium lanjut. Hal ini sangat disayangkan, bila kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum terjadinya kanker (lesi prakanker) dan dapat diterapi sehingga tidak menjadi kanker. Kanker payudara bisa dicegah dengan tindakan yang sederhana dan efektif yaitu Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS), bila ditemukan benjolan pada payudara segera diterapi sebelum berkembang menjadi kanker stadium lanjut. Oleh karena itu, deteksi dini merupakan hal yang penting dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, meningkatkan kesintasan dan mengurangi beban pembiayaan akibat penyakit kanker.

Program deteksi dini kanker leher rahim di Indonesia dilakukan dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan deteksi dini kanker payudara dilakukan dengan metode SADANIS di FKTP, yaitu pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Untuk di RS atau FKTRL dilakukan dengan menggunakan Ultrasonografi (USG) atau mammografi.

GAMBAR 6.62
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA)
DI INDONESIA TAHUN 2021-2023

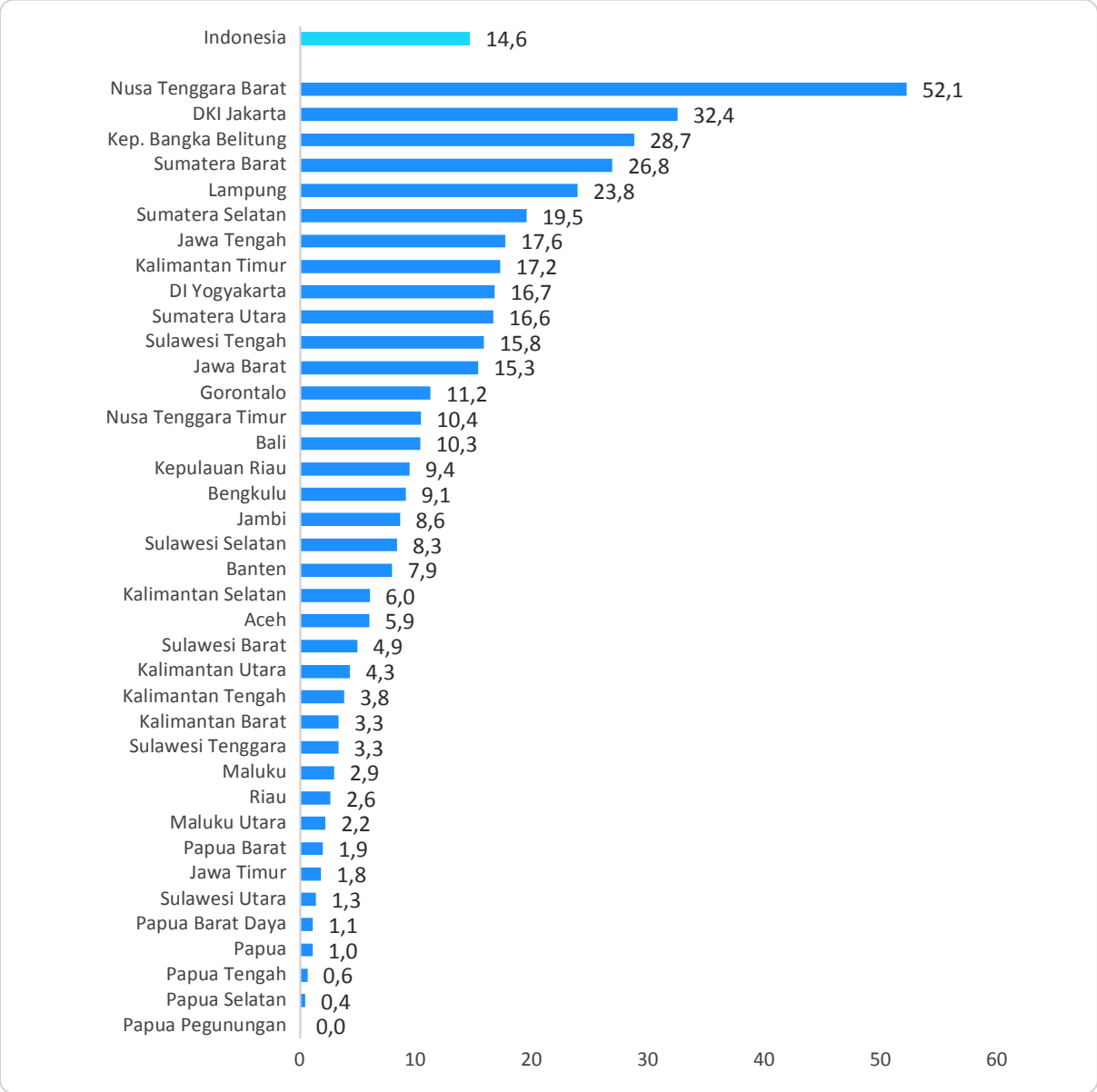

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada kurun waktu 2021-2023, sebanyak 3.114.505 perempuan usia 30-50 tahun atau 14,6% dari sasaran telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA. Deteksi dini tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 52,1%, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 32,4%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 28,7%. Sedangkan, provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

GAMBAR 6.63
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA (SADANIS)
DI INDONESIA TAHUN 2021-2023

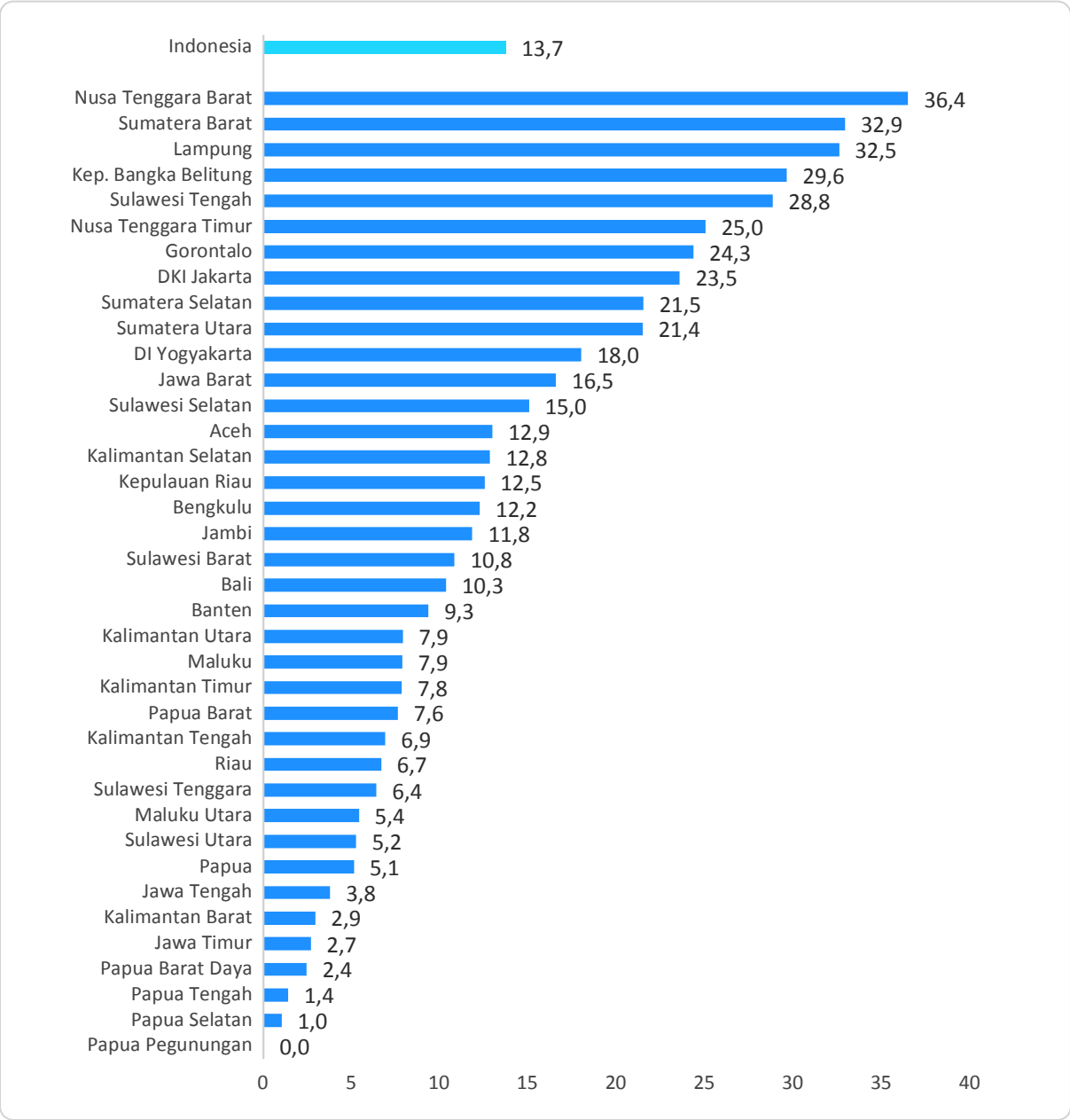

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada kurun waktu 2021-2023, sebanyak 2.277.470 perempuan usia 30-50 tahun atau 13,7% dari sasaran telah melakukan deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan SADANIS. SADANIS tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 36,4%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 32,9%, dan Lampung sebesar 32,5%. Sedangkan, provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Provinsi dengan cakupan deteksi dini yang rendah dikhawatirkan akan mengalami peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim dan payudara. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan deteksi dini di wilayah dengan cakupan yang masih rendah.

GAMBAR 6.64
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM
PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2023

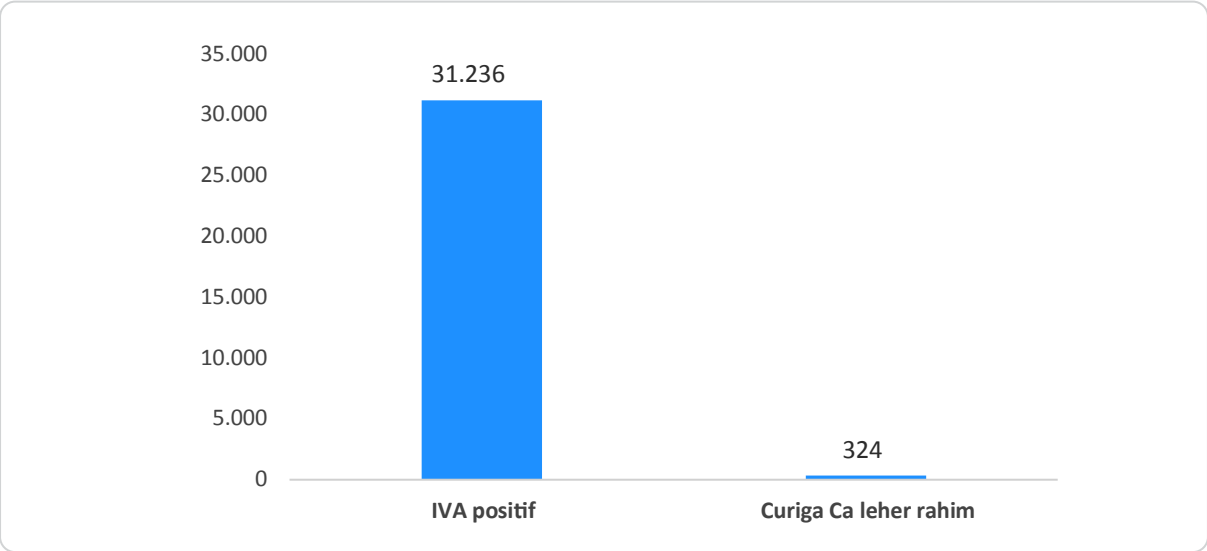

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023, hasil pemeriksaan IVA positif sebanyak 31.236 (1%) dan yang dicurigai kanker leher rahim sebanyak 324 (0,01%) dari 3.114.505 perempuan usia 30-50 tahun yang telah dilakukan deteksi dini kanker leher rahim.

GAMBAR 6.65
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA
PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2023

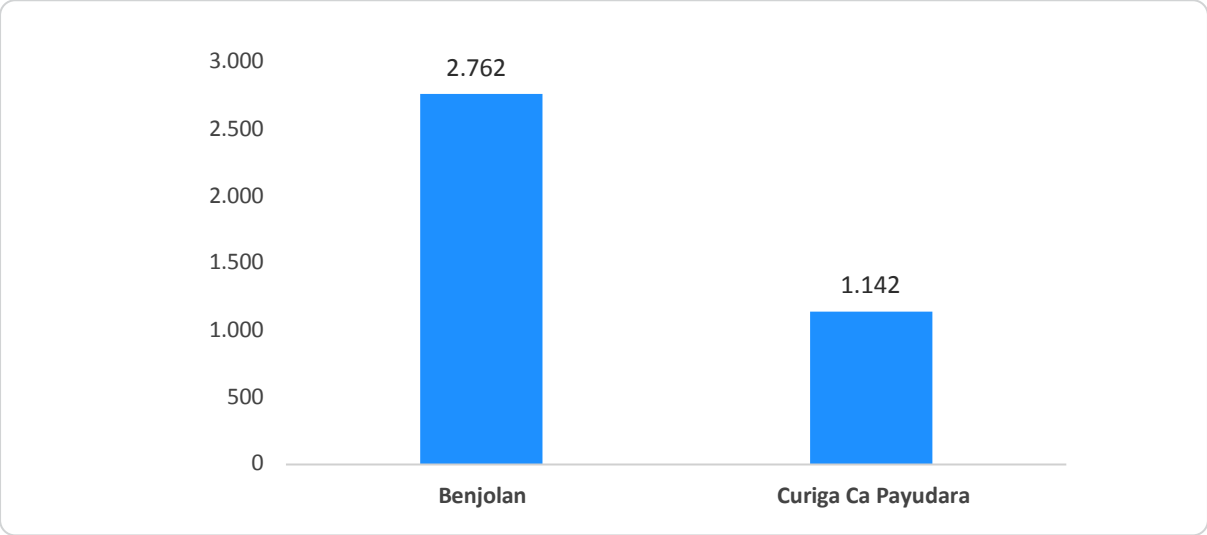

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023, dari 2.277.407 perempuan usia 30-50 tahun yang telah dilakukan deteksi dini kanker payudara sebanyak 2.762 (0,12%) ditemukan benjolan dan sebanyak 1.142 (0,05%) yang dicurigai kanker payudara.

3. Pengendalian Konsumsi Tembakau

Perilaku merokok merupakan salah satu faktor risiko yang diintervensi pada pengendalian penyakit tidak menular. Salah satu upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yaitu melalui pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Dengan indikator ini diharapkan dapat mendorong terciptanya manusia Indonesia yang sehat, bebas dari paparan asap rokok, berkualitas, dan produktif.

Untuk memperkuat implementasi KTR, Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang menerapkan KTR. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kumulatif kabupaten/kota memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan/atau terdapat lebih dari 40% tatanan yang memenuhi indikator penerapan KTR (3 dari 7 tatanan). Sebanyak 458 kabupaten/kota (89,1%) telah menerapkan KTR sampai dengan tahun 2023. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 340 kabupaten/kota.

GAMBAR 6.66
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI INDONESIA TAHUN 2023

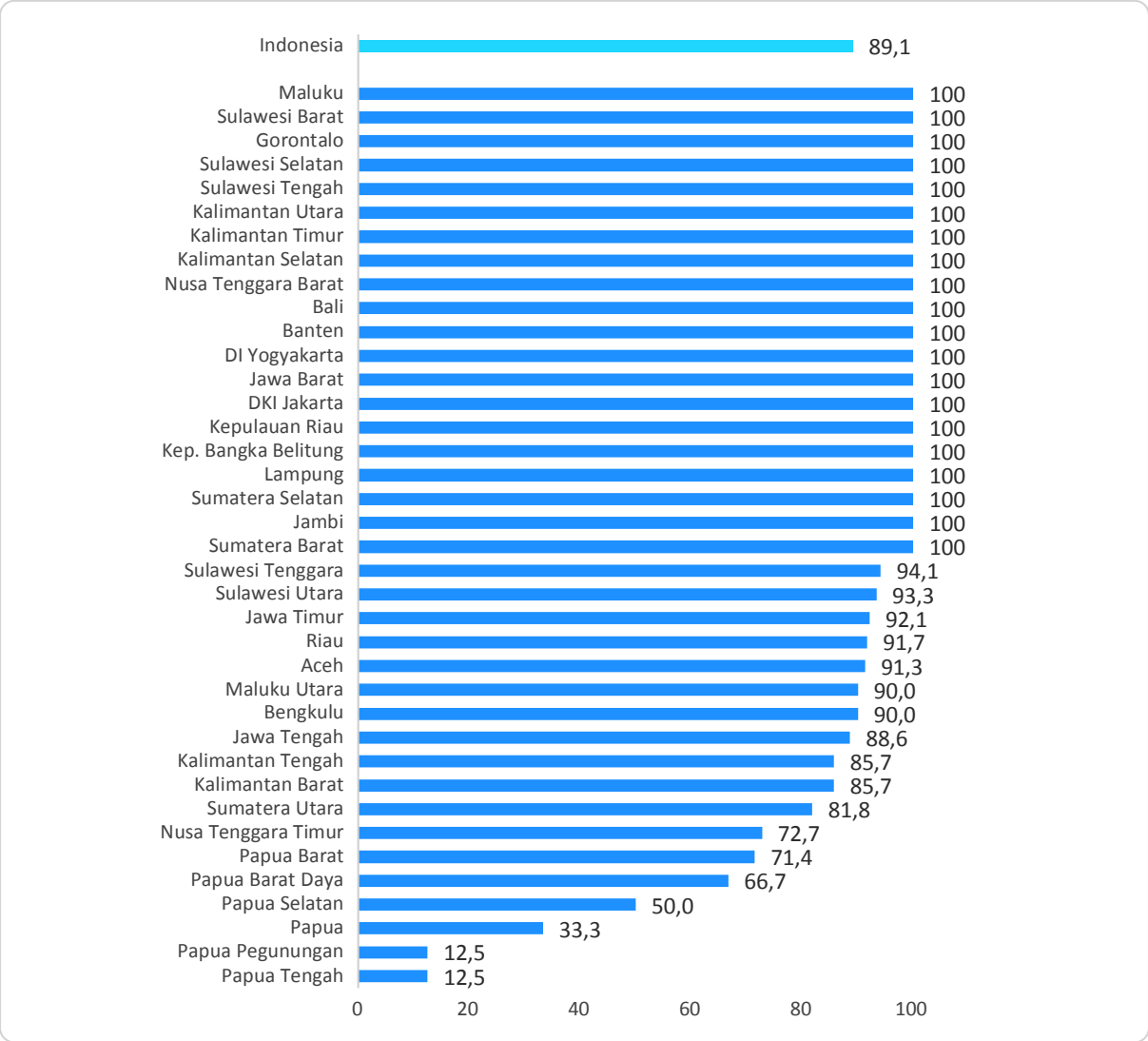

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah menerapkan KTR meningkat, 4 provinsi di tahun 2022 menjadi 20 provinsi di tahun 2023. Tiga provinsi yang masih memiliki persentase kabupaten/kota menerapkan KTR kurang dari 50% yaitu Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Selain penerapan KTR, pemerintah mengembangkan inovasi berupa layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM). Layanan ini merupakan upaya promotif, preventif dan tatalaksana pengendalian konsumsi rokok dengan membantu masyarakat untuk berhenti merokok dari gejala putus nikotin yang dilaksanakan di FKTP, salah satunya di Puskesmas. Puskesmas layanan UBM adalah Puskesmas yang melaksanakan layanan konseling UBM. Strategi ini ditempuh untuk menurunkan prevalensi perokok usia 10-18 tahun. Diharapkan, kabupaten/kota di Indonesia menyelenggarakan layanan UBM di ≥40% Puskesmas.

GAMBAR 6.67
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI ≥40% PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2023

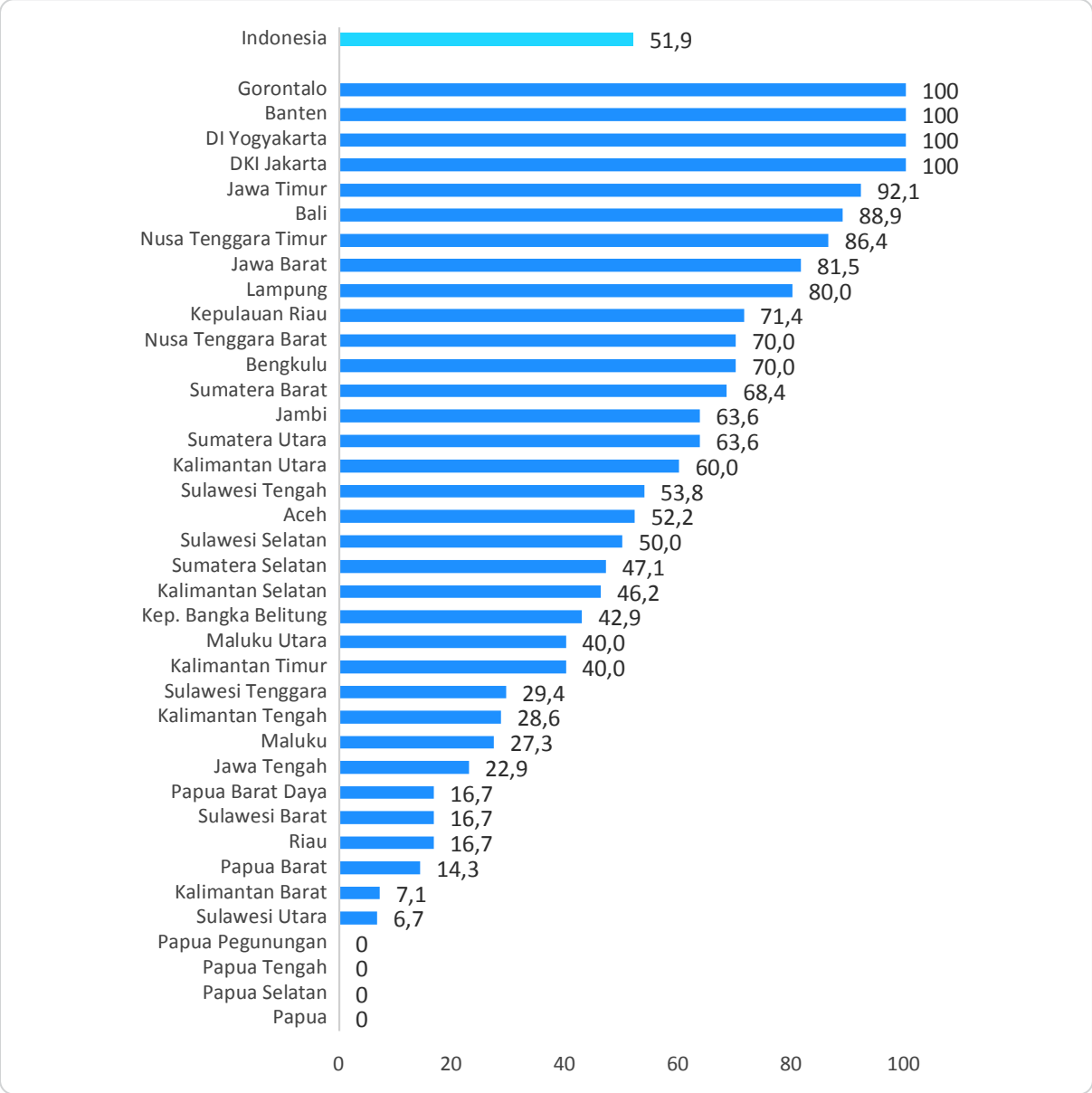

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023, jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan layanan UBM di ≥40% Puskesmas ada sebanyak 267 meningkat dari tahun 2022. Empat provinsi sudah mencapai 100 kabupaten/kota yang melaksanakan layanan UBM di ≥40% Puskesmas, yaitu Gorontalo, Banten, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Namun empat provinsi belum melaksanakan layanan UBM atau tidak melaporkan kegiatan yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

4. Deteksi Dini Gangguan Indera

Upaya penanggulangan gangguan indera dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sejalan dengan enam pilar transformasi sistem kesehatan, khususnya untuk mewujudkan transformasi layanan primer pada pengendalian penyakit tidak menular, maka upaya deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan program utama dalam rangka penemuan kasus secara dini. Upaya ini dilakukan agar kasus yang ditemukan segera mendapatkan intervensi atau penanganan dini untuk menekan angka kesakitan, kematian dan disabilitas akibat gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.

Sasaran program mengacu pada siklus hidup dan pendekatan keluarga, sehingga pelaksanaan deteksi dini dilakukan terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai lintas program dan lintas sektor terkait. Di era desentralisasi, deteksi dini gangguan indera diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Deteksi dini gangguan indera adalah kegiatan deteksi dini gangguan penglihatan dan atau gangguan pendengaran merupakan salah satu skrining yang masuk dalam skrining PTM prioritas . Sasaran yang diharapkan adalah pada kelompok usia 7-15 tahun dan >15 tahun. Data deteksi dini ganguan indera diperoleh dari pencatatan dan pelaporan pada pelayanan kesehatan maupun dari kegiatan pengelola program di Kemenkes dan lintas sektor, yang saat ini dilakukan secara sistem melalui Aplikasi Sehat Indonesia-Ku (ASIK) dan Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) secara terintegrasi.

Pada tahun 2023 hampir seluruh kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada sasaran usia 7-15 tahun dan >15 tahun dengan capaian sebesar 26,3%. Capaian ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 70% dari sasaran deteksi dini.

GAMBAR 6.68
PERSENTASE PENDUDUK USIA 7-15 DAN >15 TAHUN YANG MELAKSANAKAN SKRINING PTM PRIORITAS (DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA) TAHUN 2023

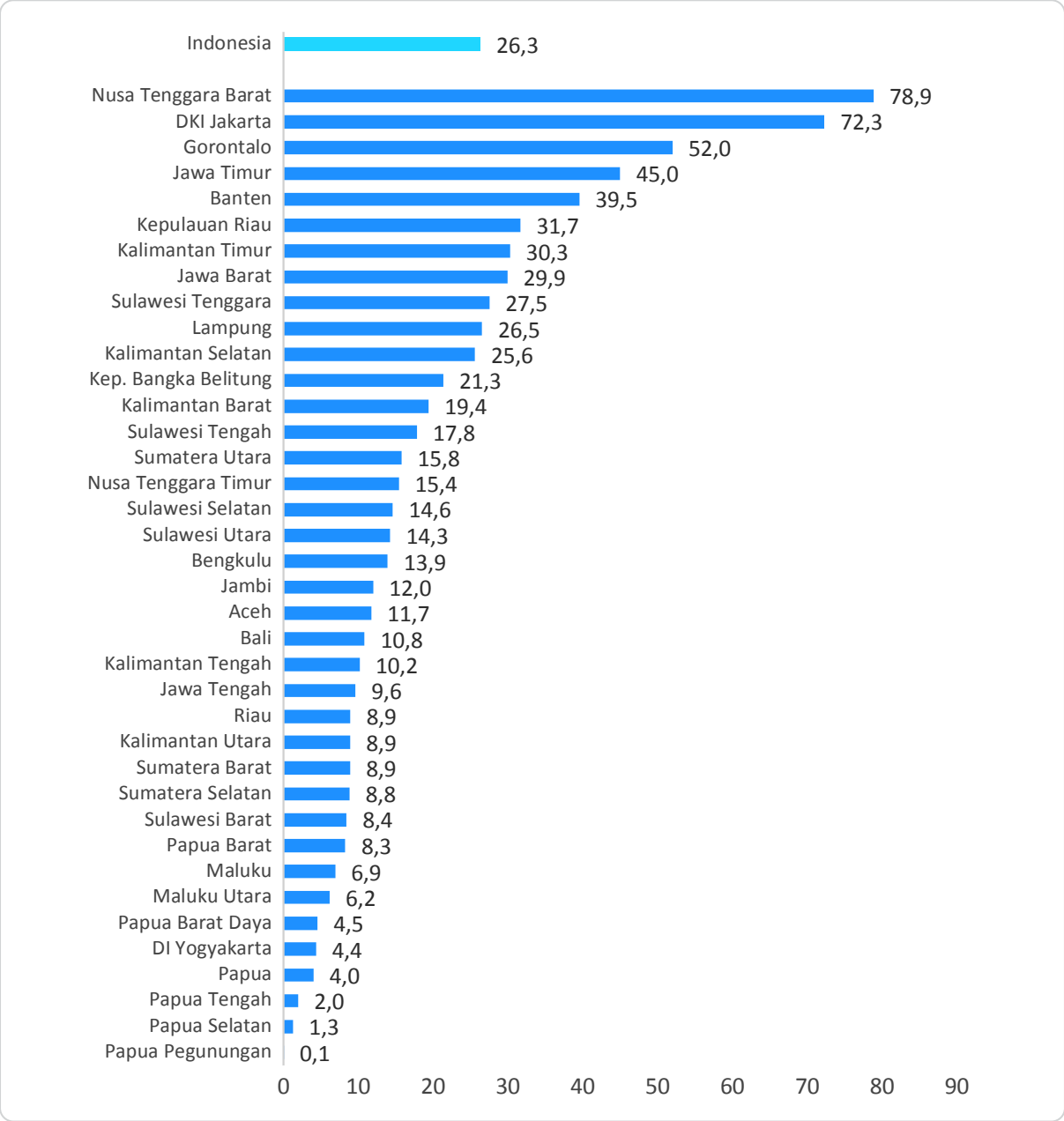

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023, hanya ada 2 provinsi yang mencapai target skrining PTM prioritas dalam hal ini deteksi dini gangguan indera yakni target 70% sasaran pada kelompok usia 7-15 tahun dan >15 tahun yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (78,9%) dan DKI Jakarta (72,3%). Untuk 3 provinsi lainnya sudah cukup baik cakupannya yaitu Provinsi Gorontalo (52%), Jawa Timur)45%) dan Banten (39%). Untuk 33 provinsi lainnya masih jauh dari target yang diharapkan. Adapun 5 provinsi dengan capaian paling rendah yaitu Papua Pegunungan (0,1%), Papua Selatan (1,3%), Papua Tengah (2,0%), Papua (4%) dan DI Yogyakarta (4,4%). Beberapa provinsi tersebut membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah agar pada tahun-tahun berikutnya kegiatan deteksi dini gangguan indera dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

5. Deteksi Dini Obesitas

Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidak seimbangan asupan energi (*energy intake*) dengan energi yang digunakan (*energy expenditure*) dalam waktu lama (WHO, 2000). Obesitas telah menjadi masalah global yang berdampak pada 2 milyar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia. Pada tahun 2030 diperkirakan 1 dari 5 wanita dan 1 dari 7 pria akan hidup dengan obesitas (setara dengan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Prevalensi obesitas global lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki dan jumlah terbesar orang dengan obesitas berada di negara berkembang, di mana beban ganda malnutrisi terus berlanjut dan sistem sangat kurang siap dan tidak dilengkapi dengan baik untuk mengatasi obesitas dan konsekuensinya secara efektif.

Secara global, lebih dari 160 juta tahun kehidupan sehat yang hilang disebabkan oleh IMT yang tinggi pada tahun 2019, dan angkanya kemungkinan akan lebih tinggi setiap tahun. Ini berarti lebih dari 20% dari semua tahun kehidupan sehat yang hilang yang disebabkan oleh kesehatan kronis yang dapat dicegah. Jika kita ingin mengatasi PTM yang dapat dicegah, maka keberhasilan dalam mengatasi obesitas sangat penting. Di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan obesitas yang cukup signifikan, dari 10,5% di tahun 2007 menjadi 21,8% di tahun 2018. Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, jantung, kanker, hipertensi dan penyakit metabolik maupun non metabolik lainnya serta berkontribusi pada penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular (5,87% dari total kematian), penyakit diabetes dan ginjal (1,84% dari total kematian).

Berdasarkan data-data tersebut, maka upaya pengendalian obesitas menjadi sangat strategis dalam mencegah terjadinya penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat di Indonesia. Salah satu upaya mengendalikan peningkatan prevalensi obesitas adalah dengan melakukan deteksi dini faktor risiko PTM melalui upaya-upaya kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk kementerian/Lembaga, TNI dan POLRI, institusi Pendidikan dan pihak swasta. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menyusun strategi untuk menemukan faktor risiko obesitas dengan melakukan deteksi dini faktor risiko PTM secara masif di 514 Kabupaten/Kota sebagai indikator kinerja program tahun 2022-2024, yaitu Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM dengan cara penghitungan berdaarkan jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM. Pada tahun 2023, indikator tersebut ditargetkan mencapai 514 kab/kota di Indonesia yang akan dipantau melalui Aplikasi Sehat Indonesia ku (ASIK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi PTM.

Definisi Operasional Indikator prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥ 18 tahun adalah kasus obesitas pada penduduk usia ≥ 18 tahun dengan kategori IMT > 27 pada periode tertentu. Indikator ini dihitung dari jumlah penduduk usia ≥ 18 tahun dengan IMT >27 dibagi dengan total peduduk usia ≥ 18 tahun di kali 100 persen, pada periode tertentu.

Obesitas merupakan penyakit, sekaligus merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular lain yang mendorong munculnya faktor metabolik (penyakit jantung, diabetes, kanker, hipertensi, dislipidemia). Prevalensi obesitas (Indeks Masa Tubuh (IMT) ≥ 27) meningkat dari 15,4% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan peningkatan proporsi obesitas sentral dari 26,6% di tahun 2013 menjadi 31% di tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Berdasarkan data tersebut maka target yang ditetapkan sebagai baseline data tahun 2023 sebagai target indikator sebesar 21,8%.

Sasaran penduduk untuk program deteksi dini obesitas adalah 70% dari sasaran penduduk

usia ≥18 tahun. Pada tahun 2023, persentase penduduk usia ≥18 tahun yang telah dilakukan deteksi dini obesitas di Indonesia sebesar 48,8% atau sekitar 68.161.703 orang. Provinsi persentase tertinggi penduduk usia ≥18 tahun yang melaksanakan deteksi dini obesitas adalah Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta dengan persentase lebih dari 100%, artinya sudah melebihi target 70% sasaran yang ditetapkan. Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Pegunungan (0,2%).

GAMBAR 6.69
PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥18 TAHUN YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI OBESITAS TAHUN 2023

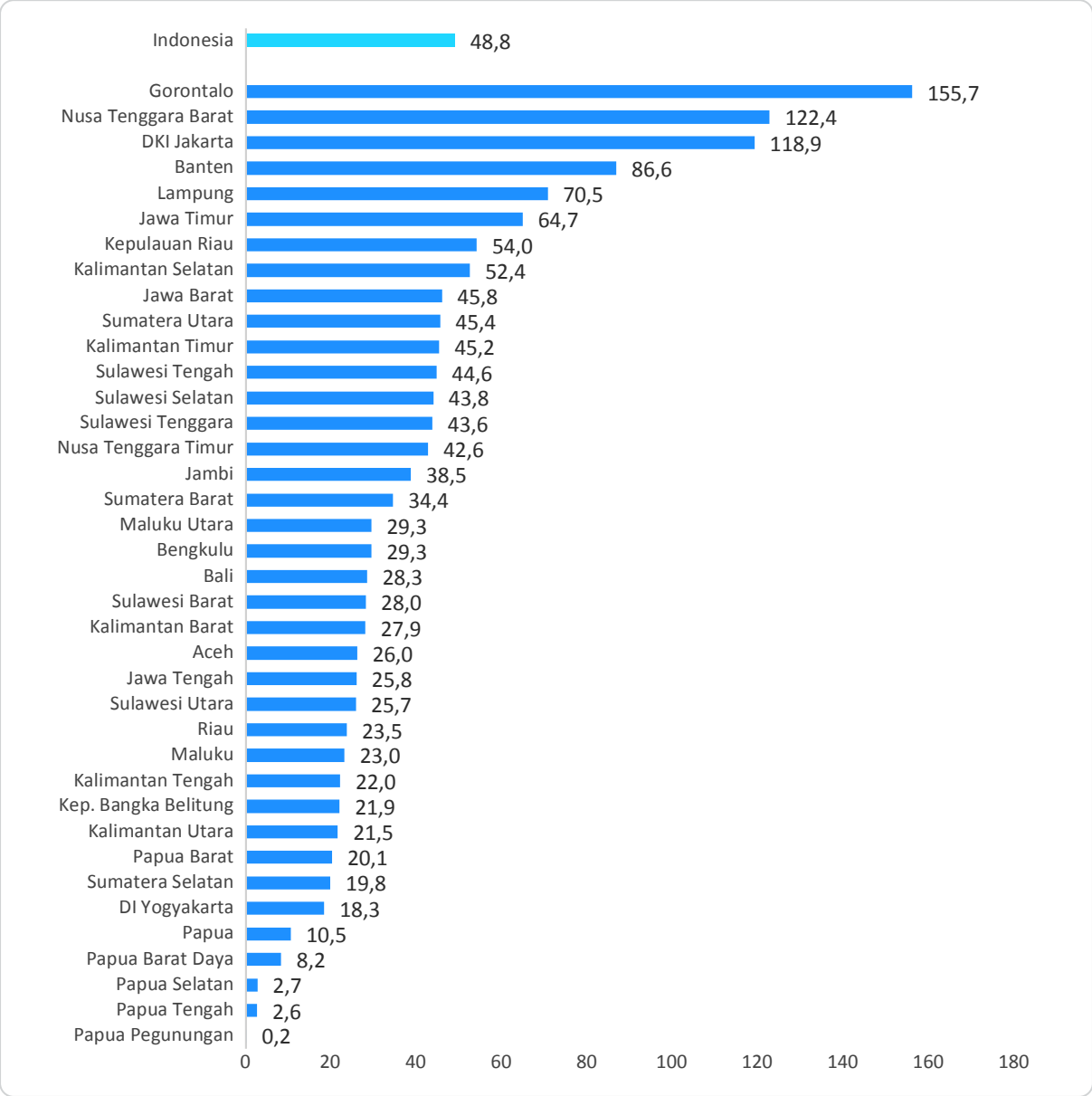

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Dari hasil deteksi dini, diketahui bahwa proporsi penduduk usia ≥18 tahun yang obesitasi di Indonesia pada tahun 2023 adalah 12,2%. Provinsi dengan proporsi terendah penduduk usia ≥18 tahun yang obesitas adalah Nusa Tenggara Timur (5,3%), sedangkan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah Papua Selatan (22,2%), Papua (21,6%), dan Papua Tengah (21,2%).

GAMBAR 6.70
PROPORSI PENDUDUK USIA >18 TAHUN YANG OBESITAS BERDASARKAN HASIL DETEKSI DINI TAHUN 2023

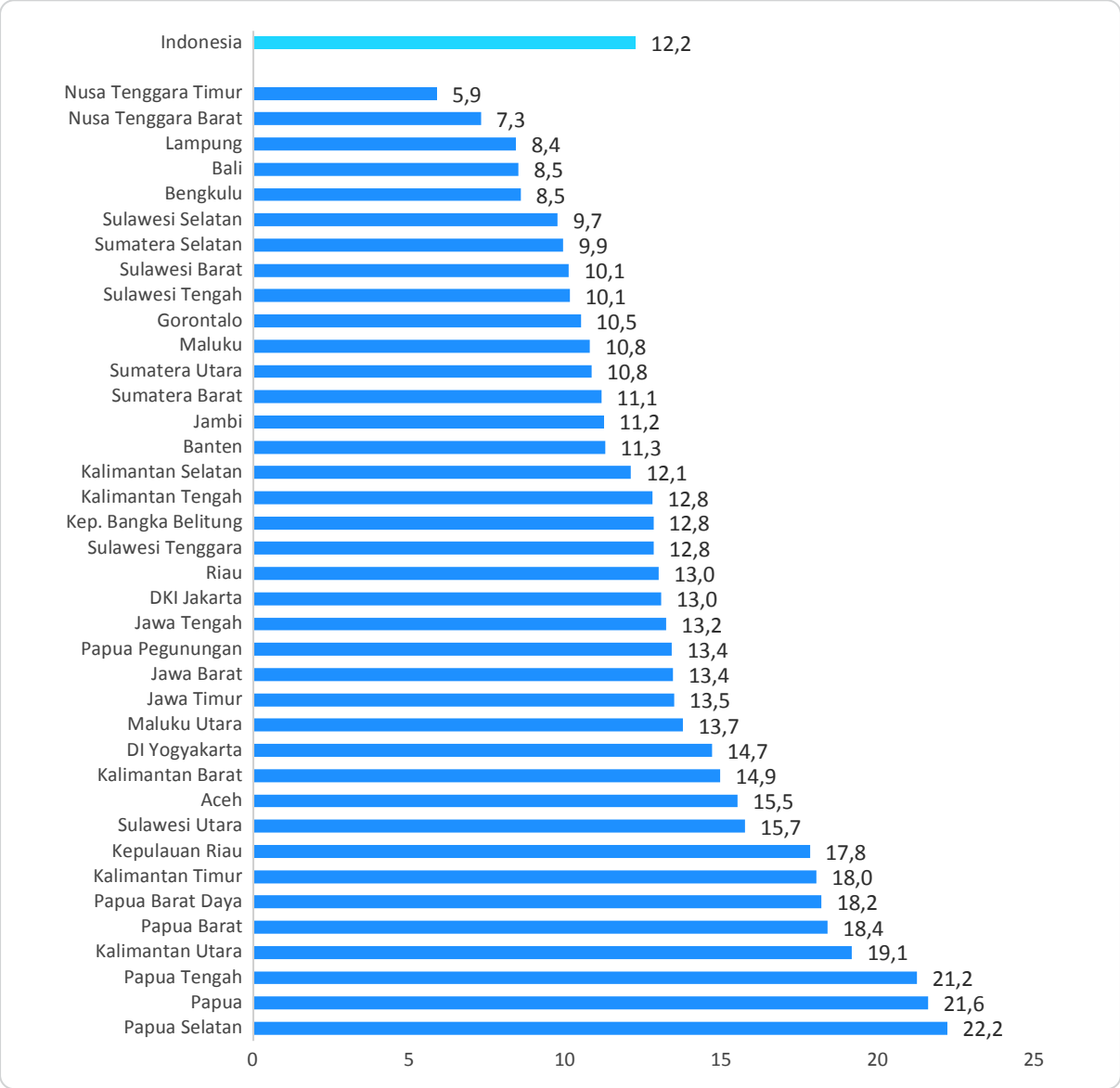

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

E. KESEHATAN JIWA DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)

Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontibusi untuk komunitasnya (UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Kesehatan jiwa mempunyai peran yang penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024.

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), yang apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan ketergantungan yang ditandai antara lain dengan dosis penggunaan yang semakin besar, kesulitan mengontrol keinginan untuk menggunakan NAPZA, muncul gejala putus zat jika penggunaan dihentikan, hingga tetap menggunakan NAPZA meskipun mengetahui dampak buruknya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sementara zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus.

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Upaya pelayanan kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

a. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa

Deteksi dini merupakan langkah awal yang penting untuk menyaring antara individu yang sehat dengan individu yang memiliki indikasi terhadap permasalahan kesehatan jiwa pada populasi. Semakin cepat suatu penyakit terdeteksi, dalam hal ini gangguan jiwa, akan semakin cepat proses diagnosis dan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan pertolongan. Dengan begitu diharapkan dapat mencegah dan/ atau memperlambat proses perjalanan penyakit sehingga terjadinya hendaya (abnormalitas fungsi seseorang yang dikaitkan dengan perilaku) dan disabilitas dapat dicegah. Skrining kesehatan jiwa dilakukan agar penduduk yang mengalami masalah kesehatan jiwa dapat ditemukan dan mendapat layanan preventif dan/atau layanan tindak lanjut lainnya lebih dini. Penduduk dengan kondisi sehat jiwa dapat diupayakan tetap sehat dengan mendapat upaya promosi kesehatan jiwa.

Program skrining kesehatan jiwa saat ini difokuskan pada penduduk berisiko masalah kesehatan jiwa mulai usia 15 tahun ke atas. Pada program ini menggunakan tiga jenis instrumen skrining. Pada kelompok usia 15-18 tahun skrining menggunakan instrumen *Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)*, pada kelompok usia > 18 tahun dengan menggunakan instrumen *Self Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20)*, dan skrining penyalahgunaan NAPZA pada kelompok usia mulai 15 tahun ke atas dengan menggunakan instrumen *Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST).* Penyelenggaraan skrining kesehatan jiwa ini dilaksanakan berbasis masyarakat, berbasis institusi dan berbasis Fasilitas Layanan Kesehatan Primer (FKTP).

Berdasarkan agenda konfirmasi data kesehatan jiwa yang dilakukan pada tahun 2023, dari pelaporan data deteksi dini daerah diketahui masih terdapat kabupaten/kota yang belum menjalankan program skrining. Kategori Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa adalah kabupaten/kota yang telah menerapkan deteksi dini dengan menggunakan instrumen yaitu *SDQ* atau *SRQ*-20, atau *ASSIST* dan melaporkan data tersebut pada Sistem Informasi Kesehatan Jiwa.

GAMBAR 6.71
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA TAHUN 2023

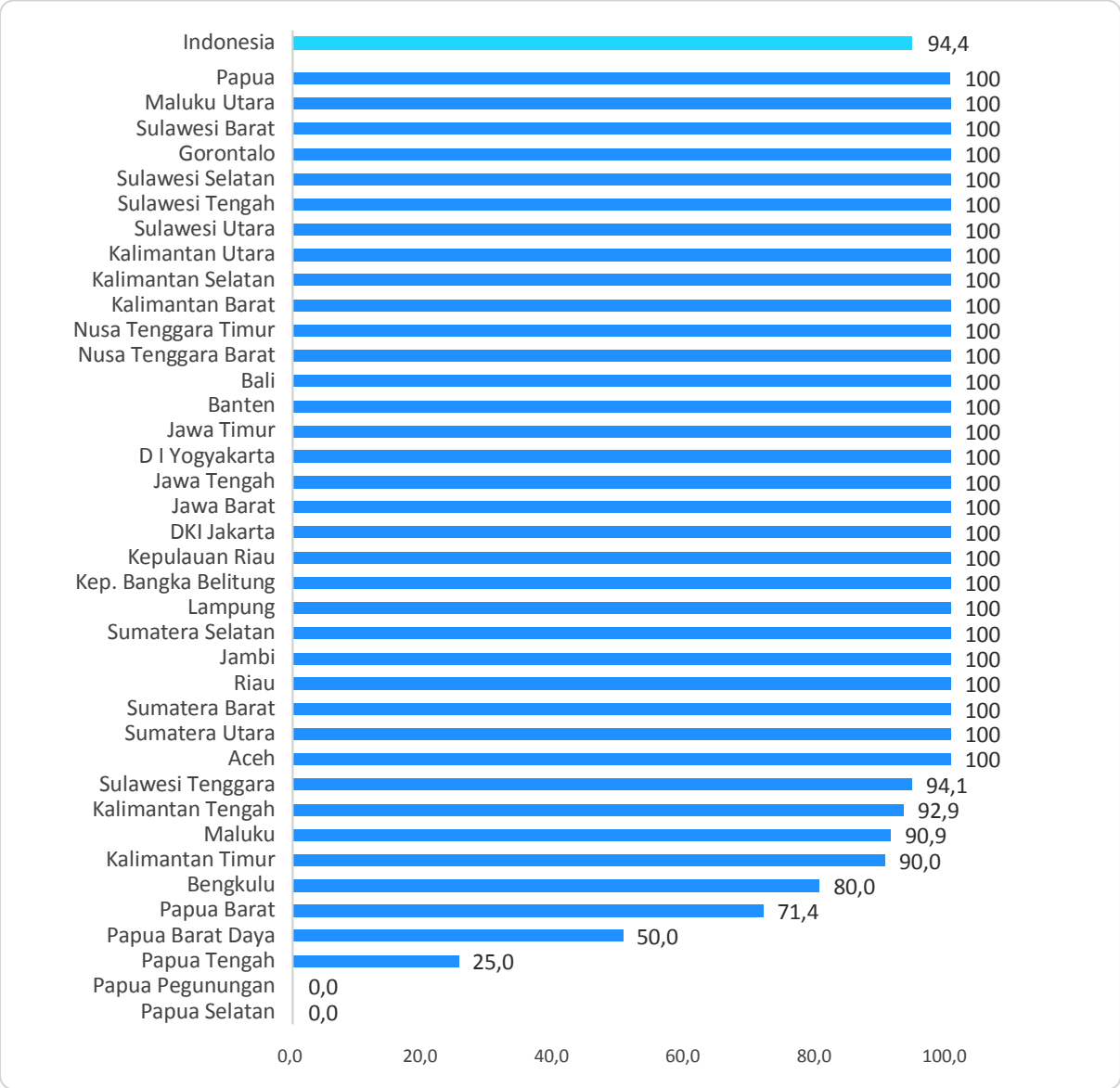

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa dari 38 provinsi, terdapat 36 provinsi yang dapat melaporkan data pelaksanaan deteksi dini kesehatan jiwa/NAPZA, adapun 2 provinsi yang tidak dapat melaporkan pelaksanaan kegiatan deteksi dini adalah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Kedua provinsi ini merupakan provinsi baru di tahun 2023, sehingga besar kemungkinan bahwa pelaksanaan kegiatannya masih bergantung dari provinsi induk sebelumnya yakni Papua dikarenakan keterbatasan SDM pelaksana.

Secara nasional, persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa/ NAPZA mencapai 94,4%. Dari 36 provinsi, terdapat 28 provinsi yang sudah melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan NAPZA 100%; 6 provinsi diantaranya 70-94% dan 2 provinsi diantaranya 50% kebawah (Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Tengah).

b. Persentase Penduduk Usia ≥ 15 Tahun dengan Risiko Masalah Jiwa yang Mendapatkan Skrining

Persentase penduduk usia ≥ 15 Tahun dengan risiko masalah jiwa yang mendapatkan skrining adalah persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan layanan skrining dengan menggunakan instrument SDQ (untuk usia 15-18 tahun) dan/atau SRQ-20 (usia diatas 18 tahun) dan/atau ASSIST (bagi kelompok sasaran yang memiliki kecenderungan penyalahguna NAPZA).

Berdasarkan Permenkes 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, skrining dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/atau kader kesehatan dan/atau guru terlatih pada kelompok berisiko berdasarkan siklus hidup dalam kurun waktu 1 tahun. Kelompok berisiko masalah kesehatan jiwa berdasarkan siklus hidup yang menjadi sasaran program antara lain: remaja (siswa baru dan Tingkat akhir SMP dan SMA; santri remaja dengan disabilitas; korban tindak kekerasan; korban dan penyintas bencana alam); dewasa (mahasiswa baru dan tingkat akhir perguruan tinggi; ibu hamil dan post partum; ibu dengan anak balita; orang tua tunggal; pekerja migran; keluarga/pendamping ODGJ; pendamping lansia; warga binaan di lapas; pekerja dengan sistem shift; lansia yang hidup sendiri/hanya dengan pasangannya; lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang; penghuni panti sosial; dan pasien dengan penyakit kronis.

Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah jiwa yang mendapatkan skrining diperoleh dengan melihat perbandingan antara penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah jiwa yang mendapatkan skrining, dengan estimasi penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, target penduduk dengan risiko masalah kesehatan jiwa pada tahun 2023 sebesar 60% dari angka sasaran penduduk.

Pada gambar 6.72, persentase penduduk di Indonesia usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining adalah sebesar 16,4%, artinya bahwa dari target skrining baru 27,3%. Meskipun angka capaian secara nasional maupun per provinsi masih jauh dari target yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu sebesar 60%, namun angka capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yakni 10,1%.

Dari 38 provinsi, hanya tiga provinsi (Bangka Belitung, Banten dan Sulawesi Selatan) yang capaiannya mendekati target program. Adapun provinsi lainnya masih jauh dari target. Tingkat capaian paling rendah didapati pada seluruh wilayah pemekaranan Provinsi Papua-Papua Barat dengan 2 dari 6 provinsi diantaranya yakni Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan tidak dapat melaporkan data pelaksanaan skrining.

GAMBAR 6.72
PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 15 TAHUN
DENGAN RISIKO MASALAH JIWA YANG MENDAPATKAN SKRINING
TAHUN 2023

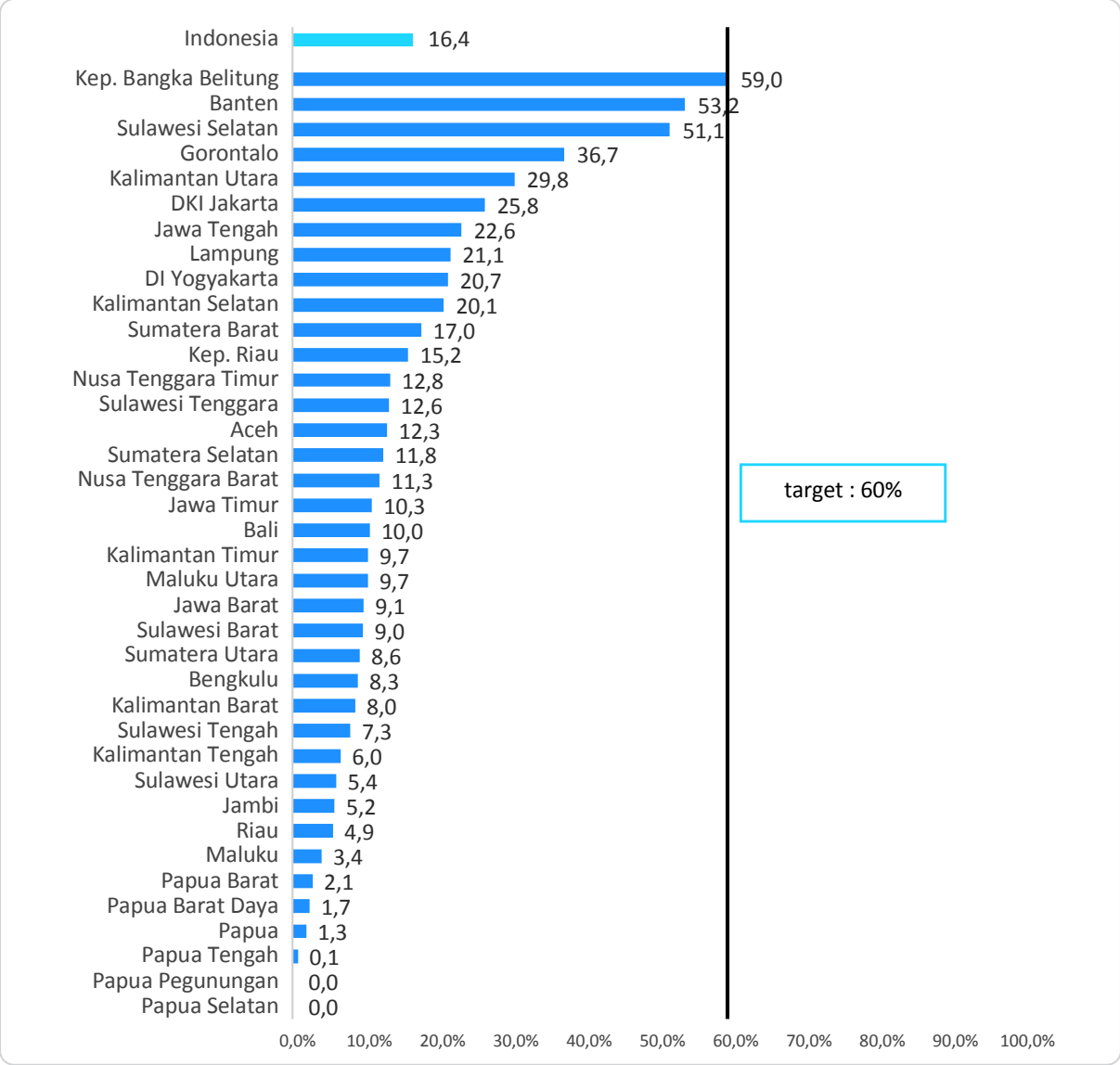

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan data SKI 2023, prevalensi masalah kesehatan jiwa dalam satu bulan terakhir pada penduduk umur ≥ 15 tahun di Indonesia adalah sebesar 2,0%. Angka prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah, tidak bekerja, tempat tinggal di perkotaan, dan status ekonomi terbawah.

Menurut SKI 2023, angka prevalensi pada provinsi dengan capaian terendah secara berturut-turut: Provinsi Papua Pegunungan sebesar 3,0%; Provinsi Papua Tengah sebesar 2,9%; Papua Barat Daya sebesar 2,1%; Papua Barat sebesar 1,6%; dan Papua Selatan sebesar 1,3%. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya memiliki prevalensi yang melebihi angka nasional. Dengan tingkat capaian kegiatan skrining di Indonesia sebesar 16,4 %, maka kemungkinan 83,6% kasus masalah kesehatan jiwa yang belum dapat ditemukan lebih awal untuk dilakukan upaya tindak lanjut agar kondisi tidak bertambah buruk.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target adalah:

1. Kesehatan jiwa di daerah belum dianggap prioritas sehingga dukungan pemangku kepentingan di daerah dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan skrining kesehatan jiwa belum optimal
2. Masih kurangnya pemahaman petugas dalam pelaporan data rutin yang dilakukan melalui Sistem Informasi Kesehatan Jiwa sehingga ada beberapa kabupaten/kota yang belum optimal melaporkan hasil kegiatan skrining
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas kesehatan jiwa di Puskesmas dalam menyelenggarakan skrining kesehatan jiwa dan melakukan intervensi hasil skrining kesehatan jiwa
4. Belum meluasnya cakupan pelaksanaan skrining (belum menjangkau seluruh masyarakat)
5. Masih adanya stigma di masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak melakukan skrining kesehatan jiwa untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwanya

c. Persentase Penyandang Gangguan Jiwa yang Memperoleh Layanan di Fasyankes

Pelayanan kesehatan jiwa pada penyandang gangguan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat, kinerjanya diukur dengan indikator persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Jiwa Tahun 2023, 2023).

Konsep gangguan jiwa dari PPDGJ III yang merujuk ke DSM-III adalah sindrom atau pola perilaku, atau psikologi seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress)* atau hendaya (*impairment/ disability)* di dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikis, atau biologis, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.

Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di fasyankes adalah persentase penyandang gangguan depresi, ansietas, dan skizofrenia yang memperoleh layanan di fasyankes dengan kriteria: sesuai dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Edisi III (1981) Nakes (UU No. 36 Tahun 2014) tentang tenaga kesehatan terlatih membuat pencatatan dan pelaporan. Jumlah sasaran merupakan estimasi yang diperoleh berdasarkan proyeksi jumlah penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2023 , dan diperoleh target sebanyak 606.903 jiwa.

Data persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di fasyankes seperti yang dapat dilihat pada gambar 6.73 diperoleh dari laporan Puskesmas yang ada di Indonesia pada Sistem Informasi Kesehatan Jiwa. Berdasarkan data tersebut, proporsi penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes pada tahun 2023 adalah sebesar 32,7% dari target sebesar 60%. Angka capaian pada tahun 2023 terlihat meningkat daripada capaian pada tahun 2022 (26,9% dari target sebesar 30%), namun apabila dilihat proporsi antara capaian dengan target maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 lebih tinggi daripada capaian di tahun 2023.

GAMBAR 6.73
PERSENTASE PENYANDANG GANGGUAN JIWA YANG MEMPEROLEH LAYANAN DI FASYANKES MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

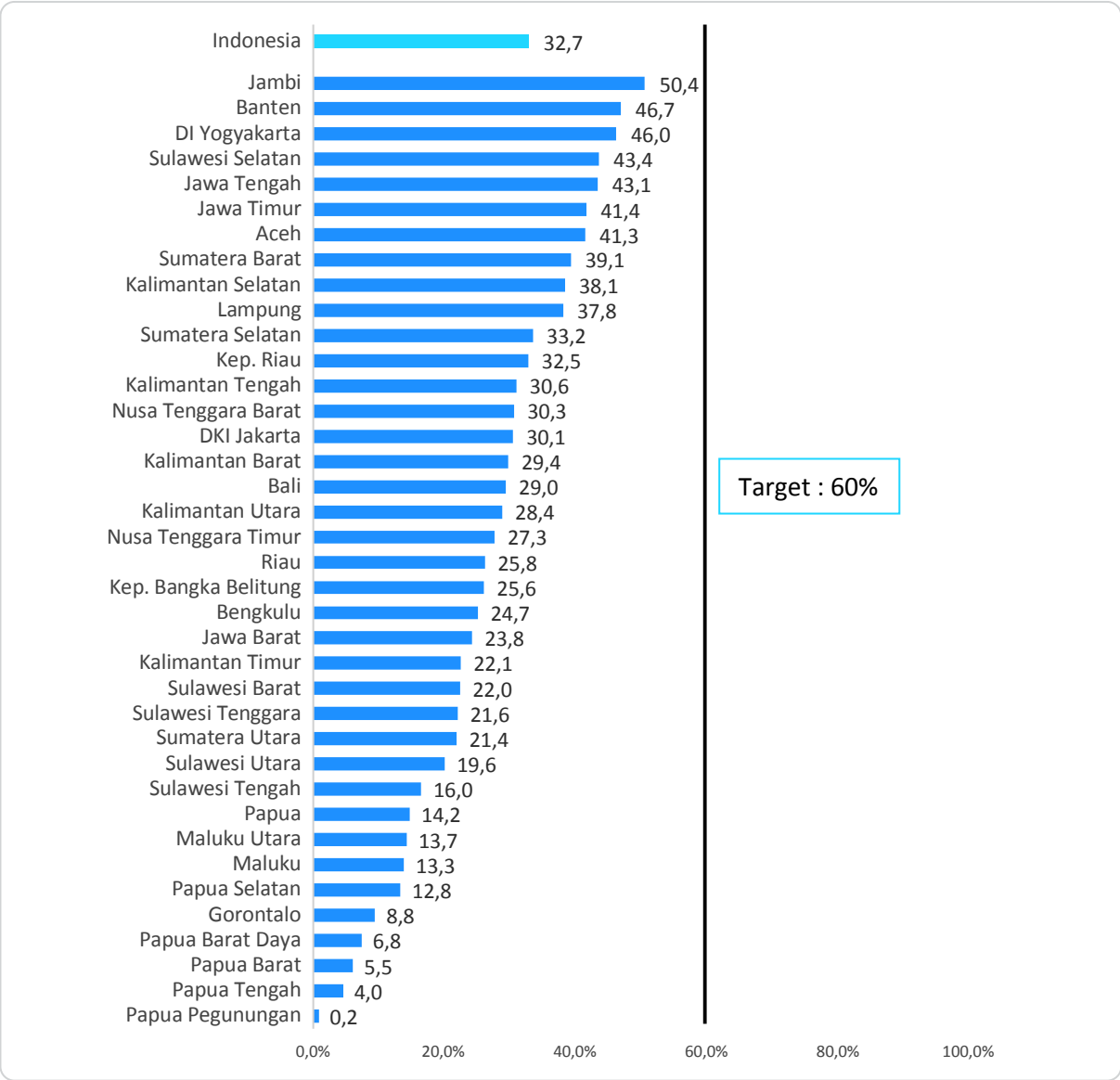

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Tantangan pelaksanaan program ini dinilai cukup kompleks dimulai dari kesenjangan pengobatan hingga data kasus gangguan jiwa yang dilaporkan pada sistem informasi kesehatan jiwa. Kesenjangan pengobatan (*treatment gap*) merepresentasikan perbedaan besaran prevalensi penyakit dengan proporsi individu sakit yang mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan. Kesenjangan ini dapat dilatarbelakangi oleh faktor predisposisi, faktor ketersediaan fasilitas, sarana, dan akses, dan faktor pendorong dari lingkungan sosial. Kompleksitas faktor yang menjadi kausalitas kesenjangan dapat diatasi dengan menerapkan strategi yang tepat. Ketepatan ini dapat dihubungkan dengan data sebagai basis bukti ilmiah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang tidak melaporkan kasus gangguan jiwa pada sistem informasi. Maka dari itu, peningkatan akses pelayanan kesehatan jiwa untuk menurunkan kesenjangan pengobatan gangguan jiwa dan peningkatan pelaporan data oleh petugas menjadi tuntutan yang perlu dipenuhi oleh fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia guna menghasilkan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan berkelanjutan.

d. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Layanan

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria diagnosis yang ditetapkan. Lebih detail, ODGJ berat adalah orang yang mendapatkan diagnosis oleh psikiater, dokter, psikolog klinis sebagai penderita Skizofrenia atau Psikosis Akut dan harus mendapat layanan dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, RSU dengan layanan Kesehatan Jiwa, RSJ). Gejala khas psikosis/skizofrenia berupa adanya waham atau halusinasi yang menetap selama satu bulan atau lebih, disertai perilaku aneh seperti *katatonik* atau *agresivitas,* serta gejala negatif yang berdampak signifikan kepada kualitas hidup keseluruhan.

ODGJ memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, diantaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. ODGJ berat mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), mendapatkan informasi dan edukasi, serta tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka prevalensi rumah tangga dengan ART gangguan jiwa skizofrenia/psikosis adalah sebesar 6,7 permil. Angka ini menunjukkan bahwa per 1000 rumah tangga terdapat 6,7 rumah tangga yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia/psikosis. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, proporsi rumah tangga yang memiliki ART dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia yang pernah dipasung sebesar 6,6%, proporsi rumah tangga yang memiliki ART dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia yang berobat 1 bulan terakhir dan berobat rutin 1 bulan terakhir di fasilitas kesehatan sebesar 55,9%

Berdasarkan laporan dari dinas kesehatan tahun 2022 Persentase ODGJ berat per mil yang memperoleh layanan di fasyankes sebesar 88,1%. Dari 34 provinsi yang melaporkan, capaian yang diatas 100% sebanyak 8 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Kepri, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, target sasaran program sebesar 90% dari estimasi sasaran ODGJ berat sebanyak 491.958 jiwa. Capaian ODGJ berat yang memperoleh layanan di fasyankes sebesar 105,2%. Rata-rata angka capaian per provinsi sudah berada diatas 50%. Empat provinsi dengan angka capaian dibawah 50% berada di Papua yaitu Provinsi Papua Barat Daya (28,6%), Papua Barat (24,3%), Papua Tengah (19,7%), dan terendah ada di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,34%.

2. Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menjamin hak dan mengatur kewajiban penyalahguna dan pecandu narkotika untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis pada penyalahguna NAPZA merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna Narkotika dari ketergantungan Narkotika. Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului dengan proses wajib lapor.

Wajib lapor merupakan suatu kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan /atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika. Di Indonesia, ada sebanyak 905 IPWL dan fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan satelit program terapi rumatan metadona, di 35 provinsi, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2020 pada tahun 2023. Provinsi terbaru yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, belum memiliki IPWL dan fasiitas pelayanan kesehatan pengampu dan satelit program terapi rumatan metadona.

Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis berasal dari penyalahguna yang datang secara sukarela dan/atau pembantaran, dan/atau kasus putusan pengadilan dan/atau mendapatkan rehabilitasi medis rawat jalan dan/atau rawat inap di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Metode penemuan kasus penyalahguna NAPZA dilakukan dengan menggunakan metode ASSIST. ASSIST, yang dikeluarkan oleh WHO, merupakan instrumen yang dirancang secara khusus untuk digunakan secara internasional pada pusat layanan kesehatan primer. Pelaksanaan skrining dengan menggunakan metode ASSIST dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dengan instrumen ASSIST perlu dilakukan kegiatan pelatihan atau orientasi untuk meningkatkan kapasitas bagi tenaga kesehatan di puskesmas, guru Bimbingan Konseling di sekolah, serta unit kepegawaian (*Human Resources Department/* HRD). Upaya lanjutan dilakukan terhadap hasil deteksi dini ASSIST dengan intervensi singkat melalui diskusi sederhana dan singkat dengan pasien mengenai skor ASSIST dan intervensi lanjutan. Pada upaya deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dilakukan juga pemeriksaan dengan menggunakan metode *rapid test urine* untuk mengetahui kandungan narkotika; memberikan edukasi kepada masyarakat; meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika; mewujudkan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika; dan mendorong masyarakat yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penyalahgunaan narkotika. (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2023). Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA dapat dilakukan pada kelompok berisiko. Kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah dan tempat kerja, deteksi dini penyalahgunaan NAPZA menggunakan ASSIST, dan membuka layanan deteksi dini NAPZA.

Pada tahun 2022, target sasaran penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis adalah sebanyak 10.500 orang. Dari target tersebut, ada sebanyak 10.826 orang penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis di 34 provinsi. Pada tahun 2023 terdapat pemekaran wilayah di Indonesia, ada satu klinik di Provinsi Papua Tengah yang dijadikan sebagai IPWL dan pelayanan kesehatan pengampu dan satelit program terapi rumatan metadona. Pada tahun 2023, target sasaran naik menjadi 11.000 orang dan diperoleh capaian sebanyak 13.472 (122,5%) orang penyalahguna NAPZA yang mendapat rehabilitasi medis. Capaian layanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna NAPZA pada tiga tahun terakhir sudah berada diatas 100%. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh penyalahguna NAPZA yang berasal dari penyalahguna yang datang secara sukarela dan/atau pembantaran, dan/atau kasus putusan pengadilan dan/atau telah mendapatkan rehabilitasi medis rawat jalan dan/atau rawat inap di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Angka capaian yang melebihi 100% selama tiga tahun terakhir, ada kecenderungan penetapan target sasaran masih lebih kecil dari kasus yang terjadi di lapangan.

F. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

GAMBAR 6.74
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2023

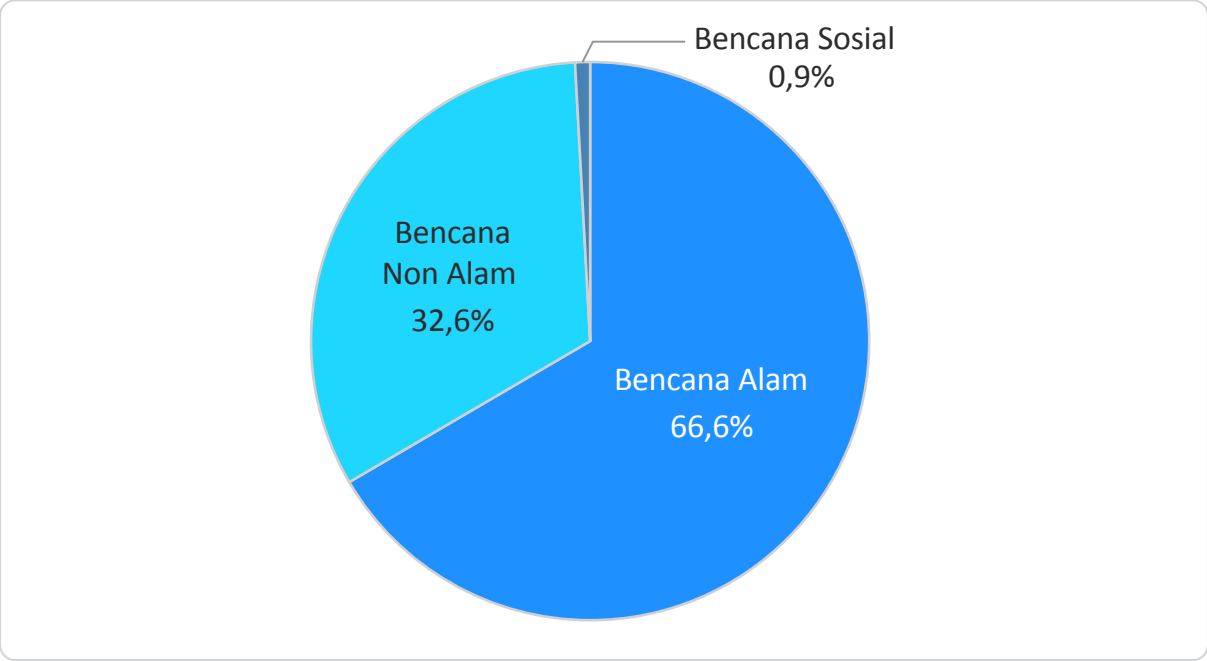

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2024

Sepanjang tahun 2023 terdapat 347 kejadian berdampak krisis kesehatan di Indonesia. Jumlah kejadian berdampak krisis kesehatan tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2022, dimana pada tahun 2022 terdapat 392 kejadian berdampak krisis kesehatan. Pada tahun 2017 terdapat penyesuaian definisi untuk kejadian berdampak krisis kesehatan pada sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, yaitu harus ada pernyataan kedaruratan oleh kepala daerah atau jumlah populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat korban/terjadi pengungsian.

Pada tahun 2023 kejadian berdampak krisis kesehatan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah bencana alam dengan persentase 66,6%, kemudian 32,6% merupakan bencana non alam dan 0,9% bencana sosial.

GAMBAR 6.75
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2023

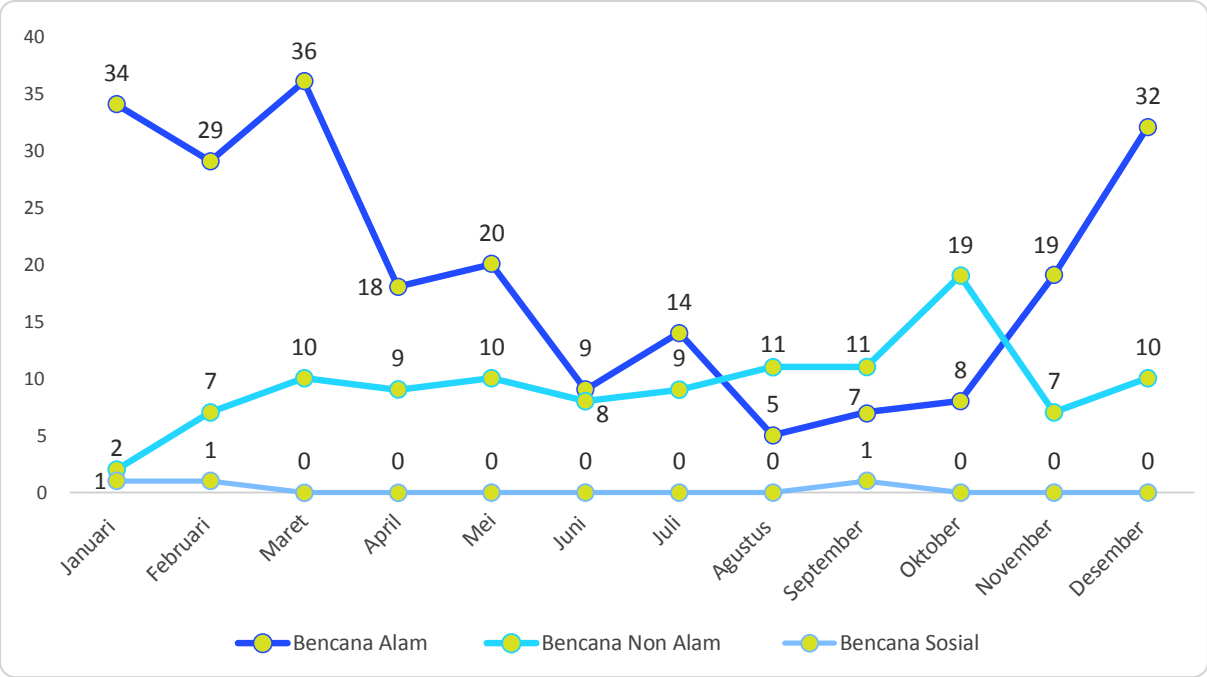

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2024

.Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kejadian berdampak krisis kesehatan akibat bencana alam dengan frekuensi tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 36 kejadian. Tingginya kejadian tersebut banyak disebabkan oleh banjir. Sedangkan bencana non alam dengan frekuensi tertinggi terjadi di bulan Oktober dengan 19 kejadian. Tingginya bencana non alam banyak disebabkan karena kebakaran. Untuk bencana sosial yang berupa konflik sosial terjadi pada bulan Januari, Februari dan September. Secara keseluruhan, frekuensi tertinggi kejadian berdampak krisis kesehatan terjadi pada bulan Maret dan terendah pada bulan Agustus.

GAMBAR 6.76
JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2023

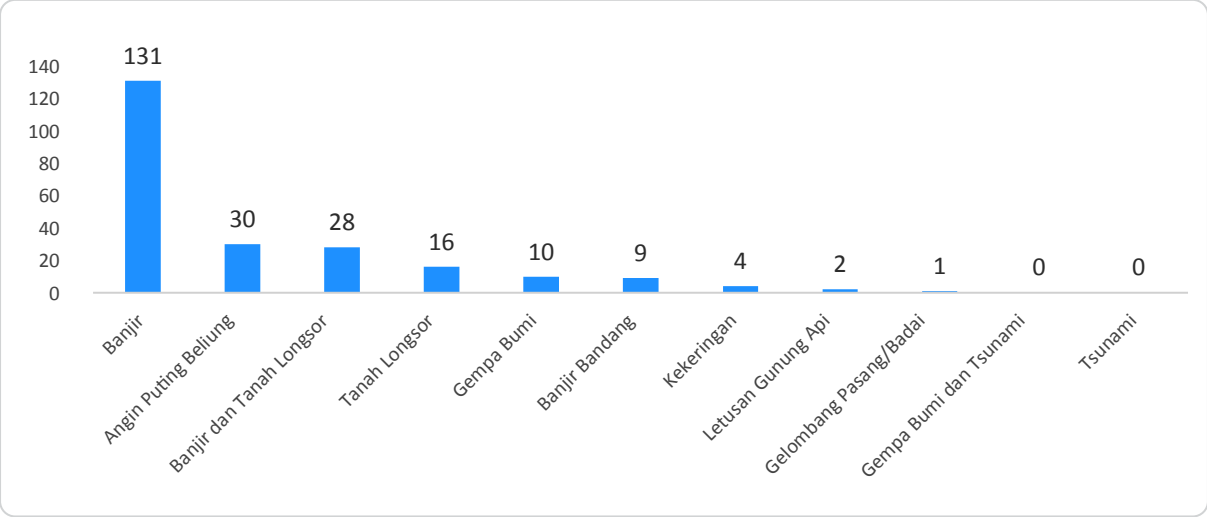

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2024

Dari 347 kejadian bencana yang berdampak krisis kesehatan sepanjang tahun 2023, banjir menjadi kejadian bencana alam dengan frekuensi tertinggi 131 kejadian disusul angin puting beliung dengan frekuensi 30 kejadian serta banjir dan tanah longsor dengan frekuensi 28 kejadian.

GAMBAR 6.77
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2023

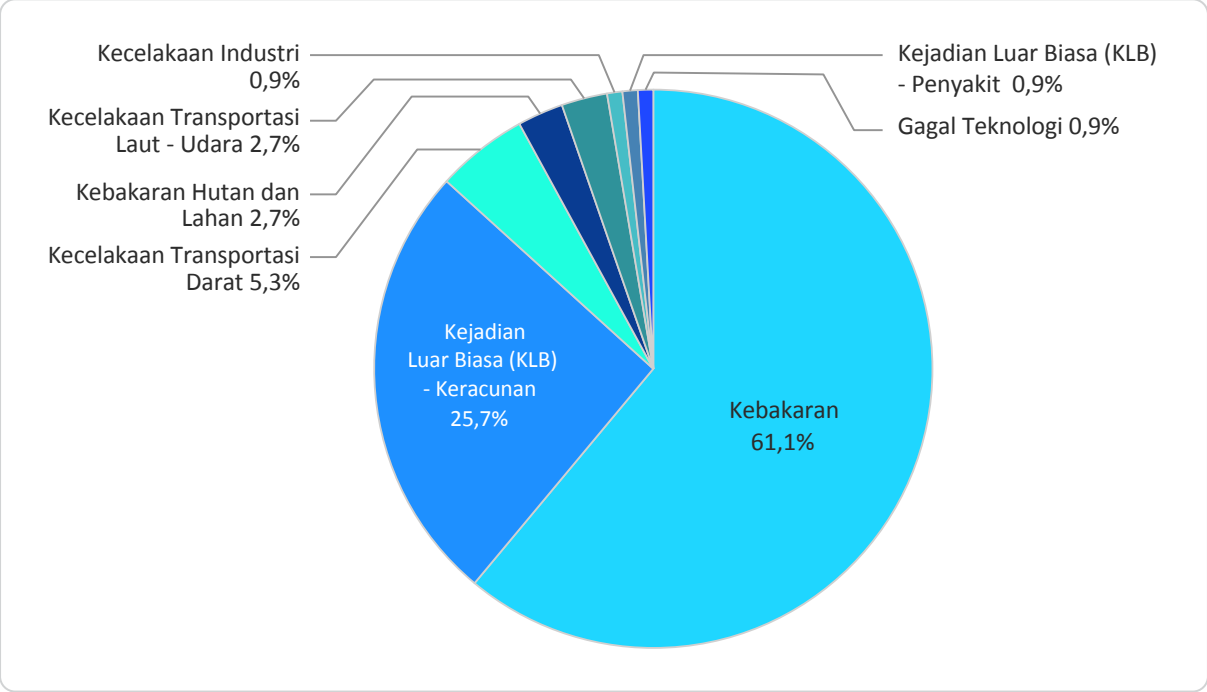

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2024

Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2023 yaitu kebakaran sebesar 61,1% dari total bencana non alam dan diikuti oleh Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan (25,7%) dan kecelakaan transportasi darat (5,3%).

Di antara ketiga jenis bencana, bencana sosial termasuk paling jarang terjadi dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Pada tahun 2023 terjadi 3 bencana sosial yang berupa konflik sosial atau kerusuhan sosial.

GAMBAR 6.78
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

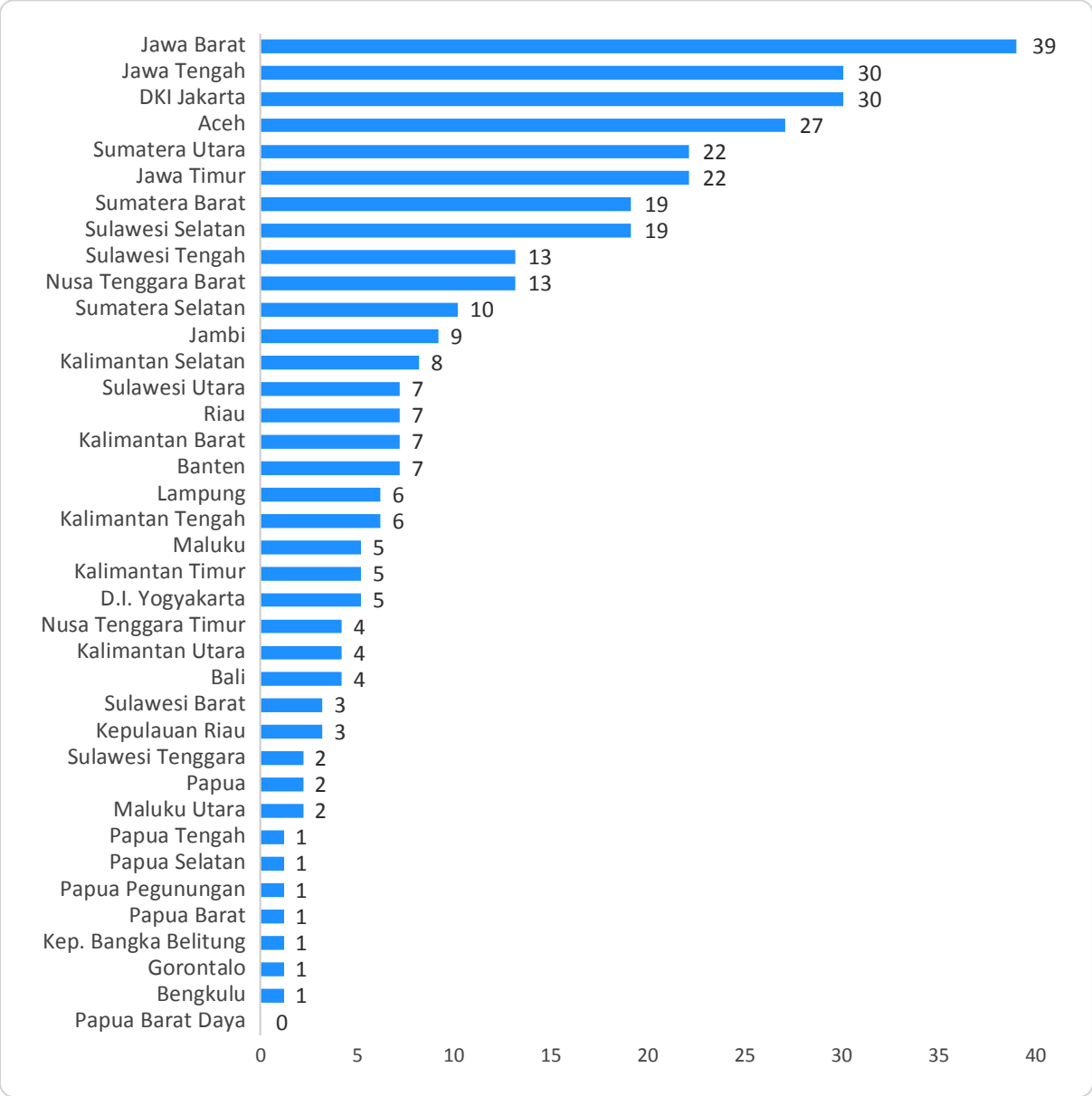

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes, 2024

Jumlah kejadian berdampak krisis kesehatan di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 347 kejadian. Dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang terbanyak mengalami kejadian bencana berdampak krisis kesehatan yaitu sebanyak 39 kejadian, diikuti Jawa Tengah dan DKI Jakarta dengan 30 kejadian bencana, sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya tidak ada kejadian bencana berdampak krisis kesehatan.

TABEL 6.1
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2023

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Pengungsi
1	Banjir	131	27	18	10	8.177	64.269
2	Letusan Gunung Api	2	2	23	6	22	73
3	Gempa Bumi	10	6	5	26	1.288	16.013
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	16	11	63	8	375	4.123
6	Banjir Bandang	9	3	3	0	387	1.095
7	Kekeringan	4	3	0	0	2	7.035
8	Angin Puting Beliung	30	13	8	4	52	172
9	Gelombang Pasang/Badai	1	1	0	0	0	20
10	Banjir dan Tanah Longsor	28	13	24	12	10.264	8.432
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		231	31	144	66	20567	101232
1	Kebakaran	69	19	25	55	958	9.072
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	2	0	5	321	123
3	Kecelakaan Transportasi Darat	6	5	1	13	66	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	3	2	11	17	118	0
5	Kecelakaan Industri	1	1	21	28	19	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	1	1	0	0	145	0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	29	12	4	776	2.787	0
8	Gagal Teknologi	1	1	4	1	11	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		113	25	66	895	4425	9195
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	3	2	2	8	157	91
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		3	2	2	8	157	91
Indonesia		347		212	969	25149	110518

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2024

Kejadian krisis Kesehatan pada tahun 2023 yang menimbulkan korban terbanyak disebabkan oleh bencana alam dengan jumlah korban meninggal sebanyak 144 orang (67,9%), korban luka berat/ rawat inap sebanyak 66 orang (6,8%), korban luka ringan/rawat jalan sebanyak 20.567 orang (81,8%) dan korban pengungsi sebanyak 101.232 orang (91,6%).

Sementara untuk bencana non alam jumlah korban meninggal sebanyak 66 orang (31,1%), korban luka berat/rawat inap sebanyak 895 orang (92,4%), korban luka ringan/rawat jalan sebanyak 4.425 orang (17,6%) dan korban pengungsi sebanyak 9.195 orang (8,3%)

Untuk bencana sosial jumlah korban yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan karena memang frukensi kejadiannya juga rendah. Jumlah korban meninggal akibat bencana sosial sebanyak 2 orang (0,9%), korban luka berat/rawat inap sebanyak 8 orang (0,8%), korban luka ringan/rawat jalan sebanyak 157 orang (0,6%) dan korban pengungsi sebanyak 91 orang (0,1%).

G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji dan umrah agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat ajaran agama Islam, serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji, bukan saja dari aspek umum dan ibadah, tetapi juga dari aspek kesehatan jemaah haji itu sendiri. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji melingkupi kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam rangka menjamin kesiapan jemaah sebelum keberangkatan, diperlukan adanya kesiapan baik fisik, mental maupun spiritual. Sejak tahun tahun 2018, penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia mulai menerapkan konsep Istitaah yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji. Permenkes ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan kesehatan haji mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Untuk itu upaya pembinaan sudah harus dilakukan sedini mungkin yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan awal. Berbagai faktor risiko kesehatan dikendalikan melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap penetapan istitaah kesehatan jemaah haji di tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan yang terdiri dari Tim Asistensi, Tim Manajerial, Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), Tim Promotif Preventif (TPP), Tim Gerak Cepat (TGC), serta Tim Pendukung Kesehatan (TPK). PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan paradigma penguatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kesehatan kuratif serta pola pendekatan deteksi dini kasus kesehatan dan pelayanan respon kegawatdaruratan. Penyelenggaraan kesehatan haji dengan konsep tersebut merupakan konsep operasional kesehatan haji yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 -2019 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2023.

Wabah penyakit COVID-19 yang awalnya hanya terjadi di Cina pada Desember 2019, kemudian dalam waktu singkat menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, sehingga organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization/*WHO) menetapkan status pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2020 dan 2021 menutup sementara pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji yang berasal dari luar negeri, ibadah haji hanya dibolehkan untuk penduduk yang bermukim di wilayah Arab Saudi. Meski demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyiapkan kesehatan dan kebugaran jemaah haji asal Indonesia selama status pandemi tahun 2020-2021 yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pembinaan kesehatan bagi jemaah haji. Namun demikian, seiring dengan membaiknya kondisi pandemi pada 2022, maka pemerintah Arab Saudi pada tahun 2022 mulai menerima jemaah haji yang berasal dari luar negeri, termasuk dari Indonesia.

1. PROFIL JEMAAH HAJI INDONESIA

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia memberangkatkan 209.880 jemaah haji reguler. Provinsi dengan jumlah jemaah haji terbanyak juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Barat dengan 39.330 jemaah, yang diikuti dengan Jawa Timur dengan 36.578 jemaah, dan Jawa Tengah dengan 31.578 jemaah. Sedangkan provinsi dengan jumlah jemaah haji paling sedikit berasal dari Provinsi Kalimantan Utara (465 jemaah), Nusa Tenggara Timur (694 jemaah), dan Bali (725 jemaah).

GAMBAR 6.79
JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

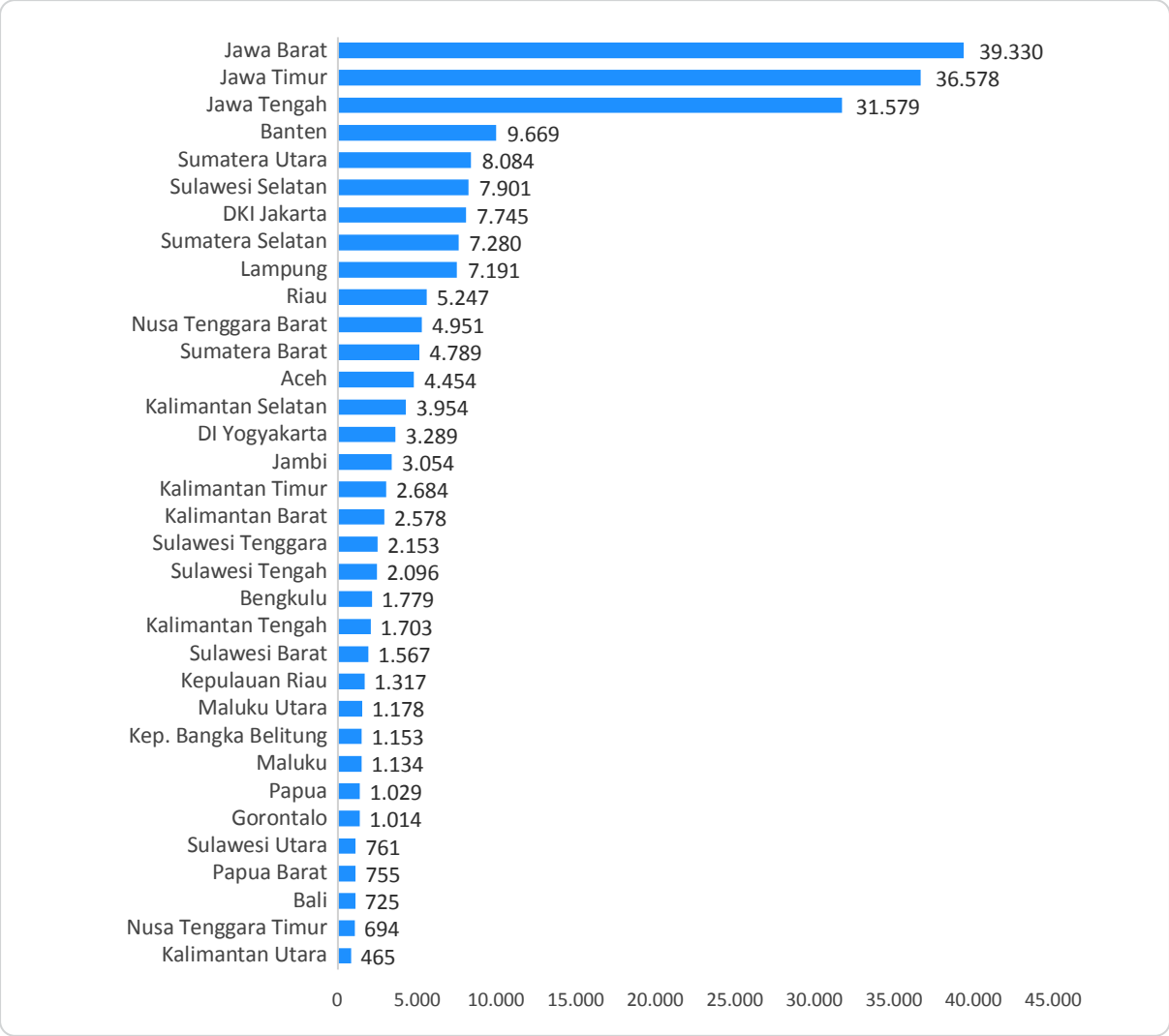

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2023 jika dilihat menurut kelompok umur, sebagian besar berada pada kelompok umur 50-59 tahun, yaitu sebesar 30,0% dari seluruh jemaah. Kelompok umur terbanyak kedua adalah 60-69 tahun sebanyak 28,9%. Sehingga jika dijumlahkan, sebesar 58,9% jemaah haji reguler Indonesia yang berangkat pada tahun 2023 berumur diatas 50 tahun. Sebagaimana diketahui bahwa kelompok populasi pra-usila (usia lanjut) dan usila merupakan kelompok rentan terhadap kejadian kesakitan dan kematian selama penyelenggaran ibadah haji. Hal ini patut menjadi perhatian, terlebih bagi pemerintah, PPIH, TKHI, dan juga pihak lain yang terkait.

GAMBAR 6.80
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2023

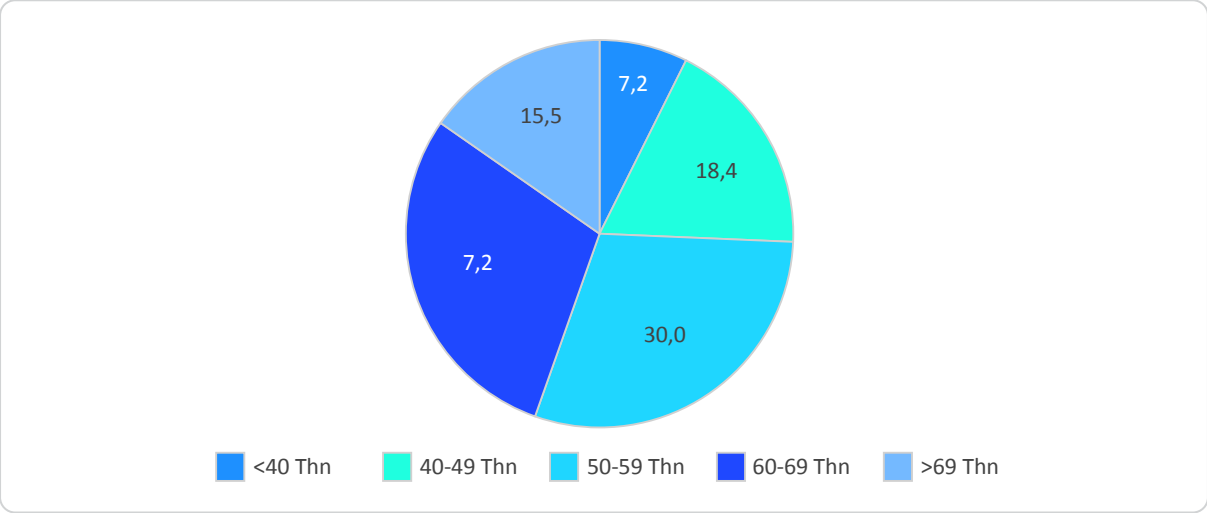

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2023 jika dilihat berdasarkan kelompok umur, sebagian besar berada pada kelompok umur 50-59 tahun, yaitu sebesar 30,0% dari seluruh jemaah. Kelompok umur kedua adalah 60-69 tahun sebanyak 28,9%, sehingga jika dijumlahkan sebesar 58,9% jumlah jemaah regular Indoneia yang berangkat pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui bahwa kelompok populasi pra lansia (lanjut usia) dan lansia merupakan kelompok rentan terhadap kejadian kesakitan dan kematian selama penyelenggaran ibadah haji. Hal ini patut menjadi perhatian, terlebih bagi pemerintah, PPIH, TKHI, dan juga pihak lain yang terkait

GAMBAR 6.81
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA YANG BERUMUR 50 – 59 tahun
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

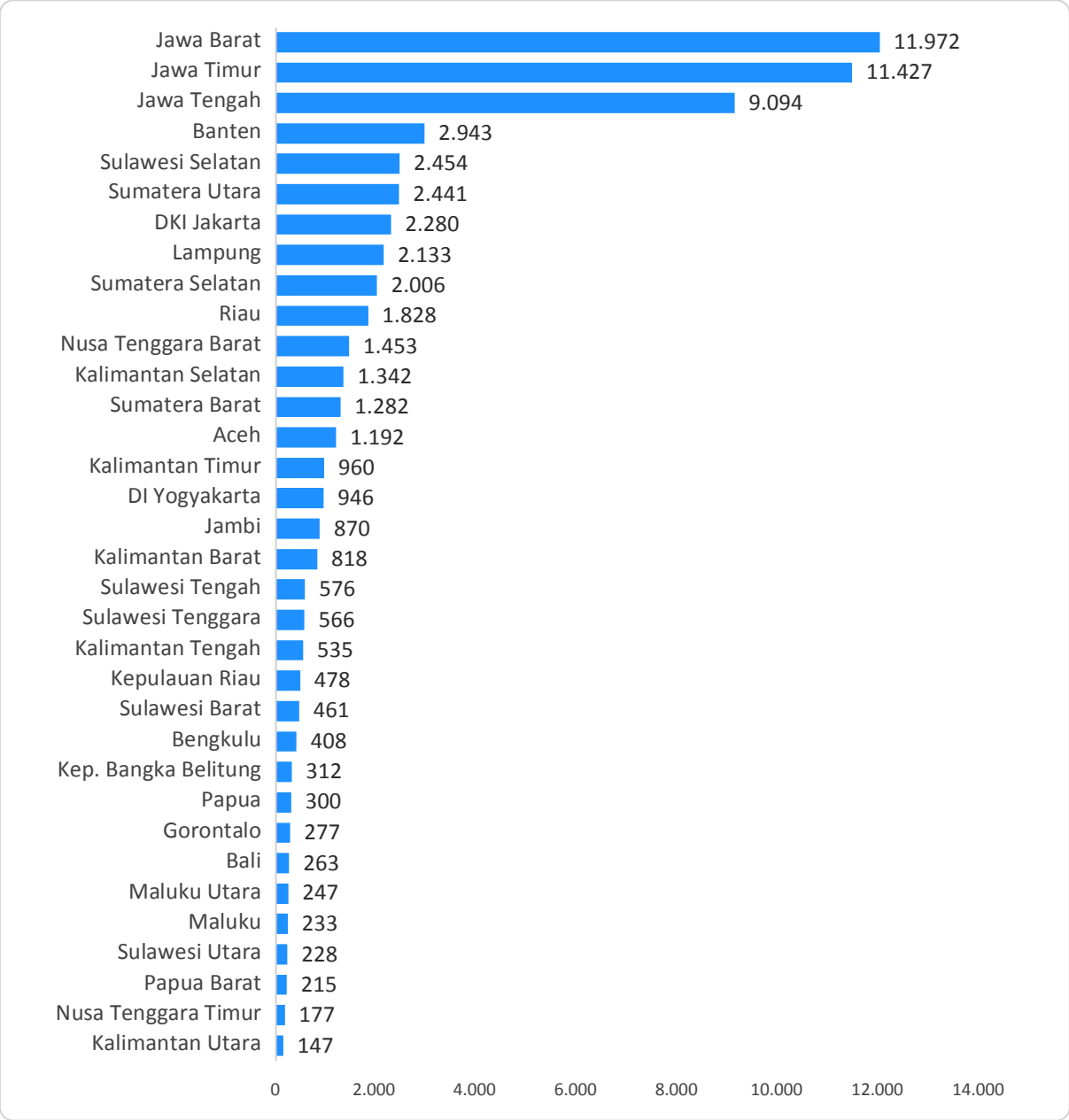

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Dari 209.880 jemaah haji Indonesia di tahun 2023, sebesar 55,3% diantaranya atau sebanyak 116.137 jemaah berjenis kelamin perempuan. Sedangkan 44,7% nya atau sebanyak 93.743 jemaah merupakan jemaah laki-laki. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah jemaah haji perempuan 22.394 lebih banyak daripada jumlah jemaah haji. Hal tersebut memberikan tantangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara haji untuk dapat lebih memperhatikan fasilitas/pelayanan kepada para jemaah perempuan.

GAMBAR 6.82
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

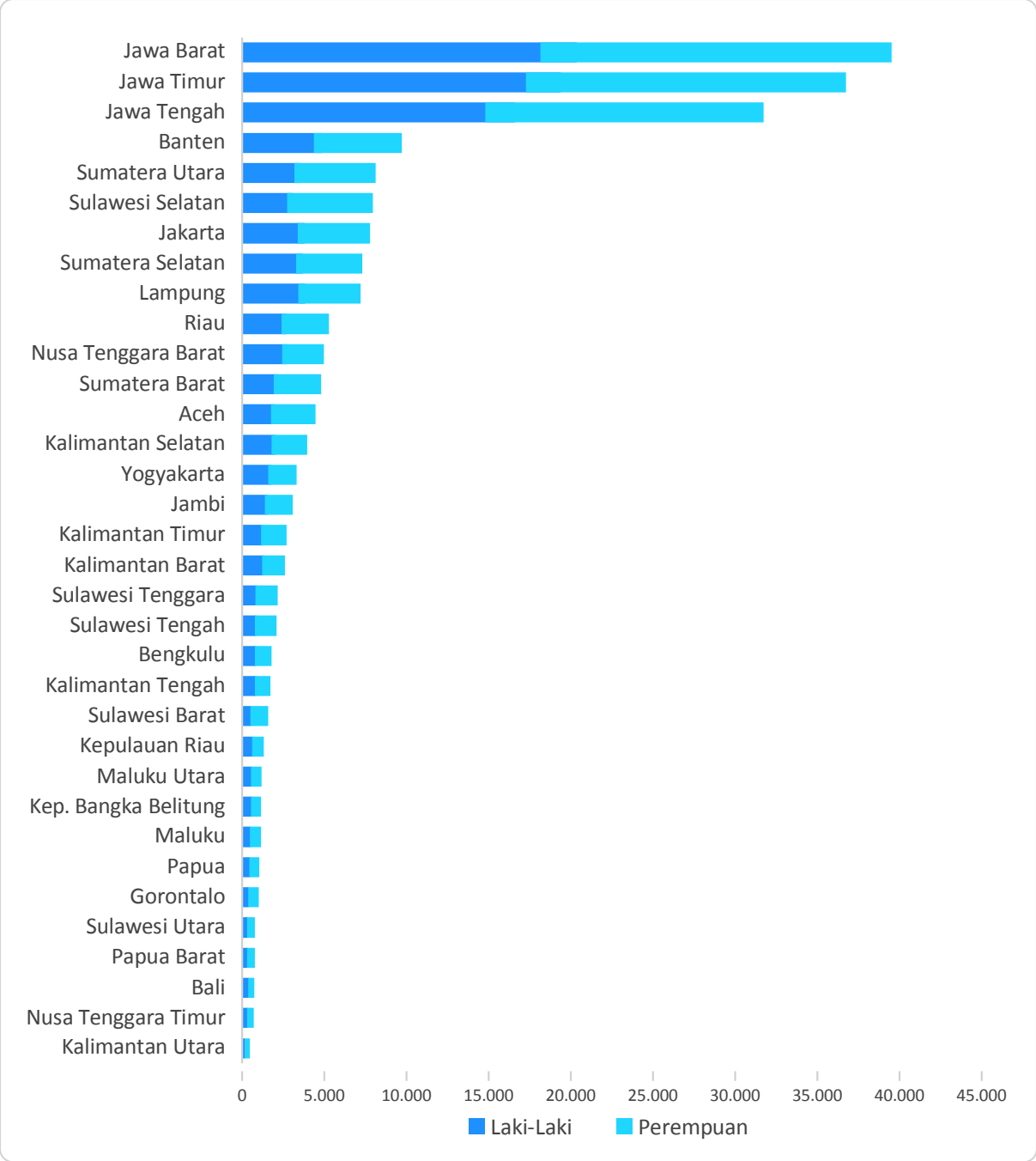

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, kelompok Jemaah haji dengan pendidikan SD merupakan yang terbanyak yaitu sebesar 32,7% diikuti oleh Jemaah haji dengan Pendidikan SLTA sebanyak 24,1%dan Jemaah haji dengan Pendidikan SI sebanyak 21,9%

GAMBAR 6.83
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2023

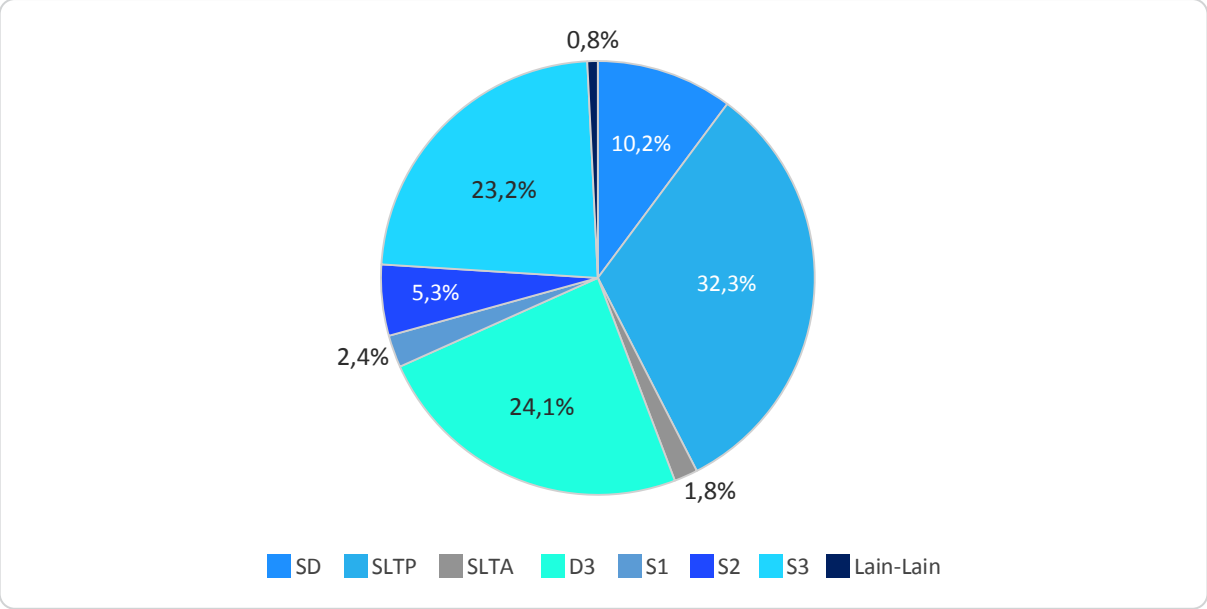

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Berdasarkan jenis pekerjaannya, persentase pekerjaan jemaah haji Indonesia pada tahun 2023 terbanyak adalah ibu rumah tangga yaitu sebesar 27,6%, kemudian kelompok terbanyak kedua yaitu pegawai swasta sebesar 20,6% dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 19,9%. Sedangkan kelompok pekerjaan jemaah haji dengan persentase terendah yaitu TNI/POLRI (1,0%), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (1,5%) dan pelajar/mahasiswa (2,0%).

GAMBAR 6.84
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2023

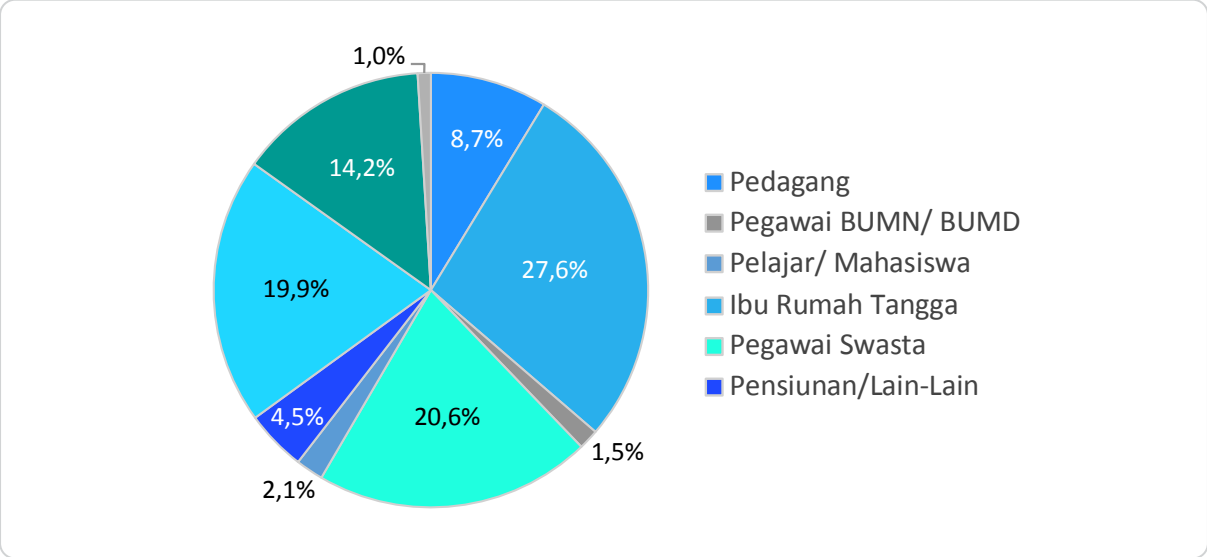

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

2. PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

Indikator penyelenggaraan kesehatan haji adalah persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar yang diinput kedalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) sebelum operasional haji. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Haji, terdapat tiga tahapan pemeriksaan kesehatan untuk jemaah haji. Namun, hal itu tidak berarti bahwa seluruh jemaah haji harus melalui ketiga tahapan tersebut. Karena, jika pada pemeriksaan tahap pertama jemaah haji tersebut dinyatakan sehat/tidak berisiko tinggi (risti), maka pemeriksaan kesehatan tahap kedua tidak perlu dilakukan. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilaksanakan di Puskesmas, pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilaksanakan di rumah sakit, dan pemeriksaan tahap ketiga dilaksanakan di asrama haji. Setiap proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji menuju istitaah dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji di kabupaten/kota dan asrama haji.

Pada tahun 2023 Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 209.880 jemaah haji dengan capaian pemeriksaan sebesar 98,3%. Secara nasional belum semua provinsi dapatmemenuhi target yang sebesar 100%, anamun sebanyak 21 provinsi yang capaian pemeriksaannya sudah mencapai nasional. Provinsi dengan persentase pemeriksaan kesehatan terendah ialah Provinsi Papua (97,4%), Kalimantan Tengah (97,5%), dan Kalimantan Timur (97,6%). Persentase capaian hasil pemeriksaan jemaah haji menurut provinsi dapat dilihat pada grafik berikut. Data dan informasi lebih rinci mengenai pemeriksaan kesehatan jemaah haji terdapat pada Lampiran 89.f. Terdapat sekitar 1,7% jemaah haji tidak melakukan pemeriksaan, hal ini sebabkan adanya kuota yang tidak terpenuhi sehingga untuk memenuhi kuota tersebut ditambah

GAMBAR 6.85
CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2023

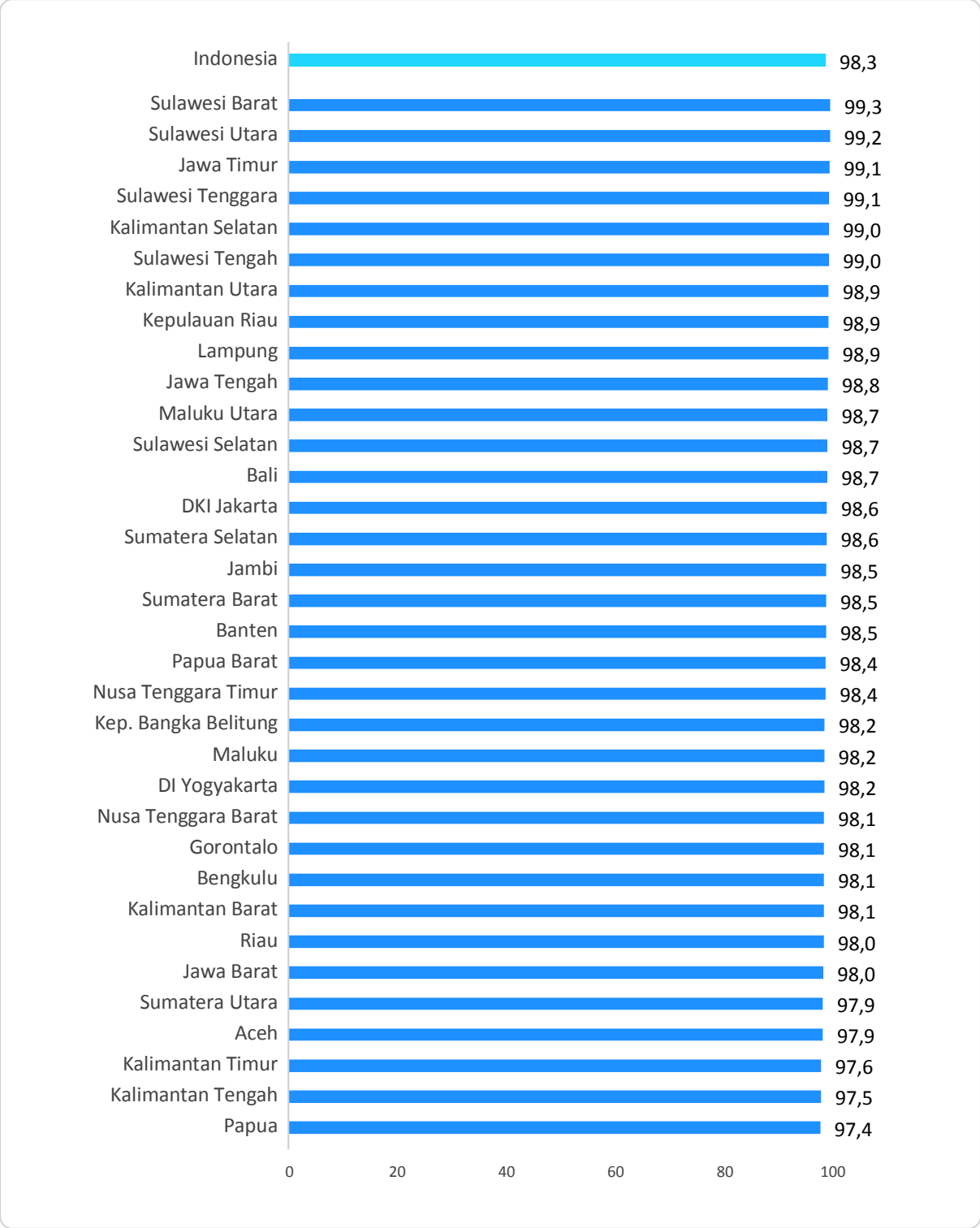

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

3. KEBUGARAN JEMAAH HAJI

Istitaah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan istitaah kesehatan haji yang merupakan kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur, diawali dengan pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar jemaah haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

Selain pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga melakukan pengukuran kebugaran pada jemaah haji yang akan diberangkatkan. Hal ini penting karena kebugaran juga merupakan faktor penunjang dalam ibadah haji. Jemaah haji yang kondisi fisiknya bugar diharapkan akan mampu mandiri dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi dalam menjalankan keseluruhan rangkaian dan perjalanan ibadah haji.

Menurut hasil pengukuran kebugaran jemaah haji, sebagian besar atau sebesar 51,0% jemaah haji berada dalam kategori kebugaran "cukup" dan sebanyak 30,4% jemaah haji termasuk kategori "baik". Selain itu, persentase jemaah haji yang termasuk dalam kategori kurang sebesar 11,8% dan kurang sekali sebesar 3,6%, sehingga jemaah haji yang termasuk kategori sangat baik sebesar 3,3%.

GAMBAR 6.86
HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER
DI INDONESIA TAHUN 2023

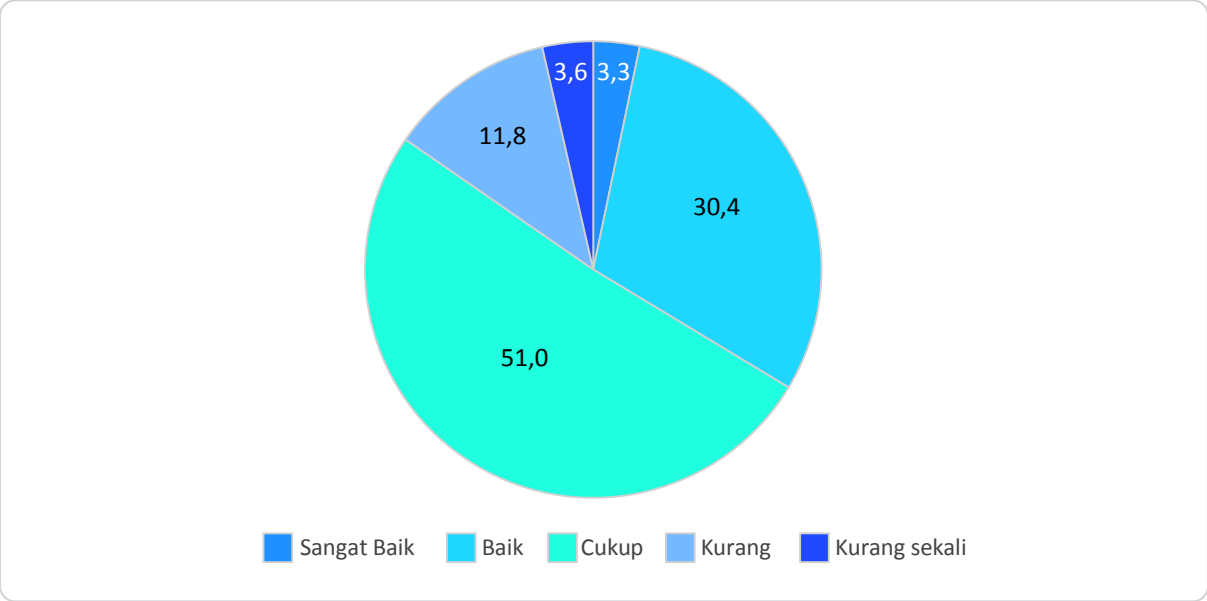

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Dari 3,3% jemaah haji yang berada dalam kategori kebugaran fisik "sangat baik", terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan provinsi dengan jemaah haji yang berada dalam kategori kebugaran fisik "kurang sekali" terendah yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua Barat

GAMBAR 6.87
JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER DENGAN HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN KURANG SEKALI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

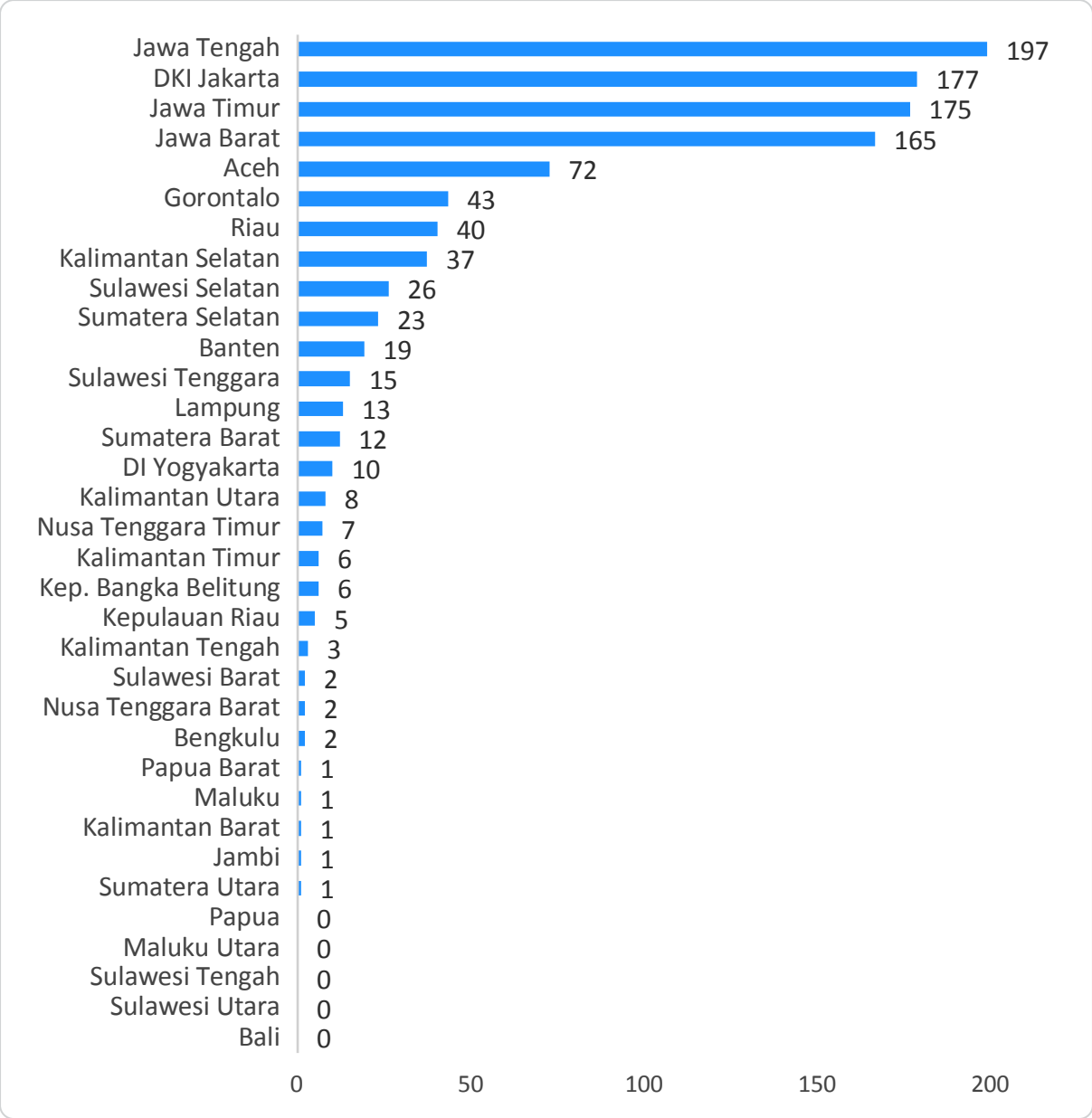

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Melalui implementasi istitaah juga, faktor risiko kesehatan dapat diketahui sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, jemaah haji tergolong risti jika memenuhi tiga kriteria, yaitu berusia ≥60 tahun dengan penyakit, berusia <60 tahun dengan penyakit, dan berusia >60 tahun tanpa penyakit.

Pada tahun 2022, terlihat bahwa sebagian besar (70,7%) jemaah haji Indonesia merupakan jemaah haji risti. Sisanya yaitu sebesar 29,3% merupakan jemaah haji yang tidak termasuk dalam kategori risti. Besarnya persentase dan jumlah jemaah haji risti pada tahun 2022 menjadikan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara kesehatan haji harus memberikan perhatian yang lebih terhadap pelayanan kesehatan jemaah haji.

GAMBAR 6.88
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI DI INDONESIA
TAHUN 2023

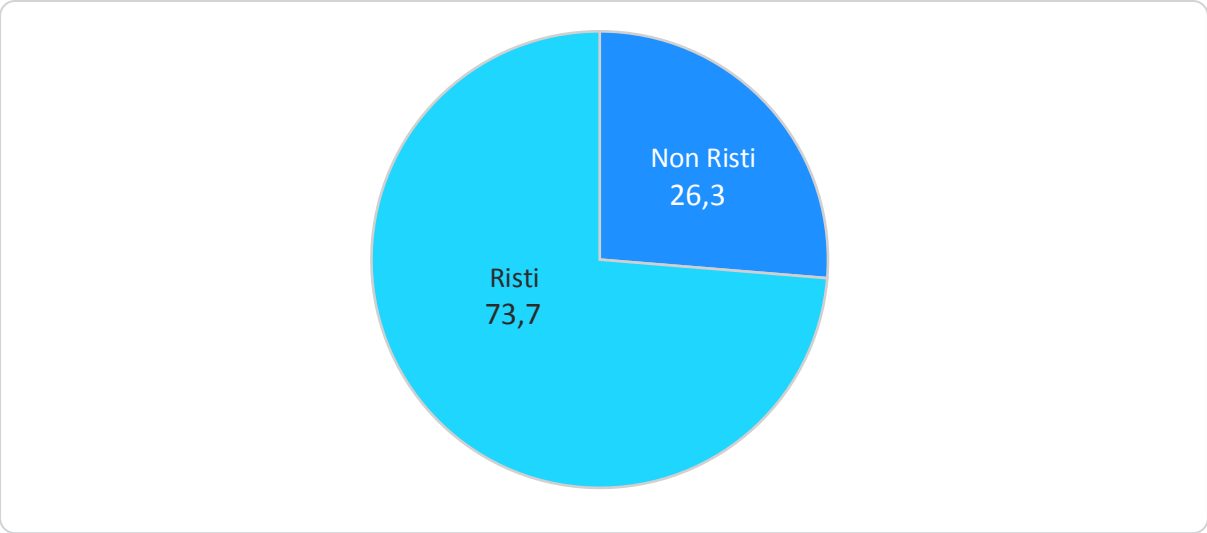

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Sebanyak 28.250 jemaah haji yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai jemaah haji risiko tinggi. Provinsi kedua dengan jumlah jemaah haji risiko tinggi adalah Provinsi Jawa Timur (25.218 jemaah), dan Jawa Tengah (24.256 jemaah). Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan jumlah jemaah haji risiko tinggi terendah (315 jemaah), kemudian Nusa Tenggara Timur (500 jemaah), dan Bali (447 jemaah).

GAMBAR 6.89
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI DAN PROVINSI
TAHUN 2023

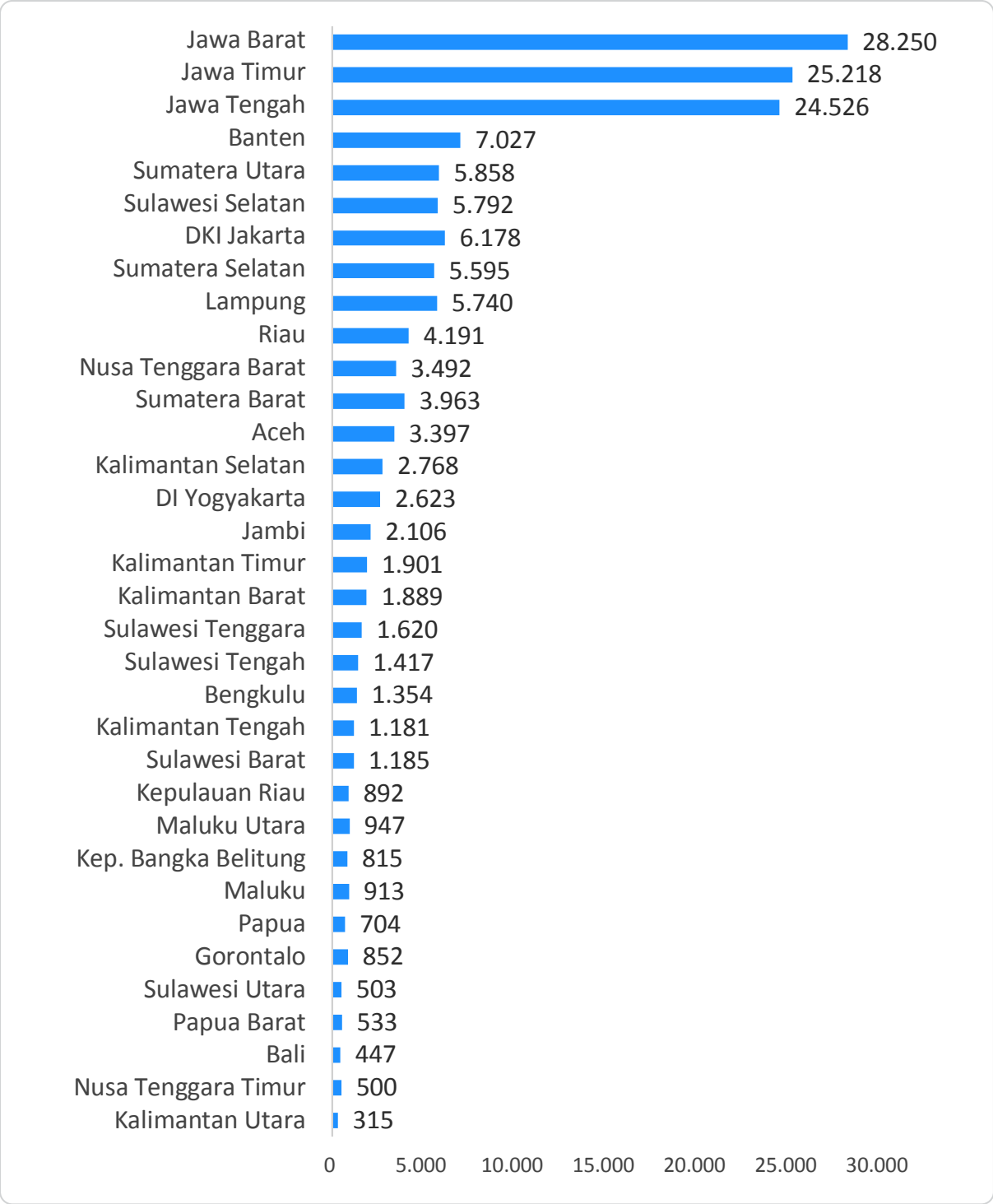

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

4. POLA MORBIDITAS DAN MORTALITAS JEMAAH HAJI

Masa operasional pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dimulai dari pemberangkatan jemaah haji atau embarkasi, pra Armuzna, Armuzna, dan pasca Armuzna, berlanjut hingga pengembalian jemaah haji ke Indonesia atau ke debarkasi. Armuzna sendiri merupakan singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ketiganya merupakan nama tempat yang terkait dengan inti pelaksanaan kewajiban ibadah haji.

Pada tahun 2022, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum keberangkatan, diketahui bahwa sepuluh penyakit berisiko tinggi terbanyak yang diderita oleh jemaah haji yaitu diantaranya *Hypertensive diseases*/I10 sebanyak 15.859 kasus, *Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidemias* /E78 (8.423 kasus), dan *Diabetes Mellitus*/E10-14 (6.226 kasus).

TABEL 6.2
SEPULUH PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Nama Penyakit	Kode ICD-X	Jumlah Kasus
1	*Essential (primary) hypertension*	I10	47.106
2	*General examination and investigation of persons without complaintor reported diagnosis*	E10-14	19.166
3	*Hyperlipidaemia, unspecified*	E78.5	11.478
4	*Pure hypercholesterolaemia*	E78.0	10.577
5	*Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias*	E78	8.876
6	*Cardiomegaly*	I51.7	7.910
7	*Hypertensive heart disease*	I11	5.973
8	*Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis andtophaceous disease*	E79.0	2.373
9	*Dyspepsia*	K30	1.952
10	*Chronic ischaemia heart disease*	I25	1.833

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024 (pemeriksaan kedua)

Jumlah tenaga kesehatan yang ditugaskan didalam setiap kloter terdiri dari tiga orang, yaitu satu dokter dan dua perawat. Ketiga orang tenaga kesehatan tersebut bisa melayani 350-400 jemaah haji dalam kloternya masing-masing. Tentu saja semakin sering jemaah haji berobat kepada tenaga kesehatan yang bertugas, akan semakin panjang waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan untuk dapat melayani mereka. Sehingga dirasa penting untuk dapat mengurangi frekuensi berobat jalan para jemaah haji.

Pada tahun 2022, rata-rata satu jemaah haji Indonesia dapat berobat jalan sebanyak dua kali. Provinsi yang jemaahnya paling sering berobat jalan adalah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebanyak empat kali, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3,5 kali, dan Provinsi DKI Jakarta sebanyak tiga kali. Sehingga hal ini sebaiknya menjadi bahan evaluasi dan perhatian bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan di tanah air sebelum keberangkatan jemaah haji. Sebaliknya, tiga provinsi yang jemaah hajinya paling jarang dirawat jalan berturut-turut adalah Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur dengan ratio masing-masing antara 0,5-1 kali.

GAMBAR 6.90
JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER MENURUT EMBARKASI
TAHUN 2023

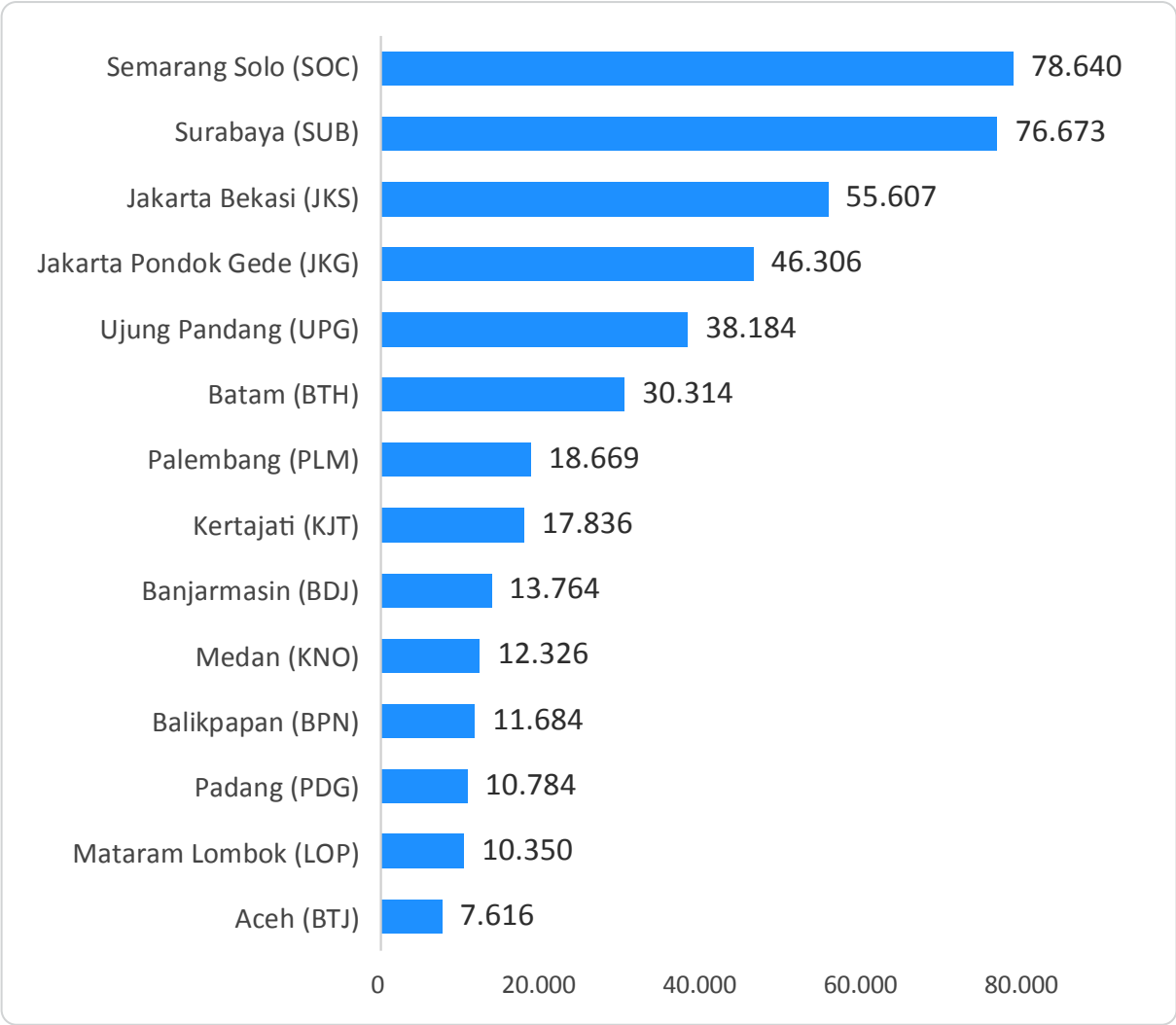

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Secara keseluruhan, jemaah haji Indonesia terbanyak dirawat inap di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah, yaitu terbanyak 2066 kasus dengan rincian 542 kasus baru dan 195 kasus lama. Sedangkan di KKHI Madinah, terdapat 735 kasus dengan rincian 542 kasus baru dan 193 kasus lama, serta terdapat 798 kasus (695 kasus baru dan103 kasus lama) yang dirujuk ke RS Arab Saudi.

GAMBAR 6.91
DISTRIBUSI JEMAAH HAJI INDONESIA YANG DIRAWAT INAP DI ARAB SAUDI MENURUT JENIS KASUS DAN TEMPAT RAWAT TAHUN 2023

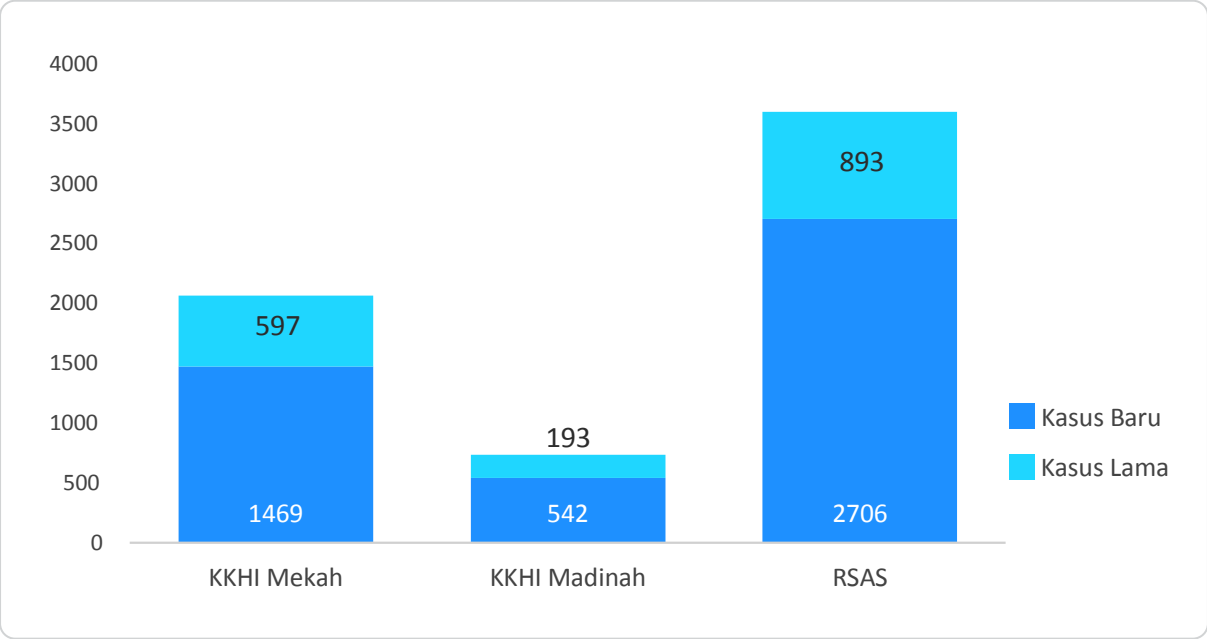

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2024

Meski pemerintah telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan terhadap jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, namun masih terdapat jemaah haji yang wafat di tanah suci. Terdapat 774 jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun 2023. Jemaah haji wafat terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 169 jemaah. Jumlah Jemaah haji wafat kedua yaitu sebanyak 116 jemaah berasal dari Provinsi Jjjawa Barat dan 111 jemaah wafat berasal dari JawaTegah. Sedangkan 3 provinsi yang palig sedikit memiliki jemaah haji yang wafat, baik sebelum, selama, hingga tiba kembali di tanah air adalah Kepulauan Riau 1 jemaah haji yang wafat, Bali 1 jemaah haji yang wafat dan Kalimantan Utara 2 jemaah haji yang wafat.

GAMBAR 6.92
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

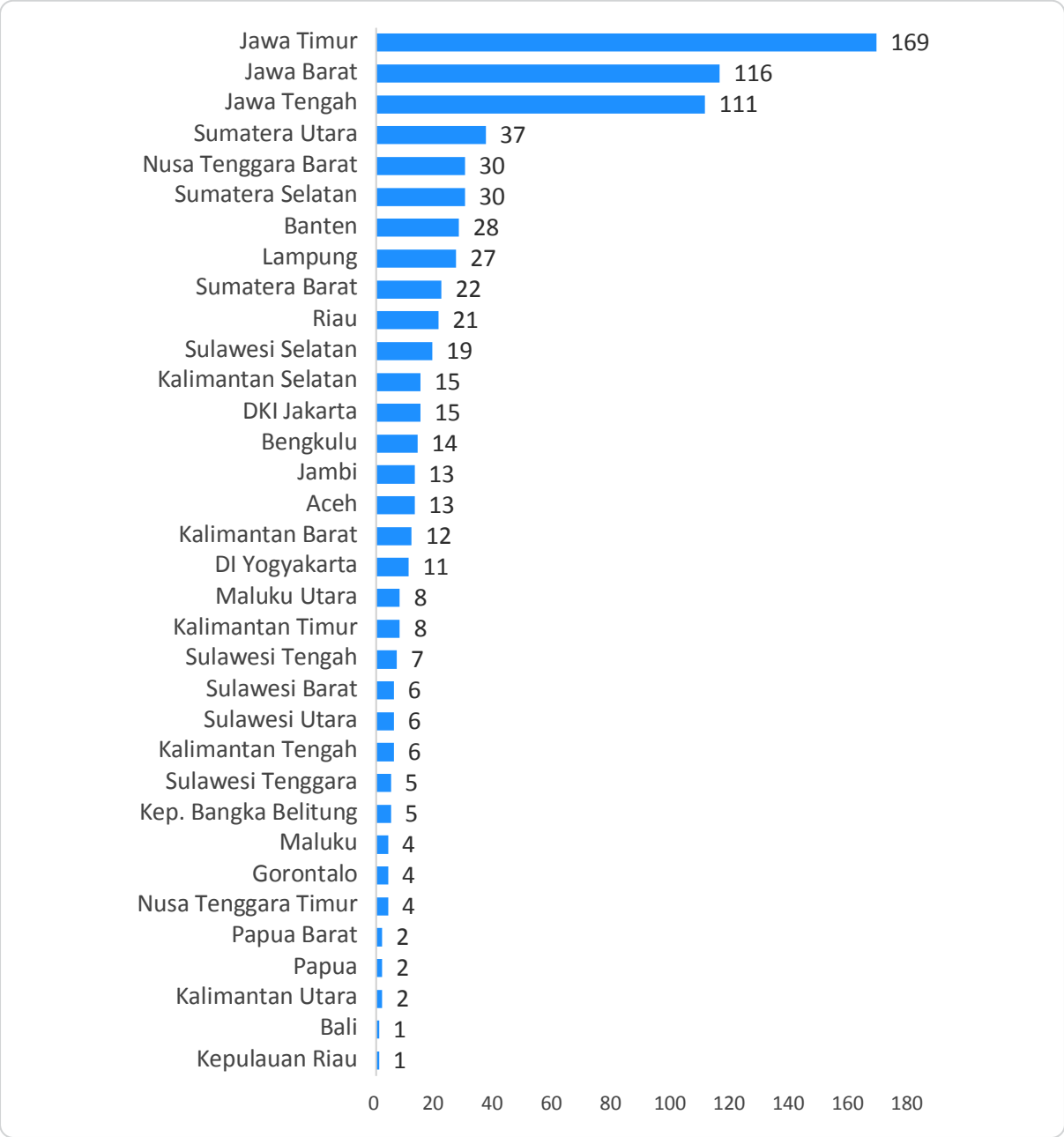

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

Dari seluruh jemaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci, terdapat sepuluh penyakit terbanyak penyebab kematian jemaah haji pada tahun 2023. Penyakit penyebab kematian terbanyak pada jemaah haji reguler tahun 2023 yaitu *cardiovascular diseases* (168 jemaah), *severe septic* (199 jemaah), *Septic Shock* (80 jemaah), Acute myocardial infarction, unspecified (54 jemaah), Adult respiratory distress syndrome (45 jemaah), Acute myocardial infarction (42 jemaah), Pneumonia, unspecified (30 jemaah), Hypovolaemic shock (25 jemaah), Acute ischaemic heart disease, unspecified (21 jemaah), Sepsis unspecified (10 jemaah), Heatstroke and sunstroke (9 jemaah), dan Septicaemia, unspecified (8 jemaah)

GAMBAR 6.93
SEPULUH PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA TAHUN 2023

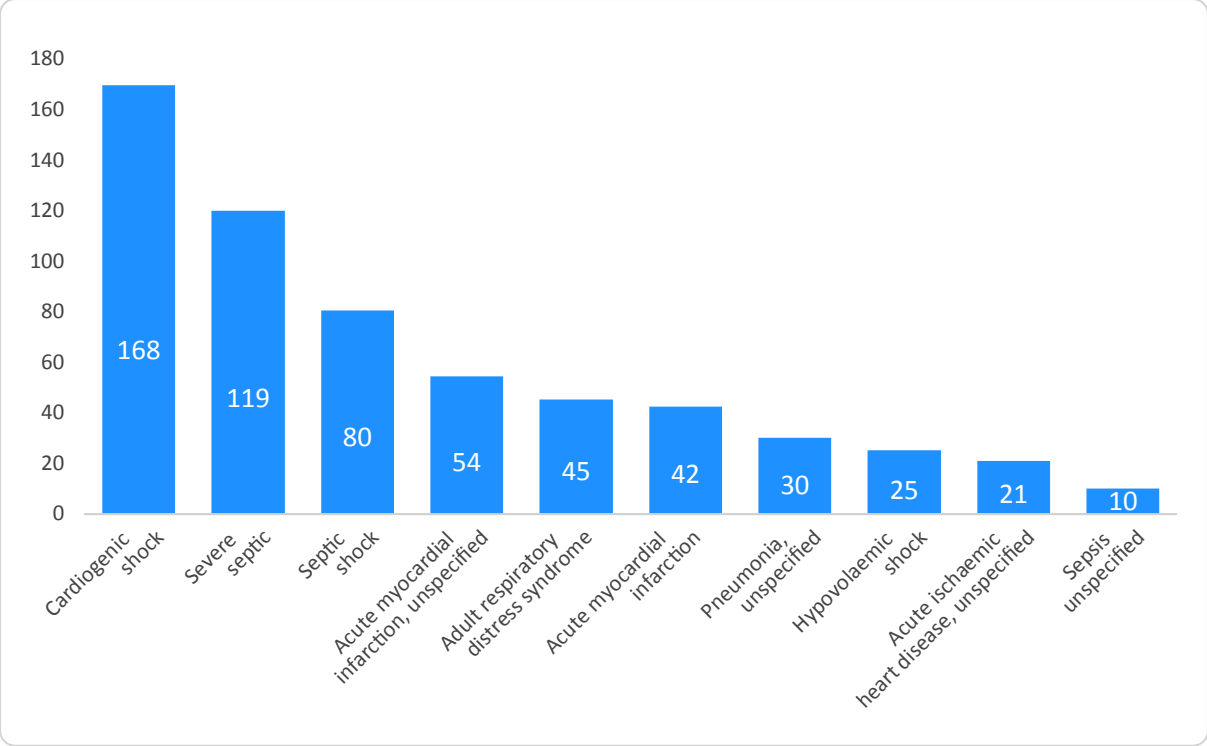

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

***

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa Upaya Kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, dan sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan melalui upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan pada media lingkungan. Kesehatan Lingkungan diselenggarakan pada lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Begitu juga dalam rangka penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada proses pengelolaan limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi persyaratan teknis atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensial untuk mempengaruhi kesehatan.

Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, hal ini di atur secara detail dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks. Kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu yang berasal dari kebijakan dan pembangunan fisik dari berbagai lintas sektor ikut serta berperan (perindustrian, lingkungan hidup, pertanian, pekerjaan umum- perumahan rakyat dan lainnya) hingga ke hilir yaitu dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri fokus kepada pengelolaan dampak kesehatan.

A. AIR MINUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan terkait Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk

menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Pengawasan secara internal dilakukan oleh pelaksana penyelenggara air minum yaitu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum.

Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum dilakukan oleh tenaga Sanitarian Puskesmas.

GAMBAR 7.1
PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

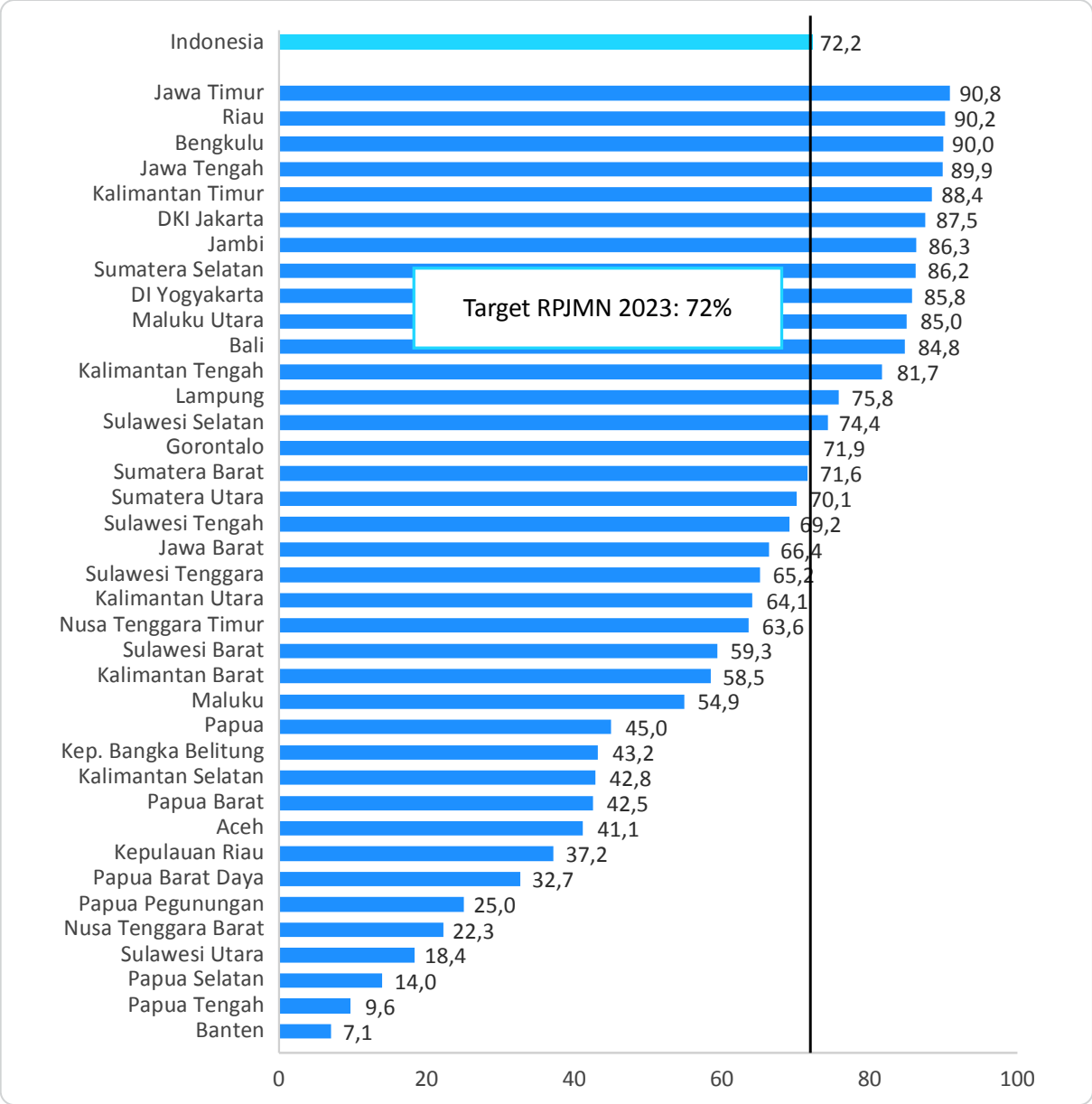

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Secara nasional, jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar tahun 2023 sebesar 21.791 dari jumlah keseluruhan total sarana air minum yang sebanyak 30.172 (Gambar7.1) dengan capaian presentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar tahun 2023 sebesar 72,2%. Angka capaian pengawasan kualitas air minum ini sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN, Renstra tahun 2023 sebesar 72%. Provinsi dengan persentase tertinggi dalam pengawasan kualitas air minum yaitu Jawa Timur (90,8%), Riau (90,2%) dan Bengkulu (90,0%). Sedangkan provinsi terendah dalam pengawasan kualitas air minum yaitu Banten (7,1%), Papua Tengah (9,6%) dan Papua Selatan (14,0%). Rincian lebih lengkap mengenai persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dapat dilihat di Lampiran tabel 79.a.

Menurut Statistik Indonesia, BPS (2024), rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah:

1. Jenis sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga meliputi leding, air terlindungi, atau air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung;
2. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan bermerk atau air isi ulang, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

TABEL 7.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2023

No	Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
1	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	53,15	23,14	40,64
2	Leding	10,40	6,85	8,92
3	Sumur Bor/Pompa	17,44	16,54	17,07
4	Sumur Terlindung	11,40	20,67	15,26
5	Sumur Tak Terlindung	0,99	4,39	2,41
6	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	5,39	21,66	12,17
7	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya	1,23	6,75	3,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, Stastistik Kesejahteraan Rakyat, 2023

Data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS (2023), sumber air minum utama yang paling banyak digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerk, air isi ulang (40,64%), sumur bor/pompa (17,07%), dan sumur terlindung (15,26%). Pada daerah perkotaan maupun perdesaan, air kemasan bermerk, air isi ulang merupakan sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan, untuk perkotaan sebesar 53,15% dan untuk perdesaan sebesar 23,14%. Secara rinci, data tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1.

GAMBAR 7.2
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

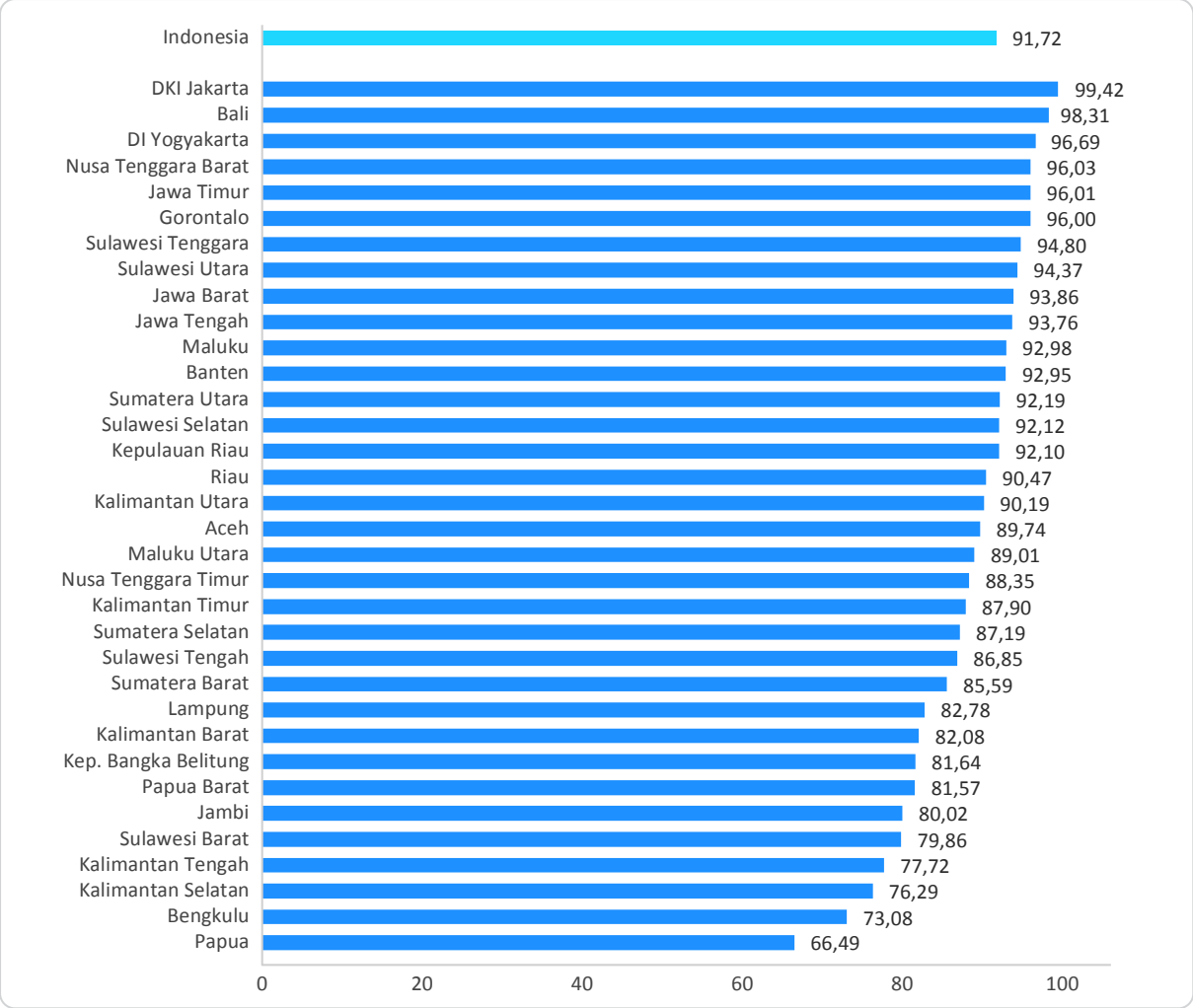

Sumber: Badan Pusat Statistik, Stastistik Indonesia, 2024

Secara nasional, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 91,72% (Gambar 7.2). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan akses air minum layak yaitu DKI Jakarta (99,42%), Bali (98,31%), dan DI Yogyakarta (96,69%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (66,49%), Bengkulu (73,08%), dan Kalimantan Selatan (76,29%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 79.b.

B. AKSES SANITASI LAYAK

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup

masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Strategi penyelenggaraan STBM yang meliputi penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. Peningkatan penyediaan layanan sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang aman dan layak.

Pendataan yang dilakukan oleh Sanitarian Puskesmas meliputi Kepala Keluarga (KK) dengan akses terhadap penggunaan layanan sanitasi (aman, layak, sharing/numpang dan belum layak) yang tergambar dalam gambar 7.3 .

GAMBAR 7.3
PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

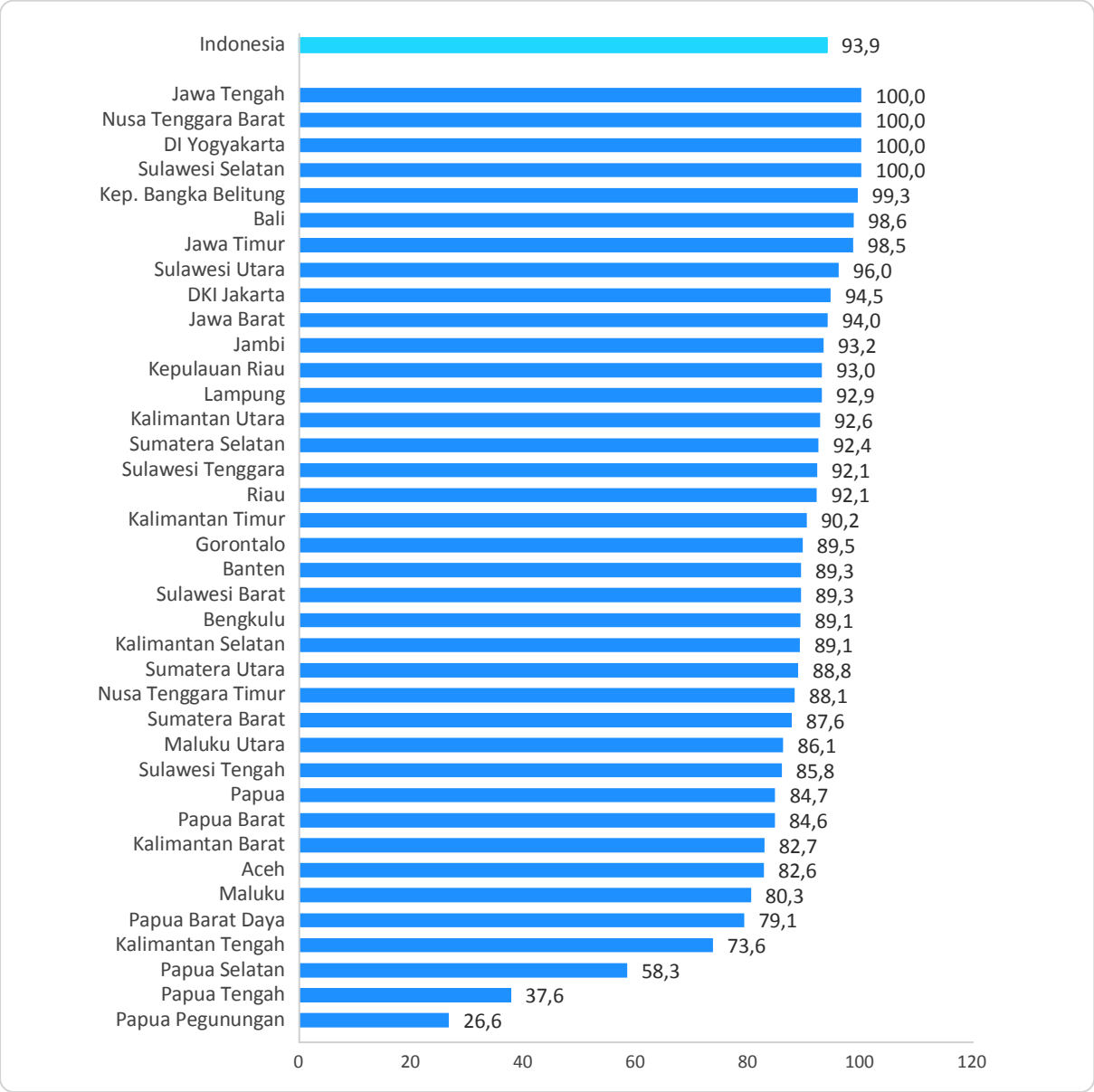

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Indonesia tahun 2023 adalah 93,3% sedangkan yang belum mengakses sebesar 6,7%. Terdapat 4 (empat) Provinsi dengan persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) mencapai 100% yaitu Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (26,6%), Papua Tengah (37,6%), dan Papua Selatan (53,8%). Rincian lengkap mengenai keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dapat dilihat pada Lampiran 80.

Untuk memenuhi hak asasi manusia, setiap penduduk idealnya memiliki akses ke sanitasi layak. Menurut Statistik Indonesia, BPS (2024), definisi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain:

a. Kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Instalasi/ Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal.
b. Untuk daerah perdesaan, jika kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja ke tangka septic atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL) atau lubang tanah dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, ataupun di MCK Komunal.

Pentingnya akses sanitasi layak di semua kalangan masyarakat berkaitan erat dengan upaya peningkatan derajat kesehatan penduduk Indonesia.

GAMBAR 7.4
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2021-2023

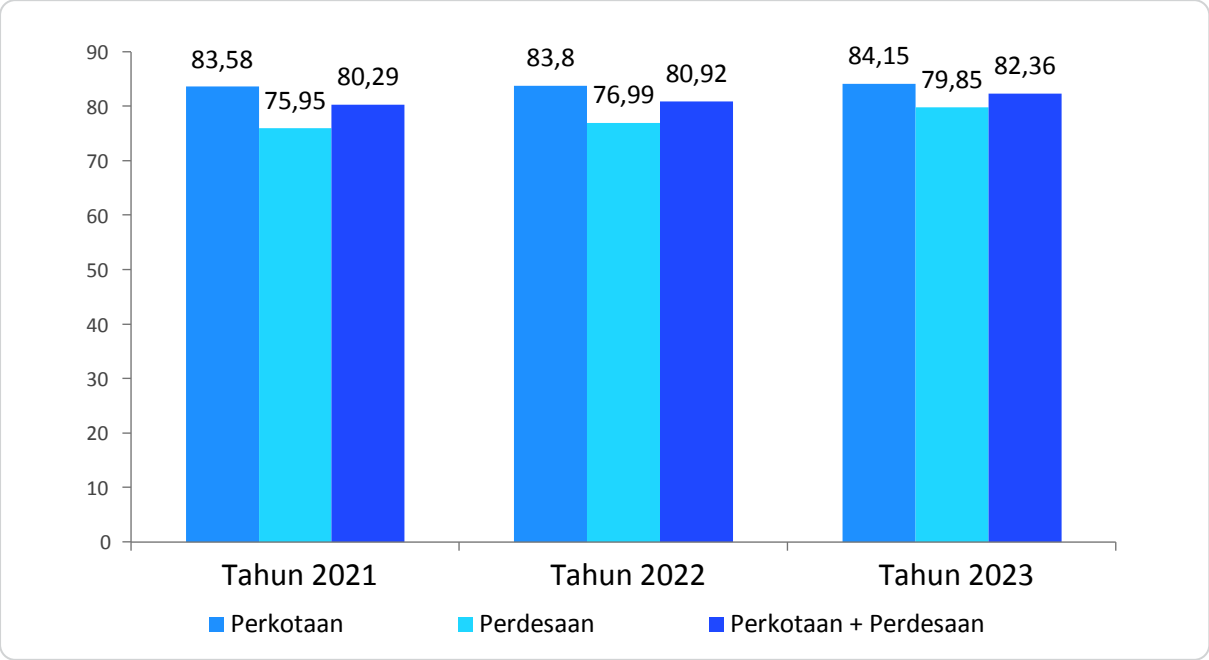

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 7.4 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2023 sebesar 2,07%. Jika dilihat menurut tipe

daerah, persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (84,15%) dan (79,85%). Selama periode ini, di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar (3,9%) sedangkan daerah perkotaan (0,57%).

GAMBAR 7.5
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

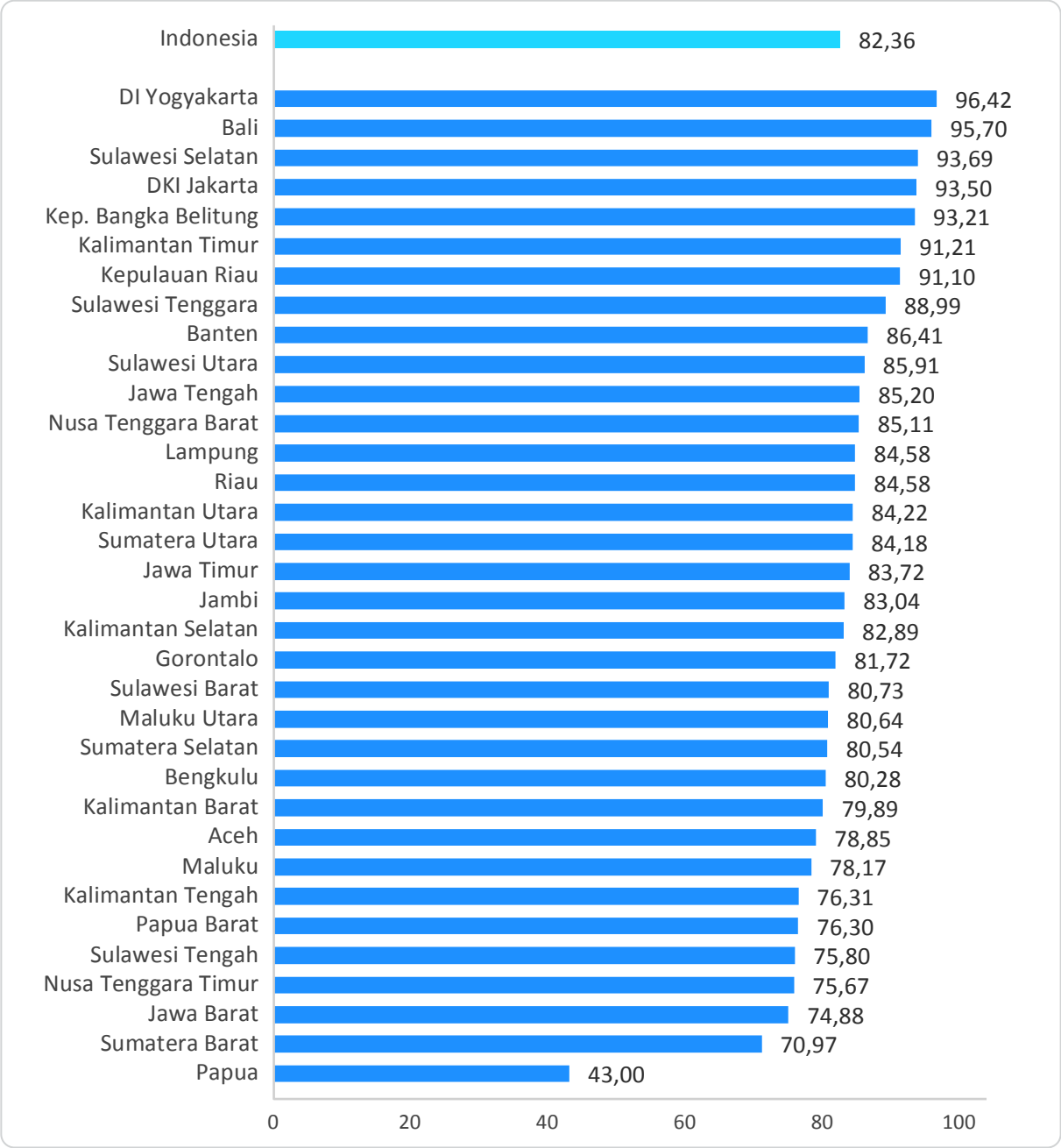

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, 2024

Secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 82,36% (Gambar 7.5). Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi yaitu Provinsi DI Yogyakarta (96,42%), Bali (95,70%), dan Sulawesi Selatan (93,69%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terendah adalah Provinsi Papua (43,00%), Sumatera Barat (70,97%), dan Jawa Barat (74,88%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Lampiran 81.a.

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Tujuan penyelenggaraan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 3 adalah untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan mewujudkan pengembangan serta pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan.

Desa/kelurahan melaksanakan STBM adalah proses mewujudkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yaitu dengan adanya tangga perubahan perilaku yang terjadi dimasyarakat, hal ini sejalan dengan proses pendampingan perubahan perilaku dengan masyarakat melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu dengan adanya pemicuan STBM, adanya natural leader dan rencana kerja masyarakat pada tahun 2023 tercapai 86,2% desa/kelurahan.

Salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, dimana salah satu kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar adalah penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Pemerintah menargetkan akses masyarakat pada perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau meningkat pada tahun 2024. Hal ini termasuk target 90% sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% akses sanitasi aman, dan ketiadaan rumah tangga yang BAB sembarangan di tempat terbuka yang menjadi target RPJMN tahun 2023 adalah 70% desa/kelurahan dengan capaian 70,02% desa/kelurahan SBS. Upaya tersebut dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM dengan pengertian yaitu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan, dimana outputnya terdiri dari lima pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga.

GAMBAR 7.6
PERSENTASE DESA/KELURAHAN MELAKSANAKAN STBM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

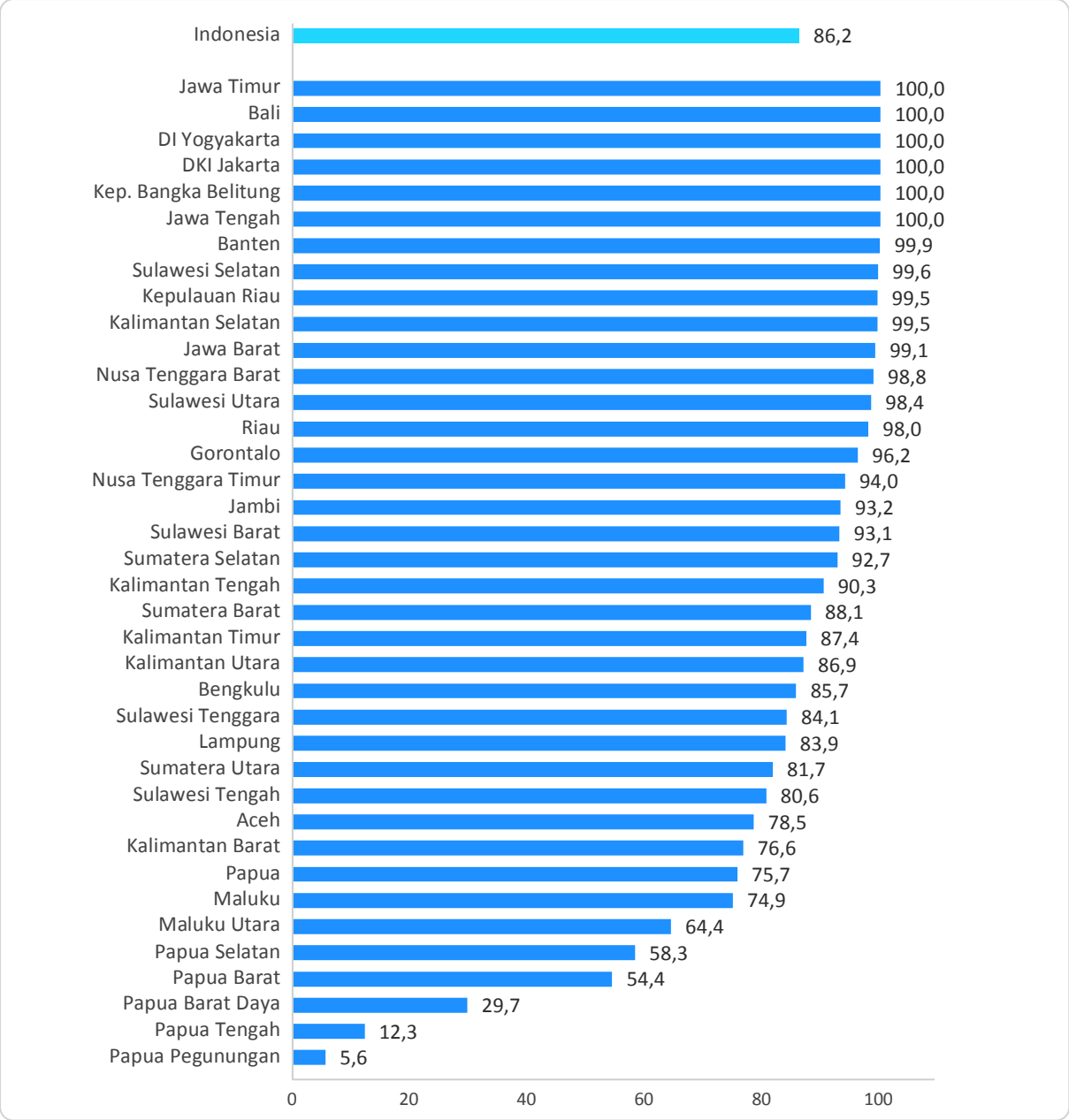

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Secara nasional, persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2023 adalah 86,2%, (Gambar 7.6). Ada enam (6) provinsi yang telah mencapai 100% desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM yaitu Provinsi Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kep. Bangka Belitung dan Jawa Tengah. Sedangkan Provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah Provinsi Papua Pegunungan (5,6%), Papua Tengah (12,3%) dan Papua Barat Daya (29,7%). Tiga (3) provinsi dengan realisasi desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah (8.562), Jawa Timur (8.498), dan Jawa Barat (5.906). Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 81.b.

Tangga layanan sanitasi menurut Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Lingkungan dan sektor yang berperan dalam pembangunan sanitasi di daerah adalah Buang Air Besar Sembarangan Terbuka (BABS terbuka), Buang Air Besar Sembarangan Tertutup (BABS tertutup) / Akses sanitasi tidak layak, Akses sanitasi layak bersama, Akses sanitasi layak sendiri dan Akses sanitasi aman.

GAMBAR 7.7
PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

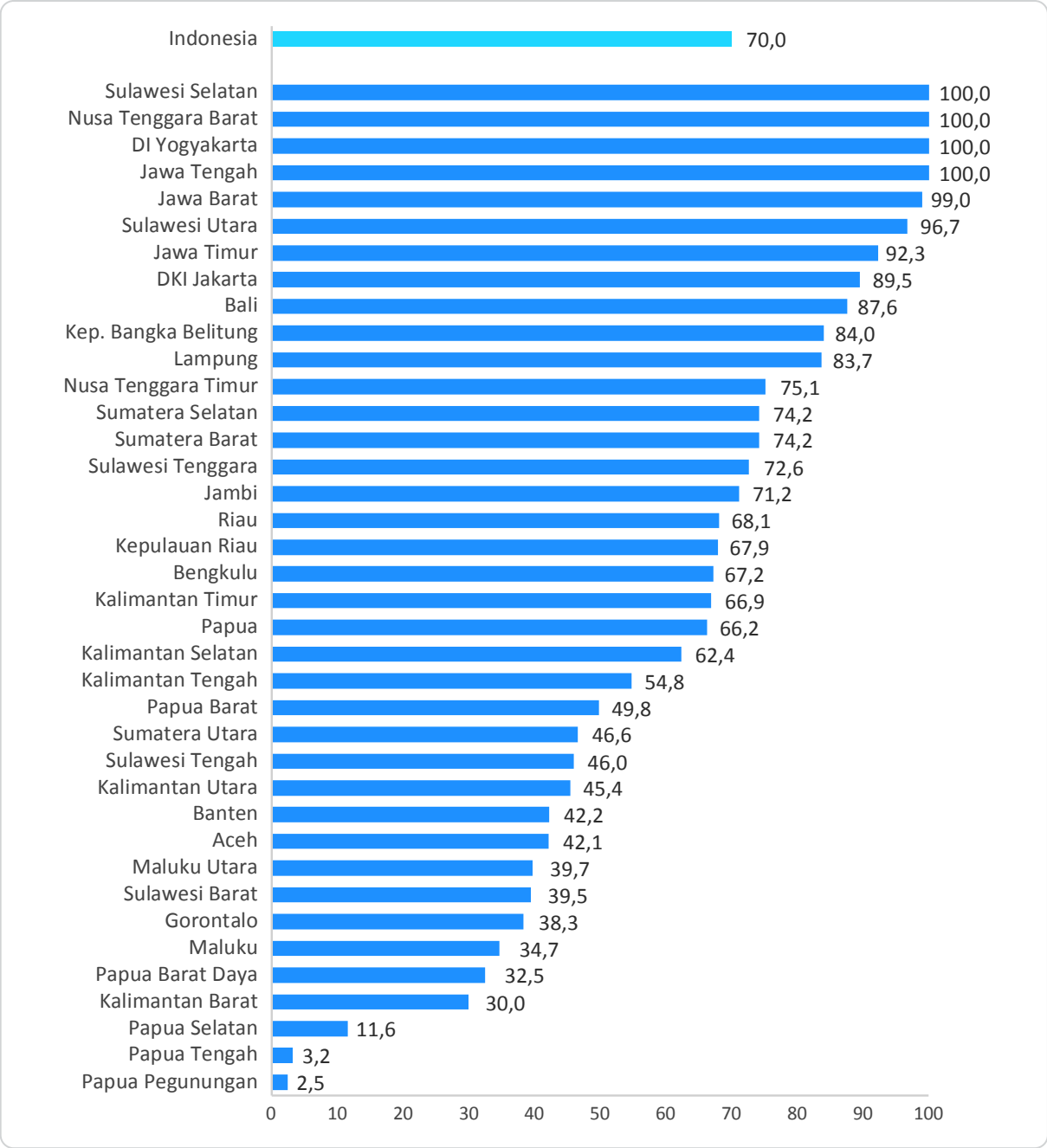

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Secara nasional, persentase desa/kelurahan SBS tahun 2023 adalah 70,0%. Ada empat (4) Provinsi yang telah mencapai 100% persentase desa/kelurahan SBS yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan SBS adalah Provinsi Papua Pegunungan (2,5%), Papua Tengah (3,2%), dan Papua Selatan (11,6%). Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan SBS tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 81.b.

D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR

TFU adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang sejenis; sarana olahraga; sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan; pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya. Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah TFU yang dilakukan pengawasan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. Ruang lingkup pengawasan pada TFU telah ditetapkan yaitu pada tiga lokus yang menjadi prioritas sesuai dengan indikator Renstra Direktorat Kesehatan Lingkungan tahun 2020 – 2024, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan sesuai standar minimal pada 3 (tiga) lokus dari tempat dan fasilitas umum tersebut, yaitu:

1. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama;
2. Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya;
3. Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar di Kementerian Perdagangan.

TFU dinyatakan telah dilakukan pengawasan sesuai standar apabila telah dilakukan IKL dengan mengisi form yang sudah ditentukan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan dengan peralatan pendukung (*Sanitarian Kit*) yang tersedia di Puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit akibat lingkungan dan selanjutnya memberikan rekomendasi hasil pengawasan tersebut pada sektor terkait untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya mewujudkan TFU yang bersih, aman, nyaman dan sehat.

Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan menggunakan formulir IKL melalui pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.

GAMBAR 7.8
PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

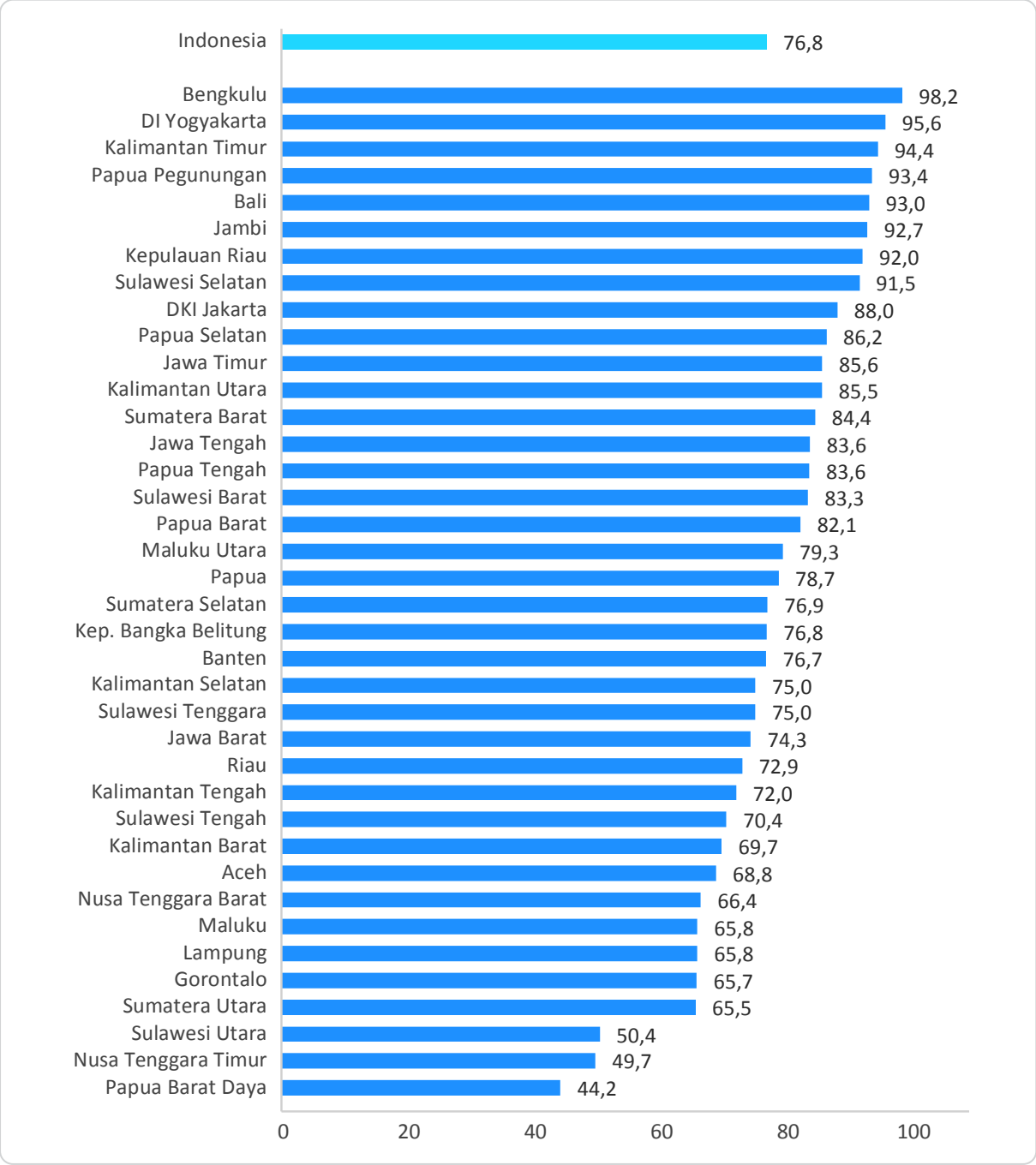

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Secara nasional, persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar pada tahun 2023 adalah 76,8%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Bengkulu (98,2%), DI Yogyakarta (95,6%), dan Kalimantan Timur (94,4%). Provinsi dengan capaian terendah yaitu Provinsi Papua Barat Daya (44,2%), Nusa Tenggara Timur (49,7%), dan Sulawesi Utara (50,4%). Rincian lengkap tentang persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 82.

E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun non komersial. TPP komersial adalah usaha penyediaan pangan siap saji yang memperdagangkan produknya secara rutin, yaitu jasa boga/katering, restoran, TPP tertentu dan Depot Air Minum (DAM), rumah makan, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, dapur gerai pangan jajanan, dan sentra gerai pangan jajanan/kantin/sejenisnya.

Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Kedua peraturan tersebut diantaranya mengatur Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Labelisasi. Dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 terdapat perubahan antara lain kategorisasi TPP dan formulir IKL.

Dalam rangka memastikan TPP memenuhi syarat higiene sanitasi, maka perlu dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh petugas puskemas, TPP juga dapat melakukan penilaian mandiri terkait kondisi higiene sanitasinya dengan mengisi Sanitation *Standard Operating Procedure* (SSOP) yang sudah disusun/dibuat oleh Pemilik/pengelola/Penanggung jawab/pengusaha Tempat Pengelolaan Pangan agar TPP tersebut mendapatkan gambaran kondisi higiene sanitasi dan dapat melakukan perbaikan kualitas TPP secara mandiri sebelum petugas datang untuk melakukan IKL.

Apabila TPP memenuhi syarat berdasarkan hasil IKL, maka dapat diberikan label oleh Sanitarian atau mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ke Dinas Kesehatan setempat dengan memenuhi persyaratan lainnya yaitu pemeriksaan sampel pangan dan penjamah pangan yang sudah dilatih higiene sanitasi pangan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

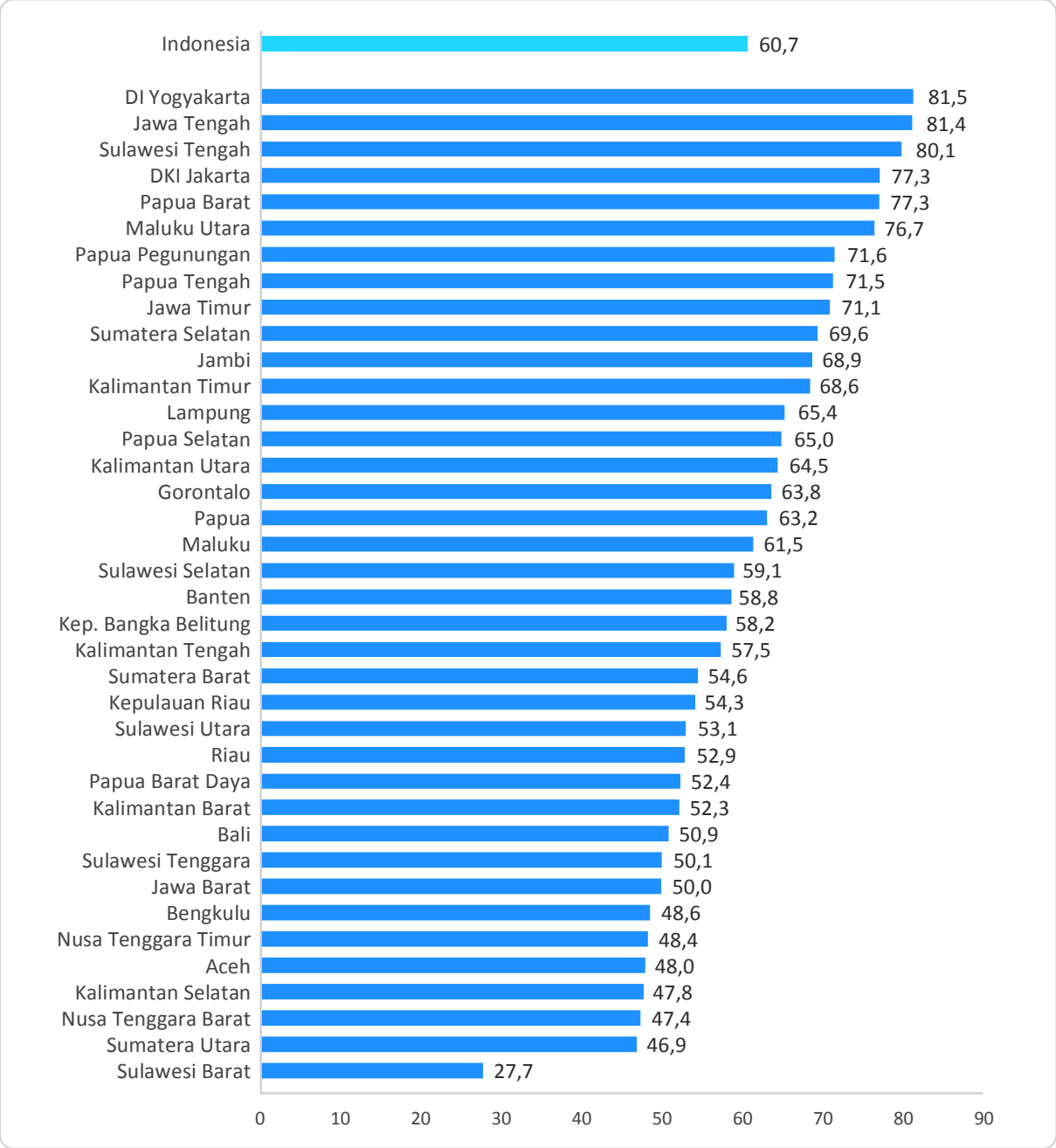

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Secara nasional, persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar pada tahun 2023 adalah 60,7%. Provinsi dengan persentase tertinggi TPP yang memenuhi syarat sesuai standar adalah Provinsi DI Yogyakarta (81,5%), Jawa Tengah (81,4%), dan Sulawesi Tengah (80,1%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat (27,7%), Sumatera Utara (46,9%), dan Nusa Tenggara Barat (47,4%). Rincian lengkap tentang persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 83.a.

F. KABUPATEN/ KOTA SEHAT

Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam PMK nomor 13 tahun 2022, indikator jumlah Kabupaten/ Kota Sehat didefinisikan sebagai Kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh tatanan, memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi.

Penyelenggaraan KKS dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut "Forum Kabupaten/ Kota Sehat" atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, tatanan KKS dikelompokkan menjadi:

1. Kehidupan masyarakat sehat mandiri;
2. Permukiman dan fasilitas umum;
3. Satuan pendidikan;
4. Pasar;
5. Perkantoran dan perindustrian;
6. Pariwisata;
7. Transportasi dan tertib lalu lintas jalan;
8. Perlindungan sosial; dan
9. Penanggulangan bencana.

KKS yang memenuhi kriteria akan diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (*Swasti Saba*) dalam periode dua tahun sekali. Seleksi usulan Kabupaten/Kota yang akan mengikuti penghargaan ini dilakukan oleh Tim Pembina KKS Provinsi. Penghargaan ini disebut dengan penghargaan SWASTI SABA terdiri dari 3 kategori, yaitu penghargaan Swasti Saba Padapa diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah memenuhi minimal 80% Desa/Kelurahan ODF *(Open Defecation Free)* dan memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 71 % -80%, Swasi Saba Wiwerda diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah memenuhi minimal 90% Desa/Kelurahan ODF *(Open Defecation Free)* dan memenuhi capaian indikator setiap tatanan sebesar 81%-90%, Swasti Saba Wistara diberikan kepada Kabupaten/ Kota yang telah memenuhi 100% Desa/Kelurahan ODF *(Open Defecation Free)* dan memenuhi capaian indikator setiap tatanan minimal 91%.

GAMBAR 7.10
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

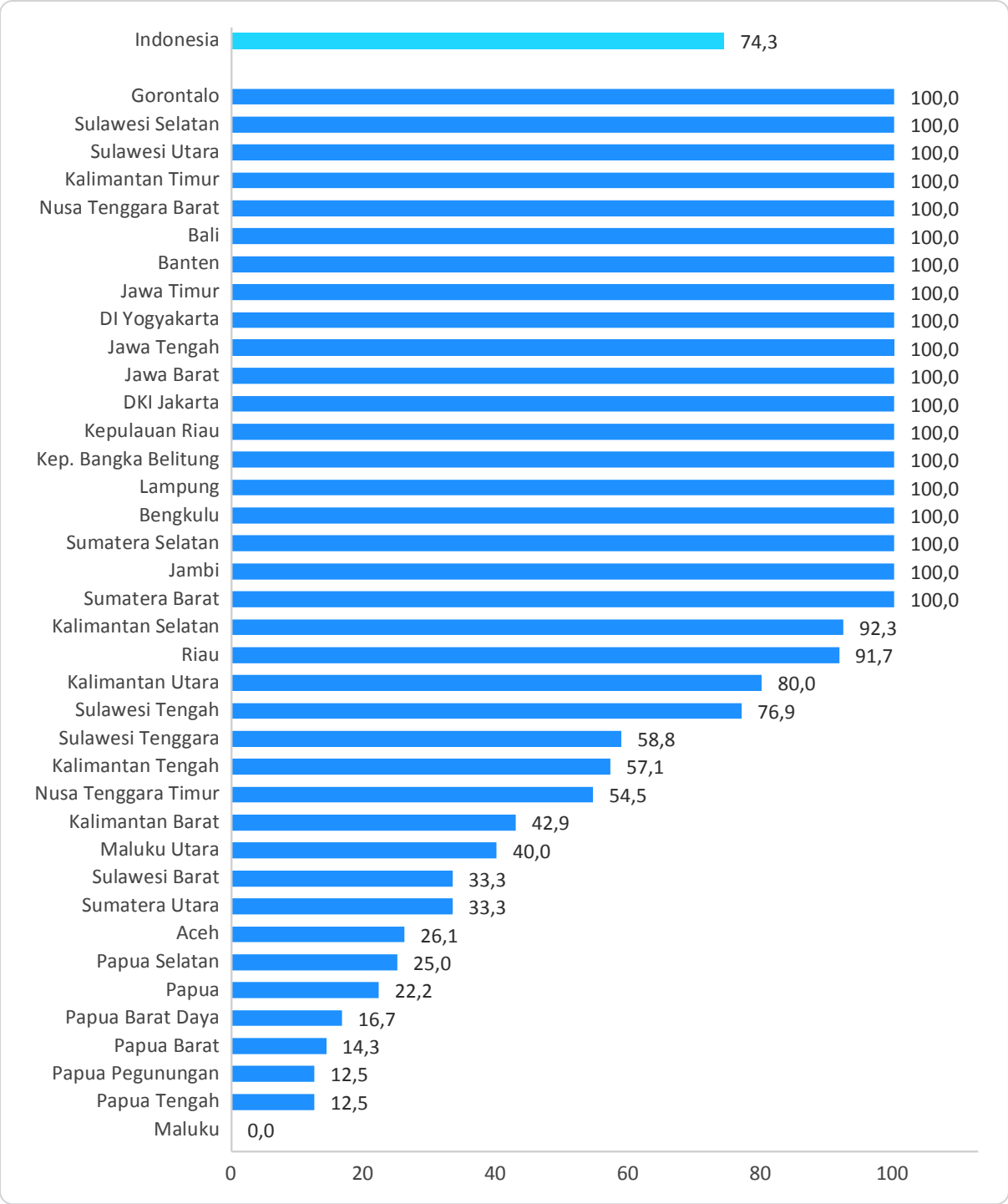

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023, kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 382 kabupaten/kota (74,3%) (Gambar 7.10). Terdapat 19 (Sembilanbelas) provinsi dengan persentase Kabupaten/Kota Sehat telah mencapai 100%. Dan masih terdapat 1 provinsi dengan persentase kabupaten/kota Sehat masih 0%, dalam kata lain belum ada Kab/Kota dalam provinsi tersebut yang merupakan Kabupaten/Kota Sehat, yaitu Maluku.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KKS diantaranya:

1. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan tatanan dalam penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
2. Kurang optimalnya peran dari tim pembina, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
3. Kurangnya koordinasi lintas sektor atau OPD untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat.
4. Masih kurangnya advokasi kegiatan KKS dari Provinsi ke Kabupaten/Kota

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait dengan penyelenggaraan KKS.

G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Fasilitas pelayanan kesehatan pasti menimbulkan limbah medis yang merupakan semua sisa kegiatan dari pelayanan kesehatan yang sudah tidak digunakan dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis berbentuk padat terdiri dari limbah infeksius, patologi, tajam, farmasi, sitoksis, kimiawi, radioaktif, kontainer bertekanan, dan logam berat. Limbah medis berbentuk cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah berbentuk gas umumnya berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, generator listrik, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

Standar pengelolaan limbah medis dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun 2022 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang berisi tahapan pengelolaan limbah medis padat termasuk:

1. Pencegahan dan pengurangan;
2. Pemilahan dan pewadahan;
3. Pengumpulan dan penyimpanan;
4. Pengangkutan dan pengolahan.

Tahapan pengelolaan limbah medis cair termasuk:

1. Sumber dan penyaluran;
2. Pengolahan dan pembuangan.

Definisi operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang mengelola limbah medis adalah RS dan Puskesmas yang melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3) yang berizin serta melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan/atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 yang berizin. Pada tahun 2023, jumlah Fasyankes (rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar mencapai 6.212 Fasyankes dari 13.335 total Fasyankes di seluruh Indonesia.

GAMBAR 7.11
PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

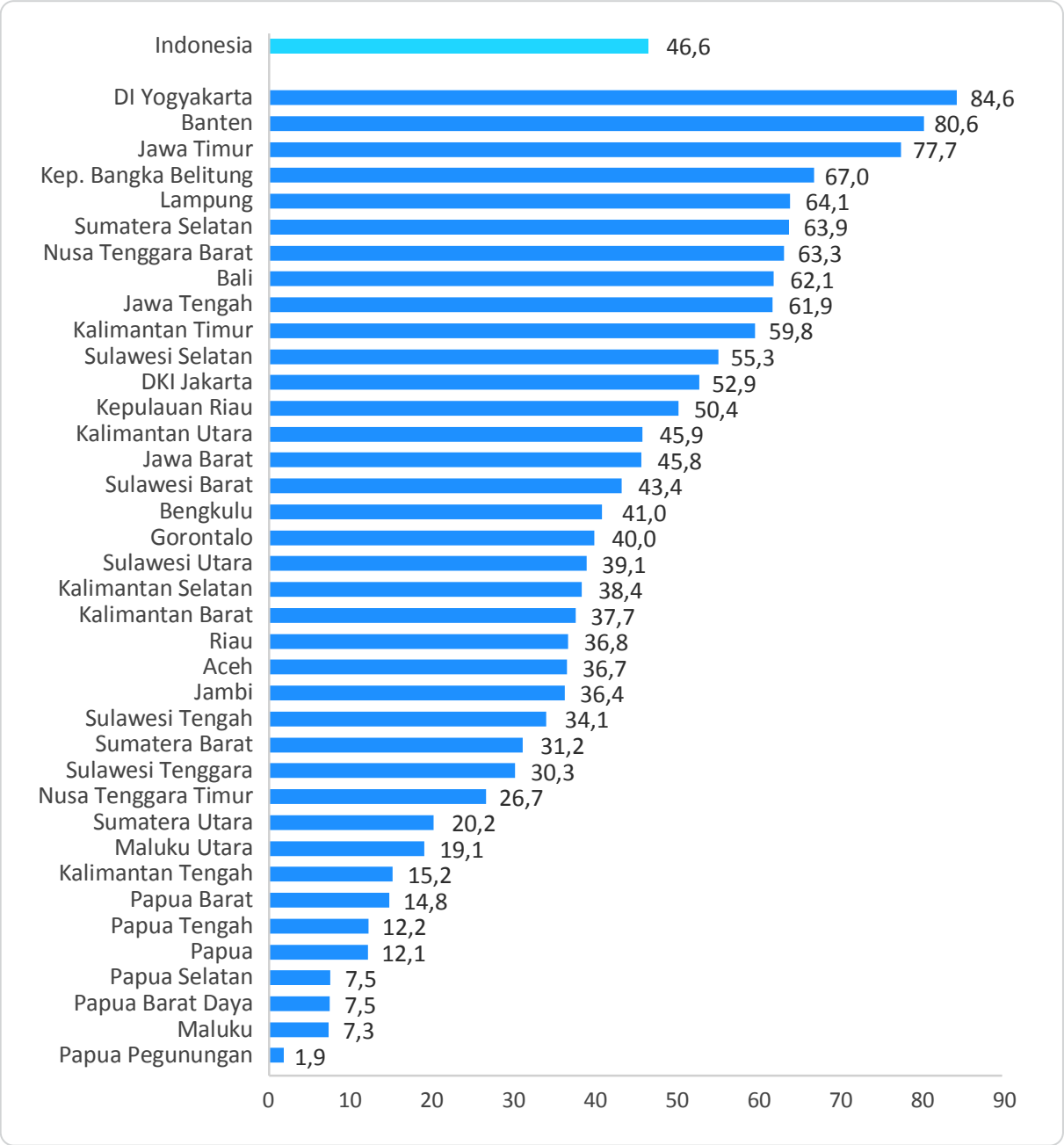

Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2024; Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2024

Secara nasional persentase Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2023 adalah 46,6% (Gambar 7.11). Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 38,9%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (84,6%), Banten (80,6%) dan Jawa Timur (77,7%) Provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan (1,9%), Maluku (7,3%), Papua Barat Daya dan Papua Selatan (7,5%). Rincian lengkap mengenai persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 83.c.

H. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

GERMAS merupakan berbagai upaya intervensi komprehensif dan holistik yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care*. Melalui pembudayaan GERMAS, *continuum of care* dilakukan secara terpadu melalui pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan aksi multisektor.

GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. GERMAS bertujuan menciptakan masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat yang berdampak pada kesehatan, produktivitas, lingkungan bersih, dan berkurangnya biaya berobat.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS, melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Inpres ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye GERMAS, meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR, meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas serta menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

GERMAS tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mempraktikkan pola hidup sehat. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan advokasi yang kuat kepada lintas sektor dan seluruh komponen masyarakat yang mampu menghasilkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Sejak dikeluarkannya Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 terdapat perubahan definisi operasional sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dengan kriteria : 1. Memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan berwawasan kesehatan 2. Melaksanakan Penggerakan Masyarakat dalam mendukung Germas, minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau Mitra Potensial.	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) bila memiliki regulasi terkait Germas, dan melaksanakan 2 dari 3 kegiatan berikut: 1. Melaksanakan kampanye Germas tema prioritas 2. Memiliki kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja 3. Memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional

GAMBAR 7.12
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

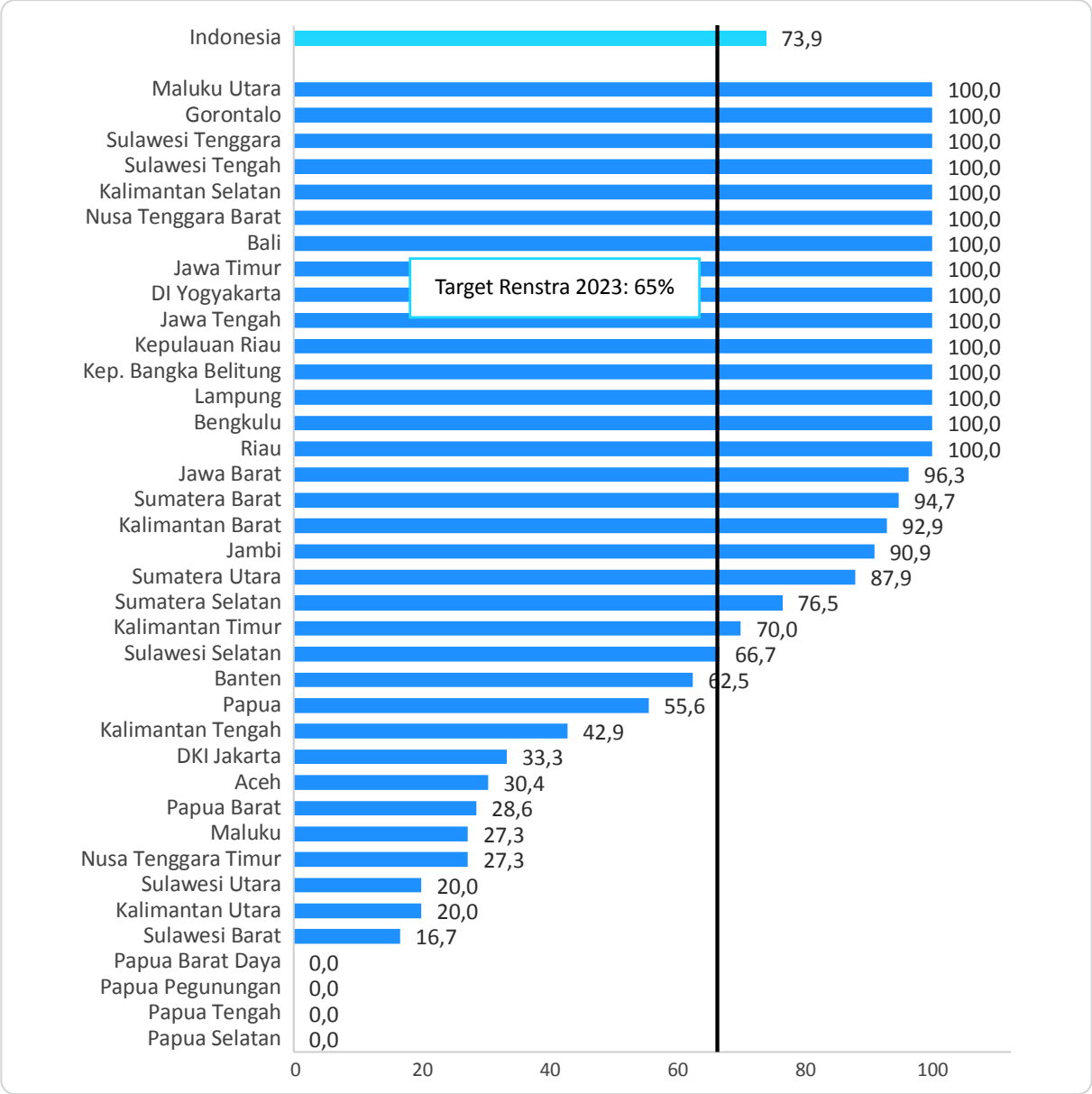

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Pada tahun 2023, sebanyak 380 kabupaten/kota (73,9%) telah melaksanakan kebijakan Germas (Gambar 7.12). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2023 yaitu 65% kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan Germas. Terdapat 15 (Limabelas) provinsi yang belum mencapai target renstra 65% kab/kota menerapkan kebijakan Germas. Terdapat 15 (Limabelas) provinsi yang mencapai 100% Kabupaten/Kota melaksanakan Kebijakan Germas yaitu Provinsi Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu dan Riau. Ada 4 (empat) provinsi dimana seluruh Kabupaten/Kotanya belum melaksanakan Kebijakan Germas yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota melaksanakan kebijakan Germas tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 83.d.

I. PERUMAHAN

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Menurut WHO (*World Health Organization*), pengertian perumahan (*housing*) adalah suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani, rohani, dan keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Klasifikasi rumah layak huni dilakukan dengan mempertimbangkan empat kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya, yaitu:

1. Ketahanan bangunan *(durable housing)* yaitu bahan bangunan atap, dinding, dan lantai rumah memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah beton, genteng, kayu/sirap, dan seng.
   b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
   c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal *(sufficient living space)* yaitu luas lantai per kapita minimal 7,2 m^2.
3. Memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
4. Memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

GAMBAR 7.13
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT TIPE DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2021-2023

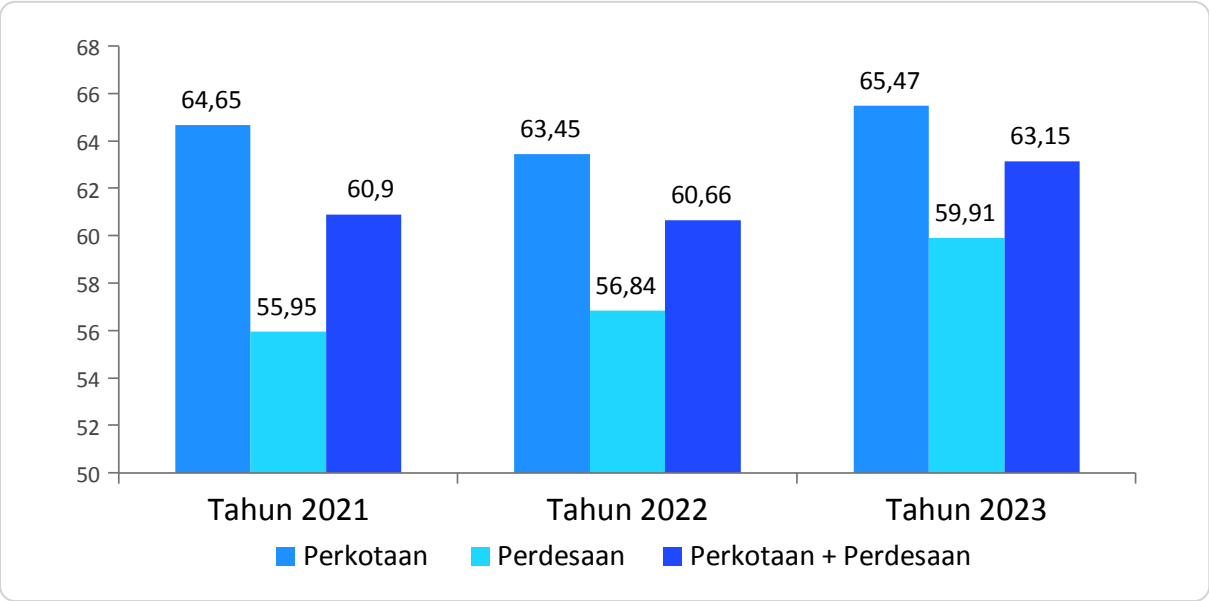

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Gambar 7.13 menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni pada tahun 2023 sebesar 63,15%. Selama periode tahun 2021 - 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,25%. Persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (65,47%) dan (59,91%).

GAMBAR 7.14
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

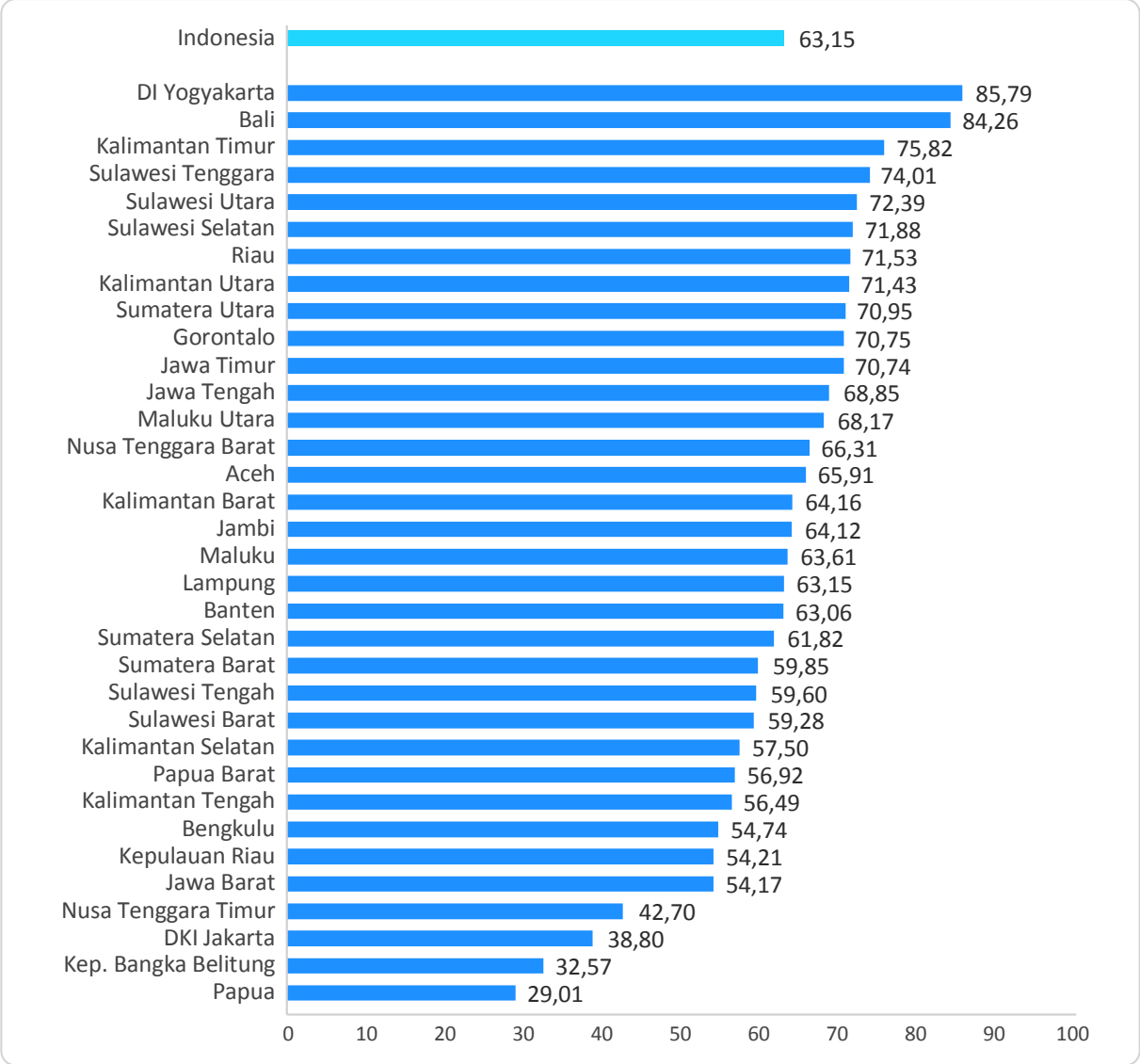

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Secara nasional persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebesar 63,15% (Gambar 7.14). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah layak huni yaitu Provinsi DI Yogyakarta (85,79%), Bali (84,26%) dan Kalimantan Timur (75,82%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (29,01%), Kepulauan Bangka Belitung (32,57%), dan DKI Jakarta (38,80%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 83.e.

***

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar. 2017. *Problematika Alokasi dan Distribusi Anggaran Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 2. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6850
- Adioutomo, Sari Martiningsih dan Ghazy Mujahid. 2014. *Indonesia on The Threeshold of Population Ageing*. UNFPA Indonesia.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2019. *Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017.* Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017.* Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Pusat Statistik, 2023. https://www.bps.go.id/indicator/29/845/1/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum-layak.html (Akses 5 January 2023).
- Badan Pusat Statistik, 2023. https://www.bps.go.id/indicator/29/834/1/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-tipe-daerah-dan-sanitasi-layak.html (Akses 5 Januari 2023)
- Badan Pusat Statistik, 2023. https://www.bps.go.id/indicator/29/1241/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html (Akses 5 Januari 2023).
- Badan Pusat Statistik, 2023. https://www.bps.go.id/statictable/2023/03/31/2219/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html (Akses Mei 2023)
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2022. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik No. 07/01/TH. XXV, 17 Januari 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, 2019. *Laporan Pelaksanaan Integrasi SUSENAS Maret 2019 dan SSGBI Tahun 2019*, Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan. 2018. *Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, 2013. *Dasar Hukum Jaminan Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- CDC. 2021. *COVID-19 Calculating Percent Positivitity*. [Online] Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/calculating-percent-positivity.html [Accessed 17 Mei 2021].
- CDC. 2021. *COVID-19 Medical Conditions*. [Online] Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [Accessed 17 Mei 2021].
- Kementerian Dalam Negeri. 2022. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.*
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS). Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.HK.01.07/Menkes.701 Tahun 2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. Pedoman Penatalaksanaan Pemberian Tablet Tambah Darah. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. Pedoman Penanggulangan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang "Eliminasi Malaria di Indonesia".
- Kementerian Kesehatan RI. 2007. *Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP).* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33/MENKES/PER/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Petunjuk Teknis Surveilans Campak.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. P*eraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. P*eraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM).* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019: Revisi I Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/ Menkes/117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran program Pembangunan Kesehatan\ Tahun 2015-2019.* Jakarta: kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/ VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Rencana Aksi Kesehatan Olah Raga Tahun 2016-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Roadmap STBM 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke 5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Surveilans Accute Flaccid Paralysis (AFP*). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman dan Tatalaksana Covid-19 Edisi 2 Agustus 2020.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Pedoman Surveilans Campak - Rubela.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Surveilans dan Penanggulangan Difteri.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Petunjuk Teknis Surveilans Tetanus Neonatorum.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Profil Kesehatan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2022.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Laporan Perkembangan Kasus AIDS dan PIMS Triwulan IV Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *National Health Accounts Indonesia Tahun 2018.* Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355 Tahun 2012.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.181/M/KPT/2016*: *Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Sosial. 2022. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 241/HUK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan November Tahun 2022.* Jakarta: Kementerian Sosial
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2011. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Kurnianigsih, Titik (2012). *Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. www.dpr.go.id
- Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- Pneumonia Covid-19 Diagnosis dan Penataksanaan di Indonesia, PDPI Tahun 2020
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia*. *Nomor 40 Tahun 2004* tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2012. *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 66*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*, Nomor 184. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Instruksi Presiden Republik I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.* Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan.
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4765/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta : Kementerian Kesehatan.

- UNICEF. 2023. *Executive Summary, The State of The World's Children 2023, For Every Child Vaccination,* Florence, Italy: UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight.
- UNICEF. 2023. *Indonesia Targetkan Daerah dengan Cakupan Vaksinasi Rendah untuk Atasi Penurunan Imunisasi Anak.* [Online]. Avalable at: https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-targetkan-daerah-dengan-cakupan-vaksinasi-rendah-untuk-atasi-penurunan. [Accessed 15 Mei 2023]
- World Health Organization. 2008. *WHO-Recommended Standards for Surveillance of Selected Vaccine-Preventable Diseases.*
- World Health Organization. *Weekly Epidemiological Record*, 31 Agustus 2018.
- World Health Organization. 2018. *Best Practices in Active Surveillance for Polio Eradication.*
- World Health Organization. 2021. *Global Tuberculosis Report 2021.* Geneva: WHO
- World Health Organization.2018. *Tetanus.*
- https://www.bps.go.id/
- https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id

* * *

LAMPIRAN

Lampiran 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Luas Wilayah (km2)	Jumlah						Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk (per km2)
			Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	L	P	L+P	Rasio Jenis Kelamin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	56.834,75	18	5	23	290	0	6.500	2.759.685	2.756.154	5.515.839	100,1	97
2	Sumatera Utara	72.460,74	25	8	33	455	693	5.417	7.742.937	7.728.645	15.471.582	100,2	214
3	Sumatera Barat	42.119,54	12	7	19	179	230	1.035	2.884.903	2.865.423	5.750.326	100,7	137
4	Riau	89.935,90	10	2	12	172	271	1.591	3.502.832	3.358.405	6.861.237	104,3	76
5	Jambi	49.026,58	9	2	11	144	171	1.414	1.914.192	1.846.083	3.760.275	103,7	77
6	Sumatera Selatan	86.771,68	13	4	17	241	403	2.855	4.526.862	4.363.051	8.889.913	103,8	102
7	Bengkulu	20.128,34	9	1	10	129	172	1.341	1.070.935	1.027.154	2.098.089	104,3	104
8	Lampung	33.570,26	13	2	15	229	205	2.446	4.623.157	4.428.302	9.051.459	104,4	270
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.690,13	6	1	7	47	84	309	779.677	742.046	1.521.723	105,1	91
10	Kepulauan Riau	8.269,71	5	2	7	80	144	275	1.107.301	1.071.309	2.178.610	103,4	263
11	DKI Jakarta	660,98	1	5	6	44	267	-	5.683.739	5.653.824	11.337.563	100,5	17.153
12	Jawa Barat	37.044,86	18	9	27	627	646	5.311	25.268.145	24.631.847	49.899.992	102,6	1.347
13	Jawa Tengah	34.337,49	29	6	35	576	753	7.810	19.183.629	18.941.562	38.125.191	101,3	1.110
14	DI Yogyakarta	3.170,65	4	1	5	78	46	392	1.842.667	1.879.629	3.722.296	98,0	1.174
15	Jawa Timur	48.036,84	29	9	38	666	773	7.721	20.755.526	20.888.573	41.644.099	99,4	867
16	Banten	9.352,77	4	4	8	155	314	1.238	6.331.931	6.138.066	12.469.997	103,2	1.333
17	Bali	5.590,15	8	1	9	57	80	636	2.178.137	2.166.417	4.344.554	100,5	777
18	Nusa Tenggara Barat	19.675,89	8	2	10	117	145	1.021	2.802.761	2.816.689	5.619.450	99,5	286
19	Nusa Tenggara Timur	46.446,64	21	1	22	315	305	3.137	2.802.966	2.806.083	5.609.049	99,9	121
20	Kalimantan Barat	147.037,04	12	2	14	174	99	2.046	2.856.503	2.700.774	5.557.277	105,8	38
21	Kalimantan Tengah	153.443,91	13	1	14	136	139	1.432	1.421.950	1.331.099	2.753.049	106,8	18
22	Kalimantan Selatan	37.135,05	11	2	13	156	144	1.872	2.139.795	2.094.419	4.234.214	102,2	114
23	Kalimantan Timur	126.981,28	7	3	10	105	197	841	2.077.842	1.929.894	4.007.736	107,7	32
24	Kalimantan Utara	70.101,18	4	1	5	55	35	447	392.339	355.076	747.415	110,5	11
25	Sulawesi Utara	14.500,28	11	4	15	171	332	1.507	1.360.389	1.300.026	2.660.415	104,6	183
26	Sulawesi Tengah	61.605,72	12	1	13	175	175	1.842	1.618.453	1.536.046	3.154.499	105,4	51
27	Sulawesi Selatan	45.330,55	21	3	24	313	793	2.266	4.661.621	4.738.662	9.400.283	98,4	207
28	Sulawesi Tenggara	36.159,71	15	2	17	221	379	1.908	1.392.064	1.361.643	2.753.707	102,2	76
29	Gorontalo	12.025,15	5	1	6	77	72	657	624.323	612.862	1.237.185	101,9	103
30	Sulawesi Barat	16.594,75	6	0	6	69	73	575	736.558	715.099	1.451.657	103,0	87
31	Maluku	46.158,27	9	2	11	118	35	1.200	960.417	951.526	1.911.943	100,9	41
32	Maluku Utara	32.998,70	8	2	10	118	118	1.067	707.223	657.868	1.365.091	107,5	41
33	Papua	82.680,96	8	1	9	105	51	948	565.799	519.482	1.085.281	108,9	13
34	Papua Barat	60.275,31	7	0	7	86	30	803	291.837	273.968	565.805	106,5	9
35	Papua Selatan	117.849,16	4	0	4	82	13	677	277.720	256.190	533.910	108,4	5
36	Papua Tengah	61.072,91	8	0	8	131	36	1.172	718.844	638.227	1.357.071	112,6	22
37	Papua Pegunungan	51.213,33	8	0	8	252	10	2.617	786.669	677.797	1.464.466	116,1	29
38	Papua Barat Daya	39.122,95	5	1	6	132	74	939	319.316	293.864	613.180	108,7	16
Indonesia		**1.892.410,10**	**416**	**98**	**514**	**7.145**	**8.433**	**74.326**	**141.671.644**	**139.053.784**	**280.725.428**	**101,9**	**148**

Sumber: - Kementerian Dalam Negeri, 2024
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Lampiran 2.a

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2023

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	0 - 4	11.499.263	11.012.575	22.511.838	104,4
2	5 - 9	11.237.620	10.762.443	22.000.063	104,4
3	10 - 14	11.316.538	10.746.686	22.063.224	105,3
4	15 - 19	11.419.740	10.714.636	22.134.376	106,6
5	20 - 24	11.489.725	10.871.139	22.360.864	105,7
6	25 - 29	11.509.141	10.986.440	22.495.581	104,8
7	30 - 34	11.243.949	10.845.051	22.089.000	103,7
8	35 - 39	10.834.133	10.570.335	21.404.468	102,5
9	40 - 44	10.274.345	10.130.836	20.405.181	101,4
10	45 - 49	9.544.209	9.514.701	19.058.910	100,3
11	50 - 54	8.415.026	8.450.863	16.865.889	99,6
12	55 - 59	7.133.287	7.231.317	14.364.604	98,6
13	60 - 64	5.676.556	5.813.749	11.490.305	97,6
14	65 - 69	4.183.921	4.344.521	8.528.442	96,3
15	70 - 74	2.695.149	2.920.621	5.615.770	92,3
16	75+	2.314.178	2.993.500	5.307.678	77,3
Indonesia		**140.786.780**	**137.909.413**	**278.696.193**	102,1
Angka Beban Tanggungan *(Dependency Ratio)*				**44,65**	

Sumber : Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2023

Lampiran 2.b

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022 - 2023

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (ribu)	
		2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	5.407,9	5.482,5
2	Sumatera Utara	15.115,2	15.386,6
3	Sumatera Barat	5.640,6	5.757,2
4	Riau	6.614,4	6.642,9
5	Jambi	3.631,1	3.679,2
6	Sumatera Selatan	8.657,0	8.743,5
7	Bengkulu	2.060,1	2.086,0
8	Lampung	9.176,6	9.314,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.494,6	1.511,9
10	Kepulauan Riau	2.179,8	2.152,6
11	DKI Jakarta	10.680,0	10.672,1
12	Jawa Barat	49.405,8	49.860,3
13	Jawa Tengah	37.032,4	37.541,0
14	DI Yogyakarta	3.761,9	3.736,5
15	Jawa Timur	41.150,0	41.527,9
16	Banten	12.252,0	12.307,7
17	Bali	4.415,1	4.404,3
18	Nusa Tenggara Barat	5.473,7	5.560,3
19	Nusa Tenggara Timur	5.466,3	5.569,1
20	Kalimantan Barat	5.541,4	5.623,3
21	Kalimantan Tengah	2.741,1	2.773,7
22	Kalimantan Selatan	4.182,1	4.222,3
23	Kalimantan Timur	3.859,8	3.909,7
24	Kalimantan Utara	727,8	730,0
25	Sulawesi Utara	2.659,5	2.681,5
26	Sulawesi Tengah	3.066,1	3.086,8
27	Sulawesi Selatan	9.225,8	9.362,3
28	Sulawesi Tenggara	2.701,7	2.749,0
29	Gorontalo	1.192,7	1.213,2
30	Sulawesi Barat	1.458,6	1.481,1
31	Maluku	1.881,7	1.920,5
32	Maluku Utara	1.319,3	1.337,1
33	Papua	4.418,6	1.047,1
34	Papua Barat	1.183,3	569,6
35	Papua Selatan	-	534,4
36	Papua Tengah	-	1.452,8
37	Papua Pegunungan	-	1.448,4
38	Papua Barat Daya	-	617,7
Indonesia		**275.773,8**	**278.696,2**

Sumber : * Hasil Sensus Penduduk 2020 (September), BPS 2023
**Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2025 Hasil SP 2020, BPS 2023

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 2.c

JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023

No	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Jumlah Bayi (0 tahun)	4.659.154	4.447.534	9.106.688
2	Jumlah Batita (0-2 tahun)	6.955.521	6.649.484	13.605.005
3	Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)	9.157.462	8.781.539	17.939.001
4	Jumlah Balita (0 - 4 tahun)	11.499.263	11.012.575	22.511.838
5	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)	4.501.995	4.319.452	8.821.447
6	Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)	2.244.209	2.149.510	4.393.719
7	Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)	13.511.018	12.894.607	26.405.625
8	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)	34.053.421	32.521.704	66.575.125
9	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)	97.540.111	95.129.067	192.669.178
10	Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)	9.193.248	10.258.642	19.451.890
11	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)	-	73.633.138	73.633.138
12	Jumlah Wanita Usia Subur Imunisasi (15-39 tahun)	-	53.987.601	53.987.601

Sumber : Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2023

Lampiran 3.a

JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2001 - 2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	2001	8,6	29,3	37,9	9,8	24,8	18,4	100.011,0	80.382,0
2	2002	13,3	25,1	38,4	14,5	21,1	18,2	130.499,0	96.512,0
3	2003	12,3	25,1	37,3	13,6	20,2	17,4	138.803,0	105.888,0
4	2004	11,4	24,8	36,2	12,1	20,1	16,7	143.455,0	108.725,0
5	2005	12,4	22,7	35,1	11,7	20,0	16,0	165.565,0	117.365,0
6	2006	14,5	24,8	39,3	13,5	21,8	17,8	174.290,0	130.584,0
7	2007	13,6	23,6	37,2	12,5	20,4	16,6	187.942,0	146.837,0
8	2008	12,8	22,2	35,0	11,7	18,9	15,4	204.896,0	161.830,8
9	2009	11,9	20,6	32,5	10,7	17,4	14,2	222.123,1	179.834,6
10	2010	11,1	19,9	31,0	9,9	16,6	13,3	232.989,0	192.353,8
11	Maret 2011	11,1	19,0	30,0	9,2	15,7	12,5	253.015,5	213.394,5
12	September 2011	11,0	18,9	29,9	9,1	15,6	12,4	263.593,8	223.180,7
13	Maret 2012	10,7	18,5	29,1	8,8	15,1	12,0	267.407,5	229.225,8
14	September 2012	10,5	18,1	28,6	8,6	14,7	11,7	277.382,0	240.441,4
15	Maret 2013	10,3	17,7	28,1	8,4	14,3	11,4	289.042,0	253.273,0
16	September 2013	10,6	17,9	28,6	8,5	14,4	11,5	308.826,0	275.779,0
17	Maret 2014	10,5	17,8	28,3	8,3	14,2	11,3	318.514,0	286.097,0
18	September 2014	10,4	17,4	27,7	8,2	13,8	11,0	326.853,0	296.681,0
19	Maret 2015	10,7	17,9	28,6	8,3	14,2	11,2	342.541,0	317.881,0
20	September 2015	10,6	17,9	28,5	8,2	14,1	11,1	356.378,0	333.034,0
21	Maret 2016	10,3	17,7	28,0	7,79	14,11	10,86	364.527,0	343.647,0
22	September 2016	10,5	17,3	27,8	7,73	13,96	10,70	372.114,0	350.420,0
23	Maret 2017	10,7	17,1	27,8	7,7	13,9	10,6	385.621,0	361.496,0
24	September 2017	10,3	16,3	26,6	7,3	13,5	10,1	400.995,0	370.910,0
25	Maret 2018	10,1	15,8	26,0	7,0	13,2	9,8	415.614,0	383.908,0
26	September 2018	10,1	15,5	25,7	6,9	13,1	9,7	425.770,0	392.154,0
27	Maret 2019	10,0	15,2	25,1	6,7	12,9	9,4	442.062,0	404.398,0
28	September 2019	9,9	14,9	24,8	6,6	12,6	9,2	458.380,0	418.515,0
29	Maret 2020	11,2	15,3	26,4	7,4	12,8	9,8	471.822,0	433.281,0
30	September 2020	12,0	15,5	27,6	7,9	13,2	10,2	475.477,0	437.902,0
31	Maret 2021	12,2	15,4	27,5	7,9	13,1	10,1	489.848,0	450.185,0
32	September 2021	11,9	14,6	26,5	7,6	12,5	9,7	502.730,0	464.474,0
31	Maret 2022	11,8	14,3	26,2	7,5	12,3	9,5	521.494,0	484.209,0
32	September 2022	12,0	14,4	26,4	7,5	12,4	9,6	535.547,0	486.168,0
33	Maret 2023	11,7	14,2	25,9	7,3	12,2	9,4	569.299,0	525.050,0

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023
Keterangan: Data bulan September 2023 tidak tersedia karena kegiatan Susenas September 2023 tidak diselenggarakan

Lampiran 3.b

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH
TAHUN 2023

No	Provinsi	Semester I (Maret)								
		Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	657.772,00	189,16	9,79	612.007,00	617,59	16,9	1.269.779,00	806,75	14,45
2	Sumatera Utara	626.782,00	709,98	8,23	573.500,00	529,73	8,0	1.200.282,00	1.239,71	8,15
3	Sumatera Barat	682.515,00	133,79	4,67	652.709,00	206,57	7,2	1.335.224,00	340,37	5,95
4	Riau	698.241,00	196,50	6,73	632.704,00	289,16	6,7	1.330.945,00	485,66	6,68
5	Jambi	699.123,00	125,30	10,19	552.720,00	155,39	6,3	1.251.843,00	280,68	7,58
6	Sumatera Selatan	556.102,00	371,75	11,07	500.688,00	673,93	12,2	1.056.790,00	1.045,68	11,78
7	Bengkulu	698.802,00	97,66	14,21	609.241,00	190,80	14,0	1.308.043,00	288,46	14,04
8	Lampung	610.614,00	232,96	8,02	534.575,00	737,71	12,7	1.145.189,00	970,67	11,11
9	Kepulauan Bangka Belitung	859.301,00	31,09	3,54	893.380,00	37,60	5,9	1.752.681,00	68,69	4,52
10	Kepulauan Riau	747.258,00	111,90	5,05	708.168,00	30,60	10,7	1.455.426,00	142,50	5,69
11	DKI Jakarta	792.515,00	477,83	4,44	-	-	-	792.515,00	477,83	4,44
12	Jawa Barat	496.201,00	2.914,24	7,19	491.013,00	974,36	9,3	987.214,00	3.888,60	7,62
13	Jawa Tengah	485.511,00	1.821,66	9,78	469.003,00	1.969,84	11,9	954.514,00	3.791,50	10,77
14	DI Yogyakarta	598.925,00	312,83	10,27	499.942,00	135,63	13,4	1.098.867,00	448,47	11,04
15	Jawa Timur	522.690,00	1.703,74	7,50	488.437,00	2.485,07	14,0	1.011.127,00	4.188,81	10,35
16	Banten	635.207,00	623,19	6,00	563.440,00	202,93	6,8	1.198.647,00	826,13	6,17
17	Bali	545.700,00	123,82	3,77	488.634,00	69,96	5,5	1.034.334,00	193,78	4,25
18	Nusa Tenggara Barat	511.463,00	383,53	13,76	485.682,00	367,70	14,0	997.145,00	751,23	13,85
19	Nusa Tenggara Timur	614.436,00	135,57	9,12	471.502,00	1.005,55	23,8	1.085.938,00	1.141,11	19,96
20	Kalimantan Barat	605.687,00	87,39	4,44	538.992,00	265,96	8,1	1.144.679,00	353,35	6,71
21	Kalimantan Tengah	570.559,00	57,10	4,78	613.490,00	85,06	5,4	1.184.049,00	142,17	5,11
22	Kalimantan Selatan	613.880,00	83,99	3,84	594.141,00	104,93	4,7	1.208.021,00	188,93	4,29
23	Kalimantan Timur	796.193,00	122,43	4,68	776.285,00	108,64	9,3	1.572.478,00	231,07	6,11
24	Kalimantan Utara	851.133,00	24,75	5,18	765.597,00	23,22	8,7	1.616.730,00	47,97	6,45
25	Sulawesi Utara	470.822,00	69,03	4,91	454.781,00	119,97	10,4	925.603,00	189,00	7,38
26	Sulawesi Tengah	579.063,00	92,11	8,90	563.068,00	303,55	14,1	1.142.131,00	395,66	12,41
27	Sulawesi Selatan	458.859,00	211,48	5,01	416.532,00	577,37	11,9	875.391,00	788,85	8,70
28	Sulawesi Tenggara	463.387,00	79,89	7,40	431.962,00	241,64	13,9	895.349,00	321,53	11,43
29	Gorontalo	444.797,00	24,12	4,47	439.013,00	159,60	23,7	883.810,00	183,71	15,15
30	Sulawesi Barat	437.387,00	26,33	9,08	432.169,00	137,81	12,1	869.556,00	164,14	11,49
31	Maluku	694.588,00	43,33	5,49	676.005,00	258,28	24,6	1.370.593,00	301,61	16,42
32	Maluku Utara	599.137,00	23,40	6,23	550.988,00	60,39	6,6	1.150.125,00	83,80	6,46
33	Papua	743.289,00	58,67	5,68	661.946,00	856,48	34,5	1.405.235,00	915,15	26,03
34	Papua Barat	765.617,00	35,84	8,23	702.530,00	179,14	29,2	1.468.147,00	214,98	20,49
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**569.299,00**	**11.736,36**	**7,29**	**525.050,00**	**14.162,19**	**12,22**	**1.094.349,00**	**25.898,55**	**9,36**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (Susenas Maret 2023)

Keterangan: - Data bulan September 2023 tidak tersedia karena kegiatan Susenas September 2023 tidak diselenggarakan

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 3.c

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Semester I (Maret)					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1,9	3,2	2,8	0,6	0,9	0,8
2	Sumatera Utara	1,2	1,3	1,3	0,3	0,3	0,3
3	Sumatera Barat	0,7	1,0	0,8	0,2	0,2	0,2
4	Riau	1,0	1,0	1,0	0,3	0,2	0,2
5	Jambi	1,6	1,0	1,2	0,4	0,3	0,3
6	Sumatera Selatan	1,8	1,7	1,7	0,4	0,4	0,4
7	Bengkulu	2,2	2,1	2,1	0,6	0,5	0,5
8	Lampung	1,2	1,9	1,6	0,3	0,4	0,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,5	0,8	0,6	0,1	0,2	0,1
10	Kepulauan Riau	0,7	1,7	0,8	0,2	0,4	0,2
11	DKI Jakarta***	0,7	-	0,7	0,2	-	0,2
12	Jawa Barat	1,1	1,4	1,2	0,3	0,3	0,3
13	Jawa Tengah	1,7	1,8	1,8	0,4	0,4	0,4
14	DI Yogyakarta	1,6	2,0	1,7	0,4	0,4	0,4
15	Jawa Timur	1,2	2,2	1,6	0,3	0,5	0,4
16	Banten	1,3	1,1	1,2	0,4	0,3	0,4
17	Bali	0,5	0,7	0,6	0,1	0,1	0,1
18	Nusa Tenggara Barat	2,3	2,5	2,4	0,5	0,7	0,6
19	Nusa Tenggara Timur	1,2	4,1	3,3	0,3	1,0	0,8
20	Kalimantan Barat	0,6	1,3	1,0	0,1	0,3	0,2
21	Kalimantan Tengah	0,6	0,7	0,7	0,1	0,1	0,1
22	Kalimantan Selatan	0,4	0,8	0,6	0,1	0,2	0,2
23	Kalimantan Timur	0,6	1,2	0,8	0,1	0,2	0,1
24	Kalimantan Utara	0,6	0,8	0,6	0,1	0,1	0,1
25	Sulawesi Utara	0,7	1,6	1,1	0,2	0,4	0,3
26	Sulawesi Tengah	1,5	2,4	2,1	0,4	0,6	0,5
27	Sulawesi Selatan	0,7	2,3	1,6	0,2	0,6	0,4
28	Sulawesi Tenggara	1,1	2,5	2,0	0,2	0,6	0,5
29	Gorontalo	0,7	4,7	2,9	0,1	1,2	0,7
30	Sulawesi Barat	1,7	1,8	1,8	0,4	0,4	0,4
31	Maluku	0,8	4,8	3,1	0,2	1,4	0,9
32	Maluku Utara	1,1	1,1	1,1	0,2	0,2	0,2
33	Papua	0,9	8,5	6,3	0,2	3,0	2,2
34	Papua Barat	1,8	7,2	4,9	0,6	2,5	1,7
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**1,2**	**2,0**	**1,5**	**0,3**	**0,5**	**0,4**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (Susenas Maret 2023)

Keterangan: - Data bulan September 2023 tidak tersedia karena kegiatan Susenas September 2023 tidak diselenggarakan.

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

***) DKI Jakarta tidak memiliki desa

Lampiran 3.d

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2023

No	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	0,32	0,32	0,32	0,29	0,30
2	Sumatera Utara	0,32	0,31	0,31	0,33	0,31
3	Sumatera Barat	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28
4	Riau	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32
5	Jambi	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34
6	Sumatera Selatan	0,33	0,34	0,34	0,33	0,34
7	Bengkulu	0,34	0,32	0,32	0,32	0,33
8	Lampung	0,33	0,32	0,31	0,31	0,32
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,27	0,26	0,25	0,26	0,25
10	Kepulauan Riau	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34
11	DKI Jakarta	0,39	0,40	0,41	0,41	0,43
12	Jawa Barat	0,40	0,40	0,41	0,41	0,43
13	Jawa Tengah	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37
14	DI Yogyakarta	0,42	0,44	0,44	0,46	0,45
15	Jawa Timur	0,37	0,36	0,36	0,37	0,39
16	Banten	0,37	0,37	0,36	0,38	0,37
17	Bali	0,37	0,37	0,38	0,36	0,36
18	Nusa Tenggara Barat	0,38	0,39	0,38	0,37	0,38
19	Nusa Tenggara Timur	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33
20	Kalimantan Barat	0,33	0,33	0,32	0,31	0,32
21	Kalimantan Tengah	0,34	0,32	0,32	0,31	0,32
22	Kalimantan Selatan	0,33	0,35	0,33	0,31	0,31
23	Kalimantan Timur	0,33	0,34	0,33	0,32	0,32
24	Kalimantan Utara	0,30	0,30	0,29	0,27	0,28
25	Sulawesi Utara	0,37	0,37	0,36	0,36	0,37
26	Sulawesi Tengah	0,33	0,32	0,33	0,31	0,30
27	Sulawesi Selatan	0,39	0,38	0,38	0,37	0,38
28	Sulawesi Tenggara	0,40	0,39	0,39	0,37	0,37
29	Gorontalo	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42
30	Sulawesi Barat	0,37	0,36	0,37	0,37	0,35
31	Maluku	0,32	0,33	0,32	0,31	0,29
32	Maluku Utara	0,31	0,29	0,28	0,31	0,30
33	Papua	0,39	0,40	0,40	0,39	0,39
34	Papua Barat	0,39	0,38	0,37	0,38	0,37
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Indonesia		**0,38**	**0,38**	**0,39**	**0,38**	**0,39**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (Susenas Maret 2023)

Keterangan: - Indeks Gini pada tahun 2023 merupakan Indeks Gini pada bulan Maret 2023

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 3.e

RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL 2023

No	Kelompok Barang	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Padi-padian	74.514	87.969	80.146
2	Umbi-umbian	7.790	10.532	8.938
3	Ikan/udang/cumi/kerang	60.965	53.679	57.915
4	Daging	41.682	27.294	35.659
5	Telur dan susu	44.218	28.086	37.465
6	Sayur-sayuran	57.701	56.276	57.104
7	Kacang-kacangan	16.025	13.226	14.854
8	Buah-buahan	37.045	26.212	32.510
9	Minyak dan kelapa	18.444	19.213	18.766
10	Bahan minuman	19.931	21.010	20.383
11	Bumbu-bumbuan	15.593	14.340	15.069
12	Konsumsi lainnya	14.956	12.407	13.889
13	Makanan dan minuman jadi	271.878	166.056	227.581
14	Rokok	88.370	94.661	91.003
	Makanan	**769.112**	**630.962**	**711.282**
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	482.684	255.140	387.434
16	Aneka barang dan jasa	230.683	103.945	177.630
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	41.038	29.176	36.073
18	Barang tahan lama	64.733	41.890	55.171
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	73.182	37.192	58.117
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	30.017	20.812	26.164
	Bukan Makanan	**922.338**	**488.157**	**740.589**
	Total Pengeluaran	**1.691.450**	**1.119.119**	**1.451.871**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (Susenas Maret 2023)

Lampiran 3.f

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

No	Provinsi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
		TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	6,30	6,30	5.97	6.17	5,75	6,03
2	Sumatera Utara	6,01	6,33	5.47	6.16	5,24	5,89
3	Sumatera Barat	6,67	6,52	6.17	6.28	5,90	5,94
4	Riau	4,96	4,42	4.40	4.37	4,25	4,23
5	Jambi	4,76	5,09	4.70	4.59	4,50	4,53
6	Sumatera Selatan	5,17	4,98	4.74	4.63	4,53	4,11
7	Bengkulu	3,72	3,65	3.39	3.59	3,21	3,42
8	Lampung	4,54	4,69	4.31	4.52	4,18	4,23
9	Kepulauan Bangka Belitung	5,04	5,03	4.18	4.77	3,89	4,56
10	Kepulauan Riau	10,12	9,91	8.02	8.23	7,61	6,80
11	DKI Jakarta	8,51	8,50	8.00	7.18	7,57	6,53
12	Jawa Barat	8,92	9,82	8.35	8.31	7,89	7,44
13	Jawa Tengah	5,96	5,95	5.75	5.57	5,24	5,13
14	DI Yogyakarta	4,28	4,56	3.73	4.06	3,58	3,69
15	Jawa Timur	5,17	5,74	4.81	5.49	4,33	4,88
16	Banten	9,01	8,98	8.53	8.09	7,97	7,52
17	Bali	5,42	5,37	4.84	4.80	3,73	2,69
18	Nusa Tenggara Barat	3,97	3,01	3.92	2.89	3,73	2,80
19	Nusa Tenggara Timur	3,38	3,77	3.30	3.54	3,10	3,14
20	Kalimantan Barat	5,73	5,82	4.86	5.11	4,52	5,05
21	Kalimantan Tengah	4,25	4,53	4.20	4.26	3,84	4,10
22	Kalimantan Selatan	4,33	4,95	4.20	4.74	3,95	4,31
23	Kalimantan Timur	6,81	6,83	6.77	5.71	6,37	5,31
24	Kalimantan Utara	4,67	4,58	4.62	4.33	4,10	4,01
25	Sulawesi Utara	7,28	7,06	6.51	6.61	6,19	6,10
26	Sulawesi Tengah	3,73	3,75	3.67	3.00	3,49	2,95
27	Sulawesi Selatan	5,79	5,72	5.75	4.51	5,26	4,33
28	Sulawesi Tenggara	4,22	3,92	3.86	3.36	3,66	3,15
29	Gorontalo	3,41	3,01	3.25	2.58	3,07	3,06
30	Sulawesi Barat	3,28	3,13	3.11	2.34	3,04	2,27
31	Maluku	6,73	6,93	6.44	6.88	6,08	6,31
32	Maluku Utara	5,06	4,71	4.98	3.98	4,60	4,31
33	Papua	3,77	3,33	3.60	2.83	3,49	2,67
34	Papua Barat	6,18	5,84	5.78	5.37	5,53	5,38
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**6,26**	**6,49**	**5.83**	**5.86**	**5,45**	**5,32**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.g

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

No	Provinsi	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(3)*
1	Aceh	9,77	9.79	9,89
2	Sumatera Utara	9,88	9.99	10,07
3	Sumatera Barat	9,46	9.51	9,59
4	Riau	9,52	9.54	9,60
5	Jambi	9,03	9.07	9,16
6	Sumatera Selatan	8,78	8.82	8,90
7	Bengkulu	9,26	9.28	9,35
8	Lampung	8,56	8.61	8,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	8,54	8.57	8,66
10	Kepulauan Riau	10,38	10.46	10,52
11	DKI Jakarta	11,20	11.30	11,42
12	Jawa Barat	9,03	9.14	9,16
13	Jawa Tengah	8,26	8.38	8,44
14	DI Yogyakarta	10,04	10.07	10,16
15	Jawa Timur	8,37	8.50	8,53
16	Banten	9,29	9.46	9,48
17	Bali	9,45	9.74	9,74
18	Nusa Tenggara Barat	8,13	8.31	8,39
19	Nusa Tenggara Timur	8,20	8.25	8,31
20	Kalimantan Barat	8,00	8.10	8,17
21	Kalimantan Tengah	9,03	9.03	9,07
22	Kalimantan Selatan	8,74	8.89	8,95
23	Kalimantan Timur	10,09	10.13	10,17
24	Kalimantan Utara	9,40	9.45	9,53
25	Sulawesi Utara	9,83	9.87	9,94
26	Sulawesi Tengah	9,18	9.17	9,22
27	Sulawesi Selatan	8,95	9.09	9,12
28	Sulawesi Tenggara	9,52	9.59	9,62
29	Gorontalo	8,32	8.39	8,48
30	Sulawesi Barat	8,39	8.47	8,48
31	Maluku	10,25	10.37	10,38
32	Maluku Utara	9,51	9.60	9,61
34	Papua	7,05	7.31	7,34
33	Papua Barat	10,03	10.14	10,14
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		**8,97**	**9.08**	**9,13**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.h

ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF)
MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019 - 2023

No	Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	99,78	99,69	99,10	98,90	99,03	98,98	99,12	97,39	97,60	97,67	99,38	99,41	98,24	98,25	98,34
2	Sumatera Utara	99,86	99,76	99,54	99,50	99,49	99,43	99,53	98,84	98,73	98,85	99,65	99,64	99,19	99,11	99,17
3	Sumatera Barat	99,63	99,68	99,54	99,65	99,65	99,28	99,20	99,00	98,93	98,98	99,45	99,44	99,26	99,29	99,31
4	Riau	99,75	99,78	99,46	99,46	99,60	99,34	99,38	98,92	98,88	98,75	99,55	99,59	99,20	99,18	99,18
5	Jambi	99,81	99,27	98,68	98,77	98,89	98,31	98,95	97,47	97,41	97,42	99,07	99,11	98,08	98,10	98,16
6	Sumatera Selatan	99,72	99,73	99,28	99,16	99,24	99,44	99,37	98,27	98,12	98,20	99,58	99,55	98,78	98,65	98,73
7	Bengkulu	99,63	99,68	98,89	98,56	98,74	98,74	98,61	96,83	97,01	97,01	99,20	99,16	97,88	97,80	97,89
8	Lampung	99,17	99,27	98,51	98,05	98,26	97,52	97,74	95,98	96,41	96,37	98,36	98,53	97,28	97,25	97,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,54	99,10	99,05	98,72	98,98	97,81	98,22	97,08	97,58	97,47	98,73	98,68	98,10	98,17	98,24
10	Kepulauan Riau	99,49	99,70	99,26	99,48	99,35	99,08	98,88	98,92	98,56	98,74	99,29	99,30	99,09	99,02	99,05
11	DKI Jakarta	99,91	99,81	99,79	99,83	99,74	99,57	99,57	99,67	99,55	99,65	99,74	99,69	99,73	99,69	99,69
12	Jawa Barat	99,25	99,46	99,29	99,03	99,14	98,22	98,24	97,93	97,93	97,88	98,75	98,87	98,62	98,49	98,51
13	Jawa Tengah	97,36	97,39	96,26	96,20	96,68	93,28	93,36	91,39	92,34	92,06	95,32	95,37	93,79	94,26	94,34
14	DI Yogyakarta	98,73	98,54	97,46	97,15	97,46	94,76	95,24	93,05	93,21	93,77	96,74	96,88	95,22	95,15	95,59
15	Jawa Timur	97,30	97,49	95,15	95,41	96,10	93,78	94,13	90,06	91,28	91,39	95,54	95,81	92,56	93,32	93,70
16	Banten	99,18	99,29	98,84	98,76	99,10	97,08	97,61	96,69	97,54	97,36	98,16	98,48	97,78	98,16	98,23
17	Bali	98,55	98,57	97,39	97,45	97,57	95,46	95,67	92,59	93,61	93,63	97,04	97,15	95,00	95,53	95,61
18	Nusa Tenggara Barat	93,77	92,67	91,02	91,38	92,05	86,31	87,63	83,95	86,59	86,31	89,92	90,07	87,39	88,97	89,11
19	Nusa Tenggara Timur	98,59	98,06	94,84	95,26	96,14	97,25	97,01	92,91	94,01	94,13	97,92	97,53	93,85	94,63	95,11
20	Kalimantan Barat	97,72	97,86	95,87	95,48	96,56	94,46	94,75	90,88	92,36	92,99	96,12	96,34	93,41	93,96	94,79
21	Kalimantan Tengah	99,77	99,91	99,34	99,43	99,27	99,12	99,00	98,83	98,78	98,78	99,47	99,48	99,10	99,12	99,03
22	Kalimantan Selatan	99,29	99,40	99,15	99,07	99,10	98,84	98,69	97,37	97,63	97,64	99,07	99,05	98,27	98,36	98,37
23	Kalimantan Timur	99,57	99,60	99,30	99,42	99,46	98,94	98,80	98,48	98,49	98,54	99,27	99,22	98,90	98,97	99,01
24	Kalimantan Utara	98,57	98,56	97,00	98,26	98,34	96,70	97,00	96,04	97,09	97,17	97,68	97,82	96,55	97,71	97,78
25	Sulawesi Utara	99,87	99,90	99,82	99,79	99,78	99,91	99,86	99,78	99,84	99,80	99,89	99,88	99,80	99,81	99,79
26	Sulawesi Tengah	99,88	99,78	98,82	98,46	98,63	99,28	99,41	97,73	97,63	97,65	99,59	99,60	98,28	98,05	98,14
27	Sulawesi Selatan	97,82	97,23	93,88	94,32	95,23	95,96	96,34	91,19	92,35	92,53	96,87	96,78	92,49	93,31	93,83
28	Sulawesi Tenggara	98,44	97,95	96,77	96,69	97,44	96,48	96,12	93,12	94,88	94,66	97,48	97,05	94,94	95,79	96,03
29	Gorontalo	99,33	99,43	98,78	98,40	98,47	99,69	99,47	98,72	98,44	98,52	99,51	99,45	98,75	98,42	98,49
30	Sulawesi Barat	96,91	97,39	95,08	95,72	95,67	95,24	93,15	91,09	91,84	92,99	96,08	95,28	93,09	93,82	94,33
31	Maluku	99,81	99,90	99,46	99,56	99,59	99,64	99,63	99,38	99,24	99,35	99,73	99,77	99,42	99,40	99,47
32	Maluku Utara	99,91	99,65	99,42	99,18	99,47	99,24	99,43	97,98	98,35	98,15	99,59	99,54	98,71	98,78	98,81
33	Papua	99,07	99,22	81,33	82,96	85,80	98,17	97,51	76,17	79,18	82,47	95,74	98,45	78,89	81,19	84,22
34	Papua Barat	99,49	99,30	98,67	98,06	98,42	99,32	99,00	97,08	97,18	97,21	99,41	99,16	97,91	97,64	97,84
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**98,70**	**98,74**	**97,43**	**97,42**	**97,77**	**96,71**	**96,86**	**94,65**	**95,26**	**95,29**	**97,71**	**97,81**	**96,04**	**96,35**	**96,53**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.i

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

No	Provinsi	2021				2022				2023			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	99,67	98,42	83,28	32,61	99,44	97,96	83,10	31,72	99,43	97,72	83,41	33,10
2	Sumatera Utara	99,32	96,99	78,66	27,05	99,50	96,78	78,66	26,60	99,51	96,76	79,25	28,61
3	Sumatera Barat	99,61	96,63	84,07	36,41	99,55	96,52	83,71	35,41	99,76	96,79	84,33	38,08
4	Riau	99,65	95,66	77,81	28,79	99,61	95,72	77,32	28,65	99,65	95,89	78,15	30,07
5	Jambi	99,66	96,39	72,50	24,14	99,33	96,20	72,53	23,35	99,49	96,01	72,46	23,98
6	Sumatera Selatan	99,65	94,85	71,53	18,81	99,38	95,06	70,93	18,61	99,41	95,27	71,71	19,79
7	Bengkulu	99,76	97,49	79,75	30,46	99,49	97,73	79,31	29,42	99,42	97,91	79,57	30,74
8	Lampung	99,53	95,58	71,72	21,17	99,56	95,63	71,14	20,72	99,61	95,93	71,74	21,66
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,47	93,17	68,15	18,02	99,41	93,00	68,42	17,68	99,51	93,20	69,53	17,59
10	Kepulauan Riau	99,62	98,85	84,40	19,83	99,28	99,01	84,54	19,50	99,29	99,07	84,97	20,51
11	DKI Jakarta	99,53	98,68	72,32	24,92	99,44	97,95	72,10	24,89	99,49	98,17	72,50	26,52
12	Jawa Barat	99,50	95,09	67,80	23,51	99,39	95,27	68,66	23,99	99,40	95,75	68,58	24,72
13	Jawa Tengah	99,66	96,84	70,79	23,55	99,58	96,77	70,82	23,76	99,57	97,08	70,87	24,59
14	DI Yogyakarta	99,70	99,43	89,63	51,41	99,59	99,01	89,95	50,43	99,63	98,88	91,17	51,60
15	Jawa Timur	99,40	97,76	74,14	26,27	99,14	97,64	73,40	26,21	99,28	97,64	74,07	26,53
16	Banten	99,45	96,77	68,94	21,59	99,33	96,39	69,22	22,14	99,43	96,65	69,64	23,72
17	Bali	99,70	98,22	83,96	28,95	99,55	97,85	83,84	30,18	99,61	97,95	84,73	30,92
18	Nusa Tenggara Barat	99,52	98,34	77,49	26,22	99,17	97,74	77,43	25,64	99,46	97,95	77,46	26,42
19	Nusa Tenggara Timur	98,42	95,32	75,77	30,54	98,59	94,83	75,55	29,36	98,62	94,89	75,93	30,68
20	Kalimantan Barat	98,64	93,14	69,38	24,57	98,73	92,64	68,72	24,50	98,81	92,92	69,25	25,08
21	Kalimantan Tengah	99,55	95,21	66,70	24,47	99,20	94,61	66,32	24,29	99,13	95,21	66,32	23,27
22	Kalimantan Selatan	99,38	93,50	69,31	24,70	99,43	94,01	69,88	24,52	99,30	94,12	69,95	27,18
23	Kalimantan Timur	99,60	98,90	82,01	29,86	99,57	98,75	81,43	29,33	99,64	98,71	81,50	32,33
24	Kalimantan Utara	98,67	96,51	76,50	25,02	98,98	97,03	76,50	25,62	99,22	96,96	77,03	27,63
25	Sulawesi Utara	99,37	95,41	73,86	23,67	99,34	94,86	74,33	23,43	99,34	95,00	74,55	23,57
26	Sulawesi Tengah	98,50	93,32	76,32	28,22	98,22	93,02	75,84	27,04	98,34	93,13	76,29	27,58
27	Sulawesi Selatan	99,29	93,55	71,21	35,08	99,43	93,20	70,81	35,07	99,49	93,22	71,00	34,47
28	Sulawesi Tenggara	99,16	95,06	75,02	31,97	99,05	94,80	74,53	31,81	99,20	95,00	74,60	31,73
29	Gorontalo	99,02	92,05	71,30	31,66	98,93	91,83	71,68	30,06	98,69	91,85	71,70	33,20
30	Sulawesi Barat	98,19	90,12	71,22	23,80	98,40	89,39	70,85	23,43	98,31	89,47	71,57	23,98
31	Maluku	99,52	97,65	79,68	39,03	99,55	97,69	79,03	40,15	99,59	97,97	79,90	37,41
32	Maluku Utara	98,84	97,00	77,01	31,23	99,13	97,59	77,70	30,67	99,12	97,51	78,38	28,78
33	Papua	83,43	80,02	63,98	22,90	84,35	81,66	65,93	23,58	83,61	80,91	64,15	23,89
34	Papua Barat	98,08	96,85	81,21	30,92	98,27	97,37	80,56	30,69	98,41	97,42	80,58	31,15
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**99,19**	**95,99**	**73,09**	**26,01**	**99,10**	**95,92**	**73,15**	**25,99**	**99,16**	**96,10**	**73,42**	**26,85**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.j

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2023

No	Provinsi	2019			2020			2021			2022			2023		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	109,93	97,42	90,09	108,70	97,79	90,90	108,10	97,74	92,63	108,34	95,02	92,53	108,48	95,51	93,80
2	Sumatera Utara	109,49	90,38	94,04	108,53	91,68	94,68	107,85	91,87	96,75	108,31	90,31	97,23	106,85	92,11	98,02
3	Sumatera Barat	109,31	91,41	88,88	108,68	92,33	90,01	108,66	93,24	90,38	108,47	92,57	90,66	108,03	92,66	92,00
4	Riau	106,81	93,95	84,17	105,89	94,89	84,61	105,52	95,25	84,11	105,82	94,45	84,85	105,35	92,91	85,12
5	Jambi	111,11	87,31	82,50	109,39	88,91	83,71	109,48	88,96	84,47	109,55	87,84	84,33	108,29	88,20	85,23
6	Sumatera Selatan	113,30	86,97	80,85	111,58	88,78	81,73	111,39	89,44	82,30	112,00	89,41	81,11	110,51	89,78	82,26
7	Bengkulu	109,98	89,50	93,80	109,22	91,32	94,14	109,31	92,11	93,79	109,23	90,79	93,97	107,67	93,10	94,53
8	Lampung	107,36	91,11	85,73	105,93	92,56	85,84	105,63	93,12	88,38	105,91	92,37	87,40	105,31	91,19	89,12
9	Kepulauan Bangka Belitung	108,44	85,34	87,11	107,43	88,19	87,15	107,16	88,44	86,49	107,26	87,85	86,50	106,09	88,51	88,28
10	Kepulauan Riau	107,64	92,82	86,69	106,31	93,97	87,53	106,60	94,12	86,31	106,26	93,27	87,08	105,96	92,58	90,58
11	DKI Jakarta	104,83	91,02	74,77	103,43	91,74	76,87	103,17	91,56	77,08	103,34	89,89	76,91	103,63	95,78	77,40
12	Jawa Barat	105,52	90,75	77,82	104,72	91,75	78,26	104,57	93,33	78,10	104,55	93,46	78,86	104,53	94,69	79,07
13	Jawa Tengah	107,74	91,70	86,76	106,32	93,21	86,83	106,40	94,00	86,65	106,19	94,05	86,83	105,01	92,80	87,84
14	DI Yogyakarta	106,18	95,00	89,07	105,96	95,44	89,30	105,15	95,54	90,50	104,96	94,02	89,93	104,52	94,28	90,82
15	Jawa Timur	105,56	94,24	84,80	104,35	96,40	85,24	104,52	97,17	87,55	104,68	95,95	87,37	103,71	94,74	89,26
16	Banten	107,93	91,61	72,92	107,24	92,76	73,35	106,91	94,88	75,66	106,89	94,05	75,49	106,96	95,71	75,02
17	Bali	103,52	97,26	87,96	102,87	97,40	88,67	103,09	98,68	89,87	103,16	96,23	90,82	102,70	98,18	93,40
18	Nusa Tenggara Barat	108,50	92,07	90,86	107,02	93,59	91,77	107,23	93,72	93,75	107,21	92,59	93,68	107,07	93,32	93,23
19	Nusa Tenggara Timur	114,95	87,82	84,63	113,40	89,85	84,70	113,55	90,78	86,36	113,36	89,88	86,38	111,35	90,41	88,66
20	Kalimantan Barat	112,58	83,26	82,49	111,53	85,22	84,51	111,01	85,45	85,21	111,84	84,59	84,79	109,46	84,49	88,52
21	Kalimantan Tengah	110,05	88,74	82,27	108,49	90,61	82,29	108,21	91,07	83,07	107,39	89,70	83,97	106,98	88,06	85,63
22	Kalimantan Selatan	108,69	83,83	78,86	107,28	86,31	79,10	107,14	86,04	80,77	107,18	86,40	80,97	107,41	86,44	82,21
23	Kalimantan Timur	106,84	91,03	94,96	105,75	92,17	95,23	105,26	92,03	95,52	105,21	91,47	95,09	106,46	92,28	95,16
24	Kalimantan Utara	101,17	98,25	97,91	100,54	101,47	98,31	99,78	100,90	96,55	100,70	99,85	97,57	101,52	97,60	97,78
25	Sulawesi Utara	108,17	89,22	86,60	106,62	90,63	86,83	106,56	90,45	86,17	106,48	89,63	86,03	105,41	90,12	86,03
26	Sulawesi Tengah	105,13	90,63	87,35	103,95	91,98	88,42	103,68	93,17	88,06	103,55	92,86	87,99	102,66	93,06	88,69
27	Sulawesi Selatan	108,46	84,22	86,09	106,99	86,23	86,44	106,85	86,82	87,07	106,71	86,19	86,49	106,65	87,15	88,04
28	Sulawesi Tenggara	109,25	85,34	86,81	107,97	87,10	87,74	108,22	87,54	89,50	108,48	86,04	89,14	108,23	85,28	90,31
29	Gorontalo	110,88	78,95	88,64	109,48	79,25	88,65	108,44	79,37	87,97	108,70	79,37	87,83	108,75	79,66	89,11
30	Sulawesi Barat	107,32	82,71	84,10	106,05	84,67	84,36	105,09	85,27	87,81	106,08	84,58	87,86	104,23	84,95	89,18
31	Maluku	112,19	90,40	95,29	110,08	91,08	95,95	110,79	90,57	95,74	111,05	87,85	95,96	108,90	90,35	95,96
32	Maluku Utara	109,73	86,53	93,17	108,71	88,28	93,44	108,07	87,99	95,04	108,05	88,35	95,40	107,81	88,17	95,64
33	Papua	91,94	78,11	76,33	91,27	81,24	76,55	93,07	81,68	75,05	94,26	83,51	77,06	91,10	81,91	73,90
34	Papua Barat	111,24	88,49	96,41	110,17	90,79	97,72	111,02	90,55	97,25	110,42	90,45	97,71	109,24	91,41	96,79
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**107,46**	**95,74**	**83,98**	**97,69**	**92,06**	**84,53**	**106,20**	**92,80**	**85,23**	**106,27**	**92,11**	**85,49**	**105,62**	**92,51**	**86,34**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.k

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-23)	SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-23)	SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-23)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	108,98	95,24	92,30	39,18	107,97	95,79	95,26	47,84	108,48	95,51	93,80	43,50
2	Sumatera Utara	106,56	92,82	97,40	28,08	107,16	91,35	98,66	37,67	106,85	92,11	98,02	32,67
3	Sumatera Barat	109,46	91,74	89,20	38,67	106,60	93,66	94,78	48,24	108,03	92,66	92,00	43,26
4	Riau	106,14	94,02	79,85	32,49	104,55	91,83	90,66	39,32	105,35	92,91	85,12	35,78
5	Jambi	108,09	89,10	78,06	29,17	108,49	87,22	92,69	34,44	108,29	88,20	85,23	31,77
6	Sumatera Selatan	110,95	89,23	79,97	22,64	110,04	90,31	84,70	32,18	110,51	89,78	82,26	27,26
7	Bengkulu	107,09	90,41	88,88	34,72	108,26	95,85	100,13	41,52	107,67	93,10	94,53	38,01
8	Lampung	104,86	91,08	87,73	19,21	105,78	91,29	90,55	24,68	105,31	91,19	89,12	21,88
9	Kepulauan Bangka Belitung	107,70	86,15	90,41	17,05	104,41	90,98	86,07	19,34	106,09	88,51	88,28	18,19
10	Kepulauan Riau	105,77	89,82	87,40	24,77	106,15	95,91	94,04	32,40	105,96	92,58	90,58	28,50
11	DKI Jakarta	104,18	97,03	72,24	39,39	103,06	94,55	82,38	40,65	103,63	95,78	77,40	40,05
12	Jawa Barat	104,06	95,89	74,85	25,17	105,01	93,48	83,75	25,98	104,53	94,69	79,07	25,57
13	Jawa Tengah	105,15	93,90	84,83	22,74	104,87	91,64	91,13	26,92	105,01	92,80	87,84	24,78
14	DI Yogyakarta	104,01	98,64	89,01	74,31	105,04	89,90	92,65	73,84	104,52	94,28	90,82	74,08
15	Jawa Timur	104,41	94,56	86,50	29,00	102,98	94,93	92,08	34,65	103,71	94,74	89,26	31,84
16	Banten	108,97	91,82	76,32	28,23	104,90	100,24	73,79	36,87	106,96	95,71	75,02	32,31
17	Bali	101,90	98,56	91,23	36,79	103,54	97,76	95,73	36,10	102,70	98,18	93,40	36,46
18	Nusa Tenggara Barat	106,36	92,74	92,38	36,46	107,78	93,92	94,04	29,44	107,07	93,32	93,23	32,99
19	Nusa Tenggara Timur	112,40	87,61	86,94	30,27	110,29	93,29	90,37	35,28	111,35	90,41	88,66	32,65
20	Kalimantan Barat	110,23	82,61	84,79	20,57	108,67	86,47	92,46	30,91	109,46	84,49	88,52	25,74
21	Kalimantan Tengah	108,67	85,71	86,73	22,34	105,32	90,51	84,54	32,06	106,98	88,06	85,63	26,95
22	Kalimantan Selatan	108,28	84,96	80,73	24,85	106,52	88,04	83,68	31,48	107,41	86,44	82,21	28,10
23	Kalimantan Timur	106,44	94,21	93,90	37,18	106,48	90,13	96,50	45,79	106,46	92,28	95,16	41,21
24	Kalimantan Utara	101,85	98,87	89,42	20,66	101,16	96,40	106,28	34,28	101,52	97,60	97,78	27,07
25	Sulawesi Utara	104,69	96,72	79,56	28,94	106,14	83,60	93,53	42,06	105,41	90,12	86,03	35,41
26	Sulawesi Tengah	102,18	91,76	83,70	34,31	103,17	94,35	93,56	45,25	102,66	93,06	88,69	39,71
27	Sulawesi Selatan	107,22	86,68	85,23	41,41	106,07	87,59	90,94	42,64	106,65	87,15	88,04	42,02
28	Sulawesi Tenggara	107,94	88,16	81,40	41,13	108,55	82,36	99,86	47,41	108,23	85,28	90,31	44,32
29	Gorontalo	108,45	75,03	85,20	31,45	109,06	84,19	92,91	41,44	108,75	79,66	89,11	36,23
30	Sulawesi Barat	104,14	84,73	80,84	26,00	104,32	85,15	98,57	34,43	104,23	84,95	89,18	30,27
31	Maluku	109,87	90,01	96,31	42,92	107,92	90,72	95,61	54,62	108,90	90,35	95,96	48,55
32	Maluku Utara	106,35	88,46	94,34	40,36	109,41	87,88	96,96	45,89	107,81	88,17	95,64	43,03
33	Papua	90,89	79,62	75,42	22,03	91,31	84,46	72,24	17,76	91,10	81,91	73,90	19,99
34	Papua Barat	108,87	89,80	94,72	33,38	109,63	93,18	98,92	34,43	109,24	91,41	96,79	33,89
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**105,84**	**92,59**	**83,49**	**29,12**	**105,39**	**92,43**	**89,31**	**33,87**	**105,62**	**92,51**	**86,34**	**31,45**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.l

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2023

No	Provinsi	2019			2020			2021			2022			2023		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	99,1	86,48	70,35	99,03	86,87	70,70	98,95	86,95	70,80	99,07	88,21	71,16	98,97	84,85	71,70
2	Sumatera Utara	97,7	80,26	67,53	97,73	80,56	68,00	97,69	81,13	67,99	98,00	81,84	68,27	97,95	82,09	68,67
3	Sumatera Barat	98,7	78,10	68,53	98,80	78,41	68,90	98,82	78,75	68,99	98,80	78,86	68,38	98,89	80,22	69,18
4	Riau	97,3	79,94	63,55	97,73	80,48	64,01	97,85	80,52	64,00	97,80	80,43	63,87	98,13	80,76	64,81
5	Jambi	99,1	79,48	60,92	99,11	79,93	61,38	99,41	79,88	61,56	99,33	79,93	60,73	99,33	80,23	60,60
6	Sumatera Selatan	97,9	77,58	59,92	97,91	77,97	60,45	98,00	78,31	60,53	98,08	78,68	61,00	98,12	79,12	61,24
7	Bengkulu	98,7	78,81	65,51	98,65	79,77	65,82	98,61	80,25	66,08	98,60	80,25	66,61	98,61	81,08	67,09
8	Lampung	99,2	80,40	59,41	99,16	81,17	59,58	99,10	82,03	60,31	99,29	82,07	61,96	99,22	80,64	62,84
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,7	74,13	58,41	97,73	74,59	58,82	97,89	74,60	58,79	98,01	74,68	59,65	98,11	77,00	60,72
10	Kepulauan Riau	99,1	85,54	72,97	99,16	86,47	73,45	99,26	86,60	73,36	99,20	86,76	73,54	99,29	86,78	74,11
11	DKI Jakarta	98,1	81,68	60,24	98,05	82,47	60,42	98,22	83,01	60,53	98,37	84,22	60,88	98,44	84,95	60,81
12	Jawa Barat	98,3	81,26	57,53	98,37	82,06	57,90	98,37	82,88	58,58	98,29	82,80	58,60	98,20	83,61	59,01
13	Jawa Tengah	97,8	79,84	59,35	97,90	80,53	59,74	98,22	80,99	60,46	98,39	81,02	61,17	98,46	81,56	61,46
14	DI Yogyakarta	99,5	84,04	70,49	99,59	83,98	70,98	99,44	83,62	71,42	99,43	85,28	74,50	99,36	85,62	76,37
15	Jawa Timur	98,0	82,84	61,77	97,99	83,53	62,24	97,90	83,80	62,63	98,09	83,80	62,10	98,04	83,91	62,59
16	Banten	98,0	81,93	58,80	97,95	82,73	59,06	98,15	84,28	59,69	97,93	84,67	59,54	97,97	85,43	60,42
17	Bali	96,8	86,75	73,01	96,84	87,26	73,29	97,20	87,11	74,82	97,46	86,88	74,73	97,77	84,78	75,60
18	Nusa Tenggara Barat	98,9	83,92	66,04	98,78	84,98	66,81	98,81	85,28	67,09	98,83	86,05	67,61	98,76	84,03	68,04
19	Nusa Tenggara Timur	96,2	69,19	53,68	96,09	69,82	54,09	96,04	69,99	54,29	96,08	70,05	56,00	95,98	73,47	58,15
20	Kalimantan Barat	97,1	66,67	51,21	97,36	67,42	51,70	97,42	68,11	51,77	97,52	68,32	51,87	97,70	70,85	54,76
21	Kalimantan Tengah	99,1	77,71	53,82	99,11	78,45	54,08	99,01	78,80	54,25	99,11	78,75	55,69	99,05	79,07	55,63
22	Kalimantan Selatan	98,8	74,84	57,82	98,76	75,51	58,25	98,94	75,88	58,37	99,12	76,28	59,61	99,14	77,44	59,83
23	Kalimantan Timur	98,4	80,42	68,55	98,44	81,28	69,00	98,36	81,30	69,29	98,45	82,65	69,10	98,53	83,36	69,89
24	Kalimantan Utara	93,2	78,42	64,39	93,46	79,09	64,75	93,38	79,21	65,37	93,69	79,38	65,65	94,73	80,53	66,70
25	Sulawesi Utara	95,0	74,30	62,98	95,13	74,82	63,43	95,39	74,94	63,33	95,44	76,11	63,30	95,68	76,56	63,86
26	Sulawesi Tengah	93,2	73,82	64,66	93,24	74,42	65,02	93,33	74,99	65,44	93,25	75,63	65,72	93,31	76,80	66,18
27	Sulawesi Selatan	98,1	75,82	60,14	97,98	76,17	60,32	98,26	77,02	60,35	98,41	77,42	60,44	98,41	77,98	60,57
28	Sulawesi Tenggara	97,5	76,95	62,92	97,70	77,64	63,41	98,15	77,86	63,70	98,27	77,77	64,11	98,48	76,54	64,00
29	Gorontalo	98,4	70,28	57,52	98,50	70,68	57,86	98,65	71,15	58,21	98,74	71,66	58,47	98,69	73,55	60,18
30	Sulawesi Barat	95,9	69,36	57,64	95,80	69,98	58,05	95,68	70,03	59,77	95,81	70,34	60,24	95,92	72,39	61,17
31	Maluku	96,2	74,68	64,23	96,85	75,15	64,81	96,92	75,53	64,71	96,90	78,37	64,57	97,27	78,58	66,16
32	Maluku Utara	97,1	76,20	63,95	97,21	76,90	64,25	97,20	77,03	64,11	97,27	77,41	65,35	97,36	78,53	65,75
33	Papua	79,2	57,19	44,32	79,34	57,95	44,73	80,38	57,93	44,41	81,66	59,14	47,63	80,67	60,23	48,32
34	Papua Barat	93,8	69,92	63,15	93,88	70,51	63,62	94,09	70,52	63,51	94,31	71,38	63,66	94,52	74,70	65,92
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**97,64**	**95,74**	**60,84**	**97,69**	**80,12**	**61,25**	**97,80**	**80,59**	**61,65**	**97,88**	**80,89**	**61,97**	**97,89**	**81,35**	**62,53**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.m

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2023

No	Provinsi	IPM			
		2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	73,29	73,48	74,11	74,70
2	Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13
3	Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64
4	Riau	73,67	73,89	74,45	74,95
5	Jambi	72,29	72,62	73,11	73,73
6	Sumatera Selatan	71,62	71,83	72,48	73,18
7	Bengkulu	72,93	73,16	73,68	74,30
8	Lampung	71,04	71,25	71,79	72,48
9	Kepulauan Bangka Belitung	72,74	72,96	73,50	74,09
10	Kepulauan Riau	77,69	77,87	78,48	79,08
11	DKI Jakarta	81,92	82,25	82,77	83,55
12	Jawa Barat	72,61	72,96	73,63	74,24
13	Jawa Tengah	71,88	72,17	72,80	73,39
14	DI Yogyakarta	79,95	80,22	80,65	81,09
15	Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65
16	Banten	74,41	74,68	75,25	75,77
17	Bali	76,52	76,69	77,40	78,01
18	Nusa Tenggara Barat	70,46	70,86	71,65	72,37
19	Nusa Tenggara Timur	66,93	67,02	67,63	68,40
20	Kalimantan Barat	68,76	68,99	69,71	70,47
21	Kalimantan Tengah	72,62	72,81	73,17	73,73
22	Kalimantan Selatan	73,09	73,45	74,00	74,66
23	Kalimantan Timur	75,94	76,6	77,36	78,20
24	Kalimantan Utara	71,00	71,57	72,21	72,88
25	Sulawesi Utara	73,67	74,03	74,52	75,04
26	Sulawesi Tengah	70,31	70,54	71,01	71,66
27	Sulawesi Selatan	73,08	73,38	73,96	74,60
28	Sulawesi Tenggara	71,61	71,82	72,38	72,94
29	Gorontalo	69,51	69,82	70,62	71,25
30	Sulawesi Barat	68,40	68,64	69,19	69,80
31	Maluku	71,34	71,55	72,04	72,75
32	Maluku Utara	69,30	69,56	70,26	70,98
33	Papua	61,22	61,4	62,16	63,01
34	Papua Barat	65,94	66,11	66,72	67,47
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Indonesia		**72,81**	**73,16**	**73,77**	**74,39**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Catatan:

Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Lampiran 3.n

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022-2023

No	Provinsi	IPM		Umur Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	74,11	74,70	72,92	73,06	14,37	14,38	9,44	9,55	9.963	10.334
2	Sumatera Utara	74,51	75,13	73,39	73,67	13,31	13,48	9,71	9,82	10.848	11.049
3	Sumatera Barat	75,16	75,64	73,88	74,14	14,10	14,11	9,18	9,28	11.130	11.380
4	Riau	74,45	74,95	73,95	74,18	13,29	13,30	9,22	9,32	11.158	11.448
5	Jambi	73,11	73,73	73,61	73,84	13,05	13,13	8,68	8,81	10.871	11.160
6	Sumatera Selatan	72,48	73,18	73,76	74,04	12,55	12,63	8,37	8,50	11.109	11.472
7	Bengkulu	73,68	74,30	72,90	73,11	13,68	13,74	8,91	9,03	10.840	11.172
8	Lampung	71,79	72,48	73,95	74,17	12,74	12,77	8,18	8,29	10.336	10.769
9	Kepulauan Bangka Belitung	73,50	74,09	73,68	73,90	12,18	12,31	8,11	8,25	13.358	13.589
10	Kepulauan Riau	78,48	79,08	74,62	74,90	12,99	13,05	10,37	10,41	14.469	14.998
11	DKI Jakarta	82,77	83,55	75,54	75,81	13,08	13,33	11,31	11,45	18.927	19.373
12	Jawa Barat	73,63	74,24	74,65	74,91	12,62	12,68	8,78	8,83	11.277	11.695
13	Jawa Tengah	72,80	73,39	74,58	74,69	12,81	12,85	7,93	8,01	11.377	11.835
14	DI Yogyakarta	80,65	81,09	75,11	75,18	15,65	15,66	9,75	9,83	14.482	14.924
15	Jawa Timur	74,05	74,65	74,57	74,87	13,37	13,38	8,03	8,11	11.992	12.421
16	Banten	75,25	75,77	74,46	74,77	13,05	13,09	9,13	9,15	12.216	12.601
17	Bali	77,40	78,01	74,60	74,88	13,48	13,58	9,39	9,45	13.942	14.382
18	Nusa Tenggara Barat	71,65	72,37	71,66	72,02	13,96	13,97	7,61	7,74	10.681	11.095
19	Nusa Tenggara Timur	67,63	68,40	71,30	71,57	13,21	13,22	7,70	7,82	7.877	8.248
20	Kalimantan Barat	69,71	70,47	73,47	73,71	12,66	12,67	7,59	7,71	9.355	9.810
21	Kalimantan Tengah	73,17	73,73	73,34	73,54	12,75	12,76	8,65	8,73	11.458	11.878
22	Kalimantan Selatan	74,00	74,66	73,70	73,97	12,82	12,86	8,46	8,55	12.469	12.953
23	Kalimantan Timur	77,36	78,20	74,45	74,72	13,84	14,02	9,92	9,99	12.641	13.202
24	Kalimantan Utara	72,21	72,88	73,51	73,54	13,06	13,20	9,27	9,34	9.350	9.734
25	Sulawesi Utara	74,52	75,04	73,59	73,85	12,95	12,96	9,68	9,77	11.179	11.497
26	Sulawesi Tengah	71,01	71,66	70,49	70,66	13,32	13,33	8,89	8,96	9.696	10.149
27	Sulawesi Selatan	73,96	74,60	73,40	73,63	13,53	13,54	8,63	8,76	11.430	11.841
28	Sulawesi Tenggara	72,38	72,94	71,70	71,79	13,69	13,70	9,25	9,31	9.708	10.117
29	Gorontalo	70,62	71,25	70,22	70,50	13,12	13,16	8,02	8,10	10.687	11.069
30	Sulawesi Barat	69,19	69,80	70,42	70,76	12,87	12,88	8,08	8,13	9.358	9.718
31	Maluku	72,04	72,75	70,16	70,45	14,00	14,08	10,19	10,20	8.876	9.278
32	Maluku Utara	70,26	70,98	70,47	70,76	13,73	13,74	9,24	9,26	8.398	8.834
33	Papua	62,16	63,01	67,98	68,17	11,14	11,15	7,02	7,15	7.146	7.562
34	Papua Barat	66,72	67,47	68,23	68,51	13,21	13,34	7,84	7,93	8.101	8.404
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**73,77**	**74,39**	**73,70**	**73,93**	**13.10**	**13,15**	**8.69**	**8,77**	**11.479**	**11.899**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Catatan:

Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Lampiran 4.a

JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI
TAHUN 2019 - 2023

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	359	359	360	362	365
2	Sumatera Utara	601	608	615	615	619
3	Sumatera Barat	275	276	279	280	280
4	Riau	228	231	234	238	239
5	Jambi	205	207	207	207	208
6	Sumatera Selatan	341	343	345	348	350
7	Bengkulu	179	179	179	179	179
8	Lampung	310	312	315	318	320
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	64	64	64
10	Kepulauan Riau	86	88	93	93	95
11	DKI Jakarta	315	315	315	315	44
12	Jawa Barat	1.072	1.083	1.086	1.100	1.100
13	Jawa Tengah	878	878	880	880	881
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121
15	Jawa Timur	968	968	971	969	972
16	Banten	243	245	245	247	253
17	Bali	120	120	120	120	120
18	Nusa Tenggara Barat	169	174	175	176	176
19	Nusa Tenggara Timur	402	410	421	429	435
20	Kalimantan Barat	246	246	247	248	249
21	Kalimantan Tengah	203	205	205	204	204
22	Kalimantan Selatan	235	236	237	241	242
23	Kalimantan Timur	186	187	188	188	188
24	Kalimantan Utara	55	55	56	57	58
25	Sulawesi Utara	195	195	198	199	199
26	Sulawesi Tengah	206	207	215	218	218
27	Sulawesi Selatan	459	461	469	472	474
28	Sulawesi Tenggara	290	292	293	302	307
29	Gorontalo	93	93	93	93	95
30	Sulawesi Barat	95	96	98	98	98
31	Maluku	209	215	222	228	229
32	Maluku Utara	147	147	147	148	150
33	Papua	420	428	437	454	121
34	Papua Barat	159	161	162	163	76
35	Papua Selatan	-	-	-	-	85
36	Papua Tengah	-	-	-	-	118
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	153
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	95
Indonesia		**10.134**	**10.205**	**10.292**	**10.374**	**10.180**

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2024

Lampiran 4.b

JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI TAHUN 2019 - 2023

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	179	181	180	179	171	180	178	180	183	194
2	Sumatera Utara	184	188	191	194	185	417	420	424	421	434
3	Sumatera Barat	108	111	113	115	109	167	165	166	165	171
4	Riau	102	102	109	116	118	126	129	125	122	121
5	Jambi	81	88	92	96	97	124	119	115	111	111
6	Sumatera Selatan	98	113	114	118	117	243	230	231	230	233
7	Bengkulu	52	52	53	52	52	127	127	126	127	127
8	Lampung	136	140	155	157	162	174	172	160	161	158
9	Kepulauan Bangka Belitung	21	26	26	27	25	43	38	38	37	39
10	Kepulauan Riau	36	35	41	32	30	50	53	52	61	65
11	DKI Jakarta	28	6	6	6	2	287	309	309	309	42
12	Jawa Barat	291	299	299	309	276	781	784	787	791	824
13	Jawa Tengah	368	371	371	377	373	510	507	509	503	508
14	DI Yogyakarta	49	49	49	49	47	72	72	72	72	74
15	Jawa Timur	553	575	588	616	625	415	393	383	353	347
16	Banten	82	81	78	76	70	161	164	167	171	183
17	Bali	42	41	40	41	37	78	79	80	79	83
18	Nusa Tenggara Barat	122	142	143	146	144	47	32	32	30	32
19	Nusa Tenggara Timur	163	164	177	190	175	239	246	244	239	260
20	Kalimantan Barat	125	129	130	131	133	121	117	117	117	116
21	Kalimantan Tengah	88	86	87	88	87	115	119	118	116	117
22	Kalimantan Selatan	50	52	52	51	51	185	184	185	190	191
23	Kalimantan Timur	102	98	99	99	99	84	89	89	89	89
24	Kalimantan Utara	27	22	22	22	20	28	33	34	35	38
25	Sulawesi Utara	94	95	96	99	94	101	100	102	100	105
26	Sulawesi Tengah	102	104	104	110	116	104	103	111	108	102
27	Sulawesi Selatan	301	304	316	316	286	158	157	153	156	188
28	Sulawesi Tenggara	93	91	92	100	100	197	201	201	202	207
29	Gorontalo	32	26	27	27	25	61	67	66	66	70
30	Sulawesi Barat	58	60	61	61	45	37	36	37	37	53
31	Maluku	77	64	65	73	92	132	151	157	155	137
32	Maluku Utara	45	53	53	52	52	102	94	94	96	98
33	Papua	115	126	126	132	43	305	302	311	322	78
34	Papua Barat	44	45	45	45	26	115	116	117	118	50
35	Papua Selatan	-	-	-	-	59	-	-	-	-	26
36	Papua Tengah	-	-	-	-	26	-	-	-	-	92
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	23	-	-	-	-	130
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	18	-	-	-	-	77
Indonesia		**4.048**	**4.119**	**4.200**	**4.302**	**4.210**	**6.086**	**6.086**	**6.092**	**6.072**	**5.970**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 4.c

RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kecamatan	Rasio Puskesmas per Kecamatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	365	290	1,26
2	Sumatera Utara	619	455	1,36
3	Sumatera Barat	280	179	1,56
4	Riau	239	172	1,39
5	Jambi	208	144	1,44
6	Sumatera Selatan	350	241	1,45
7	Bengkulu	179	129	1,39
8	Lampung	320	229	1,40
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	47	1,36
10	Kepulauan Riau	95	80	1,19
11	DKI Jakarta	44	44	1,00
12	Jawa Barat	1.100	627	1,75
13	Jawa Tengah	881	576	1,53
14	DI Yogyakarta	121	78	1,55
15	Jawa Timur	972	666	1,46
16	Banten	253	155	1,63
17	Bali	120	57	2,11
18	Nusa Tenggara Barat	176	117	1,50
19	Nusa Tenggara Timur	435	315	1,38
20	Kalimantan Barat	249	174	1,43
21	Kalimantan Tengah	204	136	1,50
22	Kalimantan Selatan	242	156	1,55
23	Kalimantan Timur	188	105	1,79
24	Kalimantan Utara	58	55	1,05
25	Sulawesi Utara	199	171	1,16
26	Sulawesi Tengah	218	175	1,25
27	Sulawesi Selatan	474	313	1,51
28	Sulawesi Tenggara	307	221	1,39
29	Gorontalo	95	77	1,23
30	Sulawesi Barat	98	69	1,42
31	Maluku	229	118	1,94
32	Maluku Utara	150	118	1,27
33	Papua	121	105	1,15
34	Papua Barat	76	86	0,88
35	Papua Selatan	85	82	1,04
36	Papua Tengah	118	131	0,90
37	Papua Pegunungan	153	252	0,61
38	Papua Barat Daya	95	132	0,72
Indonesia		**10.180**	**7.277**	**1,40**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2024;
Jumlah kecamatan berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017.

Lampiran 4.d

AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	Status Akreditasi Puskesmas				Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
						Dasar	Madya	Utama	Paripurna	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	365	215	21	58,9	0	32	96	87	150
2	Sumatera Utara	616	496	32	80,5	9	63	211	213	120
3	Sumatera Barat	280	279	19	99,6	0	21	98	160	1
4	Riau	238	224	12	94,1	1	38	97	88	14
5	Jambi	208	145	11	69,7	0	19	82	44	63
6	Sumatera Selatan	348	300	17	86,2	0	9	108	183	48
7	Bengkulu	179	130	10	72,6	0	13	74	43	49
8	Lampung	319	301	15	94,4	0	11	154	136	18
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	7	100,0	0	0	9	55	0
10	Kepulauan Riau	94	64	7	68,1	0	3	14	47	30
11	DKI Jakarta	44	43	6	97,7	0	0	0	43	1
12	Jawa Barat	1.100	1.021	27	92,8	0	5	132	884	79
13	Jawa Tengah	880	874	35	99,3	0	3	43	828	6
14	DI Yogyakarta	121	121	5	100,0	0	0	2	119	0
15	Jawa Timur	972	934	38	96,1	0	0	52	882	38
16	Banten	251	245	8	97,6	1	6	58	180	6
17	Bali	120	120	9	100,0	0	0	11	109	0
18	Nusa Tenggara Barat	176	164	10	93,2	0	0	23	141	12
19	Nusa Tenggara Timur	433	261	22	60,3	5	64	87	105	172
20	Kalimantan Barat	249	191	14	76,7	0	15	62	114	58
21	Kalimantan Tengah	204	121	12	59,3	0	14	54	53	83
22	Kalimantan Selatan	241	227	13	94,2	0	12	75	140	14
23	Kalimantan Timur	188	157	10	83,5	0	0	26	131	31
24	Kalimantan Utara	58	35	5	60,3	0	4	8	23	23
25	Sulawesi Utara	199	166	15	83,4	1	35	55	75	33
26	Sulawesi Tengah	218	186	13	85,3	0	17	84	85	32
27	Sulawesi Selatan	474	415	24	87,6	0	2	86	327	59
28	Sulawesi Tenggara	306	165	17	53,9	0	20	79	66	141
29	Gorontalo	95	88	6	92,6	0	0	15	73	7
30	Sulawesi Barat	98	89	6	90,8	0	10	42	37	9
31	Maluku	228	102	10	44,7	3	30	41	28	126
32	Maluku Utara	149	86	9	57,7	0	21	34	31	63
33	Papua	119	71	8	59,7	7	25	26	13	48
34	Papua Barat	76	41	7	53,9	8	15	12	6	35
35	Papua Selatan	79	43	4	54,4	4	16	15	8	36
36	Papua Tengah	117	22	4	18,8	7	5	7	3	95
37	Papua Pegunungan	148	22	5	14,9	8	8	5	1	126
38	Papua Barat Daya	91	22	5	24,2	1	5	13	3	69
Indonesia		**10.145**	**8.250**	**498**	**81,3**	**55**	**541**	**2.090**	**5.564**	**1.895**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 4.e

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR (MINIMAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas	% Memenuhi
		Belum Memenuhi	Memenuhi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	99	263	362	72,7
2	Sumatera Utara	391	225	616	36,5
3	Sumatera Barat	70	209	279	74,9
4	Riau	97	141	238	59,2
5	Jambi	97	110	207	53,1
6	Sumatera Selatan	179	169	348	48,6
7	Bengkulu	109	70	179	39,1
8	Lampung	199	118	317	37,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	19	45	64	70,3
10	Kepulauan Riau	40	53	93	57,0
11	DKI Jakarta		333	333	100,0
12	Jawa Barat	531	570	1.101	51,8
13	Jawa Tengah	158	722	880	82,1
14	DI Yogyakarta	14	107	121	88,4
15	Jawa Timur	300	672	972	69,1
16	Banten	113	133	246	54,1
17	Bali	25	95	120	79,2
18	Nusa Tenggara Barat	28	148	176	84,1
19	Nusa Tenggara Timur	290	137	427	32,1
20	Kalimantan Barat	131	117	248	47,2
21	Kalimantan Tengah	131	73	204	35,8
22	Kalimantan Selatan	27	214	241	88,8
23	Kalimantan Timur	62	126	188	67,0
24	Kalimantan Utara	21	37	58	63,8
25	Sulawesi Utara	136	63	199	31,7
26	Sulawesi Tengah	106	111	217	51,2
27	Sulawesi Selatan	104	370	474	78,1
28	Sulawesi Tenggara	168	138	306	45,1
29	Gorontalo	42	51	93	54,8
30	Sulawesi Barat	37	61	98	62,2
31	Maluku	196	44	240	18,3
32	Maluku Utara	88	60	148	40,5
33	Papua	91	29	120	24,2
34	Papua Barat	63	15	78	19,2
35	Papua Selatan	77	6	83	7,2
36	Papua Tengah	119	12	131	9,2
37	Papua Pegunungan	133	5	138	3,6
38	Papua Barat Daya	78	15	93	16,1
Indonesia		**4.569**	**5.867**	**10.436**	**56,2**

Sumber : SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan:

*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan berdasarkan baseline yang sudah ditentukan, baseline berlaku untuk tahun 2023

**) Perhitungan prosentase adalah jumlah puskesmas yang memenuhi dibanding jumlah puskesmas per provinsi (berdasarkan draft kodefikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2023)

Lampiran 4.f

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas Baseline*)	% Dengan Dokter
		Tidak Ada Dokter	Ada Dokter		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	3	359	362	99,2
2	Sumatera Utara	1	615	616	99,8
3	Sumatera Barat	1	278	279	99,6
4	Riau	1	237	238	99,6
5	Jambi	2	205	207	99,0
6	Sumatera Selatan	5	343	348	98,6
7	Bengkulu	2	177	179	98,9
8	Lampung	1	316	317	99,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	64	64	100,0
10	Kepulauan Riau	0	93	93	100,0
11	DKI Jakarta	0	333	333	100,0
12	Jawa Barat	2	1.099	1.101	99,8
13	Jawa Tengah	0	880	880	100,0
14	DI Yogyakarta	0	121	121	100,0
15	Jawa Timur	4	968	972	99,6
16	Banten	0	246	246	100,0
17	Bali	0	120	120	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	0	176	176	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	30	397	427	93,0
20	Kalimantan Barat	2	246	248	99,2
21	Kalimantan Tengah	9	195	204	95,6
22	Kalimantan Selatan	1	240	241	99,6
23	Kalimantan Timur	2	186	188	98,9
24	Kalimantan Utara	1	57	58	98,3
25	Sulawesi Utara	2	197	199	99,0
26	Sulawesi Tengah	4	213	217	98,2
27	Sulawesi Selatan	7	467	474	98,5
28	Sulawesi Tenggara	14	292	306	95,4
29	Gorontalo	1	92	93	98,9
30	Sulawesi Barat	1	97	98	99,0
31	Maluku	29	211	240	87,9
32	Maluku Utara	7	141	148	95,3
33	Papua	17	103	120	85,8
34	Papua Barat	6	72	78	92,3
35	Papua Selatan	18	65	83	78,3
36	Papua Tengah	57	74	131	56,5
37	Papua Pegunungan	75	63	138	45,7
38	Papua Barat Daya	25	68	93	73,1
Indonesia		**330**	**10.106**	**10.436**	**96,8**

Sumber : SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024
Keterangan:
*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan berdasarkan baseline yang sudah ditentukan, baseline berlaku untuk tahun 2023

Lampiran 4.g

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang memiliki Kegiatan pembinaan kesehatan tradisional*	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kegiatan pembinaan kesehatan tradisional*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	9	39,1
2	Sumatera Utara	33	23	69,7
3	Sumatera Barat	19	18	94,7
4	Riau	12	12	100,0
5	Jambi	11	10	90,9
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	3	50,0
12	Jawa Barat	27	25	92,6
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	5	62,5
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	3	13,6
20	Kalimantan Barat	14	13	92,9
21	Kalimantan Tengah	14	5	35,7
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	7	70,0
24	Kalimantan Utara	5	1	20,0
25	Sulawesi Utara	15	2	13,3
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	15	62,5
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
29	Gorontalo	6	4	66,7
30	Sulawesi Barat	6	1	16,7
31	Maluku	11	4	36,4
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua	9	3	33,3
34	Papua Barat	7	5	71,4
35	Papua Selatan	4	2	50,0
36	Papua Tengah	8	0	0,0
37	Papua Pegunungan	8	1	12,5
38	Papua Barat Daya	6	2	33,3
Indonesia		**514**	**379**	**73,7**

Sumber: Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: *) Kab/kota yg memiliki PKM yg melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional

Lampiran 4.h

JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Klinik Pratama dan Klinik Utama									
		Pemerintah*		TNI		POLRI		Masyarakat		Jumlah	
		Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	33	0	30	0	28	0	250	51	341	51
2	Sumatera Utara	41	0	30	0	36	0	734	47	841	47
3	Sumatera Barat	26	2	16	0	20	0	181	35	243	37
4	Riau	18	0	12	0	14	0	399	37	443	37
5	Jambi	8	0	6	0	13	0	150	14	177	14
6	Sumatera Selatan	37	0	17	0	18	0	426	42	498	42
7	Bengkulu	8	0	4	0	15	0	84	7	111	7
8	Lampung	22	0	13	0	14	0	426	43	475	43
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	0	4	0	8	0	71	22	93	22
10	Kepulauan Riau	14	0	21	0	8	0	240	51	283	51
11	DKI Jakarta	115	20	34	1	21	0	1091	607	1261	628
12	Jawa Barat	63	8	53	1	43	0	2596	430	2755	439
13	Jawa Tengah	47	10	50	0	45	0	1479	304	1621	314
14	DI Yogyakarta	15	2	8	0	6	0	233	67	262	69
15	Jawa Timur	56	1	67	0	45	0	1564	340	1732	341
16	Banten	26	1	5	0	17	0	974	130	1022	131
17	Bali	14	0	6	0	11	0	177	77	208	77
18	Nusa Tenggara Barat	18	0	8	0	13	0	150	38	189	38
19	Nusa Tenggara Timur	9	0	7	0	18	0	109	17	143	17
20	Kalimantan Barat	16	2	13	0	15	0	125	31	169	33
21	Kalimantan Tengah	10	0	4	0	18	0	128	16	160	16
22	Kalimantan Selatan	20	1	19	0	18	0	150	26	207	27
23	Kalimantan Timur	18	0	19	0	10	0	285	44	332	44
24	Kalimantan Utara	7	0	7	0	6	0	27	4	47	4
25	Sulawesi Utara	6	1	9	0	12	0	59	14	86	15
26	Sulawesi Tengah	5	0	8	0	13	0	84	12	110	12
27	Sulawesi Selatan	25	3	41	1	30	0	224	81	320	85
28	Sulawesi Tenggara	7	0	9	0	15	0	49	23	80	23
29	Gorontalo	11	0	4	0	6	0	33	8	54	8
30	Sulawesi Barat	5	0	3	0	7	0	19	2	34	2
31	Maluku	8	2	13	0	8	0	28	3	57	5
32	Maluku Utara	14	0	5	0	8	0	26	5	53	5
33	Papua	5	0	9	0	8	0	27	1	49	1
34	Papua Barat	3	0	4	0	3	0	9	1	19	1
35	Papua Selatan	0	0	3	0	2	0	17	0	22	0
36	Papua Tengah	3	0	8	0	2	0	20	4	33	4
37	Papua Pegunungan	0	0	2	0	1	0	1	1	4	1
38	Papua Barat Daya	1	0	2	0	2	0	25	6	30	6
Indonesia		**744**	**53**	**573**	**3**	**577**	**0**	**12.670**	**2.641**	**14.564**	**2.697**

Sumber: Data Klinik Teregistrasi Desember 2023, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: * : Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Lampiran 4.i

JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Tempat Praktik Mandiri Dokter	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	139	33
2	Sumatera Utara	174	42
3	Sumatera Barat	102	59
4	Riau	765	339
5	Jambi	137	45
6	Sumatera Selatan	373	102
7	Bengkulu	97	15
8	Lampung	246	59
9	Kepulauan Bangka Belitung	70	31
10	Kepulauan Riau	35	19
11	DKI Jakarta	395	241
12	Jawa Barat	799	270
13	Jawa Tengah	1563	553
14	D.I. Yogyakarta	183	81
15	Jawa Timur	1587	1365
16	Banten	112	21
17	Bali	365	261
18	Nusa Tenggara Barat	185	41
19	Nusa Tenggara Timur	83	22
20	Kalimantan Barat	104	28
21	Kalimantan Tengah	54	12
22	Kalimantan Selatan	132	42
23	Kalimantan Timur	82	48
24	Kalimantan Utara	63	18
25	Sulawesi Utara	143	31
26	Sulawesi Tengah	67	26
27	Sulawesi Selatan	178	81
28	Sulawesi Tenggara	43	21
29	Gorontalo	44	8
30	Sulawesi Barat	18	5
31	Maluku	38	9
32	Maluku Utara	43	8
33	Papua	19	4
34	Papua Barat	4	0
35	Papua Selatan	6	0
36	Papua Tengah	7	4
37	Papua Pegunungan	0	0
38	Papua Barat Daya	10	2
Indonesia		**8.465**	**3.946**

Sumber: Data BPJS Kesehatan diolah oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 4.j

JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Kepemilikan/Pengelola								
		Sudah Terakreditasi				Belum Terakreditasi				Jumlah
		Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Swasta	Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Swasta	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	0	1	2	1	0	0	4	4	12
2	Sumatera Utara	0	1	1	5	0	0	4	36	47
3	Sumatera Barat	0	1	6	2	0	0	1	25	35
4	Riau	0	1	4	1	0	0	2	4	12
5	Jambi	0	1	4	1	0	0	2	4	12
6	Sumatera Selatan	1	0	8	2	0	0	1	13	25
7	Bengkulu	0	1	2	0	0	0	3	16	22
8	Lampung	0	1	1	3	0	0	2	9	16
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	3	0	0	0	1	4	9
10	Kepulauan Riau	0	0	0	1	0	0	1	12	14
11	DKI Jakarta	1	0	0	23	0	1	0	145	170
12	Jawa Barat	0	1	20	41	0	0	7	221	290
13	Jawa Tengah	0	1	28	19	0	0	7	125	180
14	DI Yogyakarta	0	1	2	3	0	0	3	18	27
15	Jawa Timur	1	0	19	23	0	0	12	163	218
16	Banten	0	1	7	11	0	0	1	11	31
17	Bali	0	1	3	4	0	0	2	29	39
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	1	1	0	0	4	13	20
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	2	1	0	0	7	50	61
20	Kalimantan Barat	0	1	4	2	0	0	2	16	25
21	Kalimantan Tengah	0	1	3	2	0	0	5	17	28
22	Kalimantan Selatan	0	1	2	2	0	0	2	39	46
23	Kalimantan Timur	0	1	2	8	0	0	4	19	34
24	Kalimantan Utara	0	0	2	0	0	0	1	3	6
25	Sulawesi Utara	0	1	0	1	0	0	2	9	13
26	Sulawesi Tengah	0	1	0	1	0	0	0	1	3
27	Sulawesi Selatan	0	0	5	4	1	1	11	15	37
28	Sulawesi Tenggara	0	1	1	1	0	0	7	4	14
29	Gorontalo	0	1	1	1	0	0	2	3	8
30	Sulawesi Barat	0	0	1	0	0	1	0	1	3
31	Maluku	0	1	1	0	0	0	1	3	6
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	2	7	9
33	Papua	0	1	0	0	0	0	0	12	13
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	2	2
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**3**	**25**	**135**	**164**	**1**	**3**	**103**	**1.053**	**1.487**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 4.k

JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah UTD		
		Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	14	5	19
2	Sumatera Utara	20	13	33
3	Sumatera Barat	11	4	15
4	Riau	7	5	12
5	Jambi	3	1	4
6	Sumatera Selatan	11	6	17
7	Bengkulu	5	4	9
8	Lampung	6	8	14
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	3	8
10	Kepulauan Riau	2	2	4
11	DKI Jakarta	5	2	7
12	Jawa Barat	4	26	30
13	Jawa Tengah	2	35	37
14	DI Yogyakarta	1	5	6
15	Jawa Timur	3	38	41
16	Banten	0	6	6
17	Bali	1	10	11
18	Nusa Tenggara Barat	8	3	11
19	Nusa Tenggara Timur	2	6	8
20	Kalimantan Barat	6	3	9
21	Kalimantan Tengah	9	2	11
22	Kalimantan Selatan	8	5	13
23	Kalimantan Timur	4	3	7
24	Kalimantan Utara	1	2	3
25	Sulawesi Utara	2	5	7
26	Sulawesi Tengah	7	6	13
27	Sulawesi Selatan	18	5	23
28	Sulawesi Tenggara	4	0	4
29	Gorontalo	3	3	6
30	Sulawesi Barat	3	1	4
31	Maluku	6	0	6
32	Maluku Utara	5	1	6
33	Papua	0	0	0
34	Papua Barat	1	0	1
35	Papua Selatan	1	0	1
36	Papua Tengah	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0
38	Papua Barat Daya	2	0	2
Indonesia		**190**	**218**	**408**

Sumber: Data UTD Teregistrasi Desember 2023, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 8.a

JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola													
		Kemenkes		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		TNI/POLRI		BUMN/Kementerian Lain		Swasta		Jumlah	
		RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Aceh	0	0	1	2	25	0	5	0	4	0	34	6	69	8
2	Sumatera Utara	1	0	2	3	41	0	9	0	9	1	124	22	186	26
3	Sumatera Barat	1	1	3	2	24	0	4	0	2	1	18	26	52	30
4	Riau	0	0	2	1	16	0	4	0	3	0	40	13	65	14
5	Jambi	0	0	1	1	17	0	2	0	0	0	19	2	39	3
6	Sumatera Selatan	2	0	1	3	30	0	4	0	3	0	29	13	69	16
7	Bengkulu	0	0	1	1	12	1	2	0	0	0	8	1	23	3
8	Lampung	0	0	2	1	16	0	2	0	0	0	42	18	62	19
9	Kepulauan Bangka	0	0	1	1	11	0	1	0	0	0	10	3	23	4
10	Kepulauan Riau	0	0	1	1	12	0	3	0	1	0	16	4	33	5
11	DKI Jakarta	3	7	30	1	0	0	9	2	8	1	90	45	140	56
12	Jawa Barat	1	4	4	2	57	1	15	0	4	1	274	51	355	59
13	Jawa Tengah	3	3	4	3	60	1	12	0	4	1	216	38	299	46
14	DI Yogyakarta	1	0	0	2	10	0	3	0	1	1	47	15	62	18
15	Jawa Timur	0	1	10	4	72	0	24	1	4	2	230	75	340	83
16	Banten	1	0	2	0	13	0	3	0	3	0	81	25	103	25
17	Bali	1	0	1	2	15	0	3	0	1	0	42	10	63	12
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	3	2	16	0	2	0	0	0	17	5	38	7
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	1	1	27	0	4	0	1	0	22	2	56	3
20	Kalimantan Barat	0	0	1	1	22	1	5	0	1	0	19	6	48	8
21	Kalimantan Tengah	0	0	2	1	19	0	2	0	0	0	7	2	30	3
22	Kalimantan Selatan	0	0	2	2	16	0	4	0	2	0	19	7	43	9
23	Kalimantan Timur	0	0	3	2	18	1	4	0	1	0	21	8	47	11
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	11	0	2	0	1	0	1	0	16	0
25	Sulawesi Utara	2	0	3	3	19	1	4	0	0	1	21	3	49	8
26	Sulawesi Tengah	0	0	2	0	24	0	3	0	1	0	6	4	36	4
27	Sulawesi Selatan	2	1	4	4	39	1	6	1	2	2	44	19	97	28
28	Sulawesi Tenggara	0	0	1	2	17	0	2	0	1	0	18	2	39	4
29	Gorontalo	0	0	1	0	12	0	2	0	0	0	4	1	19	1
30	Sulawesi Barat	0	0	1	0	8	0	1	0	0	0	3	2	13	2
31	Maluku	1	0	2	1	16	0	3	0	0	0	7	0	29	1
32	Maluku Utara	0	0	2	1	13	0	2	0	0	0	4	1	21	2
33	Papua	0	0	2	1	9	0	5	0	0	0	2	0	18	1
34	Papua Barat	0	0	1	0	7	0	3	0	0	0	1	0	12	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	1	0	8	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	4	0	13	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	9	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	6	0	2	0	1	0	3	0	12	0
Indonesia		**20**	**17**	**98**	**51**	**751**	**7**	**163**	**4**	**59**	**11**	**1.545**	**429**	**2.636**	**519**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024 per 2 Januari 2024

Lampiran 8.b

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Kelas A			Kelas B			Kelas C			Kelas D (Kelas D dan Kelas D Pratama)			Belum Ditetapkan Kelas		
		RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT
		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2	2,6%	1.222	12	15,6%	3.041	33	42,9%	4.321	30	39,0%	1.632	0	0,0%	0
2	Sumatera Utara	2	0,9%	1.150	27	12,7%	6.477	123	58,0%	13.548	59	27,8%	3.147	1	0,5%	0
3	Sumatera Barat	3	3,7%	1.168	7	8,5%	1.047	50	61,0%	4.604	18	22,0%	1.140	4	4,9%	18
4	Riau	2	2,5%	744	6	7,6%	1.691	43	54,4%	5.183	28	35,4%	1.634	0	0,0%	0
5	Jambi	0	0,0%	0	4	9,5%	985	24	57,1%	3.134	13	31,0%	763	1	2,4%	0
6	Sumatera Selatan	2	2,4%	1.091	7	8,2%	1.748	51	60,0%	5.620	25	29,4%	1.646	0	0,0%	0
7	Bengkulu	0	0,0%	0	2	7,7%	461	16	61,5%	1.720	8	30,8%	452	0	0,0%	0
8	Lampung	1	1,2%	573	5	6,2%	1.329	54	66,7%	5.784	21	25,9%	1.380	0	0,0%	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0,0%	0	2	7,4%	342	16	59,3%	1.745	9	33,3%	388	0	0,0%	0
10	Kepulauan Riau	0	0,0%	0	8	21,1%	1.661	20	52,6%	2.155	10	26,3%	389	0	0,0%	0
11	DKI Jakarta	18	9,2%	6.630	61	31,1%	12.140	90	45,9%	7.133	26	13,3%	1.519	1	0,5%	100
12	Jawa Barat	9	2,2%	2.836	78	18,8%	20.036	249	60,1%	29.087	78	18,8%	4.933	0	0,0%	0
13	Jawa Tengah	10	2,9%	4.234	35	10,1%	10.850	171	49,6%	22.171	127	36,8%	9.423	2	0,6%	115
14	DI Yogyakarta	2	2,5%	1.063	14	17,5%	2.967	28	35,0%	2.045	36	45,0%	1.979	0	0,0%	0
15	Jawa Timur	6	1,4%	4.171	62	14,7%	15.889	211	49,9%	22.215	142	33,6%	9.729	2	0,5%	155
16	Banten	0	0,0%	0	21	16,4%	5.237	88	68,8%	8.616	18	14,1%	1.051	1	0,8%	202
17	Bali	3	4,0%	1.191	12	16,0%	2.394	46	61,3%	4.885	14	18,7%	726	0	0,0%	0
18	Nusa Tenggara Barat	1	2,2%	746	4	8,9%	998	23	51,1%	2.874	17	37,8%	1.074	0	0,0%	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0,0%	0	3	5,1%	749	31	52,5%	3.897	25	42,4%	1.528	0	0,0%	0
20	Kalimantan Barat	1	1,8%	304	3	5,4%	1.205	32	57,1%	3.855	20	35,7%	921	0	0,0%	0
21	Kalimantan Tengah	0	0,0%	0	4	12,1%	982	18	54,5%	2.194	10	30,3%	346	1	3,0%	75
22	Kalimantan Selatan	2	3,8%	1.100	6	11,5%	1.027	28	53,8%	3.597	16	30,8%	822	0	0,0%	0
23	Kalimantan Timur	3	5,2%	1.432	5	8,6%	1.171	29	50,0%	3.057	21	36,2%	1.206	0	0,0%	0
24	Kalimantan Utara	0	0,0%	0	1	6,3%	328	5	31,3%	896	10	62,5%	284	0	0,0%	0
25	Sulawesi Utara	1	1,8%	817	5	8,8%	1.059	34	59,6%	4.156	17	29,8%	1.189	0	0,0%	0
26	Sulawesi Tengah	0	0,0%	0	4	10,0%	1.281	23	57,5%	3.117	13	32,5%	625	0	0,0%	0
27	Sulawesi Selatan	2	1,6%	1.196	27	21,6%	5.691	69	55,2%	7.780	27	21,6%	1.455	0	0,0%	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0,0%	0	3	7,0%	683	19	44,2%	2.196	19	44,2%	993	2	4,7%	58
29	Gorontalo	0	0,0%	0	2	10,0%	612	8	40,0%	994	10	50,0%	657	0	0,0%	0
30	Sulawesi Barat	0	0,0%	0	0	0,0%	0	9	60,0%	1.261	6	40,0%	343	0	0,0%	0
31	Maluku	0	0,0%	0	4	13,3%	856	9	30,0%	1.251	17	56,7%	965	0	0,0%	0
32	Maluku Utara	0	0,0%	0	1	4,3%	140	7	30,4%	796	15	65,2%	716	0	0,0%	0
33	Papua	0	0,0%	0	2	10,5%	388	10	52,6%	1.458	7	36,8%	342	0	0,0%	0
34	Papua Barat	0	0,0%	0	0	0,0%	0	6	50,0%	660	5	41,7%	290	1	8,3%	22
35	Papua Selatan	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2	25,0%	337	6	75,0%	399	0	0,0%	0
36	Papua Tengah	0	0,0%	0	0	0,0%	0	4	30,8%	825	8	61,5%	258	1	7,7%	0
37	Papua Pegunungan	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1	11,1%	216	7	77,8%	300	1	11,1%	0
38	Papua Barat Daya	0	0,0%	0	0	0,0%	0	3	25,0%	451	8	66,7%	430	1	8,3%	32
	Indonesia	**70**	**2,2**	**31.668**	**437**	**13,9**	**105.465**	**1.683**	**53,3**	**189.834**	**946**	**30,0**	**57.074**	**19**	**0,6**	**777**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023 per 2 Januari 2024

Lampiran 8.c

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022 - 2023

No	Provinsi	2022				2023			
		Estimasi Jumlah Penduduk 2022	Total			Estimasi Jumlah Penduduk 2023	Total		
			RS	TT			RS	TT	
				Jumlah	Rasio			Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.529.773	73	10.236	1,9	5.482.527	77	10216	1,9
2	Sumatera Utara	15.107.226	211	24.732	1,6	15.386.640	212	24322	1,6
3	Sumatera Barat	5.675.357	81	8.100	1,4	5.757.205	82	7977	1,4
4	Riau	7.181.300	76	9.081	1,3	6.642.874	79	9252	1,4
5	Jambi	3.677.678	40	4.892	1,3	3.679.169	42	4882	1,3
6	Sumatera Selatan	8.803.213	85	10.344	1,2	8.743.522	85	10105	1,2
7	Bengkulu	2.038.146	25	2.641	1,3	2.086.006	26	2633	1,3
8	Lampung	8.683.167	82	9.065	1,0	9.313.986	81	9066	1,0
9	Kep. Bangka Belitung	1.506.505	27	2.745	1,8	1.511.899	27	2475	1,6
10	Kepulauan Riau	2.449.422	35	4.313	1,8	2.152.625	38	4205	2,0
11	DKI Jakarta	10.711.809	195	27.502	2,6	10.672.100	196	27522	2,6
12	Jawa Barat	50.639.156	399	56.232	1,1	49.860.330	414	56892	1,1
13	Jawa Tengah	35.090.378	334	45.941	1,3	37.540.962	345	46793	1,2
14	DI Yogyakarta	4.021.816	80	7.946	2,0	3.736.489	80	8054	2,2
15	Jawa Timur	40.348.441	410	51.391	1,3	41.527.934	423	52159	1,3
16	Banten	13.251.533	126	14.775	1,1	12.307.732	128	15106	1,2
17	Bali	4.518.680	74	9.240	2,0	4.404.262	75	9196	2,1
18	Nusa Tenggara Barat	5.370.302	42	5.639	1,1	5.560.287	45	5692	1,0
19	Nusa Tenggara Timur	5.662.948	57	5.862	1,0	5.569.068	59	6174	1,1
20	Kalimantan Barat	5.220.211	53	6.411	1,2	5.623.328	56	6285	1,1
21	Kalimantan Tengah	2.757.697	31	4.030	1,5	2.773.747	33	3597	1,3
22	Kalimantan Selatan	4.370.444	53	6.536	1,5	4.222.333	52	6546	1,6
23	Kalimantan Timur	3.752.605	59	6.782	1,8	3.909.741	58	6866	1,8
24	Kalimantan Utara	734.112	13	1.333	1,8	730.010	16	1508	2,1
25	Sulawesi Utara	2.548.338	55	7.281	2,9	2.681.535	57	7221	2,7
26	Sulawesi Tengah	3.159.749	39	5.192	1,6	3.086.750	40	5023	1,6
27	Sulawesi Selatan	9.022.276	118	16.596	1,8	9.362.290	125	16122	1,7
28	Sulawesi Tenggara	2.782.882	39	3.882	1,4	2.749.014	43	3930	1,4
29	Gorontalo	1.205.341	19	2.148	1,8	1.213.182	20	2263	1,9
30	Sulawesi Barat	1.415.130	14	1.467	1,0	1.481.077	15	1604	1,1
31	Maluku	1.823.518	30	3.077	1,7	1.920.462	30	3072	1,6
32	Maluku Utara	1.285.374	22	1.811	1,4	1.337.148	23	1652	1,2
33	Papua	3.482.891	50	5.048	1,4	1.047.098	19	2188	2,1
34	Papua Barat	1.031.676	25	1.976	1,9	569.570	12	972	1,7
35	Papua Selatan	-	-	-	-	534.416	8	736	1,4
36	Papua Tengah	-	-	-	-	1.452.806	13	1083	0,7
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	1.448.372	9	516	0,4
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	617.697	12	913	1,5
Indonesia		**274.859.094**	**3.072,0**	**384.247**	**1,4**	**278.696.193**	**3.155,0**	**384.818**	**1,4**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023 per 2 Januari 2024

Ket : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS
2. Estimasi Jumlah Penduduk 2023: Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2023 (BPS diolah Pusdatin)
3. Rasio tempat tidur per 1.000 penduduk

Lampiran 8.e

AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Rumah Sakit Swasta Terakreditasi	Total Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	77	35	35	70	90,9
2	Sumatera Utara	212	57	130	187	88,2
3	Sumatera Barat	82	35	40	75	91,5
4	Riau	79	25	51	76	96,2
5	Jambi	42	18	18	36	85,7
6	Sumatera Selatan	85	36	38	74	87,1
7	Bengkulu	26	16	8	24	92,3
8	Lampung	81	20	58	78	96,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	27	12	13	25	92,6
10	Kepulauan Riau	37	14	20	34	91,9
11	DKI Jakarta	196	61	126	187	95,4
12	Jawa Barat	415	85	308	393	94,7
13	Jawa Tengah	345	89	242	331	95,9
14	DI Yogyakarta	80	18	61	79	98,8
15	Jawa Timur	423	112	291	403	95,3
16	Banten	128	19	99	118	92,2
17	Bali	75	23	50	73	97,3
18	Nusa Tenggara Barat	45	20	21	41	91,1
19	Nusa Tenggara Timur	59	28	24	52	88,1
20	Kalimantan Barat	56	26	20	46	82,1
21	Kalimantan Tengah	33	19	9	28	84,8
22	Kalimantan Selatan	52	25	25	50	96,2
23	Kalimantan Timur	58	23	27	50	86,2
24	Kalimantan Utara	16	10	1	11	68,8
25	Sulawesi Utara	57	27	23	50	87,7
26	Sulawesi Tengah	40	23	10	33	82,5
27	Sulawesi Selatan	125	52	56	108	86,4
28	Sulawesi Tenggara	43	22	11	33	76,7
29	Gorontalo	20	12	5	17	85,0
30	Sulawesi Barat	15	9	5	14	93,3
31	Maluku	30	21	6	27	90,0
32	Maluku Utara	23	14	4	18	78,3
33	Papua	49	28	6	34	69,4
34	Papua Barat	24	13	4	17	70,8
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Indonesia		**3.155**	**1.047**	**1.845**	**2.892**	**91,7**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 8.f

PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C
YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C *)	Jumlah RS yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	24	24	100,0
2	Sumatera Utara	37	29	78,4
3	Sumatera Barat	21	16	76,2
4	Riau	16	13	81,3
5	Jambi	16	13	81,3
6	Sumatera Selatan	28	23	82,1
7	Bengkulu	11	11	100,0
8	Lampung	17	15	88,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	9	8	88,9
10	Kepulauan Riau	10	5	50,0
11	DKI Jakarta	0	0	0,0
12	Jawa Barat	53	50	94,3
13	Jawa Tengah	59	56	94,9
14	DI Yogyakarta	10	9	90,0
15	Jawa Timur	71	64	90,1
16	Banten	13	11	84,6
17	Bali	14	13	92,9
18	Nusa Tenggara Barat	15	12	80,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	14	63,6
20	Kalimantan Barat	20	12	60,0
21	Kalimantan Tengah	14	13	92,9
22	Kalimantan Selatan	17	14	82,4
23	Kalimantan Timur	15	10	66,7
24	Kalimantan Utara	5	4	80,0
25	Sulawesi Utara	17	12	70,6
26	Sulawesi Tengah	20	11	55,0
27	Sulawesi Selatan	31	27	87,1
28	Sulawesi Tenggara	17	10	58,8
29	Gorontalo	9	8	88,9
30	Sulawesi Barat	7	5	71,4
31	Maluku	13	4	30,8
32	Maluku Utara	10	6	60,0
33	Papua	6	2	33,3
34	Papua Barat	6	5	83,3
35	Papua Selatan	4	1	25,0
36	Papua Tengah	6	3	50,0
37	Papua Pegunungan	5	1	20,0
38	Papua Barat Daya	5	2	40,0
Indonesia		**673**	**536**	**79,6**

Sumber : SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Jumlah Rumah Sakit yang dipakai untuk perhitungan berdasarkan baseline yang sudah ditentukan, baseline berlaku untuk tahun 2023

Lampiran 8.g

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota	Target Kabupaten Kota	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			Jumlah Puskesmas yang Meningkatkan Aktivitas Fisik		
				Capaian	Persentase (Target)	Persentase	Jumlah Puskesmas	Capaian	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	23	17	16	92,9	69,6	365	90	24,7
2	Sumatera Utara	33	25	27	109,2	81,8	616	468	76,0
3	Sumatera Barat	19	14	12	84,3	63,2	280	198	70,7
4	Riau	12	9	10	111,3	83,3	238	181	76,1
5	Jambi	11	8	4	48,5	36,4	208	98	47,1
6	Sumatera Selatan	17	13	11	86,4	64,7	348	297	85,3
7	Bengkulu	10	7	10	133,5	100,0	179	179	100,0
8	Lampung	15	11	7	62,3	46,7	319	127	39,8
9	Kep. Bangka Belitung	7	5	7	133,5	100,0	64	55	85,9
10	Kepulauan Riau	7	5	7	133,5	100,0	94	93	98,9
11	DKI Jakarta	6	4	6	133,5	100,0	44	240	545,5
12	Jawa Barat	27	20	26	128,6	96,3	1.100	994	90,4
13	Jawa Tengah	35	26	35	133,5	100,0	880	860	97,7
14	DI Yogyakarta	5	4	5	133,5	100,0	121	121	100,0
15	Jawa Timur	38	28	38	133,5	100,0	972	921	94,8
16	Banten	8	6	8	133,5	100,0	251	217	86,5
17	Bali	9	7	9	133,5	100,0	120	120	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	10	133,5	100,0	176	170	96,6
19	Nusa Tenggara Timur	22	16	14	85,0	63,6	433	240	55,4
20	Kalimantan Barat	14	10	4	38,1	28,6	249	195	78,3
21	Kalimantan Tengah	14	10	4	38,1	28,6	204	125	61,3
22	Kalimantan Selatan	13	10	13	133,5	100,0	241	202	83,8
23	Kalimantan Timur	10	7	7	93,5	70,0	188	141	75,0
24	Kalimantan Utara	5	4	2	53,4	40,0	58	40	69,0
25	Sulawesi Utara	15	11	15	133,5	100,0	199	199	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	10	8	82,2	61,5	218	100	45,9
27	Sulawesi Selatan	24	18	23	127,9	95,8	474	440	92,8
28	Sulawesi Tenggara	17	13	14	110,0	82,4	306	236	77,1
29	Gorontalo	6	4	6	133,5	100,0	95	74	77,9
30	Sulawesi Barat	6	4	6	133,5	100,0	98	78	79,6
31	Maluku	11	8	6	72,8	54,5	228	114	50,0
32	Maluku Utara	10	7	4	53,4	40,0	149	58	38,9
33	Papua	9	7	7	103,8	77,8	119	43	36,1
34	Papua Barat	7	5	2	38,1	28,6	76	14	18,4
35	Papua Selatan	4	3	2	66,8	50,0	79	18	22,8
36	Papua Tengah	8	6	2	33,4	25,0	117	34	29,1
37	Papua Pegunungan	8	6	0	0,0	0,0	148	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	4	2	44,5	33,3	91	10	11,0
Indonesia		**514**	**385**	**389**	**101,0**	**75,7**	**10.145**	**7.790**	**76,8**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: Laporan Provinsi s/d 15 Januari 2024

Lampiran 8.h

JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Pelaksanaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja						Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Jumlah Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji	Jumlah Kelompok Olah Raga
		Puskesmas	Perusahaan	POS UKK	GP2SP	K3 Perkantoran	RS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	220	0	136	0	0	0	3	132	23
2	Sumatera Utara	616	6	314	0	3	3			33
3	Sumatera Barat	186	14	123	30	63	3			19
4	Riau	106	11	238	11		67	500	5	12
5	Jambi	57	837	310	38	90	42	138	706	577
6	Sumatera Selatan	97	33	737	15	0	0	126	5474	294
7	Bengkulu	179	273	824	0	0	0		862	10
8	Lampung	318	58	483	58	0	0	1	7050	1.467
9	Kep. Bangka Belitung	64	29	156	9	23	8	9	1	7
10	Kepulauan Riau	95	20	155	19	0	0	3		7
11	DKI Jakarta	210	90	146	88	0	0			6
12	Jawa Barat	1096	10440	1421	918	0	0			27
13	Jawa Tengah	761	657	1328	316	1007	242	2165	26778	9.941
14	DI Yogyakarta	121	96	290	17	0	0			5
15	Jawa Timur	972	6469	1770	75	2251	426			38
16	Banten	251	234	307	46	104	16			8
17	Bali	120	143	142	52	0	0	126	598	1.443
18	Nusa Tenggara Barat	173	88	721	57	237	42	20	5	10
19	Nusa Tenggara Timur	167	68	420	65	422	3			22
20	Kalimantan Barat	249	191	154	8	0	0	108	1214	148
21	Kalimantan Tengah	61	64	57	23	75	0			14
22	Kalimantan Selatan	241	15	265	0	2	19			13
23	Kalimantan Timur	188	82	149	5	8	46	199	412	10
24	Kalimantan Utara	57	58	42	2	79	14	7	414	5
25	Sulawesi Utara	199	18	40	0	1	56		718	15
26	Sulawesi Tengah	218	62	430	56	0	0	585	2	13
27	Sulawesi Selatan	438	1214	1390	248	216	60		7	24
28	Sulawesi Tenggara	274	80	136	0	0	0			17
29	Gorontalo	52	17	50	17	55	19			6
30	Sulawesi Barat	69	31	180	0	0	0			6
31	Maluku	79	0	0	0	0	0			11
32	Maluku Utara	69	5	35	0	9	0			10
33	Papua	35	0	28	0	0	0	43	40	18
34	Papua Barat	15	102	22	0	0	0			7
35	Papua Selatan	80	6	2	0	0	8			4
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0			8
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0			8
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0			6
	Indonesia	**8.133**	**21.511**	**13.001**	**2.173**	**4.645**	**1.074**	**4.033**	**44.418**	**14.292**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024
Keterangan: Data SITKO Januari 2024

Lampiran 8.i

JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN REKAM MEDIS ELEKTERONIK (RME) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Sepenuhnya RME	Sebagian RME	Belum RME
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	14	30	29
2	Sumatera Utara	27	18	166
3	Sumatera Barat	11	42	29
4	Riau	20	31	28
5	Jambi	11	11	20
6	Sumatera Selatan	27	29	29
7	Bengkulu	1	12	13
8	Lampung	9	45	27
9	Kep. Bangka Belitung	12	4	11
10	Kepulauan Riau	7	6	24
11	DKI Jakarta	107	69	20
12	Jawa Barat	171	216	27
13	Jawa Tengah	94	138	111
14	DI Yogyakarta	35	19	26
15	Jawa Timur	90	206	124
16	Banten	48	36	42
17	Bali	24	30	21
18	Nusa Tenggara Barat	2	21	22
19	Nusa Tenggara Timur	0	25	34
20	Kalimantan Barat	7	7	42
21	Kalimantan Tengah	5	13	15
22	Kalimantan Selatan	4	26	22
23	Kalimantan Timur	3	34	21
24	Kalimantan Utara	1	2	13
25	Sulawesi Utara	8	14	34
26	Sulawesi Tengah	7	9	24
27	Sulawesi Selatan	12	72	37
28	Sulawesi Tenggara	5	7	31
29	Gorontalo	4	13	3
30	Sulawesi Barat	0	4	11
31	Maluku	0	3	27
32	Maluku Utara	0	10	13
33	Papua	0	7	12
34	Papua Barat	1	6	5
35	Papua Selatan	0	1	7
36	Papua Tengah	0	2	11
37	Papua Pegunungan	0	1	8
38	Papua Barat Daya	1	6	6
Indonesia		**768**	**1.225**	**1.145**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Ket: 1. Sepenuhnya RME adalah melaksanakan RME di 6 pelayanan (Pendaftaran, Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Unit Penunjang, Farmasi)

2. Sebagian RME adalah RME digunakan minimal pada 3 pelayanan dari total 6 pelayanan

Lampiran 9.a

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial**	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	337	316	93,8
2	Sumatera Utara	603	568	94,2
3	Sumatera Barat	270	256	94,8
4	Riau	226	206	91,2
5	Jambi	207	199	96,1
6	Sumatera Selatan	288	261	90,6
7	Bengkulu	179	178	99,4
8	Lampung	290	245	84,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100,0
10	Kepulauan Riau	81	74	91,4
11	DKI Jakarta	315	313	99,4
12	Jawa Barat	929	894	96,2
13	Jawa Tengah	820	801	97,7
14	D.I. Yogyakarta	121	121	100,0
15	Jawa Timur	968	958	99,0
16	Banten	244	236	96,7
17	Bali	120	119	99,2
18	Nusa Tenggara Barat	175	173	98,9
19	Nusa Tenggara Timur	415	369	88,9
20	Kalimantan Barat	228	221	96,9
21	Kalimantan Tengah	205	193	94,1
22	Kalimantan Selatan	239	237	99,2
23	Kalimantan Timur	188	188	100,0
24	Kalimantan Utara	58	58	100,0
25	Sulawesi Utara	198	175	88,4
26	Sulawesi Tengah	217	204	94,0
27	Sulawesi Selatan	466	418	89,7
28	Sulawesi Tenggara	279	240	86,0
29	Gorontalo	93	93	100,0
30	Sulawesi Barat	82	74	90,2
31	Maluku	144	121	84,0
32	Maluku Utara	139	128	92,1
33	Papua	105	99	94,3
34	Papua Barat	68	64	94,1
35	Papua Selatan	65	59	90,8
36	Papua Tengah	92	69	75,0
37	Papua Pegunungan	99	98	99,0
38	Papua Barat Daya	86	63	73,3
Indonesia		**9.703**	**9.153**	**94,3**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: *) Jumlah Puskesmas sesuai perencanaan awal tahun Farmalkes

**) isi dengan jumlah Puskesmas yang memiliki obat esensial ≥80%

Lampiran 9.b

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melapor	Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial*	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	23	21	15	71,4
2	Sumatera Utara	33	30	24	80,0
3	Sumatera Barat	19	18	16	88,9
4	Riau	12	10	7	70,0
5	Jambi	11	11	9	81,8
6	Sumatera Selatan	17	9	7	77,8
7	Bengkulu	10	9	7	77,8
8	Lampung	15	11	9	81,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	5	71,4
11	DKI Jakarta	6	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	22	81,5
13	Jawa Tengah	35	28	20	71,4
14	D.I. Yogyakarta	5	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	38	100,0
16	Banten	8	8	6	75,0
17	Bali	9	9	8	88,9
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	9	90,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	18	81,8
20	Kalimantan Barat	14	12	9	75,0
21	Kalimantan Tengah	14	14	14	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	12	92,3
23	Kalimantan Timur	10	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	13	10	76,9
26	Sulawesi Tengah	13	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	20	17	85,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	14	82,4
29	Gorontalo	6	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	4	4	100,0
31	Maluku	11	9	5	55,6
32	Maluku Utara	10	10	9	90,0
33	Papua	9	5	4	80,0
34	Papua Barat	7	7	5	71,4
35	Papua Selatan	4	3	3	100,0
36	Papua Tengah	8	5	5	100,0
37	Papua Pegunungan	8	7	4	57,1
38	Papua Barat Daya	6	6	4	66,7
Indonesia		**514**	**465**	**391**	**84,1**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: *) isi dengan jumlah kabupaten/kota yang memiliki obat esensial ≥85%

Lampiran 9.c

PERSENTASE KAB/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah Kab/kota yang Melapor	Kab/kota dengan Ketersediaan Vaksin IDL	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	23	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	33	31	93,9
3	Sumatera Barat	19	19	19	100,0
4	Riau	12	12	12	100,0
5	Jambi	11	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	9	90,0
8	Lampung	15	15	11	73,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	2	33,3
12	Jawa Barat	27	27	26	96,3
13	Jawa Tengah	35	35	35	100,0
14	D.I. Yogyakarta	5	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	38	100,0
16	Banten	8	8	8	100,0
17	Bali	9	9	8	88,9
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	21	95,5
20	Kalimantan Barat	14	14	11	78,6
21	Kalimantan Tengah	14	14	13	92,9
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	9	90,0
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	17	100,0
29	Gorontalo	6	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	6	100,0
31	Maluku	11	11	11	100,0
32	Maluku Utara	10	10	10	100,0
33	Papua	9	9	9	100,0
34	Papua Barat	7	7	5	71,4
35	Papua Selatan	4	4	4	100,0
36	Papua Tengah	8	8	8	100,0
37	Papua Pegunungan	8	8	8	100,0
38	Papua Barat Daya	6	6	5	83,3
Indonesia		**514**	**514**	**492**	**95,7**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 9.d

JUMLAH SARANA PRODUKSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	5	0
2	Sumatera Utara	104	71
3	Sumatera Barat	9	12
4	Riau	3	0
5	Jambi	3	1
6	Sumatera Selatan	3	0
7	Bengkulu	0	0
8	Lampung	8	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	1
10	Kepulauan Riau	1	3
11	DKI Jakarta	182	187
12	Jawa Barat	419	396
13	Jawa Tengah	193	134
14	D.I. Yogyakarta	31	10
15	Jawa Timur	185	147
16	Banten	75	1
17	Bali	18	17
18	Nusa Tenggara Barat	3	11
19	Nusa Tenggara Timur	4	3
20	Kalimantan Barat	5	0
21	Kalimantan Tengah	0	3
22	Kalimantan Selatan	5	2
23	Kalimantan Timur	3	0
24	Kalimantan Utara	1	1
25	Sulawesi Utara	4	4
26	Sulawesi Tengah	0	0
27	Sulawesi Selatan	23	12
28	Sulawesi Tenggara	1	1
29	Gorontalo	1	3
30	Sulawesi Barat	0	0
31	Maluku	14	15
32	Maluku Utara	0	0
33	Papua	0	0
34	Papua Barat	0	0
35	Papua Selatan	0	0
36	Papua Tengah	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0
Indonesia		**1.306**	**1.037**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 9.e

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Apotek	Toko Obat	Distributor Alat Kesehatan (DAK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	30	510	490	34
2	Sumatera Utara	101	1608	1537	106
3	Sumatera Barat	47	603	273	64
4	Riau	58	812	525	34
5	Jambi	38	507	173	23
6	Sumatera Selatan	57	621	176	79
7	Bengkulu	19	281	107	19
8	Lampung	57	753	84	53
9	Kepulauan Bangka Belitung	19	304	77	11
10	Kepulauan Riau	38	301	155	64
11	DKI Jakarta	461	1950	397	1153
12	Jawa Barat	474	5110	1184	417
13	Jawa Tengah	304	4031	375	225
14	D.I. Yogyakarta	57	559	40	68
15	Jawa Timur	349	4524	469	336
16	Banten	165	1289	277	248
17	Bali	71	860	77	112
18	Nusa Tenggara Barat	26	712	98	25
19	Nusa Tenggara Timur	40	427	64	38
20	Kalimantan Barat	40	438	336	41
21	Kalimantan Tengah	11	387	219	9
22	Kalimantan Selatan	47	517	314	48
23	Kalimantan Timur	56	791	157	68
24	Kalimantan Utara	4	87	28	3
25	Sulawesi Utara	51	331	96	35
26	Sulawesi Tengah	33	503	216	25
27	Sulawesi Selatan	115	1333	273	127
28	Sulawesi Tenggara	54	655	108	21
29	Gorontalo	15	221	25	4
30	Sulawesi Barat	2	145	49	1
31	Maluku	13	179	85	18
32	Maluku Utara	5	139	20	7
33	Papua	38	178	33	74
34	Papua Barat	10	92	8	4
35	Papua Selatan	7	36	5	0
36	Papua Tengah	7	88	1	0
37	Papua Pegunungan	1	41	0	0
38	Papua Barat Daya	10	72	8	0
Indonesia		**2.930**	**31.995**	**8.559**	**3.594**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 10

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF DAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

NO	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	% Kab/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif*		% Kab/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif*	
			Capaian	Persentase	Capaian	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	23	19	82,6	19	82,6
2	Sumatera Utara	33	27	81,8	27	81,8
3	Sumatera Barat	19	17	89,5	17	89,5
4	Riau	12	12	100,0	12	100,0
5	Jambi	11	11	100,0	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	16	94,1	16	94,1
7	Bengkulu	10	10	100,0	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0	15	100,0
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	100,0	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	100,0	35	100,0
14	D.I. Yogyakarata	5	5	100,0	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0	38	100,0
16	Banten	8	6	75,0	6	75,0
17	Bali	9	9	100,0	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	9	40,9	9	40,9
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,0	14	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	7	70,0	7	70,0
24	Kalimantan Utara	5	4	80,0	4	80,0
25	Sulawesi Utara	15	9	60,0	9	60,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	21	87,5	21	87,5
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,0	17	100,0
29	Gorontalo	6	5	83,3	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	3	50,0	3	50,0
31	Maluku	11	9	81,8	9	81,8
32	Maluku Utara	10	10	100,0	10	100,0
33	Papua	9	0	-	1	11,1
34	Papua Barat	7	1	14,3	-	-
35	Papua Selatan	4	0	-	-	-
36	Papua Tengah	8	0	-	1	12,5
37	Papua Pegunungan	8	1	12,5	-	-
38	Papua Barat Daya	6	0	-	-	-
Indonesia		**514**	**427**	**83,1**	**427**	**83,1**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.a

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	512	483	995	963	2.128	3.091	1.475	2.611	4.086	9	20	29	114	485	599	123	505	628
2	Sumatera Utara	1.291	883	2.174	2.342	4.032	6.374	3.633	4.915	8.548	35	70	105	279	1.077	1.356	314	1.147	1.461
3	Sumatera Barat	531	541	1.072	680	1.858	2.538	1.211	2.399	3.610	11	25	36	95	572	667	106	597	703
4	Riau	645	432	1.077	998	2.208	3.206	1.643	2.640	4.283	15	33	48	121	559	680	136	592	728
5	Jambi	238	188	426	402	945	1.347	640	1.133	1.773	9	13	22	55	230	285	64	243	307
6	Sumatera Selatan	590	561	1.151	1.015	2.028	3.043	1.605	2.589	4.194	16	29	45	100	430	530	116	459	575
7	Bengkulu	128	101	229	239	498	737	367	599	966	3	7	10	35	139	174	38	146	184
8	Lampung	496	304	800	734	1.588	2.322	1.230	1.892	3.122	9	16	25	51	246	297	60	262	322
9	Kep. Bangka Belitung	147	101	248	262	456	718	409	557	966	8	16	24	41	90	131	49	106	155
10	Kepulauan Riau	312	185	497	460	904	1.364	772	1.089	1.861	16	15	31	73	224	297	89	239	328
11	DKI Jakarta	3.902	3.476	7.378	3.533	7.311	10.844	7.435	10.787	18.222	259	595	854	755	2.893	3.648	1.014	3.488	4.502
12	Jawa Barat	4.173	3.265	7.438	5.970	9.656	15.626	10.143	12.921	23.064	208	410	618	639	2.770	3.409	847	3.180	4.027
13	Jawa Tengah	2.916	1.992	4.908	3.847	6.551	10.398	6.763	8.543	15.306	99	168	267	568	2.002	2.570	667	2.170	2.837
14	DI Yogyakarta	716	674	1.390	729	1.497	2.226	1.445	2.171	3.616	74	164	238	163	632	795	237	796	1.033
15	Jawa Timur	3.538	2.552	6.090	4.946	7.608	12.554	8.484	10.160	18.644	197	379	576	855	2.972	3.827	1.052	3.351	4.403
16	Banten	1.551	1.314	2.865	1.750	3.228	4.978	3.301	4.542	7.843	57	176	233	170	1.004	1.174	227	1.180	1.407
17	Bali	988	600	1.588	1.993	2.227	4.220	2.981	2.827	5.808	30	35	65	253	600	853	283	635	918
18	Nusa Tenggara Barat	282	224	506	515	931	1.446	797	1.155	1.952	5	20	25	55	214	269	60	234	294
19	Nusa Tenggara Timur	231	209	440	480	882	1.362	711	1.091	1.802	3	8	11	60	185	245	63	193	256
20	Kalimantan Barat	300	187	487	570	741	1.311	870	928	1.798	17	13	30	77	195	272	94	208	302
21	Kalimantan Tengah	199	160	359	381	587	968	580	747	1.327	9	14	23	50	148	198	59	162	221
22	Kalimantan Selatan	396	265	661	473	867	1.340	869	1.132	2.001	18	26	44	147	309	456	165	335	500
23	Kalimantan Timur	479	374	853	706	1.251	1.957	1.185	1.625	2.810	21	46	67	112	352	464	133	398	531
24	Kalimantan Utara	92	60	152	189	247	436	281	307	588	8	6	14	30	59	89	38	65	103
25	Sulawesi Utara	322	296	618	886	1.307	2.193	1.208	1.603	2.811	7	8	15	72	195	267	79	203	282
26	Sulawesi Tengah	155	172	327	383	696	1.079	538	868	1.406	2	11	13	53	168	221	55	179	234
27	Sulawesi Selatan	762	918	1.680	1.239	2.548	3.787	2.001	3.466	5.467	37	90	127	215	949	1.164	252	1.039	1.291
28	Sulawesi Tenggara	163	142	305	322	682	1.004	485	824	1.309	9	17	26	49	223	272	58	240	298
29	Gorontalo	94	85	179	143	272	415	237	357	594	2	2	4	19	61	80	21	63	84
30	Sulawesi Barat	53	73	126	98	239	337	151	312	463	3	10	13	22	89	111	25	99	124
31	Maluku	92	97	189	229	530	759	321	627	948	3	6	9	29	90	119	32	96	128
32	Maluku Utara	91	68	159	194	315	509	285	383	668	5	4	9	32	60	92	37	64	101
33	Papua	102	97	199	171	351	522	273	448	721	1	7	8	24	46	70	25	53	78
34	Papua Barat	44	34	78	123	184	307	167	218	385	0	1	1	16	30	46	16	31	47
35	Papua Selatan	28	21	49	78	151	229	106	172	278	0	4	4	9	17	26	9	21	30
36	Papua Tengah	43	37	80	110	176	286	153	213	366	0	2	2	11	33	44	11	35	46
37	Papua Pegunungan	18	14	32	80	97	177	98	111	209	0	0	0	6	20	26	6	20	26
38	Papua Barat Daya	46	33	79	90	163	253	136	196	332	1	2	3	14	36	50	15	38	53
Indonesia		**26.666**	**21.218**	**47.884**	**38.323**	**67.940**	**106.263**	**64.989**	**89.158**	**154.147**	**1.206**	**2.468**	**3.674**	**5.469**	**20.404**	**25.873**	**6.675**	**22.872**	**29.547**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.b

JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	0	0	0	276	924	1.200	276	924	1.200	0	0	0	65	347	412	65	347	412
2	Sumatera Utara	3	4	7	587	1.481	2.068	590	1.485	2.075	1	1	2	95	583	678	96	584	680
3	Sumatera Barat	2	3	5	161	642	803	163	645	808	0	0	0	42	331	373	42	331	373
4	Riau	2	1	3	248	805	1.053	250	806	1.056	0	0	0	51	315	366	51	315	366
5	Jambi	0	0	0	143	401	544	143	401	544	0	0	0	32	149	181	32	149	181
6	Sumatera Selatan	1	2	3	203	609	812	204	611	815	0	0	0	47	191	238	47	191	238
7	Bengkulu	0	0	0	99	227	326	99	227	326	0	0	0	17	85	102	17	85	102
8	Lampung	0	1	1	254	684	938	254	685	939	0	0	0	22	153	175	22	153	175
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	84	155	239	84	155	239	0	0	0	24	52	76	24	52	76
10	Kepulauan Riau	2	0	2	131	317	448	133	317	450	0	0	0	26	89	115	26	89	115
11	DKI Jakarta	0	0	0	383	1.308	1.691	383	1.308	1.691	0	0	0	74	376	450	74	376	450
12	Jawa Barat	0	1	1	911	2.025	2.936	911	2.026	2.937	0	0	0	164	846	1.010	164	846	1.010
13	Jawa Tengah	0	0	0	934	1.960	2.894	934	1.960	2.894	0	0	0	173	838	1.011	173	838	1.011
14	DI Yogyakarta	1	0	1	115	413	528	116	413	529	0	1	1	20	176	196	20	177	197
15	Jawa Timur	0	0	0	896	1.947	2.843	896	1.947	2.843	0	2	2	205	1.019	1.224	205	1.021	1.226
16	Banten	0	0	0	222	602	824	222	602	824	0	0	0	50	315	365	50	315	365
17	Bali	0	0	0	273	333	606	273	333	606	0	0	0	78	211	289	78	211	289
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	196	384	580	196	384	580	0	0	0	37	136	173	37	136	173
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	1	203	412	615	203	413	616	0	0	0	42	124	166	42	124	166
20	Kalimantan Barat	0	0	0	218	307	525	218	307	525	0	0	0	37	107	144	37	107	144
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	148	254	402	148	254	402	0	0	0	28	90	118	28	90	118
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	147	374	521	147	374	521	0	0	0	66	189	255	66	189	255
23	Kalimantan Timur	0	0	0	165	347	512	165	347	512	0	0	0	47	178	225	47	178	225
24	Kalimantan Utara	0	0	0	58	98	156	58	98	156	0	0	0	16	35	51	16	35	51
25	Sulawesi Utara	0	1	1	159	477	636	159	478	637	0	0	0	33	105	138	33	105	138
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	151	323	474	151	323	474	0	0	0	30	120	150	30	120	150
27	Sulawesi Selatan	1	2	3	220	790	1.010	221	792	1.013	0	0	0	86	515	601	86	515	601
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	141	397	538	141	397	538	0	0	0	26	157	183	26	157	183
29	Gorontalo	0	0	0	41	107	148	41	107	148	0	0	0	10	50	60	10	50	60
30	Sulawesi Barat	0	0	0	52	141	193	52	141	193	0	0	0	14	68	82	14	68	82
31	Maluku	0	0	0	88	251	339	88	251	339	0	0	0	11	54	65	11	54	65
32	Maluku Utara	0	0	0	86	162	248	86	162	248	0	0	0	25	43	68	25	43	68
33	Papua	0	0	0	41	136	177	41	136	177	0	0	0	8	27	35	8	27	35
34	Papua Barat	0	0	0	54	81	135	54	81	135	0	0	0	6	17	23	6	17	23
35	Papua Selatan	0	0	0	28	81	109	28	81	109	0	0	0	3	12	15	3	12	15
36	Papua Tengah	0	0	0	46	93	139	46	93	139	0	0	0	2	20	22	2	20	22
37	Papua Pegunungan	0	0	0	47	47	94	47	47	94	0	0	0	3	14	17	3	14	17
38	Papua Barat Daya	0	0	0	35	84	119	35	84	119	0	0	0	4	21	25	4	21	25
Indonesia		**12**	**16**	**28**	**8.244**	**20.179**	**28.423**	**8.256**	**20.195**	**28.451**	**1**	**4**	**5**	**1.719**	**8.158**	**9.877**	**1.720**	**8.162**	**9.882**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.c

JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Aceh	536	501	1.037	596	992	1.588	1.132	1.493	2.625	9	20	29	40	115	155	49	135	184
2	Sumatera Utara	1.344	918	2.262	1.381	1.913	3.294	2.725	2.831	5.556	28	72	100	92	295	387	120	367	487
3	Sumatera Barat	537	544	1.081	416	953	1.369	953	1.497	2.450	11	26	37	34	147	181	45	173	218
4	Riau	646	431	1.077	502	872	1.374	1.148	1.303	2.451	15	32	47	47	138	185	62	170	232
5	Jambi	237	193	430	190	376	566	427	569	996	9	13	22	17	56	73	26	69	95
6	Sumatera Selatan	605	570	1.175	635	1.078	1.713	1.240	1.648	2.888	19	32	51	27	152	179	46	184	230
7	Bengkulu	133	106	239	97	208	305	230	314	544	3	7	10	12	40	52	15	47	62
8	Lampung	496	303	799	346	596	942	842	899	1.741	9	15	24	25	64	89	34	79	113
9	Kep. Bangka Belitung	143	100	243	115	197	312	258	297	555	8	16	24	8	16	24	16	32	48
10	Kepulauan Riau	308	186	494	212	334	546	520	520	1.040	11	16	27	15	47	62	26	63	89
11	DKI Jakarta	3.790	3.356	7.146	1.632	2.946	4.578	5.422	6.302	11.724	229	501	730	244	894	1.138	473	1.395	1.868
12	Jawa Barat	4.206	3.258	7.464	3.054	4.305	7.359	7.260	7.563	14.823	205	386	591	245	758	1.003	450	1.144	1.594
13	Jawa Tengah	2.908	1.967	4.875	1.822	2.592	4.414	4.730	4.559	9.289	94	160	254	218	626	844	312	786	1.098
14	DI Yogyakarta	706	656	1.362	376	597	973	1.082	1.253	2.335	69	134	203	82	188	270	151	322	473
15	Jawa Timur	3.453	2.501	5.954	2.604	3.370	5.974	6.057	5.871	11.928	190	366	556	303	902	1.205	493	1.268	1.761
16	Banten	1.539	1.300	2.839	875	1.516	2.391	2.414	2.816	5.230	50	151	201	49	232	281	99	383	482
17	Bali	1.023	638	1.661	1.285	1.384	2.669	2.308	2.022	4.330	32	34	66	67	177	244	99	211	310
18	Nusa Tenggara Barat	276	227	503	271	450	721	547	677	1.224	5	20	25	12	55	67	17	75	92
19	Nusa Tenggara Timur	233	208	441	242	401	643	475	609	1.084	3	7	10	14	53	67	17	60	77
20	Kalimantan Barat	307	185	492	264	336	600	571	521	1.092	17	15	32	27	52	79	44	67	111
21	Kalimantan Tengah	200	155	355	150	247	397	350	402	752	9	12	21	14	37	51	23	49	72
22	Kalimantan Selatan	390	263	653	244	346	590	634	609	1.243	20	27	47	48	77	125	68	104	172
23	Kalimantan Timur	470	366	836	308	580	888	778	946	1.724	22	46	68	27	78	105	49	124	173
24	Kalimantan Utara	88	60	148	92	129	221	180	189	369	8	6	14	5	20	25	13	26	39
25	Sulawesi Utara	333	312	645	668	760	1.428	1.001	1.072	2.073	7	8	15	37	97	134	44	105	149
26	Sulawesi Tengah	158	172	330	184	324	508	342	496	838	2	10	12	16	45	61	18	55	73
27	Sulawesi Selatan	789	944	1.733	879	1.477	2.356	1.668	2.421	4.089	42	100	142	102	316	418	144	416	560
28	Sulawesi Tenggara	162	144	306	179	245	424	341	389	730	10	16	26	19	55	74	29	71	100
29	Gorontalo	94	86	180	89	139	228	183	225	408	3	2	5	7	13	20	10	15	25
30	Sulawesi Barat	58	78	136	32	86	118	90	164	254	3	10	13	7	14	21	10	24	34
31	Maluku	94	98	192	98	245	343	192	343	535	2	6	8	9	23	32	11	29	40
32	Maluku Utara	88	70	158	74	130	204	162	200	362	5	3	8	5	17	22	10	20	30
33	Papua	104	96	200	106	189	295	210	285	495	1	7	8	13	17	30	14	24	38
34	Papua Barat	46	34	80	53	98	151	99	132	231	0	1	1	8	11	19	8	12	20
35	Papua Selatan	29	23	52	39	59	98	68	82	150	0	4	4	6	4	10	6	8	14
36	Papua Tengah	44	34	78	46	59	105	90	93	183	0	2	2	5	9	14	5	11	16
37	Papua Pegunungan	18	14	32	28	52	80	46	66	112	0	0	0	3	8	11	3	8	11
38	Papua Barat Daya	45	33	78	40	71	111	85	104	189	1	1	2	9	11	20	10	12	22
Indonesia		**26.636**	**21.130**	**47.766**	**20.224**	**30.652**	**50.876**	**46.860**	**51.782**	**98.642**	**1.151**	**2.284**	**3.435**	**1.918**	**5.859**	**7.777**	**3.069**	**8.143**	**11.212**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.d

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	143	102	93	79	32	78	41	15	5	449	29	1.066
2	Sumatera Utara	298	275	260	161	63	130	109	48	7	911	100	2.362
3	Sumatera Barat	118	117	106	71	27	67	54	25	4	492	37	1.118
4	Riau	128	132	107	86	41	63	37	21	4	458	47	1.124
5	Jambi	56	56	41	32	17	32	22	9	0	165	22	452
6	Sumatera Selatan	146	156	117	80	41	58	37	36	5	499	51	1.226
7	Bengkulu	30	32	25	28	11	16	15	4	0	78	10	249
8	Lampung	93	114	81	66	40	52	37	14	4	298	24	823
9	Kep. Bangka Belitung	29	31	27	17	13	13	15	6	1	91	24	267
10	Kepulauan Riau	54	55	57	45	21	44	22	11	1	184	27	521
11	DKI Jakarta	709	666	702	297	293	478	204	113	30	3.654	730	7.876
12	Jawa Barat	808	838	810	483	343	543	265	104	40	3.230	591	8.055
13	Jawa Tengah	595	511	483	350	230	375	176	65	25	2.065	254	5.129
14	DI Yogyakarta	137	97	103	79	59	77	50	18	2	740	203	1.565
15	Jawa Timur	646	600	545	380	272	405	217	108	25	2.756	556	6.510
16	Banten	306	347	306	155	125	198	95	32	13	1.262	201	3.040
17	Bali	161	177	148	124	51	110	39	33	4	814	66	1.727
18	Nusa Tenggara Barat	56	57	50	35	24	32	27	12	1	209	25	528
19	Nusa Tenggara Timur	74	63	53	49	25	33	23	8	2	111	10	451
20	Kalimantan Barat	62	59	51	48	25	37	19	6	2	183	32	524
21	Kalimantan Tengah	44	40	38	32	18	29	23	8	2	121	21	376
22	Kalimantan Selatan	75	71	56	39	28	49	29	9	1	296	47	700
23	Kalimantan Timur	87	93	89	51	33	72	32	17	3	359	68	904
24	Kalimantan Utara	17	18	19	14	7	10	7	2	1	53	14	162
25	Sulawesi Utara	98	69	69	50	24	43	16	6	2	268	15	660
26	Sulawesi Tengah	47	43	38	31	22	22	13	5	1	108	12	342
27	Sulawesi Selatan	191	172	144	125	97	103	81	38	4	778	142	1.875
28	Sulawesi Tenggara	39	35	32	23	17	26	17	2	0	115	26	332
29	Gorontalo	25	19	17	13	10	12	8	4	1	71	5	185
30	Sulawesi Barat	14	13	14	12	8	13	9	1	0	52	13	149
31	Maluku	23	21	19	21	10	15	15	6	0	62	8	200
32	Maluku Utara	23	18	21	19	7	12	7	1	0	50	8	166
33	Papua	24	22	17	26	9	14	9	1	0	78	8	208
34	Papua Barat	13	14	11	11	5	7	4	1	0	14	1	81
35	Papua Selatan	7	6	6	8	2	4	5	1	0	13	4	56
36	Papua Tengah	11	10	13	9	4	7	6	1	0	17	2	80
37	Papua Pegunungan	3	5	3	4	3	4	2	0	1	7	0	32
38	Papua Barat Daya	12	13	10	9	4	5	3	2	0	20	2	80
Indonesia		**5.402**	**5.167**	**4.781**	**3.162**	**2.061**	**3.288**	**1.790**	**793**	**191**	**21.131**	**3.435**	**51.201**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.e

KECUKUPAN DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan		
		Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	16,2%	4,7%	79,2%	64,7%	12,9%	22,5%	0,6%	2,2%	97,3%	0,0%	0,0%	100,0%
2	Sumatera Utara	20,3%	3,1%	76,6%	50,7%	25,7%	23,7%	6,3%	15,1%	78,6%	0,3%	1,3%	98,4%
3	Sumatera Barat	27,9%	5,0%	67,1%	61,4%	7,1%	31,4%	5,4%	13,9%	80,7%	0,4%	0,0%	99,6%
4	Riau	10,5%	3,8%	85,8%	44,4%	13,4%	42,3%	2,9%	4,2%	92,9%	0,8%	0,4%	98,7%
5	Jambi	29,3%	6,7%	63,9%	67,3%	23,6%	9,1%	4,3%	3,4%	92,3%	0,0%	0,0%	100,0%
6	Sumatera Selatan	30,3%	11,1%	58,6%	54,0%	39,1%	6,9%	1,7%	3,4%	94,9%	0,0%	0,3%	99,7%
7	Bengkulu	42,5%	10,6%	46,9%	53,6%	44,1%	2,2%	4,5%	5,0%	90,5%	0,0%	0,0%	100,0%
8	Lampung	23,4%	4,7%	71,9%	35,6%	56,3%	8,1%	5,0%	4,1%	90,9%	0,0%	0,6%	99,4%
9	Kep. Bangka Belitung	14,1%	3,1%	82,8%	76,6%	7,8%	15,6%	3,1%	3,1%	93,8%	0,0%	1,6%	98,4%
10	Kepulauan Riau	17,7%	5,2%	77,1%	52,1%	16,7%	31,3%	4,2%	3,1%	92,7%	3,1%	1,0%	95,8%
11	DKI Jakarta	0,0%	0,0%	100,0%	2,3%	0,0%	97,7%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
12	Jawa Barat	22,8%	1,9%	75,3%	62,2%	24,5%	13,4%	10,0%	19,6%	70,5%	5,9%	3,5%	90,6%
13	Jawa Tengah	16,6%	1,3%	82,2%	76,2%	7,4%	16,5%	6,5%	4,5%	89,0%	0,3%	0,5%	99,2%
14	DI Yogyakarta	8,3%	0,8%	90,9%	52,9%	0,0%	47,1%	18,2%	14,9%	66,9%	9,9%	9,9%	80,2%
15	Jawa Timur	34,4%	7,5%	58,1%	68,6%	6,1%	25,3%	3,4%	1,5%	95,1%	0,5%	0,3%	99,2%
16	Banten	11,5%	2,8%	85,8%	44,3%	14,6%	41,1%	10,3%	7,9%	81,8%	0,8%	1,2%	98,0%
17	Bali	4,2%	0,0%	95,8%	32,5%	0,8%	66,7%	2,5%	0,0%	97,5%	0,0%	0,0%	100,0%
18	Nusa Tenggara Barat	22,7%	9,1%	68,2%	72,7%	15,3%	11,9%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
19	Nusa Tenggara Timur	48,2%	30,7%	21,2%	32,3%	64,3%	3,5%	0,2%	0,5%	99,3%	0,0%	0,5%	99,5%
20	Kalimantan Barat	40,2%	19,3%	40,6%	51,8%	46,2%	2,0%	3,2%	6,0%	90,8%	2,8%	2,0%	95,2%
21	Kalimantan Tengah	35,3%	26,5%	38,2%	45,6%	48,0%	6,4%	1,5%	0,5%	98,0%	0,0%	0,5%	99,5%
22	Kalimantan Selatan	36,5%	6,6%	56,9%	79,3%	7,5%	13,3%	5,4%	6,6%	88,0%	1,7%	0,8%	97,5%
23	Kalimantan Timur	26,6%	15,4%	58,0%	52,1%	18,6%	29,3%	4,8%	11,2%	84,0%	4,3%	7,5%	88,3%
24	Kalimantan Utara	36,2%	15,5%	48,3%	67,2%	22,4%	10,3%	1,7%	3,5%	94,8%	3,5%	3,5%	93,1%
25	Sulawesi Utara	22,1%	11,6%	66,3%	46,2%	44,2%	9,6%	4,0%	6,0%	90,0%	9,1%	20,1%	70,9%
26	Sulawesi Tengah	39,9%	20,2%	39,9%	55,1%	38,1%	6,9%	0,5%	3,7%	95,9%	0,0%	0,0%	100,0%
27	Sulawesi Selatan	41,7%	16,4%	41,9%	61,9%	7,6%	30,5%	1,9%	1,1%	97,1%	0,4%	0,4%	99,2%
28	Sulawesi Tenggara	54,3%	12,4%	33,3%	45,8%	47,4%	6,9%	0,3%	1,3%	98,4%	0,0%	0,7%	99,4%
29	Gorontalo	57,0%	11,8%	31,2%	61,3%	36,6%	2,2%	1,1%	1,1%	97,9%	0,0%	0,0%	100,0%
30	Sulawesi Barat	44,9%	18,4%	36,7%	62,2%	27,6%	10,2%	2,0%	2,0%	95,9%	0,0%	0,0%	100,0%
31	Maluku	45,0%	28,5%	26,5%	25,6%	73,1%	1,2%	3,7%	7,9%	88,4%	8,7%	13,6%	77,7%
32	Maluku Utara	56,7%	13,3%	30,0%	42,0%	56,7%	1,3%	4,0%	4,7%	91,3%	0,7%	0,0%	99,3%
33	Papua	40,5%	29,8%	29,8%	28,9%	71,1%	0,0%	3,3%	0,0%	96,7%	8,3%	14,1%	77,7%
34	Papua Barat	43,6%	25,6%	30,8%	26,9%	71,8%	1,3%	1,3%	6,4%	92,3%	6,4%	6,4%	87,2%
35	Papua Selatan	26,2%	56,0%	17,9%	14,3%	83,3%	2,4%	9,5%	15,5%	75,0%	7,1%	27,4%	65,5%
36	Papua Tengah	25,4%	53,9%	20,8%	10,0%	86,9%	3,1%	3,1%	23,1%	73,9%	5,4%	46,9%	47,7%
37	Papua Pegunungan	30,1%	62,8%	7,2%	8,5%	90,2%	1,3%	11,8%	45,1%	43,1%	7,2%	72,6%	20,3%
38	Papua Barat Daya	45,4%	32,0%	22,7%	26,8%	73,2%	0,0%	2,1%	11,3%	86,6%	5,2%	19,6%	75,3%
Indonesia		**29,4%**	**11,5%**	**59,1%**	**54,2%**	**28,9%**	**16,9%**	**4,6%**	**7,3%**	**88,1%**	**2,0%**	**4,1%**	**94,0%**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.f

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL*
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kesehatan																Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan
			Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi Spesialis	Dokter Gigi	Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Sumatera Utara	4	29	165	1	27	0	1.995	2.220	224	278	54	121	28	142	152	0	5.436	734	6.170
2	Sumatera Barat	1	7	39	0	11	0	374	266	46	64	12	27	4	15	24	0	889	460	1.349
3	Sumatera Selatan	1	16	42	0	16	1	327	458	80	49	19	26	5	32	43	0	1.114	221	1.335
4	Lampung	1	7	30	0	1	0	219	412	38	23	30	29	0	22	34	0	845	205	1.050
5	Nusa Tenggara Barat	1	17	78	1	9	0	442	241	114	46	16	55	1	63	78	0	1.161	439	1.600
6	Nusa Tenggara Timur	13	134	599	3	105	3	7.483	5.694	1.016	1.145	624	872	53	716	814	0	19.261	4.036	23.297
7	Sulawesi Tengah	3	48	170	2	33	6	1.657	1.472	325	601	198	163	14	61	148	0	4.898	821	5.719
8	Maluku	6	37	236	3	35	2	3.437	1.839	306	633	348	388	11	38	255	0	7.568	1.048	8.616
9	Maluku Utara	2	9	49	1	8	0	647	538	87	229	47	66	2	20	65	0	1.768	158	1.926
10	Papua	4	12	82	1	12	0	929	391	102	114	54	84	3	24	133	0	1.941	450	2.391
11	Papua Barat	4	28	113	0	13	0	956	549	124	147	51	82	5	27	120	0	2.215	611	2.826
12	Papua Selatan	3	21	97	1	8	1	977	654	138	148	47	79	4	27	106	0	2.308	414	2.722
13	Papua Tengah	7	36	129	0	21	2	1.934	745	173	256	69	73	9	29	172	0	3.648	1.029	4.677
14	Papua Pegunungan	8	33	178	0	24	1	1.552	664	214	291	84	87	6	23	140	63	3.360	968	4.328
15	Papua Barat Daya	4	40	118	2	18	1	1.313	768	161	247	88	155	5	23	110	0	3.049	760	3.809
Indonesia		**62**	**474**	**2.125**	**15**	**341**	**17**	**24.242**	**16.911**	**3.148**	**4.271**	**1.741**	**2.307**	**150**	**1.262**	**2.394**	**63**	**59.461**	**12.354**	**71.815**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024
*berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020

Lampiran 11.g

JUMLAH DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2023

No	Provinsi	Dokter	Dokter Spesialis Anak	Dokter Spesialis Bedah	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Dokter Spesialis Lainnya	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	4.144	104	102	100	177	613	855	52	6.147
2	Sumatera Utara	10.532	320	198	321	389	1.576	2.458	195	15.989
3	Sumatera Barat	3.918	110	97	127	144	699	1.178	49	6.322
4	Riau	5.296	111	99	134	115	576	1.032	62	7.425
5	Jambi	2.221	36	40	49	59	243	355	21	3.024
6	Sumatera Selatan	4.401	141	113	200	194	593	731	51	6.424
7	Bengkulu	1.088	18	19	28	25	103	201	8	1.490
8	Lampung	3.179	72	57	103	80	435	355	29	4.310
9	Kepulauan Bangka Belitung	664	23	21	28	20	115	153	22	1.046
10	Kepulauan Riau	1.382	47	37	50	41	205	367	28	2.157
11	DKI Jakarta	17.012	782	441	989	838	5.162	4.900	1.139	31.263
12	Jawa Barat	23.048	740	444	640	659	3.810	5.879	835	36.055
13	Jawa Tengah	14.236	473	357	473	584	2.713	3.134	312	22.282
14	DI Yogyakarta	4.066	183	147	142	223	1.095	1.228	353	7.437
15	Jawa Timur	17.590	624	428	618	694	4.107	5.912	985	30.958
16	Banten	8.232	283	152	250	217	1.336	2.493	291	13.254
17	Bali	5.172	216	179	237	252	1.162	1.439	86	8.743
18	Nusa Tenggara Barat	1.878	40	33	50	47	264	294	26	2.632
19	Nusa Tenggara Timur	1.270	41	34	40	38	150	224	13	1.810
20	Kalimantan Barat	1.743	42	42	52	53	228	290	29	2.479
21	Kalimantan Tengah	1.154	30	26	26	33	174	228	20	1.691
22	Kalimantan Selatan	1.864	53	42	70	80	348	692	44	3.193
23	Kalimantan Timur	2.422	86	68	88	81	474	664	75	3.958
24	Kalimantan Utara	374	13	9	11	12	62	86	15	582
25	Sulawesi Utara	2.692	95	75	91	142	380	404	16	3.895
26	Sulawesi Tengah	1.340	27	23	28	35	160	188	18	1.819
27	Sulawesi Selatan	6.034	177	196	215	263	1.322	1.963	249	10.419
28	Sulawesi Tenggara	1.249	26	16	28	33	133	269	18	1.772
29	Gorontalo	373	13	10	15	25	79	77	6	598
30	Sulawesi Barat	228	11	11	8	14	40	105	14	431
31	Maluku	745	16	18	15	18	83	99	13	1.007
32	Maluku Utara	389	14	15	9	11	46	59	7	550
33	Papua	939	21	24	19	20	85	82	8	1.198
34	Papua Barat	213	6	5	8	6	22	33	1	294
35	Papua Selatan	172	6	4	5	4	24	28	3	246
36	Papua Tengah	264	6	4	8	4	24	31	2	343
37	Papua Pegunungan	54	1	3	3	1	4	13	0	79
38	Papua Barat Daya	248	10	3	14	9	26	43	4	357
Indonesia		**151.826**	**5.017**	**3.592**	**5.292**	**5.640**	**28.671**	**38.542**	**5.099**	**243.679**

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2024

Lampiran 11.h

JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021- 2023

No	Provinsi	Jumlah Residen		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	3	8	0
2	Sumatera Utara	32	15	1
3	Sumatera Barat	4	2	0
4	Riau	9	4	0
5	Jambi	5	4	0
6	Sumatera Selatan	0	3	1
7	Bengkulu	0	0	0
8	Lampung	3	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	0	0
10	Kepulauan Riau	4	4	2
11	DKI Jakarta	0	0	0
12	Jawa Barat	2	2	0
13	Jawa Tengah	6	0	0
14	DI Yogyakarta	1	0	0
15	Jawa Timur	4	3	0
16	Banten	0	2	0
17	Bali	10	3	0
18	Nusa Tenggara Barat	1	3	0
19	Nusa Tenggara Timur	5	3	0
20	Kalimantan Barat	7	0	0
21	Kalimantan Tengah	4	1	0
22	Kalimantan Selatan	2	3	0
23	Kalimantan Timur	4	13	2
24	Kalimantan Utara	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	0	0
26	Sulawesi Tengah	10	7	3
27	Sulawesi Selatan	5	1	0
28	Sulawesi Tenggara	9	7	3
29	Gorontalo	0	0	1
30	Sulawesi Barat	3	4	1
31	Maluku	0	3	2
32	Maluku Utara	8	6	4
33	Papua	6	5	2
34	Papua Barat	5	0	1
35	Papua Selatan	NA	NA	0
36	Papua Tengah	NA	NA	0
37	Papua Pegunungan	NA	NA	0
38	Papua Barat Daya	NA	NA	0
Indonesia		**157**	**106**	**23**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.i

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM BATCH XXIV-XXVI PADA PERIODE I-III TAHUN 2023

No	Provinsi	Batch XXIV (Periode I Tahun 2023)		Batch XXV (Periode II Tahun 2023)		Batch XXVI (Periode III Tahun 2023)	
		Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	2	2	0	0	2	2
2	Sumatera Utara	2	2	1	2	8	10
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	1	1
4	Riau	0	0	0	0	1	1
5	Jambi	0	0	0	0	3	3
6	Lampung	0	0	0	0	2	2
7	Nusa Tenggara Timur	3	3	0	0	0	0
8	Kalimantan Barat	0	0	0	0	2	2
9	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	2	2
10	Kalimantan Utara	1	2	0	0	0	0
11	Sulawesi Utara	1	1	0	0	1	1
12	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	1	1
13	Sulawesi Tenggara	3	4	0	0	2	2
14	Maluku	2	2	1	1	2	3
15	Maluku Utara	2	2	0	0	1	1
16	Papua	1	1	2	6	0	0
17	Papua Barat	2	3	0	0	0	0
18	Papua Selatan	0	0	1	1	1	1
19	Papua Tengah	0	0	0	0	1	3
20	Papua Barat Daya	1	2	1	1	2	3
Indonesia		**20**	**24**	**6**	**11**	**32**	**38**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.j

JUMLAH PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM BATCH XXIV SAMPAI DENGAN BATCH XXVI/ PERIODE I SAMPAI DENGAN III MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Gizi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Masyarakat	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	0	4	0	0	4	2	4	0	2	16
2	Sumatera Barat	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
3	Sumatera Utara	2	10	0	0	9	5	11	5	12	54
4	Riau	0	1	0	0	0	1	1	0	1	4
5	Jambi	1	0	0	0	1	1	1	2	3	9
6	Lampung	0	0	0	0	1	1	2	2	1	7
7	Nusa Tenggara Timur	2	3	0	0	1	3	3	3	1	16
8	Kalimantan Barat	0	0	0	0	2	2	2	1	0	7
9	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	1	0	1	2	2	6
10	Kalimantan Utara	0	2	0	0	2	1	2	2	1	10
11	Sulawesi Utara	1	0	0	0	1	1	2	1	2	8
12	Sulawesi Selatan	1	1	0	0	1	1	1	0	0	5
13	Sulawesi Tenggara	4	6	0	0	2	4	6	3	5	30
14	Maluku	3	2	0	0	2	3	5	4	5	24
15	Maluku Utara	2	2	0	0	1	1	2	2	3	13
16	Papua	I	3	0	0	6	6	5	7	5	32
17	Papua Barat	1	2	0	0	3	2	3	3	3	17
18	Papua Selatan	1	0	0	0	1	1	1	2	2	8
19	Papua Tengah	1	0	0	0	2	3	3	2	2	13
20	Papua Barat Daya	3	4	0	0	1	5	3	4	6	26
Indonesia		**22**	**41**	**0**	**0**	**41**	**44**	**58**	**46**	**56**	**308**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.k

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN BERBASIS INDIVIDU PERIODE I-IV TAHUN 2023

No	Provinsi	Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV	
		Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	1	2	8	10	8	9	12	27
2	Sumatera Utara	5	5	7	8	5	8	15	41
3	Sumatera Barat	1	3	5	8	3	6	8	16
4	Riau	3	4	2	4	3	7	6	7
5	Jambi	2	3	6	12	4	6	8	24
6	Sumatera Selatan	1	1	3	5	4	4	4	7
7	Bengkulu	2	3	4	7	2	2	7	18
8	Lampung	1	3	5	7	5	8	5	15
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Kepulauan Riau	4	5	4	5	2	3	4	7
11	Kalimantan Barat	5	6	7	10	3	3	7	17
12	Kalimantan Tengah	2	3	7	9	7	9	9	14
13	Kalimantan Selatan	2	3	4	8	1	4	3	6
14	Kalimantan Timur	2	3	3	3	4	6	6	11
15	Kalimantan Utara	1	2	3	3	2	2	3	6
16	Gorontalo	1	2	2	2	2	3	5	10
17	Maluku	6	18	6	11	10	27	7	10
18	Maluku Utara	3	8	6	8	1	3	4	9
19	Nusa Tenggara Barat	1	1	4	7	2	3	3	3
20	Nusa Tenggara Timur	10	25	4	6	6	12	12	41
21	Sulawesi Utara	2	4	1	1	1	1	4	18
22	SulawesiI Tengah	4	7	3	5	7	11	7	18
23	Sulawesi Selatan	1	1	7	11	4	8	7	13
24	Sulawesi Tenggara	7	12	5	6	6	13	12	28
25	Sulawesi Barat	1	1	2	2	2	3	2	9
26	Papua	1	3	4	11	1	5	1	1
27	Papua Barat	2	5	5	12	1	1	3	5
28	Papua Selatan	0	0	4	17	2	5	2	4
29	Papua Tengah	0	0	5	16	0	0	2	11
30	Papua Barat Daya	3	12	3	9	1	1	3	9
Indonesia		**74**	**145**	**129**	**223**	**99**	**173**	**172**	**406**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.l

JUMLAH PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN BERBASIS INDIVIDU PERIODE I-IV MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Gizi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Masyarakat	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)
1	Aceh	1	23	0	0	7	2	12	1	13	59
2	Sumatera Utara	1	20	0	0	14	9	20	4	11	79
3	Sumatera Barat	4	7	0	0	2	5	11	7	5	41
4	Riau	1	8	0	0	6	0	12	2	1	30
5	Jambi	1	20	0	0	3	7	16	4	6	57
6	Sumatera Selatan	0	6	0	0	5	0	7	1	1	20
7	Bengkulu	3	17	0	0	4	5	7	1	7	44
8	Lampung	1	11	0	0	7	2	8	7	8	44
9	Kep. Bangka Belitung	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
10	Kepulauan Riau	3	4	0	0	2	3	1	5	4	22
11	Kalimantan Barat	4	11	0	0	1	3	12	7	7	45
12	Kalimantan Tengah	5	2	0	0	1	1	16	14	5	44
13	Kalimantan Selatan	8	9	0	0	0	1	4	1	3	26
14	Kalimantan Timur	5	5	0	0	4	0	8	3	4	29
15	Kalimantan Utara	2	3	0	0	1	0	3	1	5	15
16	Gorontalo	2	7	0	0	0	1	2	0	6	18
17	Maluku	28	8	0	0	8	10	9	7	18	88
18	Maluku Utara	6	10	0	0	3	3	8	1	1	32
19	Nusa Tenggara Barat	0	11	0	0	0	1	3	0	0	15
20	Nusa Tenggara Timur	28	31	0	0	2	13	16	11	10	111
21	Sulawesi Utara	4	5	0	0	2	8	6	8	9	42
22	SulawesiI Tengah	8	8	0	0	7	2	18	3	7	53
23	Sulawesi Selatan	3	14	0	0	8	0	5	4	9	43
24	Sulawesi Tenggara	14	25	0	0	5	2	8	3	17	74
25	Sulawesi Barat	3	10	0	0	3	0	1	0	2	19
26	Papua	4	2	0	0	4	6	5	3	7	31
27	Papua Barat	4	1	0	0	7	1	13	7	7	40
28	Papua Selatan	3	0	0	0	5	4	17	6	5	40
29	Papua Tengah	1	0	0	0	7	7	8	6	11	40
30	Papua Barat Daya	4	4	0	0	2	12	15	8	8	53
Indonesia		**151**	**283**	**0**	**0**	**120**	**108**	**271**	**126**	**197**	**1.256**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.m

JUMLAH DOKTER INTERNSIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Angkatan I (Februari)	Angkatan II (Mei)	Angkatan III (Agustus)	Angkatan IV (November)	Jumlah Dokter Internship
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	89	73	91	71	324
2	Sumatera Utara	140	124	99	167	530
3	Sumatera Barat	103	58	48	111	320
4	Riau	82	64	31	107	284
5	Jambi	60	61	16	68	205
6	Sumatera Selatan	70	115	185	62	432
7	Bengkulu	39	42	60	54	195
8	Lampung	57	42	48	49	196
9	Kepulauan Bangka Belitung	33	30	40	40	143
10	Kepulauan Riau	74	75	47	43	239
11	DKI Jakarta	60	48	175	56	339
12	Jawa Barat	229	207	186	398	1.020
13	Jawa Tengah	240	393	361	265	1.259
14	DI Yogyakarta	59	46	111	64	280
15	Jawa Timur	215	503	496	245	1.459
16	Banten	83	44	123	111	361
17	Bali	82	71	219	126	498
18	Nusa Tenggara Barat	44	52	99	46	241
19	Nusa Tenggara Timur	53	63	55	92	263
20	Kalimantan Barat	44	40	64	22	170
21	Kalimantan Tengah	26	14	18	37	95
22	Kalimantan Selatan	49	47	40	29	165
23	Kalimantan Timur	78	52	60	121	311
24	Kalimantan Utara	25	16	36	0	77
25	Sulawesi Utara	38	66	64	50	218
26	Sulawesi Tengah	57	15	55	31	158
27	Sulawesi Selatan	80	78	101	107	366
28	Sulawesi Tenggara	57	103	56	49	265
29	Gorontalo	24	6	6	23	59
30	Sulawesi Barat	5	15	7	19	46
31	Maluku	45	47	32	17	141
32	Maluku Utara	10	44	0	23	77
33	Papua	47	0	20	37	104
34	Papua Barat	14	14	19	5	52
35	Papua Selatan	0	0	0	9	9
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
Indonesia		**2.411**	**2.668**	**3.068**	**2.754**	**10.901**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.n

JUMLAH DOKTER GIGI INTERNSIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Angkatan I (Februari)	Angkatan II (Mei)	Angkatan III (Agustus)	Angkatan IV (November)	Jumlah Dokter Gigi Internship
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	14	24	10	18	66
2	Sumatera Utara	0	39	29	19	87
3	Sumatera Barat	56	64	76	54	250
4	Riau	0	0	10	0	10
5	Jambi	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	16	14	23	9	62
7	Bengkulu	0	8	15	0	23
8	Lampung	22	10	20	10	62
9	Kepulauan Bangka Belitung	14	0	6	0	20
10	Kepulauan Riau	0	0	0	9	9
11	DKI Jakarta	14	30	14	18	76
12	Jawa Barat	36	168	92	98	394
13	Jawa Tengah	58	153	112	102	425
14	DI Yogyakarta	24	80	28	68	200
15	Jawa Timur	104	148	98	92	442
16	Banten	14	12	42	10	78
17	Bali	70	14	40	19	143
18	Nusa Tenggara Barat	43	33	32	22	130
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	42	12	23	10	87
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	27	36	29	32	124
23	Kalimantan Timur	27	20	26	32	105
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	57	12	47	116
28	Sulawesi Tenggara	0	0	49	6	55
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	5	5
31	Maluku	0	11	6	6	23
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
Indonesia		**581**	**933**	**792**	**686**	**2.992**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 11.o

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Spesialis Anak		Spesialis Obstetri dan Ginekologi		Spesialis Penyakit Dalam		Spesialis Bedah		Spesialis Anestesi		Spesialis Patologi Klinik		Spesialis Radiologi		Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah		Spesialis Kedokteran Jiwa		Spesialis Mata		Spesialis Onkologi Radiasi		Spesialis Paru		Spesialis Patologi Anatomi		Spesialis Syaraf		Spesialis THT-KL		Total
		PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)																	(17)
1	Aceh	7		2		6		2	1					1																		19
2	Sumatera Utara	3	1	1	1	1	1	4	3																							15
3	Sumatera Barat	3	1		4	2	3	1	3	1	2	1																				21
4	Riau	2	3		1	1	4	2	1		1			1																		16
5	Jambi	1	1			1	1				1	1																				6
6	Sumatera Selatan	2	1	2		2	1	2		1	1	1																				13
7	Bengkulu		1		4		3	1			1	1		2																		13
8	Lampung	1	3	2	1		2	2																								11
9	Kep. Bangka Belitung		1		2		1	1	1																							6
10	Kepulauan Riau	4			4	2	2	1	1		2																					16
11	DKI Jakarta	1		1		1		1		2		2		1																		9
12	Jawa Barat	2	4	3	3	3	2	1		2	1	1	1	1																		24
13	Jawa Tengah	3	5		3	3	2		1	1	1	2		4																		25
14	DI Yogyakarta			1		1								1																		3
15	Jawa Timur	6	1		4	5	3	1	3	1	1	5		2	1																	33
16	Banten	1												3																		4
17	Bali	1	1	2	4		1	1			3	3	2		2																	20
18	Nusa Tenggara Barat		5		1	3	3	2	4	1	4		2	1																		26
19	Nusa Tenggara Timur	1	8	1	6	3	9		6	1	11		1	1	1		2		1		1		1		1		1		1		1	58
20	Kalimantan Barat	3	2		5	2	6	2	3		3		1	1																		28
21	Kalimantan Tengah	2	2		6		4	1	3	2	5		2	3																		30
22	Kalimantan Selatan	1	4	1	2	5	4		2		2			3																		24
23	Kalimantan Timur	3		3	1	3	1			1																						12
24	Kalimantan Utara		1	1	1	1	1		1																							6
25	Sulawesi Utara	2	1	1	2	3	1	3	1			1		3																		18
26	Sulawesi Tengah		4		4	2			6				1	2																		19
27	Sulawesi Selatan	2	1	2	1	6		2						2																		16
28	Sulawesi Tenggara		2	1	2	2	4		2		3																					16
29	Gorontalo			1			2		1					1																		5
30	Sulawesi Barat				1	2	2	1	1		1			2																		10
31	Maluku	1	3		4	2	2		2	1	1			2																		18
32	Maluku Utara		1		3		2		1	1			1	1																		10
33	Papua	1			1		1					1		1																		5
34	Papua Barat									1																						1
35	Papua Selatan	1		1						3																						5
36	Papua Tengah	1												1																		2
37	Papua Pegunungan	2						4						1																		7
38	Papua Barat Daya				1																											1
39	TNI/POLRI dan K/L lainnya			4		2		5		3				1																		15
	Indonesia	**57**	**57**	**30**	**72**	**64**	**68**	**40**	**47**	**22**	**44**	**19**	**11**	**42**	**4**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**586**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 12.a

JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Puskesmas				Rumah Sakit				Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya				Total			
		Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat			Bidan
		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
1	Aceh	2.531	6.753	9.284	16.393	3.603	7.493	11.096	4.746	416	639	1.055	628	6.550	14.885	21.435	21.767
2	Sumatera Utara	2.455	6.034	8.489	19.000	3.982	11.781	15.763	6.186	533	1.002	1.535	1.936	6.970	18.817	25.787	27.122
3	Sumatera Barat	575	2.825	3.400	6.847	1.511	6.614	8.125	1.877	166	545	711	589	2.252	9.984	12.236	9.313
4	Riau	1.019	2.918	3.937	6.365	1.861	5.360	7.221	2.365	339	688	1.027	1.516	3.219	8.966	12.185	10.246
5	Jambi	1.019	2.487	3.506	5.456	1.192	3.154	4.346	1.384	204	369	573	672	2.415	6.010	8.425	7.512
6	Sumatera Selatan	1.589	5.063	6.652	11.847	2.084	7.171	9.255	2.907	464	938	1.402	1.188	4.137	13.172	17.309	15.942
7	Bengkulu	617	1.581	2.198	3.507	826	1.854	2.680	1.138	139	231	370	268	1.582	3.666	5.248	4.913
8	Lampung	1.776	2.798	4.574	8.131	2.606	4.594	7.200	1.969	575	868	1.443	1.240	4.957	8.260	13.217	11.340
9	Kep. Bangka Belitung	338	786	1.124	978	708	1.666	2.374	503	139	297	436	241	1.185	2.749	3.934	1.722
10	Kepulauan Riau	318	932	1.250	1.502	910	2.728	3.638	915	203	431	634	545	1.431	4.091	5.522	2.962
11	DKI Jakarta	515	1.403	1.918	1.869	6.740	26.387	33.127	3.678	1.418	3.074	4.492	1.956	8.673	30.864	39.537	7.503
12	Jawa Barat	4.933	6.621	11.554	17.238	15.762	36.153	51.915	9.110	2.357	4.698	7.055	6.757	23.052	47.472	70.524	33.105
13	Jawa Tengah	3.723	6.813	10.536	17.233	14.003	32.467	46.470	8.220	2.064	5.463	7.527	5.738	19.790	44.743	64.533	31.191
14	DI Yogyakarta	248	693	941	958	1.993	6.916	8.909	1.137	277	985	1.262	886	2.518	8.594	11.112	2.981
15	Jawa Timur	6.999	9.873	16.872	18.593	15.707	31.350	47.057	9.231	3.083	5.867	8.950	5.994	25.789	47.090	72.879	33.818
16	Banten	1.225	1.623	2.848	4.612	3.342	10.461	13.803	2.688	569	1.296	1.865	2.149	5.136	13.380	18.516	9.449
17	Bali	546	1.190	1.736	2.569	2.759	6.915	9.674	2.342	438	1.092	1.530	981	3.743	9.197	12.940	5.892
18	Nusa Tenggara Barat	2.552	4.011	6.563	6.234	2.053	3.477	5.530	1.706	428	421	849	289	5.033	7.909	12.942	8.229
19	Nusa Tenggara Timur	2.997	6.572	9.569	10.456	1.516	4.354	5.870	2.166	222	438	660	232	4.735	11.364	16.099	12.854
20	Kalimantan Barat	2.287	2.670	4.957	4.673	2.003	3.884	5.887	1.374	574	645	1.219	1.105	4.864	7.199	12.063	7.152
21	Kalimantan Tengah	1.646	2.348	3.994	3.559	1.178	2.304	3.482	1.001	351	338	689	485	3.175	4.990	8.165	5.045
22	Kalimantan Selatan	1.160	1.775	2.935	3.996	2.492	3.609	6.101	1.603	464	486	950	393	4.116	5.870	9.986	5.992
23	Kalimantan Timur	864	1.800	2.664	2.678	2.003	5.153	7.156	1.546	571	836	1.407	971	3.438	7.789	11.227	5.195
24	Kalimantan Utara	321	657	978	770	492	1.098	1.590	452	84	98	182	120	897	1.853	2.750	1.342
25	Sulawesi Utara	517	2.482	2.999	2.110	1.586	5.198	6.784	1.121	135	332	467	98	2.238	8.012	10.250	3.329
26	Sulawesi Tengah	1.240	2.884	4.124	5.167	1.378	3.672	5.050	1.777	260	337	597	199	2.878	6.893	9.771	7.143
27	Sulawesi Selatan	1.974	8.974	10.948	15.376	3.052	11.999	15.051	4.653	586	1.265	1.851	881	5.612	22.238	27.850	20.910
28	Sulawesi Tenggara	1.497	4.919	6.416	7.195	1.026	2.657	3.683	1.333	181	292	473	156	2.704	7.868	10.572	8.684
29	Gorontalo	339	957	1.296	1.497	643	1.564	2.207	764	96	135	231	95	1.078	2.656	3.734	2.356
30	Sulawesi Barat	557	1.677	2.234	3.073	395	1.087	1.482	679	69	84	153	87	1.021	2.848	3.869	3.839
31	Maluku	1.123	3.094	4.217	2.758	681	2.530	3.211	896	130	303	433	111	1.934	5.927	7.861	3.765
32	Maluku Utara	628	1.570	2.198	3.270	450	1.373	1.823	778	157	170	327	108	1.235	3.113	4.348	4.156
33	Papua	760	1.288	2.048	1.193	658	1.760	2.418	519	149	120	269	46	1.567	3.168	4.735	1.758
34	Papua Barat	613	936	1.549	1.051	369	774	1.143	391	67	36	103	29	1.049	1.746	2.795	1.471
35	Papua Selatan	345	557	902	754	159	565	724	286	70	59	129	40	574	1.181	1.755	1.080
36	Papua Tengah	648	1.165	1.813	884	330	755	1.085	266	109	111	220	113	1.087	2.031	3.118	1.263
37	Papua Pegunungan	494	527	1.021	499	144	315	459	315	63	71	134	41	701	913	1.614	855
38	Papua Barat Daya	394	1.104	1.498	1.032	223	642	865	642	70	71	141	58	687	1.817	2.504	1.732
Indonesia		**53.382**	**112.360**	**165.742**	**221.323**	**102.420**	**261.834**	**364.254**	**84.664**	**18.220**	**35.131**	**53.351**	**38.941**	**174.022**	**409.325**	**583.347**	**344.928**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 12.b

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik				Tenaga Keteknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional			Tenaga Psikologi Klinis	Apoteker	Total
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapis Wicara	Akupunktur	Rekam Medis	Teknik Kardiovaskular	Teknisi Pelayanan Darah	Refraksionis Optisien	Teknisi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Pengobat Tradisional	Ramuan Jamu	Interkontinental			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1	Aceh	2.209	613	286	42	44	1	132	209	28	0	1	0	86	1	5	28	0	4	107	0	43	15	86	1	1	0	0	0	4	802	4.748
2	Sumatera Utara	3.070	1.660	304	40	11	1	209	417	89	2	11	1	224	0	7	45	3	7	162	1	117	49	488	1	0	1	0	0	5	613	7.538
3	Sumatera Barat	1.521	625	212	44	15	1	129	184	81	8	61	1	145	1	16	47	2	48	63	0	72	71	192	1	1	1	0	0	4	357	3.903
4	Riau	1.261	668	190	25	19	2	32	102	74	4	11	1	191	2	2	18	1	16	19	0	77	31	270	1	0	1	0	0	9	430	3.457
5	Jambi	708	379	105	20	18	2	49	32	35	2	2	0	55	1	1	6	0	16	83	0	30	13	107	0	1	0	0	0	5	203	1.873
6	Sumatera Selatan	1.365	902	132	80	26	0	137	129	46	3	8	2	151	0	16	16	6	41	81	0	55	20	244	0	0	1	0	0	10	710	4.181
7	Bengkulu	560	318	58	62	4	1	85	95	12	1	0	1	95	1	2	5	0	39	6	0	26	24	141	0	0	0	0	0	2	211	1.749
8	Lampung	1.436	704	45	28	6	0	245	187	64	3	12	6	92	4	9	30	49	35	63	3	58	43	162	1	2	0	0	0	3	583	3.873
9	Kep. Bangka Belitung	278	99	22	14	5	3	6	56	9	0	2	0	23	3	7	0	0	2	2	0	10	3	22	0	0	0	0	0	6	302	874
10	Kepulauan Riau	372	220	27	8	7	0	77	21	12	3	2	1	41	0	6	2	2	3	11	0	15	4	38	1	1	1	0	0	4	129	1.008
11	DKI Jakarta	1.536	302	179	12	19	6	154	249	111	15	17	45	76	2	15	55	26	1	50	4	78	90	248	5	8	1	0	6	60	924	4.294
12	Jawa Barat	7.497	2.123	398	148	80	9	315	650	251	32	49	54	970	6	53	177	25	47	190	2	199	119	1.218	3	11	2	0	1	100	3.477	18.206
13	Jawa Tengah	6.561	1.212	278	69	73	23	248	597	370	108	112	76	909	3	88	99	3	88	150	3	251	160	814	15	57	0	4	0	53	2.391	14.815
14	DI Yogyakarta	577	173	18	3	6	0	105	96	40	1	3	0	127	0	5	2	0	23	38	1	39	31	70	0	1	0	0	0	24	265	1.648
15	Jawa Timur	8.187	2.544	336	109	47	5	239	888	311	28	30	29	903	0	121	87	31	13	104	0	171	130	1.201	19	21	59	0	5	46	2.934	18.598
16	Banten	1.532	595	184	22	9	3	65	115	64	10	3	6	144	11	12	32	12	4	28	0	39	51	214	1	5	1	0	0	22	880	4.064
17	Bali	761	193	29	14	20	0	67	98	79	0	1	5	46	0	11	5	2	59	62	0	32	20	147	2	0	1	0	0	9	471	2.134
18	Nusa Tenggara Barat	1.014	449	59	46	15	0	43	203	63	3	3	0	145	2	19	14	2	21	49	0	35	36	218	1	0	0	0	0	3	495	2.938
19	Nusa Tenggara Timur	1.987	898	351	67	46	0	195	183	44	0	1	1	125	2	24	3	1	16	138	1	33	34	239	1	0	0	0	0	1	352	4.743
20	Kalimantan Barat	872	410	70	46	20	5	72	149	21	2	5	0	71	0	7	25	1	7	88	0	30	18	195	0	0	1	0	0	2	231	2.348
21	Kalimantan Tengah	586	326	65	27	13	1	25	123	21	4	4	0	60	0	8	2	0	4	24	1	20	11	110	0	1	0	0	0	4	220	1.660
22	Kalimantan Selatan	524	176	110	36	44	4	131	102	42	2	5	2	155	0	7	13	0	9	122	0	22	25	154	0	2	0	0	0	8	517	2.212
23	Kalimantan Timur	1.009	288	62	35	37	5	51	120	57	3	10	0	91	2	5	8	1	3	24	0	25	18	189	1	3	0	0	0	4	172	2.223
24	Kalimantan Utara	172	80	41	4	15	2	8	26	10	1	0	0	12	0	3	1	0	0	2	0	9	5	27	0	0	0	0	0	3	100	521
25	Sulawesi Utara	1.278	329	135	34	27	2	97	113	12	0	0	0	20	0	10	1	0	5	38	0	17	5	108	2	0	0	0	0	1	372	2.606
26	Sulawesi Tengah	1.012	474	267	64	79	1	82	124	12	1	2	0	23	10	35	1	7	9	35	0	34	10	151	1	1	0	0	0	6	398	2.839
27	Sulawesi Selatan	2.054	912	227	101	121	20	195	192	143	1	4	1	213	20	2	17	19	8	117	1	56	42	366	6	0	0	0	0	6	1.606	6.450
28	Sulawesi Tenggara	745	510	231	67	97	8	85	155	27	0	0	0	85	8	12	3	4	13	83	0	21	59	280	0	0	0	0	0	2	448	2.943
29	Gorontalo	437	176	96	12	28	1	12	52	7	0	1	0	29	4	2	0	0	0	7	0	9	3	101	0	0	0	0	0	4	226	1.207
30	Sulawesi Barat	413	236	44	22	10	0	65	86	6	0	0	0	14	4	0	2	1	0	8	0	8	0	24	0	0	0	0	0	1	181	1.125
31	Maluku	1.365	538	237	25	31	0	90	117	6	0	1	0	14	7	11	2	3	5	19	0	22	6	189	0	0	0	0	0	3	78	2.769
32	Maluku Utara	506	368	85	34	42	0	92	66	4	2	0	0	22	11	4	1	1	1	13	0	6	7	111	0	0	0	0	0	0	66	1.442
33	Papua	1.448	405	209	14	18	0	106	98	17	0	0	0	24	3	2	2	2	6	7	0	15	21	218	0	0	0	0	0	0	208	2.823
34	Papua Barat	721	217	91	3	9	1	12	82	9	0	0	1	18	1	1	3	2	0	3	0	3	4	56	0	0	0	0	0	0	59	1.296
	Indonesia	**55.574**	**20.122**	**5.183**	**1.377**	**1.061**	**107**	**3.655**	**6.116**	**2.177**	**239**	**361**	**233**	**5.399**	**109**	**528**	**752**	**206**	**553**	**1.996**	**17**	**1.677**	**1.178**	**8.398**	**63**	**116**	**70**	**4**	**12**	**414**	**21.411**	**139.108**

Sumber : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2024

Keterangan: - registrasi baru adalah tenaga kesehatan yang baru teregistrasi pada tahun 2023

Lampiran 12.c

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik				Tenaga Keteknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional			Tenaga Psikologi Klinis	Apoteker	Total
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapis Wicara	Akupunktur	Rekam Medis	Teknik Kardiovaskular	Teknisi Pelayanan Darah	Refraksionis Optisien	Teknisi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Pengobat Tradisional	Ramuan Jamu	Interkontinental			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1	Aceh	7.271	7.626	278	157	65	3	512	598	266	1	0	0	152	0	3	43	0	63	414	0	154	58	423	7	1	0	0	0	11	1.160	128
2	Sumatera Utara	7.372	15.607	336	137	19	0	246	491	268	6	3	2	207	0	3	94	1	86	243	0	339	107	921	36	1	0	0	1	7	552	298
3	Sumatera Barat	3.993	5.229	131	91	27	5	254	504	277	3	14	1	441	0	4	63	9	51	248	0	116	134	339	14	3	0	0	0	9	229	190
4	Riau	3.715	4.943	105	85	39	2	101	272	199	2	5	0	246	1	0	54	7	44	66	0	147	49	560	10	0	0	0	1	8	333	253
5	Jambi	2.602	3.572	44	41	13	0	167	143	99	1	3	0	36	0	0	17	3	35	203	0	66	10	276	3	0	0	0	0	5	314	116
6	Sumatera Selatan	5.724	7.747	103	145	48	2	356	358	161	5	5	0	136	1	6	37	1	24	176	0	152	17	600	5	3	0	0	0	9	510	248
7	Bengkulu	1.578	2.289	53	65	3	1	128	329	30	0	0	5	36	0	0	4	2	6	10	0	44	12	279	3	0	0	0	0	5	123	102
8	Lampung	3.485	5.173	18	73	17	4	245	239	104	5	7	2	62	0	6	18	18	23	161	2	253	28	384	6	1	0	0	0	5	227	199
9	Kep. Bangka Belitung	1.297	664	5	41	4	4	68	100	39	0	1	0	32	0	3	8	7	10	32	0	26	6	138	8	0	0	0	0	1	80	61
10	Kepulauan Riau	1.102	1.258	12	22	10	2	185	53	26	7	1	0	45	0	1	17	2	18	46	0	35	21	109	3	0	0	0	0	3	68	84
11	DKI Jakarta	8.678	4.417	24	18	19	5	229	480	432	51	148	11	298	25	40	133	37	53	277	8	446	313	945	52	10	2	1	2	41	924	671
12	Jawa Barat	17.000	15.682	66	135	86	20	505	1.001	822	54	172	16	956	2	52	169	13	118	1.026	5	622	222	1.826	82	18	0	1	0	18	1.835	1.797
13	Jawa Tengah	17.490	8.116	60	206	131	13	475	734	1.100	130	158	116	1.440	1	36	141	2	75	415	0	519	300	1.139	99	65	1	72	0	49	1.932	1.383
14	DI Yogyakarta	2.177	1.349	12	30	26	3	150	259	224	6	15	2	289	0	23	23	1	24	121	0	104	29	272	12	1	0	1	0	23	203	304
15	Jawa Timur	19.528	15.516	109	230	48	3	636	1.231	787	34	44	60	1.088	0	29	169	37	117	369	1	390	179	1.700	79	20	36	9	1	35	1.346	1.179
16	Banten	3.900	4.450	25	50	13	2	115	185	176	25	38	2	155	7	30	95	15	21	117	0	225	129	562	21	5	0	0	0	10	447	374
17	Bali	2.295	1.634	50	52	12	0	167	185	93	1	1	2	70	0	4	6	4	12	114	0	89	9	178	13	2	0	0	0	16	231	151
18	Nusa Tenggara Barat	3.332	2.539	13	142	14	3	190	398	92	3	2	1	100	0	10	13	2	15	148	0	77	64	480	12	1	0	1	0	7	569	168
19	Nusa Tenggara Timur	5.760	4.409	169	123	50	0	436	485	95	1	2	0	188	0	11	9	1	37	306	0	85	32	565	2	0	0	0	0	0	112	172
20	Kalimantan Barat	3.361	2.548	23	101	13	10	237	211	71	1	2	1	106	0	4	7	0	20	226	0	49	11	244	1	0	0	0	0	1	196	202
21	Kalimantan Tengah	1.884	1.651	32	70	12	0	48	237	37	1	4	0	39	0	2	3	1	19	34	0	33	9	205	3	1	0	0	0	4	228	127
22	Kalimantan Selatan	3.114	2.819	24	67	18	3	193	437	129	4	3	0	71	1	2	13	2	25	227	0	65	19	381	5	0	0	1	0	13	990	212
23	Kalimantan Timur	3.015	2.455	32	55	41	5	97	143	82	2	6	0	47	0	3	8	2	35	80	0	70	12	346	5	1	0	0	0	4	401	240
24	Kalimantan Utara	920	549	14	21	15	2	46	27	9	0	1	0	6	0	1	2	0	9	22	0	11	11	58	0	0	0	0	0	0	78	65
25	Sulawesi Utara	2.499	801	17	67	22	3	188	191	87	0	3	1	3	0	11	1	1	14	157	0	14	6	127	1	1	0	0	0	1	143	89
26	Sulawesi Tengah	2.290	1.865	186	130	98	0	226	151	26	1	3	0	26	0	6	2	1	17	59	0	58	12	187	5	1	0	0	0	2	227	175
27	Sulawesi Selatan	8.740	9.014	116	171	142	22	482	623	285	6	5	0	293	5	19	13	18	26	422	1	274	121	888	47	3	0	0	0	1	981	551
28	Sulawesi Tenggara	2.649	3.520	175	111	127	4	142	321	59	2	0	0	40	0	1	10	5	22	180	1	49	29	321	6	0	0	0	0	0	451	210
29	Gorontalo	901	769	21	37	54	3	51	133	9	1	0	0	11	0	6	1	0	7	12	0	9	10	32	1	0	0	0	0	0	84	63
30	Sulawesi Barat	1.477	1.684	26	54	32	0	99	131	13	0	0	0	24	0	0	0	1	4	38	0	24	11	82	2	0	0	0	0	0	88	56
31	Maluku	1.801	1.006	72	26	29	1	204	218	8	0	0	0	17	0	3	1	2	20	16	0	23	11	187	1	0	0	0	0	0	35	59
32	Maluku Utara	977	1.179	102	47	64	0	53	188	44	0	0	0	19	0	4	0	0	5	39	0	26	18	148	1	0	0	0	0	2	31	54
33	Papua	2.596	1.748	77	15	16	0	182	153	29	3	0	0	19	0	1	3	1	12	29	0	22	7	288	0	0	0	0	0	0	187	131
34	Papua Barat	1.056	960	29	5	19	0	32	69	5	0	0	0	14	0	1	1	1	8	14	0	12	9	107	0	0	0	0	0	0	24	67
	Indonesia	**155.579**	**144.788**	**2.559**	**2.820**	**1.346**	**125**	**7.445**	**11.278**	**6.183**	**356**	**646**	**222**	**6.712**	**43**	**325**	**1.178**	**197**	**1.075**	**6.047**	**18**	**4.628**	**2.015**	**15.297**	**545**	**138**	**39**	**86**	**5**	**290**	**15.339**	**10.179**

Sumber : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2024

Keterangan: - registrasi ulang terdiri dari perpanjangan, naik level, alih profesi, dan rekognisi pembelajaran lampau.

Lampiran 12.d

JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF
MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 OKTOBER 2023

No	Provinsi	Jumlah Bidan sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh		1		1
2	Sumatera Utara	2	3		5
3	Sumatera Barat			1	1
4	Riau				0
5	Jambi				0
6	Sumatera Selatan				0
7	Bengkulu		1		1
8	Lampung	1	1		2
9	Kepulauan Bangka Belitung				0
10	Kepulauan Riau		1		1
11	DKI Jakarta				0
12	Jawa Barat	1			1
13	Jawa Tengah	2			2
14	DI Yogyakarta				0
15	Jawa Timur	2			2
16	Banten				0
17	Bali				0
18	Nusa Tenggara Barat				0
19	Nusa Tenggara Timur				0
20	Kalimantan Barat				0
21	Kalimantan Tengah				0
22	Kalimantan Selatan				0
23	Kalimantan Timur				0
24	Kalimantan Utara				0
25	Sulawesi Utara	1	2	1	4
26	Sulawesi Tengah				0
27	Sulawesi Selatan				0
28	Sulawesi Tenggara				0
29	Gorontalo				0
30	Sulawesi Barat				0
31	Maluku				0
32	Maluku Utara				0
33	Papua				0
34	Papua Barat			2	2
35	Papua Selatan				0
36	Papua Tengah				0
37	Papua Pegunungan				0
38	Papua Barat Daya				0
Indonesia		**9**	**9**	**4**	**22**

Sumber: Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 13.a

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	915	2.975	3.890	310	1.153	1.463	161	1.222	1.383
2	Sumatera Utara	574	2.593	3.167	247	648	895	113	1.408	1.521
3	Sumatera Barat	253	1.177	1.430	160	471	631	71	1.006	1.077
4	Riau	323	1.069	1.392	146	322	468	44	733	777
5	Jambi	292	767	1.059	161	333	494	49	476	525
6	Sumatera Selatan	472	1.745	2.217	196	748	944	80	1.007	1.087
7	Bengkulu	310	816	1.126	99	205	304	60	521	581
8	Lampung	270	693	963	211	531	742	92	691	783
9	Kep. Bangka Belitung	107	278	385	40	119	159	32	229	261
10	Kepulauan Riau	123	274	397	123	233	356	33	237	270
11	DKI Jakarta	149	402	551	275	467	742	189	1.240	1.429
12	Jawa Barat	923	2.094	3.017	570	1.245	1.815	367	2.871	3.238
13	Jawa Tengah	730	2.711	3.441	661	1.470	2.131	333	3.106	3.439
14	DI Yogyakarta	94	330	424	160	255	415	69	550	619
15	Jawa Timur	595	2.590	3.185	548	1.405	1.953	434	3.441	3.875
16	Banten	235	590	825	180	368	548	123	697	820
17	Bali	206	586	792	223	321	544	86	672	758
18	Nusa Tenggara Barat	336	723	1.059	208	438	646	152	993	1.145
19	Nusa Tenggara Timur	815	1.368	2.183	516	711	1.227	363	1.279	1.642
20	Kalimantan Barat	301	602	903	302	378	680	149	747	896
21	Kalimantan Tengah	166	388	554	119	170	289	88	508	596
22	Kalimantan Selatan	330	651	981	229	422	651	161	902	1.063
23	Kalimantan Timur	248	598	846	129	246	375	85	374	459
24	Kalimantan Utara	107	211	318	58	81	139	30	121	151
25	Sulawesi Utara	251	876	1.127	218	332	550	137	590	727
26	Sulawesi Tengah	711	2.030	2.741	259	510	769	92	623	715
27	Sulawesi Selatan	858	3.468	4.326	378	1.210	1.588	179	1.678	1.857
28	Sulawesi Tenggara	702	2.527	3.229	247	568	815	142	1.064	1.206
29	Gorontalo	189	743	932	71	209	280	89	496	585
30	Sulawesi Barat	163	602	765	90	172	262	28	334	362
31	Maluku	353	954	1.307	283	426	709	105	719	824
32	Maluku Utara	333	1.095	1.428	114	217	331	49	488	537
33	Papua	169	383	552	134	147	281	78	309	387
34	Papua Barat	96	238	334	53	60	113	35	180	215
35	Papua Selatan	83	157	240	42	44	86	27	109	136
36	Papua Tengah	127	252	379	71	75	146	17	103	120
37	Papua Pegunungan	114	178	292	44	40	84	13	74	87
38	Papua Barat Daya	79	289	368	54	80	134	25	222	247
Indonesia		**13.102**	**40.023**	**53.125**	**7.929**	**16.830**	**24.759**	**4.380**	**32.020**	**36.400**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 13.b

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	495	2.017	2.512	170	828	998	62	749	811
2	Sumatera Utara	326	1.668	1.994	120	423	543	53	713	766
3	Sumatera Barat	111	623	734	91	299	390	22	517	539
4	Riau	154	527	681	82	217	299	24	355	379
5	Jambi	128	367	495	73	226	299	27	274	301
6	Sumatera Selatan	262	999	1.261	115	489	604	46	517	563
7	Bengkulu	180	446	626	62	140	202	26	284	310
8	Lampung	187	461	648	127	351	478	61	411	472
9	Kep. Bangka Belitung	39	109	148	25	69	94	18	122	140
10	Kepulauan Riau	48	124	172	49	129	178	12	111	123
11	DKI Jakarta	19	90	109	109	222	331	26	345	371
12	Jawa Barat	507	1.299	1.806	312	804	1.116	103	1.100	1.203
13	Jawa Tengah	346	1.613	1.959	331	906	1.237	152	1.334	1.486
14	DI Yogyakarta	43	192	235	43	125	168	30	224	254
15	Jawa Timur	239	1.238	1.477	229	801	1.030	203	1.335	1.538
16	Banten	107	301	408	57	201	258	27	292	319
17	Bali	58	147	205	89	136	225	27	189	216
18	Nusa Tenggara Barat	211	500	711	127	316	443	114	646	760
19	Nusa Tenggara Timur	573	943	1.516	387	574	961	282	956	1.238
20	Kalimantan Barat	167	370	537	166	258	424	94	483	577
21	Kalimantan Tengah	100	253	353	76	114	190	57	316	373
22	Kalimantan Selatan	201	408	609	133	304	437	118	580	698
23	Kalimantan Timur	133	368	501	66	163	229	50	199	249
24	Kalimantan Utara	43	117	160	33	50	83	19	61	80
25	Sulawesi Utara	94	446	540	114	216	330	67	320	387
26	Sulawesi Tengah	333	1.043	1.376	131	323	454	66	396	462
27	Sulawesi Selatan	415	1.888	2.303	195	773	968	85	900	985
28	Sulawesi Tenggara	456	1.641	2.097	166	426	592	106	780	886
29	Gorontalo	88	404	492	35	136	171	55	281	336
30	Sulawesi Barat	72	393	465	59	126	185	24	219	243
31	Maluku	185	564	749	186	294	480	69	476	545
32	Maluku Utara	185	665	850	69	175	244	38	330	368
33	Papua	85	210	295	85	79	164	44	164	208
34	Papua Barat	54	125	179	37	46	83	21	116	137
35	Papua Selatan	56	82	138	27	32	59	19	75	94
36	Papua Tengah	75	167	242	54	61	115	9	73	82
37	Papua Pegunungan	67	115	182	29	27	56	9	46	55
38	Papua Barat Daya	55	200	255	35	54	89	18	181	199
Indonesia		**6.897**	**23.123**	**30.020**	**4.294**	**10.913**	**15.207**	**2.283**	**16.470**	**18.977**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 13.c

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	209	554	763	87	239	326	86	439	525
2	Sumatera Utara	105	480	585	78	150	228	51	640	691
3	Sumatera Barat	56	216	272	47	120	167	46	445	491
4	Riau	59	237	296	28	59	87	18	339	357
5	Jambi	45	127	172	49	65	114	20	176	196
6	Sumatera Selatan	72	265	337	41	172	213	28	413	441
7	Bengkulu	53	200	253	25	39	64	26	209	235
8	Lampung	25	96	121	46	105	151	22	237	259
9	Kep. Bangka Belitung	29	70	99	7	31	38	11	96	107
10	Kepulauan Riau	16	52	68	26	58	84	19	125	144
11	DKI Jakarta	86	218	304	134	189	323	161	862	1.023
12	Jawa Barat	194	311	505	184	339	523	252	1.590	1.842
13	Jawa Tengah	78	258	336	196	405	601	163	1.547	1.710
14	DI Yogyakarta	8	46	54	67	92	159	33	295	328
15	Jawa Timur	127	578	705	204	461	665	204	1.845	2.049
16	Banten	51	107	158	58	99	157	90	375	465
17	Bali	40	121	161	78	124	202	56	442	498
18	Nusa Tenggara Barat	31	79	110	42	82	124	29	307	336
19	Nusa Tenggara Timur	81	196	277	75	99	174	66	298	364
20	Kalimantan Barat	36	89	125	76	65	141	43	223	266
21	Kalimantan Tengah	15	55	70	26	39	65	26	176	202
22	Kalimantan Selatan	38	99	137	58	85	143	40	301	341
23	Kalimantan Timur	37	82	119	41	53	94	30	167	197
24	Kalimantan Utara	25	37	62	13	17	30	11	55	66
25	Sulawesi Utara	68	229	297	71	84	155	67	252	319
26	Sulawesi Tengah	150	462	612	64	115	179	18	189	207
27	Sulawesi Selatan	195	830	1.025	93	255	348	84	704	788
28	Sulawesi Tenggara	61	334	395	38	83	121	22	232	254
29	Gorontalo	28	151	179	14	37	51	19	158	177
30	Sulawesi Barat	22	67	89	16	25	41	4	95	99
31	Maluku	60	176	236	53	76	129	30	189	219
32	Maluku Utara	52	220	272	21	22	43	7	133	140
33	Papua	21	80	101	31	45	76	31	139	170
34	Papua Barat	23	76	99	8	10	18	12	62	74
35	Papua Selatan	10	32	42	5	6	11	7	31	38
36	Papua Tengah	17	49	66	9	8	17	8	26	34
37	Papua Pegunungan	13	41	54	14	8	22	4	25	29
38	Papua Barat Daya	10	40	50	7	12	19	6	41	47
Indonesia		**2.246**	**7.360**	**9.606**	**2.130**	**3.973**	**6.103**	**1.850**	**13.878**	**15.728**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 14.a

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	163	1.240	1.403	361	432	793	96	385	481	349	1.396	1.745
2	Sumatera Utara	303	1.662	1.965	461	792	1.253	181	292	473	328	1.313	1.641
3	Sumatera Barat	206	1.049	1.255	325	407	732	97	213	310	334	1.521	1.855
4	Riau	178	1.027	1.205	203	337	540	102	255	357	252	703	955
5	Jambi	161	799	960	115	134	249	38	147	185	116	588	704
6	Sumatera Selatan	250	1.267	1.517	280	413	693	75	272	347	295	1.164	1.459
7	Bengkulu	145	475	620	103	100	203	19	50	69	80	192	272
8	Lampung	239	996	1.235	257	271	528	72	131	203	262	648	910
9	Kep. Bangka Belitung	89	313	402	95	76	171	15	73	88	83	277	360
10	Kepulauan Riau	102	367	469	137	144	281	31	91	122	107	292	399
11	DKI Jakarta	1.161	3.273	4.434	1.489	1.449	2.938	622	962	1.584	1.193	2.714	3.907
12	Jawa Barat	1.522	5.064	6.586	1.786	1.759	3.545	601	1.192	1.793	2.062	4.513	6.575
13	Jawa Tengah	1.117	5.047	6.164	1.549	1.572	3.121	715	1.497	2.212	1.664	5.202	6.866
14	DI Yogyakarta	260	1.043	1.303	346	306	652	161	319	480	320	1.338	1.658
15	Jawa Timur	1.243	5.331	6.574	1.459	1.668	3.127	545	927	1.472	1.746	4.169	5.915
16	Banten	329	1.226	1.555	438	512	950	179	370	549	319	826	1.145
17	Bali	292	886	1.178	390	304	694	139	137	276	231	623	854
18	Nusa Tenggara Barat	307	1.164	1.471	289	228	517	75	184	259	503	908	1.411
19	Nusa Tenggara Timur	376	1.147	1.523	225	248	473	53	139	192	379	1.155	1.534
20	Kalimantan Barat	287	828	1.115	195	158	353	48	110	158	406	814	1.220
21	Kalimantan Tengah	182	612	794	154	99	253	34	84	118	162	366	528
22	Kalimantan Selatan	294	1.078	1.372	251	201	452	77	105	182	324	870	1.194
23	Kalimantan Timur	314	917	1.231	231	237	468	95	176	271	211	454	665
24	Kalimantan Utara	71	161	232	65	48	113	13	27	40	72	109	181
25	Sulawesi Utara	153	353	506	146	91	237	72	116	188	130	415	545
26	Sulawesi Tengah	165	566	731	94	130	224	32	89	121	149	280	429
27	Sulawesi Selatan	408	1.853	2.261	398	625	1.023	152	386	538	398	1.627	2.025
28	Sulawesi Tenggara	190	831	1.021	106	204	310	20	116	136	184	668	852
29	Gorontalo	87	209	296	45	62	107	14	20	34	52	134	186
30	Sulawesi Barat	57	182	239	31	59	90	9	39	48	35	135	170
31	Maluku	121	472	593	53	94	147	14	58	72	51	131	182
32	Maluku Utara	143	434	577	64	123	187	19	39	58	56	152	208
33	Papua	141	378	519	76	106	182	11	33	44	42	86	128
34	Papua Barat	77	191	268	33	50	83	3	17	20	29	68	97
35	Papua Selatan	53	96	149	16	28	44	8	5	13	25	24	49
36	Papua Tengah	79	155	234	41	42	83	7	13	20	22	43	65
37	Papua Pegunungan	39	66	105	11	23	34	3	3	6	7	15	22
38	Papua Barat Daya	42	128	170	18	30	48	4	5	9	11	53	64
Indonesia		**11.346**	**42.886**	**54.232**	**12.336**	**13.562**	**25.898**	**4.451**	**9.077**	**13.528**	**12.989**	**35.986**	**48.975**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 14.b

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	58	539	597	10	57	67	20	119	139	147	782	929
2	Sumatera Utara	81	518	599	17	50	67	9	11	20	93	596	689
3	Sumatera Barat	54	376	430	9	18	27	1	32	33	96	628	724
4	Riau	48	345	393	3	21	24	4	36	40	48	266	314
5	Jambi	48	271	319	3	5	8	3	18	21	56	324	380
6	Sumatera Selatan	82	446	528	7	26	33	1	22	23	70	553	623
7	Bengkulu	57	195	252	5	12	17	0	2	2	9	82	91
8	Lampung	86	349	435	4	19	23	1	3	4	119	379	498
9	Kep. Bangka Belitung	20	95	115	2	1	3	1	1	2	30	119	149
10	Kepulauan Riau	18	83	101	3	2	5	0	3	3	14	93	107
11	DKI Jakarta	132	227	359	1	0	1	0	2	2	94	305	399
12	Jawa Barat	285	1.102	1.387	19	52	71	12	18	30	415	1.375	1.790
13	Jawa Tengah	246	1.218	1.464	22	41	63	72	186	258	401	1.679	2.080
14	DI Yogyakarta	30	211	241	0	6	6	23	38	61	60	342	402
15	Jawa Timur	254	1.291	1.545	16	64	80	31	52	83	406	1.295	1.701
16	Banten	49	188	237	8	24	32	0	4	4	64	217	281
17	Bali	39	140	179	5	6	11	1	0	1	55	207	262
18	Nusa Tenggara Barat	128	539	667	29	17	46	5	12	17	216	448	664
19	Nusa Tenggara Timur	213	590	803	32	60	92	9	36	45	208	711	919
20	Kalimantan Barat	93	351	444	14	12	26	1	3	4	193	439	632
21	Kalimantan Tengah	62	239	301	5	6	11	1	0	1	79	192	271
22	Kalimantan Selatan	88	395	483	4	12	16	3	4	7	124	478	602
23	Kalimantan Timur	66	273	339	3	10	13	3	11	14	68	162	230
24	Kalimantan Utara	26	58	84	2	1	3	0	0	0	30	39	69
25	Sulawesi Utara	48	90	138	4	8	12	4	22	26	43	220	263
26	Sulawesi Tengah	68	248	316	4	4	8	4	3	7	65	158	223
27	Sulawesi Selatan	112	757	869	10	49	59	6	24	30	162	784	946
28	Sulawesi Tenggara	99	500	599	4	28	32	5	15	20	94	455	549
29	Gorontalo	30	89	119	1	2	3	0	0	0	13	51	64
30	Sulawesi Barat	23	88	111	1	5	6	0	7	7	16	63	79
31	Maluku	63	261	324	1	5	6	1	3	4	14	54	68
32	Maluku Utara	67	226	293	3	18	21	3	4	7	21	73	94
33	Papua	53	199	252	9	20	29	0	0	0	7	28	35
34	Papua Barat	44	99	143	3	8	11	1	1	2	11	24	35
35	Papua Selatan	29	52	81	7	13	20	1	2	3	2	9	11
36	Papua Tengah	36	92	128	7	12	19	2	4	6	5	23	28
37	Papua Pegunungan	23	41	64	5	13	18	0	0	0	1	4	5
38	Papua Barat Daya	26	80	106	1	8	9	0	0	0	4	13	17
Indonesia		**2.984**	**12.861**	**15.845**	**283**	**715**	**998**	**228**	**698**	**926**	**3.553**	**13.670**	**17.223**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 14.c

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	97	615	712	339	366	705	74	264	338	195	574	769
2	Sumatera Utara	142	893	1.035	386	696	1.082	165	277	442	228	686	914
3	Sumatera Barat	136	577	713	297	323	620	88	174	262	227	821	1.048
4	Riau	112	592	704	196	301	497	97	214	311	193	403	596
5	Jambi	87	396	483	109	125	234	33	127	160	56	237	293
6	Sumatera Selatan	132	695	827	262	350	612	74	246	320	212	545	757
7	Bengkulu	75	213	288	97	83	180	19	47	66	72	107	179
8	Lampung	127	515	642	234	229	463	61	114	175	139	243	382
9	Kep. Bangka Belitung	49	172	221	91	69	160	14	65	79	51	153	204
10	Kepulauan Riau	62	225	287	128	122	250	30	86	116	87	182	269
11	DKI Jakarta	762	2.147	2.909	1.265	1.128	2.393	470	734	1.204	914	1.837	2.751
12	Jawa Barat	1.051	3.141	4.192	1.621	1.381	3.002	539	1.091	1.630	1.438	2.631	4.069
13	Jawa Tengah	665	2.823	3.488	1.410	1.306	2.716	561	1.091	1.652	1.131	3.064	4.195
14	DI Yogyakarta	158	552	710	321	269	590	132	242	374	243	846	1.089
15	Jawa Timur	762	2.876	3.638	1.291	1.323	2.614	469	745	1.214	1.107	2.414	3.521
16	Banten	226	872	1.098	407	452	859	167	353	520	215	510	725
17	Bali	195	575	770	356	234	590	115	99	214	148	325	473
18	Nusa Tenggara Barat	141	488	629	240	199	439	63	159	222	279	425	704
19	Nusa Tenggara Timur	132	429	561	186	176	362	44	90	134	158	406	564
20	Kalimantan Barat	136	353	489	173	141	314	39	81	120	171	300	471
21	Kalimantan Tengah	100	302	402	145	90	235	29	80	109	80	169	249
22	Kalimantan Selatan	156	499	655	215	164	379	73	97	170	190	351	541
23	Kalimantan Timur	178	450	628	198	175	373	89	139	228	128	233	361
24	Kalimantan Utara	36	84	120	56	46	102	12	27	39	40	68	108
25	Sulawesi Utara	88	217	305	136	80	216	65	91	156	78	172	250
26	Sulawesi Tengah	75	270	345	83	116	199	24	76	100	78	115	193
27	Sulawesi Selatan	255	918	1.173	334	546	880	120	330	450	226	774	1.000
28	Sulawesi Tenggara	72	254	326	94	165	259	10	93	103	92	202	294
29	Gorontalo	44	103	147	42	61	103	12	18	30	34	78	112
30	Sulawesi Barat	26	70	96	29	54	83	8	29	37	19	68	87
31	Maluku	50	179	229	49	86	135	13	54	67	34	73	107
32	Maluku Utara	55	162	217	56	97	153	16	34	50	33	74	107
33	Papua	66	118	184	60	81	141	11	33	44	34	58	92
34	Papua Barat	35	87	122	27	39	66	3	16	19	18	39	57
35	Papua Selatan	17	37	54	9	15	24	7	3	10	22	13	35
36	Papua Tengah	36	48	84	31	25	56	4	9	13	15	19	34
37	Papua Pegunungan	14	20	34	6	10	16	3	3	6	6	12	18
38	Papua Barat Daya	15	38	53	17	22	39	4	5	9	6	42	48
Indonesia		**6.565**	**23.005**	**29.570**	**10.996**	**11.145**	**22.141**	**3.757**	**7.436**	**11.193**	**8.397**	**19.269**	**27.666**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 15.a

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	297	2.065	2.362	118	685	803	415	2.750	3.165
2	Sumatera Utara	355	2.326	2.681	195	1.094	1.289	550	3.420	3.970
3	Sumatera Barat	200	1.510	1.710	118	720	838	318	2.230	2.548
4	Riau	197	1.402	1.599	141	894	1.035	338	2.296	2.634
5	Jambi	130	847	977	116	542	658	246	1.389	1.635
6	Sumatera Selatan	289	1.775	2.064	192	715	907	481	2.490	2.971
7	Bengkulu	88	542	630	60	312	372	148	854	1.002
8	Lampung	300	1.060	1.360	225	715	940	525	1.775	2.300
9	Kep. Bangka Belitung	107	461	568	69	248	317	176	709	885
10	Kepulauan Riau	163	625	788	139	436	575	302	1.061	1.363
11	DKI Jakarta	1.268	5.248	6.516	711	2.332	3.043	1.979	7.580	9.559
12	Jawa Barat	2.511	10.069	12.580	1.635	5.110	6.745	4.146	15.179	19.325
13	Jawa Tengah	2.159	11.530	13.689	1.327	6.468	7.795	3.486	17.998	21.484
14	DI Yogyakarta	262	2.138	2.400	225	1.578	1.803	487	3.716	4.203
15	Jawa Timur	1.753	10.315	12.068	1.223	5.596	6.819	2.976	15.911	18.887
16	Banten	513	2.090	2.603	298	1.309	1.607	811	3.399	4.210
17	Bali	265	1.287	1.552	300	650	950	565	1.937	2.502
18	Nusa Tenggara Barat	400	956	1.356	192	543	735	592	1.499	2.091
19	Nusa Tenggara Timur	342	1.275	1.617	143	596	739	485	1.871	2.356
20	Kalimantan Barat	225	719	944	168	471	639	393	1.190	1.583
21	Kalimantan Tengah	167	572	739	119	452	571	286	1.024	1.310
22	Kalimantan Selatan	321	1.108	1.429	195	575	770	516	1.683	2.199
23	Kalimantan Timur	422	1.382	1.804	279	941	1.220	701	2.323	3.024
24	Kalimantan Utara	85	296	381	70	186	256	155	482	637
25	Sulawesi Utara	196	632	828	116	324	440	312	956	1.268
26	Sulawesi Tengah	220	875	1.095	111	441	552	331	1.316	1.647
27	Sulawesi Selatan	369	2.359	2.728	294	1.659	1.953	663	4.018	4.681
28	Sulawesi Tenggara	184	1.122	1.306	177	768	945	361	1.890	2.251
29	Gorontalo	69	318	387	42	180	222	111	498	609
30	Sulawesi Barat	39	337	376	47	193	240	86	530	616
31	Maluku	93	389	482	51	286	337	144	675	819
32	Maluku Utara	63	320	383	56	227	283	119	547	666
33	Papua	117	345	462	67	211	278	184	556	740
34	Papua Barat	51	168	219	32	158	190	83	326	409
35	Papua Selatan	31	110	141	24	63	87	55	173	228
36	Papua Tengah	32	116	148	33	111	144	65	227	292
37	Papua Pegunungan	38	85	123	20	71	91	58	156	214
38	Papua Barat Daya	34	139	173	45	142	187	79	281	360
Indonesia		**14.355**	**68.913**	**83.268**	**9.373**	**38.002**	**47.375**	**23.728**	**106.915**	**130.643**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 15.b

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian[a]			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	98	829	927	38	267	305	136	1.096	1.232
2	Sumatera Utara	114	665	779	38	360	398	152	1.025	1.177
3	Sumatera Barat	44	370	414	22	200	222	66	570	636
4	Riau	43	385	428	43	218	261	86	603	689
5	Jambi	28	266	294	25	152	177	53	418	471
6	Sumatera Selatan	72	535	607	69	237	306	141	772	913
7	Bengkulu	27	183	210	22	111	133	49	294	343
8	Lampung	63	253	316	61	253	314	124	506	630
9	Kep. Bangka Belitung	13	85	98	20	60	80	33	145	178
10	Kepulauan Riau	20	67	87	21	88	109	41	155	196
11	DKI Jakarta	139	453	592	55	138	193	194	591	785
12	Jawa Barat	223	981	1.204	272	819	1.091	495	1.800	2.295
13	Jawa Tengah	171	1.045	1.216	144	764	908	315	1.809	2.124
14	DI Yogyakarta	23	155	178	16	132	148	39	287	326
15	Jawa Timur	164	1.014	1.178	147	689	836	311	1.703	2.014
16	Banten	51	181	232	62	265	327	113	446	559
17	Bali	32	139	171	43	79	122	75	218	293
18	Nusa Tenggara Barat	134	377	511	54	201	255	188	578	766
19	Nusa Tenggara Timur	164	599	763	56	201	257	220	800	1.020
20	Kalimantan Barat	75	263	338	53	158	211	128	421	549
21	Kalimantan Tengah	65	221	286	49	152	201	114	373	487
22	Kalimantan Selatan	67	321	388	78	215	293	145	536	681
23	Kalimantan Timur	57	257	314	54	158	212	111	415	526
24	Kalimantan Utara	19	78	97	18	44	62	37	122	159
25	Sulawesi Utara	42	206	248	31	105	136	73	311	384
26	Sulawesi Tengah	67	403	470	35	177	212	102	580	682
27	Sulawesi Selatan	84	830	914	78	545	623	162	1.375	1.537
28	Sulawesi Tenggara	87	633	720	79	341	420	166	974	1.140
29	Gorontalo	15	134	149	12	69	81	27	203	230
30	Sulawesi Barat	19	191	210	26	80	106	45	271	316
31	Maluku	40	181	221	28	112	140	68	293	361
32	Maluku Utara	29	183	212	24	99	123	53	282	335
33	Papua	38	115	153	12	49	61	50	164	214
34	Papua Barat	17	67	84	13	55	68	30	122	152
35	Papua Selatan	15	58	73	9	23	32	24	81	105
36	Papua Tengah	11	52	63	15	45	60	26	97	123
37	Papua Pegunungan	27	43	70	6	27	33	33	70	103
38	Papua Barat Daya	17	67	84	12	64	76	29	131	160
Indonesia		**2.414**	**12.885**	**15.299**	**1.840**	**7.752**	**9.592**	**4.254**	**20.637**	**24.891**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 15.c

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian[a]			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	166	1.021	1.187	63	334	397	229	1.355	1.584
2	Sumatera Utara	196	1.462	1.658	105	563	668	301	2.025	2.326
3	Sumatera Barat	125	933	1.058	63	369	432	188	1.302	1.490
4	Riau	122	789	911	67	414	481	189	1.203	1.392
5	Jambi	55	393	448	45	207	252	100	600	700
6	Sumatera Selatan	171	1.011	1.182	88	350	438	259	1.361	1.620
7	Bengkulu	44	252	296	26	124	150	70	376	446
8	Lampung	112	463	575	68	214	282	180	677	857
9	Kep. Bangka Belitung	55	197	252	23	86	109	78	283	361
10	Kepulauan Riau	84	288	372	57	167	224	141	455	596
11	DKI Jakarta	901	3.557	4.458	351	1.152	1.503	1.252	4.709	5.961
12	Jawa Barat	1.343	5.051	6.394	517	1.902	2.419	1.860	6.953	8.813
13	Jawa Tengah	816	4.554	5.370	356	1.811	2.167	1.172	6.365	7.537
14	DI Yogyakarta	109	892	1.001	72	441	513	181	1.333	1.514
15	Jawa Timur	846	4.755	5.601	393	1.812	2.205	1.239	6.567	7.806
16	Banten	331	1.324	1.655	134	654	788	465	1.978	2.443
17	Bali	136	712	848	112	262	374	248	974	1.222
18	Nusa Tenggara Barat	203	408	611	96	235	331	299	643	942
19	Nusa Tenggara Timur	110	442	552	50	227	277	160	669	829
20	Kalimantan Barat	123	341	464	80	215	295	203	556	759
21	Kalimantan Tengah	65	236	301	40	179	219	105	415	520
22	Kalimantan Selatan	183	526	709	75	224	299	258	750	1.008
23	Kalimantan Timur	223	603	826	92	305	397	315	908	1.223
24	Kalimantan Utara	40	153	193	25	82	107	65	235	300
25	Sulawesi Utara	144	370	514	70	179	249	214	549	763
26	Sulawesi Tengah	96	367	463	52	196	248	148	563	711
27	Sulawesi Selatan	219	1.172	1.391	143	787	930	362	1.959	2.321
28	Sulawesi Tenggara	52	267	319	51	249	300	103	516	619
29	Gorontalo	39	139	178	20	76	96	59	215	274
30	Sulawesi Barat	11	115	126	11	75	86	22	190	212
31	Maluku	31	127	158	13	112	125	44	239	283
32	Maluku Utara	20	109	129	20	90	110	40	199	239
33	Papua	52	138	190	24	90	114	76	228	304
34	Papua Barat	20	71	91	9	63	72	29	134	163
35	Papua Selatan	10	38	48	11	25	36	21	63	84
36	Papua Tengah	15	39	54	13	43	56	28	82	110
37	Papua Pegunungan	12	32	44	10	30	40	22	62	84
38	Papua Barat Daya	15	54	69	8	36	44	23	90	113
Indonesia		**7.295**	**33.401**	**40.696**	**3.453**	**14.380**	**17.833**	**10.748**	**47.781**	**58.529**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 16.a

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	402	412	814	12	14	26	6.551	5.900	12.451	6.965	6.326	13.291
2	Sumatera Utara	468	771	1.239	32	19	51	8.126	10.133	18.259	8.626	10.923	19.549
3	Sumatera Barat	255	593	848	3	7	10	4.143	4.977	9.120	4.401	5.577	9.978
4	Riau	255	348	603	10	9	19	5.858	6.501	12.359	6.123	6.858	12.981
5	Jambi	249	204	453	3	4	7	3.238	3.560	6.798	3.490	3.768	7.258
6	Sumatera Selatan	356	560	916	3	9	12	6.204	6.888	13.092	6.563	7.457	14.020
7	Bengkulu	171	232	403	3	6	9	1.419	2.083	3.502	1.593	2.321	3.914
8	Lampung	469	500	969	6	17	23	5.911	6.836	12.747	6.386	7.353	13.739
9	Kep. Bangka Belitung	143	198	341	0	0	0	2.077	2.423	4.500	2.220	2.621	4.841
10	Kepulauan Riau	260	243	503	3	6	9	3.072	3.193	6.265	3.335	3.442	6.777
11	DKI Jakarta	763	1.011	1.774	38	51	89	29.453	25.190	54.643	30.254	26.252	56.506
12	Jawa Barat	1.819	1.968	3.787	36	67	103	44.314	34.492	78.806	46.169	36.527	82.696
13	Jawa Tengah	1.406	1.513	2.919	33	56	89	41.564	36.083	77.647	43.003	37.652	80.655
14	DI Yogyakarta	310	387	697	14	31	45	6.831	7.084	13.915	7.155	7.502	14.657
15	Jawa Timur	1.530	1.719	3.249	67	80	147	45.763	38.875	84.638	47.360	40.674	88.034
16	Banten	452	634	1.086	6	12	18	10.839	9.946	20.785	11.297	10.592	21.889
17	Bali	303	319	622	12	20	32	6.965	8.338	15.303	7.280	8.677	15.957
18	Nusa Tenggara Barat	350	256	606	10	10	20	5.232	3.603	8.835	5.592	3.869	9.461
19	Nusa Tenggara Timur	244	323	567	0	2	2	4.424	3.918	8.342	4.668	4.243	8.911
20	Kalimantan Barat	343	220	563	3	10	13	3.530	3.990	7.520	3.876	4.220	8.096
21	Kalimantan Tengah	245	205	450	0	1	1	2.658	3.127	5.785	2.903	3.333	6.236
22	Kalimantan Selatan	379	314	693	12	16	28	4.677	4.268	8.945	5.068	4.598	9.666
23	Kalimantan Timur	373	342	715	9	5	14	5.766	6.121	11.887	6.148	6.468	12.616
24	Kalimantan Utara	93	88	181	1	4	5	1.485	1.355	2.840	1.579	1.447	3.026
25	Sulawesi Utara	194	331	525	0	5	5	2.879	3.077	5.956	3.073	3.413	6.486
26	Sulawesi Tengah	215	254	469	0	6	6	2.294	2.678	4.972	2.509	2.938	5.447
27	Sulawesi Selatan	390	546	936	3	5	8	6.101	7.230	13.331	6.494	7.781	14.275
28	Sulawesi Tenggara	269	330	599	2	5	7	1.958	2.386	4.344	2.229	2.721	4.950
29	Gorontalo	82	138	220	1	0	1	1.110	1.393	2.503	1.193	1.531	2.724
30	Sulawesi Barat	79	102	181	0	0	0	985	1.287	2.272	1.064	1.389	2.453
31	Maluku	145	149	294	3	3	6	1.604	1.638	3.242	1.752	1.790	3.542
32	Maluku Utara	121	141	262	0	1	1	789	957	1.746	910	1.099	2.009
33	Papua	150	147	297	11	5	16	1.159	1.144	2.303	1.320	1.296	2.616
34	Papua Barat	128	78	206	0	0	0	913	868	1.781	1.041	946	1.987
35	Papua Selatan	46	54	100	0	0	0	342	435	777	388	489	877
36	Papua Tengah	140	101	241	5	2	7	712	714	1.426	857	817	1.674
37	Papua Pegunungan	137	99	236	0	0	0	412	317	729	549	416	965
38	Papua Barat Daya	77	69	146	0	0	0	654	631	1.285	731	700	1.431
Indonesia		**13.811**	**15.899**	**29.710**	**341**	**488**	**829**	**282.012**	**263.639**	**545.651**	**296.164**	**280.026**	**576.190**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.b

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	72	83	155	0	1	1	1.308	1.558	2.866	1.380	1.642	3.022
2	Sumatera Utara	53	112	165	0	0	0	889	1.189	2.078	942	1.301	2.243
3	Sumatera Barat	23	82	105	0	0	0	949	1.043	1.992	972	1.125	2.097
4	Riau	47	53	100	0	0	0	1.028	1.009	2.037	1.075	1.062	2.137
5	Jambi	48	37	85	0	0	0	415	487	902	463	524	987
6	Sumatera Selatan	87	110	197	0	0	0	997	1.370	2.367	1.084	1.480	2.564
7	Bengkulu	43	83	126	0	0	0	318	672	990	361	755	1.116
8	Lampung	107	119	226	0	0	0	1.047	1.317	2.364	1.154	1.436	2.590
9	Kep. Bangka Belitung	26	28	54	0	0	0	402	487	889	428	515	943
10	Kepulauan Riau	48	58	106	0	0	0	508	488	996	556	546	1.102
11	DKI Jakarta	13	36	49	0	0	0	2.765	1.171	3.936	2.778	1.207	3.985
12	Jawa Barat	382	340	722	0	0	0	5.266	4.078	9.344	5.648	4.418	10.066
13	Jawa Tengah	145	190	335	0	0	0	5.085	3.904	8.989	5.230	4.094	9.324
14	DI Yogyakarta	42	79	121	0	0	0	819	664	1.483	861	743	1.604
15	Jawa Timur	62	72	134	0	0	0	6.176	4.674	10.850	6.238	4.746	10.984
16	Banten	86	142	228	0	0	0	1.910	1.036	2.946	1.996	1.178	3.174
17	Bali	31	34	65	0	0	0	1.387	1.445	2.832	1.418	1.479	2.897
18	Nusa Tenggara Barat	114	71	185	0	0	0	1.272	928	2.200	1.386	999	2.385
19	Nusa Tenggara Timur	36	37	73	0	0	0	1.339	983	2.322	1.375	1.020	2.395
20	Kalimantan Barat	76	41	117	0	2	2	790	924	1.714	866	967	1.833
21	Kalimantan Tengah	58	25	83	0	0	0	525	635	1.160	583	660	1.243
22	Kalimantan Selatan	81	73	154	0	0	0	764	774	1.538	845	847	1.692
23	Kalimantan Timur	86	76	162	0	0	0	929	1.118	2.047	1.015	1.194	2.209
24	Kalimantan Utara	23	20	43	0	0	0	286	246	532	309	266	575
25	Sulawesi Utara	19	38	57	0	0	0	353	463	816	372	501	873
26	Sulawesi Tengah	48	33	81	0	1	1	498	577	1.075	546	611	1.157
27	Sulawesi Selatan	30	70	100	0	0	0	1.202	1.553	2.755	1.232	1.623	2.855
28	Sulawesi Tenggara	70	95	165	0	0	0	532	623	1.155	602	718	1.320
29	Gorontalo	11	27	38	0	0	0	233	438	671	244	465	709
30	Sulawesi Barat	30	34	64	0	0	0	411	715	1.126	441	749	1.190
31	Maluku	27	25	52	0	1	1	366	352	718	393	378	771
32	Maluku Utara	35	37	72	0	0	0	168	195	363	203	232	435
33	Papua	18	24	42	0	0	0	181	152	333	199	176	375
34	Papua Barat	19	7	26	0	0	0	206	209	415	225	216	441
35	Papua Selatan	6	8	14	0	0	0	79	84	163	85	92	177
36	Papua Tengah	54	40	94	0	0	0	144	137	281	198	177	375
37	Papua Pegunungan	65	26	91	0	0	0	149	84	233	214	110	324
38	Papua Barat Daya	13	13	26	0	0	0	164	154	318	177	167	344
Indonesia		**2.234**	**2.478**	**4.712**	**0**	**5**	**5**	**41.860**	**37.936**	**79.796**	**44.094**	**40.419**	**84.513**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.c

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	196	196	392	5	3	8	4.325	3.308	7.633	4.526	3.507	8.033
2	Sumatera Utara	259	402	661	5	4	9	5.664	6.947	12.611	5.928	7.353	13.281
3	Sumatera Barat	157	369	526	1	0	1	2.520	2.967	5.487	2.678	3.336	6.014
4	Riau	142	178	320	3	1	4	3.760	4.058	7.818	3.905	4.237	8.142
5	Jambi	103	104	207	0	0	0	1.690	2.019	3.709	1.793	2.123	3.916
6	Sumatera Selatan	159	282	441	0	1	1	4.300	4.272	8.572	4.459	4.555	9.014
7	Bengkulu	59	91	150	0	0	0	753	883	1.636	812	974	1.786
8	Lampung	124	231	355	0	0	0	3.385	3.475	6.860	3.509	3.706	7.215
9	Kep. Bangka Belitung	74	111	185	0	0	0	1.184	1.042	2.226	1.258	1.153	2.411
10	Kepulauan Riau	91	102	193	0	0	0	1.666	1.572	3.238	1.757	1.674	3.431
11	DKI Jakarta	670	870	1.540	24	41	65	20.525	16.283	36.808	21.219	17.194	38.413
12	Jawa Barat	843	1.045	1.888	9	15	24	28.452	20.852	49.304	29.304	21.912	51.216
13	Jawa Tengah	936	882	1.818	8	8	16	23.676	18.317	41.993	24.620	19.207	43.827
14	DI Yogyakarta	166	186	352	3	9	12	3.770	3.452	7.222	3.939	3.647	7.586
15	Jawa Timur	870	1.057	1.927	6	13	19	24.251	18.892	43.143	25.127	19.962	45.089
16	Banten	189	284	473	2	1	3	6.699	6.344	13.043	6.890	6.629	13.519
17	Bali	214	228	442	2	5	7	4.113	5.121	9.234	4.329	5.354	9.683
18	Nusa Tenggara Barat	152	145	297	3	5	8	3.068	1.979	5.047	3.223	2.129	5.352
19	Nusa Tenggara Timur	96	141	237	0	1	1	2.253	2.102	4.355	2.349	2.244	4.593
20	Kalimantan Barat	130	118	248	0	0	0	1.755	2.226	3.981	1.885	2.344	4.229
21	Kalimantan Tengah	108	107	215	0	0	0	1.425	1.618	3.043	1.533	1.725	3.258
22	Kalimantan Selatan	172	117	289	0	0	0	2.897	2.486	5.383	3.069	2.603	5.672
23	Kalimantan Timur	150	147	297	0	1	1	3.302	3.231	6.533	3.452	3.379	6.831
24	Kalimantan Utara	40	33	73	0	0	0	904	777	1.681	944	810	1.754
25	Sulawesi Utara	111	189	300	0	2	2	2.014	2.003	4.017	2.125	2.194	4.319
26	Sulawesi Tengah	95	149	244	0	0	0	1.391	1.578	2.969	1.486	1.727	3.213
27	Sulawesi Selatan	236	337	573	3	3	6	3.829	4.566	8.395	4.068	4.906	8.974
28	Sulawesi Tenggara	94	124	218	0	0	0	928	1.034	1.962	1.022	1.158	2.180
29	Gorontalo	47	82	129	1	0	1	701	729	1.430	749	811	1.560
30	Sulawesi Barat	23	39	62	0	0	0	397	408	805	420	447	867
31	Maluku	63	62	125	0	1	1	829	879	1.708	892	942	1.834
32	Maluku Utara	35	44	79	0	1	1	444	611	1.055	479	656	1.135
33	Papua	42	46	88	1	0	1	652	695	1.347	695	741	1.436
34	Papua Barat	29	20	49	0	0	0	456	397	853	485	417	902
35	Papua Selatan	1	3	4	0	0	0	168	255	423	169	258	427
36	Papua Tengah	20	21	41	1	0	1	378	375	753	399	396	795
37	Papua Pegunungan	7	12	19	0	0	0	140	119	259	147	131	278
38	Papua Barat Daya	19	11	30	0	0	0	335	361	696	354	372	726
Indonesia		**6.922**	**8.565**	**15.487**	**77**	**115**	**192**	**168.999**	**148.233**	**317.232**	**175.998**	**156.913**	**332.911**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.d

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	13	73	86	0	0	0	0	1	1
2	Sumatera Utara	6	27	33	0	0	0	0	1	1
3	Sumatera Barat	2	23	25	1	0	1	0	2	2
4	Riau	8	34	42	1	0	1	0	0	0
5	Jambi	2	18	20	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	12	36	48	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	4	7	11	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	4	10	14	0	6	6	1	29	30
9	Kep. Bangka Belitung	3	9	12	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	4	15	19	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	15	134	149	19	20	39	18	64	82
12	Jawa Barat	7	98	105	0	1	1	4	11	15
13	Jawa Tengah	30	139	169	7	13	20	3	11	14
14	DI Yogyakarta	14	104	118	1	4	5	0	0	0
15	Jawa Timur	26	115	141	3	15	18	14	111	125
16	Banten	7	36	43	0	0	0	0	1	1
17	Bali	5	28	33	2	3	5	1	4	5
18	Nusa Tenggara Barat	2	24	26	1	0	1	0	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	6	6	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	5	17	22	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	1	17	18	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	2	38	40	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	18	19	0	0	0	0	3	3
24	Kalimantan Utara	2	1	3	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	9	11	1	1	2	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	11	15	26	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	8	13	21	0	0	0	2	2	4
28	Sulawesi Tenggara	3	13	16	1	0	1	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	1	1	2	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	8	8	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	6	6	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	3	3	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	1	3	4	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	2	2	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	2	2	4	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	1	1	0	0	0	29	34	63
38	Papua Barat Daya	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Indonesia	**203**	**1.104**	**1.307**	**37**	**63**	**100**	**72**	**275**	**347**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.e

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	3	21	24	0	0	0	0	1	1
2	Sumatera Utara	1	2	3	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Riau	3	3	6	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	2	3	5	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	2	2	0	0	0	0	1	1
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	4	21	25	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	1	1	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	1	1	0	0	0
14	DI Yogyakarta	6	50	56	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	3	19	22	0	8	8	10	52	62
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	4	4	0	0	0	0	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	1	1	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	1	2	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	1	1	2	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	3	3	0	0	0	0	1	1
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	1	0	1	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	29	33	62
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**25**	**133**	**158**	**0**	**9**	**9**	**39**	**89**	**128**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.f

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	5	43	48	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	5	24	29	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	1	18	19	0	0	0	0	0	0
4	Riau	2	27	29	1	0	1	0	0	0
5	Jambi	1	12	13	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	10	28	38	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	3	6	9	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	4	4	8	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	1	8	9	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	1	12	13	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	10	80	90	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	5	77	82	0	1	1	0	1	1
13	Jawa Tengah	26	125	151	1	0	1	1	0	1
14	DI Yogyakarta	5	31	36	1	4	5	0	0	0
15	Jawa Timur	18	73	91	1	2	3	3	2	5
16	Banten	6	31	37	0	0	0	0	0	0
17	Bali	3	20	23	0	2	2	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	17	17	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	6	6	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	3	11	14	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	1	10	11	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	32	33	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	12	13	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	0	1	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	8	10	1	1	2	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	10	13	23	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	5	6	11	0	0	0	2	1	3
28	Sulawesi Tenggara	1	10	11	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	1	1	2	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	4	4	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	5	5	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	3	3	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	3	3	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	2	2	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	1	2	3	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	1	1	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**133**	**766**	**899**	**5**	**10**	**15**	**6**	**4**	**10**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.g

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2023

No	Nama Poltekkes	Program Studi																				Total
		Keperawatan	Kebidanan	Kesehatan Gigi	Analis Farmasi Dan Makanan	Farmasi	Jamu	Sanitasi	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Teknologi Laboratorium Medis	Asuransi Kesehatan	Teknik Gigi	Radiologi	Rekam dan Informasi Kesehatan	Teknologi Elektro Medis	Ortetik Prostetik	Teknologi Bank Darah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	279	138	41		77	0	38	50	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	694
2	Medan	203	154	93		110	0	41	109	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	874
3	Padang	165	152	71		0	0	68	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495
4	Riau	110	68	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249
5	Jambi	66	33	32		82	0	46	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	310
6	Palembang	289	164	72		73	0	65	61	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	792
7	Bengkulu	154	151	0	0	61	0	57	87	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	595
8	Tanjung Karang	196	117	44	0	50	0	135	136	0	0	0	0	44	0	35	0	0	0	0	0	757
9	Tanjung Pinang	59	62			0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
10	Pangkal Pinang	69	36			39	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
11	Jakarta I	130	73	32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	250
12	Jakarta II	0	0	0	85	98	0	65	78	0	0	0	0	0	0	55	35	0	33	0	0	449
13	Jakarta III	187	388	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	900
14	Bandung	171	187	43	-	71	-	74	73	-	-	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	863
15	Tasikmalaya	158	76	38	0	77	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	647
16	Semarang	767	346	93		0	0	97	81	0	0	0	0	43	0	0	181	178	0	0	49	1.835
17	Surakarta	91	58		92	99	60	0	0	89	104	109	66	0	0	0	0	0	0	67	0	835
18	Yogyakarta	42	47	39	0	0	0	75	43	0	0	0	0	37	0	0	0	47	0	0	0	330
19	Surabaya	307	166	49	0	0	0	155	103	0	0	0	0	42	0	0	0	0	70	0	0	892
20	Malang	460	99		60	0	0	0	128	0	0	0	0	0	95	0	0	162	0	0	112	1.116
21	Banten	90	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	288
22	Denpasar	87	38	41		0	0	8	44	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	350
23	Mataram	130	80	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	321
24	Kupang	328	145	85	0	87	0	89	89	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	931
25	Pontianak	74	54	94	0	0	0	21	65	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	404
26	Palangkaraya	64	202	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353
27	Banjarmasin	37	55	68	0	0	0	91	45	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	335
28	Kalimantan Timur	102	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	271
29	Manado	77	87	45	0	79	0	17	27	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	424
30	Palu	133	59	0	0	0	0	29	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
31	Makassar	264	103	48		83	0	44	47	44	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	685
32	Kendari	127	28			0	0	0	128	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	374
33	Gorontalo	89	98	0	0	83	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331
34	Mamuju	30	26	0	0	0	0	24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
35	Maluku	45	0			0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
36	Ternate	77	79	0	0	0	0	48	50	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	300
37	Jayapura	370	105	0	0	41	0	30	18	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	642
38	Sorong	144	67	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239
Total		**6.171**	**3.891**	**1.028**	**237**	**1.210**	**60**	**1.426**	**2.079**	**252**	**104**	**109**	**66**	**1.970**	**95**	**90**	**216**	**541**	**207**	**82**	**161**	**19.995**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.h

JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan		Keteknisian Medis	Kefarmasian	Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Gizi	Keterapian Fisik				Teknik Biomedika				Jumlah
			Keperawatan	Keperawatan Anestesiologi	Terapis Gigi	Farmasi	Sanitasi Lingkungan	Promosi Kesehatan	Gizi & Dietetika	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Teknologi Laboratorium Medis	Teknologi Rekayasa Elektromedis	Teknologi Radiologi Pencitraan	Ortotik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)
1	Aceh	40	41		108	0	52	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	377
2	Medan	96	61		0	0	64	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	389
3	Padang	0	62		0	0	59	34	77	0	0	0	0	0	0	0	0	232
4	Riau				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	304	107		44	0	64	29	0	0	0	0	0	89	0	0	0	637
6	Palembang	50			0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	95
7	Bengkulu	75	36	0	0	0	0	71	66	0	0	0	0	0	0	0	0	248
8	Tanjung Karang	0	96	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	237
9	Jakarta II	0	0	0	0	0	47	0	69	0	0	0	0	0	45	69	0	230
10	Bandung	36	35	-	88	-	70	44	121	-	-	-	-	133	-	-	-	527
11	Tasikmalaya	32	34	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
12	Semarang	318	179		0	0	96	0	97	0	0	0	0	87	0	158	0	935
13	Surakarta	99	80		0	0	0	0	0	158	106	100	76	0	0	0	81	700
14	Yogyakarta	187	59	111	118	0	102	0	94	0	0	0	0	80	0	0	0	751
15	Surabaya	153	39	0	63	0	57	0	0	0	0	0	0	100	115	0	0	527
16	Malang	239	103		0	0	0	73	107	0	0	0	0	0	0	0	0	522
17	Banten	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
18	Denpasar	119	111		0	0	18	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	336
19	Mataram	108	71		0	0	0	0	110	0	0	0	0	94	0	0	0	383
20	Kupang	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
21	Pontianak	63	88	0	0	0	62	0	75	0	0	0	0	84	0	0	0	372
22	Palangkaraya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Banjarmasin	0	0	0	69	0	45	0	49	0	0	0	0	98	0	0	0	261
24	Kalimantan Timur	192	178	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	475
25	Manado	0	28	0	0	0	100	22	91	0	0	0	0	0	0	0	0	241
26	Palu	98	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
27	Makassar				87	52	90	0	91	89	0	0	0	99	0	0	0	508
28	Gorontalo	0	0	0	0	0	25	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	47
29	Jayapura	91	94	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	208
30	Sorong	79	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
Total		**2.379**	**1.738**	**111**	**612**	**52**	**1.043**	**273**	**1.634**	**247**	**106**	**100**	**76**	**913**	**160**	**227**	**81**	**9.752**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.i

JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

No	Poltekkes	Profesi Bidan	Keperawatan	Gizi	Keterapian Fisik	Jumlah
			Ners	Dietisien	Fisioterapi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0	0	0	0	0
2	Medan	137	0	0	0	137
3	Padang	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0
5	Jambi	205	88	0	0	293
6	Palembang	39	0	0	0	39
7	Bengkulu	58	47	0	0	105
8	Tanjung Karang	0	71	0	0	71
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	0	0	0	0
12	Jakarta II	0	0	0	0	0
13	Jakarta III	0	0	0	0	0
14	Bandung	44	12	14	0	70
15	Tasikmalaya	114	0	0	0	114
16	Semarang	392	271	0	0	663
17	Surakarta	306	86	0	75	467
18	Yogyakarta	238	141	33	0	412
19	Surabaya	221	72	0	0	293
20	Malang	0	96	22	0	118
21	Banten	0	48	0	0	48
22	Denpasar	110	39	0	0	149
23	Mataram	68	96	0	0	164
24	Kupang	0	54	0	0	54
25	Pontianak	144	161	0	0	305
26	Palangkaraya	0	0	0	0	0
27	Banjarmasin	0	0	0	0	0
28	Kalimantan Timur	133	207	0	0	340
29	Manado	0	108	0	0	108
30	Palu	0	129	0	0	129
31	Makassar	48	0	32	68	148
32	Kendari	0	0	0	0	0
33	Gorontalo	0	0	0	0	0
34	Mamuju	0	0	0	0	0
35	Maluku	0	0	0	0	0
36	Ternate	0	0	0	0	0
37	Jayapura	0	109	0	0	109
38	Sorong	0	0	0	0	0
Total		**2.257**	**1.835**	**101**	**143**	**4.336**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.j

JUMLAH LULUSAN PROGRAM MAGISTER TERAPANPOLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan	Keterapian Fisik		Jumlah
				Imaging Diagnostik	Kesehatan Terapis Gigi dan Mulut	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Semarang	60	17	41	33	151
Total		**60**	**17**	**41**	**33**	**151**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 16.k

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI*
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Rumpun Tenaga Kesehatan												Jumlah
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	700	125	2.635	1.059	207	655	0	192	73	9	0	0	5.655
2	Sumatera Utara	1.732	720	6.712	16.062	4.472	2.957	0	799	335	819	0	0	34.608
3	Sumatera Barat	856	458	3.157	1.792	1.672	1.040	0	342	276	130	0	0	9.723
4	Riau	507	0	2.261	797	496	508	0	292	59	111	0	0	5.031
5	Jambi	311	0	1.198	879	401	311	0	71	39	25	0	0	3.235
6	Sumatera Selatan	679	109	1.864	967	861	714	0	234	104	34	0	0	5.566
7	Bengkulu	128	0	1.315	502	233	289	0	126	66	0	0	0	2.659
8	Lampung	945	0	3.075	777	582	187	0	295	68	0	0	0	5.929
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	225	78	41	0	0	59	0	0	0	0	403
10	Kepulauan Riau	84	0	392	143	61	63	0	0	0	0	0	0	743
11	DKI Jakarta	4.365	1.047	7.774	3.919	5.387	3.666	0	1.183	830	689	0	0	28.860
12	Jawa Barat	2.229	802	14.564	7.936	7.621	1.478	0	1.149	838	376	0	0	36.993
13	Jawa Tengah	2.514	749	17.024	6.524	7.812	2.569	176	1.627	2.014	2.117	22	0	43.148
14	DI Yogyakarta	1.720	670	3.908	1.805	3.674	1.187	0	1.030	1.185	555	0	0	15.734
15	Jawa Timur	3.588	1.756	17.332	8.910	6.944	2.344	0	1.676	1.483	666	0	50	44.749
16	Banten	607	0	4.545	943	939	998	0	87	230	11	0	0	8.360
17	Bali	1.295	257	3.074	1.379	793	332	0	136	114	191	0	14	7.585
18	Nusa Tenggara Barat	412	0	1.573	522	343	108	0	290	87	0	0	0	3.335
19	Nusa Tenggara Timur	133	0	1.267	559	247	425	0	94	0	0	0	0	2.725
20	Kalimantan Barat	240	0	1.317	438	405	226	0	211	78	0	0	0	2.915
21	Kalimantan Tengah	173	0	418	351	87	28	0	76	0	0	0	0	1.133
22	Kalimantan Selatan	285	208	2.010	686	1.208	976	0	185	263	21	0	0	5.842
23	Kalimantan Timur	194	50	1.636	823	789	877	0	37	0	33	0	0	4.439
24	Kalimantan Utara	0	0	166	47	28	0	0	0	0	0	0	0	241
25	Sulawesi Utara	241	75	2.207	332	323	547	0	104	0	5	0	0	3.834
26	Sulawesi Tengah	352	0	1.206	482	353	517	0	250	0	0	0	0	3.160
27	Sulawesi Selatan	1.691	337	5.769	3.654	3.096	2.748	0	422	402	336	0	0	18.455
28	Sulawesi Tenggara	186	0	772	353	900	831	0	205	54	14	0	0	3.315
29	Gorontalo	39	0	732	173	212	321	0	158	69	0	0	0	1.704
30	Sulawesi Barat	0	0	626	94	1	122	0	36	0	0	0	0	879
31	Maluku	241	0	1.004	262	123	206	0	0	0	0	0	0	1.836
32	Maluku Utara	72	0	135	117	12	95	0	52	0	0	0	0	483
33	Papua	183	0	919	148	166	329	0	47	0	0	0	0	1.792
34	Papua Barat	5	0	233	114	17	23	0	39	0	0	0	0	431
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Indonesia	**26.707**	**7.363**	**113.045**	**63.627**	**50.506**	**27.677**	**176**	**11.504**	**8.667**	**6.142**	**22**	**64**	**315.500**

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023
Catatan : * = lulusan jenjang DIII, DIV, S1, S2, S3, spesialis, dan profesi

Lampiran 16.l

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	13	5	8	9	0	10	0	0	0	41	0	86
2	Sumatera Utara	19	17	20	25	0	23	13	16	0	228	22	383
3	Sumatera Barat	21	15	15	19	0	0	8	6	0	94	0	178
4	Riau	0	8	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	26	0	8	12	0	10	0	3	0	57	0	116
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	90	30	57	96	0	39	13	8	19	436	98	886
12	Jawa Barat	25	46	29	76	0	28	9	7	20	131	76	447
13	Jawa Tengah	50	28	62	31	0	53	24	7	17	200	0	472
14	DI Yogyakarta	38	30	53	59	0	33	12	8	0	254	61	548
15	Jawa Timur	54	14	38	64	0	26	32	9	26	312	80	655
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	40	34	23	43	0	41	5	5	0	273	0	464
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	10	6	2	5	0	3	0	0	0	5	0	31
23	Kalimantan Timur	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	43	18	35	19	0	0	0	0	7	48	0	170
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	44	14	19	51	0	14	29	7	0	244	40	462
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**473**	**265**	**369**	**510**	**0**	**280**	**145**	**76**	**89**	**2.328**	**377**	**4.912**

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Lampiran 19.a

CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	PBI	Penduduk yang Didaftarkan Pemda	Bukan PBI						Peserta Aktif		Peserta Tidak Aktif		Total Aktif dan Tidak Aktif	%
					Pekerja Penerima Upah (PPU)		Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)		Bukan Pekerja							
					Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Total	%	Total	%		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	5.515.839	2.734.385	1.668.646	812.059	616	17.440	495.883	119.232	26	5.351.762	97,0	496.525	9,0	5.848.287	106,0
2	Sumatera Utara	15.471.582	4.645.082	1.825.106	2.359.454	6.518	977.203	2.979.776	359.661	2.256	10.166.506	65,7	2.988.550	19,3	13.155.056	85,0
3	Sumatera Barat	5.750.326	1.768.993	921.685	844.893	1.445	351.484	1.047.418	124.121	247	4.011.176	69,8	1.049.110	18,2	5.060.286	88,0
4	Riau	6.861.237	2.080.931	1.244.825	1.428.782	6.052	480.486	1.170.745	85.863	1.185	5.320.887	77,5	1.177.982	17,2	6.498.869	94,7
5	Jambi	3.760.275	1.034.113	298.329	596.702	1.513	277.846	854.709	71.661	291	2.278.651	60,6	856.513	22,8	3.135.164	83,4
6	Sumatera Selatan	8.889.913	3.633.211	1.436.441	1.207.846	5.033	364.910	1.457.994	124.796	1.211	6.767.204	76,1	1.464.238	16,5	8.231.442	92,6
7	Bengkulu	2.098.089	886.212	248.962	351.152	1.302	110.265	394.782	37.165	55	1.633.756	77,9	396.139	18,9	2.029.895	96,7
8	Lampung	9.051.459	3.764.063	828.599	878.531	2.570	401.910	2.453.294	142.799	999	6.015.902	66,5	2.456.863	27,1	8.472.765	93,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.521.723	279.262	475.445	266.135	508	139.186	272.344	23.624	122	1.183.652	77,8	272.974	17,9	1.456.626	95,7
10	Kepulauan Riau	2.178.610	450.508	231.437	791.494	2.291	251.180	425.621	17.767	672	1.742.386	80,0	428.584	19,7	2.170.970	99,6
11	DKI Jakarta	11.337.563	1.298.346	4.564.835	9.623.027	16.942	793.946	2.870.553	313.719	1.811	16.593.873	146,4	2.889.306	25,5	19.483.179	171,8
12	Jawa Barat	49.899.992	15.930.373	6.253.334	7.766.529	27.802	3.055.878	10.518.335	885.260	12.814	33.891.374	67,9	10.558.951	21,2	44.450.325	89,1
13	Jawa Tengah	38.125.191	14.980.628	3.124.007	5.481.106	8.954	2.490.079	6.984.898	695.700	2.670	26.771.520	70,2	6.996.522	18,4	33.768.042	88,6
14	D I Yogyakarta	3.722.296	1.664.779	359.596	780.817	906	248.166	402.357	141.665	349	3.195.023	85,8	403.612	10,8	3.598.635	96,7
15	Jawa Timur	41.644.099	15.066.782	5.506.646	5.643.650	15.561	2.380.674	7.393.604	789.976	4.523	29.387.728	70,6	7.413.688	17,8	36.801.416	88,4
16	Banten	12.469.997	3.105.071	1.932.104	3.322.688	6.322	881.293	2.868.988	154.068	4.657	9.395.224	75,3	2.879.967	23,1	12.275.191	98,4
17	Bali	4.344.554	884.406	1.160.658	1.089.082	3.350	460.110	661.824	100.994	345	3.695.250	85,1	665.519	15,3	4.360.769	100,4
18	Nusa Tenggara Barat	5.619.450	2.665.235	709.194	594.517	3.490	94.642	1.076.202	73.999	156	4.137.587	73,6	1.079.848	19,2	5.217.435	92,8
19	Nusa Tenggara Timur	5.609.049	3.312.734	644.947	605.593	3.649	74.848	675.663	110.394	151	4.748.516	84,7	679.463	12,1	5.427.979	96,8
20	Kalimantan Barat	5.557.277	1.729.602	632.959	1.043.377	1.344	318.961	1.051.728	63.710	422	3.788.609	68,2	1.053.494	19,0	4.842.103	87,1
21	Kalimantan Tengah	2.753.049	529.839	585.789	782.194	2.912	126.495	788.451	51.940	75	2.076.257	75,4	791.438	28,7	2.867.695	104,2
22	Kalimantan Selatan	4.234.214	812.979	1.094.883	837.189	2.098	276.736	802.847	92.387	180	3.114.174	73,5	805.125	19,0	3.919.299	92,6
23	Kalimantan Timur	4.007.736	600.380	959.839	1.435.804	2.238	371.552	768.338	61.269	536	3.428.844	85,6	771.112	19,2	4.199.956	104,8
24	Kalimantan Utara	747.415	192.652	161.178	205.585	327	53.828	141.784	10.480	17	623.723	83,5	142.128	19,0	765.851	102,5
25	Sulawesi Utara	2.660.415	848.829	438.747	458.443	1.141	202.187	577.044	84.643	143	2.032.849	76,4	578.328	21,7	2.611.177	98,1
26	Sulawesi Tengah	3.154.499	1.308.498	526.644	622.715	1.021	122.316	550.998	49.726	97	2.629.899	83,4	552.116	17,5	3.182.015	100,9
27	Sulawesi Selatan	9.400.283	606.195	314.275	179.214	235	51.470	256.631	22.266	29	1.173.420	12,5	256.895	2,7	1.430.315	15,2
28	Sulawesi Tenggara	2.753.707	3.233.788	2.041.198	1.241.012	4.020	561.282	1.699.678	218.197	611	7.295.477	264,9	1.704.309	61,9	8.999.786	326,8
29	Gorontalo	1.237.185	637.380	260.698	184.560	323	28.676	105.790	13.199	27	1.124.513	90,9	106.140	8,6	1.230.653	99,5
30	Sulawesi Barat	1.451.657	1.151.272	545.287	445.777	869	80.966	414.021	55.154	57	2.278.456	157,0	414.947	28,6	2.693.403	185,5
31	Maluku	1.911.943	877.016	212.590	297.702	1.336	45.120	313.357	48.444	2.979	1.480.872	77,5	317.672	16,6	1.798.544	94,1
32	Maluku Utara	1.365.091	367.692	270.230	334.523	1.480	27.353	269.145	16.324	22	1.016.122	74,4	270.647	19,8	1.286.769	94,3
33	Papua	4.418.600	2.995.657	401.090	548.159	3.070	70.081	682.191	43.651	196	4.058.638	91,9	685.457	15,5	4.744.095	107,4
34	Papua Barat	1.183.300	676.831	171.484	238.720	1.040	26.179	163.878	19.144	298	1.132.358	95,7	165.216	14,0	1.297.574	109,7
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lain-lain/Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**280.707.615**	**96.753.724**	**42.051.687**	**53.299.031**	**138.278**	**16.214.748**	**53.590.871**	**5.222.998**	**40.229**	213.542.188	76,1	53.769.378	19,2	**267.311.566**	**95,2**

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Bulan Desember 2023

Lampiran 19.b

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Dokter Praktik Perorangan	Klinik Pratama	Puskesmas	RS Tipe D Pratama	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Aceh	68	200	364	1	3	636
2	Sumatera Utara	120	577	612	3	9	1.321
3	Sumatera Barat	101	156	279	1	39	576
4	Riau	70	291	234	-	18	613
5	Jambi	66	82	205	-	18	371
6	Sumatera Selatan	235	247	348	2	33	865
7	Bengkulu	99	58	179	-	17	353
8	Lampung	117	234	316	-	6	673
9	Kepulauan Bangka Belitung	31	38	64	2	5	140
10	Kepulauan Riau	7	130	89	1	1	228
11	DKI Jakarta	9	377	44	-	1	431
12	Jawa Barat	433	1.489	1.093	-	61	3.076
13	Jawa Tengah	1.101	800	879	-	315	3.095
14	D I Yogyakarta	107	132	121	-	34	394
15	Jawa Timur	686	904	972	-	231	2.793
16	Banten	8	437	249	-	1	695
17	Bali	300	142	120	1	98	661
18	Nusa Tenggara Barat	96	76	175	1	13	361
19	Nusa Tenggara Timur	88	81	429	8	26	632
20	Kalimantan Barat	95	82	249	1	18	445
21	Kalimantan Tengah	66	77	204	4	8	359
22	Kalimantan Selatan	153	107	241	-	31	532
23	Kalimantan Timur	101	170	188	3	47	509
24	Kalimantan Utara	28	25	57	4	6	120
25	Sulawesi Utara	145	68	198	-	33	444
26	Sulawesi Tengah	42	57	218	4	9	330
27	Sulawesi Selatan	167	240	471	5	73	956
28	Sulawesi Tenggara	59	40	306	-	15	420
29	Gorontalo	29	34	93	-	5	161
30	Sulawesi Barat	32	22	98	1	9	162
31	Maluku	32	27	220	1	7	287
32	Maluku Utara	30	22	147	1	8	208
33	Papua	52	62	449	4	11	578
34	Papua Barat	22	25	164	1	2	214
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**4.795**	**7.509**	**10.075**	**49**	**1.211**	**23.639**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2024

Lampiran 19.c

FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	RS TNI POLRI	RS Khusus	Klinik Utama	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	25	34	5	6	16	86
2	Sumatera Utara	41	108	8	13	8	178
3	Sumatera Barat	27	18	5	23	12	85
4	Riau	18	35	3	11	6	73
5	Jambi	15	16	2	2	2	37
6	Sumatera Selatan	29	29	4	15	8	85
7	Bengkulu	11	8	2	2	3	26
8	Lampung	21	41	2	15	9	88
9	Kepulauan Bangka Belitung	9	8	2	4	2	25
10	Kepulauan Riau	13	15	2	2	8	40
11	DKI Jakarta	34	73	10	21	45	183
12	Jawa Barat	60	251	15	41	103	470
13	Jawa Tengah	66	201	11	29	38	345
14	D I Yogyakarta	12	45	3	10	4	74
15	Jawa Timur	80	218	24	51	53	426
16	Banten	16	67	3	17	19	122
17	Bali	17	38	3	8	11	77
18	Nusa Tenggara Barat	19	15	2	5	2	43
19	Nusa Tenggara Timur	24	19	4	2	4	53
20	Kalimantan Barat	18	11	5	7	16	57
21	Kalimantan Tengah	16	4	2	2	4	28
22	Kalimantan Selatan	18	15	4	6	10	53
23	Kalimantan Timur	18	19	3	10	10	60
24	Kalimantan Utara	6	2	2	0	0	10
25	Sulawesi Utara	23	19	4	6	9	61
26	Sulawesi Tengah	19	6	3	4	5	37
27	Sulawesi Selatan	38	36	6	19	30	129
28	Sulawesi Tenggara	18	10	2	1	6	37
29	Gorontalo	11	4	1	1	4	21
30	Sulawesi Barat	8	1	1	1	2	13
31	Maluku	15	6	3	1	3	28
32	Maluku Utara	10	5	1	0	1	17
33	Papua	21	6	6	1	0	34
34	Papua Barat	11	4	3	0	1	19
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**787**	**1387**	**156**	**336**	**454**	**3120**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2024

Lampiran 19.d

FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTYANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Apotek	Optik	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	90	40	130
2	Sumatera Utara	232	65	297
3	Sumatera Barat	115	54	169
4	Riau	98	31	129
5	Jambi	53	20	73
6	Sumatera Selatan	104	34	138
7	Bengkulu	35	14	49
8	Lampung	96	27	123
9	Kepulauan Bangka Belitung	34	11	45
10	Kepulauan Riau	63	16	79
11	DKI Jakarta	215	31	246
12	Jawa Barat	627	127	754
13	Jawa Tengah	633	147	780
14	D I Yogyakarta	97	8	105
15	Jawa Timur	610	253	863
16	Banten	155	17	172
17	Bali	115	25	140
18	Nusa Tenggara Barat	52	26	78
19	Nusa Tenggara Timur	76	16	92
20	Kalimantan Barat	65	30	95
21	Kalimantan Tengah	46	8	54
22	Kalimantan Selatan	92	26	118
23	Kalimantan Timur	95	17	112
24	Kalimantan Utara	18	6	24
25	Sulawesi Utara	83	25	108
26	Sulawesi Tengah	52	13	65
27	Sulawesi Selatan	180	43	223
28	Sulawesi Tenggara	37	10	47
29	Gorontalo	22	7	29
30	Sulawesi Barat	19	4	23
31	Maluku	18	5	23
32	Maluku Utara	22	8	30
33	Papua	34	15	49
34	Papua Barat	26	6	32
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		**4.309**	**1.185**	**5.494**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2024

Lampiran 20.a

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

No	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran Kementerian Kesehatan	
		Rupiah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBN PUSAT	**97.443.047.990.000**	**99,56%**
	Rupiah Murni	74.141.885.563.000	
	Pinjaman Luar Negeri	1.738.820.711.000	
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	413.964.787.000	
	Badan Layanan Umum	19.140.165.277.000	
	Hibah Langsung Dalam Negeri	981.700.000	
	Hibah Langsung Luar Negeri	2.007.229.952.000	
2	DANA DEKONSENTRASI	**431.900.303.000**	**0,44%**
3	DANA ALOKASI KHUSUS	**-**	**0,00%**
	a. DAK Fisik		
	b. DAK Nonfisik		
	Total Anggaran Kementerian Kesehatan	**97.874.948.293.000**	
	Total APBN	**3.061.200.000.000.000**	
	% APBN Kementerian Kesehatan THD APBN Indonesia		**3,20%**

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 20.b

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2023

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan											
		Kantor Pusat			Kantor Daerah			Dekonsentrasi			Jumlah		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Sekretariat Jenderal	51.914.148.797.000	51.736.218.294.959	99,66%	-	-	-	431.900.303.000	367.671.776.285	85,13%	52.346.049.100.000	52.103.890.071.244	99,54%
2	Inspektorat Jenderal	36.627.204.000	36.554.611.660	99,80%	-	-	-	-	-	-	36.627.204.000	36.554.611.660	99,80%
3	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1.730.589.421.000	1.685.530.992.828	97,40%	12.752.230.000	12.094.931.605	94,85%	-	-	-	1.743.341.651.000	1.697.625.924.433	97,38%
4	Ditjen Pelayanan Kesehatan	4.669.159.258.000	4.331.138.834.630	92,76%	23.221.383.257.000	21.522.216.497.056	92,68%	-	-	-	27.890.542.515.000	25.853.355.331.686	92,70%
5	Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	3.189.893.910.000	3.100.981.377.422	97,21%	1.136.145.629.000	1.100.065.221.029	96,82%	-	-	-	4.326.039.539.000	4.201.046.598.451	97,11%
6	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.138.958.204.000	3.934.959.743.953	95,07%	-	-	-	-	-	-	4.138.958.204.000	3.934.959.743.953	95,07%
7	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	681.939.947.000	653.328.955.030	95,80%	155.870.135.000	150.056.552.228	96,27%	-	-	-	837.810.082.000	803.385.507.258	95,89%
8	Ditjen Tenaga Kesehatan	1.772.503.180.000	1.698.860.261.102	95,85%	4.351.176.515.000	4.231.470.210.903	97,25%	-	-	-	6.123.679.695.000	5.930.330.472.005	96,84%
Kementerian Kesehatan		**67.451.879.974.000**	**66.524.244.116.554**	**98,62%**	**28.721.457.631.000**	**26.865.846.860.593**	**93,54%**	**431.900.303.000**	**367.671.776.285**	**85,13%**	**96.605.237.908.000**	**93.757.762.753.432**	**97,05%**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2024

,

Lampiran 20.c

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Belanja	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Ditjen Tenaga Kesehatan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	1.345.685.778.000	-	6.740.666.000	2.417.089.566.000	516.761.190.000	-	56.042.391.000	1.019.772.453.000	5.362.092.044.000
	Realisasi	1.298.190.704.819	-	6.584.393.372	2.374.491.279.681	511.861.321.808	-	55.172.779.000	1.006.492.491.311	5.252.792.969.991
	%	96,47%	-	97,68%	98,24%	99,05%	-	98,45%	98,70%	97,96%
B.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	4.610.215.075.000	32.857.861.000	1.712.893.519.000	18.529.133.955.000	3.588.665.341.000	4.127.328.303.000	682.833.440.000	3.744.710.041.000	37.028.637.535.000
	Realisasi	4.455.813.084.500	32.790.139.127	1.673.498.037.369	17.293.577.135.569	3.474.314.428.804	3.924.599.125.698	652.038.555.107	3.597.516.432.707	35.104.146.938.881
	%	96,65%	99,79%	97,70%	93,33%	96,81%	95,09%	95,49%	96,07%	94,80%
C.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	58.554.902.000	3.769.343.000	2.301.099.000	6.944.318.994.000	220.613.008.000	11.629.901.000	98.934.251.000	1.359.197.201.000	8.699.318.699.000
	Realisasi	48.960.081.925	3.764.472.533	2.280.613.272	6.185.286.916.436	214.870.847.839	10.360.618.255	96.174.173.151	1.326.321.547.987	7.888.019.271.398
	%	83,61%	99,87%	99,11%	89,07%	97,40%	89,09%	97,21%	97,58%	90,67%
D.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	46.331.593.345.000	-	21.406.367.000	-	-	-	-	-	46.352.999.712.000
	Realisasi	46.300.926.200.000	-	15.262.880.420	-	-	-	-	-	46.316.189.080.420
	%	99,93%	-	71,30%	-	-	-	-	-	99,92%
	TOTAL									
	Anggaran	**52.346.049.100.000**	**36.627.204.000**	**1.743.341.651.000**	**27.890.542.515.000**	**4.326.039.539.000**	**4.138.958.204.000**	**837.810.082.000**	**6.123.679.695.000**	**97.443.047.990.000**
	Realisasi	**52.103.890.071.244**	**36.554.611.660**	**1.697.625.924.433**	**25.853.355.331.686**	**4.201.046.598.451**	**3.934.959.743.953**	**803.385.507.258**	**5.930.330.472.005**	**94.561.148.260.690**
	%	**99,54%**	**99,80%**	**97,38%**	**92,70%**	**97,11%**	**95,07%**	**95,89%**	**96,84%**	**97,04%**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 20.d

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Dana	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesmas	Ditjen Yankes	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Ditjen Tenaga Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	RUPIAH MURNI									
	Anggaran	52.269.797.034.000	36.627.204.000	1.725.825.724.000	7.940.492.414.000	2.351.014.385.000	4.110.207.292.000	828.469.517.000	4.879.451.993.000	74.141.885.563.000
	Realisasi	52.027.638.030.812	36.554.611.660	1.680.348.637.163	7.591.090.265.527	2.271.330.197.936	3.906.501.843.290	794.560.262.595	4.749.405.836.930	73.057.429.685.913
	%	99,54%	99,80%	97,36%	95,60%	96,61%	95,04%	95,91%	97,33%	98,54%
B.	PINJAMAN LUAR NEGERI									
	Anggaran	-	-	-	1.738.820.711.000	-	-	-	-	1.738.820.711.000
	Realisasi	-	-	-	1.336.488.364.563	-	-	-	-	1.336.488.364.563
	%	-	-	-	76,86%	-	-	-	-	76,86%
C.	PENERIMAAN BUKAN PAJAK									
	Anggaran	-	-	350.961.000	104.175.510.000	87.607.653.000	22.474.237.000	1.793.419.000	197.563.007.000	413.964.787.000
	Realisasi	-	-	231.190.673	88.550.416.001	72.383.520.049	22.181.256.783	1.278.312.828	189.077.683.033	373.702.379.367
	%	-	-	65,87%	85,00%	82,62%	98,70%	71,28%	95,71%	90,27%
D.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran	-	-	-	18.097.609.726.000	-	-	-	1.042.555.551.000	19.140.165.277.000
	Realisasi	-	-	-	16.827.899.577.549	-	-	-	987.737.811.655	17.815.637.389.204
	%	-	-	-	92,98%	-	-	-	94,74%	93,08%
E.	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI									
	Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	981.700.000	981.700.000
	Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	981.700.000	981.700.000
	%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
F.	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLL)									
	Anggaran	76.252.066.000	-	17.164.966.000	9.444.154.000	1.887.417.501.000	6.276.675.000	7.547.146.000	3.127.444.000	2.007.229.952.000
	Realisasi	76.252.040.432	-	17.046.096.597	9.326.708.046	1.857.332.880.466	6.276.643.880	7.546.931.835	3.127.440.387	1.976.908.741.643
	%	100,00%	-	99,31%	98,76%	98,41%	100,00%	100,00%	100,00%	98,49%
	TOTAL									
	Anggaran	**52.346.049.100.000**	**36.627.204.000**	**1.743.341.651.000**	**27.890.542.515.000**	**4.326.039.539.000**	**4.138.958.204.000**	**837.810.082.000**	**6.123.679.695.000**	**97.443.047.990.000**
	Realisasi	**52.103.890.071.244**	**36.554.611.660**	**1.697.625.924.433**	**25.853.355.331.686**	**4.201.046.598.451**	**3.934.959.743.953**	**803.385.507.258**	**5.929.348.772.006**	**94.560.166.560.691**
%		**99,54%**	**99,80%**	**97,38%**	**92,70%**	**97,11%**	**95,07%**	**95,89%**	**96,83%**	**97,04%**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 20.e

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

No	Provinsi	Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	15.689.447.000	11.652.471.756	74,27%
2	Sumatera Utara	17.317.332.000	15.942.478.575	92,06%
3	Sumatera Barat	11.425.802.000	9.699.181.361	84,89%
4	Riau	11.226.574.000	10.134.856.748	90,28%
5	Jambi	12.346.529.000	10.058.139.340	81,47%
6	Sumatera Selatan	12.252.953.000	11.541.404.075	94,19%
7	Bengkulu	11.016.556.000	10.919.423.743	99,12%
8	Lampung	11.455.806.000	10.696.383.375	93,37%
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.051.535.000	8.627.430.854	85,83%
10	Kepulauan Riau	9.739.915.000	8.876.083.859	91,13%
11	DKI Jakarta	9.059.020.000	7.893.081.805	87,13%
12	Jawa Barat	15.119.930.000	12.920.541.602	85,45%
13	Jawa Tengah	17.487.195.000	14.940.747.069	85,44%
14	D.I. Yogyakarata	8.444.993.000	7.863.449.682	93,11%
15	Jawa Timur	18.834.341.000	13.827.304.107	73,42%
16	Banten	9.444.465.000	8.362.245.415	88,54%
17	Bali	9.750.457.000	8.814.052.219	90,40%
18	Nusa Tenggara Barat	12.931.091.000	11.619.780.830	89,86%
19	Nusa Tenggara Timur	15.861.502.000	15.246.046.036	96,12%
20	Kalimantan Barat	11.537.279.000	5.632.622.940	48,82%
21	Kalimantan Tengah	11.943.334.000	10.828.125.971	90,66%
22	Kalimantan Selatan	11.997.151.000	11.037.612.465	92,00%
23	Kalimantan Timur	10.450.848.000	7.394.065.333	70,75%
24	Kalimantan Utara	9.234.610.000	8.286.071.323	89,73%
25	Sulawesi Utara	10.884.724.000	10.648.967.500	97,83%
26	Sulawesi Tengah	14.785.865.000	13.463.696.901	91,06%
27	Sulawesi Selatan	15.367.966.000	13.049.748.444	84,92%
28	Sulawesi Tenggara	13.527.322.000	13.140.809.036	97,14%
29	Gorontalo	9.560.020.000	8.866.646.021	92,75%
30	Sulawesi Barat	10.667.155.000	9.102.060.090	85,33%
31	Maluku	13.655.912.000	8.235.343.422	60,31%
32	Maluku Utara	13.428.474.000	12.733.855.014	94,83%
33	Papua	21.693.584.000	18.450.605.889	85,05%
34	Papua Barat	13.710.616.000	7.166.443.485	52,27%
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Dekonsentrasi Kemenkes		**431.900.303.000**	**367.671.776.285**	**85,13%**

Sumber : OMSPAN, Kementerian Keuangan, 31 Desember 2023

Lampiran 20.f

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	DAK Fisik					DAK Non Fisik		
		Alokasi (Rp)	Kontrak (Rp)	%	Penyerapan (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	511.803.450.000	483.354.546.898	94,4%	377.533.084.791	73,8%	487.343.989.927	382.433.382.905	78,47%
2	Sumatera Utara	643.560.784.000	594.177.892.024	92,3%	394.470.315.165	61,3%	803.509.879.178	613.484.243.399	76,35%
3	Sumatera Barat	382.876.462.000	351.799.951.042	91,9%	304.009.779.023	79,4%	376.521.006.684	238.713.096.332	63,40%
4	Riau	286.951.932.000	278.245.400.568	97,0%	261.171.451.217	91,0%	284.630.687.735	199.825.900.568	70,21%
5	Jambi	394.888.621.000	382.811.258.163	96,9%	333.830.025.216	84,5%	258.680.550.084	198.340.354.165	76,67%
6	Sumatera Selatan	281.154.018.000	261.527.888.192	93,0%	197.399.555.017	70,2%	425.136.387.139	343.254.651.223	80,74%
7	Bengkulu	255.751.804.000	240.532.969.578	94,0%	135.716.864.269	53,1%	220.172.066.367	167.978.595.326	76,29%
8	Lampung	148.607.206.000	141.571.118.435	95,3%	135.132.313.797	90,9%	430.740.794.675	348.096.735.234	80,81%
9	Bangka Belitung	199.150.460.000	188.651.891.152	94,7%	188.553.536.352	94,7%	107.597.316.449	79.632.353.337	74,01%
10	Kepulauan Riau	215.229.812.000	196.923.595.479	91,5%	177.102.184.282	82,3%	108.567.330.438	75.708.741.773	69,73%
11	DKI Jakarta	4.168.977.000	3.076.020.400	73,8%		0,0%	-	-	0,00%
12	Jawa Barat	639.703.856.000	579.476.015.663	90,6%	468.767.111.182	73,3%	1.041.811.329.111	833.097.654.796	79,97%
13	Jawa Tengah	948.857.234.000	855.107.816.957	90,1%	768.194.205.231	81,0%	1.021.975.945.510	886.365.247.771	86,73%
14	DI Yogyakarta	108.838.966.000	101.864.969.626	93,6%	101.854.111.626	93,6%	117.887.102.599	102.712.988.866	87,13%
15	Jawa Timur	685.692.515.000	612.736.086.157	89,4%	560.379.720.956	81,7%	985.283.210.248	763.204.160.902	77,46%
16	Banten	155.697.282.000	139.031.332.782	89,3%	136.869.085.963	87,9%	229.878.960.438	189.875.870.558	82,60%
17	Bali	93.747.468.000	70.208.003.225	74,9%	70.208.003.225	74,9%	128.576.871.196	90.506.636.094	70,39%
18	Nusa Tenggara Barat	361.252.046.000	351.271.832.370	97,2%	268.104.274.756	74,2%	276.815.148.183	229.694.102.168	82,98%
19	Nusa Tenggara Timur	860.997.434.000	806.338.804.898	93,7%	500.161.331.804	58,1%	702.775.382.178	484.866.080.128	68,99%
20	Kalimantan Barat	338.612.674.000	318.609.370.876	94,1%	302.316.798.579	89,3%	384.069.276.159	309.236.253.009	80,52%
21	Kalimantan Tengah	359.585.672.000	347.590.749.658	96,7%	295.835.576.049	82,3%	286.168.748.954	207.182.802.495	72,40%
22	Kalimantan Selatan	277.493.429.000	252.340.115.865	90,9%	232.450.435.778	83,8%	291.698.305.534	211.821.852.059	72,62%
23	Kalimantan Timur	159.232.441.000	143.193.300.715	89,9%	121.259.488.377	76,2%	186.244.219.758	115.253.316.247	61,88%
24	Kalimantan Utara	92.086.029.000	88.298.260.962	95,9%	49.002.291.305	53,2%	85.669.238.051	59.244.823.135	69,16%
25	Sulawesi Utara	353.473.066.000	312.115.081.414	88,3%	142.243.840.990	40,2%	239.866.252.168	161.089.541.768	67,16%
26	Sulawesi Tengah	201.288.232.000	194.044.558.893	96,4%	143.334.861.839	71,2%	315.767.182.872	258.532.264.475	81,87%
27	Sulawesi Selatan	430.116.866.000	322.434.324.181	75,0%	232.586.723.515	54,1%	639.866.749.895	512.121.395.926	80,04%
28	Sulawesi Tenggara	463.196.177.000	450.168.229.826	97,2%	374.289.961.662	80,8%	404.178.602.107	338.338.681.252	83,71%
29	Gorontalo	92.348.253.000	88.734.748.992	96,1%	80.297.165.810	87,0%	126.959.686.685	98.250.866.840	77,39%
30	Sulawesi Barat	306.815.751.000	299.064.372.749	97,5%	257.819.076.035	84,0%	149.146.443.531	97.993.498.785	65,70%
31	Maluku	209.685.809.000	201.106.116.308	95,9%	103.282.701.468	49,3%	333.340.479.740	231.483.423.072	69,44%
32	Maluku Utara	370.737.813.000	333.873.540.225	90,1%	153.456.786.815	41,4%	242.160.647.501	192.342.875.580	79,43%
33	Papua	276.026.040.000	269.729.902.267	97,7%	100.585.863.240	36,4%	704.728.282.785	559.391.705.548	79,38%
34	Papua Barat	301.622.998.000	286.395.415.312	95,0%	128.237.656.136	42,5%	243.414.652.597	164.512.130.053	67,59%
35	Papua Selatan	128.381.458.000	118.759.346.445	92,5%	80.683.950.950	62,8%	-	-	0,00%
36	Papua Tengah	374.672.811.000	363.560.023.579	97,0%	227.601.374.906	60,7%	-	-	0,00%
37	Papua Pegunungan	669.480.603.000	646.578.379.015	96,6%	444.447.707.261	66,4%	-	-	0,00%
38	Papua Barat Daya	366.213.551.000	338.719.453.742	92,5%	199.534.557.255	54,5%	-	-	0,00%
TOTAL		**12.950.000.000.000**	**12.014.022.684.633**	**92,8%**	**9.048.723.771.841**	**69,9%**	**12.641.182.726.476**	**9.744.586.225.789**	**77,09%**

Sumber : Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2024

KET:

1. Data berdasarkan SIKD Kemenkeu tanggal 19 Januari 2024
2. Data Realisasi Non Fisik TA 2023 berdasarkan data dari e-Renggar (Biro Perencanaan dan Anggaran) 27 Maret 2024
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023

Lampiran 20.g

ANGGARAN KESEHATAN TAHUN 2023

No	Komponen Anggaran Kesehatan	APBN (miliar rupiah)
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	**Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat**	
	A. Melalui Kementerian Negara/Lembaga	**97.443,0**
	1. Kementerian Kesehatan	97.443
	B. Melalui Belanja Non K/L	**49.008,7**
	1. Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah	
	i Anggaran iuran PBI JKN	46.331,6
	ii Anggaran bentuan Iuran PBPU BP	2.677,1
2.	**Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke daerah dan Dana Desa**	**26.904,2**
	A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana	13.400,0
	B. BOK dan BOKB	12.641,2
	C. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua	863,0
3.	**Anggaran Kesehatan (1+2+3)**	**173.355,9**
4.	**Total Belanja Negara**	**3.061.200,0**
	RASIO ANGGARAN KESEHATAN (%)	**5,7**

Sumber : Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 21

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kelahiran		
		Hidup	Mati	Hidup + Mati
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	84.158	665	84.823
2	Sumatera Utara	228.416	797	229.213
3	Sumatera Barat	82.561	663	83.224
4	Riau	111.873	715	112.588
5	Jambi	57.448	339	57.787
6	Sumatera Selatan	152.646	645	153.291
7	Bengkulu	31.233	169	31.402
8	Lampung	129.468	505	129.973
9	Kepulauan Bangka Belitung	22.880	305	23.185
10	Kepulauan Riau	47.832	188	48.020
11	DKI Jakarta	162.338	1711	164.049
12	Jawa Barat	825.157	8259	833.416
13	Jawa Tengah	460.916	8253	469.169
14	DI Yogyakarta	35.083	755	35.838
15	Jawa Timur	510.566	5175	515.741
16	Banten	230.488	991	231.479
17	Bali	62.601	2879	65.480
18	Nusa Tenggara Barat	88.770	778	89.548
19	Nusa Tenggara Timur	73.350	973	74.323
20	Kalimantan Barat	81.811	723	82.534
21	Kalimantan Tengah	40.711	209	40.920
22	Kalimantan Selatan	62.670	1541	64.211
23	Kalimantan Timur	60.269	663	60.932
24	Kalimantan Utara	12.633	242	12.875
25	Sulawesi Utara	26.112	63	26.175
26	Sulawesi Tengah	36.259	264	36.523
27	Sulawesi Selatan	137.884	1746	139.630
28	Sulawesi Tenggara	43.407	178	43.585
29	Gorontalo	18.713	217	18.930
30	Sulawesi Barat	24.034	462	24.496
31	Maluku	27.372	257	27.629
32	Maluku Utara	20.719	429	21.148
33	Papua	14.745	151	14.896
34	Papua Barat	5.884	68	5.952
35	Papua Selatan	9.614	183	9.797
36	Papua Tengah	9.112	59	9.171
37	Papua Pegunungan	400	10	410
38	Papua Barat Daya	862	70	932
Indonesia		**4.030.995**	**42.300**	**4.073.295**
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran (Dilaporkan)		**10,5**		

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Lampiran 22

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021 - 2023

No	Provinsi	2021		2022		2023	
		Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	x	208	104.606	106	84.158	134
2	Sumatera Utara	278.100	248	278.350	119	228.416	202
3	Sumatera Barat	104.121	193	104.250	90	82.561	118
4	Riau	130.651	180	130.895	98	111.873	136
5	Jambi	63.912	75	62.550	57	57.448	50
6	Sumatera Selatan	158.262	131	158.257	81	152.646	106
7	Bengkulu	34.798	50	34.822	28	31.233	38
8	Lampung	144.178	187	143.950	92	129.468	110
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.589	62	25.739	32	22.880	39
10	Kepulauan Riau	47.117	99	48.390	24	47.832	49
11	DKI Jakarta	172.215	129	171.574	101	162.338	115
12	Jawa Barat	815.650	1204	820.850	571	825.157	792
13	Jawa Tengah	495.556	976	497.850	359	460.916	466
14	DI Yogyakarta	56.684	162	57.609	39	35.083	26
15	Jawa Timur	539.691	1279	536.550	486	510.566	499
16	Banten	223.004	298	224.050	175	230.488	209
17	Bali	65.379	125	66.008	64	62.601	40
18	Nusa Tenggara Barat	98.165	144	98.211	95	88.770	97
19	Nusa Tenggara Timur	114.473	181	118.400	160	73.350	135
20	Kalimantan Barat	91.021	183	91.081	98	81.811	136
21	Kalimantan Tengah	43.901	96	44.150	44	40.711	77
22	Kalimantan Selatan	72.733	140	73.021	81	62.670	102
23	Kalimantan Timur	60.751	169	61.050	74	60.269	83
24	Kalimantan Utara	12.998	29	13.190	10	12.633	20
25	Sulawesi Utara	35.369	64	37.022	9	26.112	42
26	Sulawesi Tengah	58.725	109	58.954	48	36.259	67
27	Sulawesi Selatan	144.079	195	143.851	175	137.884	184
28	Sulawesi Tenggara	53.593	113	54.038	64	43.407	74
29	Gorontalo	20.151	51	20.139	21	18.713	23
30	Sulawesi Barat	27.218	60	27.182	46	24.034	48
31	Maluku	35.056	63	35.172	20	27.372	77
32	Maluku Utara	24.118	58	24.304	38	20.719	50
33	Papua	65.558	79	65.958	21	14.745	29
34	Papua Barat	20.478	49	20.694	46	5.884	31
35	Papua Selatan	-	-	-	-	9.614	23
36	Papua Tengah	-	-	-	-	9.112	13
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	400	9
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	862	11
Indonesia		**4.333.294**	**7.389**	**4.452.717**	**3.572**	**4.030.995**	**4.460**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023, data per April 2024

Lampiran 23

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Penyebab Kematian Ibu							
		Kehamilan dengan komplikasi abortus	Hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas	Perdarahan obstetrik	Infeksi terkait kehamilan	Komplikasi obstetrik lain	Komplikasi manajemen yang tidak terantisipasi (O29, O74, O89)	Komplikasi non obstetrik)	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)
1	Aceh		10	15	1	2	2	10	94
2	Sumatera Utara	2	14	15	2	10	3	20	136
3	Sumatera Barat		14	13	1	3		12	75
4	Riau		16	6	3	4	3	9	95
5	Jambi		4	2	1	1	4	5	33
6	Sumatera Selatan	1	10	10		5		16	64
7	Bengkulu		1	3	2	5	2	4	21
8	Lampung		4	13	3	4	1	9	76
9	Kepulauan Bangka Belitung		3	2	1			1	32
10	Kepulauan Riau	1	2	7		2		7	30
11	DKI Jakarta	1	13	9	4	4	1	17	66
12	Jawa Barat	6	94	62	15	45	5	115	450
13	Jawa Tengah	3	27	31	7	27	4	56	311
14	DI Yogyakarta			3		2		2	19
15	Jawa Timur	4	46	29	9	23	2	59	327
16	Banten	1	20	12	1	3	5	23	144
17	Bali		3	4	1	2		10	20
18	Nusa Tenggara Barat		9	9	3	8		7	61
19	Nusa Tenggara Timur	2	13	9	3	5		11	92
20	Kalimantan Barat		9	12	3	6	2	12	92
21	Kalimantan Tengah	2	9	3	1	4	2	7	49
22	Kalimantan Selatan	2	10	8	1	2	1	9	69
23	Kalimantan Timur	1	10	8		3		12	49
24	Kalimantan Utara		2	1		1		3	13
25	Sulawesi Utara	1	8	5	3	1		7	17
26	Sulawesi Tengah		7	3	1	5		8	43
27	Sulawesi Selatan	4	22	13	4	5		14	122
28	Sulawesi Tenggara		11	8	1	6	1	7	40
29	Gorontalo		2	5	1			5	10
30	Sulawesi Barat	1	2	4		4	1	9	27
31	Maluku	1	7	14	3	2	1	4	45
32	Maluku Utara	2	2	10	4	2		6	24
33	Papua	2	3	2		2	1	1	18
34	Papua Barat	1	1	4	1	1		3	20
35	Papua Selatan	2	1	1	1			3	15
36	Papua Tengah							1	12
37	Papua Pegunungan		1	1	1	2	2	1	1
38	Papua Barat Daya	3		1	1	1			5
Indonesia		**43**	**410**	**357**	**83**	**202**	**43**	**505**	**2.817**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 24

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Ibu Hamil					Ibu Bersalin/Nifas								
		Jumlah	K4*		K6		Jumlah	Persalinan Di Fasyankes**		KF1		KF Lengkap		Ibu Nifas Mendapat Vit A	
			Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	115.620	87.925	76,0	62132	53,7	110.364	88.787	80,4	78.977	71,6	72.519	65,7	77.891	70,6
2	Sumatera Utara	306.632	258.305	84,2	250685	81,8	292.694	250.461	85,6	250.383	85,5	242.948	83,0	250.065	85,4
3	Sumatera Barat	114.770	80.810	70,4	71015	61,9	109.553	80.649	73,6	82.514	75,3	79.973	73,0	84.191	76,8
4	Riau	144.615	122.166	84,5	100233	69,3	138.041	109.306	79,2	113.469	82,2	105.453	76,4	113.517	82,2
5	Jambi	68.825	61.031	88,7	48738	70,8	65.696	56.525	86,0	59.203	90,1	58.131	88,5	59.081	89,9
6	Sumatera Selatan	174.306	159.547	91,5	143190	82,1	166.383	151.208	90,9	151.672	91,2	147.405	88,6	151.338	91,0
7	Bengkulu	38.306	33.116	86,5	27451	71,7	36.565	31.287	85,6	31.326	85,7	30.568	83,6	31.324	85,7
8	Lampung	158.025	146.978	93,0	123803	78,3	150.842	140.447	93,1	140.675	93,3	138.059	91,5	140.655	93,2
9	Kep. Bangka Belitung	28.424	22.613	79,6	21781	76,6	27.132	22.900	84,4	22.945	84,6	22.684	83,6	15.828	58,3
10	Kepulauan Riau	54.608	50.029	91,6	45483	83,3	52.126	47.653	91,4	47.799	91,7	44.030	84,5	47.738	91,6
11	DKI Jakarta	188.097	207.049	110,1	178352	94,8	179.547	197.494	110,0	207.227	115,4	195.532	108,9	204.276	113,8
12	Jawa Barat	907.364	860.496	94,8	726161	80,0	866.120	817.570	94,4	823.057	95,0	812.144	93,8	821.755	94,9
13	Jawa Tengah	546.840	474.821	86,8	446692	81,7	521.983	461.523	88,4	462.230	88,6	456.125	87,4	447.607	85,8
14	DI Yogyakarta	64.440	34.168	53,0	32594	50,6	61.511	35.058	57,0	35.075	57,0	33.761	54,9	34.967	56,8
15	Jawa Timur	588.048	511.636	87,0	460297	78,3	561.318	522.430	93,1	523.263	93,2	511.298	91,1	422.441	75,3
16	Banten	247.536	229.227	92,6	213057	86,1	236.285	222.448	94,1	227.908	96,5	223.924	94,8	237.222	100,4
17	Bali	73.252	63.168	86,2	59457	81,2	69.923	62.558	89,5	62.551	89,5	60.947	87,2	62.501	89,4
18	Nusa Tenggara Barat	108.035	88.488	81,9	70965	65,7	103.125	72.506	70,3	88.845	86,2	82.328	79,8	55.139	53,5
19	Nusa Tenggara Timur	130.038	74.513	57,3	59793	46,0	124.127	82.254	66,3	86.391	69,6	83.216	67,0	82.853	66,7
20	Kalimantan Barat	100.355	82.163	81,9	60044	59,8	95.794	74.296	77,6	81.715	85,3	76.934	80,3	81.521	85,1
21	Kalimantan Tengah	48.814	42.378	86,8	32846	67,3	46.595	36.177	77,6	38.996	83,7	37.908	81,4	38.949	83,6
22	Kalimantan Selatan	80.619	60.017	74,4	50407	62,5	76.955	60.319	78,4	62.747	81,5	61.124	79,4	62.554	81,3
23	Kalimantan Timur	67.470	58.998	87,4	52284	77,5	64.403	59.899	93,0	60.518	94,0	56.329	87,5	44.736	69,5
24	Kalimantan Utara	14.736	12.466	84,6	10994	74,6	14.066	12.931	91,9	13.086	93,0	11.943	84,9	13.108	93,2
25	Sulawesi Utara	40.686	34.260	84,2	23714	58,3	38.836	33.454	86,1	32.933	84,8	31.191	80,3	32.595	83,9
26	Sulawesi Tengah	65.050	45.378	69,8	34504	53,0	62.093	46.283	74,5	44.995	72,5	42.426	68,3	44.010	70,9
27	Sulawesi Selatan	158.028	136.728	86,5	121737	77,0	150.845	137.378	91,1	137.808	91,4	133.823	88,7	137.574	91,2
28	Sulawesi Tenggara	59.923	41.932	70,0	36660	61,2	57.199	43.973	76,9	45.653	79,8	43.200	75,5	45.379	79,3
29	Gorontalo	22.152	17.323	78,2	14848	67,0	21.145	18.687	88,4	18.720	88,5	18.133	85,8	18.720	88,5
30	Sulawesi Barat	29.875	20.645	69,1	17264	57,8	28.517	23.315	81,8	23.128	81,1	24.228	85,0	22.636	79,4
31	Maluku	38.790	27.937	72,0	17572	45,3	37.027	22.729	61,4	29.340	79,2	27.097	73,2	28.708	77,5
32	Maluku Utara	26.923	20.652	76,7	17043	63,3	25.699	20.235	78,7	22.160	86,2	21.304	82,9	22.072	85,9
33	Papua	18.363	11.150	60,7	8603	46,8	17.526	14.390	82,1	14.655	83,6	13.032	74,4	14.475	82,6
34	Papua Barat	11.235	3.650	32,5	2995	26,7	10.724	4.518	42,1	4.123	38,4	5.327	49,7	5.265	49,1
35	Papua Selatan	13.475	3.282	24,4	1660	12,3	12.863	8.108	63,0	6.252	48,6	4.279	33,3	6.104	47,5
36	Papua Tengah	22.515	6.850	30,4	3318	14,7	21.494	7.514	35,0	8.028	37,3	5.946	27,7	7.381	34,3
37	Papua Pegunungan	18.544	2.231	12,0	660	3,6	17.701	2.045	11,6	811	4,6	460	2,6	705	4,0
38	Papua Barat Daya	11.893	4.374	36,8	2535	21,3	11.352	4.314	38,0	747	6,6	604	5,3	782	6,9
	Indonesia	**4.907.227**	**4.198.500**	**85,6**	**3.651.567**	**74,4**	**4.684.169**	**4.083.629**	**87,2**	**4.141.925**	**88,4**	**4.016.333**	**85,7**	**3.967.663**	**84,7**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: *cakupan K4 sama dengan indikator SPM "persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"

** persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM "persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"

Lampiran 25

CAKUPAN IMUNISASI T2+ PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	T2+ Bumil	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	115.620	70.937	61,4
2	Sumatera Utara	306.632	155.346	50,7
3	Sumatera Barat	114.770	73.092	63,7
4	Riau	144.615	74.022	51,2
5	Jambi	68.825	50.561	73,5
6	Sumatera Selatan	174.306	141.233	81,0
7	Bengkulu	38.306	29.418	76,8
8	Lampung	158.025	125.421	79,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.424	24.520	86,3
10	Kepulauan Riau	54.608	36.078	66,1
11	DKI Jakarta	188.097	172.816	91,9
12	Jawa Barat	907.364	813.294	89,6
13	Jawa Tengah	546.840	441.827	80,8
14	DI Yogyakarta	64.440	52.390	81,3
15	Jawa Timur	588.048	541.773	92,1
16	Banten	247.536	214.506	86,7
17	Bali	73.252	62.105	84,8
18	Nusa Tenggara Barat	108.035	67.441	62,4
19	Nusa Tenggara Timur	130.038	35.185	27,1
20	Kalimantan Barat	100.355	61.788	61,6
21	Kalimantan Tengah	48.814	29.643	60,7
22	Kalimantan Selatan	80.619	53.231	66,0
23	Kalimantan Timur	67.470	42.171	62,5
24	Kalimantan Utara	14.736	11.033	74,9
25	Sulawesi Utara	40.686	30.634	75,3
26	Sulawesi Tengah	65.050	42.002	64,6
27	Sulawesi Selatan	158.028	127.812	80,9
28	Sulawesi Tenggara	59.923	32.420	54,1
29	Gorontalo	22.152	19.425	87,7
30	Sulawesi Barat	29.875	10.788	36,1
31	Maluku	38.790	22.045	56,8
32	Maluku Utara	26.923	13.766	51,1
33	Papua	18.363	10.240	55,8
34	Papua Barat	11.235	9.021	80,3
35	Papua Selatan	13.475	4.997	37,1
36	Papua Tengah	22.515	4.448	19,8
37	Papua Pegunungan	18.544	630	3,4
38	Papua Barat Daya	11.893	3.667	30,8
Indonesia		**4.907.227**	**3.711.726**	**75,6**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 26

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI T2+ PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah WUS Tidak Hamil (15-39 Tahun)	Imunisasi T2+ Pada WUS Tidak Hamil	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	1.039.529	21.813	2,1
2	Sumatera Utara	2.726.404	18.464	0,7
3	Sumatera Barat	1.012.343	16.047	1,6
4	Riau	1.319.427	17.489	1,3
5	Jambi	655.596	14.304	2,2
6	Sumatera Selatan	1.563.788	21.156	1,4
7	Bengkulu	362.064	4.253	1,2
8	Lampung	1.515.990	29.664	2,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	270.304	2.739	1,0
10	Kepulauan Riau	503.235	37.070	7,4
11	DKI Jakarta	2.024.157	44.598	2,2
12	Jawa Barat	9.190.860	98.652	1,1
13	Jawa Tengah	5.884.854	844.173	14,3
14	DI Yogyakarta	711.525	3	0,0
15	Jawa Timur	6.702.933	605.954	9,0
16	Banten	2.430.064	58.979	2,4
17	Bali	801.241	8.667	1,1
18	Nusa Tenggara Barat	948.699	10.250	1,1
19	Nusa Tenggara Timur	1.002.268	24.228	2,4
20	Kalimantan Barat	956.406	5.267	0,6
21	Kalimantan Tengah	501.848	2.463	0,5
22	Kalimantan Selatan	743.078	16.105	2,2
23	Kalimantan Timur	670.469	11.768	1,8
24	Kalimantan Utara	132.606	3.309	2,5
25	Sulawesi Utara	419.865	610	0,1
26	Sulawesi Tengah	557.478	4.820	0,9
27	Sulawesi Selatan	1.593.803	25.002	1,6
28	Sulawesi Tenggara	520.374	2.611	0,5
29	Gorontalo	217.537	2.091	1,0
30	Sulawesi Barat	252.911	1.178	0,5
31	Maluku	339.090	1.751	0,5
32	Maluku Utara	237.974	1.564	0,7
33	Papua	131.628	1.370	1,0
34	Papua Barat	94.810	4.815	5,1
35	Papua Selatan	81.653	307	0,4
36	Papua Tengah	196.316	627	0,3
37	Papua Pegunungan	228.271	231	0,1
38	Papua Barat Daya	101.860	1.466	1,4
Indonesia		**48.643.258**	**1.965.858**	**4,0**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 27.a

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah WUS (15-39 Tahun)	Imunisasi T2 + Pada WUS	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(14)	(15)
1	Aceh	1.155.149	70.937	6,1
2	Sumatera Utara	3.033.036	155.346	5,1
3	Sumatera Barat	1.127.113	73.092	6,5
4	Riau	1.464.042	74.022	5,1
5	Jambi	724.421	50.561	7,0
6	Sumatera Selatan	1.738.094	141.233	8,1
7	Bengkulu	400.370	29.418	7,3
8	Lampung	1.674.015	125.421	7,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	298.728	24.520	8,2
10	Kepulauan Riau	557.843	36.078	6,5
11	DKI Jakarta	2.212.254	172.816	7,8
12	Jawa Barat	10.098.224	813.294	8,1
13	Jawa Tengah	6.431.694	441.827	6,9
14	DI Yogyakarta	775.965	52.390	6,8
15	Jawa Timur	7.290.981	541.773	7,4
16	Banten	2.677.600	214.506	8,0
17	Bali	874.493	62.105	7,1
18	Nusa Tenggara Barat	1.056.734	67.441	6,4
19	Nusa Tenggara Timur	1.132.306	35.185	3,1
20	Kalimantan Barat	1.056.761	61.788	5,8
21	Kalimantan Tengah	550.662	29.643	5,4
22	Kalimantan Selatan	823.697	53.231	6,5
23	Kalimantan Timur	737.939	42.171	5,7
24	Kalimantan Utara	147.342	11.033	7,5
25	Sulawesi Utara	460.551	30.634	6,7
26	Sulawesi Tengah	622.528	42.002	6,7
27	Sulawesi Selatan	1.751.831	127.812	7,3
28	Sulawesi Tenggara	580.297	32.420	5,6
29	Gorontalo	239.689	19.425	8,1
30	Sulawesi Barat	282.786	10.788	3,8
31	Maluku	377.880	22.045	5,8
32	Maluku Utara	264.897	13.766	5,2
33	Papua	149.991	10.240	6,8
34	Papua Barat	106.045	9.021	8,5
35	Papua Selatan	95.128	4.997	5,3
36	Papua Tengah	218.831	4.448	2,0
37	Papua Pegunungan	246.815	630	0,3
38	Papua Barat Daya	113.753	3.667	3,2
Indonesia		**53.550.485**	**3.711.726**	**6,9**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 27.b

PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa HIV	Persentase Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Positif HIV	Persentase Ibu Hamil Positif HIV (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	115.620,00	52.749,00	45,62	7	0,01
2	Sumatera Utara	306.632,00	128.466,00	41,90	55	0,04
3	Sumatera Barat	114.770,00	59.090,00	51,49	14	0,02
4	Riau	144.615,00	89.743,00	62,06	23	0,03
5	Jambi	68.825,00	24.463,00	35,54	6	0,02
6	Sumatera Selatan	174.306,00	145.167,00	83,28	22	0,02
7	Bengkulu	38.306,00	16.165,00	42,20	0	0,00
8	Lampung	158.025,00	98.347,00	62,24	36	0,04
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.424,00	24.915,00	87,65	11	0,04
10	Kepulauan Riau	54.608,00	29.164,00	53,41	13	0,04
11	DKI Jakarta	188.097,00	132.975,00	70,69	113	0,08
12	Jawa Barat	907.364,00	565.771,00	62,35	332	0,06
13	Jawa Tengah	546.840,00	480.039,00	87,78	202	0,04
14	DI Yogyakarta	64.440,00	43.162,00	66,98	16	0,04
15	Jawa Timur	588.048,00	477.117,00	81,14	552	0,12
16	Banten	247.536,00	224.764,00	90,80	90	0,04
17	Bali	73.252,00	61.728,00	84,27	98	0,16
18	Nusa Tenggara Barat	108.035,00	60.225,00	55,75	19	0,03
19	Nusa Tenggara Timur	130.038,00	37.914,00	29,16	82	0,22
20	Kalimantan Barat	100.355,00	45.705,00	45,54	33	0,07
21	Kalimantan Tengah	48.814,00	25.561,00	52,36	27	0,11
22	Kalimantan Selatan	80.619,00	51.935,00	64,42	23	0,04
23	Kalimantan Timur	67.470,00	58.460,00	86,65	51	0,09
24	Kalimantan Utara	14.736,00	11.696,00	79,37	8	0,07
25	Sulawesi Utara	40.686,00	21.107,00	51,88	20	0,09
26	Sulawesi Tengah	65.050,00	40.495,00	62,25	7	0,02
27	Sulawesi Selatan	158.028,00	105.042,00	66,47	55	0,05
28	Sulawesi Tenggara	59.923,00	20.683,00	34,52	9	0,04
29	Gorontalo	22.152,00	15.712,00	70,93	0	0,00
30	Sulawesi Barat	29.875,00	12.295,00	41,15	2	0,02
31	Maluku	38.790,00	21.860,00	56,35	15	0,07
32	Maluku Utara	26.923,00	14.081,00	52,30	18	0,13
33	Papua	18.363,00	12.560,00	68,40	247	1,97
34	Papua Barat	11.235,00	8.155,00	72,59	82	1,01
35	Papua Selatan	13.475,00	9.130,00	67,76	23	0,25
36	Papua Tengah	22.515,00	8.332,00	37,01	81	0,97
37	Papua Pegunungan	18.544,00	2.269,00	12,24	42	1,85
38	Papua Barat Daya	11.893	8.182	68,80	56	0,68
Indonesia		**4.907.227**	**3.245.224**	**66,1**	**2.490**	**0,08**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 27.c

PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Melaksana DDHB	Persentase Ibu Hamil Melaksanakan DDHB	Jumlah Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif	Persentase Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)
1	Aceh	115.620	79.988	69,18	690	0,9
2	Sumatera Utara	306.632	112.584	36,72	945	0,8
3	Sumatera Barat	114.770	83.671	72,90	639	0,8
4	Riau	144.615	87.445	60,47	1.155	1,3
5	Jambi	68.825	47.534	69,07	455	1,0
6	Sumatera Selatan	174.306	140.061	80,35	884	0,6
7	Bengkulu	38.306	23.692	61,85	289	1,2
8	Lampung	158.025	131.763	83,38	1.219	0,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.424	23.152	81,45	367	1,6
10	Kepulauan Riau	54.608	26.301	48,16	396	1,5
11	DKI Jakarta	188.097	127.437	67,75	1.639	1,3
12	Jawa Barat	907.364	596.869	65,78	7.499	1,3
13	Jawa Tengah	546.840	351.784	64,33	4.709	1,3
14	DI Yogyakarta	64.440	36.235	56,23	192	0,5
15	Jawa Timur	588.048	490.288	83,38	8.036	1,6
16	Banten	247.536	202.105	81,65	2.307	1,1
17	Bali	73.252	58.163	79,40	658	1,1
18	Nusa Tenggara Barat	108.035	80.070	74,11	2.109	2,6
19	Nusa Tenggara Timur	130.038	74.969	57,65	3.154	4,2
20	Kalimantan Barat	100.355	56.138	55,94	1.400	2,5
21	Kalimantan Tengah	48.814	32.019	65,59	769	2,4
22	Kalimantan Selatan	80.619	53.030	65,78	1.173	2,2
23	Kalimantan Timur	67.470	58.654	86,93	1.068	1,8
24	Kalimantan Utara	14.736	12.802	86,88	195	1,5
25	Sulawesi Utara	40.686	29.428	72,33	405	1,4
26	Sulawesi Tengah	65.050	45.496	69,94	935	2,1
27	Sulawesi Selatan	158.028	137.711	87,14	2.934	2,1
28	Sulawesi Tenggara	59.923	40.531	67,64	1.042	2,6
29	Gorontalo	22.152	20.226	91,31	582	2,9
30	Sulawesi Barat	29.875	27.400	91,72	444	1,6
31	Maluku	38.790	19.677	50,73	640	3,3
32	Maluku Utara	26.923	18.525	68,81	719	3,9
33	Papua	18.363	7.864	42,83	242	3,1
34	Papua Barat	11.235	6.572	58,50	279	4,3
35	Papua Selatan	13.475	3.097	22,98	94	3,0
36	Papua Tengah	22.515	6.011	26,70	285	4,7
37	Papua Pegunungan	18.544	983	5,30	28	2,9
38	Papua Barat Daya	11.893	8.274	69,57	213	2,6
Indonesia		**4.907.227**	**3.358.549**	**68,4**	**50.789**	**1,5**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI 2024

Lampiran 27.d

PEMERIKSAAN SIFILIS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Persentase Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Jumlah Ibu Hamil Positif Sifilis	Persentase Ibu Hamil Positif Sifilis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	115.620	28.522	24,67	78	0,07
2	Sumatera Utara	306.632	51.434	16,77	69	0,02
3	Sumatera Barat	114.770	21.274	18,54	33	0,03
4	Riau	144.615	49.101	33,95	108	0,07
5	Jambi	68.825	14.702	21,36	33	0,05
6	Sumatera Selatan	174.306	77.188	44,28	111	0,06
7	Bengkulu	38.306	4.293	11,21	93	0,24
8	Lampung	158.025	52.544	33,25	245	0,16
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.424	18.950	66,67	12	0,04
10	Kepulauan Riau	54.608	11.036	20,21	19	0,03
11	DKI Jakarta	188.097	81.199	43,17	81	0,04
12	Jawa Barat	907.364	310.593	34,23	1547	0,17
13	Jawa Tengah	546.840	258.792	47,32	351	0,06
14	DI Yogyakarta	64.440	23.925	37,13	46	0,07
15	Jawa Timur	588.048	331.422	56,36	462	0,08
16	Banten	247.536	160.086	64,67	493	0,20
17	Bali	73.252	42.195	57,60	283	0,39
18	Nusa Tenggara Barat	108.035	25.541	23,64	160	0,15
19	Nusa Tenggara Timur	130.038	13.026	10,02	368	0,28
20	Kalimantan Barat	100.355	23.338	23,26	48	0,05
21	Kalimantan Tengah	48.814	12.114	24,82	8	0,02
22	Kalimantan Selatan	80.619	28.426	35,26	4	0,00
23	Kalimantan Timur	67.470	28.721	42,57	71	0,11
24	Kalimantan Utara	14.736	8.312	56,41	35	0,24
25	Sulawesi Utara	40.686	4.839	11,89	15	0,04
26	Sulawesi Tengah	65.050	21.190	32,57	33	0,05
27	Sulawesi Selatan	158.028	54.432	34,44	257	0,16
28	Sulawesi Tenggara	59.923	3.486	5,82	13	0,02
29	Gorontalo	22.152	1.264	5,71	8	0,04
30	Sulawesi Barat	29.875	1.889	6,32	0	0,00
31	Maluku	38.790	7.679	19,80	483	1,25
32	Maluku Utara	26.923	1.943	7,22	126	0,47
33	Papua	18.363	5.499	29,95	371	2,02
34	Papua Barat	11.235	796	7,09	758	6,75
35	Papua Selatan	13.475	4.365	32,39	667	4,95
36	Papua Tengah	22.515	3.418	15,18	401	1,78
37	Papua Pegunungan	18.544	1.555	8,39	361	1,95
38	Papua Barat Daya	11.893	2.379	20,00	320	2,69
Indonesia		**4.907.227**	**1.791.468**	**36,5**	**8.571**	**0,48**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 28.a

PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Remaja Putri (12-18 tahun)			Ibu Hamil		
		Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%	Jumlah	Jumlah mendapat TTD Minimal 90 Tablet	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	325.964	81.861	25,1	40.343	25.788	63,9
2	Sumatera Utara	745.429	364.494	48,9	87.358	71.284	81,6
3	Sumatera Barat	334.480	195.196	58,4	93.042	78.194	84,0
4	Riau	324.646	157.907	48,6	67.199	56.183	83,6
5	Jambi	207.009	91.667	44,3	46.284	43.380	93,7
6	Sumatera Selatan	527.454	379.016	71,9	123.098	115.843	94,1
7	Bengkulu	99.894	73.541	73,6	33.089	27.252	82,4
8	Lampung	491.022	340.592	69,4	106.385	98.603	92,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	67.590	62.409	92,3	24.404	22.115	90,6
10	Kepulauan Riau	107.009	96.278	90,0	52.054	49.383	94,9
11	DKI Jakarta	397.108	321.217	80,9	160.599	148.734	92,6
12	Jawa Barat	2.118.919	1.527.109	72,1	859.478	809.204	94,2
13	Jawa Tengah	1.683.568	998.876	59,3	415.541	345.681	83,2
14	DI Yogyakarta	166.667	99.170	59,5	32.414	29.379	90,6
15	Jawa Timur	1.848.966	1.343.997	72,7	495.999	454.012	91,5
16	Banten	514.489	449.625	87,4	211.789	198.590	93,8
17	Bali	184.879	180.212	97,5	67.948	62.325	91,7
18	Nusa Tenggara Barat	281.789	135.500	48,1	93.657	75.716	80,8
19	Nusa Tenggara Timur	260.150	162.716	62,6	73.661	56.230	76,3
20	Kalimantan Barat	289.353	188.500	65,2	78.350	68.332	87,2
21	Kalimantan Tengah	138.798	81.953	59,0	32.545	25.717	79,0
22	Kalimantan Selatan	217.953	129.643	59,5	66.960	55.700	83,2
23	Kalimantan Timur	180.890	119.754	66,2	62.088	52.121	84,0
24	Kalimantan Utara	38.302	23.958	62,6	11.653	10.039	86,2
25	Sulawesi Utara	59.249	13.705	23,1	7.650	5.948	77,8
26	Sulawesi Tengah	148.080	94.345	63,7	44.131	35.835	81,2
27	Sulawesi Selatan	388.414	249.640	64,3	104.272	85.986	82,5
28	Sulawesi Tenggara	124.407	53.930	43,4	37.239	25.943	69,7
29	Gorontalo	64.682	34.697	53,6	19.551	15.945	81,6
30	Sulawesi Barat	64.976	32.009	49,3	26.532	20.352	76,7
31	Maluku	109.718	24.792	22,6	14.273	9.991	70,0
32	Maluku Utara	64.392	22.113	34,3	13.127	9.284	70,7
33	Papua	47.081	4.461	9,5	5.613	3.779	67,3
34	Papua Barat	5.064	115	2,3	232	136	58,6
35	Papua Selatan	46.295	7.880	17,0	173	157	90,8
36	Papua Tengah	41.002	2.761	6,7	2.106	1.094	52,0
37	Papua Pegunungan	21.708	118	0,5	228	126	55,3
38	Papua Barat Daya	5.279	974	18,5	201	137	68,2
Indonesia		**12.742.675**	**8.146.731**	**78,9**	**3.611.266**	**3.194.518**	**88,5**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 28.b

PERSENTASE BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Persentase Mendapat Makanan Tambahan	
		Balita Gizi Kurang	Ibu Hamil Risiko KEK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	85,3	89,1
2	Sumatera Utara	90,5	93,3
3	Sumatera Barat	95,6	99,0
4	Riau	96,6	94,0
5	Jambi	99,5	92,8
6	Sumatera Selatan	97,6	96,4
7	Bengkulu	88,7	83,9
8	Lampung	85,2	81,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	87,1	91,1
10	Kepulauan Riau	88,8	88,5
11	DKI Jakarta	91,8	85,8
12	Jawa Barat	66,9	74,9
13	Jawa Tengah	69,4	78,7
14	DI Yogyakarta	72,4	80,0
15	Jawa Timur	73,7	83,7
16	Banten	76,1	77,3
17	Bali	93,8	95,2
18	Nusa Tenggara Barat	77,9	89,8
19	Nusa Tenggara Timur	71,1	77,3
20	Kalimantan Barat	79,6	88,3
21	Kalimantan Tengah	92,6	89,1
22	Kalimantan Selatan	81,0	90,7
23	Kalimantan Timur	90,1	98,8
24	Kalimantan Utara	78,2	60,1
25	Sulawesi Utara	82,1	91,8
26	Sulawesi Tengah	84,9	92,9
27	Sulawesi Selatan	88,3	89,1
28	Sulawesi Tenggara	81,7	88,6
29	Gorontalo	92,9	97,4
30	Sulawesi Barat	69,4	80,4
31	Maluku	78,2	91,6
32	Maluku Utara	87,9	89,0
33	Papua	68,0	89,3
34	Papua Barat	92,7	97,9
35	Papua Selatan	97,4	123,1
36	Papua Tengah	100,7	47,4
37	Papua Pegunungan	68,2	94,1
38	Papua Barat Daya	139,2	96,6
Indonesia		**76,3**	**83,8**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024
*KEK=Kekurangan Energi Kronik

Lampiran 29

JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah PUS	PUS Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi																					Prevalensi KB
			Peserta KB Modern																		Peserta KB Tradisional		Jumlah PUS Peserta KB	
			Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	IUD/AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	MAL	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Aceh	901.009	14.432	1,6	288.601	32,0	63.678	7,1	29.733	3,3	539	0,06	16.953	1,9	26.880	3,0	16.215	1,80	457.031	50,7	8.353	0,9	475.769	52,8
2	Sumatera Utara	2.337.574	46.038	2,0	537.100	23,0	189.480	8,1	54501	2,3	2.029	0,09	99182	4,2	204.374	8,7	37.504	1,60	1.170.209	50,1	18.712	0,8	1.085.998	46,5
3	Sumatera Barat	882.816	27.440	3,1	250.021	28,3	54.186	6,1	49.401	5,6	1.281	0,15	31.279	3,5	64.238	7,3	18.303	2,07	496.150	56,2	3.772	0,4	498.869	56,5
4	Riau	1.168.341	46.538	4,0	360.289	30,8	106.759	9,1	36140	3,1	598	0,05	23062	2,0	66.483	5,7	12.103	1,04	651.972	55,8	11.076	0,9	752.855	64,4
5	Jambi	679.821	11.379	1,7	269.817	39,7	77.820	11,4	17.214	2,5	354	0,05	12.481	1,8	49.569	7,3	5.687	0,84	444.320	65,4	3.007	0,4	447.377	65,8
6	Sumatera Selatan	1.515.532	15.621	1,0	631.759	41,7	88.173	5,8	25272	1,7	720	0,05	16276	1,1	161.537	10,7	12.442	0,82	951.800	62,8	5.879	0,4	962.829	63,5
7	Bengkulu	371.532	9.984	2,7	145.309	39,1	23.105	6,2	12.900	3,5	451	0,12	9.524	2,6	40.827	11,0	3.238	0,87	245.338	66,0	1.678	0,5	250.888	67,5
8	Lampung	1.634.469	14.223	0,9	672.346	41,1	111.887	6,8	47381	2,9	754	0,05	15840	1,0	192.161	11,8	13.395	0,82	1.067.986	65,3	4.249	0,3	1.010.540	61,8
9	Kep. Bangka Belitung	268.432	5.543	2,1	106.116	39,5	39.505	14,7	7.432	2,8	210	0,08	6.872	2,6	12.853	4,8	2.527	0,94	181.059	67,5	1.602	0,6	181.113	67,5
10	Kepulauan Riau	398.437	8.844	2,2	86.174	21,6	28.990	7,3	15059	3,8	254	0,06	14145	3,6	14.088	3,5	7.719	1,94	175.273	44,0	15.574	3,9	216.306	54,3
11	DKI Jakarta	1.791.162	82.348	4,6	345.361	19,3	204.682	11,4	243.768	13,6	13.422	0,75	67.626	3,8	113.420	6,3	7.643	0,43	1.078.270	60,2	-	-	-	-
12	Jawa Barat	8.618.085	77.874	0,9	3.467.522	40,2	770.138	8,9	591151	6,9	6.555	0,08	169244	2,0	272.867	3,2	87.094	1,01	5.442.445	63,2	54.542	0,6	5.977.553	69,4
13	Jawa Tengah	6.395.811	156.293	2,4	2.485.291	38,9	324.562	5,1	382.181	6,0	9.003	0,14	203.992	3,2	514.479	8,0	80.630	1,26	4.156.430	65,0	29.428	0,5	4.021.360	62,9
14	DI Yogyakarta	570.259	50.798	8,9	110.740	19,4	20.979	3,7	98296	17,2	1.528	0,27	17415	3,1	23.278	4,1	9.094	1,59	332.128	58,2	4.106	0,7	388.549	68,1
15	Jawa Timur	7.069.863	114.392	1,6	2.972.413	42,0	630.384	8,9	418.001	5,9	7.520	0,11	225.271	3,2	332.311	4,7	72.787	1,03	4.773.081	67,5	22.145	0,3	4.634.411	65,6
16	Banten	2.214.835	19.153	0,9	973.090	43,9	108.263	4,9	88683	4,0	927	0,0	30441	1,4	79.651	3,6	20.008	0,90	1.320.216	59,6	7.113	0,3	1.413.702	63,8
17	Bali	712.956	19.461	2,7	180.111	25,3	31.060	4,4	128.879	18,1	1.103	0,2	36.290	5,1	17.624	2,5	10.782	1,51	425.311	59,7	8.891	1,2	437.833	61,4
18	Nusa Tenggara Barat	1.007.065	2.812	0,3	385.795	38,3	25.637	2,5	43612	4,3	639	0,1	12150	1,2	120.001	11,9	15.480	1,54	606.125	60,2	1.036	0,1	618.316	61,4
19	Nusa Tenggara Timur	773.614	804	0,1	115.731	15,0	15.796	2,0	20.811	2,7	485	0,1	34.737	4,5	112.603	14,6	20.292	2,62	321.259	41,5	4.539	0,6	350.988	45,4
20	Kalimantan Barat	961.970	3.491	0,4	358.859	37,3	120.911	12,6	28974	3,0	320	0,0	12633	1,3	34.575	3,6	9.287	0,97	569.050	59,2	3.056	0,3	514.992	53,5
21	Kalimantan Tengah	512.312	3.218	0,6	218.745	42,7	68.504	13,4	7.875	1,5	165	0,0	5.948	1,2	27.766	5,4	3.397	0,66	335.619	65,5	1.247	0,2	355.952	69,5
22	Kalimantan Selatan	758.823	7.297	1,0	298.483	39,3	179.350	23,6	13573	1,8	494	0,1	9094	1,2	27.562	3,6	4.348	0,57	540.200	71,2	2.840	0,4	579.325	76,3
23	Kalimantan Timur	679.726	14.159	2,1	173.313	25,5	85.254	12,5	44.043	6,5	513	0,1	19.032	2,8	26.026	3,8	8.954	1,32	371.294	54,6	3.387	0,5	355.394	52,3
24	Kalimantan Utara	122.180	1.161	1,0	33.607	27,5	12.279	10,1	4772	3,9	38	0,0	1826	1,5	7.241	5,9	1.434	1,17	62.358	51,0	1.352	1,1	60.107	49,2
25	Sulawesi Utara	405.542	721	0,2	133.170	32,8	35.033	8,6	13.718	3,4	301	0,1	7.664	1,9	47.792	11,8	4.283	1,06	242.682	59,8	1.166	0,3	216.883	53,5
26	Sulawesi Tengah	516.221	904	0,2	137.750	26,7	60.415	11,7	19032	3,7	385	0,1	9460	1,8	52.375	10,1	7.472	1,45	287.794	55,8	1.966	0,4	273.348	53,0
27	Sulawesi Selatan	1.436.095	11.589	0,8	447.608	31,2	146.632	10,2	46.433	3,2	1.077	0,1	31.259	2,2	141.141	9,8	20.913	1,46	846.652	59,0	7.500	0,5	746.526	52,0
28	Sulawesi Tenggara	442.862	1.256	0,3	109.324	24,7	47.361	10,7	8960	2,0	268	0,1	6243	1,4	43.392	9,8	9.886	2,23	226.689	51,2	1.278	0,3	220.851	49,9
29	Gorontalo	206.437	360	0,2	54.875	26,6	19.962	9,7	6.732	3,3	332	0,2	5.936	2,9	34.433	16,7	3.619	1,75	126.248	61,2	240	0,1	114.227	55,3
30	Sulawesi Barat	245.133	1.564	0,6	57.346	23,4	26.902	11,0	5899	2,4	181	0,1	3941	1,6	23.302	9,5	6.232	2,54	125.367	51,1	1.271	0,5	120.567	49,2
31	Maluku	279.030	483	0,2	67.996	24,4	7.752	2,8	1.598	0,6	46	0,0	2.573	0,9	23.384	8,4	5.598	2,01	109.429	39,2	782	0,3	85.904	30,8
32	Maluku Utara	225.651	125	0,1	62.109	27,5	3.395	1,5	1543	0,7	59	0,0	1331	0,6	40.592	18,0	1.913	0,85	111.066	49,2	423	0,2	96.332	42,7
33	Papua	728.462	1.259	0,2	37.717	5,2	6.843	0,9	2.128	0,3	96	0,0	3.038	0,4	20.396	2,8	4.662	0,64	76.138	10,5	919	0,1	44.761	6,1
34	Papua Barat	184.990	283	0,2	36.355	19,7	7.924	4,3	1374	0,7	48	0,0	1580	0,9	7.880	4,3	1.988	1,07	57.431	31,0	-	-	-	-
35	Papua Selatan*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244	-	54.237	-
Indonesia		**47.017.047**	**771.849**	**1,6**	**16.610.844**	**35,3**	**3.743.598**	**13,2**	**2.517.068**	**8,9**	**52.696**	**0,19**	**1.164.338**	**4,1**	**2.977.100**	**10,5**	**546.929**	**1,9**	**28.384.421**	**60,4**	**234.373**	**0,5**	**28.618.795**	**60,9**

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 dengan weighting, BKKBN
Keterangan:
AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
MOP : Metode Operasi Pria
MOW : Metode Operasi Wanita
MAL : Metode Amenorea Laktasi
- : Tidak ada data
**Data Papua termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pengunungan*
**Data Papua Barat termasuk Papua Barat Daya*

Lampiran 30

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	PUS Peserta KB Modern										
		RS Pemerintah/ TNI/Polri	RS Swasta	Puskesmas/ Klinik TNI/ Polri	Klinik Swasta	Praktek Dokter	Pustu/ Pusling/ Bidan Desa	Praktek Mandiri Bidan	Mobil Pelayanan KB	Toko Obat/Apotik	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	29.911	7.059	103.171	30.379	9.524	115.297	136.773	2.844	20.075	1.998	457.031
2	Sumatera Utara	72.887	62.571	243.761	120.866	13.389	192.532	346.832	19.874	95.038	2.460	1.170.209
3	Sumatera Barat	34.139	21.340	88.964	17.819	4.718	168.161	110.435	6.595	41.795	2.183	496.150
4	Riau	19.945	28.466	92.916	63.395	14.629	116.508	230.834	3.121	80.320	1.838	651.972
5	Jambi	9.607	9.845	37.148	10.253	6.758	139.032	157.570	21.488	51.121	1.497	444.320
6	Sumatera Selatan	17.510	14.513	115.148	22.061	13.931	356.148	367.967	14.576	28.182	1.764	951.799
7	Bengkulu	11.704	3.619	47.420	5.199	2.175	66.246	93.370	2.748	12.493	365	245.338
8	Lampung	10.429	21.268	114.402	34.152	19.852	259.834	534.166	20.423	50.563	2.897	1.067.986
9	Kep. Bangka Belitung	5.709	4.457	17.556	5.223	2.545	60.768	56.974	2.055	23.419	2.355	181.059
10	Kepulauan Riau	11.860	13.083	36.085	14.627	3.302	24.163	49.936	1.268	20.601	349	175.273
11	DKI Jakarta**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	186.889	228.993	646.437	275.356	85.434	850.108	2.571.224	17.753	559.128	21.124	5.442.445
13	Jawa Tengah	214.770	184.478	699.628	166.904	65.542	722.776	1.743.076	15.276	327.033	16.949	4.156.431
14	DI Yogyakarta	33.562	23.645	58.110	28.304	6.895	9.587	115.636	539	54.843	1.008	332.128
15	Jawa Timur	227.778	228.774	489.347	199.067	75.554	1.187.082	1.839.488	9.100	505.711	11.180	4.773.081
16	Banten	23.381	54.149	174.008	177.265	16.581	181.193	619.507	6.606	65.451	2.077	1.320.216
17	Bali	45.890	35.612	58.557	19.397	24.377	50.404	169.355	2.694	18.648	377	425.311
18	Nusa Tenggara Barat	20.463	7.900	87.910	9.457	13.566	326.982	121.908	4.999	10.363	2.577	606.125
19	Nusa Tenggara Timur	37.116	7.010	140.593	4.840	1.723	115.153	6.418	2.396	3.555	2.457	321.259
20	Kalimantan Barat	20.673	8.434	111.872	26.578	9.508	207.816	145.220	1.396	36.568	986	569.050
21	Kalimantan Tengah	8.784	3.564	60.578	19.819	3.776	91.104	105.981	997	39.404	1.612	335.619
22	Kalimantan Selatan	12.143	5.024	49.342	19.032	6.277	141.533	168.922	8.589	120.293	9.045	540.200
23	Kalimantan Timur	22.627	23.545	67.199	31.036	10.758	36.589	113.522	667	64.370	982	371.294
24	Kalimantan Utara	3.549	350	20.789	2.883	5.303	6.183	15.748	107	7.388	56	62.358
25	Sulawesi Utara	12.938	6.432	71.585	8.425	15.638	59.636	47.578	2.324	17.483	643	242.682
26	Sulawesi Tengah	15.969	4.546	68.374	4.022	2.735	146.986	24.532	1.906	16.899	1.824	287.793
27	Sulawesi Selatan	51.060	21.745	248.513	38.782	7.676	263.318	121.858	4.702	82.424	6.573	846.652
28	Sulawesi Tenggara	9.330	2.323	69.004	6.769	2.934	79.445	28.921	8.929	16.688	2.344	226.688
29	Gorontalo	8.257	2.717	46.018	5.209	2.472	35.631	14.532	633	10.057	723	126.249
30	Sulawesi Barat	6.017	1.370	34.265	4.614	1.261	49.036	17.461	1.735	8.336	1.271	125.367
31	Maluku	3.956	732	40.564	1.305	827	44.082	10.181	4.187	2.259	1.337	109.429
32	Maluku Utara	5.319	344	40.624	2.176	929	39.105	16.107	5.413	527	521	111.066
33	Papua	5.585	707	42.361	3.631	1.818	11.167	7.262	1.263	2.213	130	76.138
34	Papua Barat	4.759	1.053	31.907	1.248	496	10.370	3.980	101	3.399	118	57.431
35	Papua Selatan*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**1.204.514**	**1.039.666**	**4.254.158**	**1.380.092**	**452.904**	**6.163.973**	**10.113.274**	**197.305**	**2.396.644**	**103.621**	**27.306.151**

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 dengan weighting, BKKBN

Keterangan:

- : Tidak ada data

**Data Papua termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pengunungan*

**Data Papua Barat termasuk Papua Barat Daya*

***Data DKI Jakarta tidak ada pemilahan PUS Peserta KB Modern menurut Tempat Pelayanan*

Lampiran 31

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Sasaran Ibu Bersalin	Persalinan di Fasyankes	Peserta KB Pasca Salin		Peserta KB Pasca Persalinan															
				ABS	%	Kondom	%	Pil	%	Suntik	%	AKDR	%	MOW	%	MOP	%	Implan	%	MAL	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	110.364	88.787	35.700	40,2	2.186	6,1	9.259	26,0	14.789	41,5	1.276	3,6	1.220	3,4	55	0,2	951	2,7	5.929	16,6
2	Sumatera Utara	292.694	250.461	49.581	19,8	5.432	10,8	10.933	21,7	11.754	23,3	2.390	4,7	3.838	7,6	630	1,3	6.706	13,3	8.684	17,2
3	Sumatera Barat	109.553	80.613	37.441	46,4	3.651	9,7	5.153	13,7	16.942	45,1	2.746	7,3	1.587	4,2	69	0,2	4.360	11,6	3.074	8,2
4	Riau	138.041	109.306	69.570	63,6	8.206	11,9	14.653	21,3	34.626	50,4	3.037	4,4	559	0,8	9	0,0	6.061	8,8	1.587	2,3
5	Jambi	65.696	56.525	34.943	61,8	1.037	2,6	6.706	16,5	28.902	71,3	1.300	3,2	369	0,9	28	0,1	1.431	3,5	784	1,9
6	Sumatera Selatan	166.383	151.208	120.037	79,4	8.051	6,8	23.704	20,0	68.121	57,3	1.967	1,7	1.233	1,0	61	0,1	9.150	7,7	6.510	5,5
7	Bengkulu	36.565	31.287	23.593	75,4	1.073	4,5	2.747	11,6	17.229	73,0	476	2,0	179	0,8	4	0,0	1.806	7,7	79	0,3
8	Lampung	150.842	140.447	80.321	57,2	4.331	5,4	10.800	13,4	51.800	64,3	3.274	4,1	647	0,8	235	0,3	5.984	7,4	3.484	4,3
9	Kep. Bangka Belitung	27.132	22.900	16.448	71,8	565	3,9	3.131	21,9	8.716	60,9	486	3,4	359	2,5	5	0,0	875	6,1	180	1,3
10	Kepulauan Riau	52.126	47.653	24.659	51,7	2.105	9,4	3.402	15,2	7.814	34,9	1.383	6,2	838	3,7	8	0,0	2.116	9,4	4.733	21,1
11	DKI Jakarta	179.547	197.701	160.117	81,0	14.380	9,0	16.448	10,3	67.563	42,2	31.496	19,7	3.375	2,1	156	0,1	14.304	8,9	12.395	7,7
12	Jawa Barat	866.120	817.570	513.986	62,9	20.766	4,0	78.718	15,3	290.157	56,5	52.830	10,3	11.998	2,3	12172	2,4	24.576	4,8	22.769	4,4
13	Jawa Tengah	521.983	461.523	239.355	51,9	11.679	4,6	11.706	4,6	140.810	55,5	26.986	10,6	8.895	3,5	563	0,2	32.807	12,9	20.366	8,0
14	DI Yogyakarta	61.511	35.058	8.001	22,8	21.001	27,3	9.647	12,5	42.179	54,7	2.725	3,5	417	0,5	4	0,0	1.069	1,4	-	0,0
15	Jawa Timur	561.318	522.430	306.702	58,7	11.047	3,7	23.674	8,0	184.662	62,1	26.774	9,0	8.505	2,9	58	0,0	26.140	8,8	16.571	5,6
16	Banten	236.285	222.448	146.543	65,9	5.035	3,6	21.011	14,9	89.351	63,5	11.940	8,5	415	0,3	42	0,0	11.706	8,3	1.267	0,9
17	Bali	69.923	62.558	37.146	59,4	5.560	14,8	2.164	5,8	13.602	36,2	7.722	20,6	3.557	9,5	64	0,2	2.225	5,9	2.637	7,0
18	Nusa Tenggara Barat	103.125	72.506	57.044	78,7	509	0,9	948	1,7	36.445	65,1	2.837	5,1	732	1,3	10	0,0	6.514	11,6	7.953	14,2
19	Nusa Tenggara Timur	124.127	82.254	16.054	19,5	107	0,6	599	3,4	5.773	32,7	1.288	7,3	2.305	13,0	55	0,3	7.037	39,8	505	2,9
20	Kalimantan Barat	95.794	74.296	41.180	55,4	882	2,1	7.595	18,4	25.318	61,4	1.180	2,9	761	1,8	7	0,0	1.136	2,8	4.327	10,5
21	Kalimantan Tengah	46.595	36.177	26.538	73,4	160	0,7	2.922	12,5	17.683	75,5	654	2,8	357	1,5	203	0,9	1.211	5,2	225	1,0
22	Kalimantan Selatan	76.955	60.319	46.619	77,3	843	1,7	9.822	19,4	31.606	62,5	2.544	5,0	931	1,8	111	0,2	1.750	3,5	2.990	5,9
23	Kalimantan Timur	64.403	59.899	35.587	59,4	2.979	8,4	5.008	14,1	17.290	48,8	3.466	9,8	1.110	3,1	54	0,2	3.479	9,8	2.015	5,7
24	Kalimantan Utara	14.066	12.931	6.652	51,4	297	4,5	301	4,5	1.992	30,0	463	7,0	256	3,8	0	0,0	879	13,2	2.462	37,0
25	Sulawesi Utara	38.836	33.454	18.491	55,3	444	2,5	1.712	9,5	12.181	67,5	507	2,8	188	1,0	13	0,1	2.992	16,6	-	0,0
26	Sulawesi Tengah	62.093	45.252	25.012	55,3	437	1,6	7.138	26,8	11.542	43,4	1.917	7,2	1.053	4,0	33	0,1	4.029	15,1	464	1,7
27	Sulawesi Selatan	150.845	137.378	69.936	50,9	838	1,3	8.228	13,1	33.595	53,3	2.659	4,2	1.645	2,6	12	0,0	13.039	20,7	3.028	4,8
28	Sulawesi Tenggara	57.199	43.973	17.823	40,5	602	3,4	5.704	32,3	8.378	47,4	238	1,3	122	0,7	3	0,0	1.107	6,3	1.528	8,6
29	Gorontalo	21.145	18.676	8.754	46,9	69	0,8	779	9,0	4.320	50,1	290	3,4	169	2,0	0	0,0	2.632	30,5	366	4,2
30	Sulawesi Barat	28.517	23.315	11.620	49,8	186	2,1	1.332	15,0	4.300	48,4	351	4,0	514	5,8	19	0,2	1.956	22,0	219	2,5
31	Maluku	37.027	22.729	11.822	52,0	63	0,6	1.140	10,5	6.262	57,7	157	1,4	178	1,6	2	0,0	3.002	27,7	44	0,4
32	Maluku Utara	25.699	20.235	11.227	55,5	90	0,8	922	8,2	6.239	55,5	494	4,4	77	0,7	17	0,2	2.389	21,3	1.008	9,0
33	Papua	17.526	14.476	2.835	19,6	501	18,0	695	24,9	1.262	45,3	33	1,2	5	0,2	0	0,0	266	9,5	25	0,9
34	Papua Barat	10.724	4.518	1.694	37,5	12	0,7	93	5,1	1.352	74,1	72	3,9	52	2,8	0	0,0	244	13,4	-	0,0
35	Papua Selatan	12.863	9.835	533	5,4	26	2,7	178	18,4	602	62,3	33	3,4	10	1,0	0	0,0	118	12,2	-	0,0
36	Papua Tengah	21.494	7.514	-	0,0	95	5,8	287	17,5	908	55,5	46	2,8	14	0,9	0	0,0	287	17,5	-	0,0
37	Papua Pegunungan	17.701	2.045	-	0,0	1	14,3	2	28,6	4	57,1	-	0,0	-	0,0	0	0,0	-	0,0	-	0,0
38	Papua Barat Daya	11.352	4.314	-	0,0	3	18,8	-	0,0	12	75,0	1	6,3	-	0,0	0	0,0	-	0,0	-	0,0
Indonesia		4.684.169	4.084.571	2.313.564	56,6	135.249	5,7	309.261	13,0	1.316.081	55,4	198.038	8,3	58.470	2,5	14702	0,6	206.334	8,7	138.208	5,8

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 34

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kematian						
		Neonatal			Post Neonatal	Balita		
		0-7 hari	8-28 hari	0-28 hari		Bayi*	Anak Balita	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	798	121	919	128	1.047	35	1.082
2	Sumatera Utara	770	154	924	84	1.008	69	1.077
3	Sumatera Barat	477	138	615	211	826	63	889
4	Riau	573	157	730	70	800	11	811
5	Jambi	274	56	330	30	360	7	367
6	Sumatera Selatan	479	96	575	91	666	24	690
7	Bengkulu	216	68	284	55	339	15	354
8	Lampung	536	158	694	81	775	17	792
9	Kepulauan Bangka Belitung	148	45	193	43	236	25	261
10	Kepulauan Riau	164	59	223	55	278	14	292
11	DKI Jakarta	572	260	832	147	979	48	1.027
12	Jawa Barat	3477	1025	4.502	732	5.234	291	5.525
13	Jawa Tengah	2727	875	3.602	970	4.572	546	5.118
14	D I Yogyakarta	198	73	271	83	354	41	395
15	Jawa Timur	2525	865	3.390	548	3.938	167	4.105
16	Banten	1038	284	1.322	185	1.507	39	1.546
17	Bali	346	114	460	147	607	56	663
18	Nusa Tenggara Barat	559	167	726	85	811	15	826
19	Nusa Tenggara Timur	658	169	827	164	991	27	1.018
20	Kalimantan Barat	605	133	738	82	820	28	848
21	Kalimantan Tengah	366	88	454	53	507	9	516
22	Kalimantan Selatan	515	160	675	111	786	23	809
23	Kalimantan Timur	429	87	516	90	606	35	641
24	Kalimantan Utara	96	33	129	21	150	4	154
25	Sulawesi Utara	114	34	148	36	184	11	195
26	Sulawesi Tengah	257	33	290	39	329	5	334
27	Sulawesi Selatan	1010	262	1.272	166	1.438	36	1.474
28	Sulawesi Tenggara	278	60	338	47	385	15	400
29	Gorontalo	90	20	110	27	137	11	148
30	Sulawesi Barat	237	43	280	79	359	20	379
31	Maluku	170	43	213	52	265	12	277
32	Maluku Utara	184	37	221	69	290	19	309
33	Papua	122	34	156	19	175	6	181
34	Papua Barat	107	16	123	11	134	7	141
35	Papua Selatan	84	17	101	42	143	17	160
36	Papua Tengah	94	28	122	16	138	4	142
37	Papua Pegunungan	8	5	13	8	21	4	25
38	Papua Barat Daya	81	17	98	18	116	0	116
39	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	1	0	1	1	2	0	2
40	Luar Negeri	93	20	113	19	132	5	137
Indonesia		**21.476**	**6.054**	**27.530**	**4.915**	**32.445**	**1.781**	**34.087**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan : *= kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

Lampiran 35

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2023

Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari)

No	Provinsi	N1: Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	N2: Disorders related to length of gestation and fetal growth	N3: Birth trauma	N4: Complications of intrapartum events	N5: Convulsions and disorders of cerebral status	N6: Infection	N7: Respiratory and cardiovascular disorders	N8: Other neonatal conditions	N9: Low birth weight and prematurity	N10: Miscellaneous	P7: Penyakit saraf, Penyakit Sistem Saraf Pusat	P8: Pneumonia, Influenza dan Pneumonia	Belum Tahu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	103	814
2	Sumatera Utara	1	0	1	2	0	1	10	0	3	1	0	0	168	737
3	Sumatera Barat	3	0	0	0	0	2	32	2	7	0	0	1	71	497
4	Riau	5	0	0	5	0	1	3	0	8	0	0	0	106	602
5	Jambi	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	52	273
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	4	5	2	2	0	0	0	140	422
7	Bengkulu	3	0	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	29	244
8	Lampung	2	0	0	2	0	0	3	0	1	0	0	0	101	585
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	33	157
10	Kepulauan Riau	1	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	18	198
11	DKI Jakarta	1	0	0	1	0	4	4	1	2	0	0	0	170	649
12	Jawa Barat	12	10	2	6	1	21	47	6	49	1	1		747	3.599
13	Jawa Tengah	12	1	0	13	1	9	54	2	40	2	0	0	479	2.989
14	D I Yogyakarta	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	28	239
15	Jawa Timur	9	2	2	1	0	10	18	4	23	0	0	0	439	2.882
16	Banten	3	1	0	1	0	2	10	0	3	0	0	0	179	1.123
17	Bali	1	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	76	375
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	103	618
19	Nusa Tenggara Timur	2	0	0	0	0	1	12	1	1	0	0	0	114	696
20	Kalimantan Barat	7	1	0	2	0	2	12	0	12	0	0	0	131	571
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	3	0	1	3	0	2	0	0	0	55	390
22	Kalimantan Selatan	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	104	565
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	73	439
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	113
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	21	125
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	40	248
27	Sulawesi Selatan	1	0	0	1	0	1	9	0	8	0	0	0	165	1.087
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	1	0	1	6	0	6	0	0	0	62	262
29	Gorontalo	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	29	78
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	5	0	7	0	0	0	23	244
31	Maluku	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	19	188
32	Maluku Utara	1	0	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	34	178
33	Papua	3	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	16	131
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	103
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	82
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	110
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	81
39	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40	Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	98
	Indonesia	**71**	**16**	**5**	**44**	**6**	**70**	**265**	**23**	**193**	**4**	**1**	**1**	**4.030**	**22.801**

Penyebab Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan)

No	Provinsi	P1: Diare, Penyakit infeksi usus, Enteritis dan colitis non-infektif	P2: Campak	P3 : Covid19	P4: Demam Berdarah	P5: Difteri	P6: HIV/AIDS	P7: Penyakit saraf, Penyakit Sistem Saraf Pusat	P8: Pneumonia, Influenza dan Pneumonia	P9: Tetanus	P10: Tuberkulosis	P11: Gagal ginjal, Penyakit Sistem Ginjal dan Reproduksi, Malformasi Kongenital dan Kelainan	P12: Gigitan Ular	P13: Gizi Buruk, Malnutrisi	P14: Kecelakaan lalu lintas, Penyebab eksternal morbiditas	P15: Keganasan, C00-D49	P16: Keracunan	P17: Luka Bakar	P18: Penyakit Jantung Bawaan, Malformasi kongenital dan kelainan kromosom	P19: Tenggelam	Belum Tahu	Lainnya
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	98
2	Sumatera Utara	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	66
3	Sumatera Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	178
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	59
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16	74
7	Bengkulu	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	46
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	69
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	38
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	50
11	DKI Jakarta	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	102
12	Jawa Barat	5	0	0	0	0	0	1	23	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0	120	577
13	Jawa Tengah	23	1	0	2	0	0	8	38	0	1	0	0	5	0	1	1	0	10	0	170	710
14	D I Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	64
15	Jawa Timur	4	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	80	455
16	Banten	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		30	151
17	Bali	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	24	117
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	10	64
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	16	143
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		16	55
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	43
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17	94
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	74
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	19
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	31
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6	33
27	Sulawesi Selatan	4	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	139
28	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5	41
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	20
30	Sulawesi Barat	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13	61
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	45
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	58
33	Papua	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	9
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	37
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	15
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	14
39	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
40	Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	17
	Indonesia	**48**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**15**	**100**	**0**	**3**	**0**	**0**	**8**	**0**	**5**	**2**	**0**	**23**	**1**	**792**	**3.914**

Penyebab Kematian Anak Balita (12-59 Bulan)

No	Provinsi	P1: Diare, Penyakit infeksi usus, Enteritis dan colitis non-infektif	P2: Campak	P3 : Covid19	P4: Demam Berdarah	P5: Difteri	P6: HIV/AIDS	P7: Penyakit saraf, Penyakit Sistem Saraf Pusat	P8: Pneumonia, Influenza dan Pneumonia	P9: Tetanus	P10: Tuberkulosis	P11: Gagal ginjal, Penyakit Sistem Ginjal dan Reproduksi, Malformasi Kongenital dan Kelainan	P12: Gigitan Ular	P13: Gizi Buruk, Malnutrisi	P14: Kecelakaan lalu lintas, Penyebab eksternal morbiditas	P15: Keganasan, C00-D49	P16: Keracunan	P17: Luka Bakar	P18: Penyakit Jantung Bawaan, Malformasi kongenital dan kelainan kromosom	P19: Tenggelam	Belum Tahu	Lainnya
(1)	(2)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	31
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	29
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	58
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22
7	Bengkulu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	40
12	Jawa Barat	4	0	0	1	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	43	231
13	Jawa Tengah	6	0	0	3	0	0	8	11	0	0	2	0	4	0	7	0	0	9	1	97	398
14	D I Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	33
15	Jawa Timur	2	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	138
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	35
17	Bali	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	44
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	11
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22
20	Kalimantan Barat	4	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1		1	0	0	3	1	5	9
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	23
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
27	Sulawesi Selatan	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	28
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	18
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15
33	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Alamat Domisili Ditolak (Nasional)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	Indonesia	**19**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**13**	**28**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**0**	**9**	**1**	**0**	**17**	**3**	**315**	**1.360**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 37

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi baru lahir ditimbang		BBLR	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	105.109	54.493	51,8	2.211	4,1
2	Sumatera Utara	278.756	189.080	67,8	2.157	1,1
3	Sumatera Barat	104.336	80.950	77,6	3.558	4,4
4	Riau	131.468	79.030	60,1	1.363	1,7
5	Jambi	62.568	64.655	103,3	1.802	2,8
6	Sumatera Selatan	158.460	163.797	103,4	3.387	2,1
7	Bengkulu	34.824	33.666	96,7	1.259	3,7
8	Lampung	143.659	133.878	93,2	3.380	2,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.840	23.322	90,3	1.196	5,1
10	Kepulauan Riau	49.644	46.630	93,9	1.077	2,3
11	DKI Jakarta	170.997	172.014	100,6	1.705	1,0
12	Jawa Barat	824.876	786.065	95,3	24.588	3,1
13	Jawa Tengah	497.127	413.589	83,2	25.121	6,1
14	D I Yogyakarta	58.582	33.437	57,1	2.574	7,7
15	Jawa Timur	534.589	472.195	88,3	20.690	4,4
16	Banten	225.033	212.743	94,5	3.998	1,9
17	Bali	66.593	62.292	93,5	2.214	3,6
18	Nusa Tenggara Barat	98.214	76.367	77,8	3.327	4,4
19	Nusa Tenggara Timur	118.216	71.221	60,2	5.701	8,0
20	Kalimantan Barat	91.232	72.642	79,6	3.856	5,3
21	Kalimantan Tengah	44.376	44.569	100,4	1.690	3,8
22	Kalimantan Selatan	73.290	60.288	82,3	4.127	6,9
23	Kalimantan Timur	61.336	59.549	97,1	3.800	6,4
24	Kalimantan Utara	13.396	12.490	93,2	819	6,6
25	Sulawesi Utara	36.987	22.670	61,3	863	3,8
26	Sulawesi Tengah	59.136	45.869	77,6	2.299	5,0
27	Sulawesi Selatan	143.662	129.040	89,8	10.101	7,8
28	Sulawesi Tenggara	54.475	38.399	70,5	1.758	4,6
29	Gorontalo	20.138	18.409	91,4	1.484	8,1
30	Sulawesi Barat	27.159	21.774	80,2	1.638	7,5
31	Maluku	35.264	19.110	54,2	763	4,0
32	Maluku Utara	24.475	19.116	78,1	938	4,9
33	Papua	16.693	10.343	62,0	630	6,1
34	Papua Barat	10.213	2.687	26,3	142	5,3
35	Papua Selatan	12.250	4.226	34,5	245	5,8
36	Papua Tengah	20.469	4.438	21,7	294	6,6
37	Papua Pegunungan	16.858	904	5,4	55	6,1
38	Papua Barat Daya	10.812	3.345	30,9	196	5,9
Indonesia		**4.461.112**	**3.759.292**	**84,3**	**147.006**	**3,9**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 38

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)*	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	105.109	82.302	78,3	85.980	81,8
2	Sumatera Utara	278.756	248.642	89,2	240.774	86,4
3	Sumatera Barat	104.336	82.290	78,9	80.277	76,9
4	Riau	131.468	113.099	86,0	111.426	84,8
5	Jambi	62.568	58.757	93,9	57.711	92,2
6	Sumatera Selatan	158.460	149.986	94,7	147.600	93,1
7	Bengkulu	34.824	31.048	89,2	30.329	87,1
8	Lampung	143.659	139.374	97,0	137.642	95,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.840	22.936	88,8	22.680	87,8
10	Kepulauan Riau	49.644	47.808	96,3	45.817	92,3
11	DKI Jakarta	170.997	199.706	116,8	199.800	116,8
12	Jawa Barat	824.876	817.725	99,1	807.156	97,9
13	Jawa Tengah	497.127	460.376	92,6	457.116	92,0
14	D I Yogyakarta	58.582	32.688	55,8	32.690	55,8
15	Jawa Timur	534.589	518.731	97,0	511.828	95,7
16	Banten	225.033	226.167	100,5	220.423	98,0
17	Bali	66.593	62.571	94,0	62.558	93,9
18	Nusa Tenggara Barat	98.214	88.413	90,0	86.863	88,4
19	Nusa Tenggara Timur	118.216	85.345	72,2	82.364	69,7
20	Kalimantan Barat	91.232	80.936	88,7	77.235	84,7
21	Kalimantan Tengah	44.376	40.278	90,8	38.316	86,3
22	Kalimantan Selatan	73.290	62.141	84,8	61.348	83,7
23	Kalimantan Timur	61.336	59.905	97,7	55.072	89,8
24	Kalimantan Utara	13.396	13.001	97,1	12.626	94,3
25	Sulawesi Utara	36.987	29.053	78,5	32.910	89,0
26	Sulawesi Tengah	59.136	43.505	73,6	43.849	74,1
27	Sulawesi Selatan	143.662	137.687	95,8	134.492	93,6
28	Sulawesi Tenggara	54.475	45.048	82,7	44.080	80,9
29	Gorontalo	20.138	19.647	97,6	19.083	94,8
30	Sulawesi Barat	27.159	23.830	87,7	23.261	85,6
31	Maluku	35.264	26.787	76,0	26.809	76,0
32	Maluku Utara	24.475	21.984	89,8	21.428	87,6
33	Papua	16.693	14.052	84,2	13.350	80,0
34	Papua Barat	10.213	3.701	36,2	3.224	31,6
35	Papua Selatan	12.250	6.035	49,3	6.130	50,0
36	Papua Tengah	20.469	7.532	36,8	6.476	31,6
37	Papua Pegunungan	16.858	785	4,7	3.623	21,5
38	Papua Barat Daya	10.812	936	8,7	5.134	47,5
Indonesia		**4.461.112**	**4.104.807**	**92,0**	**4.049.480**	**90,8**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

ıse bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"

Lampiran 39

PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD)
DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Bayi Baru Lahir			Bayi Usia 6 Bulan		
		Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif Sampai 6 Bulan	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	54.599	43.738	80,1	184.663	92.772	50,2
2	Sumatera Utara	186.732	127.707	68,4	371.238	155.028	41,8
3	Sumatera Barat	81.102	66.136	81,6	97.428	70.126	72,0
4	Riau	81.081	68.782	84,8	116.703	51.906	44,5
5	Jambi	67.473	63.704	94,4	132.851	87.741	66,0
6	Sumatera Selatan	175.292	155.282	88,6	220.163	141.920	64,5
7	Bengkulu	34.622	29.629	85,6	36.505	24.276	66,5
8	Lampung	132.079	118.619	89,8	250.684	185.872	74,2
9	Kep. Bangka Belitung	23.319	18.207	78,1	31.220	19.092	61,2
10	Kepulauan Riau	47.303	42.288	89,4	47.717	34.952	73,3
11	DKI Jakarta	175.595	174.945	99,6	75.703	60.758	80,3
12	Jawa Barat	800.628	715.804	89,4	927.638	622.994	67,2
13	Jawa Tengah	434.650	381.208	87,7	636.928	409.435	64,3
14	DI Yogyakarta	33.669	30.164	89,6	32.010	24.434	76,3
15	Jawa Timur	479.225	401.803	83,8	543.967	391.595	72,0
16	Banten	213.866	190.730	89,2	351.739	244.178	69,4
17	Bali	62.711	41.716	66,5	64.139	45.105	70,3
18	Nusa Tenggara Barat	78.274	67.756	86,6	263.638	213.729	81,1
19	Nusa Tenggara Timur	73.823	64.409	87,3	137.169	103.515	75,5
20	Kalimantan Barat	74.066	63.445	85,7	88.244	45.819	51,9
21	Kalimantan Tengah	45.795	42.478	92,8	47.247	25.777	54,6
22	Kalimantan Selatan	61.214	51.670	84,4	74.520	40.463	54,3
23	Kalimantan Timur	59.856	50.106	83,7	59.517	34.517	58,0
24	Kalimantan Utara	12.829	10.411	81,2	23.040	10.468	45,4
25	Sulawesi Utara	23.885	17.017	71,3	59.606	23.702	39,8
26	Sulawesi Tengah	46.570	41.673	89,5	80.723	47.839	59,3
27	Sulawesi Selatan	130.077	110.934	85,3	158.912	114.122	71,8
28	Sulawesi Tenggara	38.959	37.227	95,6	48.784	27.819	57,0
29	Gorontalo	18.601	15.692	84,4	32.436	11.886	36,6
30	Sulawesi Barat	22.065	19.898	90,2	26.382	10.481	39,7
31	Maluku	20.006	17.040	85,2	38.419	13.703	35,7
32	Maluku Utara	19.403	18.046	93,0	24.980	10.992	44,0
33	Papua	10.793	8.734	80,9	15.046	2.140	14,2
34	Papua Barat	2.741	2.225	81,2	5.765	628	10,9
35	Papua Selatan	4.358	3.796	87,1	11.177	2.311	20,7
36	Papua Tengah	5.032	4.603	91,5	8.430	2.191	26,0
37	Papua Pegunungan	935	935	100,0	2.320	440	19,0
38	Papua Barat Daya	3.342	2.363	70,7	6.078	815	13,4
Indonesia		**3.836.570**	**3.320.920**	**86,6**	**5.333.729**	**3.405.541**	**63,9**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 42

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi di Imunisasi HB0		Bayi di Imunisasi BCG	
		L+P	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(5)*	*(10)*	*(11)*	*(22)*	*(23)*
1	Aceh	105.120	35.127	33,4	34.791	33,1
2	Sumatera Utara	278.770	103.989	37,3	121.841	43,7
3	Sumatera Barat	104.348	49.999	47,9	59.673	57,2
4	Riau	131.472	75.426	57,4	89.195	67,8
5	Jambi	62.574	50.130	80,1	53.017	84,7
6	Sumatera Selatan	158.470	121.346	76,6	136.316	86,0
7	Bengkulu	34.830	19.318	55,5	24.536	70,4
8	Lampung	143.668	79.277	55,2	99.815	69,5
9	Kep. Bangka Belitung	25.844	16.210	62,7	18.352	71,0
10	Kepulauan Riau	49.646	36.017	72,5	39.599	79,8
11	DKI Jakarta	171.000	100.733	58,9	106.782	62,4
12	Jawa Barat	824.892	417.060	50,6	502.579	60,9
13	Jawa Tengah	497.146	365.062	73,4	416.578	83,8
14	D I Yogyakarta	35.883	29.376	81,9	35.767	99,7
15	Jawa Timur	534.610	325.563	60,9	379.793	71,0
16	Banten	225.038	176.635	78,5	190.904	84,8
17	Bali	66.596	52.680	79,1	53.355	80,1
18	Nusa Tenggara Barat	98.220	63.092	64,2	75.864	77,2
19	Nusa Tenggara Timur	118.224	83.983	71,0	90.328	76,4
20	Kalimantan Barat	91.240	40.090	43,9	57.438	63,0
21	Kalimantan Tengah	44.382	15.416	34,7	25.582	57,6
22	Kalimantan Selatan	73.296	50.090	68,3	53.639	73,2
23	Kalimantan Timur	61.342	52.426	85,5	56.875	92,7
24	Kalimantan Utara	13.398	8.839	66,0	11.440	85,4
25	Sulawesi Utara	36.994	16.548	44,7	25.831	69,8
26	Sulawesi Tengah	59.144	29.559	50,0	38.009	64,3
27	Sulawesi Selatan	143.676	95.563	66,5	117.624	81,9
28	Sulawesi Tenggara	54.482	26.686	49,0	38.115	70,0
29	Gorontalo	20.142	12.474	61,9	16.132	80,1
30	Sulawesi Barat	27.164	10.771	39,7	17.614	64,8
31	Maluku	35.270	16.169	45,8	22.489	63,8
32	Maluku Utara	24.480	12.969	53,0	18.237	74,5
33	Papua	16.696	8.228	49,3	10.967	65,7
34	Papua Barat	10.216	5.879	57,5	5.851	57,3
35	Papua Selatan	12.252	6.656	54,3	9.401	76,7
36	Papua Tengah	20.474	4.698	22,9	7.169	35,0
37	Papua Pegunungan	16.864	324	1,9	840	5,0
38	Papua Barat Daya	10.814	5.026	46,5	6.917	64,0
Indonesia		**4.438.677**	**2.619.434**	59,0	**3.069.255**	69,1

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 43.a

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Bayi *(Surviving Infant)*	Bayi Diimunisasi							
			DPT-HB-Hib3		Polio 4*		Campak/MR		Imunisasi Dasar Lengkap	
			L + P		L + P		L + P		L + P	
		L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(5)*	*(10)*	*(11)*	*(16)*	*(17)*	*(22)*	*(23)*	*(28)*	*(29)*
1	Aceh	101.671	39.694	39,0	28.482	28,0	47.355	46,6	40.077	39,4
2	Sumatera Utara	267.218	198.389	74,2	136.025	50,9	224.153	83,9	216.643	81,1
3	Sumatera Barat	100.271	60.702	60,5	59.412	59,3	67.761	67,6	58.383	58,2
4	Riau	129.296	94.385	73,0	91.374	70,7	102.724	79,4	93.844	72,6
5	Jambi	59.737	52.816	88,4	50.018	83,7	57.332	96,0	56.199	94,1
6	Sumatera Selatan	157.419	150.617	95,7	143.323	91,0	168.416	107,0	154.929	98,4
7	Bengkulu	33.184	27.924	84,1	23.054	69,5	31.350	94,5	29.290	88,3
8	Lampung	137.505	127.752	92,9	94.297	68,6	132.692	96,5	131.677	95,8
9	Kep. Bangka Belitung	24.694	20.288	82,2	17.060	69,1	21.860	88,5	21.278	86,2
10	Kepulauan Riau	46.930	36.238	77,2	36.884	78,6	40.198	85,7	35.673	76,0
11	DKI Jakarta	165.589	165.235	99,8	127.757	77,2	191.045	115,4	173.251	104,6
12	Jawa Barat	810.223	786.809	97,1	565.213	69,8	808.228	99,8	791.265	97,7
13	Jawa Tengah	487.570	468.238	96,0	429.952	88,2	506.765	103,9	485.648	99,6
14	D I Yogyakarta	35.562	34.688	97,5		0,0	34.669	97,5	34.657	97,5
15	Jawa Timur	550.862	498.204	90,4	385.774	70,0	516.761	93,8	519.487	94,3
16	Banten	217.211	221.085	101,8	201.106	92,6	257.109	118,4	231.504	106,6
17	Bali	66.344	61.829	93,2	50.497	76,1	67.323	101,5	64.710	97,5
18	Nusa Tenggara Barat	95.501	88.618	92,8	78.981	82,7	95.678	100,2	90.032	94,3
19	Nusa Tenggara Timur	115.964	85.367	73,6	87.472	75,4	96.970	83,6	85.673	73,9
20	Kalimantan Barat	87.383	68.051	77,9	47.723	54,6	68.946	78,9	65.526	75,0
21	Kalimantan Tengah	44.509	36.300	81,6	18.159	40,8	37.121	83,4	35.890	80,6
22	Kalimantan Selatan	69.998	57.141	81,6	55.788	79,7	68.769	98,2	64.236	91,8
23	Kalimantan Timur	60.498	56.978	94,2	55.962	92,5	61.653	101,9	54.827	90,6
24	Kalimantan Utara	12.947	10.869	83,9	9.693	74,9	11.421	88,2	10.142	78,3
25	Sulawesi Utara	37.311	32.976	88,4	21.691	58,1	33.718	90,4	33.432	89,6
26	Sulawesi Tengah	55.499	45.327	81,7	34.348	61,9	48.826	88,0	47.221	85,1
27	Sulawesi Selatan	138.136	131.719	95,4	126.036	91,2	157.362	113,9	144.473	104,6
28	Sulawesi Tenggara	54.707	37.309	68,2	34.957	63,9	47.397	86,6	45.174	82,6
29	Gorontalo	19.018	17.763	93,4	16.323	85,8	19.191	100,9	17.471	91,9
30	Sulawesi Barat	26.357	18.791	71,3	16.235	61,6	22.032	83,6	20.401	77,4
31	Maluku	33.539	26.376	78,6	22.933	68,4	29.941	89,3	26.351	78,6
32	Maluku Utara	23.517	19.779	84,1	17.137	72,9	20.697	88,0	18.646	79,3
33	Papua	17.192	13.586	79,0	7.636	44,4	14.623	85,1	13.182	76,7
34	Papua Barat	9.643	9.477	98,3	5.095	52,8	9.482	98,3	8.824	91,5
35	Papua Selatan	12.810	7.626	59,5	6.799	53,1	8.911	69,6	7.008	54,7
36	Papua Tengah	20.029	7.564	37,8	5.322	26,6	9.720	48,5	6.946	34,7
37	Papua Pegunungan	12.732	2.389	18,8	460	3,6	3.295	25,9	1.079	8,5
38	Papua Barat Daya	10.361	7.870	76,0	5.541	53,5	7.986	77,1	6.285	60,7
Indonesia		**4.348.937**	**3.826.769**	88,0	**3.114.519**	71,6	**4.149.480**	95,4	**3.941.334**	90,6

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan:

*khusus untuk provinsi DIY, diisi dengan imunisasi IPV dosis ke 3

MR = measles rubella

Lampiran 43.b

***DROP OUT RATE* CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023**

No	Provinsi	2021		2022		2023	
		DPT/HB/HiB(1)-Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)-Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)-Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	12,3	7,2	3,0	12,8	2,1	15,7
2	Sumatera Utara	-1,9	5,0	0,4	2,3	-33,0	-4,7
3	Sumatera Barat	11,0	8,0	2,5	5,3	-14,4	5,4
4	Riau	0,5	7,3	3,5	4,4	-2,5	5,7
5	Jambi	-0,1	5,9	1,5	1,9	-3,7	4,3
6	Sumatera Selatan	-7,3	3,0	-0,5	0,4	-17,5	-0,6
7	Bengkulu	1,2	8,3	0,2	3,5	-5,4	8,8
8	Lampung	-8,1	4,9	-1,9	-0,3	7,7	8,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	-3,1	12,1	1,2	4,3	-8,9	1,9
10	Kepulauan Riau	1,9	3,8	-1,9	2,0	-1,5	9,3
11	DKI Jakarta	1,4	0,7	-0,3	0,2	-58,4	-6,3
12	Jawa Barat	-3,8	2,8	-1,2	1,0	-25,3	-4,9
13	Jawa Tengah	-4,0	12,2	-2,9	-5,8	-14,5	0,4
14	DI Yogyakarta	2,2	1,7	1,3	0,4	19,6	29,6
15	Jawa Timur	-6,4	9,3	-0,8	-1,4	-9,7	3,1
16	Banten	1,1	3,9	1,4	2,2	-26,5	1,0
17	Bali	-0,2	5,2	-1,5	1,4	-13,7	9,6
18	Nusa Tenggara Barat	-4,2	9,9	-2,1	-0,8	-15,6	1,3
19	Nusa Tenggara Timur	-2,2	6,9	-0,8	-0,8	-7,6	5,3
20	Kalimantan Barat	5,5	8,5	4,3	6,9	16,6	20,0
21	Kalimantan Tengah	4,1	8,3	3,1	6,4	31,7	29,7
22	Kalimantan Selatan	5,9	7,2	1,5	5,7	-25,2	-1,8
23	Kalimantan Timur	7,0	9,3	4,8	5,2	-4,3	5,2
24	Kalimantan Utara	16,1	19,0	10,2	8,7	17,1	18,5
25	Sulawesi Utara	-1,0	10,2	3,1	1,5	20,3	18,6
26	Sulawesi Tengah	2,6	6,7	4,1	8,3	9,0	10,7
27	Sulawesi Selatan	-0,3	7,6	-2,2	2,0	-28,9	-3,3
28	Sulawesi Tenggara	-0,9	19,1	2,7	2,7	-17,6	4,7
29	Gorontalo	3,1	10,6	1,0	6,0	-12,6	3,6
30	Sulawesi Barat	4,1	13,2	5,0	9,8	-5,4	6,0
31	Maluku	7,6	9,0	1,3	6,2	-17,1	1,3
32	Maluku Utara	3,4	5,9	5,8	4,7	-5,7	4,2
33	Papua	9,6	10,1	10,2	14,3	34,5	27,9
34	Papua Barat	4,2	17,5	14,8	11,3	3,4	15,7
35	Papua Selatan	-	-	-	-	21,0	25,7
36	Papua Tengah	-	-	-	-	8,3	17,8
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	44,8	60,7
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	23,7	19,1
Indonesia		**-1,6**	**6,8**	**1,8**	**2,8**	**-15,4**	**2,0**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 43.c

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023

No	Provinsi	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	23	2	8,7	23	4	17,4	23	3	13,0
2	Sumatera Utara	33	14	42,4	33	23	69,7	33	18	54,5
3	Sumatera Barat	19	2	10,5	19	5	26,3	19	2	10,5
4	Riau	12	2	16,7	12	6	50,0	12	5	41,7
5	Jambi	11	7	63,6	11	11	100,0	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	16	94,1	17	17	100,0	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0	10	10	100,0	10	10	100,0
8	Lampung	15	12	80,0	15	15	100,0	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	57,1	7	4	57,1	7	5	71,4
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4	7	7	100,0	7	6	85,7
11	DKI Jakarta	6	2	33,3	6	6	100,0	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	21	77,8	27	27	100,0	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	26	74,3	35	35	100,0	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0	5	5	100,0	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	26	68,4	38	37	97,4	38	37	97,4
16	Banten	8	7	87,5	8	8	100,0	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0	9	9	100,0	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0	10	10	100,0	10	9	90,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	9	40,9	22	15	68,2	22	11	50,0
20	Kalimantan Barat	14	4	28,6	14	9	64,3	14	7	50,0
21	Kalimantan Tengah	14	11	78,6	14	13	92,9	14	11	78,6
22	Kalimantan Selatan	13	7	53,8	13	12	92,3	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	9	90,0	10	10	100,0	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0	5	3	60,0	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	8	53,3	15	11	73,3	15	12	80,0
26	Sulawesi Tengah	13	8	61,5	13	8	61,5	13	7	53,8
27	Sulawesi Selatan	24	22	91,7	24	23	95,8	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	11	64,7	17	11	64,7	17	12	70,6
29	Gorontalo	6	5	83,3	6	6	100,0	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	3	50,0	6	5	83,3	6	3	50,0
31	Maluku	11	5	45,5	11	7	63,6	11	7	63,6
32	Maluku Utara	10	5	50,0	10	7	70,0	10	6	60,0
33	Papua	29	7	24,1	29	8	27,6	9	2	22,2
34	Papua Barat	13	3	23,1	13	6	46,2	7	5	71,4
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	4	1	25,0
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	8	1	12,5
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	8	0	0,0
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	6	1	16,7
Indonesia		**514**	**298**	**58,0**	**514**	**393**	**76,5**	**514**	**369**	71,8

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 44.a

CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Baduta	Baduta Diimunisasi					
			DPT-HB-Hib4		Campak/MR2		Imunisasi Baduta Lengkap	
			L + P		L + P		L + P	
		L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(5)*	*(10)*	*(11)*	*(16)*	*(17)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	101.508	16.691	16,4%	17.756	17,5%	7.887	8,6%
2	Sumatera Utara	266.995	161.135	60,4%	168.614	63,2%	94.926	39,5%
3	Sumatera Barat	100.893	29.676	29,4%	28.169	27,9%	16.346	18,0%
4	Riau	127.102	52.666	41,4%	55.111	43,4%	19.760	17,3%
5	Jambi	60.025	39.543	65,9%	40.793	68,0%	25.023	46,3%
6	Sumatera Selatan	158.804	129.191	81,4%	135.099	85,1%	114.727	80,3%
7	Bengkulu	33.404	22.134	66,3%	22.151	66,3%	14.417	48,0%
8	Lampung	138.087	111.880	81,0%	120.838	87,5%	56.403	45,4%
9	Kepulauan Bangka Belitung	24.673	15.553	63,0%	15.587	63,2%	10.765	48,5%
10	Kepulauan Riau	45.996	27.441	59,7%	27.060	58,8%	26.426	63,8%
11	DKI Jakarta	169.250	176.412	104,2%	178.697	105,6%	178.044	116,9%
12	Jawa Barat	801.184	692.772	86,5%	689.896	86,1%	326.970	45,4%
13	Jawa Tengah	485.360	459.032	94,6%	465.370	95,9%	441.640	101,1%
14	D I Yogyakarta	38.295	29.377	76,7%	31.108	81,2%	36.235	105,1%
15	Jawa Timur	561.102	488.601	87,1%	492.801	87,8%	337.397	66,8%
16	Banten	217.045	201.109	92,7%	204.671	94,3%	202.825	103,8%
17	Bali	65.615	57.085	87,0%	57.614	87,8%	43.689	74,0%
18	Nusa Tenggara Barat	96.370	68.121	70,7%	69.002	71,6%	45.042	51,9%
19	Nusa Tenggara Timur	117.037	72.817	62,2%	80.892	69,1%	71.783	68,2%
20	Kalimantan Barat	87.689	47.723	54,4%	46.543	53,1%	23.937	30,3%
21	Kalimantan Tengah	44.546	26.359	59,2%	26.086	58,6%	10.702	26,7%
22	Kalimantan Selatan	69.933	44.926	64,2%	46.327	66,2%	45.374	72,1%
23	Kalimantan Timur	60.441	39.456	65,3%	37.460	62,0%	25.171	46,3%
24	Kalimantan Utara	12.686	8.268	65,2%	8.956	70,6%	6.970	61,1%
25	Sulawesi Utara	37.572	24.174	64,3%	22.490	59,9%	10.466	31,0%
26	Sulawesi Tengah	55.483	32.427	58,4%	32.708	59,0%	18.831	37,7%
27	Sulawesi Selatan	138.301	131.883	95,4%	140.202	101,4%	139.172	111,8%
28	Sulawesi Tenggara	54.625	27.338	50,1%	30.497	55,8%	17.870	36,4%
29	Gorontalo	19.004	13.465	70,9%	13.885	73,1%	13.518	79,0%
30	Sulawesi Barat	26.396	14.740	55,8%	15.387	58,3%	9.278	39,1%
31	Maluku	33.516	19.131	57,1%	20.874	62,3%	8.327	27,6%
32	Maluku Utara	23.319	15.046	64,5%	14.305	61,3%	9.957	47,4%
33	Papua	17.274	10.180	58,9%	10.380	60,1%	3.193	20,5%
34	Papua Barat	9.471	7.700	81,3%	7.921	83,6%	3.335	39,1%
35	Papua Selatan	12.773	6.189	48,5%	6.867	53,8%	3.607	31,4%
36	Papua Tengah	20.001	3.758	18,8%	6.803	34,0%	2.072	11,5%
37	Papua Pegunungan	12.638	1.597	12,6%	2.384	18,9%	302	2,7%
38	Papua Barat Daya	10.124	4.771	47,1%	5.282	52,2%	3.520	38,6%
Indonesia		**4.354.537**	**3.330.367**	**76,5%**	**3.396.586**	**78,0%**	**2.425.907**	**61,9%**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 44.b

CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Sasaran (Siswa SD/Sederajat)*		Campak (Kelas 1)		DT (Kelas 1)		Td (Kelas 2)	
		Kelas 1	Kelas 2	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	101.550	101.530	40.223	39,6	33.188	32,7	34.582	34,1
2	Sumatera Utara	272.294	273.407	230.717	84,7	219.205	80,5	240.069	88,2
3	Sumatera Barat	104.556	104.573	62.351	59,6	58.962	56,4	61.580	58,9
4	Riau	129.276	131.703	99.507	77,0	95.154	73,6	95.670	74,0
5	Jambi	60.798	60.739	63.336	104,2	62.300	102,5	61.359	100,9
6	Sumatera Selatan	158.258	157.109	160.282	101,3	158.753	100,3	158.064	99,9
7	Bengkulu	33.594	33.516	33.090	98,5	30.034	89,4	25.937	77,2
8	Lampung	142.294	142.868	148.790	104,6	147.266	103,5	146.845	103,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	24.950	24.871	22.971	92,1	22.712	91,0	23.374	93,7
10	Kepulauan Riau	43.046	42.183	32.344	75,1	31.531	73,2	31.758	73,8
11	DKI Jakarta	165.428	162.177	136.397	82,5	136.076	82,3	141.184	85,3
12	Jawa Barat	789.381	793.626	808.684	102,4	804.484	101,9	800.451	101,4
13	Jawa Tengah	496.939	503.441	538.594	108,4	516.790	104,0	551.834	111,0
14	DI Yogyakarta	55.740	54.855	47.336	84,9	46.363	83,2	47.559	85,3
15	Jawa Timur	560.844	557.561	542.722	96,8	537.114	95,8	539.573	96,2
16	Banten	220.336	220.346	240.196	109,0	224.574	101,9	227.550	103,3
17	Bali	62.547	62.899	66.910	107,0	66.566	106,4	66.831	106,8
18	Nusa Tenggara Barat	98.133	97.436	94.548	96,3	87.798	89,5	89.105	90,8
19	Nusa Tenggara Timur	112.766	111.519	98.023	86,9	87.479	77,6	86.812	77,0
20	Kalimantan Barat	88.403	88.412	84.266	95,3	64.069	72,5	62.956	71,2
21	Kalimantan Tengah	45.189	45.173	45.571	100,8	43.685	96,7	42.527	94,1
22	Kalimantan Selatan	76.757	76.926	64.501	84,0	60.964	79,4	60.384	78,7
23	Kalimantan Timur	60.067	59.859	63.871	106,3	62.445	104,0	61.707	102,7
24	Kalimantan Utara	12.552	12.540	12.375	98,6	11.818	94,2	12.024	95,8
25	Sulawesi Utara	39.347	39.341	31.161	79,2	28.245	71,8	29.434	74,8
26	Sulawesi Tengah	56.126	55.901	45.083	80,3	42.299	75,4	43.394	77,3
27	Sulawesi Selatan	142.753	143.377	139.646	97,8	136.393	95,5	142.179	99,6
28	Sulawesi Tenggara	52.205	51.936	43.773	83,8	42.778	81,9	45.211	86,6
29	Gorontalo	19.370	19.450	16.064	82,9	16.281	84,1	17.318	89,4
30	Sulawesi Barat	26.285	26.201	21.011	79,9	17.860	67,9	16.156	61,5
31	Maluku	33.223	33.231	22.784	68,6	17.216	51,8	18.208	54,8
32	Maluku Utara	23.125	23.170	16.085	69,6	16.476	71,2	13.836	59,8
33	Papua	13.338	12.967	14.161	106,2	13.705	102,8	13.614	102,1
34	Papua Barat	9.045	8.989	8.188	90,5	8.138	90,0	8.403	92,9
35	Papua Selatan	9.440	9.063	5.690	60,3	5.797	61,4	5.734	60,7
36	Papua Tengah	17.897	17.600	6.703	37,5	5.767	32,2	5.833	32,6
37	Papua Pegunungan	21.673	22.467	859	4,0	393	1,8	600	2,8
38	Papua Barat Daya	9.770	9.767	7.431	76,1	4.114	42,1	3.512	35,9
Indonesia		**4.389.295**	**4.392.729**	**4.116.244**	**93,8**	**3.964.792**	**90,3**	**4.033.167**	**91,9**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 45

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Bayi 6-11 Bulan			Anak Balita (12-59 Bulan)			Balita (6-59 Bulan)		
		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A	
			S	%		S	%		S	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	63.280	56.782	89,7	219.088	190.918	87,6	282.368	247.700	87,8
2	Sumatera Utara	177.792	161.942	91,1	617.080	575.858	93,5	794.872	737.800	93,2
3	Sumatera Barat	80.034	74.170	92,7	304.912	287.988	94,0	384.946	362.158	93,9
4	Riau	75.719	63.603	84,0	330.121	271.077	80,9	405.840	334.680	81,2
5	Jambi	46.587	44.201	94,9	167.611	158.659	93,5	214.198	202.860	93,7
6	Sumatera Selatan	110.483	102.349	92,6	471.793	444.355	93,8	582.276	546.704	93,7
7	Bengkulu	25.006	23.322	93,3	92.469	83.895	92,5	117.475	107.217	92,6
8	Lampung	119.593	116.159	97,1	410.838	396.910	96,4	530.431	513.069	96,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	22.716	20.548	90,5	86.816	78.393	90,5	109.532	98.941	90,5
10	Kepulauan Riau	29.632	26.402	89,1	119.592	109.537	90,5	149.224	135.939	90,4
11	DKI Jakarta	89.530	81.748	91,3	344.041	313.470	88,7	433.571	395.218	89,0
12	Jawa Barat	666.254	647.029	97,1	2.750.820	2.676.931	97,3	3.417.074	3.323.960	97,3
13	Jawa Tengah	415.844	397.808	95,7	1.752.454	1.670.493	102,0	2.168.298	2.068.301	101,3
14	DI Yogyakarta	31.656	31.363	99,1	130.859	129.592	99,1	162.515	160.955	99,1
15	Jawa Timur	483.565	448.285	92,7	2.026.120	1.906.192	93,7	2.509.685	2.354.477	93,6
16	Banten	178.583	173.466	97,1	689.616	667.467	96,7	868.199	840.933	96,7
17	Bali	48.846	48.195	98,7	169.303	166.600	98,4	218.149	214.795	98,4
18	Nusa Tenggara Barat	87.606	84.652	96,6	363.778	350.488	97,1	451.384	435.140	97,1
19	Nusa Tenggara Timur	79.545	74.592	93,8	286.380	271.363	95,8	365.925	345.955	95,6
20	Kalimantan Barat	80.604	63.632	78,9	294.168	218.965	73,6	374.772	282.597	74,2
21	Kalimantan Tengah	41.731	33.570	80,4	147.677	117.498	81,4	189.408	151.068	81,3
22	Kalimantan Selatan	57.967	52.723	91,0	237.845	212.232	89,9	295.812	264.955	90,0
23	Kalimantan Timur	48.388	39.316	81,3	222.770	154.419	71,7	271.158	193.735	72,6
24	Kalimantan Utara	12.048	10.046	83,4	53.596	37.472	72,5	65.644	47.518	73,6
25	Sulawesi Utara	24.376	23.001	94,4	79.437	75.907	93,8	103.813	98.908	93,8
26	Sulawesi Tengah	46.271	41.754	90,2	158.184	138.161	88,0	204.455	179.915	88,3
27	Sulawesi Selatan	125.561	117.233	93,4	464.859	424.339	91,5	590.420	541.572	91,7
28	Sulawesi Tenggara	42.570	34.336	80,7	152.594	114.330	75,1	195.164	148.666	75,7
29	Gorontalo	16.832	15.111	89,8	69.750	62.818	87,6	86.582	77.929	87,9
30	Sulawesi Barat	25.586	16.430	64,2	88.892	55.137	66,5	114.478	71.567	66,2
31	Maluku	25.883	20.756	80,2	86.417	68.574	74,1	112.300	89.330	74,8
32	Maluku Utara	20.645	17.082	82,7	74.376	59.279	81,8	95.021	76.361	81,9
33	Papua	17.161	10.129	59,0	68.220	30.710	44,5	85.381	40.839	46,2
34	Papua Barat	6.268	3.213	51,3	22.894	7.172	33,7	29.162	10.385	35,5
35	Papua Selatan	11.201	5.917	52,8	43.015	13.881	38,2	54.216	19.798	39,8
36	Papua Tengah	9.815	4.643	47,3	39.163	9.549	30,6	11.639	2.037	17,0
37	Papua Pegunungan	2.342	655	28,0	9.297	1.382	15,9	26.162	10.693	46,6
38	Papua Barat Daya	5.797	3.461	59,7	20.365	7.232	44,8	48.978	14.192	32,2
	Indonesia	**3.453.317**	**3.189.624**	**92,4**	**13.667.210**	**12.559.243**	**91,9**	**17.120.527**	**15.748.867**	**92,0**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024
Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.
Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

Lampiran 46

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Sasaran Balita	Balita Memiliki Buku KIA		Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya		Balita Dilayani SDIDTK		Kunjungan Balita Sakit	Balita Dilayani MTBS*	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%
(1)	*(2)*		*(4)*		*(7)*		*(10)*			*(13)*	*(13)*
1	Aceh	508.253	249.330	49,1	354.540	69,8	335.256	66,0	174.332	158.567	91,0
2	Sumatera Utara	1.342.753	962.062	71,6	1.091.683	81,3	861.024	64,1	351.630	232.874	66,2
3	Sumatera Barat	510.484	399.457	78,3	367.218	71,9	344.863	67,6	175.565	165.356	94,2
4	Riau	641.043	563.519	87,9	441.783	68,9	319.036	49,8	185.907	130.011	69,9
5	Jambi	301.020	241.769	80,3	239.651	79,6	224.381	74,5	143.851	137.730	95,7
6	Sumatera Selatan	792.216	693.912	87,6	675.125	85,2	663.412	83,7	274.183	272.779	99,5
7	Bengkulu	166.959	146.542	87,8	120.024	71,9	75.040	44,9	57.262	54.306	94,8
8	Lampung	695.697	612.862	88,1	655.855	94,3	646.551	92,9	249.930	229.781	91,9
9	Kep. Bangka Belitung	124.271	87.081	70,1	86.681	69,8	81.695	65,7	56.105	56.105	100,0
10	Kepulauan Riau	232.057	221.930	95,6	221.834	95,6	217.712	93,8	87.442	76.117	87,0
11	DKI Jakarta	838.447	718.733	85,7	644.969	76,9	671.065	80,0	704.691	586.618	83,2
12	Jawa Barat	3.984.797	3.503.631	87,9	3.460.589	86,8	2.639.465	66,2	2.129.831	1.788.841	84,0
13	Jawa Tengah	2.427.047	2.354.875	97,0	2.219.317	91,4	2.227.047	91,8	1.585.819	1.526.514	96,3
14	D I Yogyakarta	286.262	184.349	64,4	152.658	53,3	167.224	58,4	125.763	103.647	82,4
15	Jawa Timur	2.756.470	2.236.946	81,2	2.469.057	89,6	2.043.072	74,1	1.032.309	737.632	71,5
16	Banten	1.095.181	1.020.080	93,1	1.071.609	97,8	991.050	90,5	663.893	622.912	93,8
17	Bali	321.511	286.235	89,0	291.163	90,6	287.104	89,3	119.805	114.279	95,4
18	Nusa Tenggara Barat	486.437	431.198	88,6	404.550	83,2	413.241	85,0	201.811	162.042	80,3
19	Nusa Tenggara Timur	578.045	203.014	35,1	298.736	51,7	85.664	14,8	129.513	104.894	81,0
20	Kalimantan Barat	438.800	326.099	74,3	323.643	73,8	281.504	64,2	185.747	163.279	87,9
21	Kalimantan Tengah	224.530	162.578	72,4	160.033	71,3	134.581	59,9	94.879	76.766	80,9
22	Kalimantan Selatan	365.349	313.290	85,8	286.044	78,3	275.402	75,4	176.099	186.919	106,1
23	Kalimantan Timur	302.258	193.614	64,1	255.069	84,4	205.397	68,0	183.115	165.801	90,5
24	Kalimantan Utara	64.102	56.104	87,5	47.989	74,9	47.615	74,3	58.255	52.374	89,9
25	Sulawesi Utara	190.567	123.793	65,0	134.447	70,6	68.321	35,9	44.764	21.555	48,2
26	Sulawesi Tengah	280.195	121.784	43,5	189.262	67,5	142.051	50,7	59.449	54.161	91,1
27	Sulawesi Selatan	699.031	525.483	75,2	581.797	83,2	471.428	67,4	297.613	243.468	81,8
28	Sulawesi Tenggara	267.442	83.763	31,3	156.903	58,7	161.231	60,3	98.844	95.721	96,8
29	Gorontalo	95.627	68.842	72,0	59.509	62,2	48.673	50,9	29.975	24.875	83,0
30	Sulawesi Barat	132.145	49.012	37,1	95.221	72,1	88.137	66,7	40.515	29.694	73,3
31	Maluku	166.955	99.482	59,6	135.657	81,3	101.606	60,9	80.657	68.355	84,7
32	Maluku Utara	116.902	84.464	72,3	91.463	78,2	81.264	69,5	77.726	74.949	96,4
33	Papua	79.146	20.914	26,4	51.375	64,9	26.025	32,9	41.824	33.879	81,0
34	Papua Barat	47.572	25.480	53,6	33.507	70,4	18.730	39,4	15.217	14.678	96,5
35	Papua Selatan	58.077	49.895	85,9	25.123	43,3	13.975	24,1	49.010	36.788	75,1
36	Papua Tengah	97.049	39.952	41,2	25.522	26,3	10.390	10,7	52.929	48.046	90,8
37	Papua Pegunungan	79.920	7.367	9,2	22.989	28,8	83	0,1	2.105	1.381	65,6
38	Papua Barat Daya	50.356	5.946	11,8	26.562	52,7	282	0,6	1.402	834	59,5
Indonesia		**21.844.973**	**17.475.387**	**80,0**	**17.969.157**	**82,3**	**15.470.597**	**70,8**	**10.039.767**	**8.654.528**	**87,7**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

* Cakupan balita dilayani MTBS dihitung berdasarkan sasaran kunjungan balita sakit

Lampiran 47

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	2021			2022			2023		
		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang	
			Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	P+L	P+L	P+L
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	435.460	371.939	85,4	213.077	175.110	82,2	318.496	274.919	86,3
2	Sumatera Utara	826.133	633.373	76,7	185.543	142.486	76,8	867.309	697.822	80,5
3	Sumatera Barat	399.789	297.500	74,4	390.546	295.112	75,6	380.617	311.819	81,9
4	Riau	346.500	166.937	48,2	446.328	238.154	53,4	413.206	273.326	66,2
5	Jambi	159.309	117.048	73,5	216.599	155.969	72,0	210.917	154.148	73,1
6	Sumatera Selatan	572.570	390.179	68,1	622.258	517.575	83,2	580.570	510.167	87,9
7	Bengkulu	101.236	69.508	68,7	112.774	78.577	69,7	114.706	83.972	73,2
8	Lampung	585.048	425.941	72,8	568.978	445.188	78,2	573.121	461.046	80,4
9	Kepulauan Bangka	118.228	72.162	61,0	111.574	72.682	65,1	108.548	76.223	70,2
10	Kepulauan Riau	145.009	84.741	58,4	144.384	104.954	72,7	130.737	104.030	79,6
11	DKI Jakarta	420.822	171.180	40,7	445.005	291.690	65,5	422.481	327.426	77,5
12	Jawa Barat	3.316.766	2.440.785	73,6	3.409.069	2.784.025	81,7	3.383.775	2.906.128	85,9
13	Jawa Tengah	2.463.945	1.939.373	78,7	1.224.586	949.911	77,6	2.122.057	1.755.821	82,7
14	DI Yogyakarta	194.878	126.946	65,1	160.221	124.539	77,7	163.592	131.345	80,3
15	Jawa Timur	2.530.798	1.576.250	62,3	2.548.645	1.876.799	73,6	2.547.184	2.028.098	79,6
16	Banten	769.852	520.394	67,6	882.749	704.605	79,8	858.926	728.240	84,8
17	Bali	224.419	166.203	74,1	205.213	164.961	80,4	201.328	167.783	83,3
18	Nusa Tenggara Barat	440.089	363.424	82,6	387.423	332.220	85,8	450.056	411.543	91,4
19	Nusa Tenggara	439.280	350.371	79,8	416.799	332.215	79,7	398.602	328.517	82,4
20	Kalimantan Barat	380.518	183.454	48,2	398.797	197.038	49,4	389.244	195.537	50,2
21	Kalimantan Tengah	170.374	81.748	48,0	158.649	91.067	57,4	170.160	101.352	59,6
22	Kalimantan Selatan	296.907	180.960	60,9	304.749	199.622	65,5	302.044	215.518	71,4
23	Kalimantan Timur	257.306	88.414	34,4	252.698	100.606	39,8	269.458	108.565	40,3
24	Kalimantan Utara	49.378	19.405	39,3	60.956	29.094	47,7	63.919	32.101	50,2
25	Sulawesi Utara	28.572	17.847	62,5	74.362	56.614	76,1	113.699	88.770	78,1
26	Sulawesi Tengah	229.586	157.203	68,5	232.064	156.448	67,4	210.453	150.691	71,6
27	Sulawesi Selatan	609.163	437.980	71,9	611.426	463.981	75,9	595.697	465.539	78,2
28	Sulawesi Tenggara	146.319	96.946	66,3	174.739	120.094	68,7	203.594	135.830	66,7
29	Gorontalo	85.694	69.769	81,4	21.391	16.129	75,4	85.729	72.400	84,5
30	Sulawesi Barat	114.573	66.810	58,3	114.850	70.415	61,3	114.632	68.713	59,9
31	Maluku	133.758	78.703	58,8	133.444	86.563	64,9	129.555	90.663	70,0
32	Maluku Utara	96.176	79.264	82,4	17.758	12.994	73,2	99.983	72.125	72,1
33	Papua	67.705	14.705	21,7	143.294	43.423	30,3	82.316	28.199	34,3
34	Papua Barat	62.603	17.861	28,5	72.435	21.547	29,7	32.790	11.498	35,1
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	53.177	15.298	28,8
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	53.954	12.772	23,7
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	14.539	3.164	21,8
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	27.743	11.644	42,0
Indonesia		**17.218.762**	**11.875.323**	**69,0**	**15.463.383**	**11.452.407**	**74,1**	**17.258.914**	**13.612.752**	**78,9**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 48.a

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,3	6,5	89,5	2,6
2	Sumatera Utara	0,6	2,8	92,1	4,5
3	Sumatera Barat	1,4	7,1	87,3	4,2
4	Riau	0,8	4,3	90,1	4,8
5	Jambi	0,8	3,9	90,9	4,5
6	Sumatera Selatan	0,4	1,7	86,2	11,6
7	Bengkulu	0,5	2,9	89,0	7,6
8	Lampung	0,7	4,0	88,3	6,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,7	4,9	88,9	5,5
10	Kepulauan Riau	0,8	4,4	89,0	5,8
11	DKI Jakarta	1,1	3,5	87,4	7,9
12	Jawa Barat	1,3	6,1	86,8	5,8
13	Jawa Tengah	1,4	8,1	84,7	5,8
14	DI Yogyakarta	1,8	10,8	82,1	5,4
15	Jawa Timur	1,2	6,6	84,3	7,9
16	Banten	1,0	4,1	87,0	7,8
17	Bali	0,5	3,1	86,5	9,9
18	Nusa Tenggara Barat	1,9	10,4	84,3	3,4
19	Nusa Tenggara Timur	3,2	15,6	79,4	1,8
20	Kalimantan Barat	2,4	10,5	83,3	3,9
21	Kalimantan Tengah	2,0	8,6	83,6	5,8
22	Kalimantan Selatan	1,9	8,9	85,8	3,5
23	Kalimantan Timur	2,4	10,6	81,9	5,1
24	Kalimantan Utara	2,2	8,5	85,0	4,3
25	Sulawesi Utara	0,6	3,8	92,3	3,3
26	Sulawesi Tengah	2,2	10,1	84,2	3,5
27	Sulawesi Selatan	1,2	6,7	89,1	3,0
28	Sulawesi Tenggara	1,4	7,1	87,8	3,7
29	Gorontalo	1,4	5,7	91,0	1,9
30	Sulawesi Barat	2,9	12,3	81,6	3,2
31	Maluku	1,6	8,4	87,5	2,4
32	Maluku Utara	1,5	8,2	87,9	2,3
33	Papua	2,1	10,3	83,3	4,3
34	Papua Barat	3,3	11,2	82,0	3,5
35	Papua Selatan	4,5	13,5	77,9	4,1
36	Papua Tengah	2,6	7,8	84,2	5,4
37	Papua Pegunungan	2,9	7,3	85,4	4,3
38	Papua Barat Daya	3,4	13,0	79,4	4,3
Indonesia		**1,4**	**6,9**	**86,2**	**5,6**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 48.b

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,6	7,9	88,5	2,0
2	Sumatera Utara	0,5	2,4	94,7	2,4
3	Sumatera Barat	1,4	7,9	87,8	2,9
4	Riau	0,7	4,2	91,8	3,4
5	Jambi	0,7	3,7	92,7	2,9
6	Sumatera Selatan	0,3	1,4	90,3	8,0
7	Bengkulu	0,5	3,2	91,9	4,3
8	Lampung	0,5	3,3	90,7	5,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,6	3,8	90,5	5,1
10	Kepulauan Riau	1,4	6,4	86,8	5,4
11	DKI Jakarta	0,6	2,0	92,5	4,9
12	Jawa Barat	0,7	4,9	89,7	4,7
13	Jawa Tengah	1,3	8,5	84,7	5,6
14	DI Yogyakarta	1,3	9,3	83,0	6,4
15	Jawa Timur	1,2	6,6	85,3	6,9
16	Banten	0,7	3,2	89,9	6,2
17	Bali	0,4	3,3	87,2	9,1
18	Nusa Tenggara Barat	1,7	11,7	84,5	2,1
19	Nusa Tenggara Timur	3,2	18,4	77,2	1,3
20	Kalimantan Barat	3,1	13,0	80,1	3,9
21	Kalimantan Tengah	2,0	8,6	82,9	6,5
22	Kalimantan Selatan	1,8	9,2	85,8	3,2
23	Kalimantan Timur	2,5	11,9	79,4	6,2
24	Kalimantan Utara	2,6	10,9	82,6	3,9
25	Sulawesi Utara	0,6	3,7	93,3	2,3
26	Sulawesi Tengah	2,1	10,1	84,9	2,9
27	Sulawesi Selatan	1,2	6,6	90,1	2,1
28	Sulawesi Tenggara	1,4	7,5	88,4	2,8
29	Gorontalo	1,5	6,4	90,5	1,7
30	Sulawesi Barat	3,0	14,6	79,9	2,4
31	Maluku	1,3	8,4	88,7	1,6
32	Maluku Utara	1,7	8,8	87,6	1,8
33	Papua	2,5	10,9	82,5	4,1
34	Papua Barat	3,2	13,6	79,6	3,6
35	Papua Selatan	3,5	12,0	79,3	5,2
36	Papua Tengah	2,8	7,1	85,7	4,4
37	Papua Pegunungan	2,2	7,5	85,8	4,5
38	Papua Barat Daya	3,4	13,0	80,6	3,0
Indonesia		**1,1**	**6,4**	**87,7**	**4,7**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 48.c

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,8	5,1	92,6	0,5
2	Sumatera Utara	1,0	3,0	94,7	1,3
3	Sumatera Barat	2,3	6,7	90,3	0,8
4	Riau	1,1	2,9	95,1	0,8
5	Jambi	1,0	2,7	95,2	1,1
6	Sumatera Selatan	0,6	1,8	94,3	3,3
7	Bengkulu	1,0	2,8	95,9	0,3
8	Lampung	1,1	3,3	94,4	1,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,2	2,7	95,6	0,4
10	Kepulauan Riau	1,0	2,6	95,3	1,1
11	DKI Jakarta	1,1	2,3	95,4	1,2
12	Jawa Barat	2,4	6,1	90,5	1,0
13	Jawa Tengah	1,9	6,4	91,0	0,8
14	DI Yogyakarta	3,4	9,8	86,2	0,6
15	Jawa Timur	1,5	4,5	92,7	1,2
16	Banten	1,4	3,3	93,7	1,6
17	Bali	1,0	2,7	95,6	0,7
18	Nusa Tenggara Barat	3,2	8,5	87,9	0,4
19	Nusa Tenggara Timur	3,8	7,8	88,2	0,2
20	Kalimantan Barat	3,7	10,1	85,3	0,9
21	Kalimantan Tengah	3,5	10,1	85,6	0,8
22	Kalimantan Selatan	2,5	6,5	90,6	0,5
23	Kalimantan Timur	3,8	10,8	84,9	0,6
24	Kalimantan Utara	3,2	9,2	87,2	0,4
25	Sulawesi Utara	0,7	1,7	97,3	0,3
26	Sulawesi Tengah	3,6	8,8	87,2	0,3
27	Sulawesi Selatan	2,1	5,4	92,1	0,5
28	Sulawesi Tenggara	2,4	7,1	90,1	0,4
29	Gorontalo	1,8	3,7	94,5	0,1
30	Sulawesi Barat	5,7	15,1	78,9	0,3
31	Maluku	1,5	4,5	93,7	0,3
32	Maluku Utara	2,1	5,7	92,0	0,2
33	Papua	2,5	9,1	88,0	0,4
34	Papua Barat	3,4	8,1	88,2	0,3
35	Papua Selatan	5,4	12,5	81,4	0,7
36	Papua Tengah	4,3	8,7	86,3	0,7
37	Papua Pegunungan	9,8	16,7	73,1	0,5
38	Papua Barat Daya	3,4	9,8	86,0	0,7
Indonesia		**2,1**	**5,6**	**91,4**	**0,9**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 48.d

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	2,0	6,3	91,5	0,3
2	Sumatera Utara	0,9	2,9	95,3	0,9
3	Sumatera Barat	2,2	7,6	89,8	0,4
4	Riau	1,0	3,3	95,2	0,5
5	Jambi	0,9	2,3	96,3	0,4
6	Sumatera Selatan	0,4	1,1	96,5	1,9
7	Bengkulu	1,0	3,7	95,2	0,2
8	Lampung	0,8	2,6	95,8	0,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,9	2,7	96,2	0,2
10	Kepulauan Riau	1,5	5,0	93,1	0,5
11	DKI Jakarta	0,5	1,1	97,8	0,6
12	Jawa Barat	1,3	3,8	94,4	0,5
13	Jawa Tengah	2,1	7,8	89,8	0,4
14	DI Yogyakarta	2,1	7,8	89,9	0,2
15	Jawa Timur	1,5	4,8	93,0	0,7
16	Banten	1,0	2,4	95,6	0,9
17	Bali	0,9	3,0	95,7	0,3
18	Nusa Tenggara Barat	3,1	10,2	86,5	0,2
19	Nusa Tenggara Timur	4,5	10,8	84,6	0,1
20	Kalimantan Barat	4,3	12,1	83,3	0,4
21	Kalimantan Tengah	3,0	9,5	86,8	0,6
22	Kalimantan Selatan	2,1	6,6	91,1	0,2
23	Kalimantan Timur	3,8	12,5	83,3	0,3
24	Kalimantan Utara	3,7	10,2	86,0	0,1
25	Sulawesi Utara	0,7	2,0	97,2	0,1
26	Sulawesi Tengah	3,1	9,1	87,5	0,3
27	Sulawesi Selatan	2,0	5,6	92,1	0,2
28	Sulawesi Tenggara	2,7	8,5	88,5	0,2
29	Gorontalo	1,7	4,4	93,8	0,1
30	Sulawesi Barat	6,8	19,4	73,7	0,1
31	Maluku	1,7	5,4	92,7	0,2
32	Maluku Utara	2,3	7,1	90,4	0,1
33	Papua	2,9	2,9	87,6	0,3
34	Papua Barat	4,0	4,0	84,1	0,2
35	Papua Selatan	5,4	5,4	80,3	0,5
36	Papua Tengah	3,6	3,6	86,0	0,2
37	Papua Pegunungan	6,7	6,7	78,0	0,8
38	Papua Barat Daya	4,1	4,1	85,3	0,3
Indonesia		**1,7**	**5,3**	**92,5**	**0,5**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 48.e

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB

MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	0,6	4,1	88,0	5,7	1,3	0,3
2	Sumatera Utara	0,4	2,0	89,9	6,3	1,2	0,3
3	Sumatera Barat	0,8	4,8	84,8	7,3	1,8	0,4
4	Riau	0,5	3,2	86,6	7,2	1,9	0,6
5	Jambi	0,5	2,9	87,8	7,0	1,6	0,3
6	Sumatera Selatan	0,4	1,4	83,6	11,1	3,0	0,6
7	Bengkulu	0,2	1,5	81,2	13,3	3,2	0,5
8	Lampung	0,4	3,1	85,3	8,7	2,1	0,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,1	1,9	87,1	8,5	1,9	0,5
10	Kepulauan Riau	0,5	2,9	86,0	8,2	1,9	0,5
11	DKI Jakarta	0,6	2,5	84,3	10,0	2,2	0,5
12	Jawa Barat	0,8	4,4	83,2	8,7	2,3	0,7
13	Jawa Tengah	0,7	6,1	82,4	8,0	2,1	0,6
14	DI Yogyakarta	0,8	7,0	81,5	7,9	2,1	0,6
15	Jawa Timur	1,1	5,2	79,8	10,1	2,9	1,0
16	Banten	1,0	3,6	82,9	9,4	2,3	0,7
17	Bali	0,1	1,6	80,2	13,3	3,7	1,1
18	Nusa Tenggara Barat	0,5	5,7	83,7	7,7	1,9	0,4
19	Nusa Tenggara Timur	1,3	8,8	84,3	4,4	1,0	0,2
20	Kalimantan Barat	1,2	6,2	83,2	7,1	1,7	0,6
21	Kalimantan Tengah	1,0	5,4	80,2	9,6	2,8	1,0
22	Kalimantan Selatan	0,8	5,4	86,0	6,2	1,2	0,4
23	Kalimantan Timur	0,9	6,5	81,6	8,3	2,1	0,6
24	Kalimantan Utara	0,9	4,3	84,2	8,4	1,7	0,4
25	Sulawesi Utara	0,2	2,5	88,9	6,8	1,4	0,2
26	Sulawesi Tengah	0,9	5,6	83,2	7,9	1,9	0,5
27	Sulawesi Selatan	0,4	3,8	86,8	7,1	1,6	0,3
28	Sulawesi Tenggara	0,5	3,8	85,8	7,9	1,7	0,3
29	Gorontalo	0,6	3,0	89,1	6,1	1,1	0,2
30	Sulawesi Barat	1,1	6,0	81,5	8,7	2,1	0,6
31	Maluku	0,6	5,6	88,1	4,6	0,9	0,2
32	Maluku Utara	0,7	4,7	86,2	6,4	1,5	0,4
33	Papua	1,2	6,3	81,3	8,2	2,3	0,7
34	Papua Barat	2,1	7,9	79,1	7,7	2,4	0,8
35	Papua Selatan	3,5	8,4	78,1	7,4	2,0	0,7
36	Papua Tengah	1,5	5,4	81,9	7,9	2,3	1,0
37	Papua Pegunungan	1,7	2,7	71,2	17,6	5,5	1,3
38	Papua Barat Daya	2,7	9,0	79,8	6,6	1,5	0,5
Indonesia		**0,8**	**4,7**	**83,6**	**8,3**	**2,1**	**0,6**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 48.f

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	0,5	4,8	89,1	4,3	1,0	0,3
2	Sumatera Utara	0,2	1,7	93,0	4,1	0,8	0,2
3	Sumatera Barat	0,6	4,5	87,3	5,8	1,4	0,4
4	Riau	0,4	3,1	89,5	5,3	1,3	0,4
5	Jambi	0,2	2,7	90,9	4,7	1,1	0,3
6	Sumatera Selatan	0,3	1,3	87,3	8,9	1,8	0,5
7	Bengkulu	0,2	1,5	86,8	9,2	1,9	0,4
8	Lampung	0,2	2,6	87,2	7,2	2,0	0,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,0	1,5	89,3	6,1	1,9	1,2
10	Kepulauan Riau	0,6	4,0	85,9	6,5	2,0	1,0
11	DKI Jakarta	0,2	1,2	90,3	6,1	1,5	0,7
12	Jawa Barat	0,2	3,0	87,2	6,8	1,9	0,8
13	Jawa Tengah	0,5	4,9	83,5	7,7	2,3	1,1
14	DI Yogyakarta	0,3	4,7	83,1	7,9	2,6	1,4
15	Jawa Timur	0,9	5,0	81,2	8,9	2,7	1,3
16	Banten	0,7	3,0	86,2	7,3	2,0	0,8
17	Bali	0,1	1,6	80,0	12,7	3,7	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	0,3	5,2	87,1	5,7	1,3	0,3
19	Nusa Tenggara Timur	0,9	7,9	87,0	3,3	0,7	0,2
20	Kalimantan Barat	1,2	6,8	83,3	5,9	1,8	0,9
21	Kalimantan Tengah	0,9	4,9	81,7	8,7	2,5	1,3
22	Kalimantan Selatan	0,7	5,2	86,8	5,3	1,4	0,6
23	Kalimantan Timur	0,9	6,3	80,6	8,1	2,7	1,5
24	Kalimantan Utara	0,8	5,5	83,8	7,4	1,7	0,7
25	Sulawesi Utara	0,2	2,2	90,8	5,4	1,1	0,3
26	Sulawesi Tengah	0,7	5,3	85,6	6,5	1,5	0,5
27	Sulawesi Selatan	0,3	3,1	90,1	4,9	1,1	0,4
28	Sulawesi Tenggara	0,3	3,1	87,5	7,2	1,5	0,3
29	Gorontalo	0,6	3,2	91,0	4,0	0,9	0,3
30	Sulawesi Barat	0,5	5,3	84,7	7,2	1,8	0,5
31	Maluku	0,5	4,6	90,6	3,5	0,6	0,2
32	Maluku Utara	0,7	4,9	87,9	5,0	1,2	0,3
33	Papua	1,5	6,6	81,7	7,2	2,4	0,7
34	Papua Barat	1,8	7,8	81,4	6,5	1,9	0,6
35	Papua Selatan	2,2	7,0	79,1	8,1	2,7	1,0
36	Papua Tengah	1,6	3,9	83,9	7,7	2,4	0,6
37	Papua Pegunungan	1,2	3,2	78,8	12,1	3,1	1,6
38	Papua Barat Daya	1,7	7,6	82,8	5,6	1,6	0,7
Indonesia		**0,5**	**3,8**	**86,2**	**6,8**	**1,9**	**0,8**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2024

Lampiran 49

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	SEKOLAH								
		SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11)
1	Aceh	3.554	3.554	100,0	1.291	1.291	100,0	877	877	100,0
2	Sumatera Utara	10.360	10.109	97,6	3.470	3.374	97,2	2.379	2.267	95,3
3	Sumatera Barat	4.304	4.304	100,0	1.257	1.257	100,0	700	700	100,0
4	Riau	3.408	3.408	100,0	1.389	1.328	95,6	807	777	96,3
5	Jambi	2.436	2.406	98,8	939	932	99,3	551	539	97,8
6	Sumatera Selatan	5.420	5.420	100,0	1.962	1.962	100,0	1.261	1.261	100,0
7	Bengkulu	1.651	1.651	100,0	563	555	98,6	325	316	97,2
8	Lampung	9.180	9.173	99,9	3.054	3.012	98,6	1.553	1.527	98,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	877	877	100,0	288	288	100,0	169	169	100,0
10	Kepulauan Riau	1.089	1.069	98,2	474	468	98,7	322	320	99,4
11	DKI Jakarta	2.071	1.535	74,1	974	652	66,9	900	700	77,8
12	Jawa Barat	23.605	23.354	98,9	8.636	8.186	94,8	5.782	5.370	92,9
13	Jawa Tengah	21.601	21.554	99,8	4.804	4.760	99,1	2.884	2.774	96,2
14	D I Yogyakarta	2.180	2.180	100,0	596	593	99,5	361	358	99,2
15	Jawa Timur	24.755	24.230	97,9	7.870	7.674	97,5	5.241	5.077	96,9
16	Banten	5.428	5.424	99,9	2.405	2.400	99,8	1.642	1.628	99,1
17	Bali	2.522	2.522	100,0	469	467	99,6	367	364	99,2
18	Nusa Tenggara Barat	4.153	3.617	87,1	1.872	1.472	78,6	1.239	905	73,0
19	Nusa Tenggara Timur	3.077	3.468	112,7	1.198	1.198	100,0	666	666	100,0
20	Kalimantan Barat	4.809	3.720	77,4	1.600	1.252	78,3	811	619	76,3
21	Kalimantan Tengah	2.807	2.807	100,0	956	956	100,0	483	483	100,0
22	Kalimantan Selatan	3.541	3.541	100,0	1.014	1.014	100,0	541	541	100,0
23	Kalimantan Timur	1.805	1.805	100,0	738	738	100,0	450	410	91,1
24	Kalimantan Utara	476	476	100,0	205	205	100,0	116	116	100,0
25	Sulawesi Utara	2.123	1.976	93,1	750	702	93,6	427	402	94,1
26	Sulawesi Tengah	1.557	1.557	100,0	350	537	153,4	259	259	100,0
27	Sulawesi Selatan	6.672	6.672	100,0	4.950	5.043	101,9	3.551	3.551	100,0
28	Sulawesi Tenggara	2.387	2.171	91,0	915	858	93,8	538	503	93,5
29	Gorontalo	916	914	99,8	384	380	99,0	144	138	95,8
30	Sulawesi Barat	1.477	1.216	82,3	533	434	81,4	1.411	1.411	100,0
31	Maluku	4.908	1.468	29,9	1.945	563	28,9	1.586	351	22,1
32	Maluku Utara	640	640	100,0	286	285	99,7	237	237	100,0
33	Papua	293	293	100,0	87	87	100,0	44	44	100,0
34	Papua Barat	276	117	42,4	68	42	61,8	37	29	78,4
35	Papua Selatan	489	70	14,3	132	20	15,2	28	6	21,4
36	Papua Tengah	157	157	100,0	57	57	100,0	174	174	100,0
37	Papua Pegunungan	26	26	100,0	22	22	100,0	11	11	100,0
38	Papua Barat Daya	918	300	32,7	498	365	73,3	363	245	67,5
Indonesia		**167.948**	**159.781**	**95,1**	**59.001**	**55.429**	**93,9**	**39.237**	**36.125**	**92,1**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan :

* merupakan indikator SPM "Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"

Lampiran 53

PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Kab/Kota	kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi		Puskesmas	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	23	22	100%	365	343	94%
2	Sumatera Utara	33	30	100%	616	602	98%
3	Sumatera Barat	19	18	59%	280	280	100%
4	Riau	12	12	100%	238	238	100%
5	Jambi	11	10	100%	208	207	100%
6	Sumatera Selatan	17	17	100%	348	348	100%
7	Bengkulu	10	10	90%	179	179	100%
8	Lampung	15	14	80%	319	318	100%
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	93%	64	64	100%
10	Kepulauan Riau	7	7	85%	94	93	99%
11	DKI Jakarta	6	6	92%	44	44	100%
12	Jawa Barat	27	27	71%	1.100	1.100	100%
13	Jawa Tengah	35	35	100%	880	880	100%
14	DI Yogyakarta	5	5	100%	121	121	100%
15	Jawa Timur	38	38	82%	972	968	100%
16	Banten	8	8	80%	251	247	98%
17	Bali	9	9	22%	120	120	100%
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	29%	176	176	100%
19	Nusa Tenggara Timur	22	13	25%	433	228	53%
20	Kalimantan Barat	14	14	13%	249	248	100%
21	Kalimantan Tengah	14	14	0%	204	203	100%
22	Kalimantan Selatan	13	13	0%	241	241	100%
23	Kalimantan Timur	10	9	90%	188	187	99%
24	Kalimantan Utara	5	4	80%	58	57	98%
25	Sulawesi Utara	15	14	93%	199	198	99%
26	Sulawesi Tengah	13	11	85%	218	216	99%
27	Sulawesi Selatan	24	22	92%	474	451	95%
28	Sulawesi Tenggara	17	12	71%	306	280	92%
29	Gorontalo	6	6	100%	95	93	98%
30	Sulawesi Barat	6	6	100%	98	98	100%
31	Maluku	11	9	82%	228	206	90%
32	Maluku Utara	10	8	80%	149	125	84%
33	Papua	13	2	22%	119	55	46%
34	Papua Barat		2	29%	76	39	51%
35	Papua Selatan		1	25%	79	51	65%
36	Papua Tengah		1	13%	117	44	38%
37	Papua Pegunungan		-	0%	148	14	9%
38	Papua Barat Daya	29	-	0%	91	18	20%
Indonesia		**514**	**446**	86,8	**10.145**	**9.380**	92,5

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 54

PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Persentase lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		usia 60 +	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	492.637	391.885	80
2	Sumatera Utara	1.511.620	1.287.256	85
3	Sumatera Barat	587.218	425.287	72
4	Riau	542.730	400.363	74
5	Jambi	401.063	290.181	72
6	Sumatera Selatan	880.054	751.370	85
7	Bengkulu	219.308	165.259	75
8	Lampung	979.482	902.827	92
9	Kepulauan Riau	158.271	123.597	78
10	Kepulauan Bangka Belitung	161.343	113.483	70
11	DKI Jakarta	1.112.622	1.039.373	93
12	Jawa Barat	5.691.081	4.435.826	78
13	Jawa Tengah	5.332.275	4.492.298	84
14	DI Yogyakarta	642.942	356.021	55
15	Jawa Timur	6.349.460	5.551.076	87
16	Banten	1.295.672	971.675	75
17	Bali	600.071	536.683	89
18	Nusa Tenggara Barat	550.442	511.986	93
19	Nusa Tenggara Timur	556.024	333.016	60
20	Kalimantan Barat	519.662	320.299	62
21	Kalimantan Tengah	255.975	205.829	80
22	Kalimantan Selatan	499.076	323.070	65
23	Kalimantan Timur	372.971	209.861	56
24	Kalimantan Utara	69.020	33.513	49
25	Sulawesi Utara	356.973	329.803	92
26	Sulawesi Tengah	315.025	198.490	63
27	Sulawesi Selatan	1.104.751	819.140	74
28	Sulawesi Tenggara	248.167	160.280	65
29	Gorontalo	129.987	95.022	73
30	Sulawesi Barat	123.669	69.456	56
31	Maluku	169.632	111.090	65
32	Maluku Utara	112.792	93.739	83
33	Papua	111.256	47.114	42
34	Papua Barat	30.152	18.453	61
35	Papua Selatan	52.614	8.581	16
36	Papua Tengah	58.227	10.012	17
37	Papua Pegunungan	32.084	2.582	8
38	Papua Barat Daya	39.150	1.819	5
Indonesia		**32.665.498**	**26.137.615**	**80,0**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 56.a

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, *CASE NOTIFICATION RATE* (CNR) PER 100.000 PENDUDUK *TREATMENT COVERAGE* (TC) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis					*Case Notification Rate (CNR)* Semua Kasus Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Perkiraan Insiden Tuberkulosis (Dalam Absolut)	*Treatment Coverage (TC%)*	Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Anak (%)
					Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan					
					Jumlah	%	Jumlah	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	103.464	60.642	59%	8.400	64%	4.657	36%	13.057	230	21.289	60%	674	31%
2	Sumatera Utara	407.992	203.913	50%	32.432	66%	16.993	34%	49.425	320	83.949	57%	2.781	39%
3	Sumatera Barat	121.160	47.344	39%	9.280	61%	6.036	39%	15.316	268	24.930	60%	2.793	106%
4	Riau	143.121	139.632	98%	9.811	63%	5.771	37%	15.582	210	29.449	52%	1.686	53%
5	Jambi	68.090	18.135	27%	4.577	61%	2.879	39%	7.456	194	14.010	52%	1.222	82%
6	Sumatera Selatan	178.408	116.034	65%	14.817	63%	8.793	37%	23.610	262	36.710	62%	2.148	61%
7	Bengkulu	39.847	8.753	22%	2.294	62%	1.409	38%	3.703	175	8.199	44%	514	59%
8	Lampung	167.466	106.910	64%	11.166	60%	7.493	40%	18.659	208	34.458	52%	3.629	113%
9	Kep. Bangka Belitung	33.032	28.947	88%	1.918	62%	1.186	38%	3.104	197	6.797	45%	613	95%
10	Kepulauan Riau	68.955	50.194	73%	4.027	61%	2.606	39%	6.633	284	14.188	46%	1.045	85%
11	DKI Jakarta	263.293	198.232	75%	33.979	56%	26.383	44%	60.362	538	54.175	107%	9.660	181%
12	Jawa Barat	851.739	636.421	75%	116.774	55%	95.839	45%	212.613	403	175.255	116%	51.223	351%
13	Jawa Tengah	358.942	365.215	102%	47.471	56%	37.628	44%	85.099	233	73.856	112%	18.242	194%
14	DI Yogyakarta	45.203	31.104	69%	3.641	56%	2.856	44%	6.497	159	9.301	67%	2.087	202%
15	Jawa Timur	453.481	598.493	132%	48.796	56%	38.073	44%	86.869	210	93.309	91%	10.849	99%
16	Banten	229.350	179.448	78%	30.423	57%	22.564	43%	52.987	380	47.191	107%	9.225	250%
17	Bali	50.106	34.422	69%	3.180	61%	2.046	39%	5.226	117	10.310	50%	428	31%
18	Nusa Tenggara Barat	99.863	65.613	66%	6.729	61%	4.332	39%	11.061	208	20.548	53%	1.064	55%
19	Nusa Tenggara Timur	102.697	49.694	48%	5.742	59%	4.011	41%	9.753	166	21.131	44%	857	41%
20	Kalimantan Barat	96.300	47.895	50%	8.713	64%	4.904	36%	13.617	251	19.815	66%	2.074	110%
21	Kalimantan Tengah	51.989	23.048	44%	3.694	64%	2.122	36%	5.816	200	10.697	53%	876	87%
22	Kalimantan Selatan	82.262	51.117	62%	6.648	62%	4.111	38%	10.759	236	16.926	61%	1.696	97%
23	Kalimantan Timur	74.695	58.992	79%	6.836	60%	4.630	40%	11.466	292	15.369	73%	2.610	159%
24	Kalimantan Utara	14.715	3.373	23%	1.261	64%	721	36%	1.982	251	3.028	65%	325	109%
25	Sulawesi Utara	53.217	16.669	31%	6.583	65%	3.610	35%	10.193	378	10.950	89%	436	40%
26	Sulawesi Tengah	58.034	18.767	32%	4.758	60%	3.156	40%	7.914	246	11.941	65%	509	48%
27	Sulawesi Selatan	228.785	183.683	80%	15.106	59%	10.655	41%	25.761	279	47.075	54%	1.698	49%
28	Sulawesi Tenggara	49.726	19.173	39%	4.220	61%	2.680	39%	6.900	238	10.232	65%	410	43%
29	Gorontalo	26.861	12.512	47%	2.958	59%	2.095	41%	5.053	390	5.527	87%	260	56%
30	Sulawesi Barat	23.874	19.719	83%	2.049	58%	1.480	42%	3.529	236	4.912	69%	176	37%
31	Maluku	34.784	14.329	41%	3.126	59%	2.178	41%	5.304	272	7.157	71%	516	67%
32	Maluku Utara	23.128	7.996	35%	2.248	63%	1.344	37%	3.592	263	4.759	72%	188	41%
33	Papua	27.985	13.589	49%	3.434	56%	2.753	44%	6.187	666	5.758	103%	1.098	132%
34	Papua Barat	11.107	3.339	30%	1.384	54%	1.169	46%	2.553	493	2.285	104%	422	93%
35	Papua Selatan	17.389	9.542	55%	2.235	52%	2.027	48%	4.262	738	3.578	106%	960	261%
36	Papua Tengah	23.940	17.106	71%	3.122	55%	2.569	45%	5.691	519	4.926	110%	1.352	254%
37	Papua Pegunungan	11.581	1.577	14%	1.066	57%	812	43%	1.878	169	2.383	74%	356	113%
38	Papua Barat Daya	12.757	2.657	21%	978	56%	753	44%	1.731	318	2.625	62%	267	91%
Indonesia		**4.709.340**	**3.464.229**	**73,6**	**475.876**	**57,9**	**345.324**	**42,1**	**821.200**	**298,8**	**1.060.000**	**77,5**	**136.969**	**107,7**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan:

*) Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Data 2023 per 1 Maret 2024

*) Perkiraan insiden Tuberkulosis Nasional adalah 1.060.000 (Global TB Report 2023)

Lampiran 56.b

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	333	341	680	680	1.012	640	1.374	674	1.811	913	1.730	794	1.460	615	8.400	4.657	13.057
2	Sumatera Utara	1.490	1.291	3.240	3.025	4.257	2.399	5.667	2.420	6.762	3.043	6.668	3.023	4.348	1.792	32.432	16.993	49.425
3	Sumatera Barat	1.463	1.330	851	966	1.117	854	1.283	770	1.415	809	1.636	742	1.515	565	9.280	6.036	15.316
4	Riau	869	817	1.037	993	1.421	951	1.803	937	1.897	934	1.710	705	1.074	434	9.811	5.771	15.582
5	Jambi	658	564	404	392	581	441	710	425	812	474	798	372	614	211	4.577	2.879	7.456
6	Sumatera Selatan	1.123	1.025	1.239	1.209	1.952	1.294	2.541	1.359	2.676	1.437	2.740	1.385	2.546	1.084	14.817	8.793	23.610
7	Bengkulu	285	229	217	203	292	188	368	195	415	247	416	213	301	134	2.294	1.409	3.703
8	Lampung	1.869	1.760	844	910	1.321	1.061	1.690	1.046	1.895	1.098	1.866	919	1.681	699	11.166	7.493	18.659
9	Kep. Bangka Belitung	313	300	164	140	257	164	290	173	310	155	313	157	271	97	1.918	1.186	3.104
10	Kepulauan Riau	564	481	507	545	698	476	762	382	740	357	453	224	303	141	4.027	2.606	6.633
11	DKI Jakarta	4.920	4.740	4.519	4.937	5.216	3.983	5.258	3.547	5.676	3.949	5.092	3.288	3.298	1.939	33.979	26.383	60.362
12	Jawa Barat	26.233	24.990	14.095	17.569	16.513	13.766	15.188	11.338	16.655	12.359	15.917	9.858	12.173	5.959	116.774	95.839	212.613
13	Jawa Tengah	9.428	8.814	4.546	5.732	5.507	4.855	5.942	4.563	7.019	5.096	8.019	5.032	7.010	3.536	47.471	37.628	85.099
14	DI Yogyakarta	1.120	967	341	421	365	305	352	268	439	307	496	338	528	250	3.641	2.856	6.497
15	Jawa Timur	5.487	5.362	5.157	6.263	5.427	5.145	6.569	5.232	8.815	6.566	9.634	5.979	7.707	3.526	48.796	38.073	86.869
16	Banten	4.673	4.552	3.409	3.888	4.873	3.516	4.740	3.052	5.100	3.525	4.631	2.646	2.997	1.385	30.423	22.564	52.987
17	Bali	230	198	349	314	481	392	477	296	617	325	533	278	493	243	3.180	2.046	5.226
18	Nusa Tenggara Barat	587	477	549	613	844	589	1.027	684	1.254	744	1.225	735	1.243	490	6.729	4.332	11.061
19	Nusa Tenggara Timur	457	400	824	804	956	726	835	546	871	555	882	506	917	474	5.742	4.011	9.753
20	Kalimantan Barat	1.151	923	904	657	1.186	709	1.436	749	1.505	795	1.405	653	1.126	418	8.713	4.904	13.617
21	Kalimantan Tengah	487	389	333	270	501	342	602	344	714	354	589	254	468	169	3.694	2.122	5.816
22	Kalimantan Selatan	915	781	562	493	782	458	1.016	538	1.280	742	1.259	722	834	377	6.648	4.111	10.759
23	Kalimantan Timur	1.337	1.273	706	659	994	660	1.045	650	1.070	613	956	490	728	285	6.836	4.630	11.466
24	Kalimantan Utara	162	163	121	105	159	97	208	105	256	87	215	87	140	77	1.261	721	1.982
25	Sulawesi Utara	225	211	725	593	859	530	1.044	546	1.343	710	1.302	587	1.085	433	6.583	3.610	10.193
26	Sulawesi Tengah	270	239	636	560	713	467	773	494	865	591	782	483	719	322	4.758	3.156	7.914
27	Sulawesi Selatan	871	827	1.750	1.823	2.211	1.524	2.346	1.567	2.893	1.983	2.786	1.720	2.249	1.211	15.106	10.655	25.761
28	Sulawesi Tenggara	205	205	552	537	670	437	739	370	763	522	711	379	580	230	4.220	2.680	6.900
29	Gorontalo	128	132	414	367	438	293	433	323	660	494	561	290	324	196	2.958	2.095	5.053
30	Sulawesi Barat	72	104	225	256	304	262	329	239	412	252	392	213	315	154	2.049	1.480	3.529
31	Maluku	247	269	573	511	591	430	539	312	492	304	398	250	286	102	3.126	2.178	5.304
32	Maluku Utara	111	77	412	339	424	264	386	218	380	224	309	142	226	80	2.248	1.344	3.592
33	Papua	577	521	727	763	773	648	502	350	396	233	294	168	165	70	3.434	2.753	6.187
34	Papua Barat	200	222	287	265	277	257	202	179	201	124	124	81	93	41	1.384	1.169	2.553
35	Papua Selatan	473	487	517	561	407	384	341	257	248	174	172	117	77	47	2.235	2.027	4.262
36	Papua Tengah	684	668	675	630	602	468	470	382	383	251	198	114	110	56	3.122	2.569	5.691
37	Papua Pegunungan	190	166	246	229	210	180	178	99	153	88	77	43	12	7	1.066	812	1.878
38	Papua Barat Daya	139	128	168	151	205	151	123	117	150	116	116	58	77	32	978	753	1.731
Indonesia		**70.546**	**66.423**	**53.505**	**59.373**	**65.396**	**50.306**	**69.588**	**45.746**	**79.343**	**51.550**	**77.405**	**44.045**	**60.093**	**27.881**	**475.876**	**345.324**	**821.200**
		16,68%		**13,75%**		**14,09%**		**14,04%**		**15,94%**		**14,79%**		**10,71%**		**100%**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

*) Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Data 2023 per 1 Maret 2024

*) Perkiraan insiden Tuberkulosis Nasional adalah 1.060.000 (Global TB Report 2023)

Lampiran 56.c

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	27	39	416	392	627	409	982	441	1.264	599	1.172	504	904	314	5.392	2.698	8.090
2	Sumatera Utara	175	150	1.772	1.578	2.530	1.342	3.616	1.414	4.371	1.800	4.141	1.694	2.388	915	18.993	8.893	27.886
3	Sumatera Barat	30	60	539	537	784	517	913	493	1.089	574	1.222	513	1.088	341	5.665	3.035	8.700
4	Riau	56	63	605	515	950	515	1.264	562	1.324	604	1.116	421	648	212	5.963	2.892	8.855
5	Jambi	22	34	258	216	384	246	455	261	537	320	516	222	377	109	2.549	1.408	3.957
6	Sumatera Selatan	83	83	743	673	1.203	770	1.550	842	1.587	869	1.534	755	1.275	448	7.975	4.440	12.415
7	Bengkulu	41	35	133	113	196	109	251	106	260	151	277	130	189	78	1.347	722	2.069
8	Lampung	117	131	455	445	800	613	1.056	608	1.182	625	1.103	505	879	334	5.592	3.261	8.853
9	Kep. Bangka Belitung	8	9	104	81	185	101	189	115	228	107	196	100	174	47	1.084	560	1.644
10	Kepulauan Riau	22	21	323	344	445	292	504	237	522	259	288	139	187	73	2.291	1.365	3.656
11	DKI Jakarta	177	293	2.690	2.538	3.106	1.955	3.251	1.842	3.514	1.983	2.918	1.579	1.505	674	17.161	10.864	28.025
12	Jawa Barat	435	886	7.378	8.326	9.330	6.647	8.954	5.551	9.501	6.111	8.233	4.506	5.270	2.124	49.101	34.151	83.252
13	Jawa Tengah	166	338	2.627	3.257	3.485	2.767	4.027	2.670	4.661	2.968	4.845	2.688	3.588	1.416	23.399	16.104	39.503
14	DI Yogyakarta	19	30	184	216	188	154	217	121	272	149	284	133	275	93	1.439	896	2.335
15	Jawa Timur	240	381	2.980	3.478	3.489	2.898	4.671	3.233	6.311	4.312	6.594	3.671	4.666	1.777	28.951	19.750	48.701
16	Banten	100	175	1.688	1.748	2.595	1.743	2.702	1.538	2.814	1.787	2.369	1.194	1.286	503	13.554	8.688	22.242
17	Bali	14	22	214	176	302	223	314	172	431	206	336	150	314	124	1.925	1.073	2.998
18	Nusa Tenggara Barat	35	34	319	355	563	378	764	457	905	534	853	525	777	254	4.216	2.537	6.753
19	Nusa Tenggara Timur	48	56	567	556	632	481	544	362	567	338	549	275	511	225	3.418	2.293	5.711
20	Kalimantan Barat	64	59	620	426	838	446	1.031	519	1.054	528	948	413	690	236	5.245	2.627	7.872
21	Kalimantan Tengah	30	26	226	168	352	222	444	215	523	227	377	143	277	85	2.229	1.086	3.315
22	Kalimantan Selatan	19	25	307	255	466	251	656	320	802	435	713	359	425	132	3.388	1.777	5.165
23	Kalimantan Timur	38	52	416	302	581	326	667	344	722	354	588	242	387	108	3.399	1.728	5.127
24	Kalimantan Utara	8	9	91	71	118	67	170	71	218	68	176	66	100	53	881	405	1.286
25	Sulawesi Utara	32	49	529	437	636	405	830	421	1.071	552	997	435	766	255	4.861	2.554	7.415
26	Sulawesi Tengah	18	26	417	367	453	317	553	330	569	359	497	261	380	126	2.887	1.786	4.673
27	Sulawesi Selatan	84	106	1.199	1.169	1.583	1.056	1.763	1.148	2.119	1.418	1.970	1.154	1.393	666	10.111	6.717	16.828
28	Sulawesi Tenggara	41	46	388	364	458	315	519	257	527	339	466	246	334	128	2.733	1.695	4.428
29	Gorontalo	22	23	310	257	317	212	328	246	502	361	372	183	209	102	2.060	1.384	3.444
30	Sulawesi Barat	4	27	179	184	241	200	250	178	306	189	256	137	187	82	1.423	997	2.420
31	Maluku	36	65	399	349	394	305	391	211	348	199	285	153	181	54	2.034	1.336	3.370
32	Maluku Utara	30	27	306	252	324	200	301	172	301	165	214	84	157	44	1.633	944	2.577
33	Papua	72	88	476	516	494	405	312	209	253	139	170	81	82	33	1.859	1.471	3.330
34	Papua Barat	15	29	185	177	185	163	113	96	118	69	66	29	40	13	722	576	1.298
35	Papua Selatan	47	51	307	319	238	221	188	124	121	76	72	40	24	9	997	840	1.837
36	Papua Tengah	78	70	368	345	316	239	216	172	163	92	75	34	39	12	1.255	964	2.219
37	Papua Pegunungan	16	10	73	65	59	44	37	29	28	9	12	1	-	-	225	158	383
38	Papua Barat Daya	9	13	107	103	139	83	84	62	93	71	56	23	31	9	519	364	883
Indonesia		**2.478**	**3.641**	**30.898**	**31.670**	**39.986**	**27.637**	**45.077**	**26.149**	**51.178**	**29.946**	**46.856**	**23.788**	**32.003**	**12.208**	**248.476**	**155.039**	**403.515**
		1,52%		**15,51%**		**16,76%**		**17,65%**		**20,10%**		**17,51%**		**10,96%**		**100%**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

*) Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Data 2023 per 1 Maret 2024

*) Perkiraan insiden Tuberkulosis Nasional adalah 1.060.000 (Global TB Report 2023)

Lampiran 57

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar dan Diobati*)			Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati*)			Angka Kesembuhan *(Cure Rate)* Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis						Angka Pengobatan Lengkap *(Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis*						Angka Keberhasilan Pengobatan *(Treatment Success Rate/TSR)* Semua Kasus Tuberkulosis						Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis	
								Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan			
		L	P	L + P	L	P	L + P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Aceh	3.903	2.055	5.958	6.959	3.974	10.933	809	20,7	511	24,9	1.320	22,2	5.133	73,8	3.021	76,0	8.154	74,6	5.942	85,4	3.532	88,9	9.474	86,7	359	3,3
2	Sumatera Utara	12.235	5.963	18.198	22.554	12.427	34.981	4.614	37,7	2.173	36,4	6.787	37,3	15.436	68,4	9.101	73,2	24.537	70,1	20.050	88,9	11.274	90,7	31.324	89,5	1.141	3,3
3	Sumatera Barat	4.587	2.497	7.084	7.937	5.236	13.173	2.287	49,9	1.259	50,4	3.546	50,1	4.626	58,3	3.407	65,1	8.033	61,0	6.913	87,1	4.666	89,1	11.579	87,9	560	4,3
4	Riau	4.742	2.406	7.148	7.975	4.719	12.694	1.736	36,6	905	37,6	2.641	36,9	5.451	68,4	3.424	72,6	8.875	69,9	7.187	90,1	4.329	91,7	11.516	90,7	395	3,1
5	Jambi	1.883	1.153	3.036	3.152	2.098	5.250	933	49,5	634	55,0	1.567	51,6	1.826	57,9	1.277	60,9	3.103	59,1	2.759	87,5	1.911	91,1	4.670	89,0	261	5,0
6	Sumatera Selatan	6.005	3.515	9.520	12.072	7.697	19.769	2.298	38,3	1.390	39,5	3.688	38,7	8.692	72,0	5.764	74,9	14.456	73,1	10.990	91,0	7.154	92,9	18.144	91,8	595	3,0
7	Bengkulu	991	556	1.547	1.846	1.122	2.968	362	36,5	173	31,1	535	34,6	1.203	65,2	804	71,7	2.007	67,6	1.565	84,8	977	87,1	2.542	85,6	156	5,3
8	Lampung	5.611	3.700	9.311	10.187	7.248	17.435	3.460	61,7	2.360	63,8	5.820	62,5	6.367	62,5	4.693	64,7	11.060	63,4	9.827	96,5	7.053	97,3	16.880	96,8	347	2,0
9	Kep. Bangka Belitung	910	471	1.381	1.642	969	2.611	418	45,9	230	48,8	648	46,9	973	59,3	620	64,0	1.593	61,0	1.391	84,7	850	87,7	2.241	85,8	163	6,2
10	Kepulauan Riau	1.810	1.032	2.842	3.192	2.127	5.319	773	42,7	493	47,8	1.266	44,5	1.848	57,9	1.344	63,2	3.192	60,0	2.621	82,1	1.837	86,4	4.458	83,8	240	4,5
11	DKI Jakarta	11.707	7.804	19.511	25.570	20.206	45.776	4.394	37,5	3.029	38,8	7.423	38,0	15.749	61,6	13.736	68,0	29.485	64,4	20.143	78,8	16.765	83,0	36.908	80,6	1.525	3,3
12	Jawa Barat	33.317	23.942	57.259	89.352	74.645	163.997	13.775	41,3	10.494	43,8	24.269	42,4	60.773	68,0	53.698	71,9	114.471	69,8	74.548	83,4	64.192	86,0	138.740	84,6	3.970	2,4
13	Jawa Tengah	18.859	13.612	32.471	39.497	31.734	71.231	9.590	50,9	7.553	55,5	17.143	52,8	24.207	61,3	20.632	65,0	44.839	62,9	33.797	85,6	28.185	88,8	61.982	87,0	2.798	3,9
14	DI Yogyakarta	1.074	708	1.782	3.156	2.398	5.554	502	46,7	340	48,0	842	47,3	2.153	68,2	1.744	72,7	3.897	70,2	2.655	84,1	2.084	86,9	4.739	85,3	268	4,8
15	Jawa Timur	21.738	15.672	37.410	37.556	29.900	67.456	13.115	60,3	9.795	62,5	22.910	61,2	19.797	52,7	17.390	58,2	37.187	55,1	32.912	87,6	27.185	90,9	60.097	89,1	3.238	4,8
16	Banten	8.961	5.643	14.604	20.822	15.608	36.430	3.473	38,8	2.208	39,1	5.681	38,9	15.066	72,4	11.888	76,2	26.954	74,0	18.539	89,0	14.096	90,3	32.635	89,6	897	2,5
17	Bali	1.517	864	2.381	2.470	1.648	4.118	957	63,1	598	69,2	1.555	65,3	1.095	44,3	854	51,8	1.949	47,3	2.052	83,1	1.452	88,1	3.504	85,1	345	8,4
18	Nusa Tenggara Barat	3.418	2.122	5.540	5.288	3.570	8.858	2.122	62,1	1.385	65,3	3.507	63,3	2.651	50,1	1.887	52,9	4.538	51,2	4.773	90,3	3.272	91,7	8.045	90,8	460	5,2
19	Nusa Tenggara Timur	2.761	2.082	4.843	4.466	3.486	7.952	983	35,6	816	39,2	1.799	37,1	2.979	66,7	2.352	67,5	5.331	67,0	3.962	88,7	3.168	90,9	7.130	89,7	468	5,9
20	Kalimantan Barat	4.148	2.148	6.296	7.060	4.074	11.134	1.811	43,7	963	44,8	2.774	44,1	4.168	59,0	2.591	63,6	6.759	60,7	5.979	84,7	3.554	87,2	9.533	85,6	411	3,7
21	Kalimantan Tengah	1.514	757	2.271	2.699	1.518	4.217	643	42,5	348	46,0	991	43,6	1.524	56,5	904	59,6	2.428	57,6	2.167	80,3	1.252	82,5	3.419	81,1	189	4,5
22	Kalimantan Selatan	2.433	1.412	3.845	4.618	3.029	7.647	1.069	43,9	667	47,2	1.736	45,1	2.724	59,0	1.938	64,0	4.662	61,0	3.793	82,1	2.605	86,0	6.398	83,7	413	5,4
23	Kalimantan Timur	2.409	1.392	3.801	4.706	3.309	8.015	900	37,4	561	40,3	1.461	38,4	3.096	65,8	2.374	71,7	5.470	68,2	3.996	84,9	2.935	88,7	6.931	86,5	371	4,6
24	Kalimantan Utara	683	325	1.008	1.010	607	1.617	263	38,5	152	46,8	415	41,2	497	49,2	347	57,2	844	52,2	760	75,2	499	82,2	1.259	77,9	83	5,1
25	Sulawesi Utara	3.199	1.723	4.922	4.762	2.704	7.466	1.075	33,6	602	34,9	1.677	34,1	2.970	62,4	1.764	65,2	4.734	63,4	4.045	84,9	2.366	87,5	6.411	85,9	326	4,4
26	Sulawesi Tengah	2.400	1.611	4.011	3.683	2.560	6.243	634	26,4	419	26,0	1.053	26,3	2.493	67,7	1.814	70,9	4.307	69,0	3.127	84,9	2.233	87,2	5.360	85,9	356	5,7
27	Sulawesi Selatan	8.380	5.827	14.207	11.964	8.666	20.630	3.906	46,6	2.851	48,9	6.757	47,6	6.171	51,6	4.833	55,8	11.004	53,3	10.077	84,2	7.684	88,7	17.761	86,1	1.067	5,2
28	Sulawesi Tenggara	1.886	1.205	3.091	3.240	2.060	5.300	784	41,6	538	44,6	1.322	42,8	1.934	59,7	1.263	61,3	3.197	60,3	2.718	83,9	1.801	87,4	4.519	85,3	292	5,5
29	Gorontalo	1.290	933	2.223	2.006	1.534	3.540	554	42,9	452	48,4	1.006	45,3	1.270	63,3	988	64,4	2.258	63,8	1.824	90,9	1.440	93,9	3.264	92,2	165	4,7
30	Sulawesi Barat	1.145	846	1.991	1.550	1.221	2.771	505	44,1	365	43,1	870	43,7	877	56,6	726	59,5	1.603	57,8	1.382	89,2	1.091	89,4	2.473	89,2	154	5,6
31	Maluku	1.372	955	2.327	2.235	1.667	3.902	388	28,3	299	31,3	687	29,5	1.595	71,4	1.199	71,9	2.794	71,6	1.983	88,7	1.498	89,9	3.481	89,2	146	3,7
32	Maluku Utara	1.116	671	1.787	1.664	1.050	2.714	249	22,3	186	27,7	435	24,3	1.133	68,1	734	69,9	1.867	68,8	1.382	83,1	920	87,6	2.302	84,8	188	6,9
33	Papua	1.152	948	2.100	2.607	2.256	4.863	429	37,2	392	41,4	821	39,1	1.608	61,7	1.342	59,5	2.950	60,7	2.037	78,1	1.734	76,9	3.771	77,5	209	4,3
34	Papua Barat	504	395	899	959	811	1.770	143	28,4	126	31,9	269	29,9	522	54,4	473	58,3	995	56,2	665	69,3	599	73,9	1.264	71,4	101	5,7
35	Papua Selatan	862	796	1.658	1.709	1.732	3.441	384	44,5	344	43,2	728	43,9	998	58,4	1.089	62,9	2.087	60,7	1.382	80,9	1.433	82,7	2.815	81,8	116	3,4
36	Papua Tengah	943	685	1.628	2.377	1.833	4.210	354	37,5	273	39,9	627	38,5	1.425	59,9	1.165	63,6	2.590	61,5	1.779	74,8	1.438	78,5	3.217	76,4	142	3,4
37	Papua Pegunungan	166	102	268	813	613	1.426	43	25,9	20	19,6	63	23,5	414	50,9	350	57,1	764	53,6	457	56,2	370	60,4	827	58,0	28	2,0
38	Papua Barat Daya	371	295	666	664	571	1.235	132	35,6	110	37,3	242	36,3	374	56,3	337	59,0	711	57,6	506	76,2	447	78,3	953	77,2	56	4,5
	Indonesia	**182.002**	**118.823**	**300.825**	**366.019**	**272.627**	**638.646**	**80.867**	**44,4**	**56.014**	**47,1**	**136.881**	**45,5**	**231.818**	**63,3**	**183.867**	**67,4**	**415.685**	**65,1**	**312.685**	**85,4**	**239.881**	**88,0**	**552.566**	**86,5**	**22.999**	**3,6**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan:

*) Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Data Hasil Pengobatan TBC Kohort Tahun 2022 per 1 Maret 2024

*) Data 2023 per 1 Maret 2024

Lampiran 58

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Balita	Perkiraan Pneumonia Balita	Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita																						Kasus Pneumonia yang mendapatkan antibiotik	Persentase Kasus Pneumonia yang mendapatkan pengobatan sesuai standar
				Pneumonia				Pneumonia Berat				Jumlah			%	Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia				Total			CFR (%)		
				< 1 Tahun		1-<5 tahun		< 1 Tahun		1-<5 tahun		L	P	L+P		< 1 Tahun		1-<5 tahun		L	P	L+P			
				L	P	L	P	L	P	L	P					L	P	L	P						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	548.854	24.479	421	319	1.227	885	40	13	129	22	1.816	1.237	3.053	12,47	2	2	0	0	2	2	4	0,13	2.770	90,72
2	Sumatera Utara	2.823.541	84.424	752	650	1.674	1.459	173	120	109	91	2.708	2.320	5.028	5,96	26	6	3	1	29	7	36	0,72	4.796	95,39
3	Sumatera Barat	547.549	21.409	973	813	2.543	1.957	30	28	32	29	3.578	2.827	6.405	29,92	0	1	0	0	0	1	1	0,02	6.014	93,90
4	Riau	644.531	17.209	505	258	704	580	39	11	16	15	1.264	864	2.128	12,37	2	0	0	0	2	0	2	0,09	2.052	96,43
5	Jambi	366.459	11.543	159	131	464	347	5	10	16	7	644	495	1.139	9,87	1	0	0	0	1	0	1	0,09	1.096	96,22
6	Sumatera Selatan	875.020	31.588	893	815	2.449	2.053	52	43	109	82	3.503	2.993	6.496	20,56	2	2	0	0	2	2	4	0,06	5.477	84,31
7	Bengkulu	155.934	3.119	43	157	420	88	4	4	127	11	594	260	853	27,35	0	0	0	1	0	1	1	0,12	853	99,99
8	Lampung	905.859	20.199	1.127	923	2.027	1.864	19	20	54	56	3.227	2.863	6.090	30,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.782	94,94
9	Kep. Bangka Belitung	143.485	8.681	322	322	1.041	948	5	12	15	10	1.383	1.292	2.675	30,81	1	0	0	0	1	0	1	0,04	2.231	83,40
10	Kepulauan Riau	277.584	11.048	302	237	489	407	18	9	20	27	829	680	1.509	13,66	1	0	0	0	1	0	1	0,07	1.360	90,13
11	DKI Jakarta	1.125.159	47.707	6.308	4.827	12.385	10.477	121	82	180	136	18.994	15.522	34.516	72,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	34.220	99,14
12	Jawa Barat	4.929.355	227.736	17.257	14.786	34.491	30.637	1.245	881	1.799	1.480	54.792	47.784	102.576	45,04	16	9	12	2	28	11	39	0,04	98.129	95,66
13	Jawa Tengah	3.731.519	134.708	7.591	5.860	21.681	18.003	482	296	738	581	30.492	24.740	55.232	41,00	27	22	17	15	44	37	81	0,15	52.228	94,56
14	DI Yogyakarta	255.407	11.034	814	601	2.134	1.804	14	5	24	49	2.986	2.459	5.445	49,35	2	2	1	1	3	3	6	0,11	3.930	72,18
15	Jawa Timur	3.277.302	146.208	9.924	9.067	28.260	25.900	396	241	784	627	39.364	35.835	75.199	51,43	4	2	0	1	4	3	7	0,01	71.432	94,99
16	Banten	1.246.095	51.339	5.262	4.954	11.838	10.854	197	153	203	186	17.500	16.147	33.647	65,54	8	4	0	0	8	4	12	0,04	32.570	96,80
17	Bali	419.401	8.598	999	754	2.046	1.468	275	156	257	200	3.577	2.578	6.155	71,59	0	2	2	2	2	4	6	0,10	6.155	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	538.829	34.377	2.255	1.793	4.660	3.747	185	109	270	236	7.370	5.885	13.255	38,56	6	2	1	0	7	2	9	0,07	13.254	99,99
19	Nusa Tenggara Timur	570.859	24.433	1.106	707	1.338	1.171	84	59	83	73	2.611	2.010	4.621	18,91	4	4	0	0	4	4	8	0,17	3.723	80,57
20	Kalimantan Barat	528.425	11.203	417	342	607	518	11	10	28	25	1.063	895	1.958	17,48	1	0	0	0	1	0	1	0,05	1.927	98,42
21	Kalimantan Tengah	272.639	11.914	371	234	405	350	176	104	113	103	1.065	791	1.856	15,58	11	11	0	0	11	11	22	1,19	1.737	93,59
22	Kalimantan Selatan	416.947	23.057	1.996	1.422	4.605	3.952	356	294	338	318	7.295	5.986	13.281	57,60	3	1	1	0	4	1	5	0,04	12.759	96,07
23	Kalimantan Timur	357.130	10.214	900	628	1.788	1.300	32	21	21	29	2.741	1.978	4.719	46,20	1	1	0	0	1	1	2	0,04	4.123	87,37
24	Kalimantan Utara	72.544	2.075	288	179	468	316	2	3	6	8	764	506	1.270	61,21	2	2	1	0	3	2	5	0,39	1.199	94,41
25	Sulawesi Utara	254.834	54.823	41	22	40	37	1	0	1	1	83	60	143	0,26	3	4	0	0	3	4	7	4,90	114	79,72
26	Sulawesi Tengah	305.598	15.861	1.343	1.068	2.777	2.161	186	75	131	132	4.437	3.436	7.873	49,64	9	6	0	0	9	6	15	0,19	7.072	89,83
27	Sulawesi Selatan	885.540	33.562	1.381	974	2.888	2.254	334	205	545	469	5.148	3.902	9.050	26,97	3	6	1	5	4	11	15	0,17	8.118	89,70
28	Sulawesi Tenggara	264.722	10.165	310	214	486	399	38	32	40	53	874	698	1.572	15,46	1	3	5	3	6	6	12	0,76	1.572	100,00
29	Gorontalo	118.997	5.759	591	430	899	724	25	8	20	19	1.535	1.181	2.716	47,16	13	4	0	0	13	4	17	0,63	2.579	94,96
30	Sulawesi Barat	142.964	6.977	116	100	296	228	41	12	30	25	483	365	848	12,15	37	51	0	1	37	52	89	10,50	848	100,00
31	Maluku	181.416	6.785	266	207	391	281	12	4	15	20	684	512	1.196	17,63	8	7	25	31	33	38	71	5,94	1.077	90,05
32	Maluku Utara	125.094	2.865	223	146	335	248	7	8	6	11	571	413	984	34,35	1	6	0	0	1	6	7	0,71	900	91,46
33	Papua	324.540	9.087	153	111	243	185	12	13	18	15	426	324	750	8,25	8	6	0	0	8	6	14	1,87	750	100,00
34	Papua Barat	101.680	2.928	462	313	650	496	72	30	87	87	1.271	926	2.197	75,02	8	8	3	2	11	10	21	0,96	2.050	93,31
35	Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Papua Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Papua Pegunungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Papua Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indonesia		**27.735.806**	**1.127.113**	**65.871**	**54.364**	**148.749**	**128.098**	**4.688**	**3.070**	**6.364**	**5.233**	**225.671**	**190.764**	**416.435**	**36,95**	**211**	**174**	**72**	**65**	**283**	**239**	**522**	**0,13**	**394.897**	**94,83**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2024

Lampiran 59.a

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)															Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV (minimal) (Target Tes)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (Tes HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
		≤ 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	2	3	0	1	17	2	56	2	156	27	9	4	240	39	279	127.235	68.430	54%
2	Sumatera Utara	31	6	22	12	163	11	453	40	1.672	426	189	80	2.530	575	3.105	430.438	299.147	69%
3	Sumatera Barat	6	1	2	2	39	1	103	6	327	53	35	4	512	67	579	157.958	94.826	60%
4	Riau	6	1	5	3	46	5	156	17	463	132	56	24	732	182	914	225.127	168.894	75%
5	Jambi	2	0	1	2	15	0	49	5	123	42	19	3	209	52	261	88.467	40.284	46%
6	Sumatera Selatan	8	6	2	1	36	5	152	18	401	132	41	11	640	173	813	236.323	200.256	85%
7	Bengkulu	0	0	1	1	13	1	31	1	91	21	13	3	149	27	176	60.152	34.887	58%
8	Lampung	13	4	6	5	48	7	138	27	466	127	35	13	706	183	889	213.036	143.826	68%
9	Kep. Bangka Belitung	0	1	1	1	7	4	22	9	127	56	9	11	166	82	248	40.916	40.068	98%
10	Kepulauan Riau	3	2	7	6	26	8	114	15	484	181	60	24	694	236	930	75.156	80.539	107%
11	DKI Jakarta	19	13	30	22	165	39	948	107	3.065	713	324	124	4.551	1.018	5.569	326.939	481.160	147%
12	Jawa Barat	59	45	40	43	382	71	1.354	223	3.832	1.349	402	153	6.069	1.884	7.953	1.275.453	1.005.864	79%
13	Jawa Tengah	40	24	28	23	194	43	558	139	2.143	1.092	571	287	3.534	1.608	5.142	836.803	874.784	105%
14	DI Yogyakarta	4	4	4	5	63	1	235	11	345	104	90	39	741	164	905	83.087	85.254	103%
15	Jawa Timur	50	37	48	48	299	65	922	328	3.724	2.391	1.000	588	6.043	3.457	9.500	855.601	867.498	101%
16	Banten	13	8	13	15	112	9	370	56	1.170	342	110	33	1.788	463	2.251	350.618	331.479	95%
17	Bali	8	9	6	14	46	14	227	86	1.195	728	290	176	1.772	1.027	2.799	116.462	98.505	85%
18	Nusa Tenggara Barat	4	4	2	2	33	7	80	14	232	84	33	9	384	120	504	144.153	106.229	74%
19	Nusa Tenggara Timur	10	3	9	7	29	19	136	56	530	287	76	39	790	411	1.201	176.593	62.537	35%
20	Kalimantan Barat	5	4	12	7	63	11	188	31	550	193	89	31	907	277	1.184	138.906	93.063	67%
21	Kalimantan Tengah	6	4	2	2	21	9	55	19	227	108	29	12	340	154	494	77.545	43.273	56%
22	Kalimantan Selatan	1	6	4	5	38	5	109	19	367	113	40	16	559	164	723	117.937	99.710	85%
23	Kalimantan Timur	8	7	4	3	52	10	171	36	514	261	73	33	822	350	1.172	127.435	132.048	104%
24	Kalimantan Utara	4	1	3	1	7	2	28	10	89	37	12	5	143	56	199	24.174	26.249	109%
25	Sulawesi Utara	4	3	3	3	46	10	129	31	271	88	32	12	485	147	632	75.256	40.499	54%
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	26	3	71	3	82	20	11	1	190	27	217	84.621	57.283	68%
27	Sulawesi Selatan	21	18	9	4	159	11	467	48	843	156	71	16	1.570	253	1.823	254.746	172.719	68%
28	Sulawesi Tenggara	7	1	1	0	40	2	103	9	177	28	16	5	344	45	389	81.634	37.121	45%
29	Gorontalo	6	2	0	0	9	1	31	2	59	6	5	3	110	14	124	35.015	27.134	77%
30	Sulawesi Barat	2	0	1	1	1	1	16	1	43	7	1	1	64	11	75	41.742	20.388	49%
31	Maluku	6	2	2	3	16	12	77	33	184	105	21	6	306	161	467	62.947	49.451	79%
32	Maluku Utara	2	2	1	1	15	11	40	24	105	33	4	4	167	75	242	37.778	20.364	54%
33	Papua	25	32	8	15	35	110	161	365	540	679	61	43	830	1.244	2.074	100.583	38.685	38%
34	Papua Barat	8	10	3	3	13	70	91	132	228	297	44	34	387	546	933	65.809	31.003	47%
35	Papua Selatan	3	1	0	1	5	13	14	21	44	47	6	4	72	87	159	54.618	25.663	47%
36	Papua Tengah	4	12	7	15	65	168	178	231	424	412	33	26	711	864	1.575	90.295	57.804	64%
37	Papua Pegunungan	8	2	4	4	5	38	32	63	140	140	17	3	206	250	456	45.905	8.481	18%
38	Papua Barat Daya	1	2	0	1	9	12	30	56	95	123	11	3	146	197	343	50.756	19.432	38%
Indonesia		**399**	**280**	**291**	**282**	**2.358**	**811**	**8.095**	**2.294**	**25.528**	**11.140**	**3.938**	**1.883**	**40.609**	**16.690**	**57.299**	**7.388.219**	**6.084.837**	**0,8**
		1,2%		**1,0%**		**5,5%**		**18,1%**		**64,0%**		**10,2%**		**100%**					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
Data per 25 Januari 2024

Lampiran 59.b

JUMLAH KASUS BARU HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru HIV		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	175	269	279
2	Sumatera Utara	1.904	2.777	3.105
3	Sumatera Barat	364	526	579
4	Riau	476	766	914
5	Jambi	187	182	261
6	Sumatera Selatan	521	844	813
7	Bengkulu	146	179	176
8	Lampung	526	721	889
9	Kepulauan Bangka Belitung	184	279	248
10	Kepulauan Riau	669	926	930
11	DKI Jakarta	4.358	5.744	5.569
12	Jawa Barat	5.337	8.680	7.953
13	Jawa Tengah	4.569	5.897	5.142
14	DI Yogyakarta	567	902	905
15	Jawa Timur	5.872	7.242	9.500
16	Banten	1.392	2.404	2.251
17	Bali	1.571	1.826	2.799
18	Nusa Tenggara Barat	207	618	504
19	Nusa Tenggara Timur	429	556	1.201
20	Kalimantan Barat	531	931	1.184
21	Kalimantan Tengah	257	385	494
22	Kalimantan Selatan	419	621	723
23	Kalimantan Timur	1.089	1.312	1.172
24	Kalimantan Utara	130	173	199
25	Sulawesi Utara	508	656	632
26	Sulawesi Tengah	227	455	217
27	Sulawesi Selatan	1.227	1.476	1.823
28	Sulawesi Tenggara	193	524	389
29	Gorontalo	109	143	124
30	Sulawesi Barat	31	38	75
31	Maluku	320	487	467
32	Maluku Utara	257	413	242
33	Papua	1.790	3.206	2.074
34	Papua Barat	360	797	933
35	Papua Selatan	-	-	159
36	Papua Tengah	-	-	1.575
37	Papua Pegunungan	-	-	456
38	Papua Barat Daya	-	-	343
Indonesia		**36.902**	**52.955**	**57.299**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024
Data per 25 Januari 2024

Lampiran 60.a

JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																							
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Kelompok Umur Tidak Diketahui		Jenis Kelamin Tidak Diketahui	Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	0	0	0	0	1	0	3	0	26	3	29	2	16	2	4	1	0	1	0	0	0	79	9	88
2	Sumatera Utara	1	1	10	3	7	5	18	0	218	36	241	51	133	47	63	25	25	9	0	0	0	716	177	893
3	Sumatera Barat	1	0	0	0	1	0	1	0	46	2	45	5	32	5	6	2	10	0	0	0	0	142	14	156
4	Riau	1	0	1	1	2	1	5	0	80	7	58	19	45	11	20	9	3	0	0	0	0	215	48	263
5	Jambi	0	0	0	0	1	0	0	0	5	4	8	3	3	5	4	0	2	1	0	0	0	23	13	36
6	Sumatera Selatan	1	0	4	3	0	1	4	0	79	13	111	8	44	18	28	4	2	0	0	0	0	273	47	320
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	1	1	0	10	1	19	3	12	3	7	4	1	0	0	0	0	50	12	62
8	Lampung	1	0	2	0	1	4	11	0	55	5	65	10	29	13	10	0	25	2	0	0	0	199	34	233
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	2	1	0	13	2	20	5	10	3	2	1	1	2	0	0	0	47	15	62
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	1	3	5	2	59	6	74	20	56	31	16	8	1	0	0	0	0	212	70	282
11	DKI Jakarta	1	1	6	1	10	8	19	5	315	57	324	89	165	66	76	37	30	18	1	0	0	947	282	1.229
12	Jawa Barat	7	4	15	9	13	19	54	6	666	131	607	193	301	140	141	62	89	17	84	17	0	1.977	598	2.575
13	Jawa Tengah	4	0	7	4	12	16	19	3	309	69	407	152	314	167	231	118	136	39	0	1	0	1.439	569	2.008
14	DI Yogyakarta	1	1	0	1	1	1	3	0	39	2	33	4	32	7	16	8	17	8	0	0	0	142	32	174
15	Jawa Timur	4	0	12	6	23	14	41	16	359	144	482	209	374	215	217	131	134	50	1	0	0	1.647	785	2.432
16	Banten	0	0	2	4	6	8	12	1	189	27	175	37	74	34	38	9	4	2	0	0	0	500	122	622
17	Bali	0	1	8	4	10	8	13	4	172	58	329	164	336	167	193	99	75	38	1	0	0	1.137	543	1.680
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	2	1	0	4	2	39	10	31	6	24	7	13	4	3	1	0	0	0	116	32	148
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	1	3	4	3	5	3	68	25	73	38	66	18	22	17	7	4	0	0	0	247	111	358
20	Kalimantan Barat	0	0	0	1	2	2	6	0	84	13	97	28	41	12	20	8	10	3	4	2	0	264	69	333
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	1	1	0	1	2	38	8	29	9	25	9	11	6	2	0	0	0	0	107	35	142
22	Kalimantan Selatan	0	0	1	2	4	0	8	3	58	8	60	23	34	7	14	9	2	0	0	0	0	181	52	233
23	Kalimantan Timur	0	1	1	1	1	2	3	3	53	12	46	27	41	25	21	7	25	10	0	0	0	191	88	279
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	1	1	1	0	20	0	9	7	12	3	6	2	2	0	0	0	0	51	13	64
25	Sulawesi Utara	0	1	1	1	0	0	1	2	56	14	19	10	17	8	11	5	1	1	0	0	0	106	42	148
26	Sulawesi Tengah	0	0	1	1	2	0	5	1	24	4	29	7	12	6	9	1	3	0	0	0	0	85	20	105
27	Sulawesi Selatan	1	1	4	3	2	3	15	1	127	19	105	19	54	18	28	5	7	1	0	0	0	343	70	413
28	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	1	0	1	0	21	1	26	4	6	1	6	1	0	0	1	0	0	63	7	70
29	Gorontalo	4	2	0	0	0	0	2	1	13	6	4	6	3	4	3	2	1	3	0	0	0	30	24	54
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	0	0	6	2	8	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	17	3	20
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	2	2	23	4	14	3	10	2	2	0	10	0	0	0	0	61	11	72
32	Maluku Utara	0	0	1	0	0	0	6	2	43	16	36	10	22	2	11	4	0	2	0	0	0	119	36	155
33	Papua	0	0	0	0	3	2	1	5	11	27	15	18	7	7	3	1	1	2	0	0	0	41	62	103
34	Papua Barat	0	1	0	3	2	0	4	8	40	43	21	32	15	7	3	4	13	8	0	0	0	98	106	204
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	9	7	16
36	Papua Tengah	0	1	1	2	1	1	7	22	62	55	45	46	16	24	11	11	3	2	0	0	0	146	164	310
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1	2	1	1	0	5	11	0	0	0	12	16	28
38	Papua Barat Daya	3	4	0	0	0	0	0	1	8	7	7	1	3	1	0	0	1	3	1	0	0	23	17	40
Indonesia		**32**	**19**	**79**	**56**	**115**	**105**	**282**	**97**	**3.438**	**845**	**3.708**	**1.271**	**2.389**	**1.097**	**1.267**	**607**	**651**	**238**	**94**	**20**	**0**	**12.055**	**4.355**	**16.410**
		0,3%		**0,8%**		**1,3%**		**2,3%**		**26,1%**		**30,3%**		**21,2%**		**11,4%**		**5,4%**		**0,7%**		**0,0%**	**100%**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Data per 25 Januari 2024

Lampiran 60.b

JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																						
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Tidak Diketahui		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Aceh	0	0	0	0	1	0	3	0	26	3	29	2	16	2	4	1	0	1	0	0	79	9	88
2	Sumatera Utara	1	1	10	3	7	5	18	0	218	36	241	51	133	47	63	25	25	9	0	0	716	177	893
3	Sumatera Barat	1	0	0	0	1	0	1	0	46	2	45	5	32	5	6	2	10	0	0	0	142	14	156
4	Riau	1	0	1	1	2	1	5	0	80	7	58	19	45	11	20	9	3	0	0	0	215	48	263
5	Jambi	0	0	0	0	1	0	0	0	5	4	8	3	3	5	4	0	2	1	0	0	23	13	36
6	Sumatera Selatan	1	0	4	3	0	1	4	0	79	13	111	8	44	18	28	4	2	0	0	0	273	47	320
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	1	1	0	10	1	19	3	12	3	7	4	1	0	0	0	50	12	62
8	Lampung	1	0	2	0	1	4	11	0	55	5	65	10	29	13	10	0	25	2	0	0	199	34	233
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	2	1	0	13	2	20	5	10	3	2	1	1	2	0	0	47	15	62
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	1	3	5	2	59	6	74	20	56	31	16	8	1	0	0	0	212	70	282
11	DKI Jakarta	1	1	6	1	10	8	19	5	315	57	324	89	165	66	76	37	30	18	1	0	947	282	1229
12	Jawa Barat	7	4	15	9	13	19	54	6	666	131	607	193	301	140	141	62	89	17	84	17	1977	598	2575
13	Jawa Tengah	4	0	7	4	12	16	19	3	309	69	407	152	314	167	231	118	136	39	0	1	1439	569	2008
14	DI Yogyakarta	1	1	0	1	1	1	3	0	39	2	33	4	32	7	16	8	17	8	0	0	142	32	174
15	Jawa Timur	4	0	12	6	23	14	41	16	359	144	482	209	374	215	217	131	134	50	1	0	1647	785	2432
16	Banten	0	0	2	4	6	8	12	1	189	27	175	37	74	34	38	9	4	2	0	0	500	122	622
17	Bali	0	1	8	4	10	8	13	4	172	58	329	164	336	167	193	99	75	38	1	0	1137	543	1680
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	2	1	0	4	2	39	10	31	6	24	7	13	4	3	1	0	0	116	32	148
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	1	3	4	3	5	3	68	25	73	38	66	18	22	17	7	4	0	0	247	111	358
20	Kalimantan Barat	0	0	0	1	2	2	6	0	84	13	97	28	41	12	20	8	10	3	4	2	264	69	333
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	1	1	0	1	2	38	8	29	9	25	9	11	6	2	0	0	0	107	35	142
22	Kalimantan Selatan	0	0	1	2	4	0	8	3	58	8	60	23	34	7	14	9	2	0	0	0	181	52	233
23	Kalimantan Timur	0	1	1	1	1	2	3	3	53	12	46	27	41	25	21	7	25	10	0	0	191	88	279
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	1	1	1	0	20	0	9	7	12	3	6	2	2	0	0	0	51	13	64
25	Sulawesi Utara	0	1	1	1	0	0	1	2	56	14	19	10	17	8	11	5	1	1	0	0	106	42	148
26	Sulawesi Tengah	0	0	1	1	2	0	5	1	24	4	29	7	12	6	9	1	3	0	0	0	85	20	105
27	Sulawesi Selatan	1	1	4	3	2	3	15	1	127	19	105	19	54	18	28	5	7	1	0	0	343	70	413
28	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	1	0	1	0	21	1	26	4	6	1	6	1	0	0	1	0	63	7	70
29	Gorontalo	4	2	0	0	0	0	2	1	13	6	4	6	3	4	3	2	1	3	0	0	30	24	54
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	0	0	6	2	8	1	1	0	0	0	0	0	1	0	17	3	20
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	2	2	23	4	14	3	10	2	2	0	10	0	0	0	61	11	72
32	Maluku Utara	0	0	1	0	0	0	6	2	43	16	36	10	22	2	11	4	0	2	0	0	119	36	155
33	Papua	0	0	0	0	3	2	1	5	11	27	15	18	7	7	3	1	1	2	0	0	41	62	103
34	Papua Barat	0	1	0	3	2	0	4	8	40	43	21	32	15	7	3	4	13	8	0	0	98	106	204
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1	2	1	0	2	0	0	0	0	9	7	16
36	Papua Tengah	0	1	1	2	1	1	7	22	62	55	45	46	16	24	11	11	3	2	0	0	146	164	310
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1	2	1	1	0	5	11	0	0	12	16	28
38	Papua Barat Daya	3	4	0	0	0	0	0	1	8	7	7	1	3	1	0	0	1	3	1	0	23	17	40
	Indonesia	**32**	**19**	**79**	**56**	**115**	**105**	**282**	**97**	**3438**	**845**	**3708**	**1271**	**2389**	**1097**	**1267**	**607**	**651**	**238**	**94**	**20**	**12055**	**4355**	**16410**
		0,3		**0,8**		**1,3**		**2,3**		**26,1**		**30,3**		**21,2**		**11,4**		**5,4**		**0,7**		**100**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
Data per 25 Januari 2024

Lampiran 60.c

JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru			Jumlah Kasus Kumulatif s.d. Desember 2023
		2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	50	33	88	755
2	Sumatera Utara	326	403	893	5.862
3	Sumatera Barat	89	109	156	2.663
4	Riau	298	223	263	3.342
5	Jambi	16	21	36	908
6	Sumatera Selatan	163	563	320	2.456
7	Bengkulu	31	81	62	684
8	Lampung	67	159	233	1.551
9	Kepulauan Bangka Belitung	16	35	62	676
10	Kepulauan Riau	119	167	282	2.742
11	DKI Jakarta	133	89	1.229	12.123
12	Jawa Barat	221	510	2.575	11.025
13	Jawa Tengah	1.119	1.484	2.008	17.176
14	DI Yogyakarta	69	107	174	1.933
15	Jawa Timur	394	666	2.432	24.508
16	Banten	142	434	622	4.428
17	Bali	492	851	1.680	11.571
18	Nusa Tenggara Barat	154	396	148	1.559
19	Nusa Tenggara Timur	148	178	358	2.888
20	Kalimantan Barat	79	229	333	3.507
21	Kalimantan Tengah	26	75	142	591
22	Kalimantan Selatan	139	162	233	1.073
23	Kalimantan Timur	274	232	279	2.668
24	Kalimantan Utara	34	64	64	805
25	Sulawesi Utara	214	177	148	2.642
26	Sulawesi Tengah	59	127	105	1.179
27	Sulawesi Selatan	327	464	413	4.765
28	Sulawesi Tenggara	57	116	70	881
29	Gorontalo	43	19	54	331
30	Sulawesi Barat	12	12	20	71
31	Maluku	20	33	72	924
32	Maluku Utara	85	123	155	1.099
33	Papua	254	858	103	2.363
34	Papua Barat	80	141	204	24.945
35	Papua Selatan	-	-	16	16
36	Papua Tengah	-	-	310	310
37	Papua Pegunungan	-	-	28	28
38	Papua Barat Daya	-	-	40	40
Indonesia		**5.750**	**9.341**	**16.410**	**157.088**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024
Data per 25 Januari 2024

Lampiran 60.d

JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	88	2	2%
2	Sumatera Utara	893	4	0%
3	Sumatera Barat	156	2	1%
4	Riau	263	2	1%
5	Jambi	36	1	3%
6	Sumatera Selatan	320	10	3%
7	Bengkulu	62	1	2%
8	Lampung	233	1	0%
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	1	2%
10	Kepulauan Riau	282	0	0%
11	DKI Jakarta	1.229	32	3%
12	Jawa Barat	2.575	24	1%
13	Jawa Tengah	2.008	5	0%
14	DI Yogyakarta	174	0	0%
15	Jawa Timur	2.432	11	0%
16	Banten	622	3	0%
17	Bali	1.680	3	0%
18	Nusa Tenggara Barat	148	0	0%
19	Nusa Tenggara Timur	358	0	0%
20	Kalimantan Barat	333	5	2%
21	Kalimantan Tengah	142	4	3%
22	Kalimantan Selatan	233	3	1%
23	Kalimantan Timur	279	3	1%
24	Kalimantan Utara	64	0	0%
25	Sulawesi Utara	148	0	0%
26	Sulawesi Tengah	105	0	0%
27	Sulawesi Selatan	413	3	1%
28	Sulawesi Tenggara	70	0	0%
29	Gorontalo	54	0	0%
30	Sulawesi Barat	20	0	0%
31	Maluku	72	0	0%
32	Maluku Utara	155	2	1%
33	Papua	103	0	0%
34	Papua Barat	204	2	1%
35	Papua Selatan	16	0	0%
36	Papua Tengah	310	0	0%
37	Papua Pegunungan	28	0	0%
38	Papua Barat Daya	40	0	0%
Indonesia		**16.410**	**124**	**0,8**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024
Data per 25 Januari 2024

Lampiran 61

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Target Penemuan		Diare							
				Dilayani				Mendapat Oralit (Semua Umur)		Mendapat Oralit dan Zinc (Balita)	
				Semua Umur		Balita					
		Semua Umur	Balita	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	151.199	85.691	51.810	34,3	20.306	23,7	42.366	81,8	16.999	83,7
2	Sumatera Utara	411.962	226.388	105.226	25,5	28.747	12,7	92680	88,1	25.055	87,2
3	Sumatera Barat	154.957	86.068	40.689	26,3	11.729	13,6	39.251	96,5	11.443	97,6
4	Riau	196.987	108.080	31.624	16,1	9.341	8,6	27.988	88,5	7.738	82,8
5	Jambi	100.259	50.752	21.513	21,5	6.657	13,1	20.155	93,7	5.922	89,0
6	Sumatera Selatan	240.365	133.568	95.955	39,9	37.663	28,2	79.132	82,5	27.451	72,9
7	Bengkulu	55.604	28.149	10.569	19,0	3.269	11,6	9.576	90,6	2.928	89,6
8	Lampung	236.373	117.295	76.257	32,3	24.123	20,6	75.170	98,6	23.654	98,1
9	Kep. Bangka Belitung	41.163	20.952	14.585	35,4	5.444	26,0	14.151	97,0	5.359	98,4
10	Kepulauan Riau	68.075	39.125	9.305	13,7	2.069	5,3	9.018	96,9	1.977	95,6
11	DKI Jakarta	290.927	141.362	195.609	67,2	59.314	42,0	180.226	92,1	55.246	93,1
12	Jawa Barat	1.381.648	671.837	644.506	46,6	232.295	34,6	621.224	96,4	221.690	95,4
13	Jawa Tengah	951.970	409.200	372.779	39,2	113.035	27,6	310.692	83,3	94.800	83,9
14	DI Yogyakarta	109.995	48.264	37.730	34,3	7.096	14,7	32.496	86,1	6.180	87,1
15	Jawa Timur	1.094.336	464.741	642.000	58,7	289.200	62,2	633.023	98,6	284.048	98,2
16	Banten	362.531	184.648	245.029	67,6	112.172	60,7	232.608	94,9	106.324	94,8
17	Bali	123.408	54.207	33.716	27,3	9.523	17,6	30.845	91,5	8.039	84,4
18	Nusa Tenggara Barat	146.916	82.013	69.603	47,4	32.597	39,7	64.488	92,7	29.601	90,8
19	Nusa Tenggara Timur	154.871	97.458	19.037	12,3	10.020	10,3	16.748	88,0	9.021	90,0
20	Kalimantan Barat	142.470	73.982	34.376	24,1	13.030	17,6	26.305	76,5	10.113	77,6
21	Kalimantan Tengah	75.405	37.856	9.631	12,8	3.831	10,1	9.018	93,6	3.276	85,5
22	Kalimantan Selatan	116.634	62.315	47.741	40,9	18.516	29,7	42.888	89,8	17.101	92,4
23	Kalimantan Timur	102.482	50.961	50.108	48,9	17.048	33,5	44.296	88,4	15.068	88,4
24	Kalimantan Utara	20.172	10.808	12.239	60,7	5.163	47,8	10.972	89,6	4.697	91,0
25	Sulawesi Utara	69.255	32.130	8.604	12,4	3.051	9,5	7.433	86,4	2.591	84,9
26	Sulawesi Tengah	86.355	47.241	10.648	12,3	4.153	8,8	9.662	90,7	3.729	89,8
27	Sulawesi Selatan	245.349	117.857	110.987	45,2	40.762	34,6	90.978	82,0	33.573	82,4
28	Sulawesi Tenggara	76.211	45.091	26.539	34,8	11.666	25,9	22.372	84,3	8.755	75,0
29	Gorontalo	32.794	16.123	14.482	44,2	7.203	44,7	12.852	88,7	6.654	92,4
30	Sulawesi Barat	38.697	22.280	22.773	58,8	7.961	35,7	19.047	83,6	6.571	82,5
31	Maluku	49.720	28.149	6.401	12,9	3.252	11,6	5.542	86,6	2.930	90,1
32	Maluku Utara	35.150	19.710	8.460	24,1	4.433	22,5	7.355	86,9	3.888	87,7
33	Papua	23.725	13.344	7.437	31,3	3.988	29,9	5.961	80,2	3.457	86,7
34	Papua Barat	13.538	8.021	6.921	51,1	4.324	53,9	6.299	91,0	4.121	95,3
35	Papua Selatan	14.126	9.792	3.886	27,5	2.099	21,4	2.938	75,6	1.684	80,2
36	Papua Tengah	27.769	16.362	3.726	13,4	1.816	11,1	3.186	85,5	1.546	85,1
37	Papua Pegunungan	29.608	13.475	1.380	4,7	775	5,8	1.141	82,7	701	90,5
38	Papua Barat Daya	14.947	8.490	1.271	8,5	722	8,5	1.153	90,7	666	92,2
Indonesia		**7.487.954**	**3.683.780**	**3.105.152**	**41,5**	**1.168.393**	**31,7**	**2.861.235**	**92,1**	**1.074.596**	**91,97**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 62

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	33	100,0
3	Sumatera Barat	19	19	100,0
4	Riau	12	12	100,0
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,0
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	100,0
31	Maluku	11	11	100,0
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua	9	8	88,9
34	Papua Barat	7	7	100,0
35	Papua Selatan	4	4	100,0
36	Papua Tengah	8	2	25,0
37	Papua Pegunungan	8	3	37,5
38	Papua Barat Daya	6	4	66,7
Indonesia		**514**	**500**	**97,3**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 64

KASUS BARU KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk
			Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.599.952	18	21	39	167	78	245	185	99	284	5,1
2	Sumatera Utara	15.257.842	1	2	3	88	62	150	89	64	153	1,0
3	Sumatera Barat	5.676.344	3	6	9	35	21	56	38	27	65	1,1
4	Riau	7.295.829	5	7	12	87	34	121	92	41	133	1,8
5	Jambi	3.674.667	4	4	8	43	17	60	47	21	68	1,9
6	Sumatera Selatan	8.902.406	15	4	19	108	76	184	123	80	203	2,3
7	Bengkulu	2.059.421	1	0	1	7	3	10	8	3	11	0,5
8	Lampung	8.521.201	5	7	12	96	34	130	101	41	142	1,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.524.567	1	1	2	31	17	48	32	18	50	3,3
10	Kepulauan Riau	2.521.306	3	2	5	23	11	34	26	13	39	1,5
11	DKI Jakarta	11.204.714	20	21	41	331	170	501	351	191	542	4,8
12	Jawa Barat	49.964.542	67	51	118	1.083	589	1.672	1.150	640	1.790	3,6
13	Jawa Tengah	35.258.144	30	27	57	806	422	1.228	836	449	1.285	3,6
14	DI Yogyakarta	3.634.493	6	1	7	22	21	43	28	22	50	1,4
15	Jawa Timur	40.348.441	76	52	128	1.448	772	2.220	1.524	824	2.348	5,8
16	Banten	13.613.944	35	33	68	469	245	714	504	278	782	5,7
17	Bali	4.570.684	3	5	8	88	35	123	91	40	131	2,9
18	Nusa Tenggara Barat	5.370.302	18	18	36	123	89	212	141	107	248	4,6
19	Nusa Tenggara Timur	5.784.645	23	12	35	341	158	499	364	170	534	9,2
20	Kalimantan Barat	5.456.623	5	2	7	44	16	60	49	18	67	1,2
21	Kalimantan Tengah	2.741.075	6	5	11	36	16	52	42	21	63	2,3
22	Kalimantan Selatan	4.420.513	9	2	11	90	35	125	99	37	136	3,08
23	Kalimantan Timur	3.795.636	11	9	20	107	30	137	118	39	157	4,1
24	Kalimantan Utara	734.112	0	0	0	15	8	23	15	8	23	3,1
25	Sulawesi Utara	2.550.592	14	13	27	283	146	429	297	159	456	17,9
26	Sulawesi Tengah	3.159.749	17	18	35	191	96	287	208	114	322	10,2
27	Sulawesi Selatan	9.086.997	47	52	99	473	245	718	520	297	817	9,0
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	14	14	28	115	77	192	129	91	220	8,1
29	Gorontalo	1.189.312	3	1	4	114	48	162	117	49	166	14,0
30	Sulawesi Barat	1.433.233	11	9	20	94	37	131	105	46	151	10,5
31	Maluku	1.906.490	8	10	18	241	158	399	249	168	417	21,9
32	Maluku Utara	1.301.836	23	34	57	396	213	609	419	247	666	51,2
33	Papua	828.420	60	107	167	391	226	617	451	333	784	94,6
34	Papua Barat	465.563	45	37	82	177	106	283	222	143	365	78,4
35	Papua Selatan	523.182	11	6	17	51	25	76	62	31	93	17,8
36	Papua Tengah	991.989	14	17	31	125	68	193	139	85	224	22,6
37	Papua Pegunungan	975.550	2	0	2	4	3	7	6	3	9	0,9
38	Papua Barat Daya	553.575	39	33	72	203	107	310	242	140	382	69,0
Indonesia		**275.619.137**	**673**	**643**	**1.316**	**8.546**	**4.514**	**13.060**	**9.219**	**5.157**	**14.376**	**5,2**
Proporsi Jenis Kelamin			**51,1**	**48,9**		**65,4**	**34,6**		**64,1**	**35,9**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: Data per 28 Januari 2024

Lampiran 65

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									
			Penderita Kusta	Cacat Tingkat 0		Cacat Tingkat 2		Angka Cacat Tingkat 2 Per 1.000.000 Penduduk	Penderita Kusta Anak <15 Tahun		Penderita Kusta Anak <15 Tahun dengan Cacat Tingkat 2	
				Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.599.952	284	262	92,3	8	2,8	1,4	29	10,2	0	0,0
2	Sumatera Utara	15.257.842	153	121	79,1	16	10,5	0,7	13	8,5	2	15,4
3	Sumatera Barat	5.676.344	65	50	76,9	4	6,2	0,7	5	7,7	0	0,0
4	Riau	7.295.829	133	127	95,5	4	71,8	5,5	8	6,0	0	0,0
5	Jambi	3.674.667	68	45	66,2	8	11,8	2,2	2	2,9	0	0,0
6	Sumatera Selatan	8.902.406	203	154	75,9	8	3,9	0,9	15	7,4	0	0,0
7	Bengkulu	2.059.421	11	5	45,5	5	45,5	2,4	2	18,2	1	9,1
8	Lampung	8.521.201	142	102	71,8	23	16,2	2,7	6	4,2	0	0,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.524.567	50	47	94,0	2	4,0	1,3	5	10,0	0	0,0
10	Kepulauan Riau	2.521.306	39	35	90,0	2	5,0	0,8	5	12,8	1	2,9
11	DKI Jakarta	11.204.714	542	492	90,8	8	1,5	0,7	28	5,2	0	0,0
12	Jawa Barat	49.964.542	1.790	1.372	76,6	150	8,4	3,0	89	5,0	2	2,2
13	Jawa Tengah	35.258.144	1.285	1.094	85,1	93	7,2	2,6	64	5,0	0	0,0
14	DI Yogyakarta	3.634.493	50	40	80,0	5	10,0	1,4	3	6,0	1	33,3
15	Jawa Timur	40.348.441	2.348	1.780	75,8	215	9,2	5,3	127	5,4	4	3,1
16	Banten	13.613.944	782	649	83,0	48	6,1	3,5	65	8,3	4	6,2
17	Bali	4.570.684	131	113	86,3	5	3,8	1,1	0	0,0	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	5.370.302	248	227	91,5	7	2,8	1,3	18	7,3	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	5.784.645	534	408	76,4	44	8,2	7,6	27	5,1	0	0,0
20	Kalimantan Barat	5.456.623	67	47	70,1	8	0,1	1,5	6	9,0	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	2.741.075	63	53	84,1	8	12,7	2,9	4	6,3	1	25,0
22	Kalimantan Selatan	4.420.513	136	109	80,1	10	7,4	2,3	3	2,2	1	33,3
23	Kalimantan Timur	3.795.636	157	138	87,9	9	5,7	2,4	7	4,5	0	0,0
24	Kalimantan Utara	734.112	23	18	78,3	3	13,0	4,1	0	0,0	0	0,0
25	Sulawesi Utara	2.550.592	456	438	96,1	5	1,1	2,0	33	7,2	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	3.159.749	322	300	93,2	9	2,8	2,8	22	6,8	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	9.086.997	817	703	86,0	48	5,9	5,3	43	5,3	1	2,3
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	220	206	93,6	6	2,7	2,2	25	11,4	0	0,0
29	Gorontalo	1.189.312	166	149	89,8	11	6,6	9,2	8	4,8	0	0,0
30	Sulawesi Barat	1.433.233	151	147	97,4	1	0,7	0,7	9	6,0	0	0,0
31	Maluku	1.906.490	417	335	80,3	14	3,4	7,3	39	9,4	1	2,6
32	Maluku Utara	1.301.836	666	638	95,8	8	1,2	6,1	114	17,1	0	0,0
33	Papua	828.420	784	756	96,4	10	1,3	12,1	172	21,9	1	0,6
34	Papua Barat	465.563	365	356	97,5	3	0,8	6,4	78	21,4	0	0,0
35	Papua Selatan	523.182	93	93	100,0	0	0,0	0,0	18	19,4	0	0,0
36	Papua Tengah	991.989	224	210	93,8	8	3,6	8,1	29	12,9	0	0,0
37	Papua Pegunungan	975.550	9	2	22,2	2	22,2	2,1	1	11,1	0	0,0
38	Papua Barat Daya	553.575	382	368	96,3	8	2,1	14,5	58	15,2	1	1,7
Indonesia		**275.619.137**	**14.376**	**12.189**	**84,8**	**826**	**5,7**	**3,0**	**1.180**	**8,2**	**21**	**1,8**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: Data per 28 Januari 2024

Lampiran 66

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Terdaftar			Provinsi dengan Eliminasi Kusta	
			PB	MB	PB + MB	Angka Prevalensi Per 10.000 Penduduk	Status Eliminasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5.599.952	29	263	292	0,52	Eliminasi
2	Sumatera Utara	15.257.842	2	159	161	0,11	Eliminasi
3	Sumatera Barat	5.676.344	8	74	82	1,44	Belum Eliminasi
4	Riau	7.295.829	9	141	150	0,21	Eliminasi
5	Jambi	3.674.667	1	84	85	0,23	Eliminasi
6	Sumatera Selatan	8.902.406	18	205	223	0,25	Eliminasi
7	Bengkulu	2.059.421	1	10	11	0,05	Eliminasi
8	Lampung	8.521.201	5	144	149	0,17	Eliminasi
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.524.567	0	58	58	0,38	Eliminasi
10	Kepulauan Riau	2.521.306	5	38	43	0,17	Eliminasi
11	DKI Jakarta	11.204.714	37	716	753	0,67	Eliminasi
12	Jawa Barat	49.964.542	91	2.234	2.325	0,47	Eliminasi
13	Jawa Tengah	35.258.144	46	1.505	1.551	0,44	Eliminasi
14	DI Yogyakarta	3.634.493	5	61	66	0,18	Eliminasi
15	Jawa Timur	40.348.441	94	2.712	2.806	0,01	Eliminasi
16	Banten	13.613.944	42	807	849	0,62	Eliminasi
17	Bali	4.570.684	11	267	278	0,61	Eliminasi
18	Nusa Tenggara Barat	5.370.302	28	268	296	0,55	Eliminasi
19	Nusa Tenggara Timur	5.784.645	13	535	548	0,95	Eliminasi
20	Kalimantan Barat	5.456.623	7	98	105	0,19	Eliminasi
21	Kalimantan Tengah	2.741.075	7	61	68	0,25	Eliminasi
22	Kalimantan Selatan	4.420.513	7	159	166	0,38	Eliminasi
23	Kalimantan Timur	3.795.636	12	151	163	0,43	Eliminasi
24	Kalimantan Utara	734.112	1	31	32	0,44	Eliminasi
25	Sulawesi Utara	2.550.592	17	457	474	1,86	Belum eliminasi
26	Sulawesi Tengah	3.159.749	13	299	312	0,99	Eliminasi
27	Sulawesi Selatan	9.086.997	63	776	839	0,92	Eliminasi
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	22	284	306	1,12	Belum eliminasi
29	Gorontalo	1.189.312	3	160	163	1,37	Eliminasi
30	Sulawesi Barat	1.433.233	11	149	160	1,12	Belum eliminasi
31	Maluku	1.906.490	12	454	466	2,44	Belum eliminasi
32	Maluku Utara	1.301.836	34	747	781	6,00	Belum eliminasi
33	Papua	828.420	129	817	946	11,42	Belum eliminasi
34	Papua Barat	465.563	79	603	682	14,65	Belum eliminasi
35	Papua Selatan	523.182	9	116	125	2,39	Belum eliminasi
36	Papua Tengah	991.989	28	240	268	2,70	Belum eliminasi
37	Papua Pegunungan	975.550	8	7	15	0,15	Eliminasi
38	Papua Barat Daya	553.575	51	403	454	8,20	Belum eliminasi
Indonesia		**275.619.137**	**958**	**16.293**	**17.251**	**0,63**	**Eliminasi**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: Data per 28 Januari 2024

Lampiran 67

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (*RELEASE FROM TREATMENT* /RFT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Kusta (PB)		Kusta (MB)	
		Tahun 2022		Tahun 2021	
		Penderita PB[a]	RFT PB (%)	Penderita MB[b]	RFT MB (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	40	97,56	167	94,4
2	Sumatera Utara	4	100,0	74	85,06
3	Sumatera Barat	9	100,0	54	90,0
4	Riau	4	57,14	64	82,05
5	Jambi	6	100,0	33	80,5
6	Sumatera Selatan	18	100,0	190	91,8
7	Bengkulu	1	33,3	9	75,0
8	Lampung	6	100,0	123	97,6
9	Kep. Bangka Belitung	4	80,0	37	86,1
10	Kepulauan Riau	4	66,7	29	90,6
11	DKI Jakarta	55	100,0	353	92,3
12	Jawa Barat	123	90,4	1.111	89,8
13	Jawa Tengah	100	91,7	734	89,8
14	DI Yogyakarta	9	90,0	21	72,4
15	Jawa Timur	106	91,4	1.481	90,10
16	Banten	79	94,1	513	86,7
17	Bali	3	100,0	53	88,3
18	Nusa Tenggara Barat	26	92,9	149	93,7
19	Nusa Tenggara Timur	33	80,50	255	86,7
20	Kalimantan Barat	4	57,1	37	80,4
21	Kalimantan Tengah	6	100,0	27	77,1
22	Kalimantan Selatan	4	80,0	57	82,6
23	Kalimantan Timur	25	96,2	90	84,9
24	Kalimantan Utara	0	-	23	79,3
25	Sulawesi Utara	46	97,9	311	90,4
26	Sulawesi Tengah	24	96,0	170	97,7
27	Sulawesi Selatan	69	90,8	560	89,3
28	Sulawesi Tenggara	8	72,7	197	85,3
29	Gorontalo	7	100,0	124	92,5
30	Sulawesi Barat	19	90,5	76	81,7
31	Maluku	13	100,0	228	79,2
32	Maluku Utara	75	94,9	429	84,0
33	Papua	272	78,6	447	68,9
34	Papua Barat	85	75,9	186	58,5
35	Papua Selatan	12	100,0	26	43,3
36	Papua Tengah	3	75,0	101	75,9
37	Papua Pegunungan	2	40,0	5	100,0
38	Papua Barat Daya	47	51,7	179	52,2
Indonesia		**1.351**	**85,5**	**8.723**	**84,9**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan :

a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2023, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2022 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b = Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2023, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2021 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

Data per 28 Januari 2024

Lampiran 68

KASUS *AFP (NON POLIO)* PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Penduduk <15 Tahun	Jumlah Kasus *Non Polio AFP*	*Non Polio AFP Rate* per 100.000 Penduduk Usia <15 Tahun	Spesimen adekuat (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	1.521.565	149	9,52	79,7
2	Sumatera Utara	4.088.208	434	10,54	73,8
3	Sumatera Barat	1.548.653	149	9,29	71,6
4	Riau	1.998.852	54	2,70	40,0
5	Jambi	905.631	70	7,62	78,1
6	Sumatera Selatan	2.337.183	133	5,69	69,6
7	Bengkulu	499.929	25	4,89	79,3
8	Lampung	2.128.368	106	4,98	64,3
9	Kep. Bangka Belitung	371.149	13	3,47	41,2
10	Kepulauan Riau	643.743	41	5,94	81,0
11	DKI Jakarta	2.404.422	189	7,78	43,9
12	Jawa Barat	12.031.696	845	7,02	84,8
13	Jawa Tengah	7.576.694	578	7,62	89,4
14	DI Yogyakarta	823.143	28	3,40	74,2
15	Jawa Timur	8.260.709	341	4,12	68,9
16	Banten	3.295.452	193	5,86	72,0
17	Bali	962.870	83	8,62	64,8
18	Nusa Tenggara Barat	1.441.415	57	3,95	64,7
19	Nusa Tenggara Timur	1.668.803	128	7,63	80,7
20	Kalimantan Barat	1.321.232	56	4,23	71,2
21	Kalimantan Tengah	675.168	15	2,10	25,0
22	Kalimantan Selatan	1.128.374	65	5,76	44,3
23	Kalimantan Timur	897.640	55	5,95	65,1
24	Kalimantan Utara	189.827	10	4,47	33,3
25	Sulawesi Utara	581.477	33	4,87	60,0
26	Sulawesi Tengah	832.683	41	4,86	68,0
27	Sulawesi Selatan	2.139.139	76	3,55	85,0
28	Sulawesi Tenggara	783.196	32	3,73	62,2
29	Gorontalo	291.171	10	3,38	75,0
30	Sulawesi Barat	391.851	28	7,15	83,9
31	Maluku	499.230	30	5,53	63,3
32	Maluku Utara	349.384	46	11,10	61,2
33	Papua	206.839	11	3,28	75,0
34	Papua Barat	137.205	3	1,22	16,7
35	Papua Selatan	145.312	1	0,63	0,0
36	Papua Tengah	270.167	2	0,65	66,7
37	Papua Pegunungan	308.386	0	0,00	0,0
38	Papua Barat Daya	148.347	5	2,07	33,3
Indonesia		**65.805.113**	**4.135**	**6,18**	**74,0**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024
Data per 26 Februari 2024

Lampiran 69.a

JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Difteri				Pertusis			Tetanus Neonatorum				Suspek Campak		
		Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus			Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus		
		L	P	L+P		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	13	18	31	2	82	100	182	1	1	2	0	658	714	1.372
2	Sumatera Utara	16	17	33	10	3	3	6	0	0	0	0	272	314	586
3	Sumatera Barat	5	5	10	3	35	43	78	1	0	1	0	277	340	617
4	Riau	8	10	18	5	4	2	6	2	0	2	2	86	106	192
5	Jambi	4	4	8	0	25	26	51	3	0	3	2	147	156	303
6	Sumatera Selatan	4	5	9	1	87	98	185	3	0	3	1	511	490	1.001
7	Bengkulu	1	0	1	0	16	15	31	0	1	1	0	51	49	100
8	Lampung	8	6	14	1	15	19	34	0	0	0	0	451	418	869
9	Kep. Bangka Belitung	1	2	3	0	28	34	62	1	0	1	0	226	214	440
10	Kepulauan Riau	3	4	7	1	21	26	47	0	0	0	0	100	125	225
11	DKI Jakarta	51	31	82	1	51	63	114	0	0	0	0	1.933	1.702	3.635
12	Jawa Barat	116	130	246	21	218	217	435	4	4	8	4	3.898	3.812	7.710
13	Jawa Tengah	10	11	21	0	69	66	135	0	0	0	0	1.880	1.823	3.703
14	DI Yogyakarta	1	2	3	0	122	128	250	0	0	0	0	427	653	1.080
15	Jawa Timur	155	166	321	9	81	93	174	0	0	0	0	2.073	2.077	4.150
16	Banten	11	7	18	1	29	24	53	2	0	2	1	1.500	1.370	2.870
17	Bali	1	2	3	0	1	0	1	0	0	0	0	107	116	223
18	Nusa Tenggara Barat	11	5	16	0	3	2	5	0	0	0	0	114	133	247
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	7	11	18	0	0	0	0	91	130	221
20	Kalimantan Barat	15	3	18	4	8	9	17	0	1	1	1	495	466	961
21	Kalimantan Tengah	5	8	13	1	7	5	12	0	0	0	0	130	156	286
22	Kalimantan Selatan	5	2	7	0	23	23	46	0	0	0	0	346	360	706
23	Kalimantan Timur	14	18	32	2	16	20	36	0	0	0	0	536	520	1.056
24	Kalimantan Utara	1	0	1	0	5	2	7	0	0	0	0	321	288	609
25	Sulawesi Utara	1	0	1	0	1	5	6	0	0	0	0	70	103	173
26	Sulawesi Tengah	0	9	9	3	23	28	51	0	0	0	0	426	371	797
27	Sulawesi Selatan	6	2	8	0	26	17	43	0	0	0	0	622	618	1.240
28	Sulawesi Tenggara	5	3	8	3	4	0	4	0	0	0	0	78	79	157
29	Gorontalo	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	81	66	147
30	Sulawesi Barat	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2	1	60	49	109
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	22	46
32	Maluku Utara	0	1	1	0	32	32	64	0	1	1	1	648	537	1.185
33	Papua	0	2	2	0	2	2	4	0	0	0	0	77	74	151
34	Papua Barat	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	206	169	375
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	81	149
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	665	1.363
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	137	277
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	29
Indonesia		**471**	**478**	**949**	**68**	**1.044**	**1.113**	**2.157**	**19**	**8**	**27**	**13**	**19.843**	**19.517**	**39.360**
Case Fatality Rate (%)					**7,2**							**48,1**			

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024

Data per 26 Februari 2024

Lampiran 69.b

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Total Kasus	Meninggal	*Case Fatality Rate (%)*	Faktor Risiko																					Status Rawat		
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS		
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2+	TT1	Tidak Diimunisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*	*(27)*	*(28)*	*(29)*
1	Aceh	2	0	0,0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	0
2	Sumatera Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	1	0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
4	Riau	2	2	100,0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0
5	Jambi	3	2	66,7	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	3	0	3	0
6	Sumatera Selatan	3	1	33,3	1	2	0	0	0	2	0	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	2	1
7	Bengkulu	1	0	0,0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8	Lampung	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	1	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	8	4	50,0	2	2	0	4	0	1	0	6	1	0	1	4	1	2	1	2	2	3	6	0	0	2	8	0
13	Jawa Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	2	1	50,0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	2	0
17	Bali	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	1	1	100,0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	2	1	50,0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0
31	Maluku	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	1	1	100,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
33	Papua	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Papua Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**27**	**13**	**48,1**	**4**	**12**	**0**	**9**	**2**	**6**	**3**	**17**	**1**	**1**	**7**	**12**	**4**	**3**	**3**	**8**	**5**	**11**	**16**	**2**	**5**	**4**	**25**	**1**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024
Data per 26 Februari 2024

Lampiran 69.c

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kasus per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	220	179	117	82	84	80	112	89	127	147	111	24	1.372
2	Sumatera Utara	63	69	55	41	68	51	50	34	27	45	33	50	586
3	Sumatera Barat	67	52	63	17	46	35	44	49	68	60	66	50	617
4	Riau	39	27	18	3	14	8	13	8	20	15	19	8	192
5	Jambi	83	36	29	11	22	20	18	27	21	24	9	3	303
6	Sumatera Selatan	250	190	152	48	26	49	73	50	72	32	34	25	1.001
7	Bengkulu	18	16	10	11	10	5	9	8	3	1	8	1	100
8	Lampung	51	206	161	82	81	43	43	54	51	60	24	13	869
9	Kep. Bangka Belitung	34	60	84	55	72	19	25	28	23	15	8	17	440
10	Kepulauan Riau	58	26	20	7	25	17	24	14	9	9	11	5	225
11	DKI Jakarta	521	681	629	323	398	223	237	158	138	167	95	65	3.635
12	Jawa Barat	1.032	1.277	1.282	631	592	515	550	489	519	447	257	119	7.710
13	Jawa Tengah	542	417	484	254	231	278	271	342	285	299	230	70	3.703
14	DI Yogyakarta	98	128	127	71	97	73	88	72	109	121	86	10	1.080
15	Jawa Timur	859	772	467	231	229	260	389	291	195	226	171	60	4.150
16	Banten	592	571	482	212	192	164	143	151	122	109	74	58	2.870
17	Bali	23	31	25	18	23	26	19	30	26	2	0	0	223
18	Nusa Tenggara Barat	69	43	26	33	25	9	9	28	5	0	0	0	247
19	Nusa Tenggara Timur	40	85	27	4	1	2	4	6	5	9	34	4	221
20	Kalimantan Barat	193	136	140	72	52	58	52	58	41	60	75	24	961
21	Kalimantan Tengah	22	14	37	18	28	17	21	30	24	22	49	4	286
22	Kalimantan Selatan	243	163	110	54	54	23	31	20	4	0	1	3	706
23	Kalimantan Timur	45	161	189	107	79	71	62	86	91	66	61	38	1.056
24	Kalimantan Utara	44	50	47	28	46	48	73	76	85	59	49	4	609
25	Sulawesi Utara	20	18	30	15	15	25	15	5	6	7	9	8	173
26	Sulawesi Tengah	28	31	34	8	23	54	141	225	108	78	46	21	797
27	Sulawesi Selatan	51	47	56	30	72	134	196	212	180	127	101	34	1.240
28	Sulawesi Tenggara	16	21	14	8	18	12	21	34	13	0	0	0	157
29	Gorontalo	74	34	34	0	1	3	1	0	0	0	0	0	147
30	Sulawesi Barat	19	19	34	11	10	3	7	2	4	0	0	0	109
31	Maluku	3	9	2	4	23	2	3	0	0	0	0	0	46
32	Maluku Utara	21	39	29	20	47	101	265	199	188	162	88	26	1.185
33	Papua	2	11	11	15	35	20	13	11	13	14	6	0	151
34	Papua Barat	14	45	98	17	36	76	56	33	0	0	0	0	375
35	Papua Selatan	1	3	19	47	36	36	7	0	0	0	0	0	149
36	Papua Tengah	135	584	513	99	30	2	0	0	0	0	0	0	1.363
37	Papua Pegunungan	0	0	6	18	121	132	0	0	0	0	0	0	277
38	Papua Barat Daya	3	4	4	7	2	1	6	0	1	0	1	0	29
Indonesia		**5.593**	**6.255**	**5.665**	**2.712**	**2.964**	**2.695**	**3.091**	**2.919**	**2.583**	**2.383**	**1.756**	**744**	**39.360**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024
Data per 26 Februari 2024

Lampiran 69.d

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIIMUNISASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		> 14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	10	140	21	478	42	345	32	151	9	258	0	0	1.372	114	8,3
2	Sumatera Utara	23	55	48	128	96	137	59	88	69	178	0	0	586	295	50,3
3	Sumatera Barat	12	62	28	153	49	101	44	76	98	225	0	0	617	231	37,4
4	Riau	2	14	15	64	11	25	15	28	7	61	0	0	192	50	26,0
5	Jambi	5	35	13	73	21	67	25	59	19	69	0	0	303	83	27,4
6	Sumatera Selatan	12	90	67	367	66	288	28	96	34	160	0	0	1.001	207	20,7
7	Bengkulu	4	13	6	36	11	23	9	11	8	17	0	0	100	38	38,0
8	Lampung	7	78	39	293	77	295	35	116	18	87	0	0	869	176	20,3
9	Kep. Bangka Belitung	6	60	30	164	62	140	24	41	14	35	0	0	440	136	30,9
10	Kepulauan Riau	4	31	11	68	20	51	13	20	25	55	0	0	225	73	32,4
11	DKI Jakarta	141	803	225	1.400	243	780	69	185	131	467	0	0	3.635	809	22,3
12	Jawa Barat	115	1.092	501	3.068	700	2.254	215	469	242	827	0	0	7.710	1.773	23,0
13	Jawa Tengah	61	454	337	1.136	449	1.002	244	457	166	654	0	0	3.703	1.257	33,9
14	DI Yogyakarta	16	227	65	322	63	228	18	94	33	209	0	0	1.080	195	18,1
15	Jawa Timur	64	471	329	1.719	380	1.154	191	324	187	482	0	0	4.150	1.151	27,7
16	Banten	27	417	209	1.368	234	793	48	109	57	183	0	0	2.870	575	20,0
17	Bali	15	23	22	57	24	39	18	22	30	82	0	0	223	109	48,9
18	Nusa Tenggara Barat	4	19	17	100	15	63	9	19	0	46	0	0	247	45	18,2
19	Nusa Tenggara Timur	5	27	27	45	49	56	22	26	44	67	0	0	221	147	66,5
20	Kalimantan Barat	6	83	50	447	64	279	38	79	24	73	0	0	961	182	18,9
21	Kalimantan Tengah	0	24	11	125	21	75	7	19	10	43	0	0	286	49	17,1
22	Kalimantan Selatan	9	83	30	277	43	163	14	60	29	123	0	0	706	125	17,7
23	Kalimantan Timur	16	169	30	378	84	241	40	82	62	186	0	0	1.056	232	22,0
24	Kalimantan Utara	10	98	48	240	46	114	20	45	41	112	0	0	609	165	27,1
25	Sulawesi Utara	2	10	19	34	25	30	26	30	41	69	0	0	173	113	65,3
26	Sulawesi Tengah	9	55	39	246	92	263	43	90	49	143	0	0	797	232	29,1
27	Sulawesi Selatan	19	101	78	444	130	379	78	126	68	190	0	0	1.240	373	30,1
28	Sulawesi Tenggara	2	11	10	46	9	34	10	22	13	44	0	0	157	44	28,0
29	Gorontalo	2	11	9	24	6	15	2	34	7	63	0	0	147	26	17,7
30	Sulawesi Barat	3	14	4	21	23	29	8	8	4	37	0	0	109	42	38,5
31	Maluku	0	6	1	25	2	11	0	2	0	2	0	0	46	3	6,5
32	Maluku Utara	22	154	79	494	96	255	35	72	25	210	0	0	1.185	257	21,7
33	Papua	2	23	4	72	9	40	1	6	4	10	0	0	151	20	13,2
34	Papua Barat	5	56	26	202	19	91	4	13	0	13	0	0	375	54	14,4
35	Papua Selatan	1	10	5	94	3	29	1	1	2	15	0	0	149	12	8,1
36	Papua Tengah	16	211	35	850	25	243	8	30	11	29	0	0	1.363	95	7,0
37	Papua Pegunungan	2	19	5	148	3	95	1	14	0	1	0	0	277	11	4,0
38	Papua Barat Daya	4	8	7	14	2	5	0	0	2	2	0	0	29	15	51,7
Indonesia		**663**	**5.257**	**2.500**	**15.220**	**3.314**	**10.232**	**1.454**	**3.124**	**1.583**	**5.527**	**0**	**0**	**39.360**	**9.514**	**24,2**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024
Data per 26 Februari 2024

Lampiran 69.e

JUMLAH KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM DAN KASUS CAMPAK YANG DIIMUNISASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		>14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	0	2	2	32	3	37	1	11	0	5	0	0	87	6	7
2	Sumatera Utara	2	4	1	11	9	16	3	8	2	7	0	0	46	17	37
3	Sumatera Barat	0	1	1	19	5	15	0	4	9	19	0	0	58	15	26
4	Riau	0	0	0	6	0	0	0	1	1	3	0	0	10	1	10
5	Jambi	0	6	5	29	4	19	5	14	4	11	0	0	79	18	23
6	Sumatera Selatan	2	17	13	111	20	97	0	15	6	23	0	0	263	41	16
7	Bengkulu	1	2	3	8	1	4	0	0	3	3	0	0	17	8	47
8	Lampung	3	19	8	115	16	103	5	23	3	15	0	0	275	35	13
9	Kep. Bangka Belitung	0	13	10	55	13	50	5	9	2	9	0	0	136	30	22
10	Kepulauan Riau	0	6	0	18	2	13	3	3	5	5	0	0	45	10	22
11	DKI Jakarta	17	146	60	373	68	263	11	36	9	41	0	0	859	165	19
12	Jawa Barat	31	390	173	1.474	236	1.058	42	145	45	155	0	0	3.222	527	16
13	Jawa Tengah	11	102	50	322	81	338	26	76	22	106	0	0	944	190	20
14	DI Yogyakarta	3	38	13	76	11	62	3	23	3	39	0	0	238	33	14
15	Jawa Timur	2	61	38	338	50	227	10	41	14	45	0	0	712	114	16
16	Banten	6	80	59	361	75	226	8	31	7	15	0	0	713	155	22
17	Bali	0	7	8	25	6	13	5	8	5	14	0	0	67	24	36
18	Nusa Tenggara Barat	0	8	4	40	9	37	2	6	0	1	0	0	92	15	16
19	Nusa Tenggara Timur	1	2	0	1	0	2	1	2	1	3	0	0	10	3	30
20	Kalimantan Barat	1	21	9	192	15	124	4	21	3	13	0	0	371	32	9
21	Kalimantan Tengah	0	2	0	13	0	6	0	1	0	2	0	0	24	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	14	5	66	7	41	1	15	3	9	0	0	145	16	11
23	Kalimantan Timur	3	54	4	151	21	97	4	25	14	39	0	0	366	46	13
24	Kalimantan Utara	0	14	5	54	4	22	4	11	7	14	0	0	115	20	17
25	Sulawesi Utara	0	2	1	2	3	4	1	1	1	1	0	0	10	6	60
26	Sulawesi Tengah	2	26	14	155	47	163	14	37	15	45	0	0	426	92	22
27	Sulawesi Selatan	1	24	19	204	42	192	14	30	21	63	0	0	513	97	19
28	Sulawesi Tenggara	0	1	4	18	1	10	1	4	4	11	0	0	44	10	23
29	Gorontalo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
30	Sulawesi Barat	0	1	0	3	1	2	1	1	1	2	0	0	9	3	33
31	Maluku	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
32	Maluku Utara	1	17	13	103	18	69	2	6	1	33	0	0	228	35	15
33	Papua	2	12	1	47	2	23	0	2	2	3	0	0	87	7	8
34	Papua Barat	1	5	0	11	0	3	0	0	0	1	0	0	20	1	5
35	Papua Selatan	0	3	1	16	0	4	0	0	2	3	0	0	26	3	12
36	Papua Tengah	0	4	1	14	0	6	0	1	0	0	0	0	25	1	4
37	Papua Pegunungan	0	1	0	9	0	6	0	0	0	0	0	0	16	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Indonesia		**91**	**1.106**	**525**	**4.481**	**770**	**3.352**	**176**	**611**	**215**	**758**	**0**	**0**	**10.308**	**1.777**	**17,2**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024
Data per 26 Februari 2024

Lampiran 69.f

FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB SUSPEK CAMPAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Laporan KLB					
		Total KLB	Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5	Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh	Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat	Total Kasus	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	2	2	2	2	34	0
3	Sumatera Barat	5	5	5	5	26	0
4	Riau	2	2	2	2	5	0
5	Jambi	4	4	4	4	57	1
6	Sumatera Selatan	3	3	3	3	67	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	1	1	1	1	4	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	37	37	37	37	169	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	6	6	6	6	197	0
16	Banten	11	11	11	11	148	0
17	Bali	1	1	1	1	35	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	1	1	1	1	9	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	2	2	2	2	33	0
23	Kalimantan Timur	1	1	1	1	12	0
24	Kalimantan Utara	2	2	2	2	4	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	9	9	9	9	593	0
27	Sulawesi Selatan	11	11	11	11	115	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	2	2	2	2	13	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	18	18	18	18	109	1
33	Papua	2	2	2	2	8	0
34	Papua Barat	5	5	5	5	355	2
35	Papua Selatan	1	1	1	1	10	0
36	Papua Tengah	8	8	8	8	183	4
37	Papua Pegunungan	1	1	1	1	57	0
38	Papua Barat Daya	2	2	2	2	25	0
Indonesia		**137**	**137**	**137**	**137**	**2.268**	**8**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024
Data per 26 Februari 2024

Lampiran 69.g

DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Campak		Rubella		Gabungan (Campak dan Rubella)		Negatif		Pending Lab	Tanpa Spesimen	
		Frekuensi KLB	Kasus	Frekuensi KLB	Kasus	Frekuensi KLB	Kasus	Frekuensi KLB	Kasus	Kasus	Frekuensi	Kasus
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	1	8	0	0	0	0	26	0	0
3	Sumatera Barat	3	9	0	0	0	0	1	11	6	0	0
4	Riau	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	3	32	0	0	0	0	0	0	25	0	0
6	Sumatera Selatan	2	36	0	0	0	0	0	0	0	1	31
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	34	156	0	0	0	0	0	0	0	3	13
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	5	190	0	0	0	0	0	0	7	0	0
16	Banten	9	118	0	0	0	0	0	0	30	0	0
17	Bali	1	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0
23	Kalimantan Timur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	8	584	0	0	0	0	0	0	9	0	0
27	Sulawesi Selatan	11	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	3	19	0	0	0	0	1	5	85	0	0
33	Papua	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	3	338	0	0	0	0	0	0	17	0	0
35	Papua Selatan	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Tengah	3	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Pegunungan	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Indonesia		**94**	**1.907**	**3**	**13**	**1**	**4**	**2**	**16**	**272**	**4**	**44**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024
Data per 26 Februari 2024

Lampiran 70

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) SUSPEK CAMPAK DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	KLB di Desa/Kelurahan		
		Jumlah	Ditangani <24 jam	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	0	0	-
2	Sumatera Utara	2	2	100
3	Sumatera Barat	5	5	100
4	Riau	2	2	100
5	Jambi	4	4	100
6	Sumatera Selatan	3	3	100
7	Bengkulu	0	0	-
8	Lampung	1	1	100
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	-
10	Kepulauan Riau	0	0	-
11	DKI Jakarta	0	0	-
12	Jawa Barat	37	37	100
13	Jawa Tengah	0	0	-
14	DI Yogyakarta	0	0	-
15	Jawa Timur	6	6	100
16	Banten	11	11	100
17	Bali	1	1	100
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	-
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	-
20	Kalimantan Barat	1	1	100
21	Kalimantan Tengah	0	0	-
22	Kalimantan Selatan	2	2	100
23	Kalimantan Timur	1	1	100
24	Kalimantan Utara	2	2	100
25	Sulawesi Utara	0	0	-
26	Sulawesi Tengah	9	9	100
27	Sulawesi Selatan	11	11	100
28	Sulawesi Tenggara	0	0	-
29	Gorontalo	0	0	-
30	Sulawesi Barat	2	2	100
31	Maluku	0	0	-
32	Maluku Utara	18	18	100
33	Papua	2	2	100
34	Papua Barat	5	5	100
35	Papua Selatan	1	1	100
36	Papua Tengah	8	8	100
37	Papua Pegunungan	1	1	100
38	Papua Barat Daya	2	2	100
Indonesia		**137**	**137**	**100**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2024
Data per 26 Februari 2024

Lampiran 72.a

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus	*Incidence Rate* per 100.000 Penduduk	Meninggal	*CFR* (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	5.599.952	2.176	38,86	27	1,24
2	Sumatera Utara	15.257.842	4.578	30	22	0,48
3	Sumatera Barat	5.739.147	1.929	33,61	13	0,67
4	Riau	7.295.829	2.153	29,51	22	1,02
5	Jambi	3.713.311	1.413	38,05	14	0,99
6	Sumatera Selatan	8.902.406	2.983	33,51	21	0,7
7	Bengkulu	2.059.421	926	44,96	17	1,84
8	Lampung	8.754.570	2.181	24,91	8	0,37
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.524.567	1.331	87,3	18	1,35
10	Kepulauan Riau	2.521.306	730	28,95	5	0,68
11	DKI Jakarta	10.775.080	3.908	36,27	0	0
12	Jawa Barat	51.172.130	19.328	37,77	134	0,69
13	Jawa Tengah	35.258.144	6.659	18,89	143	2,15
14	DI Yogyakarta	4.073.907	700	17,18	3	0,43
15	Jawa Timur	40.530.954	9.401	23,19	103	1,1
16	Banten	13.427.073	4.154	30,94	18	0,43
17	Bali	4.570.684	7.099	155,32	19	0,27
18	Nusa Tenggara Barat	5.441.327	3.458	63,55	25	0,72
19	Nusa Tenggara Timur	5.735.959	2.653	46,25	15	0,57
20	Kalimantan Barat	5.276.672	9.003	170,62	99	1,1
21	Kalimantan Tengah	2.792.790	4.834	173,09	30	0,62
22	Kalimantan Selatan	4.420.513	3.072	69,49	19	0,62
23	Kalimantan Timur	3.795.636	5.592	147,33	25	0,45
24	Kalimantan Utara	747.125	985	131,84	8	0,81
25	Sulawesi Utara	2.565.018	2.643	103,04	30	1,14
26	Sulawesi Tengah	3.198.320	1.804	56,4	9	0,5
27	Sulawesi Selatan	9.086.997	2.701	29,72	8	0,3
28	Sulawesi Tenggara	2.822.613	1.574	55,76	14	0,89
29	Gorontalo	1.214.587	683	56,23	7	1,02
30	Sulawesi Barat	1.433.233	1.192	83,17	4	0,34
31	Maluku	1.841.492	262	14,23	3	1,15
32	Maluku Utara	1.301.836	801	61,53	4	0,5
33	Papua	878.699	220	25,04	0	0
34	Papua Barat	491.895	917	186,42	6	0,65
35	Papua Selatan	515.717	0	0	0	0
36	Papua Tengah	1.017.614	677	66,53	1	0,15
37	Papua Pegunungan	1.080.522	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	539.781	0	0	0	0
Indonesia		**277.374.669**	**114.720**	**41,36**	**894**	**0,78**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 72.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kabupaten/Kota Terjangkit					
			2021		2022		2023	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	23	21	91,30	22	95,65	22	95,65
2	Sumatera Utara	33	31	93,94	33	100,00	33	100,00
3	Sumatera Barat	19	19	100,00	19	100,00	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00	11	100,00	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	17	100,00	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	7	100,00	6	85,71
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00	27	100,00	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	35	100,00	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00	38	100,00	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00	8	100,00	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00	9	100,00	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,00	22	100,00	21	95,45
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,31	13	100,00	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00	5	100,00	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	13	100,00	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	24	100,00	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	14	82,35	17	100,00	17	100,00
29	Gorontalo	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
31	Maluku	11	8	72,73	9	81,82	9	81,82
32	Maluku Utara	10	9	90,00	9	90,00	10	100,00
33	Papua	9	3	10,34	8	27,59	5	55,56
34	Papua Barat	7	5	38,46	8	61,54	5	71,43
35	Papua Selatan	4	-	-	-	-	0	0,00
36	Papua Tengah	8	-	-	-	-	1	12,50
37	Papua Pegunungan	8	-	-	-	-	0	0,00
38	Papua Barat Daya	6	-	-	-	-	0	0,00
Indonesia		**514**	**467**	**90,86**	**484**	**94,16**	**478**	**93,00**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: Perssentase tahun 2021 dan 2022 dihitung berdasarkan jumlah kabupaten/kota dari 34 provinsi (sebelum pemekaran Papua dan Papua Barat)

Lampiran 73.a

KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023

No	Provinsi	Penduduk	Malaria										
			Suspek	Konfirmasi Laboratorium			% Konfirmasi Laboratorium	Positif			Pengobatan Standar	% Pengobatan Standar	*Annual Paracite Incidence* (API) per 1.000 Penduduk
				Mikroskopis	*Rapid Diagnostic Test (RDT)*	Total		L	P	L+P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	5.599.952	33.747	20.328	13.268	33.596	99,55	145	21	166	166	100,00	0,03
2	Sumatera Utara	15.257.842	28.250	11.202	16.863	28.065	99,35	2.937	1.984	4.921	4.178	84,90	0,32
3	Sumatera Barat	5.739.147	9.803	3.908	5.871	9.779	99,76	37	19	56	54	96,43	0,01
4	Riau	7.295.829	15.675	6.065	9.587	15.652	99,85	1.695	924	2.619	2.244	85,68	0,36
5	Jambi	3.713.311	23.678	11.440	10.052	21.492	90,77	155	44	199	187	93,97	0,05
6	Sumatera Selatan	8.902.406	22.728	8.652	14.076	22.728	100,00	47	4	51	51	100,00	0,01
7	Bengkulu	2.059.421	9.754	3.597	5.591	9.188	94,20	26	3	29	28	96,55	0,01
8	Lampung	8.754.570	28.320	14.083	12.229	26.312	92,91	795	420	1.215	1.137	93,58	0,14
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.524.567	8.149	4.973	3.121	8.094	99,33	45	16	61	53	86,89	0,04
10	Kepulauan Riau	2.521.306	6.173	3.410	2.763	6.173	100,00	15	1	16	15	93,75	0,01
11	DKI Jakarta	10.775.080	4.190	1.369	2.606	3.975	94,87	233	32	265	210	79,25	0,02
12	Jawa Barat	51.172.130	10.235	7.816	1.784	9.600	93,80	492	20	512	259	50,59	0,01
13	Jawa Tengah	35.258.144	25.111	19.099	4.643	23.742	94,55	524	43	567	418	73,72	0,02
14	DI Yogyakarta	4.073.907	20.511	13.021	4.450	17.471	85,18	66	21	87	22	25,29	0,02
15	Jawa Timur	40.530.954	10.062	6.610	3.380	9.990	99,28	514	51	565	496	87,79	0,01
16	Banten	13.427.073	972	65	389	454	46,71	129	4	133	91	68,42	0,01
17	Bali	4.570.684	9.002	7.416	1.398	8.814	97,91	47	12	59	37	62,71	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	5.441.327	121.439	82.087	37.176	119.263	98,21	244	94	338	319	94,38	0,06
19	Nusa Tenggara Timur	5.735.959	787.516	453.906	328.810	782.716	99,39	3983	2948	6931	6574	94,85	1,21
20	Kalimantan Barat	5.276.672	31.783	14.910	16.671	31.581	99,36	35	6	41	34	82,93	0,01
21	Kalimantan Tengah	2.792.790	9.891	4.125	5.372	9.497	96,02	114	20	134	105	78,36	0,05
22	Kalimantan Selatan	4.420.513	16.021	5.392	10.525	15.917	99,35	315	19	334	325	97,31	0,08
23	Kalimantan Timur	3.795.636	33.408	8.347	23.889	32.236	96,49	3317	348	3665	3196	87,20	0,97
24	Kalimantan Utara	747.125	5.623	1.149	4.456	5.605	99,68	127	16	143	85	59,44	0,19
25	Sulawesi Utara	2.565.018	27.950	20.779	6.745	27.524	98,48	872	349	1221	934	76,49	0,48
26	Sulawesi Tengah	3.198.320	11.651	1.484	7.756	9.240	79,31	424	212	636	402	63,21	0,2
27	Sulawesi Selatan	9.086.997	28.789	11.420	17.354	28.774	99,95	1500	305	1805	1535	85,04	0,2
28	Sulawesi Tenggara	2.822.613	24.818	4.947	19.801	24.748	99,72	494	91	585	568	97,09	0,21
29	Gorontalo	1.214.587	51.214	34.138	17.076	51.214	100,00	1466	103	1569	1525	97,20	1,29
30	Sulawesi Barat	1.433.233	15.038	4.597	9.829	14.426	95,93	303	18	321	213	66,36	0,22
31	Maluku	1.841.492	90.222	68.473	19.859	88.332	97,91	1032	636	1668	1382	82,85	0,91
32	Maluku Utara	1.301.836	18.541	9.106	9.362	18.468	99,61	176	68	244	232	95,08	0,19
33	Papua	878.699	670.364	407.709	191.706	599.415	89,42	85289	63434	148723	128587	86,46	169,25
34	Papua Barat	501.389	193.405	108.697	81.152	189.849	98,16	5.156	3.118	8.274	7.070	85,45	16,5
35	Papua Selatan	523.182	164.906	72.378	80.430	152.808	92,66	22325	15895	38220	35212	92,13	73,05
36	Papua Tengah	1.028.480	535.987	340.035	169.870	509.905	95,13	84.612	62.673	147.285	138.605	94,11	143,21
37	Papua Pegunungan	1.096.594	35.286	18.120	15.230	33.350	94,51	5981	4190	10171	7545	74,18	9,28
38	Papua Barat Daya	533.575	82.377	30.419	50.013	80.432	97,64	4.517	2.819	7.336	5.502	75,00	13,75
Indonesia		**277.412.360**	**3.222.589**	**1.845.272**	**1.235.153**	**3.080.425**	**95,59**	**230.184**	**160.981**	**391.165**	**349.596**	**89,37**	**1,41**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 73.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Endemisitas Malaria				% Kabupaten/Kota Mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria
		Bebas Malaria (Sudah Mendapat Sertifikat Eliminasi)	Endemis Rendah (API<1)	Endemis Sedang (API 1-5)	Endemis Tinggi (API >5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	22	1	-	-	96
2	Sumatera Utara	25	5	3	-	76
3	Sumatera Barat	18	1	-	-	95
4	Riau	12	-	-	-	100
5	Jambi	7	4	-	-	64
6	Sumatera Selatan	16	1	-	-	94
7	Bengkulu	10	-	-	-	100
8	Lampung	13	2	-	-	87
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	-	-	86
10	Kepulauan Riau	5	2	-	-	71
11	DKI Jakarta	6	-	-	-	100
12	Jawa Barat	27	-	-	-	100
13	Jawa Tengah	34	1	-	-	97
14	DI Yogyakarta	5	-	-	-	100
15	Jawa Timur	38	-	-	-	100
16	Banten	8	-	-	-	100
17	Bali	9	-	-	-	100
18	Nusa Tenggara Barat	6	4	-	-	60
19	Nusa Tenggara Timur	9	4	6	3	41
20	Kalimantan Barat	9	5	-	-	64
21	Kalimantan Tengah	12	1	1	-	86
22	Kalimantan Selatan	10	3	-	-	77
23	Kalimantan Timur	5	1	3	1	50
24	Kalimantan Utara	3	2	-	-	60
25	Sulawesi Utara	10	4	1	-	67
26	Sulawesi Tengah	6	6	1	-	46
27	Sulawesi Selatan	23	-	1	-	96
28	Sulawesi Tenggara	15	2	-	-	88
29	Gorontalo	5	1	-	-	83
30	Sulawesi Barat	5	1	-	-	83
31	Maluku	3	4	4	-	27
32	Maluku Utara	6	3	1	-	60
33	Papua	-	-	-	9	0
34	Papua Barat	-	-	4	3	0
35	Papua Selatan	-	-	-	4	0
36	Papua Tengah	-	3	3	2	0
37	Papua Pegunungan	-	1	5	2	0
38	Papua Barat Daya	1	1	-	4	17
Indonesia		**389**	**64**	**33**	**28**	**75,68**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 73.c

***ANNUAL PARASITE INSIDENCE* (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK**
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019- 2023

No	Provinsi	API				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0,02	0,04	0,06	0,02	0,03
2	Sumatera Utara	0,07	0,07	0,17	0,35	0,32
3	Sumatera Barat	0,06	0,02	0,01	0,03	0,01
4	Riau	0,02	0,24	0,13	0,25	0,36
5	Jambi	0,02	0,02	0,01	0,07	0,05
6	Sumatera Selatan	0,07	0,01	0,00	0,00	0,01
7	Bengkulu	0,04	0,05	0,00	0,01	0,01
8	Lampung	0,18	0,05	0,06	0,08	0,14
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,09	0,12	0,07	0,08	0,04
10	Kepulauan Riau	0,06	0,09	0,02	0,02	0,01
11	DKI Jakarta	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
12	Jawa Barat	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
13	Jawa Tengah	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02
14	DI Yogyakarta	0,00	0,00	0,01	0,04	0,02
15	Jawa Timur	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
16	Banten	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
17	Bali	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	0,19	0,05	0,07	0,09	0,06
19	Nusa Tenggara Timur	2,37	2,76	1,69	2,79	1,21
20	Kalimantan Barat	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
21	Kalimantan Tengah	0,07	0,06	0,06	0,08	0,05
22	Kalimantan Selatan	0,20	0,12	0,07	0,11	0,08
23	Kalimantan Timur	0,55	0,62	0,61	0,87	0,97
24	Kalimantan Utara	0,08	0,09	0,05	0,15	0,19
25	Sulawesi Utara	0,20	0,36	0,28	0,42	0,48
26	Sulawesi Tengah	0,06	0,06	0,02	0,05	0,2
27	Sulawesi Selatan	0,10	0,09	0,10	0,19	0,2
28	Sulawesi Tenggara	0,30	0,14	0,13	0,21	0,21
29	Gorontalo	0,03	0,03	0,04	0,04	1,29
30	Sulawesi Barat	0,14	0,10	0,07	0,17	0,22
31	Maluku	0,72	0,42	0,45	0,61	0,91
32	Maluku Utara	0,46	0,16	0,10	0,18	0,19
34	Papua	64,03	63,12	80,05	113,07	169,25
33	Papua Barat	7,38	10,15	7,56	12,68	16,5
35	Papua Selatan	-	-	-	-	73,05
36	Papua Tengah	-	-	-	-	143,21
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	9,28
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	13,75
Indonesia		**0,84**	**0,94**	**1,12**	**1,61**	**1,41**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 74.a

PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2023

No	Provinsi	Penderita Kronis Filariasis				
		Kasus Kronis Tahun Sebelumnya	Kasus Kronis Baru Ditemukan	Kasus Kronis Pindah	Kasus Kronis Meninggal	Jumlah Seluruh Kasus Kronis
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(8)*
1	Aceh	507	13	0	39	481
2	Sumatera Utara	63	3	15	7	44
3	Sumatera Barat	128	3	1	5	125
4	Riau	124	5	15	10	104
5	Jambi	224	0	0	0	224
6	Sumatera Selatan	109	3	0	3	109
7	Bengkulu	64	0	0	0	64
8	Lampung	34	0	0	10	24
9	Kepulauan Bangka Belitung	93	2	0	9	81
10	Kepulauan Riau	78	0	0	0	78
11	DKI Jakarta	21	1	2	2	18
12	Jawa Barat	424	32	10	123	323
13	Jawa Tengah	283	11	2	27	287
14	DI Yogyakarta	2	0	0	0	2
15	Jawa Timur	181	8	0	2	187
16	Banten	105	0	0	14	79
17	Bali	2	0	0	0	2
18	Nusa Tenggara Barat	7	0	0	1	6
19	Nusa Tenggara Timur	1276	3	5	73	1200
20	Kalimantan Barat	188	0	0	0	188
21	Kalimantan Tengah	48	3	1	10	40
22	Kalimantan Selatan	42	0	0	15	20
23	Kalimantan Timur	104	2	4	14	88
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	13	1	0	1	13
26	Sulawesi Tengah	149	1	4	36	110
27	Sulawesi Selatan	62	0	0	6	56
28	Sulawesi Tenggara	44	0	0	6	40
29	Gorontalo	1	2	0	1	2
30	Sulawesi Barat	64	0	0	0	64
31	Maluku	42	0	0	6	36
32	Maluku Utara	25	2	0	0	27
33	Papua	1137	0	0	0	1023
34	Papua Barat	297	0	0	258	39
35	Papua Selatan	1996	0	0	0	1996
36	Papua Tengah	368	0	0	0	368
37	Papua Pegunungan	114	3	0	0	117
38	Papua Barat Daya	323	61	0	94	290
Indonesia		**8.742**	**159**	**59**	**772**	**7.955**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024
Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS sampai dengan 31 Januari 2023

Lampiran 74.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Persentase Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	12	11	91,7	1	8,3	3	25,0
2	Sumatera Utara	9	9	100,0	0	0,0	7	77,8
3	Sumatera Barat	10	10	100,0	0	0,0	10	100,0
4	Riau	10	10	100,0	0	0,0	10	100,0
5	Jambi	5	5	100,0	0	0,0	4	80,0
6	Sumatera Selatan	9	9	100,0	0	0,0	5	55,6
7	Bengkulu	5	5	100,0	0	0,0	5	100,0
8	Lampung	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0	2	28,6	5	71,4
10	Kepulauan Riau	3	2	66,7	1	33,3	1	33,3
11	DKI Jakarta	0	0	-	-	-	0	-
12	Jawa Barat	11	11	100,0	0	0,0	8	72,7
13	Jawa Tengah	9	9	100,0	0	0,0	3	33,3
14	DI Yogyakarta	0	0	-	-	-	0	-
15	Jawa Timur	0	0	-	-	-	0	-
16	Banten	5	5	100,0	0	0,0	5	100,0
17	Bali	0	0	-	-	-	0	-
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	-	-	-	0	-
19	Nusa Tenggara Timur	18	18	100,0	0	0,0	3	16,7
20	Kalimantan Barat	9	8	88,9	1	11,1	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	11	10	90,9	1	9,1	4	36,4
22	Kalimantan Selatan	8	8	100,0	0	0,0	4	50,0
23	Kalimantan Timur	6	6	100,0	0	0,0	3	50,0
24	Kalimantan Utara	4	4	100,0	0	0,0	1	25,0
25	Sulawesi Utara	0	0	-	-	-	0	-
26	Sulawesi Tengah	9	9	100,0	0	0,0	4	44,4
27	Sulawesi Selatan	4	4	100,0	0	0,0	3	75,0
28	Sulawesi Tenggara	12	12	100,0	0	0,0	6	50,0
29	Gorontalo	6	6	100,0	0	0,0	4	66,7
30	Sulawesi Barat	4	4	100,0	0	0,0	2	50,0
31	Maluku	8	8	100,0	0	0,0	0	0,0
32	Maluku Utara	6	6	100,0	0	0,0	2	33,3
33	Papua	9	6	66,7	3	33,3	3	33,3
34	Papua Barat	6	1	16,7	4	66,7	0	0,0
35	Papua Selatan	4	2	50,0	2	50,0	2	50,0
36	Papua Tengah	5	1	20,0	2	40,0	0	0,0
37	Papua Pegunungan	5	0	0,0	5	100,0	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	1	16,7	4	66,7	0	0,0
Indonesia		**236**	**208**	**88,1**	**26**	**11,0**	**108**	**45,8**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Provinsi yang seluruh kabupaten/kota nya bukan endemis filariasis : DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara

Lampiran 74.c

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021 - 2023

No	Provinsi	2021			2022			2023		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	527	170	0	1.494	1.130	-	1.434	1.036	-
2	Sumatera Utara	2.201	1.740	3	6.883	5.720	6	10.360	7.848	20
3	Sumatera Barat	3.151	1.565	0	4.504	2.883	8	6.638	4.636	7
4	Riau	557	476	0	2.330	1.627	-	4.858	4.065	2
5	Jambi	327	289	0	1.031	784	-	1.511	1.278	1
6	Sumatera Selatan	1.164	1.090	2	2.432	2.197	1	4.183	3.820	4
7	Bengkulu	1.156	1.096	0	1.380	1.133	1	2.147	1.945	1
8	Lampung	1.555	1.443	0	2.188	1.987	-	3.043	2.656	-
9	Kepulauan Bangka Belitung*	30	14	0	50	37	-	168	94	-
10	Kepulauan Riau*	5	5	0	11	-	-	17	4	-
11	DKI Jakarta*	605	605	0	1.579	583	-	4.795	2.363	-
12	Jawa Barat	480	290	0	1.248	908	-	3.646	2.398	1
13	Jawa Tengah*	223	41	0	363	104	-	1.026	285	-
14	DI Yogyakarta*	97	97	0	203	25	-	307	132	-
15	Jawa Timur*	98	65	0	239	145	-	682	343	-
16	Banten	100	88	0	254	233	-	932	869	-
17	Bali	16.454	9.020	0	38.009	20.755	22	72.522	47.043	9
18	Nusa Tenggara Barat	1.864	1.821	10	1.769	1.672	3	3.102	2.718	4
19	Nusa Tenggara Timur	10.858	10.857	4	12.576	12.570	9	19.321	18.078	35
20	Kalimantan Barat	2.602	2.304	13	3.943	3.235	15	6.970	6.353	16
21	Kalimantan Tengah	304	271	0	1.312	982	1	2.179	1.739	2
22	Kalimantan Selatan	136	125	0	400	305	-	662	551	-
23	Kalimantan Timur	868	777	0	1.251	1.251	-	3.076	2.869	-
24	Kalimantan Utara	183	108	0	212	126	-	465	351	-
25	Sulawesi Utara	1.980	1.295	9	5.850	3.707	13	9.153	5.287	18
26	Sulawesi Tengah	1.637	1.080	1	2.439	2.292	3	4.211	4.092	3
27	Sulawesi Selatan	5.111	4.038	7	7.000	5.811	14	10.120	10.070	11
28	Sulawesi Tenggara	497	484	0	658	654	2	1.328	1.327	-
29	Gorontalo	719	658	6	812	712	2	1.015	925	-
30	Sulawesi Barat	573	471	1	835	616	-	1.180	1.137	1
31	Maluku	1.037	837	6	850	615	2	2.780	2.176	11
32	Maluku Utara	158	158	0	124	89	-	179	139	-
34	Papua*	-	-	0	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat*	-	-	0	-	-	-	-	-	-
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**57.257**	**43.378**	**62**	**104.229**	**74.888**	**102**	**184.010**	**138.627**	**146**
Persentase VAR/GHPR		**75,76%**			**71,85%**					

ngendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024
VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati
* daerah bebas rabies

Lampiran 74.d

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN *CASE FATALITY RATE (CFR)* LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2023

No	Provinsi	2021			2022			2023		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	*(2)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(3)*	*(10)*	*(11)*	*(3)*	*(10)*	*(11)*
1	DKI Jakarta	15	0	0	18	0	0	15	0	0
2	Jawa Barat	16	2	12,5	187	30	16,04	54	6	11,11
3	Jawa Tengah	265	44	16,6	502	70	13,94	884	139	15,72
4	DI Yogyakarta	79	7	8,86	235	13	5,53	377	32	8,49
5	Jawa Timur	312	29	9,29	606	23	3,8	1090	17	1,56
6	Banten	33	0	0	64	12	18,75	30	7	23,33
7	Maluku	0	0	0	0	0	0	5	0	0
8	Kalimantan Utara	15	1	6,67	3	0	0	35	1	2,86
9	Sulawesi Selatan	0	0	0	1	0	0	26	3	11,54
10	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sulawesi Tenggara	0	0	0	4	0	0	1	0	0
12	Kalimantan Timur	1	1	100	4	0	0	28	0	0
Indonesia		**736**	**84**	**11,41**	**1624**	**148**	**9,11**	**2545**	**205**	**8,06**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate

Lampiran 77.a

REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023

No	Provinsi	Jumlah WUS 30-50 tahun	Deteksi Dini Kanker Serviks					Deteksi Dini Kanker Payudara				
			Pemeriksaan IVA	IVA positif	Curiga Ca leher rahim	Total Pemeriksaan 2021 s.d 2023	% Cakupan	Pemeriksaan SADANIS	Benjolan	Curiga Ca Payudara	Total Pemeriksaan 2021 s.d 2023	% Cakupan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	836.746	25.610	1700	4	49.711	5,9	69.923	23	22	108.318	12,9
2	Sumatera Utara	2.200.973	230.787	4087	71	365.235	16,6	335.465	170	138	471.675	21,4
3	Sumatera Barat	848.544	23.777	1029	7	227.704	26,8	88.365	43	21	279.008	32,9
4	Riau	1.131.702	15.335	390	19	29.415	2,6	60.565	48	24	75.313	6,7
5	Jambi	562.846	20.247	387	4	48.197	8,6	38.542	26	19	66.492	11,8
6	Sumatera Selatan	1.323.459	78.805	1728	11	257.520	19,5	101.752	45	23	284.303	21,5
7	Bengkulu	314.448	15.616	368	6	28.474	9,1	27.595	20	13	38.468	12,2
8	Lampung	1.299.600	194.581	4448	18	309.845	23,8	301.188	70	45	422.987	32,5
9	Kep. Bangka Belitung	229.668	24.082	187	1	65.929	28,7	26.123	3	2	67.970	29,6
10	Kepulauan Riau	403.061	8.941	169	3	37.942	9,4	17.317	29	11	50.374	12,5
11	DKI Jakarta	2.056.759	355.176	100	0	666.700	32,4	169.659	449	66	484.050	23,5
12	Jawa Barat	1.812.594	124.889	2658	13	277.282	15,3	133.209	537	286	299.842	16,5
13	Jawa Tengah	7.814.017	1.175.141	1822	26	1.378.076	17,6	40.428	206	102	295.233	3,8
14	DI Yogyakarta	5.285.812	50.817	76	1	883.457	16,7	117.426	19	3	950.066	18,0
15	Jawa Timur	613.082	2.941	3014	6	10.933	1,8	7.988	293	86	16.446	2,7
16	Banten	6.275.139	272.875	2104	30	495.110	7,9	86.990	343	47	585.891	9,3
17	Bali	711.421	11.857	273	6	73.398	10,3	11.894	43	16	73.435	10,3
18	Nusa Tenggara Barat	827.477	178.631	762	2	431.186	52,1	46.998	37	9	301.588	36,4
19	Nusa Tenggara Timur	806.806	46.114	1383	28	83.657	10,4	145.607	22	18	201.603	25,0
20	Kalimantan Barat	812.743	12.600	103	2	26.917	3,3	9.134	24	7	23.844	2,9
21	Kalimantan Tengah	439.597	5.774	174	7	16.627	3,8	17.026	15	14	30.284	6,9
22	Kalimantan Selatan	640.038	17.332	248	8	38.203	6,0	42.737	56	35	81.971	12,8
23	Kalimantan Timur	585.950	77.108	395	5	100.709	17,2	22.257	36	16	45.858	7,8
24	Kalimantan Utara	106.413	743	41	1	4.551	4,3	2.338	0	0	8.392	7,9
25	Sulawesi Utara	368.777	3.494	28	8	4.945	1,3	18.612	11	6	19.324	5,2
26	Sulawesi Tengah	481.847	36.111	811	3	76.117	15,8	82.409	22	7	138.738	28,8
27	Sulawesi Selatan	1.427.171	63.601	1872	19	118.593	8,3	147.648	131	77	214.251	15,0
28	Sulawesi Tenggara	410.247	8.159	176	1	13.413	3,3	14.124	13	6	26.220	6,4
29	Gorontalo	188.232	19.091	139	2	21.066	11,2	43.794	4	3	45.769	24,3
30	Sulawesi Barat	208.810	4.730	20	0	10.254	4,9	15.017	4	1	22.570	10,8
31	Maluku	192.152	2.776	68	1	5.555	2,9	9.255	6	4	15.095	7,9
32	Maluku Utara	266.598	3.184	277	2	5.761	2,2	11.134	4	3	14.401	5,4
33	Papua	112.101	897	68	7	1.176	1,0	5.288	8	9	5.733	5,1
34	Papua Barat	73.617	962	34	1	1.418	1,9	5.078	0	1	5.601	7,6
35	Papua Selatan	64.484	61	1	0	275	0,4	454	0	0	668	1,0
36	Papua Tengah	155.229	760	82	0	954	0,6	1.991	2	2	2.186	1,4
37	Papua Pegunungan	190.892	8	2	0	8	0,0	43	0	0	43	0,0
38	Papua Barat Daya	83.503	892	12	1	894	1,1	2.034	0	0	2.036	2,4
Indonesia		**42.162.555**	**3.114.505**	**31.236**	**324**	**6.167.207**	**14,6**	**2.277.407**	**2.762**	**1.142**	**5.776.046**	**13,7%**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan : Sasaran = perempuan usia 30-50 tahun

Lampiran 77.b

KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menerapkan KTR	
			Jumlah	Cakupan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	21	91,3
2	Sumatera Utara	33	27	81,8
3	Sumatera Barat	19	19	100
4	Riau	12	11	91,7
5	Jambi	11	11	100
6	Sumatera Selatan	17	17	100
7	Bengkulu	10	9	90,0
8	Lampung	15	15	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100
10	Kepulauan Riau	7	7	100
11	DKI Jakarta	6	6	100
12	Jawa Barat	27	27	100
13	Jawa Tengah	35	31	88,6
14	DI Yogyakarta	5	5	100
15	Jawa Timur	38	35	92,1
16	Banten	8	8	100
17	Bali	9	9	100
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100
19	Nusa Tenggara Timur	22	16	72,7
20	Kalimantan Barat	14	12	85,7
21	Kalimantan Tengah	14	12	85,7
22	Kalimantan Selatan	13	13	100
23	Kalimantan Timur	10	10	100
24	Kalimantan Utara	5	5	100
25	Sulawesi Utara	15	14	93,3
26	Sulawesi Tengah	13	13	100
27	Sulawesi Selatan	24	24	100
28	Sulawesi Tenggara	17	16	94,1
29	Gorontalo	6	6	100
30	Sulawesi Barat	6	6	100
31	Maluku	11	11	100
32	Maluku Utara	10	9	90,0
33	Papua	9	3	33,3
34	Papua Barat	7	5	71,4
35	Papua Selatan	4	2	50,0
36	Papua Tengah	8	1	12,5
37	Papua Pegunungan	8	1	12,5
38	Papua Barat Daya	6	4	66,7
Indonesia		**514**	**458**	**89,1**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 77.c

KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI ≥40% PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menyelenggarakan UBM	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	12	52,2
2	Sumatera Utara	33	21	63,6
3	Sumatera Barat	19	13	68,4
4	Riau	12	2	16,7
5	Jambi	11	7	63,6
6	Sumatera Selatan	17	8	47,1
7	Bengkulu	10	7	70,0
8	Lampung	15	12	80,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	3	42,9
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	22	81,5
13	Jawa Tengah	35	8	22,9
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	35	92,1
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	8	88,9
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	70,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	19	86,4
20	Kalimantan Barat	14	1	7,1
21	Kalimantan Tengah	14	4	28,6
22	Kalimantan Selatan	13	6	46,2
23	Kalimantan Timur	10	4	40,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	1	6,7
26	Sulawesi Tengah	13	7	53,8
27	Sulawesi Selatan	24	12	50,0
28	Sulawesi Tenggara	17	5	29,4
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	1	16,7
31	Maluku	11	3	27,3
32	Maluku Utara	10	4	40,0
33	Papua	9	0	0,0
34	Papua Barat	7	1	14,3
35	Papua Selatan	4	0	0,0
36	Papua Tengah	8	0	0,0
37	Papua Pegunungan	8	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	1	16,7
Indonesia		**514**	**267**	**51,9**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 77.d

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM DI ≥80% PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Target Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan PANDU	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	23	18	23	127,8
2	Sumatera Utara	33	26	30	115,4
3	Sumatera Barat	19	14	17	121,4
4	Riau	12	10	3	30,0
5	Jambi	11	9	11	122,2
6	Sumatera Selatan	17	14	17	121,4
7	Bengkulu	10	8	10	125,0
8	Lampung	15	12	11	91,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	7	116,7
10	Kepulauan Riau	7	6	7	116,7
11	DKI Jakarta	6	5	6	120,0
12	Jawa Barat	27	22	15	68,2
13	Jawa Tengah	35	28	32	114,3
14	Di Yogyakarta	5	4	4	100,0
15	Jawa Timur	38	31	37	119,4
16	Banten	8	6	8	133,3
17	Bali	9	7	9	128,6
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	10	125,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	18	17	94,4
20	Kalimantan Barat	14	11	5	45,5
21	Kalimantan Tengah	14	11	10	90,9
22	Kalimantan Selatan	13	10	13	130,0
23	Kalimantan Timur	10	8	4	50,0
24	Kalimantan Utara	5	4	5	125,0
25	Sulawesi Utara	15	12	5	41,7
26	Sulawesi Tengah	13	10	5	50,0
27	Sulawesi Selatan	24	19	24	126,3
28	Sulawesi Tenggara	17	14	6	42,9
29	Gorontalo	6	5	5	100,0
30	Sulawesi Barat	6	5	5	100,0
31	Maluku	11	9	11	122,2
32	Maluku Utara	10	8	1	12,5
33	Papua	9	7	3	42,9
34	Papua Barat	7	6	5	83,3
35	Papua Selatan	4	3	2	66,7
36	Papua Tengah	8	6	2	33,3
37	Papua Pegunungan	8	6	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	5	3	60,0
Indonesia		**514**	**411**	**388**	**94,4**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 77.e

DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA (SKRINING PTM PRIORITAS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Sasaran	Target (70%)	Capaian	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	4.988.822	3.492.175	410.262	11,7
2	Sumatera Utara	13.648.900	9.554.230	1.507.969	15,8
3	Sumatera Barat	5.121.572	3.585.100	318.863	8,9
4	Riau	6.539.614	3.707.884	331.207	8,9
5	Jambi	3.350.626	2.345.438	280.901	12,0
6	Sumatera Selatan	7.940.685	5.558.480	491.313	8,8
7	Bengkulu	1.858.086	1.300.660	181.279	13,9
8	Lampung	7.919.693	5.543.785	1.470.232	26,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.374.623	962.236	205.336	21,3
10	Kepulauan Riau	2.238.408	1.566.886	496.521	31,7
11	DKI Jakarta	9.748.065	6.823.646	4.933.714	72,3
12	Jawa Barat	46.447.737	32.513.416	9.726.595	29,9
13	Jawa Tengah	32.395.696	22.676.987	2.180.715	9,6
14	DI Yogyakarta	3.727.258	2.609.081	113.704	4,4
15	Jawa Timur	37.213.896	26.049.727	11.723.760	45,0
16	Banten	12.108.906	8.476.234	3.352.097	39,5
17	Bali	4.192.009	2.934.406	317.814	10,8
18	Nusa Tenggara Barat	4.847.754	3.393.428	2.676.122	78,9
19	Nusa Tenggara Timur	5.031.856	3.522.299	543.608	15,4
20	Kalimantan Barat	4.749.131	3.324.392	645.144	19,4
21	Kalimantan Tengah	2.522.375	1.765.663	179.513	10,2
22	Kalimantan Selatan	3.976.112	2.783.278	712.288	25,6
23	Kalimantan Timur	3.431.890	2.402.323	727.562	30,3
24	Kalimantan Utara	670.302	469.211	41.868	8,9
25	Sulawesi Utara	2.334.939	1.634.457	233.078	14,3
26	Sulawesi Tengah	2.858.562	2.000.993	356.703	17,8
27	Sulawesi Selatan	8.248.761	5.774.133	844.121	14,6
28	Sulawesi Tenggara	2.501.800	1.751.260	481.696	27,5
29	Gorontalo	1.100.115	770.081	400.443	52,0
30	Sulawesi Barat	1.273.450	891.415	75.163	8,4
31	Maluku	1.641.106	1.148.774	79.383	6,9
32	Maluku Utara	1.161.706	813.194	50.172	6,2
33	Papua	784.098	548.869	22.023	4,0
34	Papua Barat	444.109	310.876	25.699	8,3
35	Papua Selatan	453.131	317.192	4.053	1,3
36	Papua Tengah	911.251	637.876	12.475	2,0
37	Papua Pegunungan	999.345	699.542	378	0,1
38	Papua Barat Daya	493.559	345.491	15.679	4,5
Indonesia		**251.249.948**	**175.874.964**	**46.169.453**	**26,3**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 77.f

PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK USIA ≥18 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Sasaran Usia ≥18 Tahun	Sasaran (70%)	Deteksi Dini Obesitas		Obesitas		
				Jumlah	%	Jumlah	Proporsi (%)	Prevalensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	3.778.793	2.645.157	687.211	26	106.359	15	3
2	Sumatera Utara	10.345.932	7.242.152	3.289.088	45	355.574	11	3
3	Sumatera Barat	3.888.837	2.722.186	935.609	34	104.107	11	3
4	Riau	4.884.118	3.418.883	804.421	24	104.239	13	2
5	Jambi	2.628.477	1.839.934	709.290	39	79.505	11	3
6	Sumatera Selatan	6.120.687	4.284.481	846.428	20	83.857	10	1
7	Bengkulu	1.461.049	1.022.734	299.712	29	25.625	9	2
8	Lampung	6.196.517	4.337.562	3.059.223	71	256.804	8	4
9	Kep. Bangka Belitung	1.080.501	1.080.501	236.439	22	30.241	13	3
10	Kepulauan Riau	1.764.152	1.764.152	952.274	54	169.449	18	10
11	DKI Jakarta	7.922.319	5.545.623	6.591.794	119	859.094	13	11
12	Jawa Barat	36.628.591	25.640.014	11.749.967	46	1.576.639	13	4
13	Jawa Tengah	26.043.146	18.230.202	4.707.038	26	621.148	13	2
14	DI Yogyakarta	3.089.456	2.162.619	396.311	18	58.091	15	2
15	Jawa Timur	30.568.165	21.397.716	13.842.341	65	1.862.029	13	6
16	Banten	9.840.594	6.636.416	5.745.980	87	646.428	11	7
17	Bali	3.402.545	2.381.782	673.968	28	57.156	8	2
18	Nusa Tenggara Barat	3.732.313	2.612.619	3.198.672	122	232.689	7	6
19	Nusa Tenggara Timur	3.763.628	2.634.540	1.121.506	43	65.790	6	2
20	Kalimantan Barat	3.692.373	2.584.661	720.936	28	107.614	15	3
21	Kalimantan Tengah	1.984.490	1.389.143	306.025	22	39.043	13	2
22	Kalimantan Selatan	3.074.753	2.152.327	1.126.887	52	136.054	12	4
23	Kalimantan Timur	2.720.414	1.904.290	859.839	45	154.760	18	6
24	Kalimantan Utara	519.944	363.961	78.126	21	14.948	19	3
25	Sulawesi Utara	1.867.088	1.306.962	335.581	26	52.742	16	3
26	Sulawesi Tengah	2.207.750	1.545.425	688.592	45	69.660	10	3
27	Sulawesi Selatan	6.515.256	4.506.679	1.973.126	44	192.034	10	3
28	Sulawesi Tenggara	1.884.373	1.319.061	574.763	44	73.591	13	4
29	Gorontalo	864.333	605.033	941.958	156	98.604	10	11
30	Sulawesi Barat	966.602	676.621	189.405	28	19.104	10	2
31	Maluku	1.243.496	870.447	200.445	23	21.572	11	2
32	Maluku Utara	883.698	618.589	181.287	29	24.899	14	3
33	Papua	633.725	458.115	48.025	10	10.360	22	2
34	Papua Barat	338.328	236.829	47.656	20	8.748	18	3
35	Papua Selatan	353.407	247.384	6.654	3	1.476	22	0
36	Papua Tengah	708.573	496.002	12.861	3	2.728	21	0
37	Papua Pegunungan	720.135	394570	598	0	80	13	0
38	Papua Barat Daya	375.349	262.745	21.667	8	3.936	18	1
Indonesia		**198.693.907**	**139.538.117**	**68.161.703**	**49**	**8.326.777**	**12**	**4**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 78.a

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Target	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan NAPZA	% Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan NAPZA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	23	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	33	33	100,0
3	Sumatera Barat	19	19	19	100,0
4	Riau	12	12	12	100,0
5	Jambi	11	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	8	80,0
8	Lampung	15	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	35	100,0
14	D I Yogyakarta	5	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	38	100,0
16	Banten	8	8	8	100,0
17	Bali	9	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	22	100,0
20	Kalimantan Barat	14	14	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	14	13	92,9
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	9	90,0
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	16	94,1
29	Gorontalo	6	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	6	100,0
31	Maluku	11	11	10	90,9
32	Maluku Utara	10	10	10	100,0
33	Papua	9	9	9	100,0
34	Papua Barat	7	7	5	71,4
35	Papua Selatan	4	4	0	0,0
36	Papua Tengah	8	8	2	25,0
37	Papua Pegunungan	8	8	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	6	3	50,0
Indonesia		**514**	**514**	**485**	**94,4**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 78.b

JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN REHABILITASI MEDIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

No	Provinsi	Baseline 2019	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	207	252	349	274	427	296	597
2	Sumatera Utara	69	133	69	165	69	197	69
3	Sumatera Barat	416	453	852	471	503	490	586
4	Riau	795	818	207	830	880	842	976
5	Jambi	184	205	1.327	216	233	227	464
6	Sumatera Selatan	1.177	1.211	66	1.227	1.422	1.243	1.510
7	Bengkulu	100	119	105	129	105	139	162
8	Lampung	393	422	437	437	452	451	520
9	Kepulauan Bangka Belitung	72	86	82	92	94	99	136
10	Kepulauan Riau	27	41	27	47	27	54	27
11	DKI Jakarta	1.115	1.127	1.169	1.133	1.191	1.138	1.624
12	Jawa Barat	730	783	815	809	846	835	1.039
13	Jawa Tengah	244	312	283	346	302	380	363
14	D I Yogyakarta	191	201	236	206	245	210	277
15	Jawa Timur	529	603	604	640	680	677	953
16	Banten	150	166	150	173	150	181	151
17	Bali	155	173	194	181	210	190	275
18	Nusa Tenggara Barat	301	320	339	330	354	340	453
19	Nusa Tenggara Timur	2	45	2	66	2	88	2
20	Kalimantan Barat	241	268	263	282	276	295	328
21	Kalimantan Tengah	194	221	283	235	258	248	297
22	Kalimantan Selatan	1.116	1.141	1.315	1.154	1.455	1.167	1.844
23	Kalimantan Timur	502	521	509	531	509	541	511
24	Kalimantan Utara	14	24	14	29	14	33	14
25	Sulawesi Utara	3	32	4	47	4	61	4
26	Sulawesi Tengah	14	39	14	52	14	65	14
27	Sulawesi Selatan	30	77	36	100	38	123	210
28	Sulawesi Tenggara	2	35	1	52	1	68	1
29	Gorontalo	-	12	-	18	-	23	-
30	Sulawesi Barat	1	13	39	19	39	24	39
31	Maluku	6	27	6	38	6	49	6
32	Maluku Utara	12	31	12	41	12	51	12
33	Papua	5	61	5	90	5	118	5
34	Papua Barat	3	28	3	41	3	54	3
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**9.000**	**10.000**	**9.817**	**10.500**	**10.826**	**11.000**	**13.472**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 79.a

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Sarana Air Minum	Jumlah SAM Yg di Awasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	637	262	41,1
2	Sumatera Utara	909	637	70,1
3	Sumatera Barat	2.004	1.434	71,6
4	Riau	942	850	90,2
5	Jambi	803	693	86,3
6	Sumatera Selatan	1.433	1.235	86,2
7	Bengkulu	150	135	90,0
8	Lampung	509	386	75,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	227	98	43,2
10	Kepulauan Riau	191	71	37,2
11	DKI Jakarta	8	7	87,5
12	Jawa Barat	1.478	981	66,4
13	Jawa Tengah	5.323	4.783	89,9
14	DI Yogyakarta	274	235	85,8
15	Jawa Timur	2.888	2.623	90,8
16	Banten	468	33	7,1
17	Bali	374	317	84,8
18	Nusa Tenggara Barat	566	126	22,3
19	Nusa Tenggara Timur	2.267	1.442	63,6
20	Kalimantan Barat	525	307	58,5
21	Kalimantan Tengah	240	196	81,7
22	Kalimantan Selatan	453	194	42,8
23	Kalimantan Timur	441	390	88,4
24	Kalimantan Utara	103	66	64,1
25	Sulawesi Utara	283	52	18,4
26	Sulawesi Tengah	1.307	904	69,2
27	Sulawesi Selatan	2.278	1.694	74,4
28	Sulawesi Tenggara	821	535	65,2
29	Gorontalo	228	164	71,9
30	Sulawesi Barat	209	124	59,3
31	Maluku	326	179	54,9
32	Maluku Utara	407	346	85,0
33	Papua	60	27	45,0
34	Papua Barat	287	122	42,5
35	Papua Selatan	86	12	14,0
36	Papua Tengah	354	34	9,6
37	Papua Pegunungan	68	17	25,0
38	Papua Barat Daya	245	80	32,7
Indonesia		**30.172**	**21.791**	**72,2**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 79.b

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI

TAHUN 2021-2023

No	Provinsi	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	88,79	89,70	89,74
2	Sumatera Utara	90,89	92,13	92,19
3	Sumatera Barat	83,40	85,23	85,59
4	Riau	89,76	90,07	90,47
5	Jambi	79,70	79,19	80,02
6	Sumatera Selatan	84,70	86,35	87,19
7	Bengkulu	67,39	73,07	73,08
8	Lampung	80,20	81,60	82,78
9	Kepulauan Bangka Belitung	73,40	80,96	81,64
10	Kepulauan Riau	90,83	91,82	92,10
11	DKI Jakarta	99,86	97,93	99,42
12	Jawa Barat	93,24	93,04	93,86
13	Jawa Tengah	93,62	93,32	93,76
14	DI Yogyakarta	95,69	96,50	96,69
15	Jawa Timur	95,02	95,05	96,01
16	Banten	93,51	92,71	92,95
17	Bali	97,56	98,42	98,31
18	Nusa Tenggara Barat	94,60	95,40	96,03
19	Nusa Tenggara Timur	85,40	86,76	88,35
20	Kalimantan Barat	78,76	80,43	82,08
21	Kalimantan Tengah	77,05	77,01	77,72
22	Kalimantan Selatan	76,40	76,18	76,29
23	Kalimantan Timur	85,80	87,14	87,90
24	Kalimantan Utara	86,80	89,96	90,19
25	Sulawesi Utara	91,65	94,15	94,37
26	Sulawesi Tengah	88,51	86,74	86,85
27	Sulawesi Selatan	91,18	91,96	92,12
28	Sulawesi Tenggara	91,94	94,64	94,80
29	Gorontalo	94,57	96,16	96,00
30	Sulawesi Barat	78,35	78,98	79,86
31	Maluku	93,21	92,10	92,98
32	Maluku Utara	88,66	88,10	89,01
33	Papua	64,92	65,39	66,49
34	Papua Barat	81,68	81,57	81,57
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		**90,78**	**91,05**	**91,72**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024

Lampiran 80

JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)

MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna Sarana			Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
				Sharing/Komunal	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	23	1.452.427	78.740	230.354	891.193	1.200.287	82,6
2	Sumatera Utara	33	3.866.094	257.910	333.998	2.840.681	3.432.589	88,8
3	Sumatera Barat	19	1.338.591	115.841	194.476	862.034	1.172.351	87,6
4	Riau	12	1.739.449	66.598	409.734	1.125.090	1.601.422	92,1
5	Jambi	11	966.344	99.135	217.345	584.564	901.044	93,2
6	Sumatera Selatan	17	2.247.066	165.379	322.468	1.588.123	2.075.970	92,4
7	Bengkulu	10	548.224	21.152	94.100	373.488	488.740	89,1
8	Lampung	15	2.315.233	84.945	744.933	1.321.932	2.151.810	92,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	472.571	8.585	51.299	409.538	469.422	99,3
10	Kepulauan Riau	7	669.200	12.481	17.923	592.029	622.433	93,0
11	DKI Jakarta	6	2.560.041	282.740	77.740	2.059.604	2.420.084	94,5
12	Jawa Barat	27	14.856.080	1.403.305	5.170.778	7.390.061	13.964.144	94,0
13	Jawa Tengah	35	11.248.938	1.166.009	916.155	9.166.776	11.248.940	100,0
14	DI Yogyakarta	5	1.088.699	53.773	98.041	936.885	1.088.699	100,0
15	Jawa Timur	38	12.114.883	894.734	1.480.958	9.562.226	11.937.918	98,5
16	Banten	8	3.309.131	256.851	820.718	1.876.460	2.954.029	89,3
17	Bali	9	1.122.845	74.107	10.994	1.022.515	1.107.616	98,6
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.493.205	129.384	167.025	1.196.796	1.493.205	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	1.284.052	144.255	303.596	683.899	1.131.750	88,1
20	Kalimantan Barat	14	1.417.465	63.224	280.219	829.410	1.172.853	82,7
21	Kalimantan Tengah	14	694.360	24.232	105.831	380.854	510.917	73,6
22	Kalimantan Selatan	13	1.079.230	67.320	234.106	659.767	961.193	89,1
23	Kalimantan Timur	10	1.068.925	26.986	37.236	900.386	964.608	90,2
24	Kalimantan Utara	5	133.011	7.610	34.910	80.670	123.190	92,6
25	Sulawesi Utara	15	724.690	47.640	139.285	508.554	695.479	96,0
26	Sulawesi Tengah	13	781.362	43.576	81.797	545.099	670.472	85,8
27	Sulawesi Selatan	24	2.407.624	122.942	158.781	2.125.488	2.407.211	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	635.056	41.589	134.799	408.757	585.145	92,1
29	Gorontalo	6	337.408	58.232	801	243.019	302.052	89,5
30	Sulawesi Barat	6	455.749	30.118	12.934	363.723	406.775	89,3
31	Maluku	11	435.296	18.753	186.463	144.532	349.748	80,3
32	Maluku Utara	10	301.509	34.379	55.609	169.586	259.574	86,1
33	Papua	9	209.029	22.170	30.100	124.707	176.977	84,7
34	Papua Barat	7	149.481	11.361	16.831	98.227	126.419	84,6
35	Papua Selatan	4	130.382	6.259	23.882	45.895	76.036	58,3
36	Papua Tengah	8	193.732	5.111	27.351	40.458	72.920	37,6
37	Papua Pegunungan	8	99.068	7.397	12.257	6.726	26.380	26,6
38	Papua Barat Daya	6	180.494	6.109	12.525	124.211	142.845	79,1
Indonesia		**514**	**76.126.944**	**5.960.932**	**13.248.352**	**52.283.963**	**71.493.247**	**93,9**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 81.a

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021-2023

No	Provinsi	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	77,55	77,48	78,85
2	Sumatera Utara	82,02	82,30	84,18
3	Sumatera Barat	68,68	69,27	70,97
4	Riau	83,64	84,06	84,58
5	Jambi	80,36	79,54	83,04
6	Sumatera Selatan	77,29	78,62	80,54
7	Bengkulu	79,81	79,58	80,28
8	Lampung	83,89	83,65	84,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	92,24	91,63	93,21
10	Kepulauan Riau	91,62	87,74	91,10
11	DKI Jakarta	95,17	92,79	93,50
12	Jawa Barat	71,66	74,02	74,88
13	Jawa Tengah	83,28	84,37	85,20
14	DI Yogyakarta	97,12	96,21	96,42
15	Jawa Timur	80,97	81,13	83,72
16	Banten	82,89	85,12	86,41
17	Bali	95,95	95,94	95,70
18	Nusa Tenggara Barat	82,85	83,12	85,11
19	Nusa Tenggara Timur	73,36	73,70	75,67
20	Kalimantan Barat	78,39	77,41	79,89
21	Kalimantan Tengah	73,77	74,33	76,31
22	Kalimantan Selatan	81,43	82,55	82,89
23	Kalimantan Timur	89,77	90,33	91,21
24	Kalimantan Utara	79,80	82,22	84,22
25	Sulawesi Utara	84,85	84,05	85,91
26	Sulawesi Tengah	76,06	75,01	75,80
27	Sulawesi Selatan	91,57	92,24	93,69
28	Sulawesi Tenggara	85,62	87,07	88,99
29	Gorontalo	78,58	79,82	81,72
30	Sulawesi Barat	80,12	78,88	80,73
31	Maluku	76,77	76,47	78,17
32	Maluku Utara	77,11	79,39	80,64
33	Papua	40,81	40,34	43,00
34	Papua Barat	77,89	73,52	76,30
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		**80,29**	**80,92**	**82,36**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024

Lampiran 81.b

PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan *	Jumlah Target Desa/Kelurahan SBS	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
				Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SBS)	
				Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	6.500	6.500	5.100	78,5	2.740	42,2
2	Sumatera Utara	6.110	6.110	4.991	81,7	2.847	46,6
3	Sumatera Barat	1.265	1.119	1.115	88,1	830	74,2
4	Riau	1.862	1.862	1.824	98,0	1.268	68,1
5	Jambi	1.585	1.585	1.478	93,2	1.128	71,2
6	Sumatera Selatan	3.258	3.246	3.020	92,7	2.408	74,2
7	Bengkulu	1.513	1.513	1.296	85,7	1.020	67,4
8	Lampung	2.651	2.651	2.224	83,9	2.218	83,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	393	393	393	100,0	330	84,0
10	Kepulauan Riau	419	417	417	99,5	283	67,9
11	DKI Jakarta	267	267	267	100,0	239	89,5
12	Jawa Barat	5.957	5.957	5.906	99,1	5.896	99,0
13	Jawa Tengah	8.563	8.562	8.562	100,0	8.562	100,0
14	DI Yogyakarta	438	438	438	100,0	438	100,0
15	Jawa Timur	8.494	8.494	8.498	100,0	7.840	92,3
16	Banten	1.552	1.552	1.551	99,9	655	42,2
17	Bali	716	716	716	100,0	627	87,6
18	Nusa Tenggara Barat	1.166	1.152	1.152	98,8	1.152	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	3.442	3.360	3.235	94,0	2.523	75,1
20	Kalimantan Barat	2.145	2.104	1.644	76,6	631	30,0
21	Kalimantan Tengah	1.571	1.566	1.419	90,3	858	54,8
22	Kalimantan Selatan	2.016	2.008	2.006	99,5	1.252	62,4
23	Kalimantan Timur	1.038	1.030	907	87,4	689	66,9
24	Kalimantan Utara	482	480	419	86,9	218	45,4
25	Sulawesi Utara	1.839	1.786	1.810	98,4	1.727	96,7
26	Sulawesi Tengah	2.017	1.974	1.625	80,6	908	46,0
27	Sulawesi Selatan	3.059	3.047	3.047	99,6	3.047	100,0
28	Sulawesi Tenggara	2.287	2.233	1.923	84,1	1.622	72,6
29	Gorontalo	729	729	701	96,2	279	38,3
30	Sulawesi Barat	648	648	603	93,1	257	39,7
31	Maluku	1.235	1.078	925	74,9	374	34,7
32	Maluku Utara	1.185	1.185	763	64,4	474	40,0
33	Papua	999	894	756	75,7	592	66,2
34	Papua Barat	824	801	448	54,4	399	49,8
35	Papua Selatan	690	614	402	58,3	71	11,6
36	Papua Tengah	1.208	541	148	12,3	17	3,1
37	Papua Pegunungan	2.628	1.671	147	5,6	41	2,5
38	Papua Barat Daya	1.013	647	301	29,7	210	32,5
Indonesia		**83.764**	**80.930**	**72.177**	**86,2**	**56.670**	**70,0**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Lampiran 82

PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR

MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	TFU Terdaftar				TFU Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar							
		Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)	Pasar	Puskesmas	Jumlah TFU Terdaftar	Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)		Pasar		Puskesmas		Jumlah Total	
						Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	1.529	60	198	1787	1.051	68,7	39	65,0	139	70,2	1.229	68,8
2	Sumatera Utara	2.833	113	263	3209	1.852	65,4	59	52,2	191	72,6	2.102	65,5
3	Sumatera Barat	2.315	118	132	2565	1.955	84,4	96	81,4	115	87,1	2.166	84,4
4	Riau	2.346	174	88	2608	1.714	73,1	125	71,8	62	70,5	1.901	72,9
5	Jambi	1.162	38	51	1251	1.075	92,5	36	94,7	49	96,1	1.160	92,7
6	Sumatera Selatan	2.347	120	191	2658	1.788	76,2	87	72,5	170	89,0	2.045	76,9
7	Bengkulu	464	52	50	566	459	98,9	50	96,2	47	94,0	556	98,2
8	Lampung	3.410	208	246	3864	2.224	65,2	131	63,0	188	76,4	2.543	65,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	395	15	30	440	297	75,2	14	93,3	27	90,0	338	76,8
10	Kepulauan Riau	726	37	46	809	672	92,6	33	89,2	39	84,8	744	92,0
11	DKI Jakarta	1.564	27	123	1714	1.391	88,9	16	59,3	101	82,1	1.508	88,0
12	Jawa Barat	12.382	241	657	13280	9.210	74,4	178	73,9	476	72,5	9.864	74,3
13	Jawa Tengah	8.874	250	307	9431	7.419	83,6	197	78,8	272	88,6	7.888	83,6
14	DI Yogyakarta	1.102	51	40	1193	1.062	96,4	44	86,3	34	85,0	1.140	95,6
15	Jawa Timur	10.751	257	297	11305	9.189	85,5	212	82,5	271	91,2	9.672	85,6
16	Banten	2.749	75	125	2949	2.102	76,5	57	76,0	103	82,4	2.262	76,7
17	Bali	652	53	35	740	611	93,7	47	88,7	30	85,7	688	93,0
18	Nusa Tenggara Barat	3.221	80	197	3498	2.135	66,3	61	76,3	125	63,5	2.321	66,4
19	Nusa Tenggara Timur	3.740	187	287	4214	1.869	50,0	82	43,9	142	49,5	2.093	49,7
20	Kalimantan Barat	2.008	50	165	2223	1.381	68,8	34	68,0	134	81,2	1.549	69,7
21	Kalimantan Tengah	847	40	51	938	607	71,7	31	77,5	37	72,5	675	72,0
22	Kalimantan Selatan	2.895	124	210	3229	2.179	75,3	76	61,3	167	79,5	2.422	75,0
23	Kalimantan Timur	843	33	48	924	793	94,1	31	93,9	48	100,0	872	94,4
24	Kalimantan Utara	456	22	34	512	398	87,3	11	50,0	29	85,3	438	85,5
25	Sulawesi Utara	1.082	52	83	1217	549	50,7	17	32,7	47	56,6	613	50,4
26	Sulawesi Tengah	1.268	114	106	1488	909	71,7	70	61,4	69	65,1	1.048	70,4
27	Sulawesi Selatan	5.293	196	209	5698	4.854	91,7	165	84,2	193	92,3	5.212	91,5
28	Sulawesi Tenggara	1.566	150	134	1850	1.167	74,5	110	73,3	110	82,1	1.387	75,0
29	Gorontalo	1.197	57	56	1310	798	66,7	37	64,9	26	46,4	861	65,7
30	Sulawesi Barat	535	32	20	587	449	83,9	25	78,1	15	75,0	489	83,3
31	Maluku	1.712	35	185	1932	1.121	65,5	24	68,6	127	68,6	1.272	65,8
32	Maluku Utara	826	30	64	920	658	79,7	19	63,3	53	82,8	730	79,3
33	Papua	379	18	53	450	294	77,6	12	66,7	48	90,6	354	78,7
34	Papua Barat	268	9	25	302	219	81,7	6	66,7	23	92,0	248	82,1
35	Papua Selatan	304	6	39	349	262	86,2	6	100,0	33	84,6	301	86,2
36	Papua Tengah	192	5	28	225	166	86,5	4	80,0	18	64,3	188	83,6
37	Papua Pegunungan	36	9	16	61	32	88,9	9	100,0	16	100,0	57	93,4
38	Papua Barat Daya	202	5	24	231	83	41,1	3	60,0	16	66,7	102	44,2
Indonesia		**84.471**	**3.143**	**4.913**	**92.527**	**64.994**	**76,9**	**2.254**	**71,7**	**3.790**	**77,1**	**71.038**	**76,8**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 83.a

PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Jasa Boga			Restoran			TPP Tertentu			Depot Air Minum (DAM)			Rumah Makan			Kelompok Gerai Pangan Jajanan			Sentra Pangan Jajanan / Kantin			Total		
		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP/ Memenuhi Syarat Sesuai Standar	
			Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	70	64	91,4	633	327	51,7	276	152	55,1	769	360	46,8	143	30	21,0	1.100	627	57,0	987	349	35,4	3.978	1.909	48,0
2	Sumatera Utara	118	118	100,0	1.570	533	33,9	554	353	63,7	991	477	48,1	54	10	18,5	2.773	1.419	51,2	537	186	34,6	6.597	3.096	46,9
3	Sumatera Barat	234	165	70,5	1.112	487	43,8	781	384	49,2	2.936	1.946	66,3	1.935	1.029	53,2	6.246	3.767	60,3	2.561	855	33,4	15.805	8.633	54,6
4	Riau	221	221	100,0	1.928	879	45,6	320	223	69,7	797	482	60,5	18	9	50,0	3.111	1.846	59,3	1.224	374	30,6	7.619	4.034	52,9
5	Jambi	164	140	85,4	1.158	718	62,0	350	282	80,6	892	651	73,0	311	204	65,6	1.979	1.398	70,6	388	218	56,2	5.242	3.611	68,9
6	Sumatera Selatan	372	372	100,0	790	504	63,8	823	468	56,9	2.498	1.733	69,4	1.778	1.221	68,7	2.051	1.602	78,1	1.734	1.088	62,7	10.046	6.988	69,6
7	Bengkulu	120	115	95,8	399	184	46,1	46	32	69,6	1.005	656	65,3	416	142	34,1	337	239	70,9	1.586	533	33,6	3.909	1.901	48,6
8	Lampung	212	208	98,1	1.213	757	62,4	915	678	74,1	1.845	1.390	75,3	618	208	33,7	2.988	1.942	65,0	583	294	50,4	8.374	5.477	65,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	122	109	89,3	151	107	70,9	48	11	22,9	1.258	827	65,7	859	442	51,5	1.376	705	51,2	464	287	61,9	4.278	2.488	58,2
10	Kepulauan Riau	262	205	78,2	787	481	61,1	320	237	74,1	886	445	50,2	959	367	38,3	1.778	1.025	57,6	843	408	48,4	5.835	3.168	54,3
11	DKI Jakarta	342	330	96,5	4.206	3.441	81,8	118	99	83,9	1.808	1.337	73,9	582	355	61,0	2.289	1.702	74,4	2.215	1.676	75,7	11.560	8.940	77,3
12	Jawa Barat	1.224	932	76,1	4.830	1.989	41,2	2.093	1.319	63,0	8.457	4.275	50,5	885	443	50,1	12.404	6.089	49,1	2.010	901	44,8	31.903	15.948	50,0
13	Jawa Tengah	2.496	2.024	81,1	2.791	2.208	79,1	1.264	1.012	80,1	2.627	2.028	77,2	241	150	62,2	8.855	7.582	85,6	1.329	946	71,2	19.603	15.950	81,4
14	DI Yogyakarta	269	230	85,5	354	261	73,7	649	513	79,0	1.145	1.001	87,4	40	16	40,0	1.002	787	78,5	459	386	84,1	3.918	3.194	81,5
15	Jawa Timur	2.429	1.487	61,2	2.556	1.973	77,2	1.552	1.195	77,0	5.003	3.447	68,9	1.525	798	52,3	9.184	6.995	76,2	3.971	2.741	69,0	26.220	18.636	71,1
16	Banten	440	370	84,1	1.485	895	60,3	353	256	72,5	687	366	53,3	111	41	36,9	4.225	2.399	56,8	329	156	47,4	7.630	4.483	58,8
17	Bali	148	107	72,3	1.771	1.047	59,1	769	110	14,3	2.045	1.094	53,5	1.128	588	52,1	921	274	29,8	1.778	1.139	64,1	8.560	4.359	50,9
18	Nusa Tenggara Barat	163	144	88,3	1.075	466	43,3	142	50	35,2	1.200	597	49,8	160	21	13,1	1.223	632	51,7	313	117	37,4	4.276	2.027	47,4
19	Nusa Tenggara Timur	140	65	46,4	630	292	46,3	852	393	46,1	1.043	494	47,4	844	339	40,2	1.406	871	61,9	465	148	31,8	5.380	2.602	48,4
20	Kalimantan Barat	92	92	100,0	963	449	46,6	518	291	56,2	1.119	646	57,7	67	33	49,3	1.926	1.043	54,2	484	148	30,6	5.169	2.702	52,3
21	Kalimantan Tengah	90	83	92,2	627	281	44,8	194	113	58,2	1.045	782	74,8	98	37	37,8	2.072	1.097	52,9	326	165	50,6	4.452	2.558	57,5
22	Kalimantan Selatan	84	79	94,0	953	366	38,4	174	103	59,2	3.355	1.543	46,0	13	6	46,2	3.284	1.747	53,2	355	85	23,9	8.218	3.929	47,8
23	Kalimantan Timur	347	327	94,2	1.504	941	62,6	993	777	78,2	1.876	1.255	66,9	159	129	81,1	4.287	2.903	67,7	1.233	805	65,3	10.399	7.137	68,6
24	Kalimantan Utara	63	63	100,0	127	71	55,9	63	43	68,3	767	494	64,4	820	518	63,2	948	655	69,1	450	246	54,7	3.238	2.090	64,5
25	Sulawesi Utara	453	422	93,2	0	0	0,0	0	0	0,0	1.479	751	50,8	2.507	1.306	52,1	692	326	47,1	3.990	2.036	51,0	9.121	4.841	53,1
26	Sulawesi Tengah	113	93	82,3	1.042	786	75,4	23	15	65,2	1.082	880	81,3	210	163	77,6	1.578	1.233	78,1	838	742	88,5	4.886	3.912	80,1
27	Sulawesi Selatan	225	217	96,4	2.378	1.226	51,6	706	528	74,8	3.160	1.876	59,4	876	499	57,0	3.641	2.272	62,4	2.266	1.219	53,8	13.252	7.837	59,1
28	Sulawesi Tenggara	21	21	100,0	909	374	41,1	482	291	60,4	1.509	888	58,8	25	4	16,0	1.569	780	49,7	654	232	35,5	5.169	2.590	50,1
29	Gorontalo	152	152	100,0	308	156	50,6	198	103	52,0	809	667	82,4	638	441	69,1	829	452	54,5	553	253	45,8	3.487	2.224	63,8
30	Sulawesi Barat	164	22	13,4	974	203	20,8	143	76	53,1	500	127	25,4	488	146	29,9	383	238	62,1	424	41	9,7	3.076	853	27,7
31	Maluku	17	17	100,0	256	96	37,5	292	179	61,3	382	243	63,6	216	95	44,0	537	369	68,7	372	275	73,9	2.072	1.274	61,5
32	Maluku Utara	327	327	100,0	162	135	83,3	173	127	73,4	402	283	70,4	270	166	61,5	427	334	78,2	90	47	52,2	1.851	1.419	76,7
33	Papua	20	20	100,0	368	195	53,0	103	69	67,0	246	151	61,4	4	2	50,0	561	384	68,4	39	27	69,2	1.341	848	63,2
34	Papua Barat	31	31	100,0	233	176	75,5	151	116	76,8	56	52	92,9	10	3	30,0	220	177	80,5	42	19	45,2	743	574	77,3
35	Papua Selatan	16	16	100,0	126	50	39,7	229	175	76,4	60	37	61,7	0	0	0,0	108	87	80,6	53	20	37,7	592	385	65,0
36	Papua Tengah	12	12	100,0	140	52	37,1	217	182	83,9	271	185	68,3	3	2	66,7	378	300	79,4	10	4	40,0	1.031	737	71,5
37	Papua Pegunungan	0	0	0,0	27	14	51,9	24	24	100,0	2	1	50,0	1	1	100,0	9	6	66,7	4	2	50,0	67	48	71,6
38	Papua Barat Daya	10	10	100,0	207	90	43,5	75	52	69,3	33	29	87,9	3	2	66,7	214	100	46,7	23	13	56,5	565	296	52,4
Indonesia		**11.783**	**9.410**	**79,9**	**40.743**	**23.210**	**57,0**	**16.983**	**11.031**	**65,0**	**56.045**	**34.496**	**61,6**	**19.015**	**9.966**	**52,4**	**88.911**	**56.404**	**63,4**	**35.982**	**19.181**	**53,3**	**269.462**	**163.698**	**60,7**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 83.b

JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI

TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	6	26,1
2	Sumatera Utara	33	11	33,3
3	Sumatera Barat	19	19	100,0
4	Riau	12	11	91,7
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	12	54,5
20	Kalimantan Barat	14	6	42,9
21	Kalimantan Tengah	14	8	57,1
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,3
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	4	80,0
25	Sulawesi Utara	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	10	76,9
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	10	58,8
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	2	33,3
31	Maluku	11	0	0,0
32	Maluku Utara	10	4	40,0
33	Papua	9	2	22,2
34	Papua Barat	7	1	14,3
35	Papua Selatan	4	1	25,0
36	Papua Tengah	8	1	12,5
37	Papua Pegunungan	8	1	12,5
38	Papua Barat Daya	6	1	16,7
Indonesia		**514**	**382**	**74,3**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 83.c

JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI

TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah RS dan Puskesmas	Jumlah RS dan Puskesmas yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	442	162	36,7
2	Sumatera Utara	831	168	20,2
3	Sumatera Barat	362	113	31,2
4	Riau	318	117	36,8
5	Jambi	250	91	36,4
6	Sumatera Selatan	435	278	63,9
7	Bengkulu	205	84	41,0
8	Lampung	401	257	64,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	91	61	67,0
10	Kepulauan Riau	133	67	50,4
11	DKI Jakarta	240	127	52,9
12	Jawa Barat	1514	693	45,8
13	Jawa Tengah	1226	759	61,9
14	DI Yogyakarta	201	170	84,6
15	Jawa Timur	1395	1084	77,7
16	Banten	381	307	80,6
17	Bali	195	121	62,1
18	Nusa Tenggara Barat	221	140	63,3
19	Nusa Tenggara Timur	494	132	26,7
20	Kalimantan Barat	305	115	37,7
21	Kalimantan Tengah	237	36	15,2
22	Kalimantan Selatan	294	113	38,4
23	Kalimantan Timur	246	147	59,8
24	Kalimantan Utara	74	34	45,9
25	Sulawesi Utara	256	100	39,1
26	Sulawesi Tengah	258	88	34,1
27	Sulawesi Selatan	599	331	55,3
28	Sulawesi Tenggara	350	106	30,3
29	Gorontalo	115	46	40,0
30	Sulawesi Barat	113	49	43,4
31	Maluku	259	19	7,3
32	Maluku Utara	173	33	19,1
33	Papua	140	17	12,1
34	Papua Barat	88	13	14,8
35	Papua Selatan	93	7	7,5
36	Papua Tengah	131	16	12,2
37	Papua Pegunungan	162	3	1,9
38	Papua Barat Daya	107	8	7,5
Indonesia		**13.335**	**6.212**	**46,6**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2024; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2024; Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 83.d

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Kebijakan Germas	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	7	30,4
2	Sumatera Utara	33	29	87,9
3	Sumatera Barat	19	18	94,7
4	Riau	12	12	100,0
5	Jambi	11	10	90,9
6	Sumatera Selatan	17	13	76,5
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	2	33,3
12	Jawa Barat	27	26	96,3
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	5	62,5
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	6	27,3
20	Kalimantan Barat	14	13	92,9
21	Kalimantan Tengah	14	6	42,9
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	7	70,0
24	Kalimantan Utara	5	1	20,0
25	Sulawesi Utara	15	3	20,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	16	66,7
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	1	16,7
31	Maluku	11	3	27,3
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua	9	5	55,6
34	Papua Barat	7	2	28,6
35	Papua Selatan	4	0	0,0
36	Papua Tengah	8	0	0,0
37	Papua Pegunungan	8	0	0,0
38	Papua Barat Daya	6	0	0,0
Indonesia		**514**	**380**	**73,9**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 83.e

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2023

No	Provinsi	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	64,43	64,18	65,91
2	Sumatera Utara	69,48	67,26	70,95
3	Sumatera Barat	56,67	58,18	59,85
4	Riau	70,63	69,43	71,53
5	Jambi	62,54	60,85	64,12
6	Sumatera Selatan	57,86	59,96	61,82
7	Bengkulu	51,36	54,98	54,74
8	Lampung	61,56	61,24	63,15
9	Kepulauan Bangka Belitung	27,60	30,79	32,57
10	Kepulauan Riau	50,23	46,69	54,21
11	DKI Jakarta	40,00	36,23	38,80
12	Jawa Barat	53,14	53,37	54,17
13	Jawa Tengah	66,47	67,02	68,85
14	DI Yogyakarta	85,15	84,94	85,79
15	Jawa Timur	66,93	66,28	70,74
16	Banten	60,78	60,98	63,06
17	Bali	78,47	81,65	84,26
18	Nusa Tenggara Barat	62,90	62,30	66,31
19	Nusa Tenggara Timur	40,41	41,80	42,70
20	Kalimantan Barat	61,17	60,74	64,16
21	Kalimantan Tengah	55,34	54,07	56,49
22	Kalimantan Selatan	57,50	55,96	57,50
23	Kalimantan Timur	70,70	73,18	75,82
24	Kalimantan Utara	65,65	67,21	71,43
25	Sulawesi Utara	69,50	69,57	72,39
26	Sulawesi Tengah	62,70	58,61	59,60
27	Sulawesi Selatan	69,11	69,90	71,88
28	Sulawesi Tenggara	70,45	72,80	74,01
29	Gorontalo	67,28	69,48	70,75
30	Sulawesi Barat	57,26	55,37	59,28
31	Maluku	60,69	60,66	63,61
32	Maluku Utara	63,85	65,42	68,17
33	Papua	28,92	27,28	29,01
34	Papua Barat	57,90	53,81	56,92
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		**60,90**	**60,66**	**63,15**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 84.a

KASUS KUMULATIF KONFIRMASI, SEMBUH, DAN MENINGGAL COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	241	226	15
2	Sumatera Utara	1.012	1.053	15
3	Sumatera Barat	210	314	14
4	Riau	535	475	28
5	Jambi	250	260	12
6	Sumatera Selatan	1.149	1.127	45
7	Bengkulu	113	122	0
8	Lampung	1.206	1.157	16
9	Kepulauan Bangka Belitung	301	332	6
10	Kep. Riau	216	257	5
11	DKI Jakarta	35.608	36.308	196
12	Jawa Barat	21.483	21.932	105
13	Jawa Tengah	7.263	8.886	321
14	DI Yogyakarta	2.610	2.608	62
15	Jawa Timur	12.715	12.742	308
16	Banten	8.440	8.349	7
17	Bali	1.696	1.571	55
18	Nusa Tenggara Barat	196	241	12
19	Nusa Tenggara Timur	806	849	10
20	Kalimantan Barat	578	624	0
21	Kalimantan Tengah	525	538	12
22	Kalimantan Selatan	527	541	11
23	Kalimantan Timur	1.209	1.203	27
24	Kalimantan Utara	335	284	14
25	Sulawesi Utara	301	379	8
26	Sulawesi Tengah	758	784	11
27	Sulawesi Selatan	803	777	15
28	Sulawesi Tenggara	199	233	5
29	Gorontalo	15	111	0
30	Sulawesi Barat	121	95	4
31	Maluku	22	9	2
32	Maluku Utara	115	126	1
33	Papua	69	66	0
34	Papua Barat	132	120	2
35	Papua Selatan	14	16	0
36	Papua Tengah	129	157	1
37	Papua Pegunungan	13	8	0
38	Papua Barat Daya	63	76	0
	Indonesia	**101.978**	**104.956**	**1.345**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2024

Keterangan:
1. Data per 31 Desember 2023
2. Jumlah kasus sembuh dan meninggal termasuk dari kasus COVID-19 tahun sebelumnya yang sembuh dan meninggal pada tahun 2023

Lampiran 86

CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 MENURUT USIA BERDASARKAN DOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	Cakupan Total Vaksinasi Covid							Cakupan Vaksinasi Covid Usia 60+						
		Sasaran	Dosis 1		Dosis Lengkap		Booster 1		Sasaran	Dosis 1		Dosis Lengkap		Booster 1	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	4.610.820	4.141.525	89,8	3.407.779	73,9	1.411.706	30,6	339.125	318.473	93,9	257.087	75,8	118.685	35,0
2	Sumatera Utara	13.035.792	11.179.227	85,8	9.904.508	76,0	4.314.472	33,1	1.093.446	986.519	90,2	850.525	77,8	516.054	47,2
3	Sumatera Barat	4.973.342	4.168.904	83,8	3.353.448	67,4	1.131.818	22,8	489.575	511.079	104,4	399.756	81,7	139.998	28,6
4	Riau	5.552.581	4.879.392	87,9	4.032.186	72,6	1.452.690	26,2	322.466	254.506	78,9	201.710	62,6	95.132	29,5
5	Jambi	3.057.055	2.656.896	86,9	2.164.521	70,8	749.969	24,5	222.250	175.279	78,9	135.497	61,0	58.773	26,4
6	Sumatera Selatan	7.202.758	6.089.751	84,5	4.996.843	69,4	1.511.997	21,0	597.071	455.619	76,3	353.106	59,1	137.618	23,0
7	Bengkulu	1.761.203	1.482.383	84,2	1.226.308	69,6	433.017	24,6	133.450	110.960	83,1	87.022	65,2	42.092	31,5
8	Lampung	7.558.816	6.120.840	81,0	5.062.648	67,0	1.703.343	22,5	704.246	543.766	77,2	429.907	61,0	173.183	24,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.283.021	1.121.887	87,4	974.022	75,9	362.245	28,2	95.863	77.802	81,2	65.986	68,8	31.771	33,1
10	Kepulauan Riau	1.802.705	1.771.627	98,3	1.560.764	86,6	786.858	43,6	87.128	73.823	84,7	64.001	73,5	34.873	40,0
11	DKI Jakarta	9.382.849	12.592.973	134,2	10.966.638	116,9	5.546.840	59,1	761.279	805.245	105,8	742.076	97,5	446.993	58,7
12	Jawa Barat	42.610.134	36.729.164	86,2	32.615.234	76,5	15.950.219	37,4	3.408.940	3.490.456	102,4	2.992.151	87,8	1.805.518	53,0
13	Jawa Tengah	32.010.100	27.028.835	84,4	24.268.456	75,8	8.879.126	27,7	3.681.475	3.008.739	81,7	2.568.939	69,8	1.161.395	31,5
14	Yogyakarta	3.181.285	3.239.411	101,8	3.050.532	95,9	1.360.835	42,8	472.852	410.448	86,8	375.856	79,5	193.672	41,0
15	Jawa Timur	35.339.869	30.252.395	85,6	26.513.832	75,0	9.733.587	27,5	4.335.549	3.459.397	79,8	2.951.394	68,1	1.168.341	26,9
16	Banten	10.463.438	8.825.440	84,3	7.299.538	69,8	3.105.576	29,7	643.607	619.286	96,2	483.497	75,1	234.705	36,5
17	Bali	3.774.174	3.964.009	105,0	3.697.585	98,0	2.180.151	57,8	454.904	386.787	85,0	347.966	76,5	250.493	55,1
18	Nusa Tenggara Barat	4.498.752	3.907.231	86,9	3.467.171	77,1	1.487.351	33,1	368.117	306.774	83,3	265.858	72,2	134.874	36,6
19	Nusa Tenggara Timur	4.438.628	3.682.146	83,0	2.880.164	64,9	674.137	15,2	405.566	269.770	66,5	201.509	49,7	52.369	12,9
20	Kalimantan Barat	4.433.426	3.521.400	79,4	2.932.488	66,1	835.304	18,8	350.692	222.060	63,3	172.576	49,2	59.926	17,1
21	Kalimantan Tengah	2.307.977	2.045.229	88,6	1.763.860	76,4	663.504	28,7	141.016	113.077	80,2	90.680	64,3	39.345	27,9
22	Kalimantan Selatan	3.601.990	3.043.312	84,5	2.486.955	69,0	914.538	25,4	258.552	223.699	86,5	163.287	63,2	62.278	24,1
23	Kalimantan Timur	3.260.705	2.963.891	90,9	2.646.993	81,2	1.237.719	38,0	189.533	160.380	84,6	130.314	68,8	73.956	39,0
24	Kalimantan Utara	617.700	532.727	86,2	455.738	73,8	181.136	29,3	33.254	28.112	84,5	20.762	62,4	9.695	29,2
25	Sulawesi Utara	2.318.366	1.884.006	81,3	1.462.070	63,1	501.009	21,6	259.465	189.302	73,0	146.156	56,3	53.434	20,6
26	Sulawesi Tengah	2.452.517	1.896.715	77,3	1.325.318	54,0	366.126	14,9	196.628	111.257	56,6	75.098	38,2	22.430	11,4
27	Sulawesi Selatan	7.954.304	6.412.975	80,6	4.939.347	62,1	1.360.569	17,1	753.919	579.208	76,8	397.243	52,7	110.388	14,6
28	Sulawesi Tenggara	2.300.158	1.797.824	78,2	1.345.158	58,5	365.064	15,9	157.296	99.471	63,2	71.340	45,4	20.492	13,0
29	Gorontalo	1.055.209	872.666	82,7	666.343	63,1	186.140	17,6	76.882	55.073	71,6	38.680	50,3	10.786	14,0
30	Sulawesi Barat	1.250.708	877.556	70,2	622.469	49,8	138.434	11,1	89.146	67.687	75,9	42.828	48,0	11.622	13,0
31	Maluku	1.613.247	1.080.892	67,0	726.820	45,1	231.406	14,3	127.308	72.446	56,9	46.627	36,6	14.018	11,0
32	Maluku Utara	1.096.222	862.254	78,7	641.879	58,6	208.672	19,0	74.323	59.129	79,6	39.919	53,7	10.389	14,0
33	Papua	2.950.247	888.790	30,1	689.917	23,4	243.201	8,2	189.899	28.460	15,0	22.198	11,7	7.871	4,1
34	Papua Barat	915.922	518.129	56,6	389.825	42,6	154.659	16,9	50.834	16.746	32,9	12.681	24,9	4.982	9,8
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**234.666.020**	**203.878.592**	**86,9**	**175.394.493**	**74,7**	**70.954.257**	**30,2**	**21.565.656**	**18.295.440**	**84,8**	**15.248.676**	**70,7**	**7.311.886**	**33,4**

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2024

Data filter per 31 Desember 2023

Lampiran 88.a

JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2023

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Banjir	21	17	23	11	14	1	4	1	4	5	11	19	131
2	Letusan Gunung Api	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Gempa Bumi	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	3	10
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	1	4	2	2	3	0	2	0	0	0	0	2	16
6	Banjir Bandang	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	2	2	9
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	4
8	Angin Puting Beliung	6	1	4	3	2	5	0	1	0	3	4	1	30
9	Gelombang Pasang/Badai	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10	Banjir dan Tanah Longsor	5	4	4	1	1	1	4	1	1	0	1	5	28
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		**34**	**29**	**36**	**18**	**20**	**9**	**14**	**5**	**7**	**8**	**19**	**32**	**231**
1	Kebakaran	1	1	6	7	7	4	6	9	7	10	3	8	69
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
3	Kecelakaan Transportasi Darat	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	6
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	0	5	2	1	2	3	2	1	2	6	4	1	29
8	Gagal Teknologi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		**2**	**7**	**10**	**9**	**10**	**8**	**9**	**11**	**11**	**19**	**7**	**10**	**113**
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**
Total Jumlah Bencana Berdampak Krisis Kesehatan 2023		**37**	**37**	**46**	**27**	**30**	**17**	**23**	**16**	**19**	**27**	**26**	**42**	**347**

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 88.b

JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2023

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Banjir	131	27	18	10	8.177	64.269
2	Letusan Gunung Api	2	2	23	6	22	73
3	Gempa Bumi	10	6	5	26	1.288	16.013
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	16	11	63	8	375	4.123
6	Banjir Bandang	9	3	3	0	387	1.095
7	Kekeringan	4	3	0	0	2	7.035
8	Angin Puting Beliung	30	13	8	4	52	172
9	Gelombang Pasang/Badai	1	1	0	0	0	20
10	Banjir dan Tanah Longsor	28	13	24	12	10.264	8.432
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		**231**	**31**	**144**	**66**	**20567**	**101232**
1	Kebakaran	69	19	25	55	958	9.072
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	2	0	5	321	123
3	Kecelakaan Transportasi Darat	6	5	1	13	66	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	3	2	11	17	118	0
5	Kecelakaan Industri	1	1	21	28	19	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	1	1	0	0	145	0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	29	12	4	776	2.787	0
8	Gagal Teknologi	1	1	4	1	11	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		**113**	**25**	**66**	**895**	**4425**	**9195**
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	3	2	2	8	157	91
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		**3**	**2**	**2**	**8**	**157**	**91**
Indonesia		**347**		**212**	**969**	**25149**	**110518**

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 88.c

JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Frekuensi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	27	3	0	848	25.016
2	Sumatera Utara	22	7	2	213	3.922
3	Sumatera Barat	19	28	80	244	10.621
4	Riau	7	11	14	168	491
5	Jambi	9	2	8	9.829	14.741
6	Sumatera Selatan	10	2	87	969	843
7	Bengkulu	1	0	0	0	10
8	Lampung	6	1	0	216	244
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	0	0	0
10	Kepulauan Riau	3	50	4	293	2.852
11	DKI Jakarta	30	24	46	599	6.083
12	Jawa Barat	39	11	387	2.795	7.345
13	Jawa Tengah	30	4	70	719	9.558
14	D.I. Yogyakarta	5	2	18	243	20
15	Jawa Timur	22	12	111	1.979	1.111
16	Banten	7	0	4	74	423
17	Bali	4	2	3	52	49
18	Nusa Tenggara Barat	13	2	0	1.042	387
19	Nusa Tenggara Timur	4	5	3	61	224
20	Kalimantan Barat	7	0	0	1.427	1.096
21	Kalimantan Tengah	6	0	3	315	220
22	Kalimantan Selatan	8	0	5	1.170	417
23	Kalimantan Timur	5	0	0	7	601
24	Kalimantan Utara	4	1	2	317	2.293
25	Sulawesi Utara	7	7	59	666	2.709
26	Sulawesi Tengah	13	24	29	419	6.409
27	Sulawesi Selatan	19	5	6	170	3.955
28	Sulawesi Tenggara	2	1	0	0	7
29	Gorontalo	1	0	0	1	80
30	Sulawesi Barat	3	1	0	55	132
31	Maluku	5	1	10	136	665
32	Maluku Utara	2	0	0	13	171
33	Papua	2	4	17	93	732
34	Papua Barat	1	0	0	6	0
35	Papua Selatan	1	1	1	0	0
36	Papua Tengah	1	0	0	0	7.000
37	Papua Pegunungan	1	0	0	10	91
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
	Indonesia	**347**	**212**	**969**	**25.149**	**110.518**

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2024

Lampiran 88.d

JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No.	Provinsi	Jumlah Kejadian Bencana																					Jumlah
		Banjir	Letusan Gunung Api	Gempa Bumi	Gempa Bumi dan Tsunami	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Kekeringan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang/Badai	Banjir dan Tanah Longsor	Kebakaran	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecelakaan Transportasi Darat	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	Kecelakaan Industri	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	Gagal Teknologi	Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi)	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	Aksi Teror dan Sabotase	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*
1	Aceh	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27
2	Sumatera Utara	8	0	0	0	1	4	0	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
3	Sumatera Barat	6	0	1	0	1	2	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	19
4	Riau	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
5	Jambi	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
6	Sumatera Selatan	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10
7	Bengkulu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Lampung	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Kepulauan Riau	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
12	Jawa Barat	12	0	4	0	4	0	1	4	0	3	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	0	39
13	Jawa Tengah	10	1	0	0	1	0	1	3	0	2	4	2	1	0	0	0	5	0	0	0	0	30
14	D.I. Yogyakarta	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	5
15	Jawa Timur	5	0	0	0	3	0	0	5	0	1	2	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	22
16	Banten	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7
17	Bali	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
18	Nusa Tenggara Barat	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	13
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
20	Kalimantan Barat	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
21	Kalimantan Tengah	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
22	Kalimantan Selatan	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
24	Kalimantan Utara	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
25	Sulawesi Utara	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
26	Sulawesi Tengah	7	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	13
27	Sulawesi Selatan	7	0	0	0	1	0	0	3	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	Gorontalo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	Sulawesi Barat	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
31	Maluku	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
32	Maluku Utara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
33	Papua	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
36	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**131**	**2**	**10**	**0**	**16**	**9**	**4**	**30**	**1**	**28**	**69**	**3**	**6**	**3**	**1**	**1**	**29**	**1**	**0**	**3**	**0**	**347**

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, 2024

Lampiran 89.a

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2022-2023

No	Provinsi	2022		2023	
		PIHK	Reguler	PIHK	Reguler
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	9	1.988	38	4.454
2	Sumatera Utara	28	3.747	102	8.084
3	Sumatera Barat	58	2.109	220	4.789
4	Riau	161	2.271	394	5.247
5	Jambi	105	1.323	188	3.054
6	Sumatera Selatan	163	3.190	423	7.280
7	Bengkulu	4	742	36	1.779
8	Lampung	42	3.197	218	7.191
9	Kepulauan Bangka Belitung	24	483	79	1.153
10	Kepulauan Riau	49	581	87	1.317
11	DKI Jakarta	1.108	3.568	2.919	7.745
12	Jawa Barat	1.033	17.578	2.627	39.330
13	Jawa Tengah	537	13.726	1.559	31.579
14	DI Yogyakarta	228	1.439	555	3.289
15	Jawa Timur	1.233	15.991	2.963	36.578
16	Banten	496	4.259	1.147	9.669
17	Bali	21	316	41	725
18	Nusa Tenggara Barat	30	2.037	76	4.951
19	Nusa Tenggara Timur	5	288	2	694
20	Kalimantan Barat	21	1.136	40	2.578
21	Kalimantan Tengah	106	733	191	1.703
22	Kalimantan Selatan	321	1.732	607	3.954
23	Kalimantan Timur	440	1.179	956	2.684
24	Kalimantan Utara	-	188	7	465
25	Sulawesi Utara	2	324	1	761
26	Sulawesi Tengah	20	894	39	2.096
27	Sulawesi Selatan	549	3.320	1.241	7.901
28	Sulawesi Tenggara	55	917	175	2.153
29	Gorontalo	2	446	7	1.014
30	Sulawesi Barat	7	657	7	1.567
31	Maluku	2	491	11	1.134
32	Maluku Utara	6	488	10	1.178
33	Papua	25	483	40	1.029
34	Papua Barat	4	326	5	755
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Indonesia		**6.894**	**92.147**	**17.011**	**209.880**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024
Keterangan: PIHK = Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.b

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	1.748	2.706	4.454
2	Sumatera Utara	3.175	4.909	8.084
3	Sumatera Barat	1.909	2.880	4.789
4	Riau	2.383	2.864	5.247
5	Jambi	1.362	1.692	3.054
6	Sumatera Selatan	3250	4.030	7.280
7	Bengkulu	776	1.003	1.779
8	Lampung	3.394	3.797	7.191
9	Kepulauan Bangka Belitung	534	619	1.153
10	Kepulauan Riau	590	727	1.317
11	DKI Jakarta	3.356	4.389	7.745
12	Jawa Barat	18.082	21.248	39.330
13	Jawa Tengah	14.721	16.858	31.579
14	DI Yogyakarta	1.580	1.709	3.289
15	Jawa Timur	17.190	19.388	36.578
16	Banten	4.358	5.311	9.669
17	Bali	351	374	725
18	Nusa Tenggara Barat	2.413	2.538	4.951
19	Nusa Tenggara Timur	315	379	694
20	Kalimantan Barat	1.223	1.355	2.578
21	Kalimantan Tengah	772	931	1.703
22	Kalimantan Selatan	1.768	2.186	3.954
23	Kalimantan Timur	1.147	1.537	2.684
24	Kalimantan Utara	174	291	465
25	Sulawesi Utara	290	471	761
26	Sulawesi Tengah	774	1.322	2.096
27	Sulawesi Selatan	2.711	5.190	7.901
28	Sulawesi Tenggara	798	1.355	2.153
29	Gorontalo	369	645	1.014
30	Sulawesi Barat	514	1.053	1.567
31	Maluku	459	675	1.134
32	Maluku Utara	521	657	1.178
33	Papua	436	593	1.029
34	Papua Barat	300	455	755
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		**93.743**	**116.137**	**209.880**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.c

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Jemaah Haji					
		< 40 tahun	40 - 49 tahun	50 - 59 tahun	60 - 69 tahun	> 69 tahun	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	299	702	1.192	1.390	871	694
2	Sumatera Utara	406	1.188	2.441	2.725	1.324	2.096
3	Sumatera Barat	225	553	1.282	1.808	921	1.029
4	Riau	294	949	1.828	1.512	664	4.951
5	Jambi	164	503	870	1.026	491	1.134
6	Sumatera Selatan	494	1.160	2.006	2.344	1.276	7.901
7	Bengkulu	80	175	408	731	385	2.684
8	Lampung	385	1.088	2.133	2.203	1.382	2.153
9	Kepulauan Bangka Belitung	72	195	312	381	193	3.054
10	Kepulauan Riau	87	267	478	333	152	1.014
11	DKI Jakarta	524	1.551	2.280	2.348	1.042	5.247
12	Jawa Barat	3.206	7.710	11.972	10.744	5.698	8.084
13	Jawa Tengah	1.765	4.963	9.094	10.157	5.600	7.280
14	DI Yogyakarta	145	456	946	1.130	612	1.178
15	Jawa Timur	2.913	6.734	11.427	10.531	4.973	4.789
16	Banten	858	2.028	2.943	2.412	1.428	761
17	Bali	56	189	263	143	74	1.153
18	Nusa Tenggara Barat	229	915	1.453	1.373	981	755
19	Nusa Tenggara Timur	86	155	177	161	116	1.779
20	Kalimantan Barat	130	461	818	777	392	7.191
21	Kalimantan Tengah	210	479	535	335	144	7.745
22	Kalimantan Selatan	493	962	1.342	816	341	465
23	Kalimantan Timur	231	602	960	625	266	2.578
24	Kalimantan Utara	40	125	147	93	60	4.454
25	Sulawesi Utara	64	150	228	192	127	3.289
26	Sulawesi Tengah	211	466	576	497	346	1.703
27	Sulawesi Selatan	672	1.906	2.454	1.800	1.069	1.567
28	Sulawesi Tenggara	200	461	566	535	391	1.317
29	Gorontalo	76	201	277	301	159	39.330
30	Sulawesi Barat	129	401	461	330	246	31.579
31	Maluku	93	229	233	331	248	36.578
32	Maluku Utara	82	211	247	363	275	3.954
33	Papua	141	329	300	154	105	725
34	Papua Barat	116	204	215	108	112	9.669
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**15.176**	**38.668**	**62.864**	**60.709**	**32.463**	**209.880**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024

Keterangan: - Kelompok umur dibuat berdasarkan masukan dari surveilans, ada hubungannya dengan permintaan dari pemerintah Arab Saudi untuk kelompok umur tertentu

- Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.d

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	Lain-Lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	1.155	466	1.020	429	1.165	183	14	22	4.454
2	Sumatera Utara	2.004	949	2.880	175	1.796	249	13	18	8.084
3	Sumatera Barat	929	498	1.301	439	1.314	234	24	50	4.789
4	Riau	1.889	608	1.247	279	1.065	141	5	13	5.247
5	Jambi	1.236	370	693	184	501	62	5	3	3.054
6	Sumatera Selatan	2.634	817	1.577	481	1.468	255	10	38	7.280
7	Bengkulu	692	159	421	36	366	83	3	19	1.779
8	Lampung	2.734	803	1.553	418	1.412	186	17	68	7.191
9	Kepulauan Bangka Belitung	473	139	300	73	144	21	1	2	1.153
10	Kepulauan Riau	285	111	510	27	329	52	1	2	1.317
11	DKI Jakarta	1.319	858	2.413	548	2.152	431	20	4	7.745
12	Jawa Barat	13.263	4.170	9.290	2.614	8.412	1.443	117	21	39.330
13	Jawa Tengah	10.035	3.535	6.821	2.431	7.708	883	27	139	31.579
14	DI Yogyakarta	358	227	926	368	1.170	213	22	5	3.289
15	Jawa Timur	12.535	4.444	8.263	1.439	8.461	1.105	65	266	36.578
16	Banten	3.393	1.024	2.242	510	1.885	346	16	253	9.669
17	Bali	171	89	236	37	172	16	1	3	725
18	Nusa Tenggara Barat	2.322	490	856	198	809	83	5	188	4.951
19	Nusa Tenggara Timur	268	105	211	17	78	13	1	0	694
20	Kalimantan Barat	844	269	647	182	459	97	6	74	2.578
21	Kalimantan Tengah	588	276	440	74	274	24	2	25	1.703
22	Kalimantan Selatan	1.324	533	1.020	249	721	59	2	46	3.954
23	Kalimantan Timur	803	328	782	145	537	69	6	14	2.684
24	Kalimantan Utara	189	71	87	17	87	11	0	3	465
25	Sulawesi Utara	168	132	255	32	149	23	2	0	761
26	Sulawesi Tengah	706	351	541	16	407	65	4	6	2.096
27	Sulawesi Selatan	3.198	1.009	1.637	350	1.415	196	10	86	7.901
28	Sulawesi Tenggara	755	294	513	123	378	87	3	0	2.153
29	Gorontalo	179	95	285	52	315	69	9	10	1.014
30	Sulawesi Barat	650	222	405	15	235	35	1	4	1.567
31	Maluku	498	143	257	44	165	20	3	4	1.134
32	Maluku Utara	463	187	257	46	190	32	1	2	1.178
33	Papua	285	160	406	11	145	19	1	2	1.029
34	Papua Barat	278	111	222	17	115	10	0	2	755
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**68.623**	**24.043**	**50.514**	**12.076**	**45.999**	**6.815**	**417**	**1.393**	**209.880**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.e

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PEKERJAAN DAN PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Pedagang	Ibu Rumah Tangga	Pegawai BUMN/ BUMD	Pegawai Swasta	Pelajar/ Mahasiswa	Pensiunan/Lain-Lain	PNS	Petani	TNI/POLRI	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	252	1.255	74	469	126	216	1.439	594	29	4.454
2	Sumatera Utara	690	2.422	243	1.395	118	386	1.580	1.167	83	8.084
3	Sumatera Barat	481	1.319	78	428	76	354	1.615	383	55	4.789
4	Riau	147	1.797	78	659	96	360	1.107	967	36	5.247
5	Jambi	133	956	36	367	50	98	631	762	21	3.054
6	Sumatera Selatan	611	2.077	221	718	117	492	1.460	1.523	61	7.280
7	Bengkulu	132	403	11	136	24	120	493	452	8	1.779
8	Lampung	494	1.668	82	1.187	93	283	1.419	1.917	48	7.191
9	Kepulauan Bangka Belitung	45	423	17	212	23	58	194	168	13	1.153
10	Kepulauan Riau	43	425	23	332	26	88	316	50	14	1.317
11	DKI Jakarta	702	2.725	241	2.293	128	470	1.013	37	136	7.745
12	Jawa Barat	4.088	13.840	685	8.341	868	1.824	6.303	2.999	382	39.330
13	Jawa Tengah	3.944	4.831	345	7.204	454	1.600	7.340	5.517	344	31.579
14	DI Yogyakarta	294	521	44	675	44	354	1.132	177	48	3.289
15	Jawa Timur	2.734	6.828	452	10.468	985	1.035	6.752	6.967	357	36.578
16	Banten	691	3.663	206	2.423	290	341	1.439	550	66	9.669
17	Bali	114	163	9	281	18	18	87	25	10	725
18	Nusa Tenggara Barat	406	953	22	457	44	617	825	1.608	19	4.951
19	Nusa Tenggara Timur	133	249	4	122	11	23	75	70	7	694
20	Kalimantan Barat	144	747	36	252	27	296	654	382	40	2.578
21	Kalimantan Tengah	173	452	7	183	29	386	332	121	20	1.703
22	Kalimantan Selatan	395	992	38	823	178	85	880	533	30	3.954
23	Kalimantan Timur	193	1.003	49	554	71	76	549	170	19	2.684
24	Kalimantan Utara	22	212	2	98	9	6	82	33	1	465
25	Sulawesi Utara	48	261	12	165	15	46	160	37	17	761
26	Sulawesi Tengah	173	780	15	234	62	90	446	288	8	2.096
27	Sulawesi Selatan	414	3.508	55	1.131	179	219	1.385	932	78	7.901
28	Sulawesi Tenggara	48	806	17	343	34	120	482	290	13	2.153
29	Gorontalo	70	230	7	60	14	159	404	53	17	1.014
30	Sulawesi Barat	50	712	6	249	25	49	271	197	8	1.567
31	Maluku	74	402	10	127	13	112	178	209	9	1.134
32	Maluku Utara	22	373	9	184	13	56	223	286	12	1.178
33	Papua	116	380	6	263	20	37	143	44	20	1.029
34	Papua Barat	112	280	11	168	20	14	78	57	15	755
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**18.188**	**57.656**	**3.151**	**43.001**	**4.300**	**10.488**	**41.487**	**29.565**	**2.044**	**209.880**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.f

JUMLAH DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI REGULER
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN
TAHUN 2022-2023

No	Provinsi	2022			2023		
		Jumlah Jemaah Haji	Jumlah Jemaah Haji Yang Diperiksa	%	Jumlah Jemaah Haji	Jumlah Jemaah Haji Yang Diperiksa	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1.988	1.931	97,1	4.454	4.360	97,9
2	Sumatera Utara	3.747	3.746	100,0	1.153	1.129	97,9
3	Sumatera Barat	2.109	2.099	99,5	725	714	98,5
4	Riau	2.271	2.271	100,0	9.669	9.479	98,0
5	Jambi	1.323	1.297	98,0	1.779	1.753	98,5
6	Sumatera Selatan	3.190	3.164	99,2	3.289	3.243	98,6
7	Bengkulu	742	734	98,9	7.745	7.597	98,1
8	Lampung	3.197	3.172	99,2	1.014	1.003	98,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	483	483	100,0	39.330	38.628	98,2
10	Kepulauan Riau	581	581	100,0	3.054	3.021	98,9
11	DKI Jakarta	3.568	3.564	99,9	31.579	31.147	98,6
12	Jawa Barat	17.578	17.571	100,0	36.578	35.838	98,0
13	Jawa Tengah	13.726	13.724	100,0	2.578	2.547	98,8
14	DI Yogyakarta	1.439	1.439	100,0	3.954	3.881	98,2
15	Jawa Timur	15.991	15.975	99,9	465	461	99,1
16	Banten	4.259	4.256	99,9	1.703	1.677	98,5
17	Bali	316	316	100,0	2.684	2.649	98,7
18	Nusa Tenggara Barat	2.037	2.035	99,9	1.317	1.292	98,1
19	Nusa Tenggara Timur	288	288	100,0	7.191	7.076	98,4
20	Kalimantan Barat	1.136	1.136	100,0	1.134	1.112	98,1
21	Kalimantan Tengah	733	732	99,9	1.178	1.149	97,5
22	Kalimantan Selatan	1.732	1.732	100,0	4.951	4.902	99,0
23	Kalimantan Timur	1.179	1.167	99,0	694	677	97,6
24	Kalimantan Utara	188	188	100,0	1.029	1.018	98,9
25	Sulawesi Utara	324	324	100,0	755	749	99,2
26	Sulawesi Tengah	894	882	98,7	5.247	5.194	99,0
27	Sulawesi Selatan	3.320	3.311	99,7	1.567	1.547	98,7
28	Sulawesi Tenggara	917	917	100,0	7.901	7.827	99,1
29	Gorontalo	446	446	100,0	2.096	2.056	98,1
30	Sulawesi Barat	657	656	99,8	2.153	2.137	99,3
31	Maluku	491	488	99,4	761	747	98,2
32	Maluku Utara	488	488	100,0	4.789	4.728	98,7
33	Papua	483	475	98,3	7.280	7.092	97,4
34	Papua Barat	326	324	99,4	8.084	7.955	98,4
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**92.147**	**91.912**	**98,3**	**209.880**	**206.385**	**98,3**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.g

HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Hasil Pengukuran Kebugaran Jemaah Haji				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Kurang sekali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	38	345	466	136	72
2	Sumatera Utara	0	37	154	27	1
3	Sumatera Barat	5	93	159	30	12
4	Riau	78	310	551	146	40
5	Jambi	23	95	60	17	1
6	Sumatera Selatan	17	157	545	216	23
7	Bengkulu	20	62	122	14	2
8	Lampung	59	289	406	129	13
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	74	61	7	6
10	Kepulauan Riau	0	29	36	12	5
11	DKI Jakarta	16	100	396	203	177
12	Jawa Barat	187	2.471	4.195	917	165
13	Jawa Tengah	168	1.243	2.195	481	197
14	DI Yogyakarta	15	96	208	36	10
15	Jawa Timur	181	2.350	3.895	682	175
16	Banten	28	348	724	115	19
17	Bali	0	1	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	2	78	75	30	2
19	Nusa Tenggara Timur	0	10	23	8	7
20	Kalimantan Barat	25	93	102	21	1
21	Kalimantan Tengah	0	189	130	25	3
22	Kalimantan Selatan	1	50	95	66	37
23	Kalimantan Timur	14	14	89	27	6
24	Kalimantan Utara	0	2	16	5	8
25	Sulawesi Utara	25	25	11	1	0
26	Sulawesi Tengah	3	49	56	1	0
27	Sulawesi Selatan	18	155	180	64	26
28	Sulawesi Tenggara	3	37	95	31	15
29	Gorontalo	17	31	40	47	43
30	Sulawesi Barat	18	210	67	0	2
31	Maluku	0	1	1	1	1
32	Maluku Utara	9	8	46	0	0
33	Papua	0	7	5	3	0
34	Papua Barat	0	0	10	13	1
35	Papua Selatan	-	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
Indonesia		**978**	**9.059**	**15.214**	**3.511**	**1.070**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.h

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI (RISTI) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Non Risti	Risti	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	1.057	3.397	4.454
2	Sumatera Utara	2.226	5.858	8.084
3	Sumatera Barat	826	3.963	4.789
4	Riau	1.056	4.191	5.247
5	Jambi	948	2.106	3.054
6	Sumatera Selatan	1.685	5.595	7.280
7	Bengkulu	425	1.354	1.779
8	Lampung	1.451	5.740	7.191
9	Kepulauan Bangka Belitung	338	815	1.153
10	Kepulauan Riau	425	892	1.317
11	DKI Jakarta	1.567	6.178	7.745
12	Jawa Barat	11.080	28.250	39.330
13	Jawa Tengah	7.053	24.526	31.579
14	DI Yogyakarta	666	2.623	3.289
15	Jawa Timur	11.360	25.218	36.578
16	Banten	2.642	7.027	9.669
17	Bali	278	447	725
18	Nusa Tenggara Barat	1.459	3.492	4.951
19	Nusa Tenggara Timur	194	500	694
20	Kalimantan Barat	689	1.889	2.578
21	Kalimantan Tengah	522	1.181	1.703
22	Kalimantan Selatan	1.186	2.768	3.954
23	Kalimantan Timur	783	1.901	2.684
24	Kalimantan Utara	150	315	465
25	Sulawesi Utara	258	503	761
26	Sulawesi Tengah	679	1.417	2.096
27	Sulawesi Selatan	2.109	5.792	7.901
28	Sulawesi Tenggara	533	1.620	2.153
29	Gorontalo	162	852	1.014
30	Sulawesi Barat	382	1.185	1.567
31	Maluku	221	913	1.134
32	Maluku Utara	231	947	1.178
33	Papua	325	704	1.029
34	Papua Barat	222	533	755
35	Papua Selatan	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-
Indonesia		**55.188**	**154.692**	**209.880**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

Lampiran 89.i

JUMLAH RAWAT JALAN DAN RATIO JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER BERDASARKAN EMBARKASI TAHUN 2023

No	Embarkasi	Jumlah Kloter	Jumlah Jemaah Berangkat	Jumlah Rawat Jalan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh (BTJ)	18	5.619	7.616
2	Balikpapan (BPN)	21	5.978	11.684
3	Banjarmasin (BDJ)	34	12.193	13.764
4	Batam (BTH)	12	4.502	30.314
5	Jakarta Bekasi (JKS)	65	24.560	55.607
6	Jakarta Pondok Gede (JKG)	74	30.512	46.306
7	Kertajati (KJT)	25	9.144	17.836
8	Mataram Lombok (LOP)	24	8.045	10.350
9	Medan (KNO)	13	4.936	12.326
10	Padang (PDG)	17	6.523	10.784
11	Palembang (PLM)	24	8.387	18.669
12	Semarang Solo (SOC)	99	34.782	78.640
13	Surabaya (SUB)	88	37.925	76.673
14	Ujung Pandang (UPG)	44	16.676	38.184
Indonesia		**558**	**209.782**	**428.753**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024

Lampiran 89.j

JUMLAH DAN PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2023

No	Provinsi	Jumlah Jemaah	Jumlah Jemaah Wafat	Persentase Jemaah Wafat (%)	Permil Jemaah Wafat (‰)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	4.454	13	0,29	2,92
2	Sumatera Utara	8.084	37	0,46	4,58
3	Sumatera Barat	4.789	22	0,46	4,59
4	Riau	5.247	21	0,40	4,00
5	Jambi	3.054	13	0,43	4,26
6	Sumatera Selatan	7.280	30	0,41	4,12
7	Bengkulu	1.779	14	0,79	7,87
8	Lampung	7.191	27	0,38	3,75
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.153	5	0,43	4,34
10	Kepulauan Riau	1.317	1	0,08	0,76
11	DKI Jakarta	7.745	15	0,19	1,94
12	Jawa Barat	39.330	116	0,29	2,95
13	Jawa Tengah	31.579	111	0,35	3,51
14	DI Yogyakarta	3.289	11	0,33	3,34
15	Jawa Timur	36.578	169	0,46	4,62
16	Banten	9.669	28	0,29	2,90
17	Bali	725	1	0,14	1,38
18	Nusa Tenggara Barat	4.951	30	0,61	6,06
19	Nusa Tenggara Timur	694	4	0,58	5,76
20	Kalimantan Barat	2.578	12	0,47	4,65
21	Kalimantan Tengah	1.703	6	0,35	3,52
22	Kalimantan Selatan	3.954	15	0,38	3,79
23	Kalimantan Timur	2.684	8	0,30	2,98
24	Kalimantan Utara	465	2	0,43	4,30
25	Sulawesi Utara	761	6	0,79	7,88
26	Sulawesi Tengah	2.096	7	0,33	3,34
27	Sulawesi Selatan	7.901	19	0,24	2,40
28	Sulawesi Tenggara	2.153	5	0,23	2,32
29	Gorontalo	1.014	4	0,39	3,94
30	Sulawesi Barat	1.567	6	0,38	3,83
31	Maluku	1.134	4	0,35	3,53
32	Maluku Utara	1.178	8	0,68	6,79
33	Papua	1.029	2	0,19	1,94
34	Papua Barat	755	2	0,26	2,65
35	Papua Selatan	-	-	-	-
36	Papua Tengah	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-
Indonesia		**209.880**	**774**	**0,37**	**3,69**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, 2024

Keterangan: Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya masih tergabung dengan provinsi induknya sebelum pemekaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2024